

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Banten Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk perungkapan yang memadai.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan audited yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.	Pendapatan	Rp	9.749.656.227.905,00	
b.	Belanja	Rp	7.845.125.554.085,00	
c.	Transfer	Rp	2.165.814.792.206,00	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp	<u>(261.284.118.385,00)</u>	
d.	Pembiayaan, terdiri dari;			
	1. Penerimaan	Rp	444.485.541.411,00	
	2. Pengeluaran	Rp	138.497.733.036,00	(-)
	3. Pembiayaan Neto	Rp	<u>305.987.808.375,00</u>	(+)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	44.703.689.990,00	

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp717.894.259.830,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 10.467.550.487.735,00
 2. Realisasi Rp 9.749.656.227.905,00 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pendapatan Rp 717.894.259.830,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp 513.887.744.156,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 8.359.013.298.241,00
 2. Realisasi Rp 7.845.125.554.085,00 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi belanja Rp 513.887.744.156,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp248.709.938.700,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran transfer setelah perubahan Rp 2.414.524.730.906,00
 2. Realisasi Rp 2.165.814.792.206,00 (-)
 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi transfer Rp 248.709.938.700,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(44.703.423.027,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran defisit setelah perubahan Rp (305.987.541.412,00)

- | | | | | |
|----|---|----|-----------------------------|-----|
| 2. | Realisasi deficit | Rp | <u>(261.284.118.385,00)</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi surplus/defisit | Rp | (44.703.423.027,00) | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|---|----|---------------------------|-----|
| 1. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 444.485.541.412,00 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>444.485.541.411,00</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 1,00 | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp266.964,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|--|----|---------------------------|-----|
| 1. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 138.498.000.000,00 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>138.497.733.036,00</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp | 266.964,00 | |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp (266.963,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|--|----|---------------------------|-----|
| 1. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 305.987.541.412,00 | |
| 2. | Realisasi | Rp | <u>305.987.808.375,00</u> | (-) |
| 3. | Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pembiayaan netto | Rp | (266.963,00) | |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, per 31 Desember Tahun 2025 yaitu:

- | | | | |
|----|------------------|----|-----------------------|
| a. | Jumlah aset | Rp | 21.243.782.203.969,00 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp | 746.076.822.332,00 |
| c. | Jumlah ekuitas | Rp | 20.497.705.381.637,00 |

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|------------------------|
| a. | Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya | Rp | 444.532.811.411,00 |
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 771.712.800.969,00 |
| c. | Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (1.032.996.919.354,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas Pendanaan | Rp | (138.497.733.036,00) |

e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(5.904.119.251,00) (+)
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	38.846.840.739,00
g. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember Tahun 2025	Rp	<u>0,00 (+)</u>
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp	38.846.840.739,00

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	10.516.289.464.924,00	
b. Beban	Rp	<u>9.584.560.203.090,00</u>	(-)
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp	931.729.261.835,00	
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional			
- Surplus non operasional	Rp	278.455.000,00	
- Defisit non operasional	Rp	<u>54.062.605.219,00</u>	(-)
- Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(53.784.150.219,00)	
d. Pos luar biasa	Rp	<u>0,00</u>	(+)
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	877.945.111.615,00	

Pasal 8

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	444.485.541.411,00	
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>444.485.541.411,00</u>	(-)
Sub Total		0,00	
c. SiLPA/SiKPA	Rp	44.703.689.990,00	
d. Koreksi kesalahan pembukuan	Rp	0,00	
e. Lain-lain	Rp	<u>0,00</u>	(+)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	44.703.689.990,00	

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	19.647.022.442.809,00	
b. Surplus/Defisit LO	Rp	877.945.111.615,00	
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	(27.262.172.787,00)	(+)
d. Ekuitas akhir	Rp	20.497.705.381.637,00	

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

PROVINSI BANTEN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	283.073.726.614,00	321.683.748.080,44	38.610.021.466,44	113,64
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.276.721.814,00	1.686.041.654,00	409.319.840,00	132,06
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.276.721.814,00	1.686.041.654,00	409.319.840,00	132,06
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	277.500.000.000,00	313.363.522.756,44	35.863.522.756,44	112,92
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	277.500.000.000,00	313.363.522.756,44	35.863.522.756,44	112,92
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.290.464.800,00	6.620.503.670,00	2.330.038.870,00	154,31
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.290.464.800,00	6.620.503.670,00	2.330.038.870,00	154,31
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.525.840.000,00	2.566.708.352,00	40.868.352,00	101,62
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.190.420.000,00	2.254.566.852,00	64.146.852,00	102,93
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.190.420.000,00	2.254.566.852,00	64.146.852,00	102,93
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	335.420.000,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	335.420.000,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.671.221.500,00	3.215.832.432,00	544.610.932,00	120,39
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.386.558.000,00	1.338.819.932,00	(47.738.068,00)	96,56
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.386.558.000,00	1.338.819.932,00	(47.738.068,00)	96,56

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.240.163.500,00	1.811.767.500,00	571.604.000,00	146,09
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	1.240.163.500,00	1.811.767.500,00	571.604.000,00	146,09
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	44.500.000,00	65.245.000,00	20.745.000,00	146,62
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44.500.000,00	65.245.000,00	20.745.000,00	146,62
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.179.279.699.621,00	9.422.189.939.040,96	(757.089.760.580,04)	92,56
5.02	KEUANGAN	10.179.043.999.621,00	9.421.964.114.040,96	(757.079.885.580,04)	92,56
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.526.424.482.000,00	3.406.827.664.671,00	(119.596.817.329,00)	96,61
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.652.619.517.621,00	6.015.136.449.369,96	(637.483.068.251,04)	90,42
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	205.900.000,00	189.825.000,00	(16.075.000,00)	92,19
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	205.900.000,00	189.825.000,00	(16.075.000,00)	92,19
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	29.800.000,00	36.000.000,00	6.200.000,00	120,81
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	29.800.000,00	36.000.000,00	6.200.000,00	120,81
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	10.467.550.487.735,00	9.749.656.227.905,40	(717.894.259.829,60)	93,14
5	BELANJA DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.822.608.953.278,00	5.527.455.044.706,38	(295.153.908.571,62)	94,93
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.156.060.369.670,00	2.951.318.579.247,88	(204.741.790.422,12)	93,51
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.156.060.369.670,00	2.951.318.579.247,88	(204.741.790.422,12)	93,51
	BELANJA OPERASI	2.569.259.524.915,00	2.456.396.884.652,64	(112.862.640.262,36)	95,61
	Belanja Pegawai	1.225.788.856.674,00	1.234.868.519.836,00	9.079.663.162,00	100,74
	Belanja Barang dan Jasa	946.362.365.421,00	826.953.629.554,64	(119.408.735.866,36)	87,38
	Belanja Hibah	397.108.302.820,00	394.574.735.262,00	(2.533.567.558,00)	99,36
	BELANJA MODAL	586.800.844.755,00	494.921.694.595,24	(91.879.150.159,76)	84,34
	Belanja Modal Tanah	122.996.463.200,00	61.519.366.328,00	(61.477.096.872,00)	50,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.783.570.613,00	218.013.727.901,24	(5.769.842.711,76)	97,42
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.851.765.802,00	167.837.476.232,00	(25.014.289.570,00)	87,03
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.156.233.140,00	47.551.124.134,00	394.890.994,00	100,84
	Belanja Modal Aset Lainnya	12.812.000,00	0,00	(12.812.000,00)	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.071.638.341.515,00	1.063.396.486.337,78	(8.241.855.177,22)	99,23
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.071.638.341.515,00	1.063.396.486.337,78	(8.241.855.177,22)	99,23
	BELANJA OPERASI	1.000.676.338.738,00	993.306.228.274,78	(7.370.110.463,22)	99,26
	Belanja Pegawai	191.604.459.070,00	188.170.098.607,00	(3.434.360.463,00)	98,21
	Belanja Barang dan Jasa	802.771.879.668,00	798.905.369.485,78	(3.866.510.182,22)	99,52

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Hibah	6.300.000.000,00	6.230.760.182,00	(69.239.818,00)	98,90
	BELANJA MODAL	70.962.002.777,00	70.090.258.063,00	(871.744.714,00)	98,77
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.849.046.569,00	55.301.856.197,00	(547.190.372,00)	99,02
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.902.721.900,00	4.691.752.017,00	(210.969.883,00)	95,70
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.660.720.308,00	6.659.858.349,00	(861.959,00)	99,99
	Belanja Modal Aset Lainnya	3.549.514.000,00	3.436.791.500,00	(112.722.500,00)	96,82
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943,00	877.785.453.408,00	(62.772.898.535,00)	93,33
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943,00	877.785.453.408,00	(62.772.898.535,00)	93,33
	BELANJA OPERASI	563.249.280.950,68	526.919.146.356,00	(36.330.134.594,68)	93,55
	Belanja Pegawai	51.500.000.000,00	50.519.285.795,00	(980.714.205,00)	98,10
	Belanja Barang dan Jasa	470.260.460.450,68	438.467.328.657,00	(31.793.131.793,68)	93,24
	Belanja Hibah	41.488.820.500,00	37.932.531.904,00	(3.556.288.596,00)	91,43
	BELANJA MODAL	377.309.070.992,32	350.866.307.052,00	(26.442.763.940,32)	92,99
	Belanja Modal Tanah	63.617.423.104,32	56.219.962.731,00	(7.397.460.373,32)	88,37
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.532.222.230,00	5.349.424.979,00	(182.797.251,00)	96,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.773.271.318,00	17.011.856.287,00	(761.415.031,00)	95,72
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.386.154.340,00	272.285.063.055,00	(18.101.091.285,00)	93,77
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386,00	509.110.021.285,00	(11.134.483.101,00)	97,86
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386,00	509.110.021.285,00	(11.134.483.101,00)	97,86
	BELANJA OPERASI	514.041.908.386,00	503.272.717.514,00	(10.769.190.872,00)	97,90
	Belanja Pegawai	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	(490.609.142,00)	96,99
	Belanja Barang dan Jasa	497.744.308.386,00	487.465.726.656,00	(10.278.581.730,00)	97,93
	BELANJA MODAL	6.202.596.000,00	5.837.303.771,00	(365.292.229,00)	94,11
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.062.596.000,00	1.829.093.771,00	(233.502.229,00)	88,68
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.140.000.000,00	4.008.210.000,00	(131.790.000,00)	96,82
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	61.967.440.202,00	56.515.288.318,00	(5.452.151.884,00)	91,20
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.762.908.280,00	33.884.428.447,00	(2.878.479.833,00)	92,17
	BELANJA OPERASI	36.480.093.280,00	33.674.686.177,00	(2.805.407.103,00)	92,31
	Belanja Pegawai	22.730.200.000,00	22.157.251.649,00	(572.948.351,00)	97,48
	Belanja Barang dan Jasa	13.749.893.280,00	11.517.434.528,00	(2.232.458.752,00)	83,76
	BELANJA MODAL	282.815.000,00	209.742.270,00	(73.072.730,00)	74,16

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.815.000,00	209.742.270,00	(73.072.730,00)	74,16
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.204.531.922,00	22.630.859.871,00	(2.573.672.051,00)	89,79
	BELANJA OPERASI	24.807.998.922,00	22.270.764.771,00	(2.537.234.151,00)	89,77
	Belanja Pegawai	13.674.600.000,00	12.739.658.805,00	(934.941.195,00)	93,16
	Belanja Barang dan Jasa	11.133.398.922,00	9.531.105.966,00	(1.602.292.956,00)	85,61
	BELANJA MODAL	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.139.945.562,00	69.329.216.109,72	(2.810.729.452,28)	96,10
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	72.139.945.562,00	69.329.216.109,72	(2.810.729.452,28)	96,10
	BELANJA OPERASI	71.206.616.562,00	68.412.592.346,72	(2.794.024.215,28)	96,08
	Belanja Pegawai	19.110.000.000,00	18.015.828.612,00	(1.094.171.388,00)	94,27
	Belanja Barang dan Jasa	27.226.116.562,00	25.529.763.884,72	(1.696.352.677,28)	93,77
	Belanja Bantuan Sosial	24.870.500.000,00	24.866.999.850,00	(3.500.150,00)	99,99
	BELANJA MODAL	933.329.000,00	916.623.763,00	(16.705.237,00)	98,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841.295.000,00	825.230.763,00	(16.064.237,00)	98,09
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.034.000,00	91.393.000,00	(641.000,00)	99,30
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	529.481.090.069,00	489.594.537.736,73	(39.886.552.332,27)	92,47
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	82.196.919.551,00	77.167.438.691,00	(5.029.480.860,00)	93,88
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	82.196.919.551,00	77.167.438.691,00	(5.029.480.860,00)	93,88
	BELANJA OPERASI	73.504.705.012,00	69.386.493.190,00	(4.118.211.822,00)	94,40
	Belanja Pegawai	44.128.400.000,00	43.289.772.810,00	(838.627.190,00)	98,10
	Belanja Barang dan Jasa	29.376.305.012,00	26.096.720.380,00	(3.279.584.632,00)	88,84
	BELANJA MODAL	8.692.214.539,00	7.780.945.501,00	(911.269.038,00)	89,52
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.708.624.670,00	5.442.081.579,00	(266.543.091,00)	95,33
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.983.589.869,00	2.338.863.922,00	(644.725.947,00)	78,39
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.199.815.769,00	29.251.310.950,00	(3.948.504.819,00)	88,11
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	33.199.815.769,00	29.251.310.950,00	(3.948.504.819,00)	88,11
	BELANJA OPERASI	32.944.421.769,00	29.081.261.799,00	(3.863.159.970,00)	88,27
	Belanja Pegawai	19.444.400.000,00	16.760.449.697,00	(2.683.950.303,00)	86,20
	Belanja Barang dan Jasa	13.250.021.769,00	12.070.812.102,00	(1.179.209.667,00)	91,10
	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	255.394.000,00	170.049.151,00	(85.344.849,00)	66,58

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.935.000,00	170.049.151,00	(885.849,00)	99,48
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.459.000,00	0,00	(84.459.000,00)	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.778.421.750,00	24.567.741.872,00	(2.210.679.878,00)	91,74
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	26.778.421.750,00	24.567.741.872,00	(2.210.679.878,00)	91,74
	BELANJA OPERASI	26.538.601.750,00	24.335.841.872,00	(2.202.759.878,00)	91,70
	Belanja Pegawai	16.431.300.000,00	14.916.404.351,00	(1.514.895.649,00)	90,78
	Belanja Barang dan Jasa	10.107.301.750,00	9.419.437.521,00	(687.864.229,00)	93,19
	BELANJA MODAL	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000,00	384.692.297,00	(84.007.703,00)	82,08
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	468.700.000,00	384.692.297,00	(84.007.703,00)	82,08
	BELANJA OPERASI	468.700.000,00	384.692.297,00	(84.007.703,00)	82,08
	Belanja Barang dan Jasa	468.700.000,00	384.692.297,00	(84.007.703,00)	82,08
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.765.052.805,00	61.578.114.175,00	(1.186.938.630,00)	98,11
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	62.765.052.805,00	61.578.114.175,00	(1.186.938.630,00)	98,11
	BELANJA OPERASI	60.432.585.907,00	59.258.896.915,00	(1.173.688.992,00)	98,06
	Belanja Pegawai	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	(757.673.556,00)	97,90
	Belanja Barang dan Jasa	24.376.385.907,00	23.960.370.471,00	(416.015.436,00)	98,29
	BELANJA MODAL	2.332.466.898,00	2.319.217.260,00	(13.249.638,00)	99,43
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.644.200,00	839.222.631,00	(4.421.569,00)	99,48
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.391.163.899,00	1.383.825.136,00	(7.338.763,00)	99,47
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.658.799,00	96.169.493,00	(1.489.306,00)	98,47
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	971.269.000,00	853.863.279,00	(117.405.721,00)	87,91
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	971.269.000,00	853.863.279,00	(117.405.721,00)	87,91
	BELANJA OPERASI	971.269.000,00	853.863.279,00	(117.405.721,00)	87,91
	Belanja Barang dan Jasa	971.269.000,00	853.863.279,00	(117.405.721,00)	87,91
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690,00	23.321.581.763,50	(4.439.138.926,50)	84,01
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690,00	23.321.581.763,50	(4.439.138.926,50)	84,01
	BELANJA OPERASI	25.614.788.690,00	21.283.575.048,00	(4.331.213.642,00)	83,09
	Belanja Pegawai	11.808.100.000,00	11.357.850.874,00	(450.249.126,00)	96,19
	Belanja Barang dan Jasa	13.806.688.690,00	9.925.724.174,00	(3.880.964.516,00)	71,89
	BELANJA MODAL	2.145.932.000,00	2.038.006.715,50	(107.925.284,50)	94,97

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.647.323.000,00	1.638.460.350,00	(8.862.650,00)	99,46
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	498.609.000,00	399.546.365,50	(99.062.634,50)	80,13
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	(86.645.318,00)	97,75
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	(86.645.318,00)	97,75
	BELANJA OPERASI	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	(86.645.318,00)	97,75
	Belanja Barang dan Jasa	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	(86.645.318,00)	97,75
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	85.218.919.822,00	77.190.639.579,23	(8.028.280.242,77)	90,58
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	85.218.919.822,00	77.190.639.579,23	(8.028.280.242,77)	90,58
	BELANJA OPERASI	59.981.719.522,00	52.819.377.632,23	(7.162.341.889,77)	88,06
	Belanja Pegawai	26.796.390.000,00	22.964.011.060,00	(3.832.378.940,00)	85,70
	Belanja Barang dan Jasa	33.185.329.522,00	29.855.366.572,23	(3.329.962.949,77)	89,97
	BELANJA MODAL	25.237.200.300,00	24.371.261.947,00	(865.938.353,00)	96,57
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.981.765.100,00	8.714.673.373,00	(267.091.727,00)	97,03
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.123.200,00	553.027.524,00	(11.095.676,00)	98,03
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.691.312.000,00	15.103.561.050,00	(587.750.950,00)	96,25
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52.506.108.904,00	48.464.027.666,00	(4.042.081.238,00)	92,30
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	52.506.108.904,00	48.464.027.666,00	(4.042.081.238,00)	92,30
	BELANJA OPERASI	46.175.861.904,00	42.282.469.952,00	(3.893.391.952,00)	91,57
	Belanja Pegawai	12.552.263.300,00	11.399.047.033,00	(1.153.216.267,00)	90,81
	Belanja Barang dan Jasa	31.098.598.604,00	28.358.542.919,00	(2.740.055.685,00)	91,19
	Belanja Hibah	2.525.000.000,00	2.524.880.000,00	(120.000,00)	100,00
	BELANJA MODAL	6.330.247.000,00	6.181.557.714,00	(148.689.286,00)	97,65
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.330.247.000,00	6.181.557.714,00	(148.689.286,00)	97,65
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	NaN
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	34.485.845.802,00	30.655.055.153,00	(3.830.790.649,00)	88,89
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	34.485.845.802,00	30.655.055.153,00	(3.830.790.649,00)	88,89
	BELANJA OPERASI	33.890.056.802,00	30.078.740.493,00	(3.811.316.309,00)	88,75
	Belanja Pegawai	14.058.000.000,00	12.360.309.674,00	(1.697.690.326,00)	87,92
	Belanja Barang dan Jasa	19.832.056.802,00	17.718.430.819,00	(2.113.625.983,00)	89,34
	BELANJA MODAL	595.789.000,00	576.314.660,00	(19.474.340,00)	96,73
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.789.000,00	576.314.660,00	(19.474.340,00)	96,73
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	NaN

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.706.399.676,00	26.891.770.616,00	(1.814.629.060,00)	93,68
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28.706.399.676,00	26.891.770.616,00	(1.814.629.060,00)	93,68
	BELANJA OPERASI	27.072.909.676,00	25.598.989.896,00	(1.473.919.780,00)	94,56
	Belanja Pegawai	17.116.200.000,00	16.956.231.901,00	(159.968.099,00)	99,07
	Belanja Barang dan Jasa	9.956.709.676,00	8.642.757.995,00	(1.313.951.681,00)	86,80
	BELANJA MODAL	1.633.490.000,00	1.292.780.720,00	(340.709.280,00)	79,14
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.633.490.000,00	1.292.780.720,00	(340.709.280,00)	79,14
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	53.706.010.700,00	50.722.729.424,00	(2.983.281.276,00)	94,45
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	53.706.010.700,00	50.722.729.424,00	(2.983.281.276,00)	94,45
	BELANJA OPERASI	52.914.859.700,00	49.979.122.624,00	(2.935.737.076,00)	94,45
	Belanja Pegawai	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35
	Belanja Barang dan Jasa	22.196.059.700,00	20.988.751.394,00	(1.207.308.306,00)	94,56
	Belanja Hibah	15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	(412.263.168,00)	97,34
	BELANJA MODAL	791.151.000,00	743.606.800,00	(47.544.200,00)	93,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73
	BELANJA OPERASI	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73
	Belanja Barang dan Jasa	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	NaN
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	485.676.000,00	466.856.450,00	(18.819.550,00)	96,13
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	485.676.000,00	466.856.450,00	(18.819.550,00)	96,13
	BELANJA OPERASI	485.676.000,00	466.856.450,00	(18.819.550,00)	96,13
	Belanja Barang dan Jasa	485.676.000,00	466.856.450,00	(18.819.550,00)	96,13
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	NaN
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.974.181.600,00	7.549.751.591,00	(424.430.009,00)	94,68
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.974.181.600,00	7.549.751.591,00	(424.430.009,00)	94,68
	BELANJA OPERASI	7.785.594.600,00	7.377.736.491,00	(407.858.109,00)	94,76
	Belanja Barang dan Jasa	7.785.594.600,00	7.377.736.491,00	(407.858.109,00)	94,76
	BELANJA MODAL	188.587.000,00	172.015.100,00	(16.571.900,00)	91,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.587.000,00	172.015.100,00	(16.571.900,00)	91,21

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	26.511.505.400,00	25.049.815.143,00	(1.461.690.257,00)	94,49
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	26.511.505.400,00	25.049.815.143,00	(1.461.690.257,00)	94,49
	BELANJA OPERASI	24.876.865.400,00	23.454.539.583,00	(1.422.325.817,00)	94,28
	Belanja Pegawai	16.285.600.000,00	15.641.668.440,00	(643.931.560,00)	96,05
	Belanja Barang dan Jasa	8.591.265.400,00	7.812.871.143,00	(778.394.257,00)	90,94
	BELANJA MODAL	1.634.640.000,00	1.595.275.560,00	(39.364.440,00)	97,59
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.095.240.000,00	1.082.555.286,00	(12.684.714,00)	98,84
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	539.400.000,00	512.720.274,00	(26.679.726,00)	95,05
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.419.981.700,00	1.246.191.705,00	(173.789.995,00)	87,76
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.419.981.700,00	1.246.191.705,00	(173.789.995,00)	87,76
	BELANJA OPERASI	1.415.811.700,00	1.242.141.705,00	(173.669.995,00)	87,73
	Belanja Barang dan Jasa	1.415.811.700,00	1.242.141.705,00	(173.669.995,00)	87,73
	BELANJA MODAL	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	307.155.173.613,00	284.865.814.681,99	(22.289.358.931,01)	92,74
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260,00	50.329.965.199,00	(5.080.674.061,00)	90,83
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260,00	50.329.965.199,00	(5.080.674.061,00)	90,83
	BELANJA OPERASI	52.112.271.260,00	48.449.151.547,00	(3.663.119.713,00)	92,97
	Belanja Pegawai	29.613.200.000,00	29.154.060.305,00	(459.139.695,00)	98,45
	Belanja Barang dan Jasa	22.499.071.260,00	19.295.091.242,00	(3.203.980.018,00)	85,76
	BELANJA MODAL	3.298.368.000,00	1.880.813.652,00	(1.417.554.348,00)	57,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.331.378.000,00	1.134.573.142,00	(196.804.858,00)	85,22
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.966.990.000,00	746.240.510,00	(1.220.749.490,00)	37,94
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	NaN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	40.356.380.790,00	37.096.611.072,00	(3.259.769.718,00)	91,92
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	40.356.380.790,00	37.096.611.072,00	(3.259.769.718,00)	91,92
	BELANJA OPERASI	39.639.567.790,00	36.556.258.372,00	(3.083.309.418,00)	92,22
	Belanja Pegawai	15.306.200.000,00	14.811.905.860,00	(494.294.140,00)	96,77
	Belanja Barang dan Jasa	24.333.367.790,00	21.744.352.512,00	(2.589.015.278,00)	89,36
	BELANJA MODAL	716.813.000,00	540.352.700,00	(176.460.300,00)	75,38
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524.423.000,00	349.112.700,00	(175.310.300,00)	66,57
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.390.000,00	191.240.000,00	(1.150.000,00)	99,40
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	110.360.240.015,00	104.180.975.011,00	(6.179.265.004,00)	94,40

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	110.360.240.015,00	104.180.975.011,00	(6.179.265.004,00)	94,40
	BELANJA OPERASI	107.816.851.715,00	101.791.904.811,00	(6.024.946.904,00)	94,41
	Belanja Pegawai	45.686.000.000,00	41.617.788.779,00	(4.068.211.221,00)	91,10
	Belanja Barang dan Jasa	62.130.851.715,00	60.174.116.032,00	(1.956.735.683,00)	96,85
	BELANJA MODAL	2.543.388.300,00	2.389.070.200,00	(154.318.100,00)	93,93
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.440.239.300,00	2.288.577.770,00	(151.661.530,00)	93,78
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.149.000,00	100.492.430,00	(2.656.570,00)	97,42
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	(316.038.821,00)	95,53
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	(316.038.821,00)	95,53
	BELANJA OPERASI	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	(316.038.821,00)	95,53
	Belanja Barang dan Jasa	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	(316.038.821,00)	95,53
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700,00	45.555.457.904,99	(3.286.505.795,01)	93,27
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700,00	45.555.457.904,99	(3.286.505.795,01)	93,27
	BELANJA OPERASI	43.833.692.700,00	40.813.123.575,46	(3.020.569.124,54)	93,11
	Belanja Pegawai	19.197.000.000,00	18.364.023.481,00	(832.976.519,00)	95,66
	Belanja Barang dan Jasa	11.668.784.950,00	9.624.665.306,46	(2.044.119.643,54)	82,48
	Belanja Bantuan Sosial	12.967.907.750,00	12.824.434.788,00	(143.472.962,00)	98,89
	BELANJA MODAL	5.008.271.000,00	4.742.334.329,53	(265.936.670,47)	94,69
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.271.000,00	7.800.000,00	(471.000,00)	94,31
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	(265.465.670,47)	94,69
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.954.176.000,00	5.125.029.622,00	(829.146.378,00)	86,07
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.954.176.000,00	5.125.029.622,00	(829.146.378,00)	86,07
	BELANJA OPERASI	5.885.460.000,00	5.062.801.421,00	(822.658.579,00)	86,02
	Belanja Barang dan Jasa	5.885.460.000,00	5.062.801.421,00	(822.658.579,00)	86,02
	BELANJA MODAL	68.716.000,00	62.228.201,00	(6.487.799,00)	90,56
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.716.000,00	62.228.201,00	(6.487.799,00)	90,56
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	NaN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.158.157.848,00	35.820.198.694,00	(3.337.959.154,00)	91,48
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.158.157.848,00	35.820.198.694,00	(3.337.959.154,00)	91,48
	BELANJA OPERASI	38.848.841.848,00	35.527.539.703,00	(3.321.302.145,00)	91,45
	Belanja Pegawai	22.579.000.000,00	22.067.117.066,00	(511.882.934,00)	97,73
	Belanja Barang dan Jasa	16.269.841.848,00	13.460.422.637,00	(2.809.419.211,00)	82,73
	BELANJA MODAL	309.316.000,00	292.658.991,00	(16.657.009,00)	94,61
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.316.000,00	292.658.991,00	(16.657.009,00)	94,61

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	858.023.501.259,00	775.699.161.353,16	(82.324.339.905,84)	90,41
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880,00	225.561.933.716,00	(19.575.498.164,00)	92,01
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880,00	225.561.933.716,00	(19.575.498.164,00)	92,01
	BELANJA OPERASI	240.455.056.880,00	221.248.750.176,00	(19.206.306.704,00)	92,01
	Belanja Pegawai	127.606.630.372,00	117.840.326.601,00	(9.766.303.771,00)	92,35
	Belanja Barang dan Jasa	103.797.426.508,00	94.942.753.192,00	(8.854.673.316,00)	91,47
	Belanja Hibah	9.051.000.000,00	8.465.670.383,00	(585.329.617,00)	93,53
	BELANJA MODAL	4.682.375.000,00	4.313.183.540,00	(369.191.460,00)	92,12
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.677.300.000,00	4.313.183.540,00	(364.116.460,00)	92,22
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.075.000,00	0,00	(5.075.000,00)	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379,00	550.137.227.637,16	(62.748.841.741,84)	89,76
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379,00	550.137.227.637,16	(62.748.841.741,84)	89,76
	BELANJA OPERASI	553.252.956.479,00	518.512.856.994,16	(34.740.099.484,84)	93,72
	Belanja Pegawai	148.802.692.489,00	146.375.834.206,00	(2.426.858.283,00)	98,37
	Belanja Barang dan Jasa	404.450.263.990,00	372.137.022.788,16	(32.313.241.201,84)	92,01
	BELANJA MODAL	59.633.112.900,00	31.624.370.643,00	(28.008.742.257,00)	53,03
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.441.179.900,00	29.464.550.643,00	(27.976.629.257,00)	51,30
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.178.000.000,00	2.159.820.000,00	(18.180.000,00)	99,17
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Aset Lainnya	13.933.000,00	0,00	(13.933.000,00)	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.109.465.790.178,00	2.797.504.657.726,31	(311.961.132.451,69)	89,97
5.01	PERENCANAAN	46.127.867.410,00	43.577.404.595,00	(2.550.462.815,00)	94,47
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	46.127.867.410,00	43.577.404.595,00	(2.550.462.815,00)	94,47
	BELANJA OPERASI	45.748.616.410,00	43.257.845.349,00	(2.490.771.061,00)	94,56
	Belanja Pegawai	32.662.600.000,00	31.419.735.524,00	(1.242.864.476,00)	96,19
	Belanja Barang dan Jasa	13.086.016.410,00	11.838.109.825,00	(1.247.906.585,00)	90,46
	BELANJA MODAL	379.251.000,00	319.559.246,00	(59.691.754,00)	84,26
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.251.000,00	319.559.246,00	(59.691.754,00)	84,26
5.02	KEUANGAN	2.767.140.819.466,00	2.468.607.463.031,31	(298.533.356.434,69)	89,21
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.498.288.120.461,00	2.214.364.216.582,00	(283.923.903.879,00)	88,64
	BELANJA OPERASI	50.736.966.050,00	48.299.331.942,00	(2.437.634.108,00)	95,20
	Belanja Pegawai	24.844.024.680,00	24.122.835.877,00	(721.188.803,00)	97,10
	Belanja Barang dan Jasa	25.892.941.370,00	24.176.496.065,00	(1.716.445.305,00)	93,37

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA MODAL	269.736.000,00	250.092.434,00	(19.643.566,00)	92,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.275.000,00	133.726.140,00	(9.548.860,00)	93,34
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.990.000,00	96.480.294,00	(3.509.706,00)	96,49
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.694.000,00	2.886.000,00	(3.808.000,00)	43,11
	Belanja Modal Aset Lainnya	19.777.000,00	17.000.000,00	(2.777.000,00)	85,96
	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.756.687.505,00	0,00	(32.756.687.505,00)	0,00
	Belanja Tidak Terduga	32.756.687.505,00	0,00	(32.756.687.505,00)	0,00
	BELANJA TRANSFER	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00	(248.709.938.700,00)	89,70
	Belanja Bagi Hasil	2.260.672.110.906,00	2.024.610.361.548,00	(236.061.749.358,00)	89,56
	Belanja Bantuan Keuangan	153.852.620.000,00	141.204.430.658,00	(12.648.189.342,00)	91,78
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.852.699.005,00	254.243.246.449,31	(14.609.452.555,69)	94,57
	BELANJA OPERASI	251.928.806.005,00	238.542.750.007,77	(13.386.055.997,23)	94,69
	Belanja Pegawai	135.549.641.850,00	131.765.919.440,00	(3.783.722.410,00)	97,21
	Belanja Barang dan Jasa	116.379.164.155,00	106.776.830.567,77	(9.602.333.587,23)	91,75
	BELANJA MODAL	16.923.893.000,00	15.700.496.441,54	(1.223.396.558,46)	92,77
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.610.035.000,00	11.763.094.589,00	(846.940.411,00)	93,28
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.434.099.000,00	3.150.834.840,54	(283.264.159,46)	91,75
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.300.000,00	176.805.739,00	(18.494.261,00)	90,53
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Aset Lainnya	684.459.000,00	609.761.273,00	(74.697.727,00)	89,09
5.03	KEPEGAWAIAN	230.722.447.163,00	228.388.845.400,00	(2.333.601.763,00)	98,99
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	230.722.447.163,00	228.388.845.400,00	(2.333.601.763,00)	98,99
	BELANJA OPERASI	229.814.447.163,00	227.507.595.400,00	(2.306.851.763,00)	99,00
	Belanja Pegawai	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23
	Belanja Barang dan Jasa	9.632.452.086,00	9.004.037.305,00	(628.414.781,00)	93,48
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92
	BELANJA MODAL	908.000.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	908.000.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.426.266.039,00	45.797.137.653,00	(7.629.128.386,00)	85,72
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.426.266.039,00	45.797.137.653,00	(7.629.128.386,00)	85,72
	BELANJA OPERASI	52.629.884.039,00	45.018.685.818,00	(7.611.198.221,00)	85,54
	Belanja Pegawai	24.310.000.000,00	22.070.630.353,00	(2.239.369.647,00)	90,79
	Belanja Barang dan Jasa	28.319.884.039,00	22.948.055.465,00	(5.371.828.574,00)	81,03
	BELANJA MODAL	796.382.000,00	778.451.835,00	(17.930.165,00)	97,75

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	736.872.000,00	720.176.835,00	(16.695.165,00)	97,73
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.510.000,00	58.275.000,00	(1.235.000,00)	97,92
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	(151.436.256,00)	90,66
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	(151.436.256,00)	90,66
	BELANJA OPERASI	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	(151.436.256,00)	90,66
	Belanja Barang dan Jasa	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	(151.436.256,00)	90,66
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.426.928.200,00	9.663.781.403,00	(763.146.797,00)	92,68
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	10.426.928.200,00	9.663.781.403,00	(763.146.797,00)	92,68
	BELANJA OPERASI	10.352.838.200,00	9.592.297.403,00	(760.540.797,00)	92,65
	Belanja Pegawai	6.098.000.000,00	5.774.067.523,00	(323.932.477,00)	94,69
	Belanja Barang dan Jasa	4.254.838.200,00	3.818.229.880,00	(436.608.320,00)	89,74
	BELANJA MODAL	74.090.000,00	71.484.000,00	(2.606.000,00)	96,48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.090.000,00	71.484.000,00	(2.606.000,00)	96,48
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	73.677.043.110,00	64.896.370.157,00	(8.780.672.953,00)	88,08
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	73.677.043.110,00	64.896.370.157,00	(8.780.672.953,00)	88,08
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	73.677.043.110,00	64.896.370.157,00	(8.780.672.953,00)	88,08
	BELANJA OPERASI	73.147.388.110,00	64.373.460.159,00	(8.773.927.951,00)	88,01
	Belanja Pegawai	61.632.600.000,00	56.310.542.389,00	(5.322.057.611,00)	91,36
	Belanja Barang dan Jasa	11.514.788.110,00	8.062.917.770,00	(3.451.870.340,00)	70,02
	BELANJA MODAL	529.655.000,00	522.909.998,00	(6.745.002,00)	98,73
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.655.000,00	328.659.998,00	(995.002,00)	99,70
	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	194.250.000,00	(5.750.000,00)	97,12
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	73.126.477.640,00	70.924.759.929,00	(2.201.717.711,00)	96,99
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640,00	70.924.759.929,00	(2.201.717.711,00)	96,99
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640,00	70.924.759.929,00	(2.201.717.711,00)	96,99
	BELANJA OPERASI	73.110.133.640,00	70.912.627.629,00	(2.197.506.011,00)	96,99
	Belanja Pegawai	11.342.600.000,00	10.482.492.375,00	(860.107.625,00)	92,42
	Belanja Barang dan Jasa	14.346.704.640,00	13.118.938.354,00	(1.227.766.286,00)	91,44
	Belanja Hibah	47.420.829.000,00	47.311.196.900,00	(109.632.100,00)	99,77
	BELANJA MODAL	16.344.000,00	12.132.300,00	(4.211.700,00)	74,23
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.344.000,00	12.132.300,00	(4.211.700,00)	74,23
	JUMLAH BELANJA DAERAH	10.773.538.029.147,00	10.010.940.346.290,57	(762.597.682.856,43)	92,92

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(305.987.541.412,00)	(261.284.118.385,17)	44.703.423.026,83	85,39

Gubernur Banten

Andra Soni

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LRA (2 + 7 + 17)	5.1.1	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA (3 s.d 6)	5.1.1.1	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.856
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.988.258
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA (8 + 14)	5.1.1.2	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (9 s.d 13)	5.1.1.2.a	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.122.216.839.000	986.117.518.100	87,87	988.546.837.000
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.108.071.000	1.057.839.000	95,47	5.887.789.000
11	Bagi Hasil Lainnya - LRA	5.1.1.2.a.1)	906.874.000	906.874.000	100,00	-
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.a.2)	1.167.199.457.000	1.146.642.838.212	98,24	1.146.248.432.968
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.a.3)	1.228.503.948.000	1.265.613.302.359	103,02	1.212.441.264.199
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA (15 s.d 16)	5.1.1.2.b	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000
15	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.b	-	-	-	-
16	Insentif Fiskal - LRA	5.1.1.2.b	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (18 s.d 19)	5.1.1.3	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000
18	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.a	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000
19	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3.b	-	-	-	-
20	BELANJA (21 + 27 + 34)	5.1.2	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85	8.302.564.419.071
21	BELANJA OPERASI (22 s.d 26)	5.1.2.1	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562
22	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242
23	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502
24	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	-	-	-	1.029.672.328
25	Belanja Hibah	5.1.2.1.d	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012
26	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478
27	BELANJA MODAL (28 s.d 33)	5.1.2.2	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508
28	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2..a	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09	46.092.332.880
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2..b	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2..c	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81	171.787.754.271
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2..d	318.031.145.447	299.055.992.016	94,03	536.407.648.367
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2..e	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663
33	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2..f	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769
34	BELANJA TAK TERDUGA (35)	5.1.2.3	32.756.687.505	-	-	75.000.000
35	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	32.756.687.505	-	-	75.000.000
36	TRANSFER (37 + 39)	5.1.3	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510
37	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (38)	5.1.3.1	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438
38	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438
39	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (40 s.d 41)	5.1.3.2	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072
40	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.a	30.352.620.000	30.342.620.000	99,97	95.923.928.072
41	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.b	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000
42	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (20 + 36)		10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581
43	SURPLUS/ (DEFISIT) (1 + 42)	5.1.3	(305.987.541.412)	(261.284.118.385)	85,39	496.108.214.282
44	PEMBIAYAAN	5.1.4	-	-	-	-
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (46 + 47)	5.1.4.1	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165
46	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165
47	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	-	-	-	-
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (49 + 51)	5.1.4.2	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.1	-	-	-	-
50	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.5.2.2	-	-	-	-
51	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.3	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036
52	PEMBIAYAAN NETO (45 - 48)	5.1.5	305.987.541.412	305.987.808.375	100,00	(51.622.672.871)
53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43+52)	5.1.6	-	44.703.689.990	-	444.485.541.411

Gubernur Banten

Andra Soni

1.01.2.22.0.00.02.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Satuan Kerja : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.01.2.22.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.276.721.814,00	1.686.041.654,00	409.319.840,00	132,06	
1.01.2.22.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.276.721.814,00	1.686.020.054,00	409.298.240,00	132,06	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.01.2.22.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.276.721.814,00	1.686.041.654,00	409.319.840,00	132,06	
5	BELANJA DAERAH					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.265.951.778.052,00	1.267.266.386.126,00	1.314.608.074,00	100,10	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.126.191.100,00	816.341.720,00	(309.849.380,00)	72,49	
1.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	148.131.600,00	129.828.300,00	(18.303.300,00)	87,64	
1.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	148.131.600,00	129.828.300,00	(18.303.300,00)	87,64	
1.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.131.600,00	129.828.300,00	(18.303.300,00)	87,64	
1.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	36.012.000,00	30.450.000,00	(5.562.000,00)	84,56	
1.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	36.012.000,00	30.450.000,00	(5.562.000,00)	84,56	
1.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.012.000,00	30.450.000,00	(5.562.000,00)	84,56	
1.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	35.618.000,00	28.426.280,00	(7.191.720,00)	79,81	
1.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	35.618.000,00	28.426.280,00	(7.191.720,00)	79,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.618.000,00	28.426.280,00	(7.191.720,00)	79,81	
1.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	38.753.000,00	34.228.320,00	(4.524.680,00)	88,32	
1.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	38.753.000,00	34.228.320,00	(4.524.680,00)	88,32	
1.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.753.000,00	34.228.320,00	(4.524.680,00)	88,32	
1.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	34.893.000,00	32.002.000,00	(2.891.000,00)	91,71	
1.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	34.893.000,00	32.002.000,00	(2.891.000,00)	91,71	
1.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.893.000,00	32.002.000,00	(2.891.000,00)	91,71	
1.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.840.000,00	16.286.000,00	(2.554.000,00)	86,44	
1.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	18.840.000,00	16.286.000,00	(2.554.000,00)	86,44	
1.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	16.286.000,00	(2.554.000,00)	86,44	
1.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	215.521.400,00	123.132.640,00	(92.388.760,00)	57,13	
1.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	215.521.400,00	123.132.640,00	(92.388.760,00)	57,13	
1.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.521.400,00	123.132.640,00	(92.388.760,00)	57,13	
1.01.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	332.201.800,00	211.337.280,00	(120.864.520,00)	63,62	
1.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	332.201.800,00	211.337.280,00	(120.864.520,00)	63,62	
1.01.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.201.800,00	211.337.280,00	(120.864.520,00)	63,62	
1.01.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	34.766.000,00	32.654.000,00	(2.112.000,00)	93,93	
1.01.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	34.766.000,00	32.654.000,00	(2.112.000,00)	93,93	
1.01.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.766.000,00	32.654.000,00	(2.112.000,00)	93,93	
1.01.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	23.809.000,00	21.371.600,00	(2.437.400,00)	89,76	
1.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	23.809.000,00	21.371.600,00	(2.437.400,00)	89,76	
1.01.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.809.000,00	21.371.600,00	(2.437.400,00)	89,76	
1.01.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	207.645.300,00	156.625.300,00	(51.020.000,00)	75,43	
1.01.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	207.645.300,00	156.625.300,00	(51.020.000,00)	75,43	
1.01.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.645.300,00	156.625.300,00	(51.020.000,00)	75,43	
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.238.407.452.174,00	1.243.534.135.336,00	5.126.683.162,00	100,41	
1.01.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.225.788.856.674,00	1.234.868.519.836,00	9.079.663.162,00	100,74	
1.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.225.788.856.674,00	1.234.868.519.836,00	9.079.663.162,00	100,74	
1.01.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.225.788.856.674,00	1.234.868.519.836,00	9.079.663.162,00	100,74	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.403.920.000,00	8.456.959.600,00	(3.946.960.400,00)	68,18	
1.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.403.920.000,00	8.456.959.600,00	(3.946.960.400,00)	68,18	
1.01.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.403.920.000,00	8.456.959.600,00	(3.946.960.400,00)	68,18	
1.01.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.200.000,00	11.743.900,00	(456.100,00)	96,26	
1.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	11.743.900,00	(456.100,00)	96,26	
1.01.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	11.743.900,00	(456.100,00)	96,26	
1.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.147.200,00	(502.800,00)	96,03	
1.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	152.325.500,00	148.700.100,00	(3.625.400,00)	97,62	
1.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	152.325.500,00	148.700.100,00	(3.625.400,00)	97,62	
1.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.325.500,00	148.700.100,00	(3.625.400,00)	97,62	
1.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	12.200.000,00	11.770.300,00	(429.700,00)	96,48	
1.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	11.770.300,00	(429.700,00)	96,48	
1.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	11.770.300,00	(429.700,00)	96,48	
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	665.454.420,00	296.452.548,00	(369.001.872,00)	44,55	
1.01.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.535.000,00	0,00	(10.535.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.535.000,00	0,00	(10.535.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.535.000,00	0,00	(10.535.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	200.000.000,00	198.759.348,00	(1.240.652,00)	99,38	
1.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	199.960.000,00	198.759.348,00	(1.200.652,00)	99,40	
1.01.01.1.03.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.960.000,00	198.759.348,00	(1.200.652,00)	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	11.009.000,00	0,00	(11.009.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.009.000,00	0,00	(11.009.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.009.000,00	0,00	(11.009.000,00)	0,00	
1.01.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	361.932.420,00	92.968.200,00	(268.964.220,00)	25,69	
1.01.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	361.932.420,00	92.968.200,00	(268.964.220,00)	25,69	
1.01.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.932.420,00	92.968.200,00	(268.964.220,00)	25,69	
1.01.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	61.978.000,00	4.725.000,00	(57.253.000,00)	7,62	
1.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.978.000,00	4.725.000,00	(57.253.000,00)	7,62	
1.01.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.978.000,00	4.725.000,00	(57.253.000,00)	7,62	
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.954.151.200,00	1.385.117.728,00	(569.033.472,00)	70,88	
1.01.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	341.200.000,00	339.163.421,00	(2.036.579,00)	99,40	
1.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	341.200.000,00	339.163.421,00	(2.036.579,00)	99,40	
1.01.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.200.000,00	339.163.421,00	(2.036.579,00)	99,40	
1.01.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	140.202.000,00	122.619.307,00	(17.582.693,00)	87,46	
1.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	140.202.000,00	122.619.307,00	(17.582.693,00)	87,46	
1.01.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.202.000,00	122.619.307,00	(17.582.693,00)	87,46	
1.01.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	267.392.000,00	23.335.000,00	(244.057.000,00)	8,73	
1.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	267.392.000,00	23.335.000,00	(244.057.000,00)	8,73	
1.01.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.392.000,00	23.335.000,00	(244.057.000,00)	8,73	
1.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.205.357.200,00	900.000.000,00	(305.357.200,00)	74,67	
1.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.205.357.200,00	900.000.000,00	(305.357.200,00)	74,67	
1.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.205.357.200,00	900.000.000,00	(305.357.200,00)	74,67	
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.165.193.222,00	5.508.260.897,00	(656.932.325,00)	89,34	
1.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	331.385.600,00	294.684.190,00	(36.701.410,00)	88,92	
1.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	331.385.600,00	294.684.190,00	(36.701.410,00)	88,92	
1.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.385.600,00	294.684.190,00	(36.701.410,00)	88,92	
1.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	403.449.000,00	385.352.000,00	(18.097.000,00)	95,51	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	403.449.000,00	385.352.000,00	(18.097.000,00)	95,51	
1.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.449.000,00	385.352.000,00	(18.097.000,00)	95,51	
1.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	350.000.000,00	326.313.828,00	(23.686.172,00)	93,23	
1.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	326.313.828,00	(23.686.172,00)	93,23	
1.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	326.313.828,00	(23.686.172,00)	93,23	
1.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	831.802.600,00	461.900.989,00	(369.901.611,00)	55,53	
1.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	831.802.600,00	461.900.989,00	(369.901.611,00)	55,53	
1.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.802.600,00	461.900.989,00	(369.901.611,00)	55,53	
1.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	148.890.600,00	65.720.000,00	(83.170.600,00)	44,14	
1.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	148.890.600,00	65.720.000,00	(83.170.600,00)	44,14	
1.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.890.600,00	65.720.000,00	(83.170.600,00)	44,14	
1.01.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	4.099.665.422,00	3.974.289.890,00	(125.375.532,00)	96,94	
1.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.729.850.422,00	3.617.533.894,00	(112.316.528,00)	96,99	
1.01.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.729.850.422,00	3.617.533.894,00	(112.316.528,00)	96,99	
1.01.01.1.06.0011.5.2	BELANJA MODAL	369.815.000,00	356.755.996,00	(13.059.004,00)	96,47	
1.01.01.1.06.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	369.815.000,00	356.755.996,00	(13.059.004,00)	96,47	
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.069.737.300,00	930.220.609,00	(139.516.691,00)	86,96	
1.01.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	471.645.100,00	453.028.715,00	(18.616.385,00)	96,05	
1.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.435.100,00	1.321.600,00	(113.500,00)	92,09	
1.01.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.100,00	1.321.600,00	(113.500,00)	92,09	
1.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	470.210.000,00	451.707.115,00	(18.502.885,00)	96,06	
1.01.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.210.000,00	451.707.115,00	(18.502.885,00)	96,06	
1.01.01.1.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	99.232.000,00	91.543.514,00	(7.688.486,00)	92,25	
1.01.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.499.000,00	1.317.000,00	(182.000,00)	87,86	
1.01.01.1.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.000,00	1.317.000,00	(182.000,00)	87,86	
1.01.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	97.733.000,00	90.226.514,00	(7.506.486,00)	92,32	
1.01.01.1.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.488.000,00	50.560.500,00	(1.927.500,00)	96,33	
1.01.01.1.07.0007.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.245.000,00	39.666.014,00	(5.578.986,00)	87,67	
1.01.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	36.591.800,00	(63.408.200,00)	36,59	
1.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	36.591.800,00	(63.408.200,00)	36,59	
1.01.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	36.591.800,00	(63.408.200,00)	36,59	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	398.860.200,00	349.056.580,00	(49.803.620,00)	87,51	
1.01.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	39.600.200,00	37.750.291,00	(1.849.909,00)	95,33	
1.01.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.200,00	37.750.291,00	(1.849.909,00)	95,33	
1.01.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	359.260.000,00	311.306.289,00	(47.953.711,00)	86,65	
1.01.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.920.000,00	256.982.889,00	(45.937.111,00)	84,84	
1.01.01.1.07.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.340.000,00	54.323.400,00	(2.016.600,00)	96,42	
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.594.424.536,00	10.540.813.014,00	(1.053.611.522,00)	90,91	
1.01.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.312.718.700,00	1.787.567.328,00	(525.151.372,00)	77,29	
1.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.299.906.700,00	1.787.567.328,00	(512.339.372,00)	77,72	
1.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.299.906.700,00	1.787.567.328,00	(512.339.372,00)	77,72	
1.01.01.1.08.0002.5.2	BELANJA MODAL	12.812.000,00	0,00	(12.812.000,00)	0,00	
1.01.01.1.08.0002.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12.812.000,00	0,00	(12.812.000,00)	0,00	
1.01.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	874.894.990,00	794.032.879,00	(80.862.111,00)	90,76	
1.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	874.894.990,00	794.032.879,00	(80.862.111,00)	90,76	
1.01.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.894.990,00	794.032.879,00	(80.862.111,00)	90,76	
1.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.396.810.846,00	7.959.212.807,00	(437.598.039,00)	94,79	
1.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.370.678.846,00	7.933.398.647,00	(437.280.199,00)	94,78	
1.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.370.678.846,00	7.933.398.647,00	(437.280.199,00)	94,78	
1.01.01.1.08.0004.5.2	BELANJA MODAL	26.132.000,00	25.814.160,00	(317.840,00)	98,78	
1.01.01.1.08.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.132.000,00	25.814.160,00	(317.840,00)	98,78	
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.969.174.100,00	4.255.044.274,00	(714.129.826,00)	85,63	
1.01.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	499.496.000,00	453.309.000,00	(46.187.000,00)	90,75	
1.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	499.496.000,00	453.309.000,00	(46.187.000,00)	90,75	
1.01.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.496.000,00	453.309.000,00	(46.187.000,00)	90,75	
1.01.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.298.074.000,00	1.081.216.600,00	(216.857.400,00)	83,29	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.298.074.000,00	1.081.216.600,00	(216.857.400,00)	83,29	
1.01.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.074.000,00	1.081.216.600,00	(216.857.400,00)	83,29	
1.01.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	291.072.900,00	276.254.200,00	(14.818.700,00)	94,91	
1.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	291.072.900,00	276.254.200,00	(14.818.700,00)	94,91	
1.01.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.072.900,00	276.254.200,00	(14.818.700,00)	94,91	
1.01.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	90.100.000,00	87.320.532,00	(2.779.468,00)	96,92	
1.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	90.100.000,00	87.320.532,00	(2.779.468,00)	96,92	
1.01.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.100.000,00	87.320.532,00	(2.779.468,00)	96,92	
1.01.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.790.431.200,00	2.356.943.942,00	(433.487.258,00)	84,47	
1.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.790.431.200,00	2.356.943.942,00	(433.487.258,00)	84,47	
1.01.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.431.200,00	2.356.943.942,00	(433.487.258,00)	84,47	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.888.819.537.318,00	1.682.955.085.910,88	(205.864.451.407,12)	89,10	
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	736.645.530.190,00	695.373.588.909,64	(41.271.941.280,36)	94,40	
1.01.02.1.01.0001	PEMBANGUNAN USB (UNIT SEKOLAH BARU)	28.700.000.000,00	27.839.161.623,00	(860.838.377,00)	97,00	
1.01.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	28.700.000.000,00	27.839.161.623,00	(860.838.377,00)	97,00	
1.01.02.1.01.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.700.000.000,00	27.839.161.623,00	(860.838.377,00)	97,00	
1.01.02.1.01.0003	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	650.000.000,00	634.769.306,00	(15.230.694,00)	97,66	
1.01.02.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	650.000.000,00	634.769.306,00	(15.230.694,00)	97,66	
1.01.02.1.01.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.000.000,00	634.769.306,00	(15.230.694,00)	97,66	
1.01.02.1.01.0011	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	500.000.000,00	487.048.350,00	(12.951.650,00)	97,41	
1.01.02.1.01.0011.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	487.048.350,00	(12.951.650,00)	97,41	
1.01.02.1.01.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	487.048.350,00	(12.951.650,00)	97,41	
1.01.02.1.01.0012	PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	750.000.000,00	731.243.000,00	(18.757.000,00)	97,50	
1.01.02.1.01.0012.5.2	BELANJA MODAL	750.000.000,00	731.243.000,00	(18.757.000,00)	97,50	
1.01.02.1.01.0012.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	731.243.000,00	(18.757.000,00)	97,50	
1.01.02.1.01.0014	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	45.635.145.000,00	44.619.910.859,00	(1.015.234.141,00)	97,78	
1.01.02.1.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	45.635.145.000,00	44.619.910.859,00	(1.015.234.141,00)	97,78	
1.01.02.1.01.0014.5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.135.145.000,00	24.435.880.000,00	(699.265.000,00)	97,22	
1.01.02.1.01.0014.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.500.000.000,00	20.184.030.859,00	(315.969.141,00)	98,46	
1.01.02.1.01.0016	PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH	200.000.000,00	191.145.300,00	(8.854.700,00)	95,57	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.0016.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	191.145.300,00	(8.854.700,00)	95,57	
1.01.02.1.01.0016.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	191.145.300,00	(8.854.700,00)	95,57	
1.01.02.1.01.0019	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	27.900.000.000,00	27.320.928.086,00	(579.071.914,00)	97,92	
1.01.02.1.01.0019.5.2	BELANJA MODAL	27.900.000.000,00	27.320.928.086,00	(579.071.914,00)	97,92	
1.01.02.1.01.0019.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.900.000.000,00	27.320.928.086,00	(579.071.914,00)	97,92	
1.01.02.1.01.0020	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.050.000.000,00	1.030.723.385,00	(19.276.615,00)	98,16	
1.01.02.1.01.0020.5.2	BELANJA MODAL	1.050.000.000,00	1.030.723.385,00	(19.276.615,00)	98,16	
1.01.02.1.01.0020.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.000.000,00	1.030.723.385,00	(19.276.615,00)	98,16	
1.01.02.1.01.0029	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA	350.000.000,00	338.452.656,00	(11.547.344,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0029.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	338.452.656,00	(11.547.344,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0029.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	338.452.656,00	(11.547.344,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0036	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	22.543.245.000,00	21.996.708.808,00	(546.536.192,00)	97,58	
1.01.02.1.01.0036.5.2	BELANJA MODAL	22.543.245.000,00	21.996.708.808,00	(546.536.192,00)	97,58	
1.01.02.1.01.0036.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.543.245.000,00	21.996.708.808,00	(546.536.192,00)	97,58	
1.01.02.1.01.0039	PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	139.198.650,00	109.571.650,00	(29.627.000,00)	78,72	
1.01.02.1.01.0039.5.1	BELANJA OPERASI	139.198.650,00	109.571.650,00	(29.627.000,00)	78,72	
1.01.02.1.01.0039.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.198.650,00	109.571.650,00	(29.627.000,00)	78,72	
1.01.02.1.01.0041	PENGADAAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	1.086.762.000,00	1.054.316.024,00	(32.445.976,00)	97,01	
1.01.02.1.01.0041.5.1	BELANJA OPERASI	44.480.000,00	39.800.000,00	(4.680.000,00)	89,48	
1.01.02.1.01.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.480.000,00	39.800.000,00	(4.680.000,00)	89,48	
1.01.02.1.01.0041.5.2	BELANJA MODAL	1.042.282.000,00	1.014.516.024,00	(27.765.976,00)	97,34	
1.01.02.1.01.0041.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.042.282.000,00	1.014.516.024,00	(27.765.976,00)	97,34	
1.01.02.1.01.0045	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	30.979.621.450,00	24.859.298.647,00	(6.120.322.803,00)	80,24	
1.01.02.1.01.0045.5.1	BELANJA OPERASI	30.979.621.450,00	24.859.298.647,00	(6.120.322.803,00)	80,24	
1.01.02.1.01.0045.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.979.621.450,00	24.859.298.647,00	(6.120.322.803,00)	80,24	
1.01.02.1.01.0045.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.0049	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	2.758.380.270,00	1.862.865.800,00	(895.514.470,00)	67,53	
1.01.02.1.01.0049.5.1	BELANJA OPERASI	2.758.380.270,00	1.862.865.800,00	(895.514.470,00)	67,53	
1.01.02.1.01.0049.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.758.380.270,00	1.862.865.800,00	(895.514.470,00)	67,53	
1.01.02.1.01.0050	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	211.132.880.850,00	191.395.683.908,00	(19.737.196.942,00)	90,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.0050.5.1	BELANJA OPERASI	211.132.880.850,00	191.395.683.908,00	(19.737.196.942,00)	90,65	
1.01.02.1.01.0050.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.132.880.850,00	191.395.683.908,00	(19.737.196.942,00)	90,65	
1.01.02.1.01.0051	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	614.097.500,00	591.816.030,00	(22.281.470,00)	96,37	
1.01.02.1.01.0051.5.1	BELANJA OPERASI	614.097.500,00	591.816.030,00	(22.281.470,00)	96,37	
1.01.02.1.01.0051.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.097.500,00	591.816.030,00	(22.281.470,00)	96,37	
1.01.02.1.01.0052	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS	551.379.600,00	279.693.000,00	(271.686.600,00)	50,73	
1.01.02.1.01.0052.5.1	BELANJA OPERASI	551.379.600,00	279.693.000,00	(271.686.600,00)	50,73	
1.01.02.1.01.0052.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.379.600,00	279.693.000,00	(271.686.600,00)	50,73	
1.01.02.1.01.0053	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	338.113.226.000,00	328.034.740.423,64	(10.078.485.576,36)	97,02	
1.01.02.1.01.0053.5.1	BELANJA OPERASI	268.107.672.680,00	257.432.067.863,64	(10.675.604.816,36)	96,02	
1.01.02.1.01.0053.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.893.494.680,00	150.206.456.260,64	(14.687.038.419,36)	91,09	
1.01.02.1.01.0053.5.1.05	Belanja Hibah	103.214.178.000,00	107.225.611.603,00	4.011.433.603,00	103,89	
1.01.02.1.01.0053.5.2	BELANJA MODAL	70.005.553.320,00	70.602.672.560,00	597.119.240,00	100,85	
1.01.02.1.01.0053.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.426.233.680,00	39.908.435.520,00	482.201.840,00	101,22	
1.01.02.1.01.0053.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.579.319.640,00	30.694.237.040,00	114.917.400,00	100,38	
1.01.02.1.01.0054	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	510.333.920,00	137.333.000,00	(373.000.920,00)	26,91	
1.01.02.1.01.0054.5.1	BELANJA OPERASI	510.333.920,00	137.333.000,00	(373.000.920,00)	26,91	
1.01.02.1.01.0054.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.333.920,00	137.333.000,00	(373.000.920,00)	26,91	
1.01.02.1.01.0057	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.01.0057.5.1	BELANJA OPERASI	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.01.0057.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.01.0058	PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	36.740.000,00	36.530.000,00	(210.000,00)	99,43	
1.01.02.1.01.0058.5.1	BELANJA OPERASI	36.740.000,00	36.530.000,00	(210.000,00)	99,43	
1.01.02.1.01.0058.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.740.000,00	36.530.000,00	(210.000,00)	99,43	
1.01.02.1.01.0059	PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0059.5.1	BELANJA OPERASI	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0059.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.01.0060	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	107.103.300,00	98.345.051,00	(8.758.249,00)	91,82	
1.01.02.1.01.0060.5.1	BELANJA OPERASI	107.103.300,00	98.345.051,00	(8.758.249,00)	91,82	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.01.0060.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.103.300,00	98.345.051,00	(8.758.249,00)	91,82	
1.01.02.1.01.0061	SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	360.573.400,00	325.700.855,00	(34.872.545,00)	90,33	
1.01.02.1.01.0061.5.1	BELANJA OPERASI	360.573.400,00	325.700.855,00	(34.872.545,00)	90,33	
1.01.02.1.01.0061.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.573.400,00	325.700.855,00	(34.872.545,00)	90,33	
1.01.02.1.01.0065	PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	153.439.300,00	136.085.233,00	(17.354.067,00)	88,69	
1.01.02.1.01.0065.5.1	BELANJA OPERASI	153.439.300,00	136.085.233,00	(17.354.067,00)	88,69	
1.01.02.1.01.0065.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.439.300,00	136.085.233,00	(17.354.067,00)	88,69	
1.01.02.1.01.0067	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	450.000.000,00	439.881.058,00	(10.118.942,00)	97,75	
1.01.02.1.01.0067.5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	439.881.058,00	(10.118.942,00)	97,75	
1.01.02.1.01.0067.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	439.881.058,00	(10.118.942,00)	97,75	
1.01.02.1.01.0068	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	2.850.000.000,00	2.768.891.949,00	(81.108.051,00)	97,15	
1.01.02.1.01.0068.5.2	BELANJA MODAL	2.850.000.000,00	2.768.891.949,00	(81.108.051,00)	97,15	
1.01.02.1.01.0068.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.850.000.000,00	2.768.891.949,00	(81.108.051,00)	97,15	
1.01.02.1.01.0070	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM	600.000.000,00	587.279.000,00	(12.721.000,00)	97,88	
1.01.02.1.01.0070.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	587.279.000,00	(12.721.000,00)	97,88	
1.01.02.1.01.0070.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	587.279.000,00	(12.721.000,00)	97,88	
1.01.02.1.01.0072	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	17.300.000.000,00	16.920.666.060,00	(379.333.940,00)	97,81	
1.01.02.1.01.0072.5.2	BELANJA MODAL	17.300.000.000,00	16.920.666.060,00	(379.333.940,00)	97,81	
1.01.02.1.01.0072.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.300.000.000,00	16.920.666.060,00	(379.333.940,00)	97,81	
1.01.02.1.01.0075	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	334.973.950,00	283.231.648,00	(51.742.302,00)	84,55	
1.01.02.1.01.0075.5.1	BELANJA OPERASI	334.973.950,00	283.231.648,00	(51.742.302,00)	84,55	
1.01.02.1.01.0075.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.973.950,00	283.231.648,00	(51.742.302,00)	84,55	
1.01.02.1.01.0078	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	207.940.000,00	182.830.000,00	(25.110.000,00)	87,92	
1.01.02.1.01.0078.5.1	BELANJA OPERASI	207.940.000,00	182.830.000,00	(25.110.000,00)	87,92	
1.01.02.1.01.0078.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.940.000,00	182.830.000,00	(25.110.000,00)	87,92	
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	1.053.035.624.376,00	910.546.129.011,24	(142.489.495.364,76)	86,47	
1.01.02.1.02.0001	PEMBANGUNAN USB (UNIT SEKOLAH BARU)	109.333.278.200,00	55.258.913.538,00	(54.074.364.662,00)	50,54	
1.01.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	109.333.278.200,00	55.258.913.538,00	(54.074.364.662,00)	50,54	
1.01.02.1.02.0001.5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.175.778.200,00	35.256.067.089,00	(39.919.711.111,00)	46,90	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.02.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.157.500.000,00	20.002.846.449,00	(14.154.653.551,00)	58,56	
1.01.02.1.02.0003	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	3.500.000.000,00	3.363.918.510,00	(136.081.490,00)	96,11	
1.01.02.1.02.0003.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000.000,00	3.363.918.510,00	(136.081.490,00)	96,11	
1.01.02.1.02.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000,00	3.363.918.510,00	(136.081.490,00)	96,11	
1.01.02.1.02.0004	PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	3.679.536.802,00	3.527.147.329,00	(152.389.473,00)	95,86	
1.01.02.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	3.679.536.802,00	3.527.147.329,00	(152.389.473,00)	95,86	
1.01.02.1.02.0004.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.679.536.802,00	3.527.147.329,00	(152.389.473,00)	95,86	
1.01.02.1.02.0005	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM	1.116.000.000,00	175.600.619,00	(940.399.381,00)	15,73	
1.01.02.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	1.116.000.000,00	175.600.619,00	(940.399.381,00)	15,73	
1.01.02.1.02.0005.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.116.000.000,00	175.600.619,00	(940.399.381,00)	15,73	
1.01.02.1.02.0008	PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	4.060.000.000,00	3.835.700.315,00	(224.299.685,00)	94,48	
1.01.02.1.02.0008.5.2	BELANJA MODAL	4.060.000.000,00	3.835.700.315,00	(224.299.685,00)	94,48	
1.01.02.1.02.0008.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.060.000.000,00	3.835.700.315,00	(224.299.685,00)	94,48	
1.01.02.1.02.0010	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	25.045.640.000,00	23.565.345.011,00	(1.480.294.989,00)	94,09	
1.01.02.1.02.0010.5.2	BELANJA MODAL	25.045.640.000,00	23.565.345.011,00	(1.480.294.989,00)	94,09	
1.01.02.1.02.0010.5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.675.000.000,00	1.778.279.539,00	(896.720.461,00)	66,48	
1.01.02.1.02.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.370.640.000,00	21.787.065.472,00	(583.574.528,00)	97,39	
1.01.02.1.02.0011	PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	416.840.000,00	414.460.630,00	(2.379.370,00)	99,43	
1.01.02.1.02.0011.5.2	BELANJA MODAL	416.840.000,00	414.460.630,00	(2.379.370,00)	99,43	
1.01.02.1.02.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	416.840.000,00	414.460.630,00	(2.379.370,00)	99,43	
1.01.02.1.02.0018	REHABILITASI RUANG LABORATORIUM	1.240.000.000,00	1.174.154.980,00	(65.845.020,00)	94,69	
1.01.02.1.02.0018.5.2	BELANJA MODAL	1.240.000.000,00	1.174.154.980,00	(65.845.020,00)	94,69	
1.01.02.1.02.0018.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.240.000.000,00	1.174.154.980,00	(65.845.020,00)	94,69	
1.01.02.1.02.0019	REHABILITASI RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	192.000.000,00	164.638.204,00	(27.361.796,00)	85,75	
1.01.02.1.02.0019.5.2	BELANJA MODAL	192.000.000,00	164.638.204,00	(27.361.796,00)	85,75	
1.01.02.1.02.0019.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.000.000,00	164.638.204,00	(27.361.796,00)	85,75	
1.01.02.1.02.0028	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	14.015.889.000,00	13.650.933.836,00	(364.955.164,00)	97,40	
1.01.02.1.02.0028.5.2	BELANJA MODAL	14.015.889.000,00	13.650.933.836,00	(364.955.164,00)	97,40	
1.01.02.1.02.0028.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.015.889.000,00	13.650.933.836,00	(364.955.164,00)	97,40	
1.01.02.1.02.0031	PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	137.639.500,00	109.545.750,00	(28.093.750,00)	79,59	
1.01.02.1.02.0031.5.1	BELANJA OPERASI	137.639.500,00	109.545.750,00	(28.093.750,00)	79,59	
1.01.02.1.02.0031.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.639.500,00	109.545.750,00	(28.093.750,00)	79,59	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.02.0033	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	115.251.140.000,00	109.707.343.354,24	(5.543.796.645,76)	95,19	
1.01.02.1.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.151.000,00	573.624.291,00	(860.526.709,00)	40,00	
1.01.02.1.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.151.000,00	573.624.291,00	(860.526.709,00)	40,00	
1.01.02.1.02.0033.5.2	BELANJA MODAL	113.816.989.000,00	109.133.719.063,24	(4.683.269.936,76)	95,89	
1.01.02.1.02.0033.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.816.989.000,00	109.133.719.063,24	(4.683.269.936,76)	95,89	
1.01.02.1.02.0037	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	80.526.000.000,00	74.376.820.000,00	(6.149.180.000,00)	92,36	
1.01.02.1.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	80.526.000.000,00	74.376.820.000,00	(6.149.180.000,00)	92,36	
1.01.02.1.02.0037.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.526.000.000,00	74.376.820.000,00	(6.149.180.000,00)	92,36	
1.01.02.1.02.0037.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.02.0041	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	3.134.280.860,00	2.563.043.014,00	(571.237.846,00)	81,77	
1.01.02.1.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.134.280.860,00	2.563.043.014,00	(571.237.846,00)	81,77	
1.01.02.1.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.134.280.860,00	2.563.043.014,00	(571.237.846,00)	81,77	
1.01.02.1.02.0042	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	251.649.714.064,00	193.976.846.426,00	(57.672.867.638,00)	77,08	
1.01.02.1.02.0042.5.1	BELANJA OPERASI	251.649.714.064,00	193.976.846.426,00	(57.672.867.638,00)	77,08	
1.01.02.1.02.0042.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.649.714.064,00	193.976.846.426,00	(57.672.867.638,00)	77,08	
1.01.02.1.02.0043	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	969.543.200,00	958.505.595,00	(11.037.605,00)	98,86	
1.01.02.1.02.0043.5.1	BELANJA OPERASI	969.543.200,00	958.505.595,00	(11.037.605,00)	98,86	
1.01.02.1.02.0043.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.543.200,00	958.505.595,00	(11.037.605,00)	98,86	
1.01.02.1.02.0045	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	461.870.000,00	348.952.494,00	(112.917.506,00)	75,55	
1.01.02.1.02.0045.5.1	BELANJA OPERASI	461.870.000,00	348.952.494,00	(112.917.506,00)	75,55	
1.01.02.1.02.0045.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.870.000,00	348.952.494,00	(112.917.506,00)	75,55	
1.01.02.1.02.0046	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	422.324.930.000,00	413.932.692.618,00	(8.392.237.382,00)	98,01	
1.01.02.1.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	378.212.687.897,00	370.041.282.635,00	(8.171.405.262,00)	97,84	
1.01.02.1.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.405.243.077,00	109.488.170.494,00	(1.917.072.583,00)	98,28	
1.01.02.1.02.0046.5.1.05	Belanja Hibah	266.807.444.820,00	260.553.112.141,00	(6.254.332.679,00)	97,66	
1.01.02.1.02.0046.5.2	BELANJA MODAL	44.112.242.103,00	43.891.409.983,00	(220.832.120,00)	99,50	
1.01.02.1.02.0046.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.199.601.853,00	27.696.842.153,00	(502.759.700,00)	98,22	
1.01.02.1.02.0046.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.912.640.250,00	16.194.567.830,00	281.927.580,00	101,77	
1.01.02.1.02.0047	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	531.616.450,00	344.200.520,00	(187.415.930,00)	64,75	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.02.0047.5.1	BELANJA OPERASI	531.616.450,00	344.200.520,00	(187.415.930,00)	64,75	
1.01.02.1.02.0047.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.616.450,00	344.200.520,00	(187.415.930,00)	64,75	
1.01.02.1.02.0050	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.02.0050.5.1	BELANJA OPERASI	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.02.0050.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.565.000,00	34.331.000,00	(234.000,00)	99,32	
1.01.02.1.02.0051	PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	36.740.000,00	32.330.000,00	(4.410.000,00)	88,00	
1.01.02.1.02.0051.5.1	BELANJA OPERASI	36.740.000,00	32.330.000,00	(4.410.000,00)	88,00	
1.01.02.1.02.0051.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.740.000,00	32.330.000,00	(4.410.000,00)	88,00	
1.01.02.1.02.0052	PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.02.0052.5.1	BELANJA OPERASI	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.02.0052.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.925.000,00	44.407.200,00	(1.517.800,00)	96,70	
1.01.02.1.02.0053	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	109.869.250,00	89.784.507,00	(20.084.743,00)	81,72	
1.01.02.1.02.0053.5.1	BELANJA OPERASI	109.869.250,00	89.784.507,00	(20.084.743,00)	81,72	
1.01.02.1.02.0053.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.869.250,00	89.784.507,00	(20.084.743,00)	81,72	
1.01.02.1.02.0054	SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	357.246.100,00	317.727.723,00	(39.518.377,00)	88,94	
1.01.02.1.02.0054.5.1	BELANJA OPERASI	357.246.100,00	317.727.723,00	(39.518.377,00)	88,94	
1.01.02.1.02.0054.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.246.100,00	317.727.723,00	(39.518.377,00)	88,94	
1.01.02.1.02.0059	PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	196.684.250,00	167.770.456,00	(28.913.794,00)	85,30	
1.01.02.1.02.0059.5.1	BELANJA OPERASI	196.684.250,00	167.770.456,00	(28.913.794,00)	85,30	
1.01.02.1.02.0059.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.684.250,00	167.770.456,00	(28.913.794,00)	85,30	
1.01.02.1.02.0063	REHABILITASI RUANG PRAKTIK PESERTA DIDIK	2.622.000.000,00	1.299.471.166,00	(1.322.528.834,00)	49,56	
1.01.02.1.02.0063.5.2	BELANJA MODAL	2.622.000.000,00	1.299.471.166,00	(1.322.528.834,00)	49,56	
1.01.02.1.02.0063.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.622.000.000,00	1.299.471.166,00	(1.322.528.834,00)	49,56	
1.01.02.1.02.0064	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	6.883.160.000,00	2.402.540.610,00	(4.480.619.390,00)	34,90	
1.01.02.1.02.0064.5.2	BELANJA MODAL	6.883.160.000,00	2.402.540.610,00	(4.480.619.390,00)	34,90	
1.01.02.1.02.0064.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.883.160.000,00	2.402.540.610,00	(4.480.619.390,00)	34,90	
1.01.02.1.02.0069	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	3.880.000.000,00	3.652.802.731,00	(227.197.269,00)	94,14	
1.01.02.1.02.0069.5.2	BELANJA MODAL	3.880.000.000,00	3.652.802.731,00	(227.197.269,00)	94,14	
1.01.02.1.02.0069.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.880.000.000,00	3.652.802.731,00	(227.197.269,00)	94,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.02.0072	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR PESERTA DIDIK	618.729.750,00	503.379.790,00	(115.349.960,00)	81,36	
1.01.02.1.02.0072.5.1	BELANJA OPERASI	618.729.750,00	503.379.790,00	(115.349.960,00)	81,36	
1.01.02.1.02.0072.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.729.750,00	503.379.790,00	(115.349.960,00)	81,36	
1.01.02.1.02.0073	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	408.786.950,00	334.594.082,00	(74.192.868,00)	81,85	
1.01.02.1.02.0073.5.1	BELANJA OPERASI	408.786.950,00	334.594.082,00	(74.192.868,00)	81,85	
1.01.02.1.02.0073.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.786.950,00	334.594.082,00	(74.192.868,00)	81,85	
1.01.02.1.02.0075	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	256.000.000,00	218.227.003,00	(37.772.997,00)	85,24	
1.01.02.1.02.0075.5.2	BELANJA MODAL	256.000.000,00	218.227.003,00	(37.772.997,00)	85,24	
1.01.02.1.02.0075.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.000.000,00	218.227.003,00	(37.772.997,00)	85,24	
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	99.138.382.752,00	77.035.367.990,00	(22.103.014.762,00)	77,70	
1.01.02.1.03.0001	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	23.710.540.000,00	3.526.343.922,00	(20.184.196.078,00)	14,87	
1.01.02.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	23.710.540.000,00	3.526.343.922,00	(20.184.196.078,00)	14,87	
1.01.02.1.03.0001.5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.010.540.000,00	49.139.700,00	(19.961.400.300,00)	0,25	
1.01.02.1.03.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.700.000.000,00	3.477.204.222,00	(222.795.778,00)	93,98	
1.01.02.1.03.0035	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.322.460.000,00	1.286.122.781,00	(36.337.219,00)	97,25	
1.01.02.1.03.0035.5.2	BELANJA MODAL	1.322.460.000,00	1.286.122.781,00	(36.337.219,00)	97,25	
1.01.02.1.03.0035.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.322.460.000,00	1.286.122.781,00	(36.337.219,00)	97,25	
1.01.02.1.03.0037	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	2.582.150.000,00	2.483.023.399,00	(99.126.601,00)	96,16	
1.01.02.1.03.0037.5.1	BELANJA OPERASI	1.891.903.000,00	1.803.056.771,00	(88.846.229,00)	95,30	
1.01.02.1.03.0037.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.891.903.000,00	1.803.056.771,00	(88.846.229,00)	95,30	
1.01.02.1.03.0037.5.2	BELANJA MODAL	690.247.000,00	679.966.628,00	(10.280.372,00)	98,51	
1.01.02.1.03.0037.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.247.000,00	679.966.628,00	(10.280.372,00)	98,51	
1.01.02.1.03.0044	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KHUSUS	7.097.250.000,00	6.948.479.000,00	(148.771.000,00)	97,90	
1.01.02.1.03.0044.5.1	BELANJA OPERASI	7.097.250.000,00	6.948.479.000,00	(148.771.000,00)	97,90	
1.01.02.1.03.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.097.250.000,00	6.948.479.000,00	(148.771.000,00)	97,90	
1.01.02.1.03.0044.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.03.0048	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	5.628.195.900,00	5.401.793.630,00	(226.402.270,00)	95,98	
1.01.02.1.03.0048.5.1	BELANJA OPERASI	5.628.195.900,00	5.401.793.630,00	(226.402.270,00)	95,98	
1.01.02.1.03.0048.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.628.195.900,00	5.401.793.630,00	(226.402.270,00)	95,98	
1.01.02.1.03.0049	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	21.226.499.352,00	20.466.824.460,00	(759.674.892,00)	96,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.03.0049.5.1	BELANJA OPERASI	21.226.499.352,00	20.466.824.460,00	(759.674.892,00)	96,42	
1.01.02.1.03.0049.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.226.499.352,00	20.466.824.460,00	(759.674.892,00)	96,42	
1.01.02.1.03.0050	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	113.228.750,00	96.207.200,00	(17.021.550,00)	84,97	
1.01.02.1.03.0050.5.1	BELANJA OPERASI	113.228.750,00	96.207.200,00	(17.021.550,00)	84,97	
1.01.02.1.03.0050.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.228.750,00	96.207.200,00	(17.021.550,00)	84,97	
1.01.02.1.03.0051	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	149.869.000,00	132.026.000,00	(17.843.000,00)	88,09	
1.01.02.1.03.0051.5.1	BELANJA OPERASI	149.869.000,00	132.026.000,00	(17.843.000,00)	88,09	
1.01.02.1.03.0051.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.869.000,00	132.026.000,00	(17.843.000,00)	88,09	
1.01.02.1.03.0052	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	33.367.470.000,00	33.069.917.768,00	(297.552.232,00)	99,11	
1.01.02.1.03.0052.5.1	BELANJA OPERASI	31.443.343.670,00	31.141.361.438,00	(301.982.232,00)	99,04	
1.01.02.1.03.0052.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.356.663.670,00	4.345.349.920,00	(11.313.750,00)	99,74	
1.01.02.1.03.0052.5.1.05	Belanja Hibah	27.086.680.000,00	26.796.011.518,00	(290.668.482,00)	98,93	
1.01.02.1.03.0052.5.2	BELANJA MODAL	1.924.126.330,00	1.928.556.330,00	4.430.000,00	100,23	
1.01.02.1.03.0052.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.305.098.080,00	1.305.903.080,00	805.000,00	100,06	
1.01.02.1.03.0052.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	619.028.250,00	622.653.250,00	3.625.000,00	100,59	
1.01.02.1.03.0053	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	24.366.750,00	24.190.000,00	(176.750,00)	99,27	
1.01.02.1.03.0053.5.1	BELANJA OPERASI	24.366.750,00	24.190.000,00	(176.750,00)	99,27	
1.01.02.1.03.0053.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.366.750,00	24.190.000,00	(176.750,00)	99,27	
1.01.02.1.03.0056	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	20.000.000,00	19.752.000,00	(248.000,00)	98,76	
1.01.02.1.03.0056.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.752.000,00	(248.000,00)	98,76	
1.01.02.1.03.0056.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.752.000,00	(248.000,00)	98,76	
1.01.02.1.03.0057	PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	8.870.000,00	8.152.000,00	(718.000,00)	91,91	
1.01.02.1.03.0057.5.1	BELANJA OPERASI	8.870.000,00	8.152.000,00	(718.000,00)	91,91	
1.01.02.1.03.0057.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.870.000,00	8.152.000,00	(718.000,00)	91,91	
1.01.02.1.03.0058	PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	6.205.000,00	6.114.000,00	(91.000,00)	98,53	
1.01.02.1.03.0058.5.1	BELANJA OPERASI	6.205.000,00	6.114.000,00	(91.000,00)	98,53	
1.01.02.1.03.0058.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	6.114.000,00	(91.000,00)	98,53	
1.01.02.1.03.0059	KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	19.030.000,00	15.175.000,00	(3.855.000,00)	79,74	
1.01.02.1.03.0059.5.1	BELANJA OPERASI	19.030.000,00	15.175.000,00	(3.855.000,00)	79,74	
1.01.02.1.03.0059.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.030.000,00	15.175.000,00	(3.855.000,00)	79,74	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.1.03.0060	SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	248.855.100,00	189.617.095,00	(59.238.005,00)	76,20	
1.01.02.1.03.0060.5.1	BELANJA OPERASI	248.855.100,00	189.617.095,00	(59.238.005,00)	76,20	
1.01.02.1.03.0060.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.855.100,00	189.617.095,00	(59.238.005,00)	76,20	
1.01.02.1.03.0066	PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	49.170.000,00	26.566.500,00	(22.603.500,00)	54,03	
1.01.02.1.03.0066.5.1	BELANJA OPERASI	49.170.000,00	26.566.500,00	(22.603.500,00)	54,03	
1.01.02.1.03.0066.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.170.000,00	26.566.500,00	(22.603.500,00)	54,03	
1.01.02.1.03.0070	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.933.490.250,00	2.823.362.210,00	(110.128.040,00)	96,25	
1.01.02.1.03.0070.5.1	BELANJA OPERASI	11.741.250,00	10.208.250,00	(1.533.000,00)	86,94	
1.01.02.1.03.0070.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.741.250,00	10.208.250,00	(1.533.000,00)	86,94	
1.01.02.1.03.0070.5.2	BELANJA MODAL	2.921.749.000,00	2.813.153.960,00	(108.595.040,00)	96,28	
1.01.02.1.03.0070.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.921.749.000,00	2.813.153.960,00	(108.595.040,00)	96,28	
1.01.02.1.03.0071	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	391.001.000,00	306.708.600,00	(84.292.400,00)	78,44	
1.01.02.1.03.0071.5.1	BELANJA OPERASI	391.001.000,00	306.708.600,00	(84.292.400,00)	78,44	
1.01.02.1.03.0071.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.001.000,00	306.708.600,00	(84.292.400,00)	78,44	
1.01.02.1.03.0073	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	239.731.650,00	204.992.425,00	(34.739.225,00)	85,51	
1.01.02.1.03.0073.5.1	BELANJA OPERASI	239.731.650,00	204.992.425,00	(34.739.225,00)	85,51	
1.01.02.1.03.0073.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.731.650,00	204.992.425,00	(34.739.225,00)	85,51	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	253.969.800,00	176.846.031,00	(77.123.769,00)	69,63	
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	78.136.800,00	34.334.931,00	(43.801.869,00)	43,94	
1.01.03.1.01.0003	PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	70.000.000,00	34.334.931,00	(35.665.069,00)	49,05	
1.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	34.334.931,00	(35.665.069,00)	49,05	
1.01.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	34.334.931,00	(35.665.069,00)	49,05	
1.01.03.1.01.0004	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	8.136.800,00	0,00	(8.136.800,00)	0,00	
1.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.136.800,00	0,00	(8.136.800,00)	0,00	
1.01.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.136.800,00	0,00	(8.136.800,00)	0,00	
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	175.833.000,00	142.511.100,00	(33.321.900,00)	81,05	
1.01.03.1.02.0003	PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	70.000.000,00	62.271.000,00	(7.729.000,00)	88,96	
1.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	62.271.000,00	(7.729.000,00)	88,96	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	62.271.000,00	(7.729.000,00)	88,96	
1.01.03.1.02.0004	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	105.833.000,00	80.240.100,00	(25.592.900,00)	75,82	
1.01.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	105.833.000,00	80.240.100,00	(25.592.900,00)	75,82	
1.01.03.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.833.000,00	80.240.100,00	(25.592.900,00)	75,82	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	875.415.500,00	833.220.000,00	(42.195.500,00)	95,18	
1.01.04.1.01	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	875.415.500,00	833.220.000,00	(42.195.500,00)	95,18	
1.01.04.1.01.0001	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	39.519.000,00	27.300.000,00	(12.219.000,00)	69,08	
1.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	39.519.000,00	27.300.000,00	(12.219.000,00)	69,08	
1.01.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.519.000,00	27.300.000,00	(12.219.000,00)	69,08	
1.01.04.1.01.0002	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	835.896.500,00	805.920.000,00	(29.976.500,00)	96,41	
1.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	835.896.500,00	805.920.000,00	(29.976.500,00)	96,41	
1.01.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	835.896.500,00	805.920.000,00	(29.976.500,00)	96,41	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	159.669.000,00	87.041.180,00	(72.627.820,00)	54,51	
1.01.05.1.01	PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	100.123.000,00	38.558.000,00	(61.565.000,00)	38,51	
1.01.05.1.01.0001	PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	50.023.000,00	25.358.000,00	(24.665.000,00)	50,69	
1.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.023.000,00	25.358.000,00	(24.665.000,00)	50,69	
1.01.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.023.000,00	25.358.000,00	(24.665.000,00)	50,69	
1.01.05.1.01.0002	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	50.100.000,00	13.200.000,00	(36.900.000,00)	26,35	
1.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.100.000,00	13.200.000,00	(36.900.000,00)	26,35	
1.01.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	13.200.000,00	(36.900.000,00)	26,35	
1.01.05.1.02	PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	59.546.000,00	48.483.180,00	(11.062.820,00)	81,42	
1.01.05.1.02.0001	PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	25.452.000,00	15.339.630,00	(10.112.370,00)	60,27	
1.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.452.000,00	15.339.630,00	(10.112.370,00)	60,27	
1.01.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.452.000,00	15.339.630,00	(10.112.370,00)	60,27	
1.01.05.1.02.0002	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	34.094.000,00	33.143.550,00	(950.450,00)	97,21	
1.01.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	34.094.000,00	33.143.550,00	(950.450,00)	97,21	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.05.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.094.000,00	33.143.550,00	(950.450,00)	97,21	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	416.980.400,00	359.954.728,00	(57.025.672,00)	86,32	
2.22.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	20.072.000,00	14.150.198,00	(5.921.802,00)	70,50	
2.22.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.072.000,00	14.150.198,00	(5.921.802,00)	70,50	
2.22.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	20.072.000,00	14.150.198,00	(5.921.802,00)	70,50	
2.22.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.072.000,00	14.150.198,00	(5.921.802,00)	70,50	
2.22.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	40.000.000,00	30.955.500,00	(9.044.500,00)	77,39	
2.22.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	40.000.000,00	30.955.500,00	(9.044.500,00)	77,39	
2.22.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	30.955.500,00	(9.044.500,00)	77,39	
2.22.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	30.955.500,00	(9.044.500,00)	77,39	
2.22.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	316.908.400,00	275.721.830,00	(41.186.570,00)	87,00	
2.22.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.186.300,00	0,00	(33.186.300,00)	0,00	
2.22.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	33.186.300,00	0,00	(33.186.300,00)	0,00	
2.22.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.186.300,00	0,00	(33.186.300,00)	0,00	
2.22.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.822.100,00	66.071.830,00	(5.750.270,00)	91,99	
2.22.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	71.822.100,00	66.071.830,00	(5.750.270,00)	91,99	
2.22.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.822.100,00	66.071.830,00	(5.750.270,00)	91,99	
2.22.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	211.900.000,00	209.650.000,00	(2.250.000,00)	98,94	
2.22.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	211.900.000,00	209.650.000,00	(2.250.000,00)	98,94	
2.22.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.900.000,00	209.650.000,00	(2.250.000,00)	98,94	
2.22.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.000.000,00	39.127.200,00	(872.800,00)	97,82	
2.22.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.000.000,00	19.347.000,00	(653.000,00)	96,74	
2.22.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.347.000,00	(653.000,00)	96,74	
2.22.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.347.000,00	(653.000,00)	96,74	
2.22.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.780.200,00	(219.800,00)	98,90	
2.22.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.780.200,00	(219.800,00)	98,90	
2.22.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.780.200,00	(219.800,00)	98,90	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.435.850.700,00	3.325.831.914,00	(110.018.786,00)	96,80	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.02.1.01	PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	524.413.100,00	511.456.790,00	(12.956.310,00)	97,53	
2.22.02.1.01.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	276.830.600,00	268.881.690,00	(7.948.910,00)	97,13	
2.22.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	276.830.600,00	268.881.690,00	(7.948.910,00)	97,13	
2.22.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.830.600,00	268.881.690,00	(7.948.910,00)	97,13	
2.22.02.1.01.0002	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	237.582.500,00	232.658.100,00	(4.924.400,00)	97,93	
2.22.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	237.582.500,00	232.658.100,00	(4.924.400,00)	97,93	
2.22.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.582.500,00	232.658.100,00	(4.924.400,00)	97,93	
2.22.02.1.01.0003	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN BUDAYA	10.000.000,00	9.917.000,00	(83.000,00)	99,17	
2.22.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.917.000,00	(83.000,00)	99,17	
2.22.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.917.000,00	(83.000,00)	99,17	
2.22.02.1.02	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI	889.316.200,00	858.343.400,00	(30.972.800,00)	96,52	
2.22.02.1.02.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	660.400.000,00	645.450.000,00	(14.950.000,00)	97,74	
2.22.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	660.400.000,00	645.450.000,00	(14.950.000,00)	97,74	
2.22.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.400.000,00	645.450.000,00	(14.950.000,00)	97,74	
2.22.02.1.02.0002	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	102.483.400,00	99.883.400,00	(2.600.000,00)	97,46	
2.22.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	102.483.400,00	99.883.400,00	(2.600.000,00)	97,46	
2.22.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.483.400,00	99.883.400,00	(2.600.000,00)	97,46	
2.22.02.1.02.0003	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	126.432.800,00	113.010.000,00	(13.422.800,00)	89,38	
2.22.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	126.432.800,00	113.010.000,00	(13.422.800,00)	89,38	
2.22.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.432.800,00	113.010.000,00	(13.422.800,00)	89,38	
2.22.02.1.03	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.022.121.400,00	1.956.031.724,00	(66.089.676,00)	96,73	
2.22.02.1.03.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	1.799.149.500,00	1.755.720.173,00	(43.429.327,00)	97,59	
2.22.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.799.149.500,00	1.755.720.173,00	(43.429.327,00)	97,59	
2.22.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.149.500,00	1.755.720.173,00	(43.429.327,00)	97,59	
2.22.02.1.03.0002	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	212.971.900,00	190.971.500,00	(22.000.400,00)	89,67	
2.22.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	212.971.900,00	190.971.500,00	(22.000.400,00)	89,67	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.971.900,00	190.971.500,00	(22.000.400,00)	89,67	
2.22.02.1.03.0003	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	10.000.000,00	9.340.051,00	(659.949,00)	93,40	
2.22.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.340.051,00	(659.949,00)	93,40	
2.22.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.340.051,00	(659.949,00)	93,40	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.283.909.300,00	1.258.011.155,00	(25.898.145,00)	97,98	
2.22.05.1.01	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	164.830.000,00	162.713.000,00	(2.117.000,00)	98,72	
2.22.05.1.01.0001	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	54.400.000,00	54.080.000,00	(320.000,00)	99,41	
2.22.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	54.400.000,00	54.080.000,00	(320.000,00)	99,41	
2.22.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	54.080.000,00	(320.000,00)	99,41	
2.22.05.1.01.0002	PENETAPAN CAGAR BUDAYA	110.430.000,00	108.633.000,00	(1.797.000,00)	98,37	
2.22.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.430.000,00	108.633.000,00	(1.797.000,00)	98,37	
2.22.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.430.000,00	108.633.000,00	(1.797.000,00)	98,37	
2.22.05.1.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	1.065.517.000,00	1.046.062.305,00	(19.454.695,00)	98,17	
2.22.05.1.02.0001	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	115.000.000,00	113.428.200,00	(1.571.800,00)	98,63	
2.22.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	113.428.200,00	(1.571.800,00)	98,63	
2.22.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	113.428.200,00	(1.571.800,00)	98,63	
2.22.05.1.02.0002	PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA	200.947.000,00	195.218.057,00	(5.728.943,00)	97,15	
2.22.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.947.000,00	195.218.057,00	(5.728.943,00)	97,15	
2.22.05.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.947.000,00	195.218.057,00	(5.728.943,00)	97,15	
2.22.05.1.02.0003	PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA	499.246.000,00	492.038.686,00	(7.207.314,00)	98,56	
2.22.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	499.246.000,00	492.038.686,00	(7.207.314,00)	98,56	
2.22.05.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.246.000,00	492.038.686,00	(7.207.314,00)	98,56	
2.22.05.1.02.0004	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PELESTARI CAGAR BUDAYA	250.324.000,00	245.377.362,00	(4.946.638,00)	98,02	
2.22.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	250.324.000,00	245.377.362,00	(4.946.638,00)	98,02	
2.22.05.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.324.000,00	245.377.362,00	(4.946.638,00)	98,02	
2.22.05.1.03	PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH PROVINSI	53.562.300,00	49.235.850,00	(4.326.450,00)	91,92	
2.22.05.1.03.0001	PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH PROVINSI	22.353.400,00	19.345.850,00	(3.007.550,00)	86,55	
2.22.05.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.353.400,00	19.345.850,00	(3.007.550,00)	86,55	
2.22.05.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.353.400,00	19.345.850,00	(3.007.550,00)	86,55	
2.22.05.1.03.0002	EVALUASI DAN PENGAWASAN CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH PROVINSI	31.208.900,00	29.890.000,00	(1.318.900,00)	95,77	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.05.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	31.208.900,00	29.890.000,00	(1.318.900,00)	95,77	
2.22.05.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.208.900,00	29.890.000,00	(1.318.900,00)	95,77	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.837.441.200,00	2.605.953.794,00	(231.487.406,00)	91,84	
2.22.06.1.01	PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	2.837.441.200,00	2.605.953.794,00	(231.487.406,00)	91,84	
2.22.06.1.01.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KOLEKSI SECARA TERPADU	2.172.959.200,00	2.032.174.400,00	(140.784.800,00)	93,52	
2.22.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.172.959.200,00	2.032.174.400,00	(140.784.800,00)	93,52	
2.22.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.172.959.200,00	2.032.174.400,00	(140.784.800,00)	93,52	
2.22.06.1.01.0002	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	307.378.700,00	228.211.779,00	(79.166.921,00)	74,24	
2.22.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	307.378.700,00	228.211.779,00	(79.166.921,00)	74,24	
2.22.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.378.700,00	228.211.779,00	(79.166.921,00)	74,24	
2.22.06.1.01.0003	PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	32.346.300,00	31.257.515,00	(1.088.785,00)	96,63	
2.22.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	32.346.300,00	31.257.515,00	(1.088.785,00)	96,63	
2.22.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.346.300,00	31.257.515,00	(1.088.785,00)	96,63	
2.22.06.1.01.0004	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	149.793.000,00	142.492.000,00	(7.301.000,00)	95,13	
2.22.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.618.000,00	25.142.000,00	(476.000,00)	98,14	
2.22.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.618.000,00	25.142.000,00	(476.000,00)	98,14	
2.22.06.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	124.175.000,00	117.350.000,00	(6.825.000,00)	94,50	
2.22.06.1.01.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.175.000,00	117.350.000,00	(6.825.000,00)	94,50	
2.22.06.1.01.0005	REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	174.964.000,00	171.818.100,00	(3.145.900,00)	98,20	
2.22.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.552.000,00	148.108.500,00	(2.443.500,00)	98,38	
2.22.06.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.552.000,00	148.108.500,00	(2.443.500,00)	98,38	
2.22.06.1.01.0005.5.2	BELANJA MODAL	24.412.000,00	23.709.600,00	(702.400,00)	97,12	
2.22.06.1.01.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.412.000,00	23.709.600,00	(702.400,00)	97,12	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.164.034.551.270,00	2.958.868.330.838,88	(205.166.220.431,12)	93,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.162.757.829.456,00)	(2.957.182.289.184,88)	205.575.540.271,12	93,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.162.757.829.456,00)	(2.957.182.289.184,88)	205.575.540.271,12	93,50	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000.000,00	2.129.466.000,00	379.466.000,00	121,68	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000.000,00	2.129.466.000,00	379.466.000,00	121,68	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.750.000.000,00	2.129.466.000,00	379.466.000,00	121,68	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.454.408.019,00	54.484.435.876,00	(969.972.143,00)	98,25	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	577.846.200,00	547.322.960,00	(30.523.240,00)	94,72	
1.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	245.119.000,00	227.164.814,00	(17.954.186,00)	92,68	
1.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	245.119.000,00	227.164.814,00	(17.954.186,00)	92,68	
1.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.119.000,00	227.164.814,00	(17.954.186,00)	92,68	
1.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	6.910.000,00	6.140.000,00	(770.000,00)	88,86	
1.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.910.000,00	6.140.000,00	(770.000,00)	88,86	
1.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.910.000,00	6.140.000,00	(770.000,00)	88,86	
1.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.430.000,00	6.428.890,00	(1.110,00)	99,98	
1.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.430.000,00	6.428.890,00	(1.110,00)	99,98	
1.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	6.428.890,00	(1.110,00)	99,98	
1.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.990.000,00	9.973.785,00	(16.215,00)	99,84	
1.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.973.785,00	(16.215,00)	99,84	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.973.785,00	(16.215,00)	99,84	
1.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.977.200,00	10.954.183,00	(23.017,00)	99,79	
1.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.977.200,00	10.954.183,00	(23.017,00)	99,79	
1.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.977.200,00	10.954.183,00	(23.017,00)	99,79	
1.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.600.000,00	24.480.376,00	(119.624,00)	99,51	
1.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	24.480.376,00	(119.624,00)	99,51	
1.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.480.376,00	(119.624,00)	99,51	
1.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	209.081.000,00	199.901.912,00	(9.179.088,00)	95,61	
1.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	209.081.000,00	199.901.912,00	(9.179.088,00)	95,61	
1.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.081.000,00	199.901.912,00	(9.179.088,00)	95,61	
1.02.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	37.170.000,00	34.710.000,00	(2.460.000,00)	93,38	
1.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	37.170.000,00	34.710.000,00	(2.460.000,00)	93,38	
1.02.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.170.000,00	34.710.000,00	(2.460.000,00)	93,38	
1.02.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	34.139.339.619,00	33.757.432.156,00	(381.907.463,00)	98,88	
1.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	33.430.335.219,00	33.053.664.790,00	(376.670.429,00)	98,87	
1.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.430.335.219,00	33.053.664.790,00	(376.670.429,00)	98,87	
1.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	33.430.335.219,00	33.053.664.790,00	(376.670.429,00)	98,87	
1.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	689.736.000,00	684.608.000,00	(5.128.000,00)	99,26	
1.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	689.736.000,00	684.608.000,00	(5.128.000,00)	99,26	
1.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.736.000,00	684.608.000,00	(5.128.000,00)	99,26	
1.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.178.800,00	6.142.470,00	(36.330,00)	99,41	
1.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.178.800,00	6.142.470,00	(36.330,00)	99,41	
1.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.178.800,00	6.142.470,00	(36.330,00)	99,41	
1.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.273.600,00	12.204.731,00	(68.869,00)	99,44	
1.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.273.600,00	12.204.731,00	(68.869,00)	99,44	
1.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.273.600,00	12.204.731,00	(68.869,00)	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	816.000,00	812.165,00	(3.835,00)	99,53	
1.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	816.000,00	812.165,00	(3.835,00)	99,53	
1.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.000,00	812.165,00	(3.835,00)	99,53	
1.02.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	41.450.000,00	(8.550.000,00)	82,90	
1.02.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.000.000,00	8.330.000,00	(1.670.000,00)	83,30	
1.02.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.330.000,00	(1.670.000,00)	83,30	
1.02.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.330.000,00	(1.670.000,00)	83,30	
1.02.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.560.000,00	(3.440.000,00)	82,80	
1.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52	
1.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52	
1.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52	
1.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.250.000,00	104.750.000,00	(500.000,00)	99,52	
1.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.994.395.000,00	1.807.649.929,00	(186.745.071,00)	90,64	
1.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	109.409.000,00	107.015.100,00	(2.393.900,00)	97,81	
1.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	109.409.000,00	107.015.100,00	(2.393.900,00)	97,81	
1.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.409.000,00	107.015.100,00	(2.393.900,00)	97,81	
1.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	439.571.200,00	434.775.260,00	(4.795.940,00)	98,91	
1.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	439.571.200,00	434.775.260,00	(4.795.940,00)	98,91	
1.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.571.200,00	434.775.260,00	(4.795.940,00)	98,91	
1.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	273.995.800,00	203.807.260,00	(70.188.540,00)	74,38	
1.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	273.995.800,00	203.807.260,00	(70.188.540,00)	74,38	
1.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.995.800,00	203.807.260,00	(70.188.540,00)	74,38	
1.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	685.186.000,00	676.645.340,00	(8.540.660,00)	98,75	
1.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	685.186.000,00	676.645.340,00	(8.540.660,00)	98,75	
1.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.186.000,00	676.645.340,00	(8.540.660,00)	98,75	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	150.163.000,00	150.103.230,00	(59.770,00)	99,96	
1.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.163.000,00	150.103.230,00	(59.770,00)	99,96	
1.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.163.000,00	150.103.230,00	(59.770,00)	99,96	
1.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	312.930.000,00	212.926.583,00	(100.003.417,00)	68,04	
1.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	312.930.000,00	212.926.583,00	(100.003.417,00)	68,04	
1.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.930.000,00	212.926.583,00	(100.003.417,00)	68,04	
1.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	23.140.000,00	22.377.156,00	(762.844,00)	96,70	
1.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	23.140.000,00	22.377.156,00	(762.844,00)	96,70	
1.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	22.377.156,00	(762.844,00)	96,70	
1.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.271.072.000,00	8.132.469.586,00	(138.602.414,00)	98,32	
1.02.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4.738.000.000,00	4.715.800.001,00	(22.199.999,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	4.738.000.000,00	4.715.800.001,00	(22.199.999,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.738.000.000,00	4.715.800.001,00	(22.199.999,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.533.072.000,00	3.416.669.585,00	(116.402.415,00)	96,71	
1.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.882.000,00	(118.000,00)	98,31	
1.02.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.882.000,00	(118.000,00)	98,31	
1.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	3.526.072.000,00	3.409.787.585,00	(116.284.415,00)	96,70	
1.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.526.072.000,00	3.409.787.585,00	(116.284.415,00)	96,70	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.416.590.200,00	7.341.898.969,00	(74.691.231,00)	98,99	
1.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	945.089.042,00	922.414.617,00	(22.674.425,00)	97,60	
1.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	945.089.042,00	922.414.617,00	(22.674.425,00)	97,60	
1.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.089.042,00	922.414.617,00	(22.674.425,00)	97,60	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.471.501.158,00	6.419.484.352,00	(52.016.806,00)	99,20	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.471.501.158,00	6.419.484.352,00	(52.016.806,00)	99,20	
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.501.158,00	6.419.484.352,00	(52.016.806,00)	99,20	
1.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.899.915.000,00	2.751.462.276,00	(148.452.724,00)	94,88	
1.02.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	80.176.000,00	80.176.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.176.000,00	80.176.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.176.000,00	80.176.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.163.196.000,00	1.131.337.020,00	(31.858.980,00)	97,26	
1.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.163.196.000,00	1.131.337.020,00	(31.858.980,00)	97,26	
1.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.196.000,00	1.131.337.020,00	(31.858.980,00)	97,26	
1.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	403.515.000,00	344.045.950,00	(59.469.050,00)	85,26	
1.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	403.515.000,00	344.045.950,00	(59.469.050,00)	85,26	
1.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.515.000,00	344.045.950,00	(59.469.050,00)	85,26	
1.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	770.000.000,00	768.808.000,00	(1.192.000,00)	99,85	
1.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	770.000.000,00	768.808.000,00	(1.192.000,00)	99,85	
1.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.000.000,00	768.808.000,00	(1.192.000,00)	99,85	
1.02.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	216.376.000,00	175.948.000,00	(40.428.000,00)	81,32	
1.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	216.376.000,00	175.948.000,00	(40.428.000,00)	81,32	
1.02.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.376.000,00	175.948.000,00	(40.428.000,00)	81,32	
1.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	266.652.000,00	251.147.306,00	(15.504.694,00)	94,19	
1.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	266.652.000,00	251.147.306,00	(15.504.694,00)	94,19	
1.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.652.000,00	251.147.306,00	(15.504.694,00)	94,19	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	459.548.370.513,00	458.710.983.979,00	(837.386.534,00)	99,82	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	60.341.464.093,00	60.174.762.197,00	(166.701.896,00)	99,72	
1.02.02.1.01.0001	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0020	PENYEDIAAN TELEMEDICINE DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	816.790.000,00	816.790.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0020.5.2	BELANJA MODAL	816.790.000,00	816.790.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.01.0020.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	816.790.000,00	816.790.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.01.0027	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	59.524.674.093,00	59.357.972.197,00	(166.701.896,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	59.524.674.093,00	59.357.972.197,00	(166.701.896,00)	99,72	
1.02.02.1.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.524.674.093,00	59.357.972.197,00	(166.701.896,00)	99,72	
1.02.02.1.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	382.497.505.020,00	381.896.809.763,00	(600.695.257,00)	99,84	
1.02.02.1.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	452.646.000,00	325.985.754,00	(126.660.246,00)	72,02	
1.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	452.646.000,00	325.985.754,00	(126.660.246,00)	72,02	
1.02.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.646.000,00	325.985.754,00	(126.660.246,00)	72,02	
1.02.02.1.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	202.900.000,00	202.579.503,00	(320.497,00)	99,84	
1.02.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	202.900.000,00	202.579.503,00	(320.497,00)	99,84	
1.02.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.900.000,00	202.579.503,00	(320.497,00)	99,84	
1.02.02.1.02.0003	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.000.797.000,00	1.000.718.393,00	(78.607,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.797.000,00	1.000.718.393,00	(78.607,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.797.000,00	1.000.718.393,00	(78.607,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT	30.892.000,00	30.892.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.892.000,00	30.892.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.892.000,00	30.892.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0006	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	781.440.000,00	781.435.908,00	(4.092,00)	100,00	
1.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	781.440.000,00	781.435.908,00	(4.092,00)	100,00	
1.02.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.440.000,00	781.435.908,00	(4.092,00)	100,00	
1.02.02.1.02.0007	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	574.681.000,00	539.542.431,00	(35.138.569,00)	93,89	
1.02.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	574.681.000,00	539.542.431,00	(35.138.569,00)	93,89	
1.02.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.681.000,00	539.542.431,00	(35.138.569,00)	93,89	
1.02.02.1.02.0008	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.102.577.000,00	1.010.761.484,00	(91.815.516,00)	91,67	
1.02.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.102.577.000,00	1.010.761.484,00	(91.815.516,00)	91,67	
1.02.02.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.577.000,00	1.010.761.484,00	(91.815.516,00)	91,67	
1.02.02.1.02.0010	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	721.888.600,00	721.830.005,00	(58.595,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	721.888.600,00	721.830.005,00	(58.595,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.888.600,00	721.830.005,00	(58.595,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	2.198.172.000,00	2.003.200.539,00	(194.971.461,00)	91,13	
1.02.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.198.172.000,00	2.003.200.539,00	(194.971.461,00)	91,13	
1.02.02.1.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.898.172.000,00	1.703.408.284,00	(194.763.716,00)	89,74	
1.02.02.1.02.0011.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	299.792.255,00	(207.745,00)	99,93	
1.02.02.1.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	37.255.600,00	37.255.600,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	37.255.600,00	37.255.600,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.255.600,00	37.255.600,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.0013	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	718.743.000,00	714.910.857,00	(3.832.143,00)	99,47	
1.02.02.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	718.743.000,00	714.910.857,00	(3.832.143,00)	99,47	
1.02.02.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.743.000,00	714.910.857,00	(3.832.143,00)	99,47	
1.02.02.1.02.0014	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN KECANDUAN NAPZA	124.558.000,00	124.545.811,00	(12.189,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	124.558.000,00	124.545.811,00	(12.189,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.558.000,00	124.545.811,00	(12.189,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0016	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	370.899.917.620,00	370.876.629.243,00	(23.288.377,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	370.899.917.620,00	370.876.629.243,00	(23.288.377,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.899.917.620,00	370.876.629.243,00	(23.288.377,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0017	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	154.551.000,00	154.244.800,00	(306.200,00)	99,80	
1.02.02.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	154.551.000,00	154.244.800,00	(306.200,00)	99,80	
1.02.02.1.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.551.000,00	154.244.800,00	(306.200,00)	99,80	
1.02.02.1.02.0019	PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1.792.431.000,00	1.703.285.825,00	(89.145.175,00)	95,03	
1.02.02.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	1.778.899.000,00	1.689.755.325,00	(89.143.675,00)	94,99	
1.02.02.1.02.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.899.000,00	1.689.755.325,00	(89.143.675,00)	94,99	
1.02.02.1.02.0019.5.2	BELANJA MODAL	13.532.000,00	13.530.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0019.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.532.000,00	13.530.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.02.02.1.02.0020	VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN PUSKESMAS UNTUK REGISTRASI PUSKESMAS	1.115.732.200,00	1.081.960.109,00	(33.772.091,00)	96,97	
1.02.02.1.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	1.115.732.200,00	1.081.960.109,00	(33.772.091,00)	96,97	
1.02.02.1.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.732.200,00	1.081.960.109,00	(33.772.091,00)	96,97	
1.02.02.1.02.0020.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.0020.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.0021	INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL OLEH KABUPATEN/KOTA	228.097.000,00	227.620.911,00	(476.089,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	228.097.000,00	227.620.911,00	(476.089,00)	99,79	
1.02.02.1.02.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.097.000,00	227.620.911,00	(476.089,00)	99,79	
1.02.02.1.02.0023	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	360.226.000,00	359.410.590,00	(815.410,00)	99,77	
1.02.02.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	360.226.000,00	359.410.590,00	(815.410,00)	99,77	
1.02.02.1.02.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.226.000,00	359.410.590,00	(815.410,00)	99,77	
1.02.02.1.04	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	16.709.401.400,00	16.639.412.019,00	(69.989.381,00)	99,58	
1.02.02.1.04.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	270.782.000,00	270.254.972,00	(527.028,00)	99,81	
1.02.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	270.782.000,00	270.254.972,00	(527.028,00)	99,81	
1.02.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.782.000,00	270.254.972,00	(527.028,00)	99,81	
1.02.02.1.04.0003	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	16.438.619.400,00	16.369.157.047,00	(69.462.353,00)	99,58	
1.02.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.208.491.000,00	6.139.028.647,00	(69.462.353,00)	98,88	
1.02.02.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.491.000,00	208.060.720,00	(430.280,00)	99,79	
1.02.02.1.04.0003.5.1.05	Belanja Hibah	6.000.000.000,00	5.930.967.927,00	(69.032.073,00)	98,85	
1.02.02.1.04.0003.5.2	BELANJA MODAL	10.230.128.400,00	10.230.128.400,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.04.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.230.128.400,00	10.230.128.400,00	0,00	100,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.354.392.256,00	18.638.024.983,00	(716.367.273,00)	96,30	
1.02.03.1.01	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	19.354.392.256,00	18.638.024.983,00	(716.367.273,00)	96,30	
1.02.03.1.01.0001	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.289.297.256,00	18.572.929.983,00	(716.367.273,00)	96,29	
1.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.289.297.256,00	18.572.929.983,00	(716.367.273,00)	96,29	
1.02.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.289.297.256,00	18.572.929.983,00	(716.367.273,00)	96,29	
1.02.03.1.01.0002	DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	100,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000,00	1.092.604.928,00	(4.292.072,00)	99,61	
1.02.04.1.01	PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56	
1.02.04.1.01.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56	
1.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.689.800,00	974.407.703,00	(4.282.097,00)	99,56	
1.02.04.1.02	PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99	
1.02.04.1.02.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99	
1.02.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99	
1.02.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.207.200,00	118.197.225,00	(9.975,00)	99,99	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000,00	968.397.813,00	(4.584.187,00)	99,53	
1.02.05.1.01	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46	
1.02.05.1.01.0001	PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46	
1.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46	
1.02.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.902.000,00	617.539.420,00	(3.362.580,00)	99,46	
1.02.05.1.02	PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65	
1.02.05.1.02.0001	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65	
1.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65	
1.02.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.080.000,00	350.858.393,00	(1.221.607,00)	99,65	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	536.427.049.788,00	533.894.447.579,00	(2.532.602.209,00)	99,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(534.677.049.788,00)	(531.764.981.579,00)	2.912.068.209,00	99,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(534.677.049.788,00)	(531.764.981.579,00)	2.912.068.209,00	99,46	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD BANTEN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD RSUD BANTEN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.700.000.000,00	241.401.348.405,14	28.701.348.405,14	113,49	
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	211.200.000.000,00	238.977.528.683,40	27.777.528.683,40	113,15	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000,00	2.423.819.721,74	923.819.721,74	161,59	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	212.700.000.000,00	241.401.348.405,14	28.701.348.405,14	113,49	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.683.702.628,00	288.484.283.497,00	(1.199.419.131,00)	99,59	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	(1.020.527.867,00)	98,54	
1.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	(1.020.527.867,00)	98,54	
1.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	(1.020.527.867,00)	98,54	
1.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	(1.020.527.867,00)	98,54	
1.02.01.1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	219.616.516.328,00	219.437.625.064,00	(178.891.264,00)	99,92	
1.02.01.1.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	219.616.516.328,00	219.437.625.064,00	(178.891.264,00)	99,92	
1.02.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	203.941.725.538,00	203.770.978.531,00	(170.747.007,00)	99,92	
1.02.01.1.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	44.610.331.521,00	44.447.932.879,00	(162.398.642,00)	99,64	
1.02.01.1.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.331.394.017,00	159.323.045.652,00	(8.348.365,00)	99,99	
1.02.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	15.674.790.790,00	15.666.646.533,00	(8.144.257,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.994.491.382,00	8.994.480.104,00	(11.278,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.743.100,00	222.728.800,00	(8.014.300,00)	96,53	
1.02.01.1.10.0001.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.449.556.308,00	6.449.437.629,00	(118.679,00)	100,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	(8.786.534,00)	99,63	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	(8.786.534,00)	99,63	
1.02.02.1.01.0010	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	(8.786.534,00)	99,63	
1.02.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	(8.786.534,00)	99,63	
1.02.02.1.01.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	(8.786.534,00)	99,63	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	292.036.202.628,00	290.827.996.963,00	(1.208.205.665,00)	99,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.336.202.628,00)	(49.426.648.557,86)	29.909.554.070,14	62,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(79.336.202.628,00)	(49.426.648.557,86)	29.909.554.070,14	62,30	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD MALINGPING

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RSUD MALINGPING

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.000.000.000,00	56.596.723.424,43	4.596.723.424,43	108,84	
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	51.736.000.000,00	56.377.299.245,24	4.641.299.245,24	108,97	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	264.000.000,00	219.424.179,19	(44.575.820,81)	83,12	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	52.000.000.000,00	56.596.723.424,43	4.596.723.424,43	108,84	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.933.782.839,00	102.344.477.943,00	(589.304.896,00)	99,43	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	33.597.402.067,00	33.112.352.777,00	(485.049.290,00)	98,56	
1.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	33.388.942.067,00	32.904.032.777,00	(484.909.290,00)	98,55	
1.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.388.942.067,00	32.904.032.777,00	(484.909.290,00)	98,55	
1.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	33.388.942.067,00	32.904.032.777,00	(484.909.290,00)	98,55	
1.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	208.460.000,00	208.320.000,00	(140.000,00)	99,93	
1.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	208.460.000,00	208.320.000,00	(140.000,00)	99,93	
1.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.460.000,00	208.320.000,00	(140.000,00)	99,93	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	(104.000.833,00)	99,31	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	(104.000.833,00)	99,31	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	(104.000.833,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.181.730.094,00	15.077.729.261,00	(104.000.833,00)	99,31	
1.02.01.1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	54.154.650.678,00	54.154.395.905,00	(254.773,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	54.154.650.678,00	54.154.395.905,00	(254.773,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.182.650.678,00	53.182.523.085,00	(127.593,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	6.904.853.624,00	6.904.853.624,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.277.797.054,00	46.277.669.461,00	(127.593,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	972.000.000,00	971.872.820,00	(127.180,00)	99,99	
1.02.01.1.10.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	972.000.000,00	971.872.820,00	(127.180,00)	99,99	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	(175.686.946,00)	92,52	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	(175.686.946,00)	92,52	
1.02.02.1.01.0009	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	(175.686.946,00)	92,52	
1.02.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	(175.686.946,00)	92,52	
1.02.02.1.01.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	(175.686.946,00)	92,52	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	105.283.782.839,00	104.518.790.997,00	(764.991.842,00)	99,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.283.782.839,00)	(47.922.067.572,57)	5.361.715.266,43	89,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(53.283.782.839,00)	(47.922.067.572,57)	5.361.715.266,43	89,94	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD PELATIHAN KESEHATAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELATIHAN KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	991.037.284,00	972.010.871,00	(19.026.413,00)	98,08	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	182.173.600,00	177.987.844,00	(4.185.756,00)	97,70	
1.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.066.600,00	6.976.905,00	(89.695,00)	98,73	
1.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.066.600,00	6.976.905,00	(89.695,00)	98,73	
1.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.066.600,00	6.976.905,00	(89.695,00)	98,73	
1.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.870.000,00	57.582.644,00	(287.356,00)	99,50	
1.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	57.870.000,00	57.582.644,00	(287.356,00)	99,50	
1.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.870.000,00	57.582.644,00	(287.356,00)	99,50	
1.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.889.000,00	21.047.820,00	(1.841.180,00)	91,96	
1.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.889.000,00	21.047.820,00	(1.841.180,00)	91,96	
1.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.889.000,00	21.047.820,00	(1.841.180,00)	91,96	
1.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.830.000,00	22.770.000,00	(60.000,00)	99,74	
1.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	22.830.000,00	22.770.000,00	(60.000,00)	99,74	
1.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.830.000,00	22.770.000,00	(60.000,00)	99,74	
1.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.360.000,00	11.180.475,00	(179.525,00)	98,42	
1.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.360.000,00	11.180.475,00	(179.525,00)	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	11.180.475,00	(179.525,00)	98,42	
1.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.158.000,00	58.430.000,00	(1.728.000,00)	97,13	
1.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	60.158.000,00	58.430.000,00	(1.728.000,00)	97,13	
1.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.158.000,00	58.430.000,00	(1.728.000,00)	97,13	
1.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21	
1.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21	
1.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21	
1.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.684.684,00	187.201.500,00	(1.483.184,00)	99,21	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	482.041.000,00	471.638.732,00	(10.402.268,00)	97,84	
1.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.864.000,00	110.530.164,00	(333.836,00)	99,70	
1.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	103.350.000,00	103.016.164,00	(333.836,00)	99,68	
1.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.350.000,00	103.016.164,00	(333.836,00)	99,68	
1.02.01.1.08.0002.5.2	BELANJA MODAL	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.08.0002.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	371.177.000,00	361.108.568,00	(10.068.432,00)	97,29	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	371.177.000,00	361.108.568,00	(10.068.432,00)	97,29	
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.177.000,00	361.108.568,00	(10.068.432,00)	97,29	
1.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.138.000,00	135.182.795,00	(2.955.205,00)	97,86	
1.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	87.977.000,00	85.223.795,00	(2.753.205,00)	96,87	
1.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.977.000,00	85.223.795,00	(2.753.205,00)	96,87	
1.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.977.000,00	85.223.795,00	(2.753.205,00)	96,87	
1.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.959.000,00	49.959.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	49.959.000,00	49.959.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.959.000,00	49.959.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	202.000,00	0,00	(202.000,00)	0,00	
1.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	202.000,00	0,00	(202.000,00)	0,00	
1.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.000,00	0,00	(202.000,00)	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	714.080.000,00	629.745.770,00	(84.334.230,00)	88,19	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.03.1.02	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	714.080.000,00	629.745.770,00	(84.334.230,00)	88,19	
1.02.03.1.02.0001	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	646.435.000,00	564.530.770,00	(81.904.230,00)	87,33	
1.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	646.435.000,00	564.530.770,00	(81.904.230,00)	87,33	
1.02.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.435.000,00	564.530.770,00	(81.904.230,00)	87,33	
1.02.03.1.02.0002	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	67.645.000,00	65.215.000,00	(2.430.000,00)	96,41	
1.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	67.645.000,00	65.215.000,00	(2.430.000,00)	96,41	
1.02.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.645.000,00	65.215.000,00	(2.430.000,00)	96,41	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.705.117.284,00	1.601.756.641,00	(103.360.643,00)	93,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.705.117.284,00)	(1.601.756.641,00)	103.360.643,00	93,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.705.117.284,00)	(1.601.756.641,00)	103.360.643,00	93,94	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.279.517.252,00	8.197.777.686,00	(81.739.566,00)	99,01	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89	
1.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89	
1.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89	
1.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.398.000,00	134.255.014,00	(142.986,00)	99,89	
1.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	484.369.000,00	483.277.802,00	(1.091.198,00)	99,77	
1.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.351.000,00	19.327.309,00	(23.691,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.351.000,00	19.327.309,00	(23.691,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.351.000,00	19.327.309,00	(23.691,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	279.079.000,00	278.351.740,00	(727.260,00)	99,74	
1.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	254.655.000,00	253.942.618,00	(712.382,00)	99,72	
1.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.655.000,00	253.942.618,00	(712.382,00)	99,72	
1.02.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	24.424.000,00	24.409.122,00	(14.878,00)	99,94	
1.02.01.1.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.424.000,00	24.409.122,00	(14.878,00)	99,94	
1.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	130.920.000,00	130.756.600,00	(163.400,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	130.920.000,00	130.756.600,00	(163.400,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.920.000,00	130.756.600,00	(163.400,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.299.000,00	53.122.153,00	(176.847,00)	99,67	
1.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	53.299.000,00	53.122.153,00	(176.847,00)	99,67	
1.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.299.000,00	53.122.153,00	(176.847,00)	99,67	
1.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.490.300.000,00	2.466.930.630,00	(23.369.370,00)	99,06	
1.02.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	627.184.000,00	616.464.774,00	(10.719.226,00)	98,29	
1.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	627.064.000,00	616.344.774,00	(10.719.226,00)	98,29	
1.02.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.064.000,00	616.344.774,00	(10.719.226,00)	98,29	
1.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.337.947.000,00	1.331.677.956,00	(6.269.044,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.337.887.000,00	1.331.617.956,00	(6.269.044,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.337.887.000,00	1.331.617.956,00	(6.269.044,00)	99,53	
1.02.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	212.056.000,00	211.095.720,00	(960.280,00)	99,55	
1.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
1.02.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
1.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	112.056.000,00	111.495.720,00	(560.280,00)	99,50	
1.02.01.1.07.0010.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.056.000,00	111.495.720,00	(560.280,00)	99,50	
1.02.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	313.113.000,00	307.692.180,00	(5.420.820,00)	98,27	
1.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	313.113.000,00	307.692.180,00	(5.420.820,00)	98,27	
1.02.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.779.000,00	21.794.850,00	(3.984.150,00)	84,54	
1.02.01.1.07.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	287.334.000,00	285.897.330,00	(1.436.670,00)	99,50	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.797.499.252,00	3.740.866.240,00	(56.633.012,00)	98,51	
1.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	581.299.372,00	571.161.772,00	(10.137.600,00)	98,26	
1.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	581.299.372,00	571.161.772,00	(10.137.600,00)	98,26	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.299.372,00	571.161.772,00	(10.137.600,00)	98,26	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.216.199.880,00	3.169.704.468,00	(46.495.412,00)	98,55	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.216.199.880,00	3.169.704.468,00	(46.495.412,00)	98,55	
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.216.199.880,00	3.169.704.468,00	(46.495.412,00)	98,55	
1.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.372.951.000,00	1.372.448.000,00	(503.000,00)	99,96	
1.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	288.760.000,00	288.257.000,00	(503.000,00)	99,83	
1.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	288.760.000,00	288.257.000,00	(503.000,00)	99,83	
1.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.760.000,00	288.257.000,00	(503.000,00)	99,83	
1.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	179.457.000,00	179.457.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	179.457.000,00	179.457.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.457.000,00	179.457.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	769.305.000,00	769.305.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	769.305.000,00	769.305.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.305.000,00	769.305.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	135.429.000,00	135.429.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	135.429.000,00	135.429.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.429.000,00	135.429.000,00	0,00	100,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.001.464.694,00	8.800.655.102,00	(200.809.592,00)	97,77	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	9.001.464.694,00	8.800.655.102,00	(200.809.592,00)	97,77	
1.02.02.1.01.0004	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.406.774.120,00	1.269.630.702,00	(137.143.418,00)	90,25	
1.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.406.774.120,00	1.269.630.702,00	(137.143.418,00)	90,25	
1.02.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.774.120,00	1.269.630.702,00	(137.143.418,00)	90,25	
1.02.02.1.01.0010	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	2.389.965.000,00	2.361.027.165,00	(28.937.835,00)	98,79	
1.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	69.802.000,00	69.757.681,00	(44.319,00)	99,94	
1.02.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.802.000,00	69.757.681,00	(44.319,00)	99,94	
1.02.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	2.320.163.000,00	2.291.269.484,00	(28.893.516,00)	98,75	
1.02.02.1.01.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.320.163.000,00	2.291.269.484,00	(28.893.516,00)	98,75	
1.02.02.1.01.0013	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	2.295.526.000,00	2.267.865.106,00	(27.660.894,00)	98,80	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	62.309.000,00	60.779.676,00	(1.529.324,00)	97,55	
1.02.02.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.309.000,00	60.779.676,00	(1.529.324,00)	97,55	
1.02.02.1.01.0013.5.2	BELANJA MODAL	2.233.217.000,00	2.207.085.430,00	(26.131.570,00)	98,83	
1.02.02.1.01.0013.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.233.217.000,00	2.207.085.430,00	(26.131.570,00)	98,83	
1.02.02.1.01.0017	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	485.315.000,00	479.589.000,00	(5.726.000,00)	98,82	
1.02.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	485.315.000,00	479.589.000,00	(5.726.000,00)	98,82	
1.02.02.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.315.000,00	479.589.000,00	(5.726.000,00)	98,82	
1.02.02.1.01.0027	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	2.423.884.574,00	2.422.543.129,00	(1.341.445,00)	99,94	
1.02.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	2.423.884.574,00	2.422.543.129,00	(1.341.445,00)	99,94	
1.02.02.1.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.884.574,00	2.422.543.129,00	(1.341.445,00)	99,94	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.280.981.946,00	16.998.432.788,00	(282.549.158,00)	98,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.280.981.946,00)	(16.998.432.788,00)	282.549.158,00	98,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.280.981.946,00)	(16.998.432.788,00)	282.549.158,00	98,36	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD LABUAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RSUD LABUAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.050.000.000,00	9.119.099.815,93	2.069.099.815,93	129,35	
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	9.086.420.964,62	2.086.420.964,62	129,81	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000,00	32.678.851,31	(17.321.148,69)	65,36	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7.050.000.000,00	9.119.099.815,93	2.069.099.815,93	129,35	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.647.447.819,00	40.984.876.212,50	(1.662.571.606,50)	96,10	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.820.000,00	8.787.072,00	(32.928,00)	99,63	
1.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	960.000,00	927.072,00	(32.928,00)	96,57	
1.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	927.072,00	(32.928,00)	96,57	
1.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	927.072,00	(32.928,00)	96,57	
1.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.863.120.363,00	1.160.370.392,00	(702.749.971,00)	62,28	
1.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.728.017.963,00	1.052.311.104,00	(675.706.859,00)	60,90	
1.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.728.017.963,00	1.052.311.104,00	(675.706.859,00)	60,90	
1.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.728.017.963,00	1.052.311.104,00	(675.706.859,00)	60,90	
1.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	127.588.000,00	100.795.000,00	(26.793.000,00)	79,00	
1.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	127.588.000,00	100.795.000,00	(26.793.000,00)	79,00	
1.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.588.000,00	100.795.000,00	(26.793.000,00)	79,00	
1.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.098.000,00	1.060.339,00	(37.661,00)	96,57	
1.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.098.000,00	1.060.339,00	(37.661,00)	96,57	
1.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.000,00	1.060.339,00	(37.661,00)	96,57	
1.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.966.400,00	5.769.384,00	(197.016,00)	96,70	
1.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.966.400,00	5.769.384,00	(197.016,00)	96,70	
1.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.966.400,00	5.769.384,00	(197.016,00)	96,70	
1.02.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	450.000,00	434.565,00	(15.435,00)	96,57	
1.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	434.565,00	(15.435,00)	96,57	
1.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	434.565,00	(15.435,00)	96,57	
1.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	87.400.000,00	86.400.000,00	(1.000.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	87.400.000,00	86.400.000,00	(1.000.000,00)	98,86	
1.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.400.000,00	86.400.000,00	(1.000.000,00)	98,86	
1.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	86.400.000,00	(1.000.000,00)	98,86	
1.02.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.869.850.600,00	1.757.570.977,00	(112.279.623,00)	94,00	
1.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	110.018.000,00	94.000.061,00	(16.017.939,00)	85,44	
1.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	110.018.000,00	94.000.061,00	(16.017.939,00)	85,44	
1.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.018.000,00	94.000.061,00	(16.017.939,00)	85,44	
1.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	441.828.000,00	428.690.774,00	(13.137.226,00)	97,03	
1.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	441.828.000,00	428.690.774,00	(13.137.226,00)	97,03	
1.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.828.000,00	428.690.774,00	(13.137.226,00)	97,03	
1.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	646.120.900,00	608.683.681,00	(37.437.219,00)	94,21	
1.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	646.120.900,00	608.683.681,00	(37.437.219,00)	94,21	
1.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.120.900,00	608.683.681,00	(37.437.219,00)	94,21	
1.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	203.965.000,00	200.498.531,00	(3.466.469,00)	98,30	
1.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	203.965.000,00	200.498.531,00	(3.466.469,00)	98,30	
1.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.965.000,00	200.498.531,00	(3.466.469,00)	98,30	
1.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	381.199.800,00	373.731.894,00	(7.467.906,00)	98,04	
1.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	381.199.800,00	373.731.894,00	(7.467.906,00)	98,04	
1.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.199.800,00	373.731.894,00	(7.467.906,00)	98,04	
1.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.999.900,00	21.184.071,00	(33.815.829,00)	38,52	
1.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	54.999.900,00	21.184.071,00	(33.815.829,00)	38,52	
1.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.999.900,00	21.184.071,00	(33.815.829,00)	38,52	
1.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	31.719.000,00	30.781.965,00	(937.035,00)	97,05	
1.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	31.719.000,00	30.781.965,00	(937.035,00)	97,05	
1.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.719.000,00	30.781.965,00	(937.035,00)	97,05	
1.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	672.028.700,00	642.398.561,00	(29.630.139,00)	95,59	
1.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	389.383.900,00	381.358.561,00	(8.025.339,00)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	389.383.900,00	381.358.561,00	(8.025.339,00)	97,94	
1.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.275.900,00	357.358.561,00	(7.917.339,00)	97,83	
1.02.01.1.07.0006.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.108.000,00	24.000.000,00	(108.000,00)	99,55	
1.02.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	282.644.800,00	261.040.000,00	(21.604.800,00)	92,36	
1.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	282.644.800,00	261.040.000,00	(21.604.800,00)	92,36	
1.02.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282.644.800,00	261.040.000,00	(21.604.800,00)	92,36	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.230.246.156,00	28.436.694.396,00	(793.551.760,00)	97,29	
1.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.685.560.000,00	1.415.266.564,00	(270.293.436,00)	83,96	
1.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.685.560.000,00	1.415.266.564,00	(270.293.436,00)	83,96	
1.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.560.000,00	1.415.266.564,00	(270.293.436,00)	83,96	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.544.686.156,00	27.021.427.832,00	(523.258.324,00)	98,10	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	27.544.686.156,00	27.021.427.832,00	(523.258.324,00)	98,10	
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.544.686.156,00	27.021.427.832,00	(523.258.324,00)	98,10	
1.02.01.1.08.0004.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.08.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.915.982.000,00	1.892.654.814,50	(23.327.185,50)	98,78	
1.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	220.060.000,00	212.938.688,00	(7.121.312,00)	96,76	
1.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	220.060.000,00	212.938.688,00	(7.121.312,00)	96,76	
1.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.060.000,00	212.938.688,00	(7.121.312,00)	96,76	
1.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	723.396.000,00	717.950.764,00	(5.445.236,00)	99,25	
1.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	723.396.000,00	717.950.764,00	(5.445.236,00)	99,25	
1.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.396.000,00	717.950.764,00	(5.445.236,00)	99,25	
1.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	404.000.000,00	401.000.000,00	(3.000.000,00)	99,26	
1.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	404.000.000,00	401.000.000,00	(3.000.000,00)	99,26	
1.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.000.000,00	401.000.000,00	(3.000.000,00)	99,26	
1.02.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	107.500.000,00	105.616.500,00	(1.883.500,00)	98,25	
1.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	107.500.000,00	105.616.500,00	(1.883.500,00)	98,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.500.000,00	105.616.500,00	(1.883.500,00)	98,25	
1.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	461.026.000,00	455.148.862,50	(5.877.137,50)	98,73	
1.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	461.026.000,00	455.148.862,50	(5.877.137,50)	98,73	
1.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.026.000,00	455.148.862,50	(5.877.137,50)	98,73	
1.02.01.1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.580.000.000,00	6.590.105.108,00	10.105.108,00	100,15	
1.02.01.1.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.576.000.000,00	6.586.105.108,00	10.105.108,00	100,15	
1.02.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	420.000.000,00	409.894.892,00	(10.105.108,00)	97,59	
1.02.01.1.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.000.000,00	409.894.892,00	(10.105.108,00)	97,59	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.709.914.395,00	12.523.056.971,00	(186.857.424,00)	98,53	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	12.709.914.395,00	12.523.056.971,00	(186.857.424,00)	98,53	
1.02.02.1.01.0010	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	7.738.049.175,00	7.610.431.372,00	(127.617.803,00)	98,35	
1.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	7.738.049.175,00	7.610.431.372,00	(127.617.803,00)	98,35	
1.02.02.1.01.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.967.049.175,00	5.895.826.372,00	(71.222.803,00)	98,81	
1.02.02.1.01.0010.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.771.000.000,00	1.714.605.000,00	(56.395.000,00)	96,82	
1.02.02.1.01.0016	PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	200.000.000,00	199.739.294,00	(260.706,00)	99,87	
1.02.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.739.294,00	(260.706,00)	99,87	
1.02.02.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.739.294,00	(260.706,00)	99,87	
1.02.02.1.01.0017	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	199.668.000,00	198.899.000,00	(769.000,00)	99,61	
1.02.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	199.668.000,00	198.899.000,00	(769.000,00)	99,61	
1.02.02.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.668.000,00	198.899.000,00	(769.000,00)	99,61	
1.02.02.1.01.0026	PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	350.000.000,00	332.584.844,00	(17.415.156,00)	95,02	
1.02.02.1.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	332.584.844,00	(17.415.156,00)	95,02	
1.02.02.1.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	332.584.844,00	(17.415.156,00)	95,02	
1.02.02.1.01.0026.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.01.0026.5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.01.0027	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.222.197.220,00	4.181.402.461,00	(40.794.759,00)	99,03	
1.02.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	4.222.197.220,00	4.181.402.461,00	(40.794.759,00)	99,03	
1.02.02.1.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.222.197.220,00	4.181.402.461,00	(40.794.759,00)	99,03	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	55.357.362.214,00	53.507.933.183,50	(1.849.429.030,50)	96,66	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.307.362.214,00)	(44.388.833.367,57)	3.918.528.846,43	91,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(48.307.362.214,00)	(44.388.833.367,57)	3.918.528.846,43	91,89	

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD CILOGRANG

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD RSUD CILOGRANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000.000,00	4.116.885.110,94	116.885.110,94	102,92	
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	3.990.000.000,00	4.091.468.443,00	101.468.443,00	102,54	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	25.416.667,94	15.416.667,94	254,17	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.000.000.000,00	4.116.885.110,94	116.885.110,94	102,92	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.179.521.832,00	43.098.393.685,00	(1.081.128.147,00)	97,55	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.530.000,00	10.521.290,00	(8.710,00)	99,92	
1.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	940.000,00	931.290,00	(8.710,00)	99,07	
1.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	940.000,00	931.290,00	(8.710,00)	99,07	
1.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	931.290,00	(8.710,00)	99,07	
1.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.597.130.376,00	882.983.000,00	(714.147.376,00)	55,29	
1.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.470.792.376,00	756.645.000,00	(714.147.376,00)	51,44	
1.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.470.792.376,00	756.645.000,00	(714.147.376,00)	51,44	
1.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.470.792.376,00	756.645.000,00	(714.147.376,00)	51,44	
1.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	125.110.000,00	125.110.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	125.110.000,00	125.110.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.110.000,00	125.110.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	398.000,00	398.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	398.000,00	398.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.000,00	398.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	87.400.000,00	87.399.144,00	(856,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	87.400.000,00	87.399.144,00	(856,00)	100,00	
1.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.400.000,00	87.399.144,00	(856,00)	100,00	
1.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	87.399.144,00	(856,00)	100,00	
1.02.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.799.908.700,00	1.774.297.085,00	(25.611.615,00)	98,58	
1.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	130.022.000,00	129.948.161,00	(73.839,00)	99,94	
1.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.022.000,00	129.948.161,00	(73.839,00)	99,94	
1.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.022.000,00	129.948.161,00	(73.839,00)	99,94	
1.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	514.156.000,00	513.453.391,00	(702.609,00)	99,86	
1.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	514.156.000,00	513.453.391,00	(702.609,00)	99,86	
1.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.156.000,00	513.453.391,00	(702.609,00)	99,86	
1.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	496.873.000,00	473.475.678,00	(23.397.322,00)	95,29	
1.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	496.873.000,00	473.475.678,00	(23.397.322,00)	95,29	
1.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.873.000,00	473.475.678,00	(23.397.322,00)	95,29	
1.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	203.748.500,00	203.044.458,00	(704.042,00)	99,65	
1.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	203.748.500,00	203.044.458,00	(704.042,00)	99,65	
1.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.748.500,00	203.044.458,00	(704.042,00)	99,65	
1.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	403.763.200,00	403.282.744,00	(480.456,00)	99,88	
1.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	359.483.200,00	359.132.494,00	(350.706,00)	99,90	
1.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.483.200,00	359.132.494,00	(350.706,00)	99,90	
1.02.01.1.06.0005.5.2	BELANJA MODAL	44.280.000,00	44.150.250,00	(129.750,00)	99,71	
1.02.01.1.06.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.280.000,00	44.150.250,00	(129.750,00)	99,71	
1.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.596.000,00	19.454.000,00	(142.000,00)	99,28	
1.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	19.596.000,00	19.454.000,00	(142.000,00)	99,28	
1.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.596.000,00	19.454.000,00	(142.000,00)	99,28	
1.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	31.750.000,00	31.638.653,00	(111.347,00)	99,65	
1.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	31.750.000,00	31.638.653,00	(111.347,00)	99,65	
1.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	31.638.653,00	(111.347,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.093.426.429,00	2.054.004.838,00	(39.421.591,00)	98,12	
1.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.013.426.429,00	979.216.235,00	(34.210.194,00)	96,62	
1.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.590.200,00	1.570.939,00	(19.261,00)	98,79	
1.02.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.200,00	1.570.939,00	(19.261,00)	98,79	
1.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.011.836.229,00	977.645.296,00	(34.190.933,00)	96,62	
1.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	936.836.229,00	902.720.296,00	(34.115.933,00)	96,36	
1.02.01.1.07.0006.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.925.000,00	(75.000,00)	99,90	
1.02.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.080.000.000,00	1.074.788.603,00	(5.211.397,00)	99,52	
1.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.766.800,00	(233.200,00)	99,77	
1.02.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.766.800,00	(233.200,00)	99,77	
1.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	980.000.000,00	975.021.803,00	(4.978.197,00)	99,49	
1.02.01.1.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.121.790,00	(878.210,00)	99,56	
1.02.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	780.000.000,00	775.900.013,00	(4.099.987,00)	99,47	
1.02.01.1.07.0010.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.749.060.327,00	31.553.958.110,00	(195.102.217,00)	99,39	
1.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	896.538.000,00	873.755.913,00	(22.782.087,00)	97,46	
1.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	896.538.000,00	873.755.913,00	(22.782.087,00)	97,46	
1.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.538.000,00	873.755.913,00	(22.782.087,00)	97,46	
1.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	30.852.522.327,00	30.680.202.197,00	(172.320.130,00)	99,44	
1.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.852.522.327,00	30.680.202.197,00	(172.320.130,00)	99,44	
1.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.852.522.327,00	30.680.202.197,00	(172.320.130,00)	99,44	
1.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.842.066.000,00	2.735.689.033,00	(106.376.967,00)	96,26	
1.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	177.790.000,00	160.184.352,00	(17.605.648,00)	90,10	
1.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	177.790.000,00	160.184.352,00	(17.605.648,00)	90,10	
1.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.790.000,00	160.184.352,00	(17.605.648,00)	90,10	
1.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.070.897.000,00	1.025.885.157,00	(45.011.843,00)	95,80	
1.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	875.897.000,00	831.337.677,00	(44.559.323,00)	94,91	
1.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.897.000,00	831.337.677,00	(44.559.323,00)	94,91	
1.02.01.1.09.0006.5.2	BELANJA MODAL	195.000.000,00	194.547.480,00	(452.520,00)	99,77	
1.02.01.1.09.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.000.000,00	194.547.480,00	(452.520,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	986.660.000,00	974.263.056,00	(12.396.944,00)	98,74	
1.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	986.660.000,00	974.263.056,00	(12.396.944,00)	98,74	
1.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.660.000,00	974.263.056,00	(12.396.944,00)	98,74	
1.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	606.719.000,00	575.356.468,00	(31.362.532,00)	94,83	
1.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	606.719.000,00	575.356.468,00	(31.362.532,00)	94,83	
1.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.719.000,00	575.356.468,00	(31.362.532,00)	94,83	
1.02.01.1.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.000.000.000,00	3.999.541.185,00	(458.815,00)	99,99	
1.02.01.1.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.000.000.000,00	3.999.541.185,00	(458.815,00)	99,99	
1.02.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000.000,00	3.849.898.755,00	(101.245,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000.000,00	3.849.898.755,00	(101.245,00)	100,00	
1.02.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.642.430,00	(357.570,00)	99,76	
1.02.01.1.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.642.430,00	(357.570,00)	99,76	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.368.322.984,00	18.948.734.501,28	(419.588.482,72)	97,83	
1.02.02.1.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	17.597.322.984,00	17.234.062.001,28	(363.260.982,72)	97,94	
1.02.02.1.01.0010	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	10.167.366.799,00	9.968.007.964,00	(199.358.835,00)	98,04	
1.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.494.000,00	23.367.010,00	(2.126.990,00)	91,66	
1.02.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.494.000,00	23.367.010,00	(2.126.990,00)	91,66	
1.02.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	10.141.872.799,00	9.944.640.954,00	(197.231.845,00)	98,06	
1.02.02.1.01.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.141.872.799,00	9.944.640.954,00	(197.231.845,00)	98,06	
1.02.02.1.01.0016	PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	200.000.000,00	197.148.703,00	(2.851.297,00)	98,57	
1.02.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	197.148.703,00	(2.851.297,00)	98,57	
1.02.02.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.148.703,00	(2.851.297,00)	98,57	
1.02.02.1.01.0017	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	330.000.000,00	312.411.440,00	(17.588.560,00)	94,67	
1.02.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	312.411.440,00	(17.588.560,00)	94,67	
1.02.02.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	312.411.440,00	(17.588.560,00)	94,67	
1.02.02.1.01.0027	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	6.899.956.185,00	6.756.493.894,28	(143.462.290,72)	97,92	
1.02.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	6.899.956.185,00	6.756.493.894,28	(143.462.290,72)	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.1.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.899.956.185,00	6.756.493.894,28	(143.462.290,72)	97,92	
1.02.02.1.03	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	(56.327.500,00)	96,82	
1.02.02.1.03.0002	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	(56.327.500,00)	96,82	
1.02.02.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	(56.327.500,00)	96,82	
1.02.02.1.03.0002.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	(56.327.500,00)	96,82	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	63.547.844.816,00	62.047.128.186,28	(1.500.716.629,72)	97,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.547.844.816,00)	(57.930.243.075,34)	1.617.601.740,66	97,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(59.547.844.816,00)	(57.930.243.075,34)	1.617.601.740,66	97,28	

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Satuan Kerja : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.03.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.290.464.800,00	6.620.503.670,00	2.330.038.870,00	154,31	
1.03.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	4.290.464.800,00	6.620.172.450,00	2.329.707.650,00	154,30	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	331.220,00	331.220,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.290.464.800,00	6.620.503.670,00	2.330.038.870,00	154,31	
5	BELANJA DAERAH					
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.851.762.489,90	107.808.651.813,00	(6.043.110.676,90)	94,69	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.513.230.000,00	3.368.693.056,00	(144.536.944,00)	95,89	
1.03.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.450.000,00	25.543.840,00	(2.906.160,00)	89,79	
1.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.450.000,00	25.543.840,00	(2.906.160,00)	89,79	
1.03.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	25.543.840,00	(2.906.160,00)	89,79	
1.03.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	16.800.000,00	15.500.000,00	(1.300.000,00)	92,26	
1.03.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	15.500.000,00	(1.300.000,00)	92,26	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	15.500.000,00	(1.300.000,00)	92,26	
1.03.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.269.381,00	(530.619,00)	96,84	
1.03.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	55.680.000,00	54.725.315,00	(954.685,00)	98,29	
1.03.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	55.680.000,00	54.725.315,00	(954.685,00)	98,29	
1.03.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.680.000,00	54.725.315,00	(954.685,00)	98,29	
1.03.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.016.590.000,00	958.878.633,00	(57.711.367,00)	94,32	
1.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.016.590.000,00	958.878.633,00	(57.711.367,00)	94,32	
1.03.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.590.000,00	958.878.633,00	(57.711.367,00)	94,32	
1.03.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	60.000.000,00	59.626.400,00	(373.600,00)	99,38	
1.03.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.626.400,00	(373.600,00)	99,38	
1.03.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.626.400,00	(373.600,00)	99,38	
1.03.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	56.240.000,00	42.473.600,00	(13.766.400,00)	75,52	
1.03.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	56.240.000,00	42.473.600,00	(13.766.400,00)	75,52	
1.03.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.240.000,00	42.473.600,00	(13.766.400,00)	75,52	
1.03.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	2.229.070.000,00	2.163.137.125,00	(65.932.875,00)	97,04	
1.03.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.229.070.000,00	2.163.137.125,00	(65.932.875,00)	97,04	
1.03.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.229.070.000,00	2.163.137.125,00	(65.932.875,00)	97,04	
1.03.01.1.01.0012	SINKRONISASI DAN HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	53.409.785.000,00	52.256.407.263,00	(1.153.377.737,00)	97,84	
1.03.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	51.500.000.000,00	50.519.285.795,00	(980.714.205,00)	98,10	
1.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	51.500.000.000,00	50.519.285.795,00	(980.714.205,00)	98,10	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	51.500.000.000,00	50.519.285.795,00	(980.714.205,00)	98,10	
1.03.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.727.135.000,00	1.555.360.000,00	(171.775.000,00)	90,05	
1.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.727.135.000,00	1.555.360.000,00	(171.775.000,00)	90,05	
1.03.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.727.135.000,00	1.555.360.000,00	(171.775.000,00)	90,05	
1.03.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	79.350.000,00	78.895.213,00	(454.787,00)	99,43	
1.03.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	79.350.000,00	78.895.213,00	(454.787,00)	99,43	
1.03.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.350.000,00	78.895.213,00	(454.787,00)	99,43	
1.03.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	17.580.000,00	17.416.410,00	(163.590,00)	99,07	
1.03.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.580.000,00	17.416.410,00	(163.590,00)	99,07	
1.03.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	17.416.410,00	(163.590,00)	99,07	
1.03.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.580.000,00	18.513.438,00	(66.562,00)	99,64	
1.03.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	18.580.000,00	18.513.438,00	(66.562,00)	99,64	
1.03.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.580.000,00	18.513.438,00	(66.562,00)	99,64	
1.03.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	12.740.000,00	12.682.720,00	(57.280,00)	99,55	
1.03.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.740.000,00	12.682.720,00	(57.280,00)	99,55	
1.03.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	12.682.720,00	(57.280,00)	99,55	
1.03.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	51.920.000,00	51.901.687,00	(18.313,00)	99,96	
1.03.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	51.920.000,00	51.901.687,00	(18.313,00)	99,96	
1.03.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.920.000,00	51.901.687,00	(18.313,00)	99,96	
1.03.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.480.000,00	2.352.000,00	(128.000,00)	94,84	
1.03.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.480.000,00	2.352.000,00	(128.000,00)	94,84	
1.03.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	2.352.000,00	(128.000,00)	94,84	
1.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	274.458.500,00	254.093.437,00	(20.365.063,00)	92,58	
1.03.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	11.426.000,00	9.842.687,00	(1.583.313,00)	86,14	
1.03.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.426.000,00	9.842.687,00	(1.583.313,00)	86,14	
1.03.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.426.000,00	9.842.687,00	(1.583.313,00)	86,14	
1.03.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	38.840.000,00	31.400.000,00	(7.440.000,00)	80,84	
1.03.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	38.840.000,00	31.400.000,00	(7.440.000,00)	80,84	
1.03.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.840.000,00	31.400.000,00	(7.440.000,00)	80,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.03.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.03.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.03.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	213.392.500,00	202.050.750,00	(11.341.750,00)	94,69	
1.03.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	119.462.500,00	111.974.250,00	(7.488.250,00)	93,73	
1.03.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.462.500,00	111.974.250,00	(7.488.250,00)	93,73	
1.03.01.1.03.0006.5.2	BELANJA MODAL	93.930.000,00	90.076.500,00	(3.853.500,00)	95,90	
1.03.01.1.03.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.930.000,00	90.076.500,00	(3.853.500,00)	95,90	
1.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	177.526.000,00	134.188.000,00	(43.338.000,00)	75,59	
1.03.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	23.376.000,00	23.088.000,00	(288.000,00)	98,77	
1.03.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	23.376.000,00	23.088.000,00	(288.000,00)	98,77	
1.03.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.376.000,00	23.088.000,00	(288.000,00)	98,77	
1.03.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	154.150.000,00	111.100.000,00	(43.050.000,00)	72,07	
1.03.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	154.150.000,00	111.100.000,00	(43.050.000,00)	72,07	
1.03.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.150.000,00	111.100.000,00	(43.050.000,00)	72,07	
1.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.527.643.700,00	2.217.908.046,00	(309.735.654,00)	87,75	
1.03.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	92.927.000,00	87.426.141,00	(5.500.859,00)	94,08	
1.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	92.927.000,00	87.426.141,00	(5.500.859,00)	94,08	
1.03.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.927.000,00	87.426.141,00	(5.500.859,00)	94,08	
1.03.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	728.617.000,00	637.112.112,00	(91.504.888,00)	87,44	
1.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	728.617.000,00	637.112.112,00	(91.504.888,00)	87,44	
1.03.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.617.000,00	637.112.112,00	(91.504.888,00)	87,44	
1.03.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	86.648.000,00	73.513.063,00	(13.134.937,00)	84,84	
1.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	86.648.000,00	73.513.063,00	(13.134.937,00)	84,84	
1.03.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.648.000,00	73.513.063,00	(13.134.937,00)	84,84	
1.03.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	225.294.000,00	208.775.660,00	(16.518.340,00)	92,67	
1.03.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	225.294.000,00	208.775.660,00	(16.518.340,00)	92,67	
1.03.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.294.000,00	208.775.660,00	(16.518.340,00)	92,67	
1.03.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	117.581.700,00	105.752.411,00	(11.829.289,00)	89,94	
1.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	117.581.700,00	105.752.411,00	(11.829.289,00)	89,94	
1.03.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.581.700,00	105.752.411,00	(11.829.289,00)	89,94	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	57.791.000,00	56.464.500,00	(1.326.500,00)	97,70	
1.03.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	57.791.000,00	56.464.500,00	(1.326.500,00)	97,70	
1.03.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.791.000,00	56.464.500,00	(1.326.500,00)	97,70	
1.03.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	300.000.000,00	280.327.562,00	(19.672.438,00)	93,44	
1.03.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	280.327.562,00	(19.672.438,00)	93,44	
1.03.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	280.327.562,00	(19.672.438,00)	93,44	
1.03.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	189.972.000,00	157.337.054,00	(32.634.946,00)	82,82	
1.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	189.972.000,00	157.337.054,00	(32.634.946,00)	82,82	
1.03.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.972.000,00	157.337.054,00	(32.634.946,00)	82,82	
1.03.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	692.173.000,00	575.541.293,00	(116.631.707,00)	83,15	
1.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	692.173.000,00	575.541.293,00	(116.631.707,00)	83,15	
1.03.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.173.000,00	575.541.293,00	(116.631.707,00)	83,15	
1.03.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	36.640.000,00	35.658.250,00	(981.750,00)	97,32	
1.03.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	36.640.000,00	35.658.250,00	(981.750,00)	97,32	
1.03.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.640.000,00	35.658.250,00	(981.750,00)	97,32	
1.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.930.377.478,00	5.706.178.629,00	(224.198.849,00)	96,22	
1.03.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	86.321.000,00	57.950.001,00	(28.370.999,00)	67,13	
1.03.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
1.03.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
1.03.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	85.961.000,00	57.950.001,00	(28.010.999,00)	67,41	
1.03.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.961.000,00	57.950.001,00	(28.010.999,00)	67,41	
1.03.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.147.198.478,00	4.000.594.028,00	(146.604.450,00)	96,46	
1.03.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	28.528.248,00	20.207.550,00	(8.320.698,00)	70,83	
1.03.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.528.248,00	20.207.550,00	(8.320.698,00)	70,83	
1.03.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	4.118.670.230,00	3.980.386.478,00	(138.283.752,00)	96,64	
1.03.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.118.670.230,00	3.980.386.478,00	(138.283.752,00)	96,64	
1.03.01.1.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	300.000.000,00	291.865.620,00	(8.134.380,00)	97,29	
1.03.01.1.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.07.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	291.865.620,00	(8.134.380,00)	97,29	
1.03.01.1.07.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	291.865.620,00	(8.134.380,00)	97,29	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.297.783.000,00	1.258.190.680,00	(39.592.320,00)	96,95	
1.03.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	277.783.000,00	254.262.380,00	(23.520.620,00)	91,53	
1.03.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.783.000,00	254.262.380,00	(23.520.620,00)	91,53	
1.03.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.020.000.000,00	1.003.928.300,00	(16.071.700,00)	98,42	
1.03.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.020.000.000,00	1.003.928.300,00	(16.071.700,00)	98,42	
1.03.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	99.075.000,00	97.578.300,00	(1.496.700,00)	98,49	
1.03.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00	
1.03.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00	
1.03.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	98.595.000,00	97.578.300,00	(1.016.700,00)	98,97	
1.03.01.1.07.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.595.000,00	97.578.300,00	(1.016.700,00)	98,97	
1.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.599.613.471,90	28.434.995.358,00	(3.164.618.113,90)	89,99	
1.03.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.817.912.011,90	5.615.277.434,00	(1.202.634.577,90)	82,36	
1.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.817.912.011,90	5.615.277.434,00	(1.202.634.577,90)	82,36	
1.03.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.817.912.011,90	5.615.277.434,00	(1.202.634.577,90)	82,36	
1.03.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	229.140.000,00	218.427.000,00	(10.713.000,00)	95,32	
1.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	229.140.000,00	218.427.000,00	(10.713.000,00)	95,32	
1.03.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.140.000,00	218.427.000,00	(10.713.000,00)	95,32	
1.03.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	24.552.561.460,00	22.601.290.924,00	(1.951.270.536,00)	92,05	
1.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.552.561.460,00	22.601.290.924,00	(1.951.270.536,00)	92,05	
1.03.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.552.561.460,00	22.601.290.924,00	(1.951.270.536,00)	92,05	
1.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.419.128.340,00	15.436.188.024,00	(982.940.316,00)	94,01	
1.03.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	896.803.000,00	697.368.000,00	(199.435.000,00)	77,76	
1.03.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	896.803.000,00	697.368.000,00	(199.435.000,00)	77,76	
1.03.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.803.000,00	697.368.000,00	(199.435.000,00)	77,76	
1.03.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.197.700.840,00	5.735.159.451,00	(462.541.389,00)	92,54	
1.03.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.197.700.840,00	5.735.159.451,00	(462.541.389,00)	92,54	
1.03.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.197.700.840,00	5.735.159.451,00	(462.541.389,00)	92,54	
1.03.01.1.09.0003	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	5.679.960.400,00	5.513.331.849,00	(166.628.551,00)	97,07	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.1.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.679.960.400,00	5.513.331.849,00	(166.628.551,00)	97,07	
1.03.01.1.09.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.679.960.400,00	5.513.331.849,00	(166.628.551,00)	97,07	
1.03.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	631.106.000,00	582.145.189,00	(48.960.811,00)	92,24	
1.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	631.106.000,00	582.145.189,00	(48.960.811,00)	92,24	
1.03.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.106.000,00	582.145.189,00	(48.960.811,00)	92,24	
1.03.01.1.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	23.850.000,00	23.280.000,00	(570.000,00)	97,61	
1.03.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	23.850.000,00	23.280.000,00	(570.000,00)	97,61	
1.03.01.1.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	23.280.000,00	(570.000,00)	97,61	
1.03.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.363.869.100,00	2.319.188.036,00	(44.681.064,00)	98,11	
1.03.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.872.869.100,00	1.832.320.476,00	(40.548.624,00)	97,83	
1.03.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.869.100,00	1.832.320.476,00	(40.548.624,00)	97,83	
1.03.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	491.000.000,00	486.867.560,00	(4.132.440,00)	99,16	
1.03.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	486.867.560,00	(4.132.440,00)	99,16	
1.03.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	149.160.000,00	144.550.000,00	(4.610.000,00)	96,91	
1.03.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	149.160.000,00	144.550.000,00	(4.610.000,00)	96,91	
1.03.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.160.000,00	144.550.000,00	(4.610.000,00)	96,91	
1.03.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	476.679.000,00	421.165.499,00	(55.513.501,00)	88,35	
1.03.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	476.679.000,00	421.165.499,00	(55.513.501,00)	88,35	
1.03.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.679.000,00	421.165.499,00	(55.513.501,00)	88,35	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	154.604.855.632,00	141.500.786.986,00	(13.104.068.646,00)	91,52	
1.03.02.1.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.580.055.802,00	70.205.820.930,00	(4.374.234.872,00)	94,13	
1.03.02.1.01.0009	PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	19.691.528.800,00	18.082.126.109,00	(1.609.402.691,00)	91,83	
1.03.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	208.506.000,00	144.873.877,00	(63.632.123,00)	69,48	
1.03.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.506.000,00	144.873.877,00	(63.632.123,00)	69,48	
1.03.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	19.483.022.800,00	17.937.252.232,00	(1.545.770.568,00)	92,07	
1.03.02.1.01.0009.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.483.022.800,00	17.937.252.232,00	(1.545.770.568,00)	92,07	
1.03.02.1.01.0067	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SITU	25.103.637.932,00	23.740.578.854,00	(1.363.059.078,00)	94,57	
1.03.02.1.01.0067.5.1	BELANJA OPERASI	25.103.637.932,00	23.740.578.854,00	(1.363.059.078,00)	94,57	
1.03.02.1.01.0067.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.103.637.932,00	23.740.578.854,00	(1.363.059.078,00)	94,57	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.02.1.01.0090	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN PROVINSI	323.670.000,00	224.711.958,00	(98.958.042,00)	69,43	
1.03.02.1.01.0090.5.1	BELANJA OPERASI	323.670.000,00	224.711.958,00	(98.958.042,00)	69,43	
1.03.02.1.01.0090.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.670.000,00	224.711.958,00	(98.958.042,00)	69,43	
1.03.02.1.01.0103	PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI	3.670.435.000,00	3.543.403.019,00	(127.031.981,00)	96,54	
1.03.02.1.01.0103.5.1	BELANJA OPERASI	3.670.435.000,00	3.543.403.019,00	(127.031.981,00)	96,54	
1.03.02.1.01.0103.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.670.435.000,00	3.543.403.019,00	(127.031.981,00)	96,54	
1.03.02.1.01.0107	OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI	13.592.955.100,00	12.837.321.606,00	(755.633.494,00)	94,44	
1.03.02.1.01.0107.5.1	BELANJA OPERASI	13.592.955.100,00	12.837.321.606,00	(755.633.494,00)	94,44	
1.03.02.1.01.0107.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.592.955.100,00	12.837.321.606,00	(755.633.494,00)	94,44	
1.03.02.1.01.0119	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI AIR TANAH DAN AIR BAKU	2.794.663.900,00	2.456.127.497,00	(338.536.403,00)	87,89	
1.03.02.1.01.0119.5.1	BELANJA OPERASI	2.732.043.900,00	2.396.127.497,00	(335.916.403,00)	87,70	
1.03.02.1.01.0119.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.732.043.900,00	2.396.127.497,00	(335.916.403,00)	87,70	
1.03.02.1.01.0119.5.2	BELANJA MODAL	62.620.000,00	60.000.000,00	(2.620.000,00)	95,82	
1.03.02.1.01.0119.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.620.000,00	60.000.000,00	(2.620.000,00)	95,82	
1.03.02.1.01.0121	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	2.363.333.000,00	2.346.567.984,00	(16.765.016,00)	99,29	
1.03.02.1.01.0121.5.1	BELANJA OPERASI	63.062.000,00	46.296.984,00	(16.765.016,00)	73,42	
1.03.02.1.01.0121.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.062.000,00	46.296.984,00	(16.765.016,00)	73,42	
1.03.02.1.01.0121.5.2	BELANJA MODAL	2.300.271.000,00	2.300.271.000,00	0,00	100,00	
1.03.02.1.01.0121.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.300.271.000,00	2.300.271.000,00	0,00	100,00	
1.03.02.1.01.0122	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	7.039.832.070,00	6.974.983.903,00	(64.848.167,00)	99,08	
1.03.02.1.01.0122.5.1	BELANJA OPERASI	3.790.437.000,00	3.764.152.013,00	(26.284.987,00)	99,31	
1.03.02.1.01.0122.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.790.437.000,00	3.764.152.013,00	(26.284.987,00)	99,31	
1.03.02.1.01.0122.5.2	BELANJA MODAL	3.249.395.070,00	3.210.831.890,00	(38.563.180,00)	98,81	
1.03.02.1.01.0122.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.249.395.070,00	3.210.831.890,00	(38.563.180,00)	98,81	
1.03.02.1.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA-3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.024.799.830,00	71.294.966.056,00	(8.729.833.774,00)	89,09	
1.03.02.1.02.0014	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	51.705.575.080,00	44.194.616.126,00	(7.510.958.954,00)	85,47	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.02.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	594.330.000,00	499.412.607,00	(94.917.393,00)	84,03	
1.03.02.1.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.330.000,00	499.412.607,00	(94.917.393,00)	84,03	
1.03.02.1.02.0014.5.2	BELANJA MODAL	51.111.245.080,00	43.695.203.519,00	(7.416.041.561,00)	85,49	
1.03.02.1.02.0014.5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.1.02.0014.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.111.245.080,00	43.695.203.519,00	(7.416.041.561,00)	85,49	
1.03.02.1.02.0021	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	19.218.562.100,00	18.196.659.433,00	(1.021.902.667,00)	94,68	
1.03.02.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	19.218.562.100,00	18.196.659.433,00	(1.021.902.667,00)	94,68	
1.03.02.1.02.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.218.562.100,00	18.196.659.433,00	(1.021.902.667,00)	94,68	
1.03.02.1.02.0022	OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	1.380.691.650,00	1.275.948.710,00	(104.742.940,00)	92,41	
1.03.02.1.02.0022.5.1	BELANJA OPERASI	583.005.650,00	560.487.611,00	(22.518.039,00)	96,14	
1.03.02.1.02.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.005.650,00	560.487.611,00	(22.518.039,00)	96,14	
1.03.02.1.02.0022.5.2	BELANJA MODAL	797.686.000,00	715.461.099,00	(82.224.901,00)	89,69	
1.03.02.1.02.0022.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	797.686.000,00	715.461.099,00	(82.224.901,00)	89,69	
1.03.02.1.02.0030	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI	1.471.306.000,00	1.407.769.336,00	(63.536.664,00)	95,68	
1.03.02.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	1.471.306.000,00	1.407.769.336,00	(63.536.664,00)	95,68	
1.03.02.1.02.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.471.306.000,00	1.407.769.336,00	(63.536.664,00)	95,68	
1.03.02.1.02.0032	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	6.248.665.000,00	6.219.972.451,00	(28.692.549,00)	99,54	
1.03.02.1.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	657.208.000,00	641.833.451,00	(15.374.549,00)	97,66	
1.03.02.1.02.0032.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.208.000,00	641.833.451,00	(15.374.549,00)	97,66	
1.03.02.1.02.0032.5.2	BELANJA MODAL	5.591.457.000,00	5.578.139.000,00	(13.318.000,00)	99,76	
1.03.02.1.02.0032.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.591.457.000,00	5.578.139.000,00	(13.318.000,00)	99,76	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.374.972.600,00	3.835.655.205,00	(539.317.395,00)	87,67	
1.03.03.1.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	4.374.972.600,00	3.835.655.205,00	(539.317.395,00)	87,67	
1.03.03.1.01.0014	PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN/KOTA	12.910.000,00	8.784.000,00	(4.126.000,00)	68,04	
1.03.03.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	12.910.000,00	8.784.000,00	(4.126.000,00)	68,04	
1.03.03.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.910.000,00	8.784.000,00	(4.126.000,00)	68,04	
1.03.03.1.01.0015	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	887.922.000,00	811.071.156,00	(76.850.844,00)	91,34	
1.03.03.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	887.922.000,00	811.071.156,00	(76.850.844,00)	91,34	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.03.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.922.000,00	811.071.156,00	(76.850.844,00)	91,34	
1.03.03.1.01.0017	PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	2.052.712.000,00	1.831.713.675,00	(220.998.325,00)	89,23	
1.03.03.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	2.052.712.000,00	1.831.713.675,00	(220.998.325,00)	89,23	
1.03.03.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.052.712.000,00	1.831.713.675,00	(220.998.325,00)	89,23	
1.03.03.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.03.1.01.0017.5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.03.1.01.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.03.1.01.0019	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.421.428.600,00	1.184.086.374,00	(237.342.226,00)	83,30	
1.03.03.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	1.421.428.600,00	1.184.086.374,00	(237.342.226,00)	83,30	
1.03.03.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.428.600,00	1.184.086.374,00	(237.342.226,00)	83,30	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	370.462.000,00	257.287.251,00	(113.174.749,00)	69,45	
1.03.04.1.01	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	370.462.000,00	257.287.251,00	(113.174.749,00)	69,45	
1.03.04.1.01.0009	PEMBINAAN PENGEMBANGAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KABUPATEN/KOTA	12.850.000,00	9.984.000,00	(2.866.000,00)	77,70	
1.03.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	12.850.000,00	9.984.000,00	(2.866.000,00)	77,70	
1.03.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	9.984.000,00	(2.866.000,00)	77,70	
1.03.04.1.01.0016	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	357.612.000,00	247.303.251,00	(110.308.749,00)	69,15	
1.03.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	357.612.000,00	247.303.251,00	(110.308.749,00)	69,15	
1.03.04.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.612.000,00	247.303.251,00	(110.308.749,00)	69,15	
1.03.04.1.01.0016.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0016.5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0017	PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG TPA/TPST/SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.1.01.0017.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.422.792.000,00	1.339.338.130,00	(83.453.870,00)	94,13	
1.03.05.1.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	1.422.792.000,00	1.339.338.130,00	(83.453.870,00)	94,13	
1.03.05.1.01.0010	PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) KABUPATEN/KOTA	13.600.000,00	9.203.130,00	(4.396.870,00)	67,67	
1.03.05.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	9.203.130,00	(4.396.870,00)	67,67	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.05.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	9.203.130,00	(4.396.870,00)	67,67	
1.03.05.1.01.0015	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	1.409.192.000,00	1.330.135.000,00	(79.057.000,00)	94,39	
1.03.05.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	1.409.192.000,00	1.330.135.000,00	(79.057.000,00)	94,39	
1.03.05.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.409.192.000,00	1.330.135.000,00	(79.057.000,00)	94,39	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.03.07.1.01	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.03.07.1.01.0007	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.03.07.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.03.07.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.03.07.1.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0009	PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0029	PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0029.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.07.1.01.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93.943.991.538,00	85.558.434.150,00	(8.385.557.388,00)	91,07	
1.03.08.1.01	PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	93.943.991.538,00	85.558.434.150,00	(8.385.557.388,00)	91,07	
1.03.08.1.01.0012	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG, DAN MASYARAKAT	26.320.000,00	26.276.160,00	(43.840,00)	99,83	
1.03.08.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	26.320.000,00	26.276.160,00	(43.840,00)	99,83	
1.03.08.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.320.000,00	26.276.160,00	(43.840,00)	99,83	
1.03.08.1.01.0017	PENYELENGGARAAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK	29.260.000,00	28.251.055,00	(1.008.945,00)	96,55	
1.03.08.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	29.260.000,00	28.251.055,00	(1.008.945,00)	96,55	
1.03.08.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.260.000,00	28.251.055,00	(1.008.945,00)	96,55	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.08.1.01.0018	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.821.918,00	(1.178.082,00)	96,07	
1.03.08.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.821.918,00	(1.178.082,00)	96,07	
1.03.08.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.821.918,00	(1.178.082,00)	96,07	
1.03.08.1.01.0019	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	56.712.851.400,00	52.403.852.918,00	(4.308.998.482,00)	92,40	
1.03.08.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	42.116.834.500,00	38.529.337.863,00	(3.587.496.637,00)	91,48	
1.03.08.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.014.000,00	596.805.959,00	(31.208.041,00)	95,03	
1.03.08.1.01.0019.5.1.05	Belanja Hibah	41.488.820.500,00	37.932.531.904,00	(3.556.288.596,00)	91,43	
1.03.08.1.01.0019.5.2	BELANJA MODAL	14.596.016.900,00	13.874.515.055,00	(721.501.845,00)	95,06	
1.03.08.1.01.0019.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.596.016.900,00	13.874.515.055,00	(721.501.845,00)	95,06	
1.03.08.1.01.0020	PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	37.145.560.138,00	33.071.232.099,00	(4.074.328.039,00)	89,03	
1.03.08.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	37.145.560.138,00	33.071.232.099,00	(4.074.328.039,00)	89,03	
1.03.08.1.01.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.145.560.138,00	33.071.232.099,00	(4.074.328.039,00)	89,03	
1.03.08.1.01.0020.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.08.1.01.0020.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.574.255.818,00	1.573.247.663,00	(1.008.155,00)	99,94	
1.03.09.1.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.574.255.818,00	1.573.247.663,00	(1.008.155,00)	99,94	
1.03.09.1.01.0008	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	1.014.600.298,00	1.014.600.297,00	(1,00)	100,00	
1.03.09.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.09.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.09.1.01.0008.5.2	BELANJA MODAL	1.014.600.298,00	1.014.600.297,00	(1,00)	100,00	
1.03.09.1.01.0008.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.014.600.298,00	1.014.600.297,00	(1,00)	100,00	
1.03.09.1.01.0009	PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	506.596.400,00	505.588.246,00	(1.008.154,00)	99,80	
1.03.09.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	506.596.400,00	505.588.246,00	(1.008.154,00)	99,80	
1.03.09.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.596.400,00	505.588.246,00	(1.008.154,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.09.1.01.0010	SUPERVISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	53.059.120,00	53.059.120,00	0,00	100,00	
1.03.09.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.09.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.09.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	53.059.120,00	53.059.120,00	0,00	100,00	
1.03.09.1.01.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.059.120,00	53.059.120,00	0,00	100,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	562.235.116.565,10	528.252.751.589,00	(33.982.364.976,10)	93,96	
1.03.10.1.01	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	562.235.116.565,10	528.252.751.589,00	(33.982.364.976,10)	93,96	
1.03.10.1.01.0024	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN PROVINSI	9.492.169.350,00	8.520.387.287,00	(971.782.063,00)	89,76	
1.03.10.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	3.818.644.350,00	3.394.040.716,00	(424.603.634,00)	88,88	
1.03.10.1.01.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.818.644.350,00	3.394.040.716,00	(424.603.634,00)	88,88	
1.03.10.1.01.0024.5.2	BELANJA MODAL	5.673.525.000,00	5.126.346.571,00	(547.178.429,00)	90,36	
1.03.10.1.01.0024.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.673.525.000,00	5.126.346.571,00	(547.178.429,00)	90,36	
1.03.10.1.01.0026	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	5.856.687.207,10	5.672.060.571,00	(184.626.636,10)	96,85	
1.03.10.1.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	5.856.687.207,10	5.672.060.571,00	(184.626.636,10)	96,85	
1.03.10.1.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.856.687.207,10	5.672.060.571,00	(184.626.636,10)	96,85	
1.03.10.1.01.0029	PELEBARAN JEMBATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.10.1.01.0029.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.10.1.01.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.10.1.01.0029.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.10.1.01.0029.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.10.1.01.0030	REHABILITASI JALAN	109.585.395.400,00	104.252.623.420,00	(5.332.771.980,00)	95,13	
1.03.10.1.01.0030.5.1	BELANJA OPERASI	52.768.832.400,00	50.117.750.619,00	(2.651.081.781,00)	94,98	
1.03.10.1.01.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.768.832.400,00	50.117.750.619,00	(2.651.081.781,00)	94,98	
1.03.10.1.01.0030.5.2	BELANJA MODAL	56.816.563.000,00	54.134.872.801,00	(2.681.690.199,00)	95,28	
1.03.10.1.01.0030.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.816.563.000,00	54.134.872.801,00	(2.681.690.199,00)	95,28	
1.03.10.1.01.0031	REKONSTRUKSI JALAN	21.725.550.000,00	20.567.501.945,00	(1.158.048.055,00)	94,67	
1.03.10.1.01.0031.5.1	BELANJA OPERASI	448.904.000,00	360.901.245,00	(88.002.755,00)	80,40	
1.03.10.1.01.0031.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.904.000,00	360.901.245,00	(88.002.755,00)	80,40	
1.03.10.1.01.0031.5.2	BELANJA MODAL	21.276.646.000,00	20.206.600.700,00	(1.070.045.300,00)	94,97	
1.03.10.1.01.0031.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.276.646.000,00	20.206.600.700,00	(1.070.045.300,00)	94,97	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.10.1.01.0032	PEMBANGUNAN JEMBATAN	32.737.615.000,00	30.919.499.830,00	(1.818.115.170,00)	94,45	
1.03.10.1.01.0032.5.1	BELANJA OPERASI	253.502.000,00	230.997.130,00	(22.504.870,00)	91,12	
1.03.10.1.01.0032.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.502.000,00	230.997.130,00	(22.504.870,00)	91,12	
1.03.10.1.01.0032.5.2	BELANJA MODAL	32.484.113.000,00	30.688.502.700,00	(1.795.610.300,00)	94,47	
1.03.10.1.01.0032.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.484.113.000,00	30.688.502.700,00	(1.795.610.300,00)	94,47	
1.03.10.1.01.0033	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	72.979.796.956,00	71.659.921.186,00	(1.319.875.770,00)	98,19	
1.03.10.1.01.0033.5.1	BELANJA OPERASI	72.779.796.956,00	71.470.479.151,00	(1.309.317.805,00)	98,20	
1.03.10.1.01.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.779.796.956,00	71.470.479.151,00	(1.309.317.805,00)	98,20	
1.03.10.1.01.0033.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	189.442.035,00	(10.557.965,00)	94,72	
1.03.10.1.01.0033.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	189.442.035,00	(10.557.965,00)	94,72	
1.03.10.1.01.0035	PELEBARAN JALAN MENAMBAH LAJUR	29.284.107.000,00	29.026.352.580,00	(257.754.420,00)	99,12	
1.03.10.1.01.0035.5.1	BELANJA OPERASI	45.930.000,00	43.668.580,00	(2.261.420,00)	95,08	
1.03.10.1.01.0035.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.930.000,00	43.668.580,00	(2.261.420,00)	95,08	
1.03.10.1.01.0035.5.2	BELANJA MODAL	29.238.177.000,00	28.982.684.000,00	(255.493.000,00)	99,13	
1.03.10.1.01.0035.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.238.177.000,00	28.982.684.000,00	(255.493.000,00)	99,13	
1.03.10.1.01.0038	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	78.474.608.837,68	77.355.538.621,00	(1.119.070.216,68)	98,57	
1.03.10.1.01.0038.5.1	BELANJA OPERASI	62.999.616.757,68	62.030.287.413,00	(969.329.344,68)	98,46	
1.03.10.1.01.0038.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.999.616.757,68	62.030.287.413,00	(969.329.344,68)	98,46	
1.03.10.1.01.0038.5.2	BELANJA MODAL	15.474.992.080,00	15.325.251.208,00	(149.740.872,00)	99,03	
1.03.10.1.01.0038.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.474.992.080,00	15.325.251.208,00	(149.740.872,00)	99,03	
1.03.10.1.01.0040	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR	27.286.781.000,00	24.787.908.450,00	(2.498.872.550,00)	90,84	
1.03.10.1.01.0040.5.1	BELANJA OPERASI	172.880.000,00	150.206.600,00	(22.673.400,00)	86,88	
1.03.10.1.01.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.880.000,00	150.206.600,00	(22.673.400,00)	86,88	
1.03.10.1.01.0040.5.2	BELANJA MODAL	27.113.901.000,00	24.637.701.850,00	(2.476.199.150,00)	90,87	
1.03.10.1.01.0040.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.113.901.000,00	24.637.701.850,00	(2.476.199.150,00)	90,87	
1.03.10.1.01.0041	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	11.677.473.400,00	11.473.044.346,00	(204.429.054,00)	98,25	
1.03.10.1.01.0041.5.1	BELANJA OPERASI	11.677.473.400,00	11.473.044.346,00	(204.429.054,00)	98,25	
1.03.10.1.01.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.677.473.400,00	11.473.044.346,00	(204.429.054,00)	98,25	
1.03.10.1.01.0042	PEMBANGUNAN JALAN	162.692.630.414,32	143.605.228.855,00	(19.087.401.559,32)	88,27	
1.03.10.1.01.0042.5.1	BELANJA OPERASI	79.300.047.000,00	67.639.321.639,00	(11.660.725.361,00)	85,30	
1.03.10.1.01.0042.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.300.047.000,00	67.639.321.639,00	(11.660.725.361,00)	85,30	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.10.1.01.0042.5.2	BELANJA MODAL	83.392.583.414,32	75.965.907.216,00	(7.426.676.198,32)	91,09	
1.03.10.1.01.0042.5.2.01	Belanja Modal Tanah	63.617.423.104,32	56.219.962.731,00	(7.397.460.373,32)	88,37	
1.03.10.1.01.0042.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.775.160.310,00	19.745.944.485,00	(29.215.825,00)	99,85	
1.03.10.1.01.0043	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	442.302.000,00	412.684.498,00	(29.617.502,00)	93,30	
1.03.10.1.01.0043.5.1	BELANJA OPERASI	442.302.000,00	412.684.498,00	(29.617.502,00)	93,30	
1.03.10.1.01.0043.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.302.000,00	412.684.498,00	(29.617.502,00)	93,30	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.340.221.500,00	3.974.520.754,00	(365.700.746,00)	91,57	
1.03.11.1.01	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	687.904.500,00	662.111.403,00	(25.793.097,00)	96,25	
1.03.11.1.01.0011	PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	316.615.500,00	299.387.653,00	(17.227.847,00)	94,56	
1.03.11.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	316.615.500,00	299.387.653,00	(17.227.847,00)	94,56	
1.03.11.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.615.500,00	299.387.653,00	(17.227.847,00)	94,56	
1.03.11.1.01.0014	FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	284.122.000,00	281.359.350,00	(2.762.650,00)	99,03	
1.03.11.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	284.122.000,00	281.359.350,00	(2.762.650,00)	99,03	
1.03.11.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.122.000,00	281.359.350,00	(2.762.650,00)	99,03	
1.03.11.1.01.0015	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	87.167.000,00	81.364.400,00	(5.802.600,00)	93,34	
1.03.11.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	87.167.000,00	81.364.400,00	(5.802.600,00)	93,34	
1.03.11.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.167.000,00	81.364.400,00	(5.802.600,00)	93,34	
1.03.11.1.02	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN DAERAH PROVINSI	2.929.594.000,00	2.630.990.740,00	(298.603.260,00)	89,81	
1.03.11.1.02.0006	OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	1.106.344.000,00	1.025.606.400,00	(80.737.600,00)	92,70	
1.03.11.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	481.344.000,00	400.606.400,00	(80.737.600,00)	83,23	
1.03.11.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.344.000,00	400.606.400,00	(80.737.600,00)	83,23	
1.03.11.1.02.0006.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.11.1.02.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00	
1.03.11.1.02.0007	PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	1.348.954.000,00	1.137.680.485,00	(211.273.515,00)	84,34	
1.03.11.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	802.913.000,00	601.668.485,00	(201.244.515,00)	74,94	
1.03.11.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.913.000,00	601.668.485,00	(201.244.515,00)	74,94	
1.03.11.1.02.0007.5.2	BELANJA MODAL	546.041.000,00	536.012.000,00	(10.029.000,00)	98,16	
1.03.11.1.02.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.041.000,00	536.012.000,00	(10.029.000,00)	98,16	
1.03.11.1.02.0008	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN PROVINSI	474.296.000,00	467.703.855,00	(6.592.145,00)	98,61	
1.03.11.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	474.296.000,00	467.703.855,00	(6.592.145,00)	98,61	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.11.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.296.000,00	467.703.855,00	(6.592.145,00)	98,61	
1.03.11.1.03	KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	722.723.000,00	681.418.611,00	(41.304.389,00)	94,28	
1.03.11.1.03.0004	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	305.734.000,00	285.365.840,00	(20.368.160,00)	93,34	
1.03.11.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	305.734.000,00	285.365.840,00	(20.368.160,00)	93,34	
1.03.11.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.734.000,00	285.365.840,00	(20.368.160,00)	93,34	
1.03.11.1.03.0006	PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI	146.344.000,00	138.704.500,00	(7.639.500,00)	94,78	
1.03.11.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	146.344.000,00	138.704.500,00	(7.639.500,00)	94,78	
1.03.11.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.344.000,00	138.704.500,00	(7.639.500,00)	94,78	
1.03.11.1.03.0008	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI	270.645.000,00	257.348.271,00	(13.296.729,00)	95,09	
1.03.11.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	270.645.000,00	257.348.271,00	(13.296.729,00)	95,09	
1.03.11.1.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.645.000,00	257.348.271,00	(13.296.729,00)	95,09	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.835.421.800,00	3.684.779.867,00	(150.641.933,00)	96,07	
1.03.12.1.01	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	(55.138.312,00)	96,10	
1.03.12.1.01.0003	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	(55.138.312,00)	96,10	
1.03.12.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	(55.138.312,00)	96,10	
1.03.12.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	(55.138.312,00)	96,10	
1.03.12.1.02	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG	45.342.000,00	34.829.580,00	(10.512.420,00)	76,82	
1.03.12.1.02.0004	PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG	19.814.000,00	15.653.300,00	(4.160.700,00)	79,00	
1.03.12.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	19.814.000,00	15.653.300,00	(4.160.700,00)	79,00	
1.03.12.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.814.000,00	15.653.300,00	(4.160.700,00)	79,00	
1.03.12.1.02.0006	MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW DAN RDTR KABUPATEN/KOTA	25.528.000,00	19.176.280,00	(6.351.720,00)	75,12	
1.03.12.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.528.000,00	19.176.280,00	(6.351.720,00)	75,12	
1.03.12.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.528.000,00	19.176.280,00	(6.351.720,00)	75,12	
1.03.12.1.03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI	270.309.000,00	256.456.914,00	(13.852.086,00)	94,88	
1.03.12.1.03.0004	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	114.442.000,00	106.920.754,00	(7.521.246,00)	93,43	
1.03.12.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	114.442.000,00	106.920.754,00	(7.521.246,00)	93,43	
1.03.12.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.442.000,00	106.920.754,00	(7.521.246,00)	93,43	
1.03.12.1.03.0007	PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	155.867.000,00	149.536.160,00	(6.330.840,00)	95,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.12.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	155.867.000,00	149.536.160,00	(6.330.840,00)	95,94	
1.03.12.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.867.000,00	149.536.160,00	(6.330.840,00)	95,94	
1.03.12.1.04	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI	2.106.320.800,00	2.035.181.685,00	(71.139.115,00)	96,62	
1.03.12.1.04.0011	PENILAIAN PERWUJUDAN RTR	1.657.444.800,00	1.626.940.581,00	(30.504.219,00)	98,16	
1.03.12.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.657.444.800,00	1.626.940.581,00	(30.504.219,00)	98,16	
1.03.12.1.04.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.444.800,00	1.626.940.581,00	(30.504.219,00)	98,16	
1.03.12.1.04.0013	PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG	448.876.000,00	408.241.104,00	(40.634.896,00)	90,95	
1.03.12.1.04.0013.5.1	BELANJA OPERASI	448.876.000,00	408.241.104,00	(40.634.896,00)	90,95	
1.03.12.1.04.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.876.000,00	408.241.104,00	(40.634.896,00)	90,95	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	940.558.351.943,00	877.785.453.408,00	(62.772.898.535,00)	93,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(936.267.887.143,00)	(871.164.949.738,00)	65.102.937.405,00	93,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(936.267.887.143,00)	(871.164.949.738,00)	65.102.937.405,00	93,05	

1.04.2.10.0.00.01.0000

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Kerja : 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
1.04.2.10.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	6.540.000,00	13.680.000,00	7.140.000,00	209,17	
5	BELANJA DAERAH					
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.334.492.399,00	30.120.484.997,00	(2.214.007.402,00)	93,15	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.04.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.652.720.000,00	2.501.605.008,00	(151.114.992,00)	94,30	
1.04.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23	
1.04.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23	
1.04.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000,00	132.461.603,00	(14.338.397,00)	90,23	
1.04.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	15.000.000,00	13.155.000,00	(1.845.000,00)	87,70	
1.04.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.155.000,00	(1.845.000,00)	87,70	
1.04.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.155.000,00	(1.845.000,00)	87,70	
1.04.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	15.000.000,00	13.200.000,00	(1.800.000,00)	88,00	
1.04.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.200.000,00	(1.800.000,00)	88,00	
1.04.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.200.000,00	(1.800.000,00)	88,00	
1.04.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
1.04.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
1.04.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	50.000.000,00	46.291.370,00	(3.708.630,00)	92,58	
1.04.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.291.370,00	(3.708.630,00)	92,58	
1.04.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.291.370,00	(3.708.630,00)	92,58	
1.04.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	420.000.000,00	358.112.990,00	(61.887.010,00)	85,26	
1.04.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	358.112.990,00	(61.887.010,00)	85,26	
1.04.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	358.112.990,00	(61.887.010,00)	85,26	
1.04.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	850.000.000,00	826.963.800,00	(23.036.200,00)	97,29	
1.04.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	826.963.800,00	(23.036.200,00)	97,29	
1.04.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	826.963.800,00	(23.036.200,00)	97,29	
1.04.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	111.400.000,00	95.118.000,00	(16.282.000,00)	85,38	
1.04.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	111.400.000,00	95.118.000,00	(16.282.000,00)	85,38	
1.04.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.400.000,00	95.118.000,00	(16.282.000,00)	85,38	
1.04.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	1.014.520.000,00	986.347.245,00	(28.172.755,00)	97,22	
1.04.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.014.520.000,00	986.347.245,00	(28.172.755,00)	97,22	
1.04.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.014.520.000,00	986.347.245,00	(28.172.755,00)	97,22	
1.04.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.527.725.750,00	16.989.307.082,00	(538.418.668,00)	96,93	
1.04.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	(490.609.142,00)	96,99	
1.04.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	(490.609.142,00)	96,99	
1.04.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	(490.609.142,00)	96,99	
1.04.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	569.960.000,00	523.969.902,00	(45.990.098,00)	91,93	
1.04.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	569.960.000,00	523.969.902,00	(45.990.098,00)	91,93	
1.04.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.960.000,00	523.969.902,00	(45.990.098,00)	91,93	
1.04.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	340.203.750,00	340.179.569,00	(24.181,00)	99,99	
1.04.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	340.203.750,00	340.179.569,00	(24.181,00)	99,99	
1.04.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.203.750,00	340.179.569,00	(24.181,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	10.000.000,00	9.999.896,00	(104,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.896,00	(104,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.896,00	(104,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	100.430.000,00	100.429.826,00	(174,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	100.430.000,00	100.429.826,00	(174,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.430.000,00	100.429.826,00	(174,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	10.000.000,00	9.999.899,00	(101,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.899,00	(101,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.899,00	(101,00)	100,00	
1.04.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	189.532.000,00	187.748.932,00	(1.783.068,00)	99,06	
1.04.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	189.532.000,00	187.748.932,00	(1.783.068,00)	99,06	
1.04.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.532.000,00	187.748.932,00	(1.783.068,00)	99,06	
1.04.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10.000.000,00	9.988.200,00	(11.800,00)	99,88	
1.04.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.988.200,00	(11.800,00)	99,88	
1.04.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.988.200,00	(11.800,00)	99,88	
1.04.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	225.332.500,00	204.759.000,00	(20.573.500,00)	90,87	
1.04.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	120.000.000,00	99.826.000,00	(20.174.000,00)	83,19	
1.04.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	99.826.000,00	(20.174.000,00)	83,19	
1.04.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	99.826.000,00	(20.174.000,00)	83,19	
1.04.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	105.332.500,00	104.933.000,00	(399.500,00)	99,62	
1.04.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	105.332.500,00	104.933.000,00	(399.500,00)	99,62	
1.04.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.332.500,00	104.933.000,00	(399.500,00)	99,62	
1.04.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	420.665.500,00	370.987.654,00	(49.677.846,00)	88,19	
1.04.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	187.625.500,00	176.812.399,00	(10.813.101,00)	94,24	
1.04.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	187.625.500,00	176.812.399,00	(10.813.101,00)	94,24	
1.04.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.625.500,00	176.812.399,00	(10.813.101,00)	94,24	
1.04.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	16.880.690,00	(3.119.310,00)	84,40	
1.04.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.880.690,00	(3.119.310,00)	84,40	
1.04.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.880.690,00	(3.119.310,00)	84,40	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	112.627.000,00	104.650.380,00	(7.976.620,00)	92,92	
1.04.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	112.627.000,00	104.650.380,00	(7.976.620,00)	92,92	
1.04.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.627.000,00	104.650.380,00	(7.976.620,00)	92,92	
1.04.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	37.373.000,00	31.974.790,00	(5.398.210,00)	85,56	
1.04.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.373.000,00	31.974.790,00	(5.398.210,00)	85,56	
1.04.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.373.000,00	31.974.790,00	(5.398.210,00)	85,56	
1.04.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	63.040.000,00	40.669.395,00	(22.370.605,00)	64,51	
1.04.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	63.040.000,00	40.669.395,00	(22.370.605,00)	64,51	
1.04.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.040.000,00	40.669.395,00	(22.370.605,00)	64,51	
1.04.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.674.039.429,00	2.524.645.162,00	(149.394.267,00)	94,41	
1.04.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	200.000.000,00	182.820.065,00	(17.179.935,00)	91,41	
1.04.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	182.820.065,00	(17.179.935,00)	91,41	
1.04.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	182.820.065,00	(17.179.935,00)	91,41	
1.04.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	661.596.036,00	637.588.665,00	(24.007.371,00)	96,37	
1.04.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	661.596.036,00	637.588.665,00	(24.007.371,00)	96,37	
1.04.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.596.036,00	637.588.665,00	(24.007.371,00)	96,37	
1.04.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	80.000.000,00	77.445.000,00	(2.555.000,00)	96,81	
1.04.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	77.445.000,00	(2.555.000,00)	96,81	
1.04.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	77.445.000,00	(2.555.000,00)	96,81	
1.04.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	95.001.964,00	91.495.995,00	(3.505.969,00)	96,31	
1.04.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	95.001.964,00	91.495.995,00	(3.505.969,00)	96,31	
1.04.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.001.964,00	91.495.995,00	(3.505.969,00)	96,31	
1.04.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.000.000,00	50.708.200,00	(4.291.800,00)	92,20	
1.04.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	50.708.200,00	(4.291.800,00)	92,20	
1.04.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	50.708.200,00	(4.291.800,00)	92,20	
1.04.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	160.218.000,00	140.000.000,00	(20.218.000,00)	87,38	
1.04.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	160.218.000,00	140.000.000,00	(20.218.000,00)	87,38	
1.04.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.218.000,00	140.000.000,00	(20.218.000,00)	87,38	
1.04.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	230.000.000,00	225.720.000,00	(4.280.000,00)	98,14	
1.04.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	225.720.000,00	(4.280.000,00)	98,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	225.720.000,00	(4.280.000,00)	98,14	
1.04.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	1.192.223.429,00	1.118.867.237,00	(73.356.192,00)	93,85	
1.04.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.192.223.429,00	1.118.867.237,00	(73.356.192,00)	93,85	
1.04.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.223.429,00	1.118.867.237,00	(73.356.192,00)	93,85	
1.04.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.924.225.000,00	1.694.999.771,00	(229.225.229,00)	88,09	
1.04.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.924.225.000,00	1.694.999.771,00	(229.225.229,00)	88,09	
1.04.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.259.000,00	9.255.000,00	(4.000,00)	99,96	
1.04.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.259.000,00	9.255.000,00	(4.000,00)	99,96	
1.04.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.914.966.000,00	1.685.744.771,00	(229.221.229,00)	88,03	
1.04.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.914.966.000,00	1.685.744.771,00	(229.221.229,00)	88,03	
1.04.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.728.673.720,00	3.454.258.195,00	(274.415.525,00)	92,64	
1.04.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	550.000.000,00	431.150.411,00	(118.849.589,00)	78,39	
1.04.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	431.150.411,00	(118.849.589,00)	78,39	
1.04.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	431.150.411,00	(118.849.589,00)	78,39	
1.04.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	49.974.000,00	(26.000,00)	99,95	
1.04.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.974.000,00	(26.000,00)	99,95	
1.04.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.974.000,00	(26.000,00)	99,95	
1.04.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.128.673.720,00	2.973.133.784,00	(155.539.936,00)	95,03	
1.04.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.128.673.720,00	2.973.133.784,00	(155.539.936,00)	95,03	
1.04.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.128.673.720,00	2.973.133.784,00	(155.539.936,00)	95,03	
1.04.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.181.110.500,00	2.379.923.125,00	(801.187.375,00)	74,81	
1.04.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	186.025.000,00	179.150.565,00	(6.874.435,00)	96,30	
1.04.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	186.025.000,00	179.150.565,00	(6.874.435,00)	96,30	
1.04.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.025.000,00	179.150.565,00	(6.874.435,00)	96,30	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.280.000.000,00	723.681.709,00	(556.318.291,00)	56,54	
1.04.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.280.000.000,00	723.681.709,00	(556.318.291,00)	56,54	
1.04.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000.000,00	723.681.709,00	(556.318.291,00)	56,54	
1.04.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	490.085.500,00	271.188.885,00	(218.896.615,00)	55,34	
1.04.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	490.085.500,00	271.188.885,00	(218.896.615,00)	55,34	
1.04.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.085.500,00	271.188.885,00	(218.896.615,00)	55,34	
1.04.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.225.000.000,00	1.205.901.966,00	(19.098.034,00)	98,44	
1.04.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	825.000.000,00	807.560.966,00	(17.439.034,00)	97,89	
1.04.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.000.000,00	807.560.966,00	(17.439.034,00)	97,89	
1.04.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	398.341.000,00	(1.659.000,00)	99,59	
1.04.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.341.000,00	(1.659.000,00)	99,59	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.985.888.709,00	35.024.907.615,00	(2.960.981.094,00)	92,21	
1.04.02.1.01	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.605.925.000,00	1.559.806.820,00	(46.118.180,00)	97,13	
1.04.02.1.01.0002	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	240.870.000,00	233.925.300,00	(6.944.700,00)	97,12	
1.04.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.870.000,00	233.925.300,00	(6.944.700,00)	97,12	
1.04.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.870.000,00	233.925.300,00	(6.944.700,00)	97,12	
1.04.02.1.01.0003	PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI	240.392.000,00	233.578.800,00	(6.813.200,00)	97,17	
1.04.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	240.392.000,00	233.578.800,00	(6.813.200,00)	97,17	
1.04.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.392.000,00	233.578.800,00	(6.813.200,00)	97,17	
1.04.02.1.01.0006	PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS	249.740.000,00	236.826.700,00	(12.913.300,00)	94,83	
1.04.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	249.740.000,00	236.826.700,00	(12.913.300,00)	94,83	
1.04.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.740.000,00	236.826.700,00	(12.913.300,00)	94,83	
1.04.02.1.01.0008	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	240.144.000,00	233.586.500,00	(6.557.500,00)	97,27	
1.04.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	240.144.000,00	233.586.500,00	(6.557.500,00)	97,27	
1.04.02.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.144.000,00	233.586.500,00	(6.557.500,00)	97,27	
1.04.02.1.01.0009	PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA PROVINSI	249.416.000,00	241.560.350,00	(7.855.650,00)	96,85	
1.04.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	249.416.000,00	241.560.350,00	(7.855.650,00)	96,85	
1.04.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.416.000,00	241.560.350,00	(7.855.650,00)	96,85	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.02.1.01.0010	PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	185.363.000,00	182.797.050,00	(2.565.950,00)	98,62	
1.04.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	185.363.000,00	182.797.050,00	(2.565.950,00)	98,62	
1.04.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.363.000,00	182.797.050,00	(2.565.950,00)	98,62	
1.04.02.1.01.0011	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI	200.000.000,00	197.532.120,00	(2.467.880,00)	98,77	
1.04.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	197.532.120,00	(2.467.880,00)	98,77	
1.04.02.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.532.120,00	(2.467.880,00)	98,77	
1.04.02.1.02	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	531.195.000,00	459.352.401,00	(71.842.599,00)	86,48	
1.04.02.1.02.0001	SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA	76.000.000,00	66.256.000,00	(9.744.000,00)	87,18	
1.04.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	76.000.000,00	66.256.000,00	(9.744.000,00)	87,18	
1.04.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	66.256.000,00	(9.744.000,00)	87,18	
1.04.02.1.02.0004	PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN TIM SATGAS, TIM PENDAMPING DAN FASILITATOR	331.445.000,00	297.775.401,00	(33.669.599,00)	89,84	
1.04.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	331.445.000,00	297.775.401,00	(33.669.599,00)	89,84	
1.04.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.445.000,00	297.775.401,00	(33.669.599,00)	89,84	
1.04.02.1.02.0006	KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN	123.750.000,00	95.321.000,00	(28.429.000,00)	77,03	
1.04.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	123.750.000,00	95.321.000,00	(28.429.000,00)	77,03	
1.04.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.750.000,00	95.321.000,00	(28.429.000,00)	77,03	
1.04.02.1.03	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	35.731.490.709,00	32.928.671.394,00	(2.802.819.315,00)	92,16	
1.04.02.1.03.0001	REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	3.009.650.609,00	2.854.362.104,00	(155.288.505,00)	94,84	
1.04.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.009.650.609,00	2.854.362.104,00	(155.288.505,00)	94,84	
1.04.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.009.650.609,00	2.854.362.104,00	(155.288.505,00)	94,84	
1.04.02.1.03.0004	PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	19.169.420.000,00	18.226.742.140,00	(942.677.860,00)	95,08	
1.04.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.281.790.000,00	14.473.524.140,00	(808.265.860,00)	94,71	
1.04.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.281.790.000,00	14.473.524.140,00	(808.265.860,00)	94,71	
1.04.02.1.03.0004.5.2	BELANJA MODAL	3.887.630.000,00	3.753.218.000,00	(134.412.000,00)	96,54	
1.04.02.1.03.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.630.000,00	143.349.000,00	(4.281.000,00)	97,10	
1.04.02.1.03.0004.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.740.000.000,00	3.609.869.000,00	(130.131.000,00)	96,52	
1.04.02.1.03.0012	PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	13.552.420.100,00	11.847.567.150,00	(1.704.852.950,00)	87,42	
1.04.02.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	13.552.420.100,00	11.847.567.150,00	(1.704.852.950,00)	87,42	
1.04.02.1.03.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.552.420.100,00	11.847.567.150,00	(1.704.852.950,00)	87,42	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.02.1.04	PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	117.278.000,00	77.077.000,00	(40.201.000,00)	65,72	
1.04.02.1.04.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	50.140.000,00	20.510.000,00	(29.630.000,00)	40,91	
1.04.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.140.000,00	20.510.000,00	(29.630.000,00)	40,91	
1.04.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.140.000,00	20.510.000,00	(29.630.000,00)	40,91	
1.04.02.1.04.0007	PENATAUSAHAAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	67.138.000,00	56.567.000,00	(10.571.000,00)	84,25	
1.04.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	67.138.000,00	56.567.000,00	(10.571.000,00)	84,25	
1.04.02.1.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.138.000,00	56.567.000,00	(10.571.000,00)	84,25	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.739.904.557,00	42.608.747.594,00	(1.131.156.963,00)	97,41	
1.04.03.1.01	PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	864.192.000,00	606.121.503,00	(258.070.497,00)	70,14	
1.04.03.1.01.0008	PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	147.349.000,00	126.814.500,00	(20.534.500,00)	86,06	
1.04.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	147.349.000,00	126.814.500,00	(20.534.500,00)	86,06	
1.04.03.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.349.000,00	126.814.500,00	(20.534.500,00)	86,06	
1.04.03.1.01.0012	PENATAUSAHAAN SERAH TERIMA RUMAH BARU LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	75.000.000,00	74.242.085,00	(757.915,00)	98,99	
1.04.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.242.085,00	(757.915,00)	98,99	
1.04.03.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.242.085,00	(757.915,00)	98,99	
1.04.03.1.01.0014	PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH	170.839.000,00	135.070.870,00	(35.768.130,00)	79,06	
1.04.03.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	170.839.000,00	135.070.870,00	(35.768.130,00)	79,06	
1.04.03.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.839.000,00	135.070.870,00	(35.768.130,00)	79,06	
1.04.03.1.01.0017	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN	324.913.000,00	184.129.220,00	(140.783.780,00)	56,67	
1.04.03.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	324.913.000,00	184.129.220,00	(140.783.780,00)	56,67	
1.04.03.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.913.000,00	184.129.220,00	(140.783.780,00)	56,67	
1.04.03.1.01.0018	PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	146.091.000,00	85.864.828,00	(60.226.172,00)	58,77	
1.04.03.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	146.091.000,00	85.864.828,00	(60.226.172,00)	58,77	
1.04.03.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.091.000,00	85.864.828,00	(60.226.172,00)	58,77	
1.04.03.1.02	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	42.875.712.557,00	42.002.626.091,00	(873.086.466,00)	97,96	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.03.1.02.0003	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	14.766.680.800,00	14.627.524.540,00	(139.156.260,00)	99,06	
1.04.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.766.680.800,00	14.627.524.540,00	(139.156.260,00)	99,06	
1.04.03.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.766.680.800,00	14.627.524.540,00	(139.156.260,00)	99,06	
1.04.03.1.02.0013	PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	28.109.031.757,00	27.375.101.551,00	(733.930.206,00)	97,39	
1.04.03.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	28.109.031.757,00	27.375.101.551,00	(733.930.206,00)	97,39	
1.04.03.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.109.031.757,00	27.375.101.551,00	(733.930.206,00)	97,39	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	406.084.192.721,00	401.259.207.079,00	(4.824.985.642,00)	98,81	
1.04.05.1.01	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	406.084.192.721,00	401.259.207.079,00	(4.824.985.642,00)	98,81	
1.04.05.1.01.0001	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	2.134.416.000,00	1.979.953.974,00	(154.462.026,00)	92,76	
1.04.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.134.416.000,00	1.979.953.974,00	(154.462.026,00)	92,76	
1.04.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.134.416.000,00	1.979.953.974,00	(154.462.026,00)	92,76	
1.04.05.1.01.0002	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN	403.773.144.221,00	399.157.149.981,00	(4.615.994.240,00)	98,86	
1.04.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	403.773.144.221,00	399.157.149.981,00	(4.615.994.240,00)	98,86	
1.04.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.773.144.221,00	399.157.149.981,00	(4.615.994.240,00)	98,86	
1.04.05.1.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.1.01.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.1.01.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.1.01.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN	176.632.500,00	122.103.124,00	(54.529.376,00)	69,13	
1.04.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	176.632.500,00	122.103.124,00	(54.529.376,00)	69,13	
1.04.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.632.500,00	122.103.124,00	(54.529.376,00)	69,13	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65	
1.04.06.1.01	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65	
1.04.06.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI MENENGAH	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65	
1.04.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65	
1.04.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.026.000,00	96.674.000,00	(3.352.000,00)	96,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57	
2.10.03.1.01	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57	
2.10.03.1.01.0005	PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57	
2.10.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57	
2.10.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.350.000,00	62.055.599,00	(22.294.401,00)	73,57	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000,00	150.423.799,00	(33.926.201,00)	81,60	
2.10.06.1.01	PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	184.350.000,00	150.423.799,00	(33.926.201,00)	81,60	
2.10.06.1.01.0002	KOORDINASI PENETAPAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.350.000,00	52.285.900,00	(32.064.100,00)	61,99	
2.10.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	84.350.000,00	52.285.900,00	(32.064.100,00)	61,99	
2.10.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.350.000,00	52.285.900,00	(32.064.100,00)	61,99	
2.10.06.1.01.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN AKSES DALAM PEMANFAATAN REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	98.137.899,00	(1.862.101,00)	98,14	
2.10.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.137.899,00	(1.862.101,00)	98,14	
2.10.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.137.899,00	(1.862.101,00)	98,14	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	172.212.899,00	(27.787.101,00)	86,11	
2.10.10.1.01	PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	172.212.899,00	(27.787.101,00)	86,11	
2.10.10.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	100.000.000,00	85.537.899,00	(14.462.101,00)	85,54	
2.10.10.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	85.537.899,00	(14.462.101,00)	85,54	
2.10.10.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.537.899,00	(14.462.101,00)	85,54	
2.10.10.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KEWENANGAN PROVINSI	100.000.000,00	86.675.000,00	(13.325.000,00)	86,68	
2.10.10.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	86.675.000,00	(13.325.000,00)	86,68	
2.10.10.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.675.000,00	(13.325.000,00)	86,68	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	520.713.204.386,00	509.494.713.582,00	(11.218.490.804,00)	97,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(520.706.664.386,00)	(509.481.033.582,00)	11.225.630.804,00	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(520.706.664.386,00)	(509.481.033.582,00)	11.225.630.804,00	97,84	

1.05.0.00.0.00.01.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Kerja : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.993.088.280,00	31.072.314.164,00	(920.774.116,00)	97,12	
1.05.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	214.383.600,00	203.717.855,00	(10.665.745,00)	95,02	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.05.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.557.000,00	22.768.620,00	(2.788.380,00)	89,09	
1.05.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.557.000,00	22.768.620,00	(2.788.380,00)	89,09	
1.05.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.557.000,00	22.768.620,00	(2.788.380,00)	89,09	
1.05.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.700.000,00	2.971.560,00	(728.440,00)	80,31	
1.05.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	2.971.560,00	(728.440,00)	80,31	
1.05.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	2.971.560,00	(728.440,00)	80,31	
1.05.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.500.000,00	2.456.000,00	(44.000,00)	98,24	
1.05.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.456.000,00	(44.000,00)	98,24	
1.05.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.456.000,00	(44.000,00)	98,24	
1.05.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.350.000,00	26.118.875,00	(231.125,00)	99,12	
1.05.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	26.350.000,00	26.118.875,00	(231.125,00)	99,12	
1.05.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.350.000,00	26.118.875,00	(231.125,00)	99,12	
1.05.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	106.720.000,00	104.696.200,00	(2.023.800,00)	98,10	
1.05.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	106.720.000,00	104.696.200,00	(2.023.800,00)	98,10	
1.05.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.720.000,00	104.696.200,00	(2.023.800,00)	98,10	
1.05.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	18.682.600,00	16.397.600,00	(2.285.000,00)	87,77	
1.05.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	18.682.600,00	16.397.600,00	(2.285.000,00)	87,77	
1.05.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.682.600,00	16.397.600,00	(2.285.000,00)	87,77	
1.05.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.674.000,00	22.109.000,00	(2.565.000,00)	89,60	
1.05.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	24.674.000,00	22.109.000,00	(2.565.000,00)	89,60	
1.05.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.674.000,00	22.109.000,00	(2.565.000,00)	89,60	
1.05.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.015.560.000,00	22.438.779.149,00	(576.780.851,00)	97,49	
1.05.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.730.200.000,00	22.157.251.649,00	(572.948.351,00)	97,48	
1.05.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.730.200.000,00	22.157.251.649,00	(572.948.351,00)	97,48	
1.05.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	22.730.200.000,00	22.157.251.649,00	(572.948.351,00)	97,48	
1.05.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	264.360.000,00	261.140.000,00	(3.220.000,00)	98,78	
1.05.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	264.360.000,00	261.140.000,00	(3.220.000,00)	98,78	
1.05.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.360.000,00	261.140.000,00	(3.220.000,00)	98,78	
1.05.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000,00	4.867.500,00	(132.500,00)	97,35	
1.05.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.867.500,00	(132.500,00)	97,35	
1.05.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.867.500,00	(132.500,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.05.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.05.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.05.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.720.000,00	(280.000,00)	94,40	
1.05.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.720.000,00	(280.000,00)	94,40	
1.05.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.720.000,00	(280.000,00)	94,40	
1.05.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	70.100.000,00	0,00	(70.100.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	69.100.000,00	0,00	(69.100.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	69.100.000,00	0,00	(69.100.000,00)	0,00	
1.05.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.100.000,00	0,00	(69.100.000,00)	0,00	
1.05.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	385.596.700,00	385.332.297,00	(264.403,00)	99,93	
1.05.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	9.896.205,00	(103.795,00)	98,96	
1.05.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.896.205,00	(103.795,00)	98,96	
1.05.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.896.205,00	(103.795,00)	98,96	
1.05.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	357.444.700,00	357.284.092,00	(160.608,00)	99,96	
1.05.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	357.444.700,00	357.284.092,00	(160.608,00)	99,96	
1.05.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.444.700,00	357.284.092,00	(160.608,00)	99,96	
1.05.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	191.499.740,00	119.665.770,00	(71.833.970,00)	62,49	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	191.499.740,00	119.665.770,00	(71.833.970,00)	62,49	
1.05.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	144.740,00	0,00	(144.740,00)	0,00	
1.05.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.740,00	0,00	(144.740,00)	0,00	
1.05.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	191.355.000,00	119.665.770,00	(71.689.230,00)	62,54	
1.05.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.355.000,00	119.665.770,00	(71.689.230,00)	62,54	
1.05.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	(166.006.376,00)	97,65	
1.05.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	(166.006.376,00)	97,65	
1.05.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	(166.006.376,00)	97,65	
1.05.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	(166.006.376,00)	97,65	
1.05.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.040.273.000,00	1.015.150.229,00	(25.122.771,00)	97,58	
1.05.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	928.367.000,00	907.057.708,00	(21.309.292,00)	97,70	
1.05.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	928.367.000,00	907.057.708,00	(21.309.292,00)	97,70	
1.05.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.367.000,00	907.057.708,00	(21.309.292,00)	97,70	
1.05.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	61.906.000,00	60.174.521,00	(1.731.479,00)	97,20	
1.05.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.906.000,00	60.174.521,00	(1.731.479,00)	97,20	
1.05.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.906.000,00	60.174.521,00	(1.731.479,00)	97,20	
1.05.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	47.918.000,00	(2.082.000,00)	95,84	
1.05.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.918.000,00	(2.082.000,00)	95,84	
1.05.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.918.000,00	(2.082.000,00)	95,84	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.480.339.000,00	1.867.777.261,00	(612.561.739,00)	75,30	
1.05.02.1.01	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.418.767.000,00	1.302.159.228,00	(116.607.772,00)	91,78	
1.05.02.1.01.0006	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	38.000.000,00	30.759.550,00	(7.240.450,00)	80,95	
1.05.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	30.759.550,00	(7.240.450,00)	80,95	
1.05.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	30.759.550,00	(7.240.450,00)	80,95	
1.05.02.1.01.0010	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	10.000.000,00	9.279.000,00	(721.000,00)	92,79	
1.05.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.279.000,00	(721.000,00)	92,79	
1.05.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.279.000,00	(721.000,00)	92,79	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.02.1.01.0012	PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS TINGKAT PROVINSI	5.000.000,00	4.049.604,00	(950.396,00)	80,99	
1.05.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.049.604,00	(950.396,00)	80,99	
1.05.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.049.604,00	(950.396,00)	80,99	
1.05.02.1.01.0014	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI	15.000.000,00	13.038.800,00	(1.961.200,00)	86,93	
1.05.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.038.800,00	(1.961.200,00)	86,93	
1.05.02.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.038.800,00	(1.961.200,00)	86,93	
1.05.02.1.01.0015	PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.1.01.0016	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	371.516.000,00	332.520.150,00	(38.995.850,00)	89,50	
1.05.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	371.516.000,00	332.520.150,00	(38.995.850,00)	89,50	
1.05.02.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.516.000,00	332.520.150,00	(38.995.850,00)	89,50	
1.05.02.1.01.0017	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN ,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	356.800.000,00	351.510.340,00	(5.289.660,00)	98,52	
1.05.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	356.800.000,00	351.510.340,00	(5.289.660,00)	98,52	
1.05.02.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.800.000,00	351.510.340,00	(5.289.660,00)	98,52	
1.05.02.1.01.0018	PENINGKATAN KAPASITA SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA MELALUI PELATIHAN TEKNIS TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSIA	100.000.000,00	69.880.634,00	(30.119.366,00)	69,88	
1.05.02.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	69.880.634,00	(30.119.366,00)	69,88	
1.05.02.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	69.880.634,00	(30.119.366,00)	69,88	
1.05.02.1.01.0019	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERBITAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	517.451.000,00	491.121.150,00	(26.329.850,00)	94,91	
1.05.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	517.451.000,00	491.121.150,00	(26.329.850,00)	94,91	
1.05.02.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.451.000,00	491.121.150,00	(26.329.850,00)	94,91	
1.05.02.1.02	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	465.747.000,00	229.357.833,00	(236.389.167,00)	49,25	
1.05.02.1.02.0001	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	187.599.000,00	124.979.861,00	(62.619.139,00)	66,62	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	187.599.000,00	124.979.861,00	(62.619.139,00)	66,62	
1.05.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.599.000,00	124.979.861,00	(62.619.139,00)	66,62	
1.05.02.1.02.0002	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	30.336.000,00	30.156.117,00	(179.883,00)	99,41	
1.05.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.336.000,00	30.156.117,00	(179.883,00)	99,41	
1.05.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.336.000,00	30.156.117,00	(179.883,00)	99,41	
1.05.02.1.02.0003	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	163.634.000,00	37.494.934,00	(126.139.066,00)	22,91	
1.05.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	163.634.000,00	37.494.934,00	(126.139.066,00)	22,91	
1.05.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.634.000,00	37.494.934,00	(126.139.066,00)	22,91	
1.05.02.1.02.0005	PENYELIDIKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	20.946.000,00	12.621.582,00	(8.324.418,00)	60,26	
1.05.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.946.000,00	12.621.582,00	(8.324.418,00)	60,26	
1.05.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.946.000,00	12.621.582,00	(8.324.418,00)	60,26	
1.05.02.1.02.0007	DUKUNGAN PELAKSANAAN SIDANG ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	19.980.000,00	6.450.000,00	(13.530.000,00)	32,28	
1.05.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	6.450.000,00	(13.530.000,00)	32,28	
1.05.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	6.450.000,00	(13.530.000,00)	32,28	
1.05.02.1.02.0008	PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	15.720.000,00	14.599.339,00	(1.120.661,00)	92,87	
1.05.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	14.599.339,00	(1.120.661,00)	92,87	
1.05.02.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	14.599.339,00	(1.120.661,00)	92,87	
1.05.02.1.02.0009	PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH	27.532.000,00	3.056.000,00	(24.476.000,00)	11,10	
1.05.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	27.532.000,00	3.056.000,00	(24.476.000,00)	11,10	
1.05.02.1.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.532.000,00	3.056.000,00	(24.476.000,00)	11,10	
1.05.02.1.03	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	595.825.000,00	336.260.200,00	(259.564.800,00)	56,44	
1.05.02.1.03.0001	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	189.864.000,00	47.048.511,00	(142.815.489,00)	24,78	
1.05.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	189.864.000,00	47.048.511,00	(142.815.489,00)	24,78	
1.05.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.864.000,00	47.048.511,00	(142.815.489,00)	24,78	
1.05.02.1.03.0003	PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS	5.000.000,00	2.859.366,00	(2.140.634,00)	57,19	
1.05.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.859.366,00	(2.140.634,00)	57,19	
1.05.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.859.366,00	(2.140.634,00)	57,19	
1.05.02.1.03.0004	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	144.243.000,00	106.171.945,00	(38.071.055,00)	73,61	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	144.243.000,00	106.171.945,00	(38.071.055,00)	73,61	
1.05.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.243.000,00	106.171.945,00	(38.071.055,00)	73,61	
1.05.02.1.03.0005	DUKUNGAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PPNS	158.450.000,00	148.771.689,00	(9.678.311,00)	93,89	
1.05.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	158.450.000,00	148.771.689,00	(9.678.311,00)	93,89	
1.05.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.450.000,00	148.771.689,00	(9.678.311,00)	93,89	
1.05.02.1.03.0006	PEMBENTUKAN PPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH	98.268.000,00	31.408.689,00	(66.859.311,00)	31,96	
1.05.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	98.268.000,00	31.408.689,00	(66.859.311,00)	31,96	
1.05.02.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.268.000,00	31.408.689,00	(66.859.311,00)	31,96	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.289.481.000,00	944.337.022,00	(1.345.143.978,00)	41,25	
1.05.04.1.01	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	2.189.481.000,00	848.838.422,00	(1.340.642.578,00)	38,77	
1.05.04.1.01.0004	PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	80.000.000,00	51.506.000,00	(28.494.000,00)	64,38	
1.05.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	51.506.000,00	(28.494.000,00)	64,38	
1.05.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	51.506.000,00	(28.494.000,00)	64,38	
1.05.04.1.01.0006	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	5.000.000,00	3.780.000,00	(1.220.000,00)	75,60	
1.05.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.780.000,00	(1.220.000,00)	75,60	
1.05.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.780.000,00	(1.220.000,00)	75,60	
1.05.04.1.01.0007	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	5.000.000,00	4.940.000,00	(60.000,00)	98,80	
1.05.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.940.000,00	(60.000,00)	98,80	
1.05.04.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.940.000,00	(60.000,00)	98,80	
1.05.04.1.01.0009	BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	325.000.000,00	2.187.600,00	(322.812.400,00)	0,67	
1.05.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000,00	2.187.600,00	(322.812.400,00)	0,67	
1.05.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	2.187.600,00	(322.812.400,00)	0,67	
1.05.04.1.01.0012	PENYAJIAN DATA KEJADIAN DAN DAMPAK KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN	5.000.000,00	2.340.000,00	(2.660.000,00)	46,80	
1.05.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.340.000,00	(2.660.000,00)	46,80	
1.05.04.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.340.000,00	(2.660.000,00)	46,80	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.04.1.01.0013	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA	20.000.000,00	12.350.000,00	(7.650.000,00)	61,75	
1.05.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.350.000,00	(7.650.000,00)	61,75	
1.05.04.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.350.000,00	(7.650.000,00)	61,75	
1.05.04.1.01.0017	PEMUTAKHIRAN RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0019	PEMUTAKHIRAN INFORMASI DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN PETA RAWAN KEBAKARAN	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0021	PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	908.166.000,00	59.836.300,00	(848.329.700,00)	6,59	
1.05.04.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	908.166.000,00	59.836.300,00	(848.329.700,00)	6,59	
1.05.04.1.01.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.166.000,00	59.836.300,00	(848.329.700,00)	6,59	
1.05.04.1.01.0022	PENYEDIAAN INFORMASI DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN PETA RAWAN KEBAKARAN	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	826.839,00	(4.173.161,00)	16,54	
1.05.04.1.01.0023	PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	190.968.405,00	(9.031.595,00)	95,48	
1.05.04.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	190.968.405,00	(9.031.595,00)	95,48	
1.05.04.1.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	190.968.405,00	(9.031.595,00)	95,48	
1.05.04.1.01.0024	SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	521.315.000,00	415.123.100,00	(106.191.900,00)	79,63	
1.05.04.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	521.315.000,00	415.123.100,00	(106.191.900,00)	79,63	
1.05.04.1.01.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.315.000,00	415.123.100,00	(106.191.900,00)	79,63	
1.05.04.1.01.0025	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SECARA TERINTEGRASI	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
1.05.04.1.01.0025.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
1.05.04.1.01.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
1.05.04.1.01.0026	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	50.000.000,00	49.723.000,00	(277.000,00)	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.04.1.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	100,00	
1.05.04.1.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	100,00	
1.05.04.1.01.0026.5.2	BELANJA MODAL	42.790.000,00	42.513.000,00	(277.000,00)	99,35	
1.05.04.1.01.0026.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.790.000,00	42.513.000,00	(277.000,00)	99,35	
1.05.04.1.01.0027	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	50.000.000,00	48.893.500,00	(1.106.500,00)	97,79	
1.05.04.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
1.05.04.1.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
1.05.04.1.01.0027.5.2	BELANJA MODAL	48.670.000,00	47.563.500,00	(1.106.500,00)	97,73	
1.05.04.1.01.0027.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.670.000,00	47.563.500,00	(1.106.500,00)	97,73	
1.05.04.1.02	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100.000.000,00	95.498.600,00	(4.501.400,00)	95,50	
1.05.04.1.02.0002	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	40.000.000,00	39.882.800,00	(117.200,00)	99,71	
1.05.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.882.800,00	(117.200,00)	99,71	
1.05.04.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.882.800,00	(117.200,00)	99,71	
1.05.04.1.02.0003	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN ANALIS KEBAKARAN	40.000.000,00	37.690.000,00	(2.310.000,00)	94,23	
1.05.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.690.000,00	(2.310.000,00)	94,23	
1.05.04.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.690.000,00	(2.310.000,00)	94,23	
1.05.04.1.02.0004	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	20.000.000,00	17.925.800,00	(2.074.200,00)	89,63	
1.05.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.925.800,00	(2.074.200,00)	89,63	
1.05.04.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.925.800,00	(2.074.200,00)	89,63	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	36.762.908.280,00	33.884.428.447,00	(2.878.479.833,00)	92,17	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.762.908.280,00)	(33.884.428.447,00)	2.878.479.833,00	92,17	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(36.762.908.280,00)	(33.884.428.447,00)	2.878.479.833,00	92,17	

1.05.0.00.0.00.04.0000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Kerja : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.944.402.122,00	19.380.602.642,00	(1.563.799.480,00)	92,53	
1.05.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	192.032.000,00	184.546.343,00	(7.485.657,00)	96,10	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.05.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.130.000,00	15.018.326,00	(1.111.674,00)	93,11	
1.05.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.130.000,00	15.018.326,00	(1.111.674,00)	93,11	
1.05.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	15.018.326,00	(1.111.674,00)	93,11	
1.05.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	4.070.000,00	3.997.533,00	(72.467,00)	98,22	
1.05.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.070.000,00	3.997.533,00	(72.467,00)	98,22	
1.05.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	3.997.533,00	(72.467,00)	98,22	
1.05.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.070.000,00	3.705.033,00	(364.967,00)	91,03	
1.05.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.070.000,00	3.705.033,00	(364.967,00)	91,03	
1.05.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	3.705.033,00	(364.967,00)	91,03	
1.05.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.400.000,00	3.335.640,00	(64.360,00)	98,11	
1.05.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.335.640,00	(64.360,00)	98,11	
1.05.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.335.640,00	(64.360,00)	98,11	
1.05.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.400.000,00	3.179.000,00	(221.000,00)	93,50	
1.05.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.179.000,00	(221.000,00)	93,50	
1.05.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.179.000,00	(221.000,00)	93,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.632.000,00	23.999.980,00	(632.020,00)	97,43	
1.05.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.632.000,00	23.999.980,00	(632.020,00)	97,43	
1.05.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.632.000,00	23.999.980,00	(632.020,00)	97,43	
1.05.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.006.000,00	62.966.149,00	(2.039.851,00)	96,86	
1.05.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	65.006.000,00	62.966.149,00	(2.039.851,00)	96,86	
1.05.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.006.000,00	62.966.149,00	(2.039.851,00)	96,86	
1.05.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	24.397.000,00	22.482.948,00	(1.914.052,00)	92,15	
1.05.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	24.397.000,00	22.482.948,00	(1.914.052,00)	92,15	
1.05.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.397.000,00	22.482.948,00	(1.914.052,00)	92,15	
1.05.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	46.927.000,00	45.861.734,00	(1.065.266,00)	97,73	
1.05.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	46.927.000,00	45.861.734,00	(1.065.266,00)	97,73	
1.05.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.927.000,00	45.861.734,00	(1.065.266,00)	97,73	
1.05.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.017.730.000,00	13.009.265.818,00	(1.008.464.182,00)	92,81	
1.05.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.674.600.000,00	12.739.658.805,00	(934.941.195,00)	93,16	
1.05.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.674.600.000,00	12.739.658.805,00	(934.941.195,00)	93,16	
1.05.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.674.600.000,00	12.739.658.805,00	(934.941.195,00)	93,16	
1.05.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	331.800.000,00	258.472.000,00	(73.328.000,00)	77,90	
1.05.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	331.800.000,00	258.472.000,00	(73.328.000,00)	77,90	
1.05.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.800.000,00	258.472.000,00	(73.328.000,00)	77,90	
1.05.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	2.000.000,00	1.974.674,00	(25.326,00)	98,73	
1.05.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.974.674,00	(25.326,00)	98,73	
1.05.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.974.674,00	(25.326,00)	98,73	
1.05.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.150.000,00	1.087.678,00	(62.322,00)	94,58	
1.05.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.087.678,00	(62.322,00)	94,58	
1.05.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.087.678,00	(62.322,00)	94,58	
1.05.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.660.000,00	2.638.304,00	(21.696,00)	99,18	
1.05.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.660.000,00	2.638.304,00	(21.696,00)	99,18	
1.05.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.638.304,00	(21.696,00)	99,18	
1.05.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.520.000,00	4.474.119,00	(45.881,00)	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.520.000,00	4.474.119,00	(45.881,00)	98,98	
1.05.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	4.474.119,00	(45.881,00)	98,98	
1.05.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	480.119,00	(19.881,00)	96,02	
1.05.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	350.388.000,00	324.194.069,00	(26.193.931,00)	92,52	
1.05.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.360.000,00	8.491.500,00	(868.500,00)	90,72	
1.05.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.360.000,00	8.491.500,00	(868.500,00)	90,72	
1.05.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	8.491.500,00	(868.500,00)	90,72	
1.05.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	43.443.180,00	(6.556.820,00)	86,89	
1.05.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.443.180,00	(6.556.820,00)	86,89	
1.05.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.443.180,00	(6.556.820,00)	86,89	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.826.000,00	10.562.760,00	(263.240,00)	97,57	
1.05.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.826.000,00	10.562.760,00	(263.240,00)	97,57	
1.05.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.826.000,00	10.562.760,00	(263.240,00)	97,57	
1.05.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	53.940.000,00	52.971.000,00	(969.000,00)	98,20	
1.05.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	53.940.000,00	52.971.000,00	(969.000,00)	98,20	
1.05.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.940.000,00	52.971.000,00	(969.000,00)	98,20	
1.05.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.104.000,00	41.108.340,00	(2.995.660,00)	93,21	
1.05.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	44.104.000,00	41.108.340,00	(2.995.660,00)	93,21	
1.05.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.104.000,00	41.108.340,00	(2.995.660,00)	93,21	
1.05.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.600.000,00	6.570.000,00	(30.000,00)	99,55	
1.05.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.570.000,00	(30.000,00)	99,55	
1.05.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.570.000,00	(30.000,00)	99,55	
1.05.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.958.000,00	160.447.289,00	(14.510.711,00)	91,71	
1.05.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	174.958.000,00	160.447.289,00	(14.510.711,00)	91,71	
1.05.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.958.000,00	160.447.289,00	(14.510.711,00)	91,71	
1.05.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81	
1.05.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81	
1.05.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81	
1.05.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.533.000,00	360.095.100,00	(36.437.900,00)	90,81	
1.05.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.912.554.871,00	3.721.968.364,00	(190.586.507,00)	95,13	
1.05.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	450.000,00	444.555,00	(5.445,00)	98,79	
1.05.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	444.555,00	(5.445,00)	98,79	
1.05.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	444.555,00	(5.445,00)	98,79	
1.05.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	475.874.851,00	418.505.614,00	(57.369.237,00)	87,94	
1.05.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	475.874.851,00	418.505.614,00	(57.369.237,00)	87,94	
1.05.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.874.851,00	418.505.614,00	(57.369.237,00)	87,94	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.022.000,00	6.000.000,00	(17.022.000,00)	26,06	
1.05.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	23.022.000,00	6.000.000,00	(17.022.000,00)	26,06	
1.05.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.022.000,00	6.000.000,00	(17.022.000,00)	26,06	
1.05.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.413.208.020,00	3.297.018.195,00	(116.189.825,00)	96,60	
1.05.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.413.208.020,00	3.297.018.195,00	(116.189.825,00)	96,60	
1.05.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.208.020,00	3.297.018.195,00	(116.189.825,00)	96,60	
1.05.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.067.854.251,00	1.773.222.948,00	(294.631.303,00)	85,75	
1.05.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	219.955.000,00	184.331.000,00	(35.624.000,00)	83,80	
1.05.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	219.955.000,00	184.331.000,00	(35.624.000,00)	83,80	
1.05.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.955.000,00	184.331.000,00	(35.624.000,00)	83,80	
1.05.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.260.907.000,00	1.063.751.400,00	(197.155.600,00)	84,36	
1.05.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.907.000,00	1.063.751.400,00	(197.155.600,00)	84,36	
1.05.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.907.000,00	1.063.751.400,00	(197.155.600,00)	84,36	
1.05.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	407.660.000,00	357.379.728,00	(50.280.272,00)	87,67	
1.05.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	407.660.000,00	357.379.728,00	(50.280.272,00)	87,67	
1.05.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.660.000,00	357.379.728,00	(50.280.272,00)	87,67	
1.05.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	144.000.000,00	143.161.000,00	(839.000,00)	99,42	
1.05.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	143.161.000,00	(839.000,00)	99,42	
1.05.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	143.161.000,00	(839.000,00)	99,42	
1.05.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.332.251,00	0,00	(10.332.251,00)	0,00	
1.05.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.332.251,00	0,00	(10.332.251,00)	0,00	
1.05.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.332.251,00	0,00	(10.332.251,00)	0,00	
1.05.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.000.000,00	24.599.820,00	(400.180,00)	98,40	
1.05.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.599.820,00	(400.180,00)	98,40	
1.05.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.599.820,00	(400.180,00)	98,40	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.260.129.800,00	3.250.257.229,00	(1.009.872.571,00)	76,29	
1.05.03.1.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI	587.384.000,00	570.004.171,00	(17.379.829,00)	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.03.1.01.0004	SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA PROVINSI (PER JENIS ANCAMAN)	587.384.000,00	570.004.171,00	(17.379.829,00)	97,04	
1.05.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	587.384.000,00	570.004.171,00	(17.379.829,00)	97,04	
1.05.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.384.000,00	570.004.171,00	(17.379.829,00)	97,04	
1.05.03.1.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.639.271.400,00	1.589.139.526,00	(50.131.874,00)	96,94	
1.05.03.1.02.0013	PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	88.857.100,00	76.605.425,00	(12.251.675,00)	86,21	
1.05.03.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	88.857.100,00	76.605.425,00	(12.251.675,00)	86,21	
1.05.03.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.857.100,00	76.605.425,00	(12.251.675,00)	86,21	
1.05.03.1.02.0023	GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	251.870.800,00	247.621.362,00	(4.249.438,00)	98,31	
1.05.03.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	251.870.800,00	247.621.362,00	(4.249.438,00)	98,31	
1.05.03.1.02.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.870.800,00	247.621.362,00	(4.249.438,00)	98,31	
1.05.03.1.02.0025	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI	235.800.000,00	232.093.660,00	(3.706.340,00)	98,43	
1.05.03.1.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	235.800.000,00	232.093.660,00	(3.706.340,00)	98,43	
1.05.03.1.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.800.000,00	232.093.660,00	(3.706.340,00)	98,43	
1.05.03.1.02.0027	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA	64.913.000,00	64.748.110,00	(164.890,00)	99,75	
1.05.03.1.02.0027.5.1	BELANJA OPERASI	64.913.000,00	64.748.110,00	(164.890,00)	99,75	
1.05.03.1.02.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.913.000,00	64.748.110,00	(164.890,00)	99,75	
1.05.03.1.02.0028	PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	376.961.500,00	369.354.641,00	(7.606.859,00)	97,98	
1.05.03.1.02.0028.5.1	BELANJA OPERASI	376.961.500,00	369.354.641,00	(7.606.859,00)	97,98	
1.05.03.1.02.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.961.500,00	369.354.641,00	(7.606.859,00)	97,98	
1.05.03.1.02.0028.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.03.1.02.0028.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.03.1.02.0030	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	620.869.000,00	598.716.328,00	(22.152.672,00)	96,43	
1.05.03.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	620.869.000,00	598.716.328,00	(22.152.672,00)	96,43	
1.05.03.1.02.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.869.000,00	598.716.328,00	(22.152.672,00)	96,43	
1.05.03.1.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	974.961.000,00	264.461.272,00	(710.499.728,00)	27,13	
1.05.03.1.03.0025	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	42.310.000,00	37.280.090,00	(5.029.910,00)	88,11	
1.05.03.1.03.0025.5.1	BELANJA OPERASI	42.310.000,00	37.280.090,00	(5.029.910,00)	88,11	
1.05.03.1.03.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.310.000,00	37.280.090,00	(5.029.910,00)	88,11	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.03.1.03.0026	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT PROVINSI	66.104.000,00	58.982.500,00	(7.121.500,00)	89,23	
1.05.03.1.03.0026.5.1	BELANJA OPERASI	66.104.000,00	58.982.500,00	(7.121.500,00)	89,23	
1.05.03.1.03.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.104.000,00	58.982.500,00	(7.121.500,00)	89,23	
1.05.03.1.03.0028	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	819.417.000,00	122.727.588,00	(696.689.412,00)	14,98	
1.05.03.1.03.0028.5.1	BELANJA OPERASI	819.417.000,00	122.727.588,00	(696.689.412,00)	14,98	
1.05.03.1.03.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.417.000,00	122.727.588,00	(696.689.412,00)	14,98	
1.05.03.1.03.0030	RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA	47.130.000,00	45.471.094,00	(1.658.906,00)	96,48	
1.05.03.1.03.0030.5.1	BELANJA OPERASI	47.130.000,00	45.471.094,00	(1.658.906,00)	96,48	
1.05.03.1.03.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.130.000,00	45.471.094,00	(1.658.906,00)	96,48	
1.05.03.1.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	1.058.513.400,00	826.652.260,00	(231.861.140,00)	78,10	
1.05.03.1.04.0006	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	698.301.400,00	598.851.390,00	(99.450.010,00)	85,76	
1.05.03.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	698.301.400,00	598.851.390,00	(99.450.010,00)	85,76	
1.05.03.1.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.301.400,00	598.851.390,00	(99.450.010,00)	85,76	
1.05.03.1.04.0008	FASILITASI PENGUMPULAN DATA PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA LINTAS KAB/KOTA	84.620.000,00	81.103.190,00	(3.516.810,00)	95,84	
1.05.03.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	84.620.000,00	81.103.190,00	(3.516.810,00)	95,84	
1.05.03.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.620.000,00	81.103.190,00	(3.516.810,00)	95,84	
1.05.03.1.04.0010	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI	16.192.000,00	7.713.000,00	(8.479.000,00)	47,63	
1.05.03.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	16.192.000,00	7.713.000,00	(8.479.000,00)	47,63	
1.05.03.1.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.192.000,00	7.713.000,00	(8.479.000,00)	47,63	
1.05.03.1.04.0011	KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI	37.494.000,00	20.451.500,00	(17.042.500,00)	54,55	
1.05.03.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	37.494.000,00	20.451.500,00	(17.042.500,00)	54,55	
1.05.03.1.04.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.494.000,00	20.451.500,00	(17.042.500,00)	54,55	
1.05.03.1.04.0016	PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	105.588.000,00	36.146.760,00	(69.441.240,00)	34,23	
1.05.03.1.04.0016.5.1	BELANJA OPERASI	105.588.000,00	36.146.760,00	(69.441.240,00)	34,23	
1.05.03.1.04.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.588.000,00	36.146.760,00	(69.441.240,00)	34,23	
1.05.03.1.04.0018	PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA DAERAH	30.444.000,00	18.304.890,00	(12.139.110,00)	60,13	
1.05.03.1.04.0018.5.1	BELANJA OPERASI	30.444.000,00	18.304.890,00	(12.139.110,00)	60,13	
1.05.03.1.04.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.444.000,00	18.304.890,00	(12.139.110,00)	60,13	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.03.1.04.0019	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	40.299.000,00	34.028.150,00	(6.270.850,00)	84,44	
1.05.03.1.04.0019.5.1	BELANJA OPERASI	40.299.000,00	34.028.150,00	(6.270.850,00)	84,44	
1.05.03.1.04.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.299.000,00	34.028.150,00	(6.270.850,00)	84,44	
1.05.03.1.04.0022	PENYUSUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN	19.265.000,00	14.077.720,00	(5.187.280,00)	73,07	
1.05.03.1.04.0022.5.1	BELANJA OPERASI	19.265.000,00	14.077.720,00	(5.187.280,00)	73,07	
1.05.03.1.04.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.265.000,00	14.077.720,00	(5.187.280,00)	73,07	
1.05.03.1.04.0023	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	26.310.000,00	15.975.660,00	(10.334.340,00)	60,72	
1.05.03.1.04.0023.5.1	BELANJA OPERASI	26.310.000,00	15.975.660,00	(10.334.340,00)	60,72	
1.05.03.1.04.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.310.000,00	15.975.660,00	(10.334.340,00)	60,72	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	25.204.531.922,00	22.630.859.871,00	(2.573.672.051,00)	89,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.204.531.922,00)	(22.630.859.871,00)	2.573.672.051,00	89,79	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.204.531.922,00)	(22.630.859.871,00)	2.573.672.051,00	89,79	

1.06.0.00.0.00.01.0000

DINAS SOSIAL

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Satuan Kerja : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.005.398.062,00	31.379.153.231,72	(1.626.244.830,28)	95,07	
1.06.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	540.859.000,00	458.108.979,00	(82.750.021,00)	84,70	
1.06.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	225.226.000,00	175.620.842,00	(49.605.158,00)	77,98	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
1.06.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	225.226.000,00	175.620.842,00	(49.605.158,00)	77,98	
1.06.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.226.000,00	175.620.842,00	(49.605.158,00)	77,98	
1.06.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	23.080.900,00	(1.264.100,00)	94,81	
1.06.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	55.590.000,00	38.897.820,00	(16.692.180,00)	69,97	
1.06.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	55.590.000,00	38.897.820,00	(16.692.180,00)	69,97	
1.06.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.590.000,00	38.897.820,00	(16.692.180,00)	69,97	
1.06.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.600.000,00	44.827.000,00	(773.000,00)	98,30	
1.06.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	44.827.000,00	(773.000,00)	98,30	
1.06.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	44.827.000,00	(773.000,00)	98,30	
1.06.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	56.119.000,00	52.190.600,00	(3.928.400,00)	93,00	
1.06.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	56.119.000,00	52.190.600,00	(3.928.400,00)	93,00	
1.06.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.119.000,00	52.190.600,00	(3.928.400,00)	93,00	
1.06.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	43.694.000,00	40.254.400,00	(3.439.600,00)	92,13	
1.06.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	43.694.000,00	40.254.400,00	(3.439.600,00)	92,13	
1.06.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.694.000,00	40.254.400,00	(3.439.600,00)	92,13	
1.06.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	17.250.000,00	13.994.717,00	(3.255.283,00)	81,13	
1.06.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	17.250.000,00	13.994.717,00	(3.255.283,00)	81,13	
1.06.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	13.994.717,00	(3.255.283,00)	81,13	
1.06.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.734.170.000,00	18.630.255.812,00	(1.103.914.188,00)	94,41	
1.06.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.110.000.000,00	18.015.828.612,00	(1.094.171.388,00)	94,27	
1.06.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.110.000.000,00	18.015.828.612,00	(1.094.171.388,00)	94,27	
1.06.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.110.000.000,00	18.015.828.612,00	(1.094.171.388,00)	94,27	
1.06.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	564.810.000,00	556.650.000,00	(8.160.000,00)	98,56	
1.06.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	564.810.000,00	556.650.000,00	(8.160.000,00)	98,56	
1.06.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.810.000,00	556.650.000,00	(8.160.000,00)	98,56	
1.06.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	45.687.000,00	44.414.500,00	(1.272.500,00)	97,21	
1.06.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	45.687.000,00	44.414.500,00	(1.272.500,00)	97,21	
1.06.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.687.000,00	44.414.500,00	(1.272.500,00)	97,21	
1.06.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	8.696.000,00	8.527.800,00	(168.200,00)	98,07	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.696.000,00	8.527.800,00	(168.200,00)	98,07	
1.06.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.696.000,00	8.527.800,00	(168.200,00)	98,07	
1.06.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.378.000,00	1.335.400,00	(42.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.378.000,00	1.335.400,00	(42.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.378.000,00	1.335.400,00	(42.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.218.000,00	1.180.400,00	(37.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.218.000,00	1.180.400,00	(37.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.000,00	1.180.400,00	(37.600,00)	96,91	
1.06.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.228.000,00	1.202.200,00	(25.800,00)	97,90	
1.06.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.228.000,00	1.202.200,00	(25.800,00)	97,90	
1.06.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.228.000,00	1.202.200,00	(25.800,00)	97,90	
1.06.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.153.000,00	1.116.900,00	(36.100,00)	96,87	
1.06.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.153.000,00	1.116.900,00	(36.100,00)	96,87	
1.06.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.000,00	1.116.900,00	(36.100,00)	96,87	
1.06.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	64.756.000,00	62.300.575,00	(2.455.425,00)	96,21	
1.06.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	44.766.000,00	43.104.900,00	(1.661.100,00)	96,29	
1.06.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	44.766.000,00	43.104.900,00	(1.661.100,00)	96,29	
1.06.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.766.000,00	43.104.900,00	(1.661.100,00)	96,29	
1.06.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	11.000.000,00	10.238.775,00	(761.225,00)	93,08	
1.06.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.238.775,00	(761.225,00)	93,08	
1.06.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.238.775,00	(761.225,00)	93,08	
1.06.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	8.990.000,00	8.956.900,00	(33.100,00)	99,63	
1.06.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	8.990.000,00	8.956.900,00	(33.100,00)	99,63	
1.06.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	8.956.900,00	(33.100,00)	99,63	
1.06.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	236.129.000,00	221.316.826,00	(14.812.174,00)	93,73	
1.06.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	107.450.000,00	107.066.325,00	(383.675,00)	99,64	
1.06.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	107.450.000,00	107.066.325,00	(383.675,00)	99,64	
1.06.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.450.000,00	107.066.325,00	(383.675,00)	99,64	
1.06.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	124.344.000,00	111.829.501,00	(12.514.499,00)	89,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	124.344.000,00	111.829.501,00	(12.514.499,00)	89,94	
1.06.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.344.000,00	111.829.501,00	(12.514.499,00)	89,94	
1.06.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.335.000,00	2.421.000,00	(1.914.000,00)	55,85	
1.06.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	4.335.000,00	2.421.000,00	(1.914.000,00)	55,85	
1.06.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	2.421.000,00	(1.914.000,00)	55,85	
1.06.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.035.695.300,00	1.885.042.936,00	(150.652.364,00)	92,60	
1.06.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	104.142.300,00	97.965.200,00	(6.177.100,00)	94,07	
1.06.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	104.142.300,00	97.965.200,00	(6.177.100,00)	94,07	
1.06.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.142.300,00	97.965.200,00	(6.177.100,00)	94,07	
1.06.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	181.707.000,00	147.187.117,00	(34.519.883,00)	81,00	
1.06.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	181.707.000,00	147.187.117,00	(34.519.883,00)	81,00	
1.06.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.707.000,00	147.187.117,00	(34.519.883,00)	81,00	
1.06.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	86.088.000,00	80.200.595,00	(5.887.405,00)	93,16	
1.06.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	86.088.000,00	80.200.595,00	(5.887.405,00)	93,16	
1.06.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.088.000,00	80.200.595,00	(5.887.405,00)	93,16	
1.06.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	198.544.000,00	187.670.650,00	(10.873.350,00)	94,52	
1.06.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	198.544.000,00	187.670.650,00	(10.873.350,00)	94,52	
1.06.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.544.000,00	187.670.650,00	(10.873.350,00)	94,52	
1.06.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.343.164.000,00	1.251.417.374,00	(91.746.626,00)	93,17	
1.06.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.343.164.000,00	1.251.417.374,00	(91.746.626,00)	93,17	
1.06.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.343.164.000,00	1.251.417.374,00	(91.746.626,00)	93,17	
1.06.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	111.310.000,00	109.862.000,00	(1.448.000,00)	98,70	
1.06.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	111.310.000,00	109.862.000,00	(1.448.000,00)	98,70	
1.06.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.310.000,00	109.862.000,00	(1.448.000,00)	98,70	
1.06.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	961.441.000,00	943.548.106,00	(17.892.894,00)	98,14	
1.06.01.1.07.0005	PENGADAAN MEDEL	209.384.000,00	204.068.107,00	(5.315.893,00)	97,46	
1.06.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	209.384.000,00	204.068.107,00	(5.315.893,00)	97,46	
1.06.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.384.000,00	204.068.107,00	(5.315.893,00)	97,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	752.057.000,00	739.479.999,00	(12.577.001,00)	98,33	
1.06.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	120.146.000,00	118.317.343,00	(1.828.657,00)	98,48	
1.06.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.146.000,00	118.317.343,00	(1.828.657,00)	98,48	
1.06.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	631.911.000,00	621.162.656,00	(10.748.344,00)	98,30	
1.06.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	631.911.000,00	621.162.656,00	(10.748.344,00)	98,30	
1.06.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.503.322.200,00	4.294.597.029,00	(208.725.171,00)	95,37	
1.06.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	597.050.500,00	534.180.247,00	(62.870.253,00)	89,47	
1.06.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	597.050.500,00	534.180.247,00	(62.870.253,00)	89,47	
1.06.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.050.500,00	534.180.247,00	(62.870.253,00)	89,47	
1.06.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	97.346.000,00	92.372.440,00	(4.973.560,00)	94,89	
1.06.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	97.346.000,00	92.372.440,00	(4.973.560,00)	94,89	
1.06.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.346.000,00	92.372.440,00	(4.973.560,00)	94,89	
1.06.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.808.925.700,00	3.668.044.342,00	(140.881.358,00)	96,30	
1.06.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.808.925.700,00	3.668.044.342,00	(140.881.358,00)	96,30	
1.06.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.925.700,00	3.668.044.342,00	(140.881.358,00)	96,30	
1.06.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.929.025.562,00	4.883.982.968,72	(45.042.593,28)	99,09	
1.06.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	115.230.000,00	109.598.000,00	(5.632.000,00)	95,11	
1.06.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	115.230.000,00	109.598.000,00	(5.632.000,00)	95,11	
1.06.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.230.000,00	109.598.000,00	(5.632.000,00)	95,11	
1.06.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	493.360.000,00	478.125.300,00	(15.234.700,00)	96,91	
1.06.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	493.360.000,00	478.125.300,00	(15.234.700,00)	96,91	
1.06.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.360.000,00	478.125.300,00	(15.234.700,00)	96,91	
1.06.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	196.029.000,00	191.071.436,00	(4.957.564,00)	97,47	
1.06.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	196.029.000,00	191.071.436,00	(4.957.564,00)	97,47	
1.06.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.029.000,00	191.071.436,00	(4.957.564,00)	97,47	
1.06.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	315.134.000,00	309.715.392,00	(5.418.608,00)	98,28	
1.06.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	315.134.000,00	309.715.392,00	(5.418.608,00)	98,28	
1.06.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.134.000,00	309.715.392,00	(5.418.608,00)	98,28	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.809.272.562,00	3.795.472.840,72	(13.799.721,28)	99,64	
1.06.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.717.238.562,00	3.704.079.840,72	(13.158.721,28)	99,65	
1.06.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.717.238.562,00	3.704.079.840,72	(13.158.721,28)	99,65	
1.06.01.1.09.0011.5.2	BELANJA MODAL	92.034.000,00	91.393.000,00	(641.000,00)	99,30	
1.06.01.1.09.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.034.000,00	91.393.000,00	(641.000,00)	99,30	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.293.911.000,00	1.176.744.173,00	(117.166.827,00)	90,94	
1.06.02.1.01	PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	114.010.000,00	113.284.000,00	(726.000,00)	99,36	
1.06.02.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	114.010.000,00	113.284.000,00	(726.000,00)	99,36	
1.06.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	114.010.000,00	113.284.000,00	(726.000,00)	99,36	
1.06.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.010.000,00	113.284.000,00	(726.000,00)	99,36	
1.06.02.1.02	PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI	1.179.901.000,00	1.063.460.173,00	(116.440.827,00)	90,13	
1.06.02.1.02.0001	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	301.875.000,00	297.374.212,00	(4.500.788,00)	98,51	
1.06.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	301.875.000,00	297.374.212,00	(4.500.788,00)	98,51	
1.06.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.875.000,00	297.374.212,00	(4.500.788,00)	98,51	
1.06.02.1.02.0002	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN PROVINSI	498.162.000,00	402.181.800,00	(95.980.200,00)	80,73	
1.06.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	498.162.000,00	402.181.800,00	(95.980.200,00)	80,73	
1.06.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.162.000,00	402.181.800,00	(95.980.200,00)	80,73	
1.06.02.1.02.0003	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	189.202.000,00	181.550.000,00	(7.652.000,00)	95,96	
1.06.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	189.202.000,00	181.550.000,00	(7.652.000,00)	95,96	
1.06.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.202.000,00	181.550.000,00	(7.652.000,00)	95,96	
1.06.02.1.02.0004	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	190.662.000,00	182.354.161,00	(8.307.839,00)	95,64	
1.06.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	190.662.000,00	182.354.161,00	(8.307.839,00)	95,64	
1.06.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.662.000,00	182.354.161,00	(8.307.839,00)	95,64	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.03.1.01	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/KOTA ASAL	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	97,04	
1.06.03.1.01.0001	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/KOTA ASAL	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	97,04	
1.06.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	97,04	
1.06.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	97,04	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.338.917.500,00	8.520.493.260,00	(818.424.240,00)	91,24	
1.06.04.1.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	2.594.405.000,00	2.331.420.871,00	(262.984.129,00)	89,86	
1.06.04.1.01.0001	PENYEDIAAN PERMAKINAN	918.800.000,00	799.148.976,00	(119.651.024,00)	86,98	
1.06.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	918.800.000,00	799.148.976,00	(119.651.024,00)	86,98	
1.06.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.800.000,00	500.648.856,00	(118.151.144,00)	80,91	
1.06.04.1.01.0001.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	298.500.120,00	(1.499.880,00)	99,50	
1.06.04.1.01.0002	PENYEDIAAN SANDANG	113.270.000,00	104.333.250,00	(8.936.750,00)	92,11	
1.06.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	113.270.000,00	104.333.250,00	(8.936.750,00)	92,11	
1.06.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.270.000,00	104.333.250,00	(8.936.750,00)	92,11	
1.06.04.1.01.0003	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	28.326.000,00	19.707.744,00	(8.618.256,00)	69,57	
1.06.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	28.326.000,00	19.707.744,00	(8.618.256,00)	69,57	
1.06.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.326.000,00	19.707.744,00	(8.618.256,00)	69,57	
1.06.04.1.01.0004	PENYEDIAAN ALAT BANTU	603.568.000,00	558.130.998,00	(45.437.002,00)	92,47	
1.06.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	603.568.000,00	558.130.998,00	(45.437.002,00)	92,47	
1.06.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.568.000,00	558.130.998,00	(45.437.002,00)	92,47	
1.06.04.1.01.0005	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	24.659.000,00	20.945.000,00	(3.714.000,00)	84,94	
1.06.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.659.000,00	20.945.000,00	(3.714.000,00)	84,94	
1.06.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.659.000,00	20.945.000,00	(3.714.000,00)	84,94	
1.06.04.1.01.0006	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	506.587.000,00	475.635.638,00	(30.951.362,00)	93,89	
1.06.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	506.587.000,00	475.635.638,00	(30.951.362,00)	93,89	
1.06.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.587.000,00	475.635.638,00	(30.951.362,00)	93,89	
1.06.04.1.01.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	218.272.000,00	203.702.765,00	(14.569.235,00)	93,33	
1.06.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	218.272.000,00	203.702.765,00	(14.569.235,00)	93,33	
1.06.04.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.272.000,00	203.702.765,00	(14.569.235,00)	93,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.1.01.0008	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.01.0009	AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	107.208.000,00	97.303.000,00	(9.905.000,00)	90,76	
1.06.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	107.208.000,00	97.303.000,00	(9.905.000,00)	90,76	
1.06.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.208.000,00	97.303.000,00	(9.905.000,00)	90,76	
1.06.04.1.01.0010	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0011	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	5.500.000,00	(330.000,00)	94,34	
1.06.04.1.01.0012	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	59.055.000,00	38.513.500,00	(20.541.500,00)	65,22	
1.06.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	59.055.000,00	38.513.500,00	(20.541.500,00)	65,22	
1.06.04.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.055.000,00	38.513.500,00	(20.541.500,00)	65,22	
1.06.04.1.02	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	1.844.305.000,00	1.782.245.752,00	(62.059.248,00)	96,64	
1.06.04.1.02.0001	PENGASUHAN	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0002	PENYEDIAAN MAKANAN	803.289.000,00	789.352.096,00	(13.936.904,00)	98,27	
1.06.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	803.289.000,00	789.352.096,00	(13.936.904,00)	98,27	
1.06.04.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.289.000,00	490.851.976,00	(12.437.024,00)	97,53	
1.06.04.1.02.0002.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	298.500.120,00	(1.499.880,00)	99,50	
1.06.04.1.02.0003	PENYEDIAAN SANDANG	71.095.000,00	64.646.000,00	(6.449.000,00)	90,93	
1.06.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	71.095.000,00	64.646.000,00	(6.449.000,00)	90,93	
1.06.04.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.095.000,00	64.646.000,00	(6.449.000,00)	90,93	
1.06.04.1.02.0004	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	68.748.000,00	67.615.700,00	(1.132.300,00)	98,35	
1.06.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.748.000,00	67.615.700,00	(1.132.300,00)	98,35	
1.06.04.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.748.000,00	67.615.700,00	(1.132.300,00)	98,35	
1.06.04.1.02.0005	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	54.224.000,00	50.537.800,00	(3.686.200,00)	93,20	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	54.224.000,00	50.537.800,00	(3.686.200,00)	93,20	
1.06.04.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.224.000,00	50.537.800,00	(3.686.200,00)	93,20	
1.06.04.1.02.0006	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	398.273.000,00	373.980.300,00	(24.292.700,00)	93,90	
1.06.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	398.273.000,00	373.980.300,00	(24.292.700,00)	93,90	
1.06.04.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.273.000,00	373.980.300,00	(24.292.700,00)	93,90	
1.06.04.1.02.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	11.087.000,00	10.753.300,00	(333.700,00)	96,99	
1.06.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	11.087.000,00	10.753.300,00	(333.700,00)	96,99	
1.06.04.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.087.000,00	10.753.300,00	(333.700,00)	96,99	
1.06.04.1.02.0008	FASILITASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DAN KARTU IDENTITAS ANAK	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0009	AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	279.375.000,00	278.083.800,00	(1.291.200,00)	99,54	
1.06.04.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	279.375.000,00	278.083.800,00	(1.291.200,00)	99,54	
1.06.04.1.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.375.000,00	278.083.800,00	(1.291.200,00)	99,54	
1.06.04.1.02.0010	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	33.679.000,00	24.410.256,00	(9.268.744,00)	72,48	
1.06.04.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	33.679.000,00	24.410.256,00	(9.268.744,00)	72,48	
1.06.04.1.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.679.000,00	24.410.256,00	(9.268.744,00)	72,48	
1.06.04.1.02.0011	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	14.491.000,00	14.478.500,00	(12.500,00)	99,91	
1.06.04.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	14.491.000,00	14.478.500,00	(12.500,00)	99,91	
1.06.04.1.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.491.000,00	14.478.500,00	(12.500,00)	99,91	
1.06.04.1.02.0012	AKSES LAYANAN PENGASUHAN KEPADA KELUARGA PENGANTI	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.02.0013	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	46.464.000,00	44.808.000,00	(1.656.000,00)	96,44	
1.06.04.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	46.464.000,00	44.808.000,00	(1.656.000,00)	96,44	
1.06.04.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.464.000,00	44.808.000,00	(1.656.000,00)	96,44	
1.06.04.1.03	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	3.114.617.000,00	2.977.687.279,00	(136.929.721,00)	95,60	
1.06.04.1.03.0001	PENYEDIAAN PERMAKINAN	1.681.940.000,00	1.653.533.167,00	(28.406.833,00)	98,31	
1.06.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.681.940.000,00	1.653.533.167,00	(28.406.833,00)	98,31	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.940.000,00	1.154.033.557,00	(27.906.443,00)	97,64	
1.06.04.1.03.0001.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	499.499.610,00	(500.390,00)	99,90	
1.06.04.1.03.0002	PENYEDIAAN SANDANG	278.962.000,00	261.729.604,00	(17.232.396,00)	93,82	
1.06.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	278.962.000,00	261.729.604,00	(17.232.396,00)	93,82	
1.06.04.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.962.000,00	261.729.604,00	(17.232.396,00)	93,82	
1.06.04.1.03.0003	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	115.330.000,00	108.260.643,00	(7.069.357,00)	93,87	
1.06.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	115.330.000,00	108.260.643,00	(7.069.357,00)	93,87	
1.06.04.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.330.000,00	108.260.643,00	(7.069.357,00)	93,87	
1.06.04.1.03.0004	PENYEDIAAN ALAT BANTU	387.950.000,00	381.108.875,00	(6.841.125,00)	98,24	
1.06.04.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	387.950.000,00	381.108.875,00	(6.841.125,00)	98,24	
1.06.04.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.950.000,00	381.108.875,00	(6.841.125,00)	98,24	
1.06.04.1.03.0005	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL	234.019.000,00	193.114.300,00	(40.904.700,00)	82,52	
1.06.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	234.019.000,00	193.114.300,00	(40.904.700,00)	82,52	
1.06.04.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.019.000,00	193.114.300,00	(40.904.700,00)	82,52	
1.06.04.1.03.0006	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	182.636.000,00	165.939.190,00	(16.696.810,00)	90,86	
1.06.04.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	182.636.000,00	165.939.190,00	(16.696.810,00)	90,86	
1.06.04.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.636.000,00	165.939.190,00	(16.696.810,00)	90,86	
1.06.04.1.03.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	37.068.000,00	37.068.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	37.068.000,00	37.068.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.068.000,00	37.068.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0008	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS	5.977.000,00	5.939.500,00	(37.500,00)	99,37	
1.06.04.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.977.000,00	5.939.500,00	(37.500,00)	99,37	
1.06.04.1.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.977.000,00	5.939.500,00	(37.500,00)	99,37	
1.06.04.1.03.0009	AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	27.216.000,00	16.922.000,00	(10.294.000,00)	62,18	
1.06.04.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	27.216.000,00	16.922.000,00	(10.294.000,00)	62,18	
1.06.04.1.03.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.216.000,00	16.922.000,00	(10.294.000,00)	62,18	
1.06.04.1.03.0010	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	27.826.000,00	21.345.500,00	(6.480.500,00)	76,71	
1.06.04.1.03.0010.5.1	BELANJA OPERASI	27.826.000,00	21.345.500,00	(6.480.500,00)	76,71	
1.06.04.1.03.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.826.000,00	21.345.500,00	(6.480.500,00)	76,71	
1.06.04.1.03.0011	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	15.455.000,00	15.417.500,00	(37.500,00)	99,76	
1.06.04.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.455.000,00	15.417.500,00	(37.500,00)	99,76	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.1.03.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	15.417.500,00	(37.500,00)	99,76	
1.06.04.1.03.0012	PEMULASARAAN	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.03.0013	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR DI DALAM PANTI	57.238.000,00	54.309.000,00	(2.929.000,00)	94,88	
1.06.04.1.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	57.238.000,00	54.309.000,00	(2.929.000,00)	94,88	
1.06.04.1.03.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.238.000,00	54.309.000,00	(2.929.000,00)	94,88	
1.06.04.1.04	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	1.365.612.000,00	1.034.908.814,00	(330.703.186,00)	75,78	
1.06.04.1.04.0001	PENYEDIAAN PERMAKINAN	437.500.000,00	197.409.619,00	(240.090.381,00)	45,12	
1.06.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	437.500.000,00	197.409.619,00	(240.090.381,00)	45,12	
1.06.04.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.500.000,00	197.409.619,00	(240.090.381,00)	45,12	
1.06.04.1.04.0002	PENYEDIAAN SANDANG	208.728.000,00	188.091.719,00	(20.636.281,00)	90,11	
1.06.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	208.728.000,00	188.091.719,00	(20.636.281,00)	90,11	
1.06.04.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.728.000,00	188.091.719,00	(20.636.281,00)	90,11	
1.06.04.1.04.0003	PENYEDIAAN ASRAMA/WISMA YANG MUDAH DIAKSES	8.520.000,00	7.147.020,00	(1.372.980,00)	83,89	
1.06.04.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000,00	7.147.020,00	(1.372.980,00)	83,89	
1.06.04.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	7.147.020,00	(1.372.980,00)	83,89	
1.06.04.1.04.0004	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	11.050.000,00	9.468.856,00	(1.581.144,00)	85,69	
1.06.04.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	9.468.856,00	(1.581.144,00)	85,69	
1.06.04.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	9.468.856,00	(1.581.144,00)	85,69	
1.06.04.1.04.0005	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0006	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	22.455.000,00	20.710.620,00	(1.744.380,00)	92,23	
1.06.04.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	22.455.000,00	20.710.620,00	(1.744.380,00)	92,23	
1.06.04.1.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.455.000,00	20.710.620,00	(1.744.380,00)	92,23	
1.06.04.1.04.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN KETERAMPILAN DASAR	526.257.000,00	473.341.236,00	(52.915.764,00)	89,94	
1.06.04.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	526.257.000,00	473.341.236,00	(52.915.764,00)	89,94	
1.06.04.1.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.257.000,00	473.341.236,00	(52.915.764,00)	89,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.1.04.0008	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN/ATAU IDENTITAS ANAK	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.04.0009	AKSES KELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	11.340.000,00	0,00	(11.340.000,00)	0,00	
1.06.04.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	11.340.000,00	0,00	(11.340.000,00)	0,00	
1.06.04.1.04.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.340.000,00	0,00	(11.340.000,00)	0,00	
1.06.04.1.04.0010	PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	3.766.000,00	3.486.000,00	(280.000,00)	92,57	
1.06.04.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	3.766.000,00	3.486.000,00	(280.000,00)	92,57	
1.06.04.1.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.766.000,00	3.486.000,00	(280.000,00)	92,57	
1.06.04.1.04.0011	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR DI DALAM PANTI	17.946.000,00	17.203.744,00	(742.256,00)	95,86	
1.06.04.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	17.946.000,00	17.203.744,00	(742.256,00)	95,86	
1.06.04.1.04.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.946.000,00	17.203.744,00	(742.256,00)	95,86	
1.06.04.1.05	REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DI DALAM PANTI	419.978.500,00	394.230.544,00	(25.747.956,00)	93,87	
1.06.04.1.05.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN KETERAMPILAN DASAR	264.250.000,00	248.180.200,00	(16.069.800,00)	93,92	
1.06.04.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	264.250.000,00	248.180.200,00	(16.069.800,00)	93,92	
1.06.04.1.05.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.250.000,00	248.180.200,00	(16.069.800,00)	93,92	
1.06.04.1.05.0010	PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	149.858.500,00	140.180.344,00	(9.678.156,00)	93,54	
1.06.04.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	149.858.500,00	140.180.344,00	(9.678.156,00)	93,54	
1.06.04.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.858.500,00	140.180.344,00	(9.678.156,00)	93,54	
1.06.04.1.05.0011	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.1.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	100,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	25.924.337.000,00	25.890.910.597,00	(33.426.403,00)	99,87	
1.06.05.1.01	PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	50.000.000,00	42.625.280,00	(7.374.720,00)	85,25	
1.06.05.1.01.0001	PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	
1.06.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	
1.06.05.1.01.0002	PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	
1.06.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	
1.06.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.312.640,00	(3.687.360,00)	85,25	
1.06.05.1.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	25.874.337.000,00	25.848.285.317,00	(26.051.683,00)	99,90	
1.06.05.1.02.0001	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	20.128.867.000,00	20.126.386.750,00	(2.480.250,00)	99,99	
1.06.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.128.867.000,00	20.126.386.750,00	(2.480.250,00)	99,99	
1.06.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.258.367.000,00	1.255.886.750,00	(2.480.250,00)	99,80	
1.06.05.1.02.0001.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.870.500.000,00	18.870.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.1.02.0002	PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.288.000,00	56.082.001,00	(205.999,00)	99,63	
1.06.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	56.288.000,00	56.082.001,00	(205.999,00)	99,63	
1.06.05.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.288.000,00	56.082.001,00	(205.999,00)	99,63	
1.06.05.1.02.0003	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	5.689.182.000,00	5.665.816.566,00	(23.365.434,00)	99,59	
1.06.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.689.182.000,00	5.665.816.566,00	(23.365.434,00)	99,59	
1.06.05.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.182.000,00	765.816.566,00	(23.365.434,00)	97,04	
1.06.05.1.02.0003.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.502.382.000,00	2.289.131.848,00	(213.250.152,00)	91,48	
1.06.06.1.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	2.502.382.000,00	2.289.131.848,00	(213.250.152,00)	91,48	
1.06.06.1.01.0001	PENYEDIAAN PERMAKINAN	1.712.551.000,00	1.550.638.695,00	(161.912.305,00)	90,55	
1.06.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.712.551.000,00	1.550.638.695,00	(161.912.305,00)	90,55	
1.06.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.551.000,00	1.550.638.695,00	(161.912.305,00)	90,55	
1.06.06.1.01.0002	PENYEDIAAN SANDANG	119.200.000,00	118.674.010,00	(525.990,00)	99,56	
1.06.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	119.200.000,00	118.674.010,00	(525.990,00)	99,56	
1.06.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.200.000,00	118.674.010,00	(525.990,00)	99,56	
1.06.06.1.01.0003	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	298.120.000,00	249.808.960,00	(48.311.040,00)	83,79	
1.06.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	298.120.000,00	249.808.960,00	(48.311.040,00)	83,79	
1.06.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.120.000,00	249.808.960,00	(48.311.040,00)	83,79	
1.06.06.1.01.0004	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	262.450.000,00	261.065.484,00	(1.384.516,00)	99,47	
1.06.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	262.450.000,00	261.065.484,00	(1.384.516,00)	99,47	
1.06.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.450.000,00	261.065.484,00	(1.384.516,00)	99,47	
1.06.06.1.01.0005	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	110.061.000,00	108.944.699,00	(1.116.301,00)	98,99	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	110.061.000,00	108.944.699,00	(1.116.301,00)	98,99	
1.06.06.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.061.000,00	108.944.699,00	(1.116.301,00)	98,99	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	72.139.945.562,00	69.329.216.109,72	(2.810.729.452,28)	96,10	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.139.945.562,00)	(69.329.216.109,72)	2.810.729.452,28	96,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(72.139.945.562,00)	(69.329.216.109,72)	2.810.729.452,28	96,10	

2.07.0.00.0.00.01.0000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Satuan Kerja : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.07.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.190.420.000,00	2.254.566.852,00	64.146.852,00	102,93	
2.07.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	2.190.420.000,00	2.254.558.852,00	64.138.852,00	102,93	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
2.07.0.00.0.00.01.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.190.420.000,00	2.254.566.852,00	64.146.852,00	102,93	
5	BELANJA DAERAH					
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.782.893.512,00	65.923.513.462,00	(3.859.380.050,00)	94,47	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.07.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	751.835.500,00	648.788.204,00	(103.047.296,00)	86,29	
2.07.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	90.360.500,00	47.538.190,00	(42.822.310,00)	52,61	
2.07.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.360.500,00	47.538.190,00	(42.822.310,00)	52,61	
2.07.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.360.500,00	47.538.190,00	(42.822.310,00)	52,61	
2.07.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	49.360.000,00	44.368.300,00	(4.991.700,00)	89,89	
2.07.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	49.360.000,00	44.368.300,00	(4.991.700,00)	89,89	
2.07.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.360.000,00	44.368.300,00	(4.991.700,00)	89,89	
2.07.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	
2.07.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	
2.07.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	49.360.000,00	45.008.300,00	(4.351.700,00)	91,18	
2.07.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	49.360.000,00	45.008.300,00	(4.351.700,00)	91,18	
2.07.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.360.000,00	45.008.300,00	(4.351.700,00)	91,18	
2.07.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	
2.07.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	
2.07.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.368.300,00	(31.700,00)	99,84	
2.07.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.775.000,00	20.626.625,00	(5.148.375,00)	80,03	
2.07.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.775.000,00	20.626.625,00	(5.148.375,00)	80,03	
2.07.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	20.626.625,00	(5.148.375,00)	80,03	
2.07.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.085.000,00	56.081.438,00	(9.003.562,00)	86,17	
2.07.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	65.085.000,00	56.081.438,00	(9.003.562,00)	86,17	
2.07.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.085.000,00	56.081.438,00	(9.003.562,00)	86,17	
2.07.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	136.175.000,00	136.067.563,00	(107.437,00)	99,92	
2.07.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	136.175.000,00	136.067.563,00	(107.437,00)	99,92	
2.07.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.175.000,00	136.067.563,00	(107.437,00)	99,92	
2.07.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	55.560.000,00	54.718.750,00	(841.250,00)	98,49	
2.07.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	55.560.000,00	54.718.750,00	(841.250,00)	98,49	
2.07.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.560.000,00	54.718.750,00	(841.250,00)	98,49	
2.07.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	17.075.000,00	10.740.313,00	(6.334.687,00)	62,90	
2.07.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	17.075.000,00	10.740.313,00	(6.334.687,00)	62,90	
2.07.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.075.000,00	10.740.313,00	(6.334.687,00)	62,90	
2.07.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	222.285.000,00	192.902.125,00	(29.382.875,00)	86,78	
2.07.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	222.285.000,00	192.902.125,00	(29.382.875,00)	86,78	
2.07.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.285.000,00	192.902.125,00	(29.382.875,00)	86,78	
2.07.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	44.822.758.100,00	43.751.864.345,00	(1.070.893.755,00)	97,61	
2.07.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	44.128.400.000,00	43.289.772.810,00	(838.627.190,00)	98,10	
2.07.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	44.128.400.000,00	43.289.772.810,00	(838.627.190,00)	98,10	
2.07.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	44.128.400.000,00	43.289.772.810,00	(838.627.190,00)	98,10	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	598.680.000,00	407.100.000,00	(191.580.000,00)	68,00	
2.07.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	598.680.000,00	407.100.000,00	(191.580.000,00)	68,00	
2.07.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.680.000,00	407.100.000,00	(191.580.000,00)	68,00	
2.07.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	25.320.000,00	18.864.000,00	(6.456.000,00)	74,50	
2.07.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.320.000,00	18.864.000,00	(6.456.000,00)	74,50	
2.07.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	18.864.000,00	(6.456.000,00)	74,50	
2.07.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	16.356.600,00	7.200.000,00	(9.156.600,00)	44,02	
2.07.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.356.600,00	7.200.000,00	(9.156.600,00)	44,02	
2.07.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.356.600,00	7.200.000,00	(9.156.600,00)	44,02	
2.07.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.630.000,00	0,00	(13.630.000,00)	0,00	
2.07.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	13.630.000,00	0,00	(13.630.000,00)	0,00	
2.07.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.630.000,00	0,00	(13.630.000,00)	0,00	
2.07.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	14.167.500,00	9.695.640,00	(4.471.860,00)	68,44	
2.07.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.167.500,00	9.695.640,00	(4.471.860,00)	68,44	
2.07.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.167.500,00	9.695.640,00	(4.471.860,00)	68,44	
2.07.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	18.655.000,00	13.525.694,00	(5.129.306,00)	72,50	
2.07.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	18.655.000,00	13.525.694,00	(5.129.306,00)	72,50	
2.07.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.655.000,00	13.525.694,00	(5.129.306,00)	72,50	
2.07.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	7.549.000,00	5.706.201,00	(1.842.799,00)	75,59	
2.07.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	7.549.000,00	5.706.201,00	(1.842.799,00)	75,59	
2.07.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.549.000,00	5.706.201,00	(1.842.799,00)	75,59	
2.07.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	13.753.000,00	4.200.000,00	(9.553.000,00)	30,54	
2.07.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	13.753.000,00	4.200.000,00	(9.553.000,00)	30,54	
2.07.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.753.000,00	4.200.000,00	(9.553.000,00)	30,54	
2.07.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.753.000,00	4.200.000,00	(9.553.000,00)	30,54	
2.07.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	199.643.000,00	174.293.550,00	(25.349.450,00)	87,30	
2.07.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	199.643.000,00	174.293.550,00	(25.349.450,00)	87,30	
2.07.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	199.643.000,00	174.293.550,00	(25.349.450,00)	87,30	
2.07.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.643.000,00	174.293.550,00	(25.349.450,00)	87,30	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.586.999.150,00	1.295.237.211,00	(291.761.939,00)	81,62	
2.07.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	75.510.000,00	71.210.372,00	(4.299.628,00)	94,31	
2.07.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.510.000,00	71.210.372,00	(4.299.628,00)	94,31	
2.07.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.510.000,00	71.210.372,00	(4.299.628,00)	94,31	
2.07.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	486.071.000,00	408.907.442,00	(77.163.558,00)	84,13	
2.07.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	486.071.000,00	408.907.442,00	(77.163.558,00)	84,13	
2.07.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.071.000,00	408.907.442,00	(77.163.558,00)	84,13	
2.07.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	73.001.000,00	65.120.925,00	(7.880.075,00)	89,21	
2.07.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	73.001.000,00	65.120.925,00	(7.880.075,00)	89,21	
2.07.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.001.000,00	65.120.925,00	(7.880.075,00)	89,21	
2.07.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	226.994.150,00	222.037.803,00	(4.956.347,00)	97,82	
2.07.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	226.994.150,00	222.037.803,00	(4.956.347,00)	97,82	
2.07.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.994.150,00	222.037.803,00	(4.956.347,00)	97,82	
2.07.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	102.223.000,00	94.460.723,00	(7.762.277,00)	92,41	
2.07.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	102.223.000,00	94.460.723,00	(7.762.277,00)	92,41	
2.07.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.223.000,00	94.460.723,00	(7.762.277,00)	92,41	
2.07.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	237.450.000,00	180.540.606,00	(56.909.394,00)	76,03	
2.07.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	237.450.000,00	180.540.606,00	(56.909.394,00)	76,03	
2.07.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.450.000,00	180.540.606,00	(56.909.394,00)	76,03	
2.07.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	335.750.000,00	214.241.985,00	(121.508.015,00)	63,81	
2.07.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	335.750.000,00	214.241.985,00	(121.508.015,00)	63,81	
2.07.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.750.000,00	214.241.985,00	(121.508.015,00)	63,81	
2.07.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	50.000.000,00	38.717.355,00	(11.282.645,00)	77,43	
2.07.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	38.717.355,00	(11.282.645,00)	77,43	
2.07.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.717.355,00	(11.282.645,00)	77,43	
2.07.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.737.321.170,00	5.464.516.677,00	(272.804.493,00)	95,25	
2.07.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	3.150.000.000,00	3.058.556.160,00	(91.443.840,00)	97,10	
2.07.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	3.150.000.000,00	3.058.556.160,00	(91.443.840,00)	97,10	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.150.000.000,00	3.058.556.160,00	(91.443.840,00)	97,10	
2.07.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.587.321.170,00	2.405.960.517,00	(181.360.653,00)	92,99	
2.07.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	28.696.500,00	22.435.098,00	(6.261.402,00)	78,18	
2.07.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.696.500,00	22.435.098,00	(6.261.402,00)	78,18	
2.07.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.558.624.670,00	2.383.525.419,00	(175.099.251,00)	93,16	
2.07.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.558.624.670,00	2.383.525.419,00	(175.099.251,00)	93,16	
2.07.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.839.677.623,00	9.808.834.829,00	(1.030.842.794,00)	90,49	
2.07.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
2.07.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
2.07.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
2.07.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.405.032.983,00	4.807.313.605,00	(597.719.378,00)	88,94	
2.07.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.405.032.983,00	4.807.313.605,00	(597.719.378,00)	88,94	
2.07.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.405.032.983,00	4.807.313.605,00	(597.719.378,00)	88,94	
2.07.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	512.185.000,00	414.799.200,00	(97.385.800,00)	80,99	
2.07.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	512.185.000,00	414.799.200,00	(97.385.800,00)	80,99	
2.07.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.185.000,00	414.799.200,00	(97.385.800,00)	80,99	
2.07.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.898.459.640,00	4.586.722.024,00	(311.737.616,00)	93,64	
2.07.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.898.459.640,00	4.586.722.024,00	(311.737.616,00)	93,64	
2.07.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.459.640,00	4.586.722.024,00	(311.737.616,00)	93,64	
2.07.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.830.905.969,00	4.775.778.646,00	(1.055.127.323,00)	81,90	
2.07.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	73.896.000,00	37.816.338,00	(36.079.662,00)	51,18	
2.07.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	73.896.000,00	37.816.338,00	(36.079.662,00)	51,18	
2.07.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.896.000,00	37.816.338,00	(36.079.662,00)	51,18	
2.07.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.261.776.100,00	1.009.723.500,00	(252.052.600,00)	80,02	
2.07.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.261.776.100,00	1.009.723.500,00	(252.052.600,00)	80,02	
2.07.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.776.100,00	1.009.723.500,00	(252.052.600,00)	80,02	
2.07.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	514.284.000,00	416.719.550,00	(97.564.450,00)	81,03	
2.07.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	514.284.000,00	416.719.550,00	(97.564.450,00)	81,03	
2.07.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.284.000,00	416.719.550,00	(97.564.450,00)	81,03	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.980.949.869,00	3.311.519.258,00	(669.430.611,00)	83,18	
2.07.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	997.360.000,00	972.655.336,00	(24.704.664,00)	97,52	
2.07.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.360.000,00	972.655.336,00	(24.704.664,00)	97,52	
2.07.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	2.983.589.869,00	2.338.863.922,00	(644.725.947,00)	78,39	
2.07.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.983.589.869,00	2.338.863.922,00	(644.725.947,00)	78,39	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	179.330.600,00	126.408.100,00	(52.922.500,00)	70,49	
2.07.02.1.01	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	179.330.600,00	126.408.100,00	(52.922.500,00)	70,49	
2.07.02.1.01.0001	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	69.309.600,00	50.634.050,00	(18.675.550,00)	73,05	
2.07.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	69.309.600,00	50.634.050,00	(18.675.550,00)	73,05	
2.07.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.309.600,00	50.634.050,00	(18.675.550,00)	73,05	
2.07.02.1.01.0003	FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	65.051.000,00	46.850.000,00	(18.201.000,00)	72,02	
2.07.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	65.051.000,00	46.850.000,00	(18.201.000,00)	72,02	
2.07.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.051.000,00	46.850.000,00	(18.201.000,00)	72,02	
2.07.02.1.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	44.970.000,00	28.924.050,00	(16.045.950,00)	64,32	
2.07.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	44.970.000,00	28.924.050,00	(16.045.950,00)	64,32	
2.07.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.970.000,00	28.924.050,00	(16.045.950,00)	64,32	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.421.530.839,00	7.839.819.161,00	(581.711.678,00)	93,09	
2.07.03.1.01	PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLAS TER KOMPETENSI	7.924.508.839,00	7.387.105.161,00	(537.403.678,00)	93,22	
2.07.03.1.01.0001	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLAS TER KOMPETENSI	7.044.123.839,00	6.561.467.061,00	(482.656.778,00)	93,15	
2.07.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.044.123.839,00	6.561.467.061,00	(482.656.778,00)	93,15	
2.07.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.044.123.839,00	6.561.467.061,00	(482.656.778,00)	93,15	
2.07.03.1.01.0002	KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	842.480.000,00	788.292.850,00	(54.187.150,00)	93,57	
2.07.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	842.480.000,00	788.292.850,00	(54.187.150,00)	93,57	
2.07.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.480.000,00	788.292.850,00	(54.187.150,00)	93,57	
2.07.03.1.01.0004	KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	37.905.000,00	37.345.250,00	(559.750,00)	98,52	
2.07.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	37.905.000,00	37.345.250,00	(559.750,00)	98,52	
2.07.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.905.000,00	37.345.250,00	(559.750,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.03.1.02	PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA	255.735.000,00	238.400.000,00	(17.335.000,00)	93,22	
2.07.03.1.02.0001	SURVEY DAN PENILAIAN AKREDITASI KEPADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	255.735.000,00	238.400.000,00	(17.335.000,00)	93,22	
2.07.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	255.735.000,00	238.400.000,00	(17.335.000,00)	93,22	
2.07.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.735.000,00	238.400.000,00	(17.335.000,00)	93,22	
2.07.03.1.03	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN MENENGAH	171.996.000,00	151.612.000,00	(20.384.000,00)	88,15	
2.07.03.1.03.0001	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN MENENGAH	171.996.000,00	151.612.000,00	(20.384.000,00)	88,15	
2.07.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	171.996.000,00	151.612.000,00	(20.384.000,00)	88,15	
2.07.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.996.000,00	151.612.000,00	(20.384.000,00)	88,15	
2.07.03.1.04	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH PROVINSI	69.291.000,00	62.702.000,00	(6.589.000,00)	90,49	
2.07.03.1.04.0001	PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	69.291.000,00	62.702.000,00	(6.589.000,00)	90,49	
2.07.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	69.291.000,00	62.702.000,00	(6.589.000,00)	90,49	
2.07.03.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.291.000,00	62.702.000,00	(6.589.000,00)	90,49	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	987.889.600,00	813.172.290,00	(174.717.310,00)	82,31	
2.07.04.1.01	PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	522.249.600,00	468.375.640,00	(53.873.960,00)	89,68	
2.07.04.1.01.0001	PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA	51.835.000,00	47.630.000,00	(4.205.000,00)	91,89	
2.07.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	51.835.000,00	47.630.000,00	(4.205.000,00)	91,89	
2.07.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.835.000,00	47.630.000,00	(4.205.000,00)	91,89	
2.07.04.1.01.0002	PELAYANAN ANTAR KERJA	74.720.000,00	69.100.000,00	(5.620.000,00)	92,48	
2.07.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	74.720.000,00	69.100.000,00	(5.620.000,00)	92,48	
2.07.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.720.000,00	69.100.000,00	(5.620.000,00)	92,48	
2.07.04.1.01.0003	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	150.630.000,00	144.556.500,00	(6.073.500,00)	95,97	
2.07.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.630.000,00	144.556.500,00	(6.073.500,00)	95,97	
2.07.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.630.000,00	144.556.500,00	(6.073.500,00)	95,97	
2.07.04.1.01.0004	PEMBINAAN OPERASIONALISASI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD (ANTAR KERJA ANTAR DAERAH) DAN AKL (ANTAR KERJA LOKAL)	53.259.800,00	49.086.820,00	(4.172.980,00)	92,16	
2.07.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	53.259.800,00	49.086.820,00	(4.172.980,00)	92,16	
2.07.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.259.800,00	49.086.820,00	(4.172.980,00)	92,16	
2.07.04.1.01.0005	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	114.630.000,00	107.927.500,00	(6.702.500,00)	94,15	
2.07.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	114.630.000,00	107.927.500,00	(6.702.500,00)	94,15	
2.07.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.630.000,00	107.927.500,00	(6.702.500,00)	94,15	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.04.1.01.0006	PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN	77.174.800,00	50.074.820,00	(27.099.980,00)	64,88	
2.07.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	77.174.800,00	50.074.820,00	(27.099.980,00)	64,88	
2.07.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.174.800,00	50.074.820,00	(27.099.980,00)	64,88	
2.07.04.1.03	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	187.870.000,00	109.304.500,00	(78.565.500,00)	58,18	
2.07.04.1.03.0001	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	66.880.000,00	57.460.000,00	(9.420.000,00)	85,92	
2.07.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	66.880.000,00	57.460.000,00	(9.420.000,00)	85,92	
2.07.04.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.880.000,00	57.460.000,00	(9.420.000,00)	85,92	
2.07.04.1.03.0002	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	120.990.000,00	51.844.500,00	(69.145.500,00)	42,85	
2.07.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	120.990.000,00	51.844.500,00	(69.145.500,00)	42,85	
2.07.04.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.990.000,00	51.844.500,00	(69.145.500,00)	42,85	
2.07.04.1.03.0003	JOB FAIR/BURSA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.1.04	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH PROVINSI	277.770.000,00	235.492.150,00	(42.277.850,00)	84,78	
2.07.04.1.04.0001	PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	138.945.000,00	109.475.000,00	(29.470.000,00)	78,79	
2.07.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	138.945.000,00	109.475.000,00	(29.470.000,00)	78,79	
2.07.04.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.945.000,00	109.475.000,00	(29.470.000,00)	78,79	
2.07.04.1.04.0002	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	67.515.000,00	61.617.150,00	(5.897.850,00)	91,26	
2.07.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	67.515.000,00	61.617.150,00	(5.897.850,00)	91,26	
2.07.04.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.515.000,00	61.617.150,00	(5.897.850,00)	91,26	
2.07.04.1.04.0004	PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN	71.310.000,00	64.400.000,00	(6.910.000,00)	90,31	
2.07.04.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	71.310.000,00	64.400.000,00	(6.910.000,00)	90,31	
2.07.04.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.310.000,00	64.400.000,00	(6.910.000,00)	90,31	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.312.088.000,00	2.083.134.243,00	(228.953.757,00)	90,10	
2.07.05.1.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK YANG MEMPUYAI WILAYAH KERJA LEBIH DARI 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	249.948.000,00	236.711.000,00	(13.237.000,00)	94,70	
2.07.05.1.01.0001	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	65.020.800,00	62.904.120,00	(2.116.680,00)	96,74	
2.07.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	65.020.800,00	62.904.120,00	(2.116.680,00)	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.020.800,00	62.904.120,00	(2.116.680,00)	96,74	
2.07.05.1.01.0002	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG TERKAIT DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	66.405.200,00	63.344.880,00	(3.060.320,00)	95,39	
2.07.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	66.405.200,00	63.344.880,00	(3.060.320,00)	95,39	
2.07.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.405.200,00	63.344.880,00	(3.060.320,00)	95,39	
2.07.05.1.01.0003	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	118.522.000,00	110.462.000,00	(8.060.000,00)	93,20	
2.07.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	118.522.000,00	110.462.000,00	(8.060.000,00)	93,20	
2.07.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.522.000,00	110.462.000,00	(8.060.000,00)	93,20	
2.07.05.1.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	995.000.000,00	919.174.140,00	(75.825.860,00)	92,38	
2.07.05.1.02.0001	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	215.052.000,00	203.520.140,00	(11.531.860,00)	94,64	
2.07.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	215.052.000,00	203.520.140,00	(11.531.860,00)	94,64	
2.07.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.052.000,00	203.520.140,00	(11.531.860,00)	94,64	
2.07.05.1.02.0002	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	7.148.100,00	7.084.930,00	(63.170,00)	99,12	
2.07.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.148.100,00	7.084.930,00	(63.170,00)	99,12	
2.07.05.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.148.100,00	7.084.930,00	(63.170,00)	99,12	
2.07.05.1.02.0003	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	100,00	
2.07.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	100,00	
2.07.05.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	100,00	
2.07.05.1.02.0004	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH PROVINSI	765.707.900,00	701.477.070,00	(64.230.830,00)	91,61	
2.07.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	765.707.900,00	701.477.070,00	(64.230.830,00)	91,61	
2.07.05.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.707.900,00	701.477.070,00	(64.230.830,00)	91,61	
2.07.05.1.03	PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)	1.067.140.000,00	927.249.103,00	(139.890.897,00)	86,89	
2.07.05.1.03.0001	PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	861.862.000,00	742.427.000,00	(119.435.000,00)	86,14	
2.07.05.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	861.862.000,00	742.427.000,00	(119.435.000,00)	86,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.05.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.862.000,00	742.427.000,00	(119.435.000,00)	86,14	
2.07.05.1.03.0003	PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)	205.278.000,00	184.822.103,00	(20.455.897,00)	90,04	
2.07.05.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	205.278.000,00	184.822.103,00	(20.455.897,00)	90,04	
2.07.05.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.278.000,00	184.822.103,00	(20.455.897,00)	90,04	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	513.187.000,00	381.391.435,00	(131.795.565,00)	74,32	
2.07.06.1.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	513.187.000,00	381.391.435,00	(131.795.565,00)	74,32	
2.07.06.1.01.0001	PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN	181.070.000,00	137.892.500,00	(43.177.500,00)	76,15	
2.07.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	181.070.000,00	137.892.500,00	(43.177.500,00)	76,15	
2.07.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.070.000,00	137.892.500,00	(43.177.500,00)	76,15	
2.07.06.1.01.0002	PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN	55.000.000,00	31.405.000,00	(23.595.000,00)	57,10	
2.07.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	31.405.000,00	(23.595.000,00)	57,10	
2.07.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	31.405.000,00	(23.595.000,00)	57,10	
2.07.06.1.01.0003	PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN	277.117.000,00	212.093.935,00	(65.023.065,00)	76,54	
2.07.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	277.117.000,00	212.093.935,00	(65.023.065,00)	76,54	
2.07.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.117.000,00	212.093.935,00	(65.023.065,00)	76,54	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	82.196.919.551,00	77.167.438.691,00	(5.029.480.860,00)	93,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(80.006.499.551,00)	(74.912.871.839,00)	5.093.627.712,00	93,63	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(80.006.499.551,00)	(74.912.871.839,00)	5.093.627.712,00	93,63	

2.08.2.12.2.14.02.0000

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Satuan Kerja : 2.08.2.12.2.14.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.695.115.969,00	20.545.276.017,00	(3.149.839.952,00)	86,71	
2.08.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	244.115.200,00	241.030.701,00	(3.084.499,00)	98,74	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.08.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.074.000,00	23.204.000,00	(870.000,00)	96,39	
2.08.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.074.000,00	23.204.000,00	(870.000,00)	96,39	
2.08.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.074.000,00	23.204.000,00	(870.000,00)	96,39	
2.08.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	10.890.000,00	10.815.000,00	(75.000,00)	99,31	
2.08.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.890.000,00	10.815.000,00	(75.000,00)	99,31	
2.08.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	10.815.000,00	(75.000,00)	99,31	
2.08.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	13.996.800,00	13.996.800,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.996.800,00	13.996.800,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.996.800,00	13.996.800,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.330.400,00	11.330.400,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.330.400,00	11.330.400,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.330.400,00	11.330.400,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	86.642.000,00	86.487.001,00	(154.999,00)	99,82	
2.08.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	86.642.000,00	86.487.001,00	(154.999,00)	99,82	
2.08.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.642.000,00	86.487.001,00	(154.999,00)	99,82	
2.08.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.792.500,00	17.442.500,00	(350.000,00)	98,03	
2.08.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	17.792.500,00	17.442.500,00	(350.000,00)	98,03	
2.08.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.792.500,00	17.442.500,00	(350.000,00)	98,03	
2.08.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	8.204.000,00	8.154.000,00	(50.000,00)	99,39	
2.08.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	8.204.000,00	8.154.000,00	(50.000,00)	99,39	
2.08.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.204.000,00	8.154.000,00	(50.000,00)	99,39	
2.08.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.645.000,00	28.857.000,00	(788.000,00)	97,34	
2.08.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	29.645.000,00	28.857.000,00	(788.000,00)	97,34	
2.08.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.645.000,00	28.857.000,00	(788.000,00)	97,34	
2.08.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	2.863.500,00	2.713.500,00	(150.000,00)	94,76	
2.08.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.863.500,00	2.713.500,00	(150.000,00)	94,76	
2.08.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.863.500,00	2.713.500,00	(150.000,00)	94,76	
2.08.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	15.709.000,00	15.609.000,00	(100.000,00)	99,36	
2.08.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.709.000,00	15.609.000,00	(100.000,00)	99,36	
2.08.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.709.000,00	15.609.000,00	(100.000,00)	99,36	
2.08.01.1.01.0012	SINKRONISASI DAN HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	10.938.000,00	10.391.500,00	(546.500,00)	95,00	
2.08.01.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	10.938.000,00	10.391.500,00	(546.500,00)	95,00	
2.08.01.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.938.000,00	10.391.500,00	(546.500,00)	95,00	
2.08.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.957.600.000,00	17.107.767.297,00	(2.849.832.703,00)	85,72	
2.08.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.444.400.000,00	16.760.449.697,00	(2.683.950.303,00)	86,20	
2.08.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.444.400.000,00	16.760.449.697,00	(2.683.950.303,00)	86,20	
2.08.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.444.400.000,00	16.760.449.697,00	(2.683.950.303,00)	86,20	
2.08.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	447.200.000,00	281.320.000,00	(165.880.000,00)	62,91	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	447.200.000,00	281.320.000,00	(165.880.000,00)	62,91	
2.08.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.200.000,00	281.320.000,00	(165.880.000,00)	62,91	
2.08.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.212.000,00	2.211.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.212.000,00	2.211.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000,00	2.211.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	10.480.000,00	10.479.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.480.000,00	10.479.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	10.479.900,00	(100,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	45.440.000,00	45.439.800,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	45.440.000,00	45.439.800,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.440.000,00	45.439.800,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.780.000,00	2.778.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.08.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.780.000,00	2.778.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.08.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	2.778.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.08.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	12.779.719,00	12.493.900,00	(285.819,00)	97,76	
2.08.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.179.000,00	5.893.400,00	(285.600,00)	95,38	
2.08.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.179.000,00	5.893.400,00	(285.600,00)	95,38	
2.08.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.179.000,00	5.893.400,00	(285.600,00)	95,38	
2.08.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.154.000,00	4.154.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.154.000,00	4.154.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.154.000,00	4.154.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.446.719,00	2.446.500,00	(219,00)	99,99	
2.08.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.446.719,00	2.446.500,00	(219,00)	99,99	
2.08.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.446.719,00	2.446.500,00	(219,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	51.174.000,00	5.976.000,00	(45.198.000,00)	11,68	
2.08.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.285.000,00	960.000,00	(325.000,00)	74,71	
2.08.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.285.000,00	960.000,00	(325.000,00)	74,71	
2.08.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	960.000,00	(325.000,00)	74,71	
2.08.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	370.000,00	240.000,00	(130.000,00)	64,86	
2.08.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	240.000,00	(130.000,00)	64,86	
2.08.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	240.000,00	(130.000,00)	64,86	
2.08.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	49.519.000,00	4.776.000,00	(44.743.000,00)	9,64	
2.08.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	49.519.000,00	4.776.000,00	(44.743.000,00)	9,64	
2.08.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.519.000,00	4.776.000,00	(44.743.000,00)	9,64	
2.08.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	686.991.960,00	669.676.234,00	(17.315.726,00)	97,48	
2.08.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.038.000,00	11.972.000,00	(66.000,00)	99,45	
2.08.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.038.000,00	11.972.000,00	(66.000,00)	99,45	
2.08.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.038.000,00	11.972.000,00	(66.000,00)	99,45	
2.08.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	193.418.700,00	185.130.326,00	(8.288.374,00)	95,71	
2.08.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	193.418.700,00	185.130.326,00	(8.288.374,00)	95,71	
2.08.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.418.700,00	185.130.326,00	(8.288.374,00)	95,71	
2.08.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	97.384.000,00	97.252.997,00	(131.003,00)	99,87	
2.08.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	97.384.000,00	97.252.997,00	(131.003,00)	99,87	
2.08.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.384.000,00	97.252.997,00	(131.003,00)	99,87	
2.08.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	115.439.000,00	115.122.000,00	(317.000,00)	99,73	
2.08.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	115.439.000,00	115.122.000,00	(317.000,00)	99,73	
2.08.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.439.000,00	115.122.000,00	(317.000,00)	99,73	
2.08.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	69.244.260,00	69.104.438,00	(139.822,00)	99,80	
2.08.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	69.244.260,00	69.104.438,00	(139.822,00)	99,80	
2.08.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.244.260,00	69.104.438,00	(139.822,00)	99,80	
2.08.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	29.155.000,00	29.090.000,00	(65.000,00)	99,78	
2.08.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	29.155.000,00	29.090.000,00	(65.000,00)	99,78	
2.08.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.155.000,00	29.090.000,00	(65.000,00)	99,78	
2.08.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	140.008.000,00	132.004.473,00	(8.003.527,00)	94,28	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	140.008.000,00	132.004.473,00	(8.003.527,00)	94,28	
2.08.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.008.000,00	132.004.473,00	(8.003.527,00)	94,28	
2.08.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00	
2.08.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00	
2.08.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00	
2.08.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	129.759.000,00	128.294.151,00	(1.464.849,00)	98,87	
2.08.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	127.290.000,00	126.335.151,00	(954.849,00)	99,25	
2.08.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.338.000,00	1.095.000,00	(243.000,00)	81,84	
2.08.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.000,00	1.095.000,00	(243.000,00)	81,84	
2.08.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	125.952.000,00	125.240.151,00	(711.849,00)	99,43	
2.08.01.1.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.952.000,00	125.240.151,00	(711.849,00)	99,43	
2.08.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.469.000,00	1.959.000,00	(510.000,00)	79,34	
2.08.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	0,00	(510.000,00)	0,00	
2.08.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	0,00	(510.000,00)	0,00	
2.08.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.752.810.090,00	1.527.735.375,00	(225.074.715,00)	87,16	
2.08.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	741.980.950,00	661.469.535,00	(80.511.415,00)	89,15	
2.08.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	741.980.950,00	661.469.535,00	(80.511.415,00)	89,15	
2.08.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.980.950,00	661.469.535,00	(80.511.415,00)	89,15	
2.08.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.010.829.140,00	866.265.840,00	(144.563.300,00)	85,70	
2.08.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.829.140,00	866.265.840,00	(144.563.300,00)	85,70	
2.08.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.829.140,00	866.265.840,00	(144.563.300,00)	85,70	
2.08.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	859.886.000,00	852.302.359,00	(7.583.641,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.410.000,00	38.298.977,00	(111.023,00)	99,71	
2.08.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.410.000,00	38.298.977,00	(111.023,00)	99,71	
2.08.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.410.000,00	38.298.977,00	(111.023,00)	99,71	
2.08.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	459.818.000,00	459.657.391,00	(160.609,00)	99,97	
2.08.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	459.818.000,00	459.657.391,00	(160.609,00)	99,97	
2.08.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.818.000,00	459.657.391,00	(160.609,00)	99,97	
2.08.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	108.360.000,00	106.507.991,00	(1.852.009,00)	98,29	
2.08.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	108.360.000,00	106.507.991,00	(1.852.009,00)	98,29	
2.08.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.360.000,00	106.507.991,00	(1.852.009,00)	98,29	
2.08.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	253.298.000,00	247.838.000,00	(5.460.000,00)	97,84	
2.08.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	253.298.000,00	247.838.000,00	(5.460.000,00)	97,84	
2.08.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.298.000,00	247.838.000,00	(5.460.000,00)	97,84	
2.08.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.660.013.000,00	3.517.147.524,00	(142.865.476,00)	96,10	
2.08.02.1.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	322.255.000,00	289.711.500,00	(32.543.500,00)	89,90	
2.08.02.1.01.0005	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN PROVINSI	66.678.500,00	63.036.500,00	(3.642.000,00)	94,54	
2.08.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	66.678.500,00	63.036.500,00	(3.642.000,00)	94,54	
2.08.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.678.500,00	63.036.500,00	(3.642.000,00)	94,54	
2.08.02.1.01.0006	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN PROVINSI	115.422.000,00	108.122.000,00	(7.300.000,00)	93,68	
2.08.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	115.422.000,00	108.122.000,00	(7.300.000,00)	93,68	
2.08.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.422.000,00	108.122.000,00	(7.300.000,00)	93,68	
2.08.02.1.01.0007	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN PROVINSI	140.154.500,00	118.553.000,00	(21.601.500,00)	84,59	
2.08.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	140.154.500,00	118.553.000,00	(21.601.500,00)	84,59	
2.08.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.154.500,00	118.553.000,00	(21.601.500,00)	84,59	
2.08.02.1.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	1.513.134.000,00	1.448.983.900,00	(64.150.100,00)	95,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.02.1.02.0003	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	1.493.384.000,00	1.436.033.900,00	(57.350.100,00)	96,16	
2.08.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.493.384.000,00	1.436.033.900,00	(57.350.100,00)	96,16	
2.08.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.493.384.000,00	1.436.033.900,00	(57.350.100,00)	96,16	
2.08.02.1.02.0004	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	19.750.000,00	12.950.000,00	(6.800.000,00)	65,57	
2.08.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	19.750.000,00	12.950.000,00	(6.800.000,00)	65,57	
2.08.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	12.950.000,00	(6.800.000,00)	65,57	
2.08.02.1.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	1.824.624.000,00	1.778.452.124,00	(46.171.876,00)	97,47	
2.08.02.1.03.0004	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	22.664.000,00	17.564.000,00	(5.100.000,00)	77,50	
2.08.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	22.664.000,00	17.564.000,00	(5.100.000,00)	77,50	
2.08.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.664.000,00	17.564.000,00	(5.100.000,00)	77,50	
2.08.02.1.03.0005	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	1.768.118.000,00	1.728.146.124,00	(39.971.876,00)	97,74	
2.08.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.768.118.000,00	1.728.146.124,00	(39.971.876,00)	97,74	
2.08.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.118.000,00	1.728.146.124,00	(39.971.876,00)	97,74	
2.08.02.1.03.0006	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	33.842.000,00	32.742.000,00	(1.100.000,00)	96,75	
2.08.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	33.842.000,00	32.742.000,00	(1.100.000,00)	96,75	
2.08.02.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.842.000,00	32.742.000,00	(1.100.000,00)	96,75	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.210.142.500,00	1.085.579.877,00	(124.562.623,00)	89,71	
2.08.03.1.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	576.820.000,00	573.071.909,00	(3.748.091,00)	99,35	
2.08.03.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	576.820.000,00	573.071.909,00	(3.748.091,00)	99,35	
2.08.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	576.820.000,00	573.071.909,00	(3.748.091,00)	99,35	
2.08.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.820.000,00	573.071.909,00	(3.748.091,00)	99,35	
2.08.03.1.02	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.416.500,00	114.593.000,00	(115.823.500,00)	49,73	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.03.1.02.0001	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.328.000,00	53.151.000,00	(37.177.000,00)	58,84	
2.08.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.328.000,00	53.151.000,00	(37.177.000,00)	58,84	
2.08.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.328.000,00	53.151.000,00	(37.177.000,00)	58,84	
2.08.03.1.02.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	140.088.500,00	61.442.000,00	(78.646.500,00)	43,86	
2.08.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.088.500,00	61.442.000,00	(78.646.500,00)	43,86	
2.08.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.088.500,00	61.442.000,00	(78.646.500,00)	43,86	
2.08.03.1.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	402.906.000,00	397.914.968,00	(4.991.032,00)	98,76	
2.08.03.1.03.0003	PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	371.850.000,00	370.810.968,00	(1.039.032,00)	99,72	
2.08.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	371.850.000,00	370.810.968,00	(1.039.032,00)	99,72	
2.08.03.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.850.000,00	370.810.968,00	(1.039.032,00)	99,72	
2.08.03.1.03.0004	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.056.000,00	27.104.000,00	(3.952.000,00)	87,27	
2.08.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.056.000,00	27.104.000,00	(3.952.000,00)	87,27	
2.08.03.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.056.000,00	27.104.000,00	(3.952.000,00)	87,27	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.910.680.800,00	1.780.022.056,00	(130.658.744,00)	93,16	
2.08.04.1.01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	27.435.000,00	23.758.500,00	(3.676.500,00)	86,60	
2.08.04.1.01.0002	PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.1.01.0003	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	24.110.000,00	20.433.500,00	(3.676.500,00)	84,75	
2.08.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.110.000,00	20.433.500,00	(3.676.500,00)	84,75	
2.08.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.110.000,00	20.433.500,00	(3.676.500,00)	84,75	
2.08.04.1.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	1.421.403.000,00	1.324.948.556,00	(96.454.444,00)	93,21	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.04.1.02.0001	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	1.421.403.000,00	1.324.948.556,00	(96.454.444,00)	93,21	
2.08.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.378.379.000,00	1.282.098.556,00	(96.280.444,00)	93,01	
2.08.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.379.000,00	1.032.098.556,00	(96.280.444,00)	91,47	
2.08.04.1.02.0001.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	43.024.000,00	42.850.000,00	(174.000,00)	99,60	
2.08.04.1.02.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.024.000,00	42.850.000,00	(174.000,00)	99,60	
2.08.04.1.03	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	461.842.800,00	431.315.000,00	(30.527.800,00)	93,39	
2.08.04.1.03.0001	PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	461.842.800,00	431.315.000,00	(30.527.800,00)	93,39	
2.08.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	461.842.800,00	431.315.000,00	(30.527.800,00)	93,39	
2.08.04.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.842.800,00	431.315.000,00	(30.527.800,00)	93,39	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	81.813.000,00	74.913.000,00	(6.900.000,00)	91,57	
2.08.05.1.01	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH PROVINSI	81.813.000,00	74.913.000,00	(6.900.000,00)	91,57	
2.08.05.1.01.0001	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI	50.685.000,00	45.485.000,00	(5.200.000,00)	89,74	
2.08.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.685.000,00	45.485.000,00	(5.200.000,00)	89,74	
2.08.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.685.000,00	45.485.000,00	(5.200.000,00)	89,74	
2.08.05.1.01.0002	PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA PROVINSI	31.128.000,00	29.428.000,00	(1.700.000,00)	94,54	
2.08.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	31.128.000,00	29.428.000,00	(1.700.000,00)	94,54	
2.08.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.128.000,00	29.428.000,00	(1.700.000,00)	94,54	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.440.091.000,00	1.373.383.387,00	(66.707.613,00)	95,37	
2.08.06.1.01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	248.080.000,00	242.105.000,00	(5.975.000,00)	97,59	
2.08.06.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	225.250.000,00	220.375.000,00	(4.875.000,00)	97,84	
2.08.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.250.000,00	220.375.000,00	(4.875.000,00)	97,84	
2.08.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.250.000,00	220.375.000,00	(4.875.000,00)	97,84	
2.08.06.1.01.0003	ADVOKASI, SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	22.830.000,00	21.730.000,00	(1.100.000,00)	95,18	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.830.000,00	21.730.000,00	(1.100.000,00)	95,18	
2.08.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.830.000,00	21.730.000,00	(1.100.000,00)	95,18	
2.08.06.1.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	1.192.011.000,00	1.131.278.387,00	(60.732.613,00)	94,91	
2.08.06.1.02.0001	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	1.131.325.000,00	1.071.792.555,00	(59.532.445,00)	94,74	
2.08.06.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.131.325.000,00	1.071.792.555,00	(59.532.445,00)	94,74	
2.08.06.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.325.000,00	1.071.792.555,00	(59.532.445,00)	94,74	
2.08.06.1.02.0005	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	40.474.000,00	39.273.832,00	(1.200.168,00)	97,03	
2.08.06.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	40.474.000,00	39.273.832,00	(1.200.168,00)	97,03	
2.08.06.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.474.000,00	39.273.832,00	(1.200.168,00)	97,03	
2.08.06.1.02.0006	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK	20.212.000,00	20.212.000,00	0,00	100,00	
2.08.06.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.212.000,00	20.212.000,00	0,00	100,00	
2.08.06.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.212.000,00	20.212.000,00	0,00	100,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.201.959.500,00	874.989.089,00	(326.970.411,00)	72,80	
2.08.07.1.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	586.624.000,00	556.699.589,00	(29.924.411,00)	94,90	
2.08.07.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	455.980.000,00	432.859.589,00	(23.120.411,00)	94,93	
2.08.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	455.980.000,00	432.859.589,00	(23.120.411,00)	94,93	
2.08.07.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.980.000,00	432.859.589,00	(23.120.411,00)	94,93	
2.08.07.1.01.0003	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA KEWENANGAN PROVINSI	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.01.0004	PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS PERANGKAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, DAN DRPPA KEWENANGAN PROVINSI	122.544.000,00	116.740.000,00	(5.804.000,00)	95,26	
2.08.07.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	122.544.000,00	116.740.000,00	(5.804.000,00)	95,26	
2.08.07.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.544.000,00	116.740.000,00	(5.804.000,00)	95,26	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.07.1.02	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	464.635.500,00	173.874.000,00	(290.761.500,00)	37,42	
2.08.07.1.02.0005	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	113.496.000,00	56.295.000,00	(57.201.000,00)	49,60	
2.08.07.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	113.496.000,00	56.295.000,00	(57.201.000,00)	49,60	
2.08.07.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.496.000,00	56.295.000,00	(57.201.000,00)	49,60	
2.08.07.1.02.0007	KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK KEWENANGAN PROVINSI	351.139.500,00	117.579.000,00	(233.560.500,00)	33,48	
2.08.07.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	266.680.500,00	117.579.000,00	(149.101.500,00)	44,09	
2.08.07.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.680.500,00	117.579.000,00	(149.101.500,00)	44,09	
2.08.07.1.02.0007.5.2	BELANJA MODAL	84.459.000,00	0,00	(84.459.000,00)	0,00	
2.08.07.1.02.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.459.000,00	0,00	(84.459.000,00)	0,00	
2.08.07.1.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.700.000,00	144.415.500,00	(6.284.500,00)	95,83	
2.08.07.1.03.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	42.034.000,00	39.629.500,00	(2.404.500,00)	94,28	
2.08.07.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	42.034.000,00	39.629.500,00	(2.404.500,00)	94,28	
2.08.07.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.034.000,00	39.629.500,00	(2.404.500,00)	94,28	
2.08.07.1.03.0004	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI AMPK KEWENANGAN PROVINSI	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	7.100.000,00	(1.000.000,00)	87,65	
2.08.07.1.03.0006	PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN PROVINSI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0007	PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK KEWENANGAN PROVINSI	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	100,00	
2.08.07.1.03.0008	PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK KEWENANGAN	86.750.000,00	83.870.000,00	(2.880.000,00)	96,68	
2.08.07.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	86.750.000,00	83.870.000,00	(2.880.000,00)	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.07.1.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.750.000,00	83.870.000,00	(2.880.000,00)	96,68	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	399.217.000,00	340.707.919,00	(58.509.081,00)	85,34	
2.12.02.1.01	PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	26.870.000,00	23.879.500,00	(2.990.500,00)	88,87	
2.12.02.1.01.0003	PENATAAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK SKALA PROVINSI	26.870.000,00	23.879.500,00	(2.990.500,00)	88,87	
2.12.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	26.870.000,00	23.879.500,00	(2.990.500,00)	88,87	
2.12.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.870.000,00	23.879.500,00	(2.990.500,00)	88,87	
2.12.02.1.02	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	327.803.000,00	285.108.419,00	(42.694.581,00)	86,98	
2.12.02.1.02.0001	FASILITASI TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	327.803.000,00	285.108.419,00	(42.694.581,00)	86,98	
2.12.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	327.803.000,00	285.108.419,00	(42.694.581,00)	86,98	
2.12.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.803.000,00	285.108.419,00	(42.694.581,00)	86,98	
2.12.02.1.03	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	44.544.000,00	31.720.000,00	(12.824.000,00)	71,21	
2.12.02.1.03.0001	PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	44.544.000,00	31.720.000,00	(12.824.000,00)	71,21	
2.12.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	44.544.000,00	31.720.000,00	(12.824.000,00)	71,21	
2.12.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.544.000,00	31.720.000,00	(12.824.000,00)	71,21	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	334.593.000,00	279.963.300,00	(54.629.700,00)	83,67	
2.12.03.1.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	31.949.000,00	30.499.000,00	(1.450.000,00)	95,46	
2.12.03.1.01.0002	PENATAAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL SKALA PROVINSI	7.815.000,00	6.365.000,00	(1.450.000,00)	81,45	
2.12.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.815.000,00	6.365.000,00	(1.450.000,00)	81,45	
2.12.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.815.000,00	6.365.000,00	(1.450.000,00)	81,45	
2.12.03.1.01.0004	FASILITASI PELAYANAN BIDANG PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA	24.134.000,00	24.134.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.134.000,00	24.134.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.134.000,00	24.134.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.1.02	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI	259.082.000,00	216.143.300,00	(42.938.700,00)	83,43	
2.12.03.1.02.0001	FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	259.082.000,00	216.143.300,00	(42.938.700,00)	83,43	
2.12.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	259.082.000,00	216.143.300,00	(42.938.700,00)	83,43	
2.12.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.082.000,00	216.143.300,00	(42.938.700,00)	83,43	
2.12.03.1.03	PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	43.562.000,00	33.321.000,00	(10.241.000,00)	76,49	
2.12.03.1.03.0001	PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL	29.932.000,00	23.181.000,00	(6.751.000,00)	77,45	
2.12.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.932.000,00	23.181.000,00	(6.751.000,00)	77,45	
2.12.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.932.000,00	23.181.000,00	(6.751.000,00)	77,45	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.03.1.03.0002	BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL	13.630.000,00	10.140.000,00	(3.490.000,00)	74,39	
2.12.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.630.000,00	10.140.000,00	(3.490.000,00)	74,39	
2.12.03.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.630.000,00	10.140.000,00	(3.490.000,00)	74,39	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	182.841.000,00	178.574.500,00	(4.266.500,00)	97,67	
2.12.04.1.02	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI	156.553.000,00	156.424.500,00	(128.500,00)	99,92	
2.12.04.1.02.0001	FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	146.833.000,00	146.704.500,00	(128.500,00)	99,91	
2.12.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	146.833.000,00	146.704.500,00	(128.500,00)	99,91	
2.12.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.833.000,00	146.704.500,00	(128.500,00)	99,91	
2.12.04.1.02.0005	PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	100,00	
2.12.04.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	100,00	
2.12.04.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	100,00	
2.12.04.1.03	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI	26.288.000,00	22.150.000,00	(4.138.000,00)	84,26	
2.12.04.1.03.0001	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	26.288.000,00	22.150.000,00	(4.138.000,00)	84,26	
2.12.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	26.288.000,00	22.150.000,00	(4.138.000,00)	84,26	
2.12.04.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.288.000,00	22.150.000,00	(4.138.000,00)	84,26	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.618.000,00	54.617.560,00	(440,00)	100,00	
2.12.05.1.01	PENYEDIAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.618.000,00	54.617.560,00	(440,00)	100,00	
2.12.05.1.01.0001	PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI	31.386.000,00	31.385.560,00	(440,00)	100,00	
2.12.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.386.000,00	31.385.560,00	(440,00)	100,00	
2.12.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.386.000,00	31.385.560,00	(440,00)	100,00	
2.12.05.1.01.0002	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	100,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	414.400.000,00	401.894.999,00	(12.505.001,00)	96,98	
2.14.02.1.01	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	402.276.000,00	391.310.999,00	(10.965.001,00)	97,27	
2.14.02.1.01.0002	PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT PROVINSI	71.225.000,00	71.225.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.225.000,00	71.225.000,00	0,00	100,00	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.225.000,00	71.225.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.1.01.0005	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN UNTUK SLTA-MA SESUAI KEARIFAN LOKAL	17.461.000,00	17.461.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.461.000,00	17.461.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.461.000,00	17.461.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.1.01.0010	ADVOKASI DAN SOSIALISASI TENTANG PEMANFAATAN KAJIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN BESERTA MODEL SOLUSI STRATEGIS SEBAGAI PERINGATAN DINI DAMPAK KEPENDUDUKAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN	13.715.000,00	12.714.999,00	(1.000.001,00)	92,71	
2.14.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	13.715.000,00	12.714.999,00	(1.000.001,00)	92,71	
2.14.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.715.000,00	12.714.999,00	(1.000.001,00)	92,71	
2.14.02.1.01.0012	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN	28.156.000,00	27.463.000,00	(693.000,00)	97,54	
2.14.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	28.156.000,00	27.463.000,00	(693.000,00)	97,54	
2.14.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.156.000,00	27.463.000,00	(693.000,00)	97,54	
2.14.02.1.01.0015	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB UNTUK MEMPERKUAT INTEGRASI PROGRAM BANGGA KENCANA DAN SEKTOR LAIN	258.524.000,00	250.352.000,00	(8.172.000,00)	96,84	
2.14.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	258.524.000,00	250.352.000,00	(8.172.000,00)	96,84	
2.14.02.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.524.000,00	250.352.000,00	(8.172.000,00)	96,84	
2.14.02.1.01.0016	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL PADA JENJANG SLTA -MA MELALUI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN/SSK DAN POJOK KEPENDUDUKAN/PJK	13.195.000,00	12.095.000,00	(1.100.000,00)	91,66	
2.14.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	13.195.000,00	12.095.000,00	(1.100.000,00)	91,66	
2.14.02.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.195.000,00	12.095.000,00	(1.100.000,00)	91,66	
2.14.02.1.02	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH PROVINSI	12.124.000,00	10.584.000,00	(1.540.000,00)	87,30	
2.14.02.1.02.0002	KOORDINASI, PENYEDIAAN, DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS KELUARGA	12.124.000,00	10.584.000,00	(1.540.000,00)	87,30	
2.14.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.124.000,00	10.584.000,00	(1.540.000,00)	87,30	
2.14.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.124.000,00	10.584.000,00	(1.540.000,00)	87,30	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	439.703.800,00	410.627.900,00	(29.075.900,00)	93,39	
2.14.03.1.01	PENGEMBANGAN DESAIN PROGRAM, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	394.565.400,00	370.589.600,00	(23.975.800,00)	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.03.1.01.0006	PENGEMBANGAN STRATEGI OPERASIONAL PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI SESUAI DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	81.729.400,00	73.704.600,00	(8.024.800,00)	90,18	
2.14.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	81.729.400,00	73.704.600,00	(8.024.800,00)	90,18	
2.14.03.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.729.400,00	73.704.600,00	(8.024.800,00)	90,18	
2.14.03.1.01.0009	PENURUNAN KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN	270.164.000,00	256.513.000,00	(13.651.000,00)	94,95	
2.14.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	270.164.000,00	256.513.000,00	(13.651.000,00)	94,95	
2.14.03.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.164.000,00	256.513.000,00	(13.651.000,00)	94,95	
2.14.03.1.01.0011	PENGUNAAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG UNTUK ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	27.007.000,00	27.007.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	27.007.000,00	27.007.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.007.000,00	27.007.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.1.01.0012	PELAKSANAAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MITRA KERJA	15.665.000,00	13.365.000,00	(2.300.000,00)	85,32	
2.14.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	15.665.000,00	13.365.000,00	(2.300.000,00)	85,32	
2.14.03.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.665.000,00	13.365.000,00	(2.300.000,00)	85,32	
2.14.03.1.02	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	45.138.400,00	40.038.300,00	(5.100.100,00)	88,70	
2.14.03.1.02.0001	PENGEMBANGAN STRATEGI OPERASIONAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	15.025.000,00	15.024.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.025.000,00	15.024.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.025.000,00	15.024.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.03.1.02.0002	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KERJA SAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	14.698.400,00	13.198.400,00	(1.500.000,00)	89,79	
2.14.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.698.400,00	13.198.400,00	(1.500.000,00)	89,79	
2.14.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.698.400,00	13.198.400,00	(1.500.000,00)	89,79	
2.14.03.1.02.0004	PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN JEJARING KEMITRAAN DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA	15.415.000,00	11.815.000,00	(3.600.000,00)	76,65	
2.14.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.415.000,00	11.815.000,00	(3.600.000,00)	76,65	
2.14.03.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.415.000,00	11.815.000,00	(3.600.000,00)	76,65	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.001.268.100,00	2.956.203.683,00	(45.064.417,00)	98,50	
2.14.04.1.01	PENGELOLAAN PELAKSANAAN DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.227.056.800,00	1.196.875.093,00	(30.181.707,00)	97,54	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.04.1.01.0003	PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	7.580.800,00	7.549.099,00	(31.701,00)	99,58	
2.14.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.580.800,00	7.549.099,00	(31.701,00)	99,58	
2.14.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.580.800,00	7.549.099,00	(31.701,00)	99,58	
2.14.04.1.01.0017	PELAKSANAAN FASILITASI, PEMBIMBINGAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGUATAN PENYIAPAN PENGASUHAN 1000 HPK	1.219.476.000,00	1.189.325.994,00	(30.150.006,00)	97,53	
2.14.04.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	1.219.476.000,00	1.189.325.994,00	(30.150.006,00)	97,53	
2.14.04.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.476.000,00	1.189.325.994,00	(30.150.006,00)	97,53	
2.14.04.1.02	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.774.211.300,00	1.759.328.590,00	(14.882.710,00)	99,16	
2.14.04.1.02.0007	FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	1.467.226.600,00	1.461.369.994,00	(5.856.606,00)	99,60	
2.14.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.467.226.600,00	1.461.369.994,00	(5.856.606,00)	99,60	
2.14.04.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.467.226.600,00	1.461.369.994,00	(5.856.606,00)	99,60	
2.14.04.1.02.0008	PENINGKATAN KAPASITAS MITRA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA MELALUI BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	306.984.700,00	297.958.596,00	(9.026.104,00)	97,06	
2.14.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	306.984.700,00	297.958.596,00	(9.026.104,00)	97,06	
2.14.04.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.984.700,00	297.958.596,00	(9.026.104,00)	97,06	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	38.026.456.669,00	33.873.900.811,00	(4.152.555.858,00)	89,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.026.456.669,00)	(33.873.900.811,00)	4.152.555.858,00	89,08	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(38.026.456.669,00)	(33.873.900.811,00)	4.152.555.858,00	89,08	

2.09.0.00.0.00.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Satuan Kerja : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.337.695.150,00	18.635.292.597,00	(1.702.402.553,00)	91,63	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.09.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	251.415.000,00	251.335.000,00	(80.000,00)	99,97	
2.09.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	77.195.000,00	77.195.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	77.195.000,00	77.195.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.195.000,00	77.195.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.240.000,00	47.240.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	47.240.000,00	47.240.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.240.000,00	47.240.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	17.584.000,00	17.504.000,00	(80.000,00)	99,55	
2.09.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	17.584.000,00	17.504.000,00	(80.000,00)	99,55	
2.09.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.584.000,00	17.504.000,00	(80.000,00)	99,55	
2.09.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.546.000,00	25.546.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	25.546.000,00	25.546.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.546.000,00	25.546.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.731.508.000,00	15.216.612.351,00	(1.514.895.649,00)	90,95	
2.09.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.431.300.000,00	14.916.404.351,00	(1.514.895.649,00)	90,78	
2.09.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.431.300.000,00	14.916.404.351,00	(1.514.895.649,00)	90,78	
2.09.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.431.300.000,00	14.916.404.351,00	(1.514.895.649,00)	90,78	
2.09.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	262.200.000,00	262.200.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	262.200.000,00	262.200.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.200.000,00	262.200.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	723.114.600,00	709.736.525,00	(13.378.075,00)	98,15	
2.09.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.278.000,00	21.372.152,00	(905.848,00)	95,93	
2.09.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.278.000,00	21.372.152,00	(905.848,00)	95,93	
2.09.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.278.000,00	21.372.152,00	(905.848,00)	95,93	
2.09.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	211.340.600,00	206.759.161,00	(4.581.439,00)	97,83	
2.09.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	211.340.600,00	206.759.161,00	(4.581.439,00)	97,83	
2.09.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.340.600,00	206.759.161,00	(4.581.439,00)	97,83	
2.09.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	199.859.000,00	194.221.564,00	(5.637.436,00)	97,18	
2.09.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	199.859.000,00	194.221.564,00	(5.637.436,00)	97,18	
2.09.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.859.000,00	194.221.564,00	(5.637.436,00)	97,18	
2.09.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.935.000,00	59.817.000,00	(118.000,00)	99,80	
2.09.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	59.935.000,00	59.817.000,00	(118.000,00)	99,80	
2.09.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.935.000,00	59.817.000,00	(118.000,00)	99,80	
2.09.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.420.000,00	17.888.000,00	(532.000,00)	97,11	
2.09.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	18.420.000,00	17.888.000,00	(532.000,00)	97,11	
2.09.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.420.000,00	17.888.000,00	(532.000,00)	97,11	
2.09.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	205.486.000,00	203.882.648,00	(1.603.352,00)	99,22	
2.09.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	205.486.000,00	203.882.648,00	(1.603.352,00)	99,22	
2.09.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.486.000,00	203.882.648,00	(1.603.352,00)	99,22	
2.09.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70	
2.09.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70	
2.09.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70	
2.09.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.820.000,00	231.900.000,00	(7.920.000,00)	96,70	
2.09.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.677.119.550,00	1.530.955.639,00	(146.163.911,00)	91,28	
2.09.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	567.636.000,00	504.989.657,00	(62.646.343,00)	88,96	
2.09.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	567.636.000,00	504.989.657,00	(62.646.343,00)	88,96	
2.09.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.636.000,00	504.989.657,00	(62.646.343,00)	88,96	
2.09.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.105.643.550,00	1.022.125.982,00	(83.517.568,00)	92,45	
2.09.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.105.643.550,00	1.022.125.982,00	(83.517.568,00)	92,45	
2.09.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.643.550,00	1.022.125.982,00	(83.517.568,00)	92,45	
2.09.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	699.118.000,00	679.153.082,00	(19.964.918,00)	97,14	
2.09.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	411.207.000,00	393.011.103,00	(18.195.897,00)	95,58	
2.09.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	411.207.000,00	393.011.103,00	(18.195.897,00)	95,58	
2.09.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.207.000,00	393.011.103,00	(18.195.897,00)	95,58	
2.09.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	89.951.000,00	89.575.540,00	(375.460,00)	99,58	
2.09.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	89.951.000,00	89.575.540,00	(375.460,00)	99,58	
2.09.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.951.000,00	89.575.540,00	(375.460,00)	99,58	
2.09.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	197.960.000,00	196.566.439,00	(1.393.561,00)	99,30	
2.09.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	197.960.000,00	196.566.439,00	(1.393.561,00)	99,30	
2.09.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.960.000,00	196.566.439,00	(1.393.561,00)	99,30	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.890.000,00	32.870.000,00	(20.000,00)	99,94	
2.09.02.1.01	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN PADA BERBAGAI SEKTOR SESUAI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	32.890.000,00	32.870.000,00	(20.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.02.1.01.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK	32.890.000,00	32.870.000,00	(20.000,00)	99,94	
2.09.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	32.890.000,00	32.870.000,00	(20.000,00)	99,94	
2.09.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.890.000,00	32.870.000,00	(20.000,00)	99,94	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.537.511.500,00	4.136.523.365,00	(400.988.135,00)	91,16	
2.09.03.1.01	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	318.186.000,00	296.273.500,00	(21.912.500,00)	93,11	
2.09.03.1.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	53.260.000,00	47.414.000,00	(5.846.000,00)	89,02	
2.09.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	53.260.000,00	47.414.000,00	(5.846.000,00)	89,02	
2.09.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.260.000,00	47.414.000,00	(5.846.000,00)	89,02	
2.09.03.1.01.0007	PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	29.656.000,00	29.209.500,00	(446.500,00)	98,49	
2.09.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	29.656.000,00	29.209.500,00	(446.500,00)	98,49	
2.09.03.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.656.000,00	29.209.500,00	(446.500,00)	98,49	
2.09.03.1.01.0008	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS	41.886.000,00	35.002.000,00	(6.884.000,00)	83,56	
2.09.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	41.886.000,00	35.002.000,00	(6.884.000,00)	83,56	
2.09.03.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.886.000,00	35.002.000,00	(6.884.000,00)	83,56	
2.09.03.1.01.0011	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN PROVINSI	28.361.000,00	24.615.000,00	(3.746.000,00)	86,79	
2.09.03.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	28.361.000,00	24.615.000,00	(3.746.000,00)	86,79	
2.09.03.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.361.000,00	24.615.000,00	(3.746.000,00)	86,79	
2.09.03.1.01.0012	PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH PROVINSI	81.320.000,00	78.430.000,00	(2.890.000,00)	96,45	
2.09.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	81.320.000,00	78.430.000,00	(2.890.000,00)	96,45	
2.09.03.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.320.000,00	78.430.000,00	(2.890.000,00)	96,45	
2.09.03.1.01.0013	PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	83.703.000,00	81.603.000,00	(2.100.000,00)	97,49	
2.09.03.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	83.703.000,00	81.603.000,00	(2.100.000,00)	97,49	
2.09.03.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.703.000,00	81.603.000,00	(2.100.000,00)	97,49	
2.09.03.1.02	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI	2.469.263.000,00	2.117.629.900,00	(351.633.100,00)	85,76	
2.09.03.1.02.0002	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PANGAN LOKAL	36.864.000,00	32.422.000,00	(4.442.000,00)	87,95	
2.09.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	36.864.000,00	32.422.000,00	(4.442.000,00)	87,95	
2.09.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.864.000,00	32.422.000,00	(4.442.000,00)	87,95	
2.09.03.1.02.0006	PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	398.239.000,00	350.825.000,00	(47.414.000,00)	88,09	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.03.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	398.239.000,00	350.825.000,00	(47.414.000,00)	88,09	
2.09.03.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.239.000,00	350.825.000,00	(47.414.000,00)	88,09	
2.09.03.1.02.0007	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	1.991.150.000,00	1.692.551.900,00	(298.598.100,00)	85,00	
2.09.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.991.150.000,00	1.692.551.900,00	(298.598.100,00)	85,00	
2.09.03.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.150.000,00	1.692.551.900,00	(298.598.100,00)	85,00	
2.09.03.1.02.0008	KOORDINASI PENYELENGGARAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	43.010.000,00	41.831.000,00	(1.179.000,00)	97,26	
2.09.03.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	43.010.000,00	41.831.000,00	(1.179.000,00)	97,26	
2.09.03.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.010.000,00	41.831.000,00	(1.179.000,00)	97,26	
2.09.03.1.04	PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI	1.750.062.500,00	1.722.619.965,00	(27.442.535,00)	98,43	
2.09.03.1.04.0001	PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.152.229.000,00	1.131.641.000,00	(20.588.000,00)	98,21	
2.09.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.229.000,00	1.131.641.000,00	(20.588.000,00)	98,21	
2.09.03.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.229.000,00	1.131.641.000,00	(20.588.000,00)	98,21	
2.09.03.1.04.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASI, DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)	576.591.500,00	570.553.065,00	(6.038.435,00)	98,95	
2.09.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	576.591.500,00	570.553.065,00	(6.038.435,00)	98,95	
2.09.03.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.591.500,00	570.553.065,00	(6.038.435,00)	98,95	
2.09.03.1.04.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENCAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN PROVINSI	21.242.000,00	20.425.900,00	(816.100,00)	96,16	
2.09.03.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	21.242.000,00	20.425.900,00	(816.100,00)	96,16	
2.09.03.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.242.000,00	20.425.900,00	(816.100,00)	96,16	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.532.444.800,00	1.428.980.234,00	(103.464.566,00)	93,25	
2.09.04.1.01	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	56.360.000,00	56.260.000,00	(100.000,00)	99,82	
2.09.04.1.01.0001	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	56.360.000,00	56.260.000,00	(100.000,00)	99,82	
2.09.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.360.000,00	56.260.000,00	(100.000,00)	99,82	
2.09.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.360.000,00	56.260.000,00	(100.000,00)	99,82	
2.09.04.1.02	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	1.476.084.800,00	1.372.720.234,00	(103.364.566,00)	93,00	
2.09.04.1.02.0002	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.081.693.000,00	987.936.000,00	(93.757.000,00)	91,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.081.693.000,00	987.936.000,00	(93.757.000,00)	91,33	
2.09.04.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.693.000,00	987.936.000,00	(93.757.000,00)	91,33	
2.09.04.1.02.0003	PELAKSANAAN INTERVENSI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	210.590.000,00	204.035.734,00	(6.554.266,00)	96,89	
2.09.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	210.590.000,00	204.035.734,00	(6.554.266,00)	96,89	
2.09.04.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.590.000,00	204.035.734,00	(6.554.266,00)	96,89	
2.09.04.1.02.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI	141.557.000,00	139.852.700,00	(1.704.300,00)	98,80	
2.09.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	141.557.000,00	139.852.700,00	(1.704.300,00)	98,80	
2.09.04.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.557.000,00	139.852.700,00	(1.704.300,00)	98,80	
2.09.04.1.02.0005	PENYUSUNAN PETA SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI	42.244.800,00	40.895.800,00	(1.349.000,00)	96,81	
2.09.04.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.244.800,00	40.895.800,00	(1.349.000,00)	96,81	
2.09.04.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.244.800,00	40.895.800,00	(1.349.000,00)	96,81	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	337.880.300,00	334.075.676,00	(3.804.624,00)	98,87	
2.09.05.1.01	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	337.880.300,00	334.075.676,00	(3.804.624,00)	98,87	
2.09.05.1.01.0006	SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	100,00	
2.09.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	100,00	
2.09.05.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	100,00	
2.09.05.1.01.0007	REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	37.470.000,00	36.545.000,00	(925.000,00)	97,53	
2.09.05.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	37.470.000,00	36.545.000,00	(925.000,00)	97,53	
2.09.05.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.470.000,00	36.545.000,00	(925.000,00)	97,53	
2.09.05.1.01.0008	REKOMENDASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.668.400,00	196.952.776,00	(2.715.624,00)	98,64	
2.09.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	199.668.400,00	196.952.776,00	(2.715.624,00)	98,64	
2.09.05.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.668.400,00	196.952.776,00	(2.715.624,00)	98,64	
2.09.05.1.01.0011	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	24.391.900,00	24.227.900,00	(164.000,00)	99,33	
2.09.05.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	24.391.900,00	24.227.900,00	(164.000,00)	99,33	
2.09.05.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.391.900,00	24.227.900,00	(164.000,00)	99,33	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	26.778.421.750,00	24.567.741.872,00	(2.210.679.878,00)	91,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.778.421.750,00)	(24.567.741.872,00)	2.210.679.878,00	91,74	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(26.778.421.750,00)	(24.567.741.872,00)	2.210.679.878,00	91,74	

2.11.3.28.0.00.02.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Satuan Kerja : 2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.420.000,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	335.420.000,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	335.420.000,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06	
5	BELANJA DAERAH					
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.509.981.705,00	50.407.086.729,00	(1.102.894.976,00)	97,86	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.11.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	479.494.000,00	478.077.512,00	(1.416.488,00)	99,70	
2.11.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	88.598.000,00	88.292.810,00	(305.190,00)	99,66	
2.11.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	88.598.000,00	88.292.810,00	(305.190,00)	99,66	
2.11.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.598.000,00	88.292.810,00	(305.190,00)	99,66	
2.11.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	12.570.000,00	12.569.900,00	(100,00)	100,00	
2.11.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.570.000,00	12.569.900,00	(100,00)	100,00	
2.11.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	12.569.900,00	(100,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.662.000,00	9.660.910,00	(1.090,00)	99,99	
2.11.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.662.000,00	9.660.910,00	(1.090,00)	99,99	
2.11.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.662.000,00	9.660.910,00	(1.090,00)	99,99	
2.11.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	56.700.000,00	56.697.750,00	(2.250,00)	100,00	
2.11.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	56.700.000,00	56.697.750,00	(2.250,00)	100,00	
2.11.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	56.697.750,00	(2.250,00)	100,00	
2.11.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	173.478.000,00	172.675.356,00	(802.644,00)	99,54	
2.11.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	173.478.000,00	172.675.356,00	(802.644,00)	99,54	
2.11.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.478.000,00	172.675.356,00	(802.644,00)	99,54	
2.11.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	11.870.000,00	11.806.800,00	(63.200,00)	99,47	
2.11.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	11.870.000,00	11.806.800,00	(63.200,00)	99,47	
2.11.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.870.000,00	11.806.800,00	(63.200,00)	99,47	
2.11.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	72.230.000,00	71.989.900,00	(240.100,00)	99,67	
2.11.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	72.230.000,00	71.989.900,00	(240.100,00)	99,67	
2.11.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.230.000,00	71.989.900,00	(240.100,00)	99,67	
2.11.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	32.254.000,00	32.252.086,00	(1.914,00)	99,99	
2.11.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	32.254.000,00	32.252.086,00	(1.914,00)	99,99	
2.11.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.254.000,00	32.252.086,00	(1.914,00)	99,99	
2.11.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.586.078.800,00	35.818.870.514,00	(767.208.286,00)	97,90	
2.11.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	(757.673.556,00)	97,90	
2.11.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	(757.673.556,00)	97,90	
2.11.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	(757.673.556,00)	97,90	
2.11.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	473.938.800,00	465.067.450,00	(8.871.350,00)	98,13	
2.11.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	473.938.800,00	465.067.450,00	(8.871.350,00)	98,13	
2.11.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.938.800,00	465.067.450,00	(8.871.350,00)	98,13	
2.11.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.880.000,00	12.547.500,00	(332.500,00)	97,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.880.000,00	12.547.500,00	(332.500,00)	97,42	
2.11.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	12.547.500,00	(332.500,00)	97,42	
2.11.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	5.000.000,00	4.902.500,00	(97.500,00)	98,05	
2.11.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.902.500,00	(97.500,00)	98,05	
2.11.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.902.500,00	(97.500,00)	98,05	
2.11.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.580.000,00	13.513.620,00	(66.380,00)	99,51	
2.11.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	13.580.000,00	13.513.620,00	(66.380,00)	99,51	
2.11.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.580.000,00	13.513.620,00	(66.380,00)	99,51	
2.11.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	14.480.000,00	14.430.000,00	(50.000,00)	99,65	
2.11.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.480.000,00	14.430.000,00	(50.000,00)	99,65	
2.11.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.480.000,00	14.430.000,00	(50.000,00)	99,65	
2.11.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70	
2.11.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70	
2.11.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70	
2.11.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000,00	4.948.000,00	(52.000,00)	98,96	
2.11.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.948.000,00	(52.000,00)	98,96	
2.11.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.948.000,00	(52.000,00)	98,96	
2.11.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.000.000,00	54.953.745,00	(46.255,00)	99,92	
2.11.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	5.000.000,00	4.957.144,00	(42.856,00)	99,14	
2.11.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.957.144,00	(42.856,00)	99,14	
2.11.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.957.144,00	(42.856,00)	99,14	
2.11.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	50.000.000,00	49.996.601,00	(3.399,00)	99,99	
2.11.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.996.601,00	(3.399,00)	99,99	
2.11.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.996.601,00	(3.399,00)	99,99	
2.11.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.103.583.500,00	1.082.201.731,00	(21.381.769,00)	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	51.055.000,00	50.071.580,00	(983.420,00)	98,07	
2.11.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	51.055.000,00	50.071.580,00	(983.420,00)	98,07	
2.11.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.055.000,00	50.071.580,00	(983.420,00)	98,07	
2.11.01.1.06.0001.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.01.1.06.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	371.556.900,00	365.341.115,00	(6.215.785,00)	98,33	
2.11.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	371.556.900,00	365.341.115,00	(6.215.785,00)	98,33	
2.11.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.556.900,00	365.341.115,00	(6.215.785,00)	98,33	
2.11.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.000.000,00	1.603.500,00	(396.500,00)	80,18	
2.11.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.603.500,00	(396.500,00)	80,18	
2.11.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.603.500,00	(396.500,00)	80,18	
2.11.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	472.190.600,00	464.501.539,00	(7.689.061,00)	98,37	
2.11.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	472.190.600,00	464.501.539,00	(7.689.061,00)	98,37	
2.11.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.190.600,00	464.501.539,00	(7.689.061,00)	98,37	
2.11.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.364.000,00	36.090.088,00	(1.273.912,00)	96,59	
2.11.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.364.000,00	36.090.088,00	(1.273.912,00)	96,59	
2.11.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.364.000,00	36.090.088,00	(1.273.912,00)	96,59	
2.11.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	5.835.000,00	(165.000,00)	97,25	
2.11.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.835.000,00	(165.000,00)	97,25	
2.11.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.835.000,00	(165.000,00)	97,25	
2.11.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	137.167.000,00	132.702.000,00	(4.465.000,00)	96,74	
2.11.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	137.167.000,00	132.702.000,00	(4.465.000,00)	96,74	
2.11.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.167.000,00	132.702.000,00	(4.465.000,00)	96,74	
2.11.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	2.000.000,00	1.811.909,00	(188.091,00)	90,60	
2.11.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.811.909,00	(188.091,00)	90,60	
2.11.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.811.909,00	(188.091,00)	90,60	
2.11.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	24.250.000,00	24.245.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	24.250.000,00	24.245.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	24.245.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.201.938.000,00	2.186.111.586,00	(15.826.414,00)	99,28	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	162.017.600,00	161.036.387,00	(981.213,00)	99,39	
2.11.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	764.000,00	762.000,00	(2.000,00)	99,74	
2.11.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.000,00	762.000,00	(2.000,00)	99,74	
2.11.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	161.253.600,00	160.274.387,00	(979.213,00)	99,39	
2.11.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.253.600,00	160.274.387,00	(979.213,00)	99,39	
2.11.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	456.899.000,00	453.101.370,00	(3.797.630,00)	99,17	
2.11.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	52.288.000,00	51.523.126,00	(764.874,00)	98,54	
2.11.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.288.000,00	51.523.126,00	(764.874,00)	98,54	
2.11.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	404.611.000,00	401.578.244,00	(3.032.756,00)	99,25	
2.11.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.611.000,00	401.578.244,00	(3.032.756,00)	99,25	
2.11.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.583.021.400,00	1.571.973.829,00	(11.047.571,00)	99,30	
2.11.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	754.198.702,00	749.488.500,00	(4.710.202,00)	99,38	
2.11.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.198.702,00	749.488.500,00	(4.710.202,00)	99,38	
2.11.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	828.822.698,00	822.485.329,00	(6.337.369,00)	99,24	
2.11.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	731.163.899,00	726.315.836,00	(4.848.063,00)	99,34	
2.11.01.1.07.0010.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.658.799,00	96.169.493,00	(1.489.306,00)	98,47	
2.11.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.251.209.705,00	7.009.415.728,00	(241.793.977,00)	96,67	
2.11.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.050.939.500,00	1.929.126.908,00	(121.812.592,00)	94,06	
2.11.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.050.939.500,00	1.929.126.908,00	(121.812.592,00)	94,06	
2.11.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.939.500,00	1.929.126.908,00	(121.812.592,00)	94,06	
2.11.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.200.270.205,00	5.080.288.820,00	(119.981.385,00)	97,69	
2.11.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.270.205,00	5.080.288.820,00	(119.981.385,00)	97,69	
2.11.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.270.205,00	5.080.288.820,00	(119.981.385,00)	97,69	
2.11.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.824.037.700,00	3.768.815.913,00	(55.221.787,00)	98,56	
2.11.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	187.210.000,00	186.703.300,00	(506.700,00)	99,73	
2.11.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	187.210.000,00	186.703.300,00	(506.700,00)	99,73	
2.11.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.210.000,00	186.703.300,00	(506.700,00)	99,73	
2.11.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	698.331.000,00	686.927.834,00	(11.403.166,00)	98,37	
2.11.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	698.331.000,00	686.927.834,00	(11.403.166,00)	98,37	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.331.000,00	686.927.834,00	(11.403.166,00)	98,37	
2.11.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	63.488.000,00	62.575.190,00	(912.810,00)	98,56	
2.11.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	63.488.000,00	62.575.190,00	(912.810,00)	98,56	
2.11.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.488.000,00	62.575.190,00	(912.810,00)	98,56	
2.11.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.208.752.000,00	2.182.442.053,00	(26.309.947,00)	98,81	
2.11.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.548.752.000,00	1.524.932.753,00	(23.819.247,00)	98,46	
2.11.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.752.000,00	1.524.932.753,00	(23.819.247,00)	98,46	
2.11.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	660.000.000,00	657.509.300,00	(2.490.700,00)	99,62	
2.11.01.1.09.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.000.000,00	657.509.300,00	(2.490.700,00)	99,62	
2.11.01.1.09.0010.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	666.256.700,00	650.167.536,00	(16.089.164,00)	97,59	
2.11.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	666.256.700,00	650.167.536,00	(16.089.164,00)	97,59	
2.11.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.256.700,00	650.167.536,00	(16.089.164,00)	97,59	
2.11.01.1.09.0011.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.01.1.09.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000,00	261.206.500,00	(1.293.500,00)	99,51	
2.11.02.1.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	262.500.000,00	261.206.500,00	(1.293.500,00)	99,51	
2.11.02.1.02.0005	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KLHS	157.080.000,00	155.986.500,00	(1.093.500,00)	99,30	
2.11.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	157.080.000,00	155.986.500,00	(1.093.500,00)	99,30	
2.11.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.080.000,00	155.986.500,00	(1.093.500,00)	99,30	
2.11.02.1.02.0006	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLHS	105.420.000,00	105.220.000,00	(200.000,00)	99,81	
2.11.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	105.420.000,00	105.220.000,00	(200.000,00)	99,81	
2.11.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.420.000,00	105.220.000,00	(200.000,00)	99,81	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.795.386.100,00	3.756.099.722,00	(39.286.378,00)	98,96	
2.11.03.1.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.752.086.100,00	3.720.678.796,00	(31.407.304,00)	99,16	
2.11.03.1.01.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	42.740.000,00	42.209.431,00	(530.569,00)	98,76	
2.11.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	42.740.000,00	42.209.431,00	(530.569,00)	98,76	
2.11.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.740.000,00	42.209.431,00	(530.569,00)	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.03.1.01.0004	PENGAMBILAN CONTOH UJI DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN	125.260.000,00	125.259.900,00	(100,00)	100,00	
2.11.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	125.260.000,00	125.259.900,00	(100,00)	100,00	
2.11.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.260.000,00	125.259.900,00	(100,00)	100,00	
2.11.03.1.01.0005	PELAKSANAAN UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT PROVINSI	2.043.148.500,00	2.034.488.469,00	(8.660.031,00)	99,58	
2.11.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.043.148.500,00	2.034.488.469,00	(8.660.031,00)	99,58	
2.11.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.043.148.500,00	2.034.488.469,00	(8.660.031,00)	99,58	
2.11.03.1.01.0007	PELAKSANAAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT PROVINSI	771.170.000,00	761.047.197,00	(10.122.803,00)	98,69	
2.11.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	771.170.000,00	761.047.197,00	(10.122.803,00)	98,69	
2.11.03.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.170.000,00	761.047.197,00	(10.122.803,00)	98,69	
2.11.03.1.01.0009	PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	264.790.000,00	260.908.679,00	(3.881.321,00)	98,53	
2.11.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	264.790.000,00	260.908.679,00	(3.881.321,00)	98,53	
2.11.03.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.790.000,00	260.908.679,00	(3.881.321,00)	98,53	
2.11.03.1.01.0011	PELAKSANAAN INVENTARISASI GRK DAN PENYUSUNAN PROFIL EMISI GRK	28.950.000,00	26.366.610,00	(2.583.390,00)	91,08	
2.11.03.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	28.950.000,00	26.366.610,00	(2.583.390,00)	91,08	
2.11.03.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	26.366.610,00	(2.583.390,00)	91,08	
2.11.03.1.01.0014	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMANTAU KUALITAS LINGKUNGAN DI PROVINSI	312.779.600,00	312.312.330,00	(467.270,00)	99,85	
2.11.03.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.942.330,00	(57.670,00)	99,84	
2.11.03.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.942.330,00	(57.670,00)	99,84	
2.11.03.1.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	277.779.600,00	277.370.000,00	(409.600,00)	99,85	
2.11.03.1.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.779.600,00	277.370.000,00	(409.600,00)	99,85	
2.11.03.1.01.0015	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	163.248.000,00	158.086.180,00	(5.161.820,00)	96,84	
2.11.03.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	163.248.000,00	158.086.180,00	(5.161.820,00)	96,84	
2.11.03.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.248.000,00	158.086.180,00	(5.161.820,00)	96,84	
2.11.03.1.02	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	43.300.000,00	35.420.926,00	(7.879.074,00)	81,80	
2.11.03.1.02.0001	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	43.300.000,00	35.420.926,00	(7.879.074,00)	81,80	
2.11.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.300.000,00	35.420.926,00	(7.879.074,00)	81,80	
2.11.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	35.420.926,00	(7.879.074,00)	81,80	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000,00	93.335.310,00	(464.690,00)	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.04.1.01	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI	93.800.000,00	93.335.310,00	(464.690,00)	99,50	
2.11.04.1.01.0001	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	93.800.000,00	93.335.310,00	(464.690,00)	99,50	
2.11.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	93.800.000,00	93.335.310,00	(464.690,00)	99,50	
2.11.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.800.000,00	93.335.310,00	(464.690,00)	99,50	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000,00	118.558.190,00	(2.991.810,00)	97,54	
2.11.05.1.01	PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	121.550.000,00	118.558.190,00	(2.991.810,00)	97,54	
2.11.05.1.01.0001	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	45.360.000,00	43.513.000,00	(1.847.000,00)	95,93	
2.11.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	45.360.000,00	43.513.000,00	(1.847.000,00)	95,93	
2.11.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.360.000,00	43.513.000,00	(1.847.000,00)	95,93	
2.11.05.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGLOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	76.190.000,00	75.045.190,00	(1.144.810,00)	98,50	
2.11.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	76.190.000,00	75.045.190,00	(1.144.810,00)	98,50	
2.11.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.190.000,00	75.045.190,00	(1.144.810,00)	98,50	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000,00	79.955.000,00	(2.325.000,00)	97,17	
2.11.06.1.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	82.280.000,00	79.955.000,00	(2.325.000,00)	97,17	
2.11.06.1.01.0006	PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	82.280.000,00	79.955.000,00	(2.325.000,00)	97,17	
2.11.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	82.280.000,00	79.955.000,00	(2.325.000,00)	97,17	
2.11.06.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.280.000,00	79.955.000,00	(2.325.000,00)	97,17	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	(9.763.038,00)	97,40	
2.11.07.1.02	PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	(9.763.038,00)	97,40	
2.11.07.1.02.0001	PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	(9.763.038,00)	97,40	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	375.405.000,00	365.641.962,00	(9.763.038,00)	97,40	
2.11.07.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.405.000,00	365.641.962,00	(9.763.038,00)	97,40	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000,00	41.069.136,00	(180.864,00)	99,56	
2.11.08.1.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	41.250.000,00	41.069.136,00	(180.864,00)	99,56	
2.11.08.1.01.0003	PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	7.500.000,00	7.446.000,00	(54.000,00)	99,28	
2.11.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.446.000,00	(54.000,00)	99,28	
2.11.08.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.446.000,00	(54.000,00)	99,28	
2.11.08.1.01.0005	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	33.750.000,00	33.623.136,00	(126.864,00)	99,62	
2.11.08.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	33.750.000,00	33.623.136,00	(126.864,00)	99,62	
2.11.08.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	33.623.136,00	(126.864,00)	99,62	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000,00	35.629.800,00	(20.200,00)	99,94	
2.11.09.1.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	35.650.000,00	35.629.800,00	(20.200,00)	99,94	
2.11.09.1.01.0001	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	35.650.000,00	35.629.800,00	(20.200,00)	99,94	
2.11.09.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.650.000,00	35.629.800,00	(20.200,00)	99,94	
2.11.09.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	35.629.800,00	(20.200,00)	99,94	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000,00	109.490.000,00	(4.145.000,00)	96,35	
2.11.10.1.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI	113.635.000,00	109.490.000,00	(4.145.000,00)	96,35	
2.11.10.1.01.0003	PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	55.720.000,00	53.407.500,00	(2.312.500,00)	95,85	
2.11.10.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	55.720.000,00	53.407.500,00	(2.312.500,00)	95,85	
2.11.10.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.720.000,00	53.407.500,00	(2.312.500,00)	95,85	
2.11.10.1.01.0007	PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI	57.915.000,00	56.082.500,00	(1.832.500,00)	96,84	
2.11.10.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	57.915.000,00	56.082.500,00	(1.832.500,00)	96,84	
2.11.10.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.915.000,00	56.082.500,00	(1.832.500,00)	96,84	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	(23.573.174,00)	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.11.1.01	PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	(23.573.174,00)	99,63	
2.11.11.1.01.0013	PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH PADA KONDISI KHUSUS YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	6.243.765.000,00	6.226.882.176,00	(16.882.824,00)	99,73	
2.11.11.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	6.243.765.000,00	6.226.882.176,00	(16.882.824,00)	99,73	
2.11.11.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.243.765.000,00	6.226.882.176,00	(16.882.824,00)	99,73	
2.11.11.1.01.0014	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN/KOTA	89.850.000,00	83.159.650,00	(6.690.350,00)	92,55	
2.11.11.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	89.850.000,00	83.159.650,00	(6.690.350,00)	92,55	
2.11.11.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.850.000,00	83.159.650,00	(6.690.350,00)	92,55	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.859.390.000,00	3.661.764.822,00	(197.625.178,00)	94,88	
3.28.03.1.02	RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KEQUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)	113.080.000,00	104.276.500,00	(8.803.500,00)	92,21	
3.28.03.1.02.0001	PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN	113.080.000,00	104.276.500,00	(8.803.500,00)	92,21	
3.28.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	113.080.000,00	104.276.500,00	(8.803.500,00)	92,21	
3.28.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.080.000,00	104.276.500,00	(8.803.500,00)	92,21	
3.28.03.1.03	PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	32.830.000,00	26.515.000,00	(6.315.000,00)	80,76	
3.28.03.1.03.0001	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI WILAYAH USAHA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI	32.830.000,00	26.515.000,00	(6.315.000,00)	80,76	
3.28.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	32.830.000,00	26.515.000,00	(6.315.000,00)	80,76	
3.28.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.830.000,00	26.515.000,00	(6.315.000,00)	80,76	
3.28.03.1.04	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	1.899.894.000,00	1.778.640.571,00	(121.253.429,00)	93,62	
3.28.03.1.04.0001	PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN (RTNRL)	88.740.000,00	86.026.500,00	(2.713.500,00)	96,94	
3.28.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	88.740.000,00	86.026.500,00	(2.713.500,00)	96,94	
3.28.03.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.740.000,00	86.026.500,00	(2.713.500,00)	96,94	
3.28.03.1.04.0002	PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	1.312.455.000,00	1.220.522.477,00	(91.932.523,00)	93,00	
3.28.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.312.455.000,00	1.220.522.477,00	(91.932.523,00)	93,00	
3.28.03.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.455.000,00	1.220.522.477,00	(91.932.523,00)	93,00	
3.28.03.1.04.0004	PEMBANGUNAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	288.970.000,00	269.147.700,00	(19.822.300,00)	93,14	
3.28.03.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	288.970.000,00	269.147.700,00	(19.822.300,00)	93,14	
3.28.03.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.970.000,00	269.147.700,00	(19.822.300,00)	93,14	
3.28.03.1.04.0008	PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN REHABILITASI LAHAN	25.269.000,00	23.812.000,00	(1.457.000,00)	94,23	
3.28.03.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.269.000,00	23.812.000,00	(1.457.000,00)	94,23	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.28.03.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.269.000,00	23.812.000,00	(1.457.000,00)	94,23	
3.28.03.1.04.0009	REHABILITASI MANGROVE DI LUAR KAWASAN HUTAN	184.460.000,00	179.131.894,00	(5.328.106,00)	97,11	
3.28.03.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	184.460.000,00	179.131.894,00	(5.328.106,00)	97,11	
3.28.03.1.04.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.460.000,00	179.131.894,00	(5.328.106,00)	97,11	
3.28.03.1.06	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)	670.158.000,00	660.616.541,00	(9.541.459,00)	98,58	
3.28.03.1.06.0006	FASILITASI PBPHH SKALA KECIL DAN MENENGAH UNTUK AKSES SUMBER BAHAN BAKU (KAYU DAN/ATAU HHBK) DAN PASAR	12.705.000,00	12.185.000,00	(520.000,00)	95,91	
3.28.03.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.705.000,00	12.185.000,00	(520.000,00)	95,91	
3.28.03.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.705.000,00	12.185.000,00	(520.000,00)	95,91	
3.28.03.1.06.0008	PELAKSANAAN PEMBINAAN (BIMBINGAN TEKNIS) KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN (KAYU DAN/ATAU HHBK) SKALA KECIL DAN MENENGAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	657.453.000,00	648.431.541,00	(9.021.459,00)	98,63	
3.28.03.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	657.453.000,00	648.431.541,00	(9.021.459,00)	98,63	
3.28.03.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.453.000,00	648.431.541,00	(9.021.459,00)	98,63	
3.28.03.1.07	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI	316.455.000,00	309.828.380,00	(6.626.620,00)	97,91	
3.28.03.1.07.0004	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PBPHH (KAYU DAN/ATAU HHBK) SKALA KECIL DAN MENENGAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	12.815.000,00	11.490.880,00	(1.324.120,00)	89,67	
3.28.03.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.815.000,00	11.490.880,00	(1.324.120,00)	89,67	
3.28.03.1.07.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.815.000,00	11.490.880,00	(1.324.120,00)	89,67	
3.28.03.1.07.0005	PENGENDALIAN PBPHH (KAYU DAN/ATAU HHBK) SKALA KECIL DAN MENENGAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	192.800.000,00	189.461.500,00	(3.338.500,00)	98,27	
3.28.03.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	192.800.000,00	189.461.500,00	(3.338.500,00)	98,27	
3.28.03.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	189.461.500,00	(3.338.500,00)	98,27	
3.28.03.1.07.0006	PEMANTAUAN RENCANA KERJA OPERASIONAL PENGOLAHAN HASIL HUTAN (RKOPHH) UNTUK PBPHH (KAYU DAN HHBK) SKALA USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	110.840.000,00	108.876.000,00	(1.964.000,00)	98,23	
3.28.03.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	110.840.000,00	108.876.000,00	(1.964.000,00)	98,23	
3.28.03.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.840.000,00	108.876.000,00	(1.964.000,00)	98,23	
3.28.03.1.09	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	826.973.000,00	781.887.830,00	(45.085.170,00)	94,55	
3.28.03.1.09.0002	SERTIFIKASI SUMBER BENIH	20.150.000,00	20.103.000,00	(47.000,00)	99,77	
3.28.03.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	20.103.000,00	(47.000,00)	99,77	
3.28.03.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	20.103.000,00	(47.000,00)	99,77	
3.28.03.1.09.0003	SERTIFIKASI MUTU BENIH	2.855.000,00	2.841.000,00	(14.000,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.28.03.1.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.855.000,00	2.841.000,00	(14.000,00)	99,51	
3.28.03.1.09.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	2.841.000,00	(14.000,00)	99,51	
3.28.03.1.09.0004	SERTIFIKASI MUTU BIBIT	18.370.000,00	18.342.500,00	(27.500,00)	99,85	
3.28.03.1.09.0004.5.1	BELANJA OPERASI	18.370.000,00	18.342.500,00	(27.500,00)	99,85	
3.28.03.1.09.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.370.000,00	18.342.500,00	(27.500,00)	99,85	
3.28.03.1.09.0005	PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT	3.800.000,00	3.785.500,00	(14.500,00)	99,62	
3.28.03.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.785.500,00	(14.500,00)	99,62	
3.28.03.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.785.500,00	(14.500,00)	99,62	
3.28.03.1.09.0007	PEMBUATAN DAN PENGADAAN BIBIT UNTUK REHABILITASI LAHAN	777.998.000,00	733.092.452,00	(44.905.548,00)	94,23	
3.28.03.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	777.998.000,00	733.092.452,00	(44.905.548,00)	94,23	
3.28.03.1.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.998.000,00	733.092.452,00	(44.905.548,00)	94,23	
3.28.03.1.09.0010	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	3.800.000,00	3.723.378,00	(76.622,00)	97,98	
3.28.03.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.723.378,00	(76.622,00)	97,98	
3.28.03.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.723.378,00	(76.622,00)	97,98	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.721.397.000,00	1.655.757.756,00	(65.639.244,00)	96,19	
3.28.04.1.01	PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI	736.442.000,00	702.100.592,00	(34.341.408,00)	95,34	
3.28.04.1.01.0006	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN TAHURA PROVINSI	12.740.000,00	12.524.000,00	(216.000,00)	98,30	
3.28.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.740.000,00	12.524.000,00	(216.000,00)	98,30	
3.28.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	12.524.000,00	(216.000,00)	98,30	
3.28.04.1.01.0007	KERJA SAMA PENYELENGGARAAAAN TAHURA PROVINSI	10.000.000,00	9.872.000,00	(128.000,00)	98,72	
3.28.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.872.000,00	(128.000,00)	98,72	
3.28.04.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.872.000,00	(128.000,00)	98,72	
3.28.04.1.01.0008	PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR TAHURA PROVINSI	48.310.000,00	47.913.906,00	(396.094,00)	99,18	
3.28.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	48.310.000,00	47.913.906,00	(396.094,00)	99,18	
3.28.04.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.310.000,00	47.913.906,00	(396.094,00)	99,18	
3.28.04.1.01.0011	PERENCANAAN PENGELOLAAN TAHURA	53.510.000,00	53.082.566,00	(427.434,00)	99,20	
3.28.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	53.510.000,00	53.082.566,00	(427.434,00)	99,20	
3.28.04.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.510.000,00	53.082.566,00	(427.434,00)	99,20	
3.28.04.1.01.0014	PEMULIHAN EKOSISTEM TAHURA PROVINSI	10.000.000,00	9.584.293,00	(415.707,00)	95,84	
3.28.04.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.584.293,00	(415.707,00)	95,84	
3.28.04.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.584.293,00	(415.707,00)	95,84	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.28.04.1.01.0015	PENGAMANAN KAWASAN TAHURA PROVINSI	406.680.000,00	406.419.000,00	(261.000,00)	99,94	
3.28.04.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	406.680.000,00	406.419.000,00	(261.000,00)	99,94	
3.28.04.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.680.000,00	406.419.000,00	(261.000,00)	99,94	
3.28.04.1.01.0016	PENATAAN KAWASAN TAHURA PROVINSI	195.202.000,00	162.704.827,00	(32.497.173,00)	83,35	
3.28.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	195.202.000,00	162.704.827,00	(32.497.173,00)	83,35	
3.28.04.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.202.000,00	162.704.827,00	(32.497.173,00)	83,35	
3.28.04.1.02	PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES) UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	11.515.000,00	10.897.724,00	(617.276,00)	94,64	
3.28.04.1.02.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN CITES	11.515.000,00	10.897.724,00	(617.276,00)	94,64	
3.28.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.515.000,00	10.897.724,00	(617.276,00)	94,64	
3.28.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	10.897.724,00	(617.276,00)	94,64	
3.28.04.1.03	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	973.440.000,00	942.759.440,00	(30.680.560,00)	96,85	
3.28.04.1.03.0005	PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	209.615.000,00	198.785.618,00	(10.829.382,00)	94,83	
3.28.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	209.615.000,00	198.785.618,00	(10.829.382,00)	94,83	
3.28.04.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.615.000,00	198.785.618,00	(10.829.382,00)	94,83	
3.28.04.1.03.0006	PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA DI KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	763.825.000,00	743.973.822,00	(19.851.178,00)	97,40	
3.28.04.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	763.825.000,00	743.973.822,00	(19.851.178,00)	97,40	
3.28.04.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.825.000,00	743.973.822,00	(19.851.178,00)	97,40	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	(17.289.399,00)	97,10	
3.28.05.1.01	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	(17.289.399,00)	97,10	
3.28.05.1.01.0002	PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN	338.737.000,00	329.452.400,00	(9.284.600,00)	97,26	
3.28.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	338.737.000,00	329.452.400,00	(9.284.600,00)	97,26	
3.28.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.737.000,00	329.452.400,00	(9.284.600,00)	97,26	
3.28.05.1.01.0004	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN	75.505.000,00	74.621.660,00	(883.340,00)	98,83	
3.28.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.505.000,00	74.621.660,00	(883.340,00)	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.28.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.505.000,00	74.621.660,00	(883.340,00)	98,83	
3.28.05.1.01.0008	PENYIAPAN PERHUTANAN SOSIAL	182.287.000,00	175.165.541,00	(7.121.459,00)	96,09	
3.28.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	182.287.000,00	175.165.541,00	(7.121.459,00)	96,09	
3.28.05.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.287.000,00	175.165.541,00	(7.121.459,00)	96,09	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000,00	860.815.000,00	(35.485.000,00)	96,04	
3.28.06.1.01	PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	896.300.000,00	860.815.000,00	(35.485.000,00)	96,04	
3.28.06.1.01.0004	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAS	873.928.000,00	838.680.000,00	(35.248.000,00)	95,97	
3.28.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	873.928.000,00	838.680.000,00	(35.248.000,00)	95,97	
3.28.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	873.928.000,00	838.680.000,00	(35.248.000,00)	95,97	
3.28.06.1.01.0005	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS	22.372.000,00	22.135.000,00	(237.000,00)	98,94	
3.28.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.372.000,00	22.135.000,00	(237.000,00)	98,94	
3.28.06.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.372.000,00	22.135.000,00	(237.000,00)	98,94	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	69.838.668.805,00	68.335.691.354,00	(1.502.977.451,00)	97,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.503.248.805,00)	(68.023.549.854,00)	1.479.698.951,00	97,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(69.503.248.805,00)	(68.023.549.854,00)	1.479.698.951,00	97,87	

2.13.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Satuan Kerja : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.423.387.190,00	17.131.866.594,50	(1.291.520.595,50)	92,99	
2.13.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	310.607.300,00	252.202.000,00	(58.405.300,00)	81,20	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.13.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	92.622.400,00	83.553.000,00	(9.069.400,00)	90,21	
2.13.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	92.622.400,00	83.553.000,00	(9.069.400,00)	90,21	
2.13.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.622.400,00	83.553.000,00	(9.069.400,00)	90,21	
2.13.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
2.13.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
2.13.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
2.13.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.13.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.13.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.13.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
2.13.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
2.13.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	93.473.900,00	85.908.400,00	(7.565.500,00)	91,91	
2.13.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	93.473.900,00	85.908.400,00	(7.565.500,00)	91,91	
2.13.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.473.900,00	85.908.400,00	(7.565.500,00)	91,91	
2.13.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	74.602.000,00	60.098.600,00	(14.503.400,00)	80,56	
2.13.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	74.602.000,00	60.098.600,00	(14.503.400,00)	80,56	
2.13.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.602.000,00	60.098.600,00	(14.503.400,00)	80,56	
2.13.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	24.267.000,00	0,00	(24.267.000,00)	0,00	
2.13.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	24.267.000,00	0,00	(24.267.000,00)	0,00	
2.13.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.267.000,00	0,00	(24.267.000,00)	0,00	
2.13.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.083.830.000,00	11.592.777.874,00	(491.052.126,00)	95,94	
2.13.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.808.100.000,00	11.357.850.874,00	(450.249.126,00)	96,19	
2.13.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.808.100.000,00	11.357.850.874,00	(450.249.126,00)	96,19	
2.13.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.808.100.000,00	11.357.850.874,00	(450.249.126,00)	96,19	
2.13.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	256.530.000,00	222.927.000,00	(33.603.000,00)	86,90	
2.13.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	256.530.000,00	222.927.000,00	(33.603.000,00)	86,90	
2.13.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.530.000,00	222.927.000,00	(33.603.000,00)	86,90	
2.13.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	9.200.000,00	2.000.000,00	(7.200.000,00)	21,74	
2.13.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	2.000.000,00	(7.200.000,00)	21,74	
2.13.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	2.000.000,00	(7.200.000,00)	21,74	
2.13.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.379.000,00	2.379.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	651.000,00	651.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	651.000,00	651.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.000,00	651.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	50.790.000,00	50.455.322,00	(334.678,00)	99,34	
2.13.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	50.790.000,00	50.455.322,00	(334.678,00)	99,34	
2.13.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.790.000,00	50.455.322,00	(334.678,00)	99,34	
2.13.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.790.000,00	50.455.322,00	(334.678,00)	99,34	
2.13.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	691.964.000,00	428.222.122,00	(263.741.878,00)	61,89	
2.13.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000,00	48.811.140,00	(1.188.860,00)	97,62	
2.13.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.811.140,00	(1.188.860,00)	97,62	
2.13.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.811.140,00	(1.188.860,00)	97,62	
2.13.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	132.354.000,00	129.808.770,00	(2.545.230,00)	98,08	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	132.354.000,00	129.808.770,00	(2.545.230,00)	98,08	
2.13.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.354.000,00	129.808.770,00	(2.545.230,00)	98,08	
2.13.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	32.606.000,00	27.732.845,00	(4.873.155,00)	85,05	
2.13.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	32.606.000,00	27.732.845,00	(4.873.155,00)	85,05	
2.13.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.606.000,00	27.732.845,00	(4.873.155,00)	85,05	
2.13.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.000.000,00	55.095.600,00	(44.904.400,00)	55,10	
2.13.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	55.095.600,00	(44.904.400,00)	55,10	
2.13.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	55.095.600,00	(44.904.400,00)	55,10	
2.13.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.800.000,00	27.906.600,00	(6.893.400,00)	80,19	
2.13.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	27.906.600,00	(6.893.400,00)	80,19	
2.13.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	27.906.600,00	(6.893.400,00)	80,19	
2.13.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	254.603.800,00	74.423.650,00	(180.180.150,00)	29,23	
2.13.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	254.603.800,00	74.423.650,00	(180.180.150,00)	29,23	
2.13.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.603.800,00	74.423.650,00	(180.180.150,00)	29,23	
2.13.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	33.600.000,00	11.060.000,00	(22.540.000,00)	32,92	
2.13.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	11.060.000,00	(22.540.000,00)	32,92	
2.13.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	11.060.000,00	(22.540.000,00)	32,92	
2.13.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	54.000.200,00	53.383.517,00	(616.683,00)	98,86	
2.13.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.200,00	53.383.517,00	(616.683,00)	98,86	
2.13.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.200,00	53.383.517,00	(616.683,00)	98,86	
2.13.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.149.615.000,00	2.040.991.955,50	(108.623.044,50)	94,95	
2.13.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	70.160.000,00	68.413.100,00	(1.746.900,00)	97,51	
2.13.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	869.000,00	747.500,00	(121.500,00)	86,02	
2.13.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.000,00	747.500,00	(121.500,00)	86,02	
2.13.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	69.291.000,00	67.665.600,00	(1.625.400,00)	97,65	
2.13.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.291.000,00	67.665.600,00	(1.625.400,00)	97,65	
2.13.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.578.903.000,00	1.571.519.550,00	(7.383.450,00)	99,53	
2.13.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	871.000,00	724.800,00	(146.200,00)	83,21	
2.13.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	871.000,00	724.800,00	(146.200,00)	83,21	
2.13.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.578.032.000,00	1.570.794.750,00	(7.237.250,00)	99,54	
2.13.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.578.032.000,00	1.570.794.750,00	(7.237.250,00)	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	500.552.000,00	401.059.305,50	(99.492.694,50)	80,12	
2.13.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.943.000,00	1.512.940,00	(430.060,00)	77,87	
2.13.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.943.000,00	1.512.940,00	(430.060,00)	77,87	
2.13.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	498.609.000,00	399.546.365,50	(99.062.634,50)	80,13	
2.13.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	498.609.000,00	399.546.365,50	(99.062.634,50)	80,13	
2.13.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.304.189.890,00	2.095.816.043,00	(208.373.847,00)	90,96	
2.13.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	709.706.000,00	653.382.022,00	(56.323.978,00)	92,06	
2.13.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	709.706.000,00	653.382.022,00	(56.323.978,00)	92,06	
2.13.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.706.000,00	653.382.022,00	(56.323.978,00)	92,06	
2.13.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.594.483.890,00	1.442.434.021,00	(152.049.869,00)	90,46	
2.13.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.594.483.890,00	1.442.434.021,00	(152.049.869,00)	90,46	
2.13.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.594.483.890,00	1.442.434.021,00	(152.049.869,00)	90,46	
2.13.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	830.012.000,00	669.022.278,00	(160.989.722,00)	80,60	
2.13.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	45.118.000,00	35.578.000,00	(9.540.000,00)	78,86	
2.13.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	45.118.000,00	35.578.000,00	(9.540.000,00)	78,86	
2.13.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.118.000,00	35.578.000,00	(9.540.000,00)	78,86	
2.13.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	492.160.000,00	343.954.000,00	(148.206.000,00)	69,89	
2.13.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	492.160.000,00	343.954.000,00	(148.206.000,00)	69,89	
2.13.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.160.000,00	343.954.000,00	(148.206.000,00)	69,89	
2.13.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	104.998.000,00	103.800.000,00	(1.198.000,00)	98,86	
2.13.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	104.998.000,00	103.800.000,00	(1.198.000,00)	98,86	
2.13.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.998.000,00	103.800.000,00	(1.198.000,00)	98,86	
2.13.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	125.240.000,00	124.651.378,00	(588.622,00)	99,53	
2.13.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	125.240.000,00	124.651.378,00	(588.622,00)	99,53	
2.13.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.240.000,00	124.651.378,00	(588.622,00)	99,53	
2.13.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	62.496.000,00	61.038.900,00	(1.457.100,00)	97,67	
2.13.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	62.496.000,00	61.038.900,00	(1.457.100,00)	97,67	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.496.000,00	61.038.900,00	(1.457.100,00)	97,67	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	120.657.200,00	111.031.200,00	(9.626.000,00)	92,02	
2.13.02.1.01	PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	120.657.200,00	111.031.200,00	(9.626.000,00)	92,02	
2.13.02.1.01.0001	IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITASI PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	25.000.000,00	22.784.000,00	(2.216.000,00)	91,14	
2.13.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.784.000,00	(2.216.000,00)	91,14	
2.13.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.784.000,00	(2.216.000,00)	91,14	
2.13.02.1.01.0002	FASILITASI KELEMBAGAAN DESA DAN DESA ADAT	30.657.200,00	28.757.200,00	(1.900.000,00)	93,80	
2.13.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.657.200,00	28.757.200,00	(1.900.000,00)	93,80	
2.13.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.657.200,00	28.757.200,00	(1.900.000,00)	93,80	
2.13.02.1.01.0003	FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA	65.000.000,00	59.490.000,00	(5.510.000,00)	91,52	
2.13.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	59.490.000,00	(5.510.000,00)	91,52	
2.13.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	59.490.000,00	(5.510.000,00)	91,52	
2.13.02.1.01.0004	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	541.112.000,00	490.409.102,00	(50.702.898,00)	90,63	
2.13.03.1.01	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	541.112.000,00	490.409.102,00	(50.702.898,00)	90,63	
2.13.03.1.01.0001	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA LINTAS KABUPATEN/KOTA	216.927.000,00	193.939.552,00	(22.987.448,00)	89,40	
2.13.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	216.927.000,00	193.939.552,00	(22.987.448,00)	89,40	
2.13.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.927.000,00	193.939.552,00	(22.987.448,00)	89,40	
2.13.03.1.01.0002	FASILITASI KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	116.199.000,00	105.483.550,00	(10.715.450,00)	90,78	
2.13.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	116.199.000,00	105.483.550,00	(10.715.450,00)	90,78	
2.13.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.199.000,00	105.483.550,00	(10.715.450,00)	90,78	
2.13.03.1.01.0003	FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	207.986.000,00	190.986.000,00	(17.000.000,00)	91,83	
2.13.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	207.986.000,00	190.986.000,00	(17.000.000,00)	91,83	
2.13.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.986.000,00	190.986.000,00	(17.000.000,00)	91,83	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.165.240.000,00	1.069.536.775,00	(95.703.225,00)	91,79	
2.13.04.1.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.165.240.000,00	1.069.536.775,00	(95.703.225,00)	91,79	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.04.1.01.0002	PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	67.372.000,00	61.382.080,00	(5.989.920,00)	91,11	
2.13.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	67.372.000,00	61.382.080,00	(5.989.920,00)	91,11	
2.13.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.372.000,00	61.382.080,00	(5.989.920,00)	91,11	
2.13.04.1.01.0003	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	23.002.000,00	(1.900.000,00)	92,37	
2.13.04.1.01.0005	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	23.958.000,00	22.012.000,00	(1.946.000,00)	91,88	
2.13.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	23.958.000,00	22.012.000,00	(1.946.000,00)	91,88	
2.13.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.958.000,00	22.012.000,00	(1.946.000,00)	91,88	
2.13.04.1.01.0006	FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	37.302.000,00	35.302.000,00	(2.000.000,00)	94,64	
2.13.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	37.302.000,00	35.302.000,00	(2.000.000,00)	94,64	
2.13.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.302.000,00	35.302.000,00	(2.000.000,00)	94,64	
2.13.04.1.01.0008	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	464.850.000,00	444.198.955,00	(20.651.045,00)	95,56	
2.13.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	464.850.000,00	444.198.955,00	(20.651.045,00)	95,56	
2.13.04.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.850.000,00	444.198.955,00	(20.651.045,00)	95,56	
2.13.04.1.01.0009	FASILITASI PELAKSANAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN	115.548.000,00	98.604.440,00	(16.943.560,00)	85,34	
2.13.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	115.548.000,00	98.604.440,00	(16.943.560,00)	85,34	
2.13.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.548.000,00	98.604.440,00	(16.943.560,00)	85,34	
2.13.04.1.01.0010	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	120.886.000,00	113.006.000,00	(7.880.000,00)	93,48	
2.13.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	120.886.000,00	113.006.000,00	(7.880.000,00)	93,48	
2.13.04.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.886.000,00	113.006.000,00	(7.880.000,00)	93,48	
2.13.04.1.01.0011	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	92.804.000,00	86.676.000,00	(6.128.000,00)	93,40	
2.13.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	92.804.000,00	86.676.000,00	(6.128.000,00)	93,40	
2.13.04.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.804.000,00	86.676.000,00	(6.128.000,00)	93,40	
2.13.04.1.01.0012	PEMBINAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS	40.656.000,00	20.177.000,00	(20.479.000,00)	49,63	
2.13.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	40.656.000,00	20.177.000,00	(20.479.000,00)	49,63	
2.13.04.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.656.000,00	20.177.000,00	(20.479.000,00)	49,63	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.04.1.01.0016	FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	33.262.000,00	31.362.000,00	(1.900.000,00)	94,29	
2.13.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	33.262.000,00	31.362.000,00	(1.900.000,00)	94,29	
2.13.04.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.262.000,00	31.362.000,00	(1.900.000,00)	94,29	
2.13.04.1.01.0018	FASILITASI PENCATATAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN/KOTA	39.262.000,00	35.842.000,00	(3.420.000,00)	91,29	
2.13.04.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	39.262.000,00	35.842.000,00	(3.420.000,00)	91,29	
2.13.04.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.262.000,00	35.842.000,00	(3.420.000,00)	91,29	
2.13.04.1.01.0019	FASILITASI PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	24.902.000,00	23.102.000,00	(1.800.000,00)	92,77	
2.13.04.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	24.902.000,00	23.102.000,00	(1.800.000,00)	92,77	
2.13.04.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	23.102.000,00	(1.800.000,00)	92,77	
2.13.04.1.01.0020	FASILITASI PENGEMBANGAN INOVASI DESA	54.634.000,00	51.868.300,00	(2.765.700,00)	94,94	
2.13.04.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	54.634.000,00	51.868.300,00	(2.765.700,00)	94,94	
2.13.04.1.01.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.634.000,00	51.868.300,00	(2.765.700,00)	94,94	
2.13.04.1.01.0021	FASILITASI PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.04.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.04.1.01.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.510.324.300,00	4.518.738.092,00	(2.991.586.208,00)	60,17	
2.13.05.1.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.510.324.300,00	4.518.738.092,00	(2.991.586.208,00)	60,17	
2.13.05.1.01.0002	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	508.872.000,00	430.940.723,00	(77.931.277,00)	84,69	
2.13.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	508.872.000,00	430.940.723,00	(77.931.277,00)	84,69	
2.13.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.872.000,00	430.940.723,00	(77.931.277,00)	84,69	
2.13.05.1.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	803.298.000,00	680.230.657,00	(123.067.343,00)	84,68	
2.13.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	803.298.000,00	680.230.657,00	(123.067.343,00)	84,68	
2.13.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	803.298.000,00	680.230.657,00	(123.067.343,00)	84,68	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.05.1.01.0004	FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	344.381.000,00	280.126.999,00	(64.254.001,00)	81,34	
2.13.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	344.381.000,00	280.126.999,00	(64.254.001,00)	81,34	
2.13.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.381.000,00	280.126.999,00	(64.254.001,00)	81,34	
2.13.05.1.01.0005	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	277.943.000,00	234.615.001,00	(43.327.999,00)	84,41	
2.13.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	277.943.000,00	234.615.001,00	(43.327.999,00)	84,41	
2.13.05.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.943.000,00	234.615.001,00	(43.327.999,00)	84,41	
2.13.05.1.01.0006	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1.736.226.200,00	359.180.790,00	(1.377.045.410,00)	20,69	
2.13.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.736.226.200,00	359.180.790,00	(1.377.045.410,00)	20,69	
2.13.05.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.736.226.200,00	359.180.790,00	(1.377.045.410,00)	20,69	
2.13.05.1.01.0007	FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	337.342.000,00	155.036.714,00	(182.305.286,00)	45,96	
2.13.05.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	337.342.000,00	155.036.714,00	(182.305.286,00)	45,96	
2.13.05.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.342.000,00	155.036.714,00	(182.305.286,00)	45,96	
2.13.05.1.01.0009	FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	3.502.262.100,00	2.378.607.208,00	(1.123.654.892,00)	67,92	
2.13.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.502.262.100,00	2.378.607.208,00	(1.123.654.892,00)	67,92	
2.13.05.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.502.262.100,00	2.378.607.208,00	(1.123.654.892,00)	67,92	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	27.760.720.690,00	23.321.581.763,50	(4.439.138.926,50)	84,01	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.760.720.690,00)	(23.321.581.763,50)	4.439.138.926,50	84,01	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.760.720.690,00)	(23.321.581.763,50)	4.439.138.926,50	84,01	

2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Satuan Kerja : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.543.917.320,00	40.839.062.066,33	(5.704.855.253,67)	87,74	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.15.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	365.175.770,00	287.537.510,33	(77.638.259,67)	78,74	
2.15.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	52.984.770,00	41.031.200,00	(11.953.570,00)	77,44	
2.15.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	52.984.770,00	41.031.200,00	(11.953.570,00)	77,44	
2.15.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.984.770,00	41.031.200,00	(11.953.570,00)	77,44	
2.15.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	5.505.000,00	5.172.825,00	(332.175,00)	93,97	
2.15.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	5.172.825,00	(332.175,00)	93,97	
2.15.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	5.172.825,00	(332.175,00)	93,97	
2.15.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.505.000,00	1.946.025,00	(3.558.975,00)	35,35	
2.15.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	1.946.025,00	(3.558.975,00)	35,35	
2.15.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	1.946.025,00	(3.558.975,00)	35,35	
2.15.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.505.000,00	5.405.592,00	(99.408,00)	98,19	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	5.405.592,00	(99.408,00)	98,19	
2.15.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	5.405.592,00	(99.408,00)	98,19	
2.15.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	205.200.000,00	175.250.868,33	(29.949.131,67)	85,40	
2.15.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	205.200.000,00	175.250.868,33	(29.949.131,67)	85,40	
2.15.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.200.000,00	175.250.868,33	(29.949.131,67)	85,40	
2.15.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	84.971.000,00	53.226.000,00	(31.745.000,00)	62,64	
2.15.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	84.971.000,00	53.226.000,00	(31.745.000,00)	62,64	
2.15.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.971.000,00	53.226.000,00	(31.745.000,00)	62,64	
2.15.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.720.193.000,00	23.446.736.840,00	(4.273.456.160,00)	84,58	
2.15.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	26.721.990.000,00	22.964.011.060,00	(3.757.978.940,00)	85,94	
2.15.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	26.721.990.000,00	22.964.011.060,00	(3.757.978.940,00)	85,94	
2.15.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	26.721.990.000,00	22.964.011.060,00	(3.757.978.940,00)	85,94	
2.15.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	885.950.000,00	391.030.000,00	(494.920.000,00)	44,14	
2.15.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	885.950.000,00	391.030.000,00	(494.920.000,00)	44,14	
2.15.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	74.400.000,00	0,00	(74.400.000,00)	0,00	
2.15.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.550.000,00	391.030.000,00	(420.520.000,00)	48,18	
2.15.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	63.005.000,00	59.669.996,00	(3.335.004,00)	94,71	
2.15.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	63.005.000,00	59.669.996,00	(3.335.004,00)	94,71	
2.15.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.005.000,00	59.669.996,00	(3.335.004,00)	94,71	
2.15.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	798.000,00	798.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	798.000,00	798.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.000,00	798.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	19.100.000,00	6.900.000,00	(12.200.000,00)	36,13	
2.15.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	6.900.000,00	(12.200.000,00)	36,13	
2.15.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	6.900.000,00	(12.200.000,00)	36,13	
2.15.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	25.464.000,00	20.591.784,00	(4.872.216,00)	80,87	
2.15.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.464.000,00	20.591.784,00	(4.872.216,00)	80,87	
2.15.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.464.000,00	20.591.784,00	(4.872.216,00)	80,87	
2.15.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.886.000,00	3.736.000,00	(150.000,00)	96,14	
2.15.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.886.000,00	3.736.000,00	(150.000,00)	96,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.886.000,00	3.736.000,00	(150.000,00)	96,14	
2.15.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	30.100.000,00	20.675.790,00	(9.424.210,00)	68,69	
2.15.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	30.100.000,00	20.675.790,00	(9.424.210,00)	68,69	
2.15.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.100.000,00	20.675.790,00	(9.424.210,00)	68,69	
2.15.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	20.675.790,00	(9.424.210,00)	68,69	
2.15.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.000.000,00	74.974.710,00	(25.290,00)	99,97	
2.15.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	75.000.000,00	74.974.710,00	(25.290,00)	99,97	
2.15.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.974.710,00	(25.290,00)	99,97	
2.15.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.974.710,00	(25.290,00)	99,97	
2.15.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	723.548.000,00	635.627.076,00	(87.920.924,00)	87,85	
2.15.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.130.000,00	58.255.325,00	(1.874.675,00)	96,88	
2.15.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.130.000,00	58.255.325,00	(1.874.675,00)	96,88	
2.15.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.130.000,00	58.255.325,00	(1.874.675,00)	96,88	
2.15.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	270.000.000,00	257.754.043,00	(12.245.957,00)	95,46	
2.15.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	257.754.043,00	(12.245.957,00)	95,46	
2.15.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	257.754.043,00	(12.245.957,00)	95,46	
2.15.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	115.000.000,00	108.021.690,00	(6.978.310,00)	93,93	
2.15.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	108.021.690,00	(6.978.310,00)	93,93	
2.15.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	108.021.690,00	(6.978.310,00)	93,93	
2.15.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.820.000,00	68.991.663,00	(3.828.337,00)	94,74	
2.15.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	72.820.000,00	68.991.663,00	(3.828.337,00)	94,74	
2.15.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.820.000,00	68.991.663,00	(3.828.337,00)	94,74	
2.15.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	135.902.000,00	78.955.055,00	(56.946.945,00)	58,10	
2.15.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	135.902.000,00	78.955.055,00	(56.946.945,00)	58,10	
2.15.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.902.000,00	78.955.055,00	(56.946.945,00)	58,10	
2.15.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	29.696.000,00	26.168.800,00	(3.527.200,00)	88,12	
2.15.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	29.696.000,00	26.168.800,00	(3.527.200,00)	88,12	
2.15.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.696.000,00	26.168.800,00	(3.527.200,00)	88,12	
2.15.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	40.000.000,00	37.480.500,00	(2.519.500,00)	93,70	
2.15.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.480.500,00	(2.519.500,00)	93,70	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.480.500,00	(2.519.500,00)	93,70	
2.15.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.532.822.000,00	3.413.464.945,00	(119.357.055,00)	96,62	
2.15.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.550.000.000,00	2.485.115.000,00	(64.885.000,00)	97,46	
2.15.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.115.000,00	(185.000,00)	85,77	
2.15.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.115.000,00	(185.000,00)	85,77	
2.15.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	2.548.700.000,00	2.484.000.000,00	(64.700.000,00)	97,46	
2.15.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.548.700.000,00	2.484.000.000,00	(64.700.000,00)	97,46	
2.15.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	350.000.000,00	343.945.570,00	(6.054.430,00)	98,27	
2.15.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.446.000,00	299.700,00	(1.146.300,00)	20,73	
2.15.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.000,00	299.700,00	(1.146.300,00)	20,73	
2.15.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	348.554.000,00	343.645.870,00	(4.908.130,00)	98,59	
2.15.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.554.000,00	343.645.870,00	(4.908.130,00)	98,59	
2.15.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	632.822.000,00	584.404.375,00	(48.417.625,00)	92,35	
2.15.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	273.759.000,00	263.339.587,00	(10.419.413,00)	96,19	
2.15.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.759.000,00	263.339.587,00	(10.419.413,00)	96,19	
2.15.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	359.063.000,00	321.064.788,00	(37.998.212,00)	89,42	
2.15.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.063.000,00	321.064.788,00	(37.998.212,00)	89,42	
2.15.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.754.082.550,00	10.717.449.585,00	(1.036.632.965,00)	91,18	
2.15.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.537.501.200,00	3.724.093.265,00	(813.407.935,00)	82,07	
2.15.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.537.501.200,00	3.724.093.265,00	(813.407.935,00)	82,07	
2.15.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.537.501.200,00	3.724.093.265,00	(813.407.935,00)	82,07	
2.15.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.216.581.350,00	6.993.356.320,00	(223.225.030,00)	96,91	
2.15.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.170.871.350,00	6.948.412.420,00	(222.458.930,00)	96,90	
2.15.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.170.871.350,00	6.948.412.420,00	(222.458.930,00)	96,90	
2.15.01.1.08.0004.5.2	BELANJA MODAL	45.710.000,00	44.943.900,00	(766.100,00)	98,32	
2.15.01.1.08.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.710.000,00	44.943.900,00	(766.100,00)	98,32	
2.15.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.342.996.000,00	2.242.595.610,00	(100.400.390,00)	95,71	
2.15.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	500.000.000,00	497.930.705,00	(2.069.295,00)	99,59	
2.15.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	497.930.705,00	(2.069.295,00)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	497.930.705,00	(2.069.295,00)	99,59	
2.15.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.221.230.000,00	1.204.611.800,00	(16.618.200,00)	98,64	
2.15.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.221.230.000,00	1.204.611.800,00	(16.618.200,00)	98,64	
2.15.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.230.000,00	1.204.611.800,00	(16.618.200,00)	98,64	
2.15.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	121.766.000,00	113.149.536,00	(8.616.464,00)	92,92	
2.15.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	121.766.000,00	113.149.536,00	(8.616.464,00)	92,92	
2.15.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.766.000,00	113.149.536,00	(8.616.464,00)	92,92	
2.15.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	500.000.000,00	426.903.569,00	(73.096.431,00)	85,38	
2.15.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	426.903.569,00	(73.096.431,00)	85,38	
2.15.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	426.903.569,00	(73.096.431,00)	85,38	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	37.646.801.430,00	35.520.045.153,90	(2.126.756.276,10)	94,35	
2.15.02.1.01	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI	216.304.000,00	111.991.324,00	(104.312.676,00)	51,77	
2.15.02.1.01.0001	PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI	120.388.000,00	98.311.324,00	(22.076.676,00)	81,66	
2.15.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	120.388.000,00	98.311.324,00	(22.076.676,00)	81,66	
2.15.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.388.000,00	98.311.324,00	(22.076.676,00)	81,66	
2.15.02.1.01.0002	PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI	95.916.000,00	13.680.000,00	(82.236.000,00)	14,26	
2.15.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.916.000,00	13.680.000,00	(82.236.000,00)	14,26	
2.15.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.916.000,00	13.680.000,00	(82.236.000,00)	14,26	
2.15.02.1.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	26.939.967.372,00	25.796.796.901,00	(1.143.170.471,00)	95,76	
2.15.02.1.02.0001	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN PROVINSI	2.678.146.000,00	2.547.984.468,00	(130.161.532,00)	95,14	
2.15.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	359.807.800,00	275.955.444,00	(83.852.356,00)	76,70	
2.15.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.807.800,00	275.955.444,00	(83.852.356,00)	76,70	
2.15.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	2.318.338.200,00	2.272.029.024,00	(46.309.176,00)	98,00	
2.15.02.1.02.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.754.215.000,00	1.719.001.500,00	(35.213.500,00)	97,99	
2.15.02.1.02.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.123.200,00	553.027.524,00	(11.095.676,00)	98,03	
2.15.02.1.02.0002	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	22.560.248.000,00	21.661.311.550,00	(898.936.450,00)	96,02	
2.15.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.868.936.000,00	6.557.750.500,00	(311.185.500,00)	95,47	
2.15.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.868.936.000,00	6.557.750.500,00	(311.185.500,00)	95,47	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.02.1.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	15.691.312.000,00	15.103.561.050,00	(587.750.950,00)	96,25	
2.15.02.1.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.691.312.000,00	15.103.561.050,00	(587.750.950,00)	96,25	
2.15.02.1.02.0003	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	305.130.000,00	295.829.090,00	(9.300.910,00)	96,95	
2.15.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	305.130.000,00	295.829.090,00	(9.300.910,00)	96,95	
2.15.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.130.000,00	295.829.090,00	(9.300.910,00)	96,95	
2.15.02.1.02.0004	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	1.396.443.372,00	1.291.671.793,00	(104.771.579,00)	92,50	
2.15.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.177.795.172,00	1.078.531.793,00	(99.263.379,00)	91,57	
2.15.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.795.172,00	1.078.531.793,00	(99.263.379,00)	91,57	
2.15.02.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	218.648.200,00	213.140.000,00	(5.508.200,00)	97,48	
2.15.02.1.02.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.648.200,00	213.140.000,00	(5.508.200,00)	97,48	
2.15.02.1.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B	90.330.630,00	83.165.323,00	(7.165.307,00)	92,07	
2.15.02.1.03.0001	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B	90.330.630,00	83.165.323,00	(7.165.307,00)	92,07	
2.15.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.330.630,00	83.165.323,00	(7.165.307,00)	92,07	
2.15.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.330.630,00	83.165.323,00	(7.165.307,00)	92,07	
2.15.02.1.05	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	3.831.360.128,00	3.313.185.147,00	(518.174.981,00)	86,48	
2.15.02.1.05.0001	PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0004	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI	1.977.725.128,00	1.579.883.206,00	(397.841.922,00)	79,88	
2.15.02.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.908.133.128,00	1.510.619.206,00	(397.513.922,00)	79,17	
2.15.02.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.908.133.128,00	1.510.619.206,00	(397.513.922,00)	79,17	
2.15.02.1.05.0004.5.2	BELANJA MODAL	69.592.000,00	69.264.000,00	(328.000,00)	99,53	
2.15.02.1.05.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.592.000,00	69.264.000,00	(328.000,00)	99,53	
2.15.02.1.05.0005	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
2.15.02.1.05.0007	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1.849.585.000,00	1.733.301.941,00	(116.283.059,00)	93,71	
2.15.02.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.446.533.200,00	1.336.341.825,00	(110.191.375,00)	92,38	
2.15.02.1.05.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.533.200,00	1.336.341.825,00	(110.191.375,00)	92,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.02.1.05.0007.5.2	BELANJA MODAL	403.051.800,00	396.960.116,00	(6.091.684,00)	98,49	
2.15.02.1.05.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	403.051.800,00	396.960.116,00	(6.091.684,00)	98,49	
2.15.02.1.06	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN PROVINSI	15.560.000,00	8.094.800,00	(7.465.200,00)	52,02	
2.15.02.1.06.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN	10.000.000,00	5.664.800,00	(4.335.200,00)	56,65	
2.15.02.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.664.800,00	(4.335.200,00)	56,65	
2.15.02.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.664.800,00	(4.335.200,00)	56,65	
2.15.02.1.06.0004	PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI ANDALALIN	5.560.000,00	2.430.000,00	(3.130.000,00)	43,71	
2.15.02.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.560.000,00	2.430.000,00	(3.130.000,00)	43,71	
2.15.02.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	2.430.000,00	(3.130.000,00)	43,71	
2.15.02.1.07	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	4.550.357.300,00	4.351.060.977,00	(199.296.323,00)	95,62	
2.15.02.1.07.0004	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI	52.476.800,00	14.299.621,00	(38.177.179,00)	27,25	
2.15.02.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	52.476.800,00	14.299.621,00	(38.177.179,00)	27,25	
2.15.02.1.07.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.476.800,00	14.299.621,00	(38.177.179,00)	27,25	
2.15.02.1.07.0005	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM	5.000.000,00	4.453.621,00	(546.379,00)	89,07	
2.15.02.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.453.621,00	(546.379,00)	89,07	
2.15.02.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.453.621,00	(546.379,00)	89,07	
2.15.02.1.07.0007	PEMBANGUNAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)	40.053.000,00	37.068.500,00	(2.984.500,00)	92,55	
2.15.02.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.053.000,00	37.068.500,00	(2.984.500,00)	92,55	
2.15.02.1.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.053.000,00	37.068.500,00	(2.984.500,00)	92,55	
2.15.02.1.07.0008	MONITORING DAN EVALUASI ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)	5.000.000,00	4.533.621,00	(466.379,00)	90,67	
2.15.02.1.07.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.533.621,00	(466.379,00)	90,67	
2.15.02.1.07.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.533.621,00	(466.379,00)	90,67	
2.15.02.1.07.0011	PEMBANGUNAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)	4.447.827.500,00	4.290.705.614,00	(157.121.886,00)	96,47	
2.15.02.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.418.748.500,00	1.371.273.435,00	(47.475.065,00)	96,65	
2.15.02.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.418.748.500,00	1.371.273.435,00	(47.475.065,00)	96,65	
2.15.02.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	3.029.079.000,00	2.919.432.179,00	(109.646.821,00)	96,38	
2.15.02.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.029.079.000,00	2.919.432.179,00	(109.646.821,00)	96,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.02.1.08	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.002.922.000,00	1.855.750.681,90	(147.171.318,10)	92,65	
2.15.02.1.08.0002	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	2.000.752.000,00	1.853.822.211,90	(146.929.788,10)	92,66	
2.15.02.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.752.000,00	1.853.822.211,90	(146.929.788,10)	92,66	
2.15.02.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.752.000,00	1.853.822.211,90	(146.929.788,10)	92,66	
2.15.02.1.08.0003	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.170.000,00	1.928.470,00	(241.530,00)	88,87	
2.15.02.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.170.000,00	1.928.470,00	(241.530,00)	88,87	
2.15.02.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	1.928.470,00	(241.530,00)	88,87	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	543.674.972,00	393.791.248,00	(149.883.724,00)	72,43	
2.15.03.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI	297.387.472,00	238.858.694,00	(58.528.778,00)	80,32	
2.15.03.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN PROVINSI	297.387.472,00	238.858.694,00	(58.528.778,00)	80,32	
2.15.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	297.387.472,00	238.858.694,00	(58.528.778,00)	80,32	
2.15.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.387.472,00	238.858.694,00	(58.528.778,00)	80,32	
2.15.03.1.09	PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	246.287.500,00	154.932.554,00	(91.354.946,00)	62,91	
2.15.03.1.09.0001	FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	246.287.500,00	154.932.554,00	(91.354.946,00)	62,91	
2.15.03.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	246.287.500,00	154.932.554,00	(91.354.946,00)	62,91	
2.15.03.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.287.500,00	154.932.554,00	(91.354.946,00)	62,91	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	484.526.100,00	437.741.111,00	(46.784.989,00)	90,34	
2.15.05.1.06	PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN PADA JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN PROVINSI	484.526.100,00	437.741.111,00	(46.784.989,00)	90,34	
2.15.05.1.06.0001	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN PADA JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN KEWENANGAN PROVINSI	484.526.100,00	437.741.111,00	(46.784.989,00)	90,34	
2.15.05.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	279.374.000,00	234.520.091,00	(44.853.909,00)	83,94	
2.15.05.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.374.000,00	234.520.091,00	(44.853.909,00)	83,94	
2.15.05.1.06.0001.5.2	BELANJA MODAL	205.152.100,00	203.221.020,00	(1.931.080,00)	99,06	
2.15.05.1.06.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.152.100,00	203.221.020,00	(1.931.080,00)	99,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	85.218.919.822,00	77.190.639.579,23	(8.028.280.242,77)	90,58	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.218.919.822,00)	(77.190.639.579,23)	8.028.280.242,77	90,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(85.218.919.822,00)	(77.190.639.579,23)	8.028.280.242,77	90,58	

2.16.2.20.2.21.04.0000

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Satuan Kerja : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.295.437.075,00	15.954.934.382,00	(1.340.502.693,00)	92,25	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.16.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	287.772.800,00	287.072.800,00	(700.000,00)	99,76	
2.16.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	35.228.000,00	35.228.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.228.000,00	35.228.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.228.000,00	35.228.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	40.128.000,00	40.128.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	40.128.000,00	40.128.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.128.000,00	40.128.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.622.000,00	81.622.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	81.622.000,00	81.622.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.622.000,00	81.622.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	33.910.000,00	33.710.000,00	(200.000,00)	99,41	
2.16.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	33.910.000,00	33.710.000,00	(200.000,00)	99,41	
2.16.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.910.000,00	33.710.000,00	(200.000,00)	99,41	
2.16.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.657.800,00	18.157.800,00	(500.000,00)	97,32	
2.16.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	18.657.800,00	18.157.800,00	(500.000,00)	97,32	
2.16.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.657.800,00	18.157.800,00	(500.000,00)	97,32	
2.16.01.1.01.0012	SINKRONISASI DAN HARMONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.929.523.300,00	11.776.307.033,00	(1.153.216.267,00)	91,08	
2.16.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.552.263.300,00	11.399.047.033,00	(1.153.216.267,00)	90,81	
2.16.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.552.263.300,00	11.399.047.033,00	(1.153.216.267,00)	90,81	
2.16.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	12.552.263.300,00	11.399.047.033,00	(1.153.216.267,00)	90,81	
2.16.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	237.830.000,00	237.830.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	237.830.000,00	237.830.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.830.000,00	237.830.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.190.125,00	4.189.900,00	(225,00)	99,99	
2.16.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.500.125,00	3.499.900,00	(225,00)	99,99	
2.16.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.125,00	3.499.900,00	(225,00)	99,99	
2.16.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.125,00	3.499.900,00	(225,00)	99,99	
2.16.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	582.733.100,00	562.754.908,00	(19.978.192,00)	96,57	
2.16.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.874.400,00	26.782.335,00	(92.065,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	26.874.400,00	26.782.335,00	(92.065,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.874.400,00	26.782.335,00	(92.065,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	178.886.800,00	177.135.350,00	(1.751.450,00)	99,02	
2.16.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	178.886.800,00	177.135.350,00	(1.751.450,00)	99,02	
2.16.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.886.800,00	177.135.350,00	(1.751.450,00)	99,02	
2.16.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	37.536.000,00	37.358.715,00	(177.285,00)	99,53	
2.16.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	37.536.000,00	37.358.715,00	(177.285,00)	99,53	
2.16.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.536.000,00	37.358.715,00	(177.285,00)	99,53	
2.16.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	194.329.900,00	188.844.900,00	(5.485.000,00)	97,18	
2.16.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	194.329.900,00	188.844.900,00	(5.485.000,00)	97,18	
2.16.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.329.900,00	188.844.900,00	(5.485.000,00)	97,18	
2.16.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	95.642.000,00	95.319.108,00	(322.892,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	95.642.000,00	95.319.108,00	(322.892,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.642.000,00	95.319.108,00	(322.892,00)	99,66	
2.16.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40.000.000,00	27.850.500,00	(12.149.500,00)	69,63	
2.16.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	27.850.500,00	(12.149.500,00)	69,63	
2.16.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.850.500,00	(12.149.500,00)	69,63	
2.16.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	252.667.500,00	235.953.714,00	(16.713.786,00)	93,39	
2.16.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	170.614.000,00	168.410.214,00	(2.203.786,00)	98,71	
2.16.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	922.000,00	0,00	(922.000,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.000,00	0,00	(922.000,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	169.692.000,00	168.410.214,00	(1.281.786,00)	99,24	
2.16.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.692.000,00	168.410.214,00	(1.281.786,00)	99,24	
2.16.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	74.364.500,00	60.550.500,00	(13.814.000,00)	81,42	
2.16.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.770.500,00	0,00	(1.770.500,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.500,00	0,00	(1.770.500,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	72.594.000,00	60.550.500,00	(12.043.500,00)	83,41	
2.16.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.594.000,00	60.550.500,00	(12.043.500,00)	83,41	
2.16.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.689.000,00	6.993.000,00	(696.000,00)	90,95	
2.16.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	599.000,00	0,00	(599.000,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.000,00	0,00	(599.000,00)	0,00	
2.16.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	7.090.000,00	6.993.000,00	(97.000,00)	98,63	
2.16.01.1.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.090.000,00	6.993.000,00	(97.000,00)	98,63	
2.16.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.07.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.644.167.450,00	2.511.156.427,00	(133.011.023,00)	94,97	
2.16.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	656.350.100,00	566.556.209,00	(89.793.891,00)	86,32	
2.16.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	656.350.100,00	566.556.209,00	(89.793.891,00)	86,32	
2.16.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.350.100,00	566.556.209,00	(89.793.891,00)	86,32	
2.16.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.987.817.350,00	1.944.600.218,00	(43.217.132,00)	97,83	
2.16.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.987.817.350,00	1.944.600.218,00	(43.217.132,00)	97,83	
2.16.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.817.350,00	1.944.600.218,00	(43.217.132,00)	97,83	
2.16.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	577.182.800,00	560.299.600,00	(16.883.200,00)	97,07	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.410.000,00	36.970.000,00	(1.440.000,00)	96,25	
2.16.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.410.000,00	36.970.000,00	(1.440.000,00)	96,25	
2.16.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.410.000,00	36.970.000,00	(1.440.000,00)	96,25	
2.16.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	430.808.000,00	416.529.750,00	(14.278.250,00)	96,69	
2.16.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	430.808.000,00	416.529.750,00	(14.278.250,00)	96,69	
2.16.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.808.000,00	416.529.750,00	(14.278.250,00)	96,69	
2.16.01.1.09.0005	PEMELIHARAAN MEDEL	6.816.000,00	6.816.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.816.000,00	6.816.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.816.000,00	6.816.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	83.549.000,00	82.457.850,00	(1.091.150,00)	98,69	
2.16.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	83.549.000,00	82.457.850,00	(1.091.150,00)	98,69	
2.16.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.549.000,00	82.457.850,00	(1.091.150,00)	98,69	
2.16.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	17.599.800,00	17.526.000,00	(73.800,00)	99,58	
2.16.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	17.599.800,00	17.526.000,00	(73.800,00)	99,58	
2.16.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.599.800,00	17.526.000,00	(73.800,00)	99,58	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.427.818.829,00	10.189.646.673,00	(238.172.156,00)	97,72	
2.16.02.1.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10.427.818.829,00	10.189.646.673,00	(238.172.156,00)	97,72	
2.16.02.1.01.0014	RELASI MEDIA	22.651.000,00	20.804.066,00	(1.846.934,00)	91,85	
2.16.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	22.651.000,00	20.804.066,00	(1.846.934,00)	91,85	
2.16.02.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.651.000,00	20.804.066,00	(1.846.934,00)	91,85	
2.16.02.1.01.0015	PENYUSUNAN KONTEN	636.560.000,00	634.510.000,00	(2.050.000,00)	99,68	
2.16.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	636.560.000,00	634.510.000,00	(2.050.000,00)	99,68	
2.16.02.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.560.000,00	634.510.000,00	(2.050.000,00)	99,68	
2.16.02.1.01.0016	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	23.415.000,00	20.665.000,00	(2.750.000,00)	88,26	
2.16.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	23.415.000,00	20.665.000,00	(2.750.000,00)	88,26	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.02.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.415.000,00	20.665.000,00	(2.750.000,00)	88,26	
2.16.02.1.01.0017	SOSIALISASI PERATURAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11.280.000,00	8.177.000,00	(3.103.000,00)	72,49	
2.16.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	11.280.000,00	8.177.000,00	(3.103.000,00)	72,49	
2.16.02.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	8.177.000,00	(3.103.000,00)	72,49	
2.16.02.1.01.0018	DISEMINASI INFORMASI	2.653.156.029,00	2.493.883.894,00	(159.272.135,00)	94,00	
2.16.02.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	2.535.323.029,00	2.378.554.894,00	(156.768.135,00)	93,82	
2.16.02.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.323.029,00	2.378.554.894,00	(156.768.135,00)	93,82	
2.16.02.1.01.0018.5.2	BELANJA MODAL	117.833.000,00	115.329.000,00	(2.504.000,00)	97,87	
2.16.02.1.01.0018.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.833.000,00	115.329.000,00	(2.504.000,00)	97,87	
2.16.02.1.01.0019	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK	10.800.000,00	10.799.400,00	(600,00)	99,99	
2.16.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.799.400,00	(600,00)	99,99	
2.16.02.1.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.799.400,00	(600,00)	99,99	
2.16.02.1.01.0020	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	3.863.474.800,00	3.810.625.713,00	(52.849.087,00)	98,63	
2.16.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	3.863.474.800,00	3.810.625.713,00	(52.849.087,00)	98,63	
2.16.02.1.01.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.863.474.800,00	3.810.625.713,00	(52.849.087,00)	98,63	
2.16.02.1.01.0021	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	2.563.415.000,00	2.562.525.000,00	(890.000,00)	99,97	
2.16.02.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	2.563.415.000,00	2.562.525.000,00	(890.000,00)	99,97	
2.16.02.1.01.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.415.000,00	37.645.000,00	(770.000,00)	98,00	
2.16.02.1.01.0021.5.1.05	Belanja Hibah	2.525.000.000,00	2.524.880.000,00	(120.000,00)	100,00	
2.16.02.1.01.0022	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	314.590.000,00	309.499.500,00	(5.090.500,00)	98,38	
2.16.02.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	314.590.000,00	309.499.500,00	(5.090.500,00)	98,38	
2.16.02.1.01.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.590.000,00	309.499.500,00	(5.090.500,00)	98,38	
2.16.02.1.01.0023	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	313.777.000,00	307.257.100,00	(6.519.900,00)	97,92	
2.16.02.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	313.777.000,00	307.257.100,00	(6.519.900,00)	97,92	
2.16.02.1.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.777.000,00	307.257.100,00	(6.519.900,00)	97,92	
2.16.02.1.01.0024	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	14.700.000,00	10.900.000,00	(3.800.000,00)	74,15	
2.16.02.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	10.900.000,00	(3.800.000,00)	74,15	
2.16.02.1.01.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	10.900.000,00	(3.800.000,00)	74,15	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	24.782.853.000,00	22.319.446.611,00	(2.463.406.389,00)	90,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.03.1.01	PENGLOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	178.098.000,00	160.256.600,00	(17.841.400,00)	89,98	
2.16.03.1.01.0004	PENGLOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	178.098.000,00	160.256.600,00	(17.841.400,00)	89,98	
2.16.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	178.098.000,00	160.256.600,00	(17.841.400,00)	89,98	
2.16.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.098.000,00	160.256.600,00	(17.841.400,00)	89,98	
2.16.03.1.02	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	24.604.755.000,00	22.159.190.011,00	(2.445.564.989,00)	90,06	
2.16.03.1.02.0014	PENYELENGGARAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	7.550.000,00	6.550.000,00	(1.000.000,00)	86,75	
2.16.03.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	7.550.000,00	6.550.000,00	(1.000.000,00)	86,75	
2.16.03.1.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	6.550.000,00	(1.000.000,00)	86,75	
2.16.03.1.02.0015	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	7.150.000,00	(2.850.000,00)	71,50	
2.16.03.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.150.000,00	(2.850.000,00)	71,50	
2.16.03.1.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.150.000,00	(2.850.000,00)	71,50	
2.16.03.1.02.0017	PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	2.267.400.000,00	2.261.400.000,00	(6.000.000,00)	99,74	
2.16.03.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	2.267.400.000,00	2.261.400.000,00	(6.000.000,00)	99,74	
2.16.03.1.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.267.400.000,00	2.261.400.000,00	(6.000.000,00)	99,74	
2.16.03.1.02.0018	KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PROVINSI CERDAS	15.900.000,00	14.350.000,00	(1.550.000,00)	90,25	
2.16.03.1.02.0018.5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	14.350.000,00	(1.550.000,00)	90,25	
2.16.03.1.02.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	14.350.000,00	(1.550.000,00)	90,25	
2.16.03.1.02.0019	KETERHUBUNGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA KE JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5.360.000,00	4.508.000,00	(852.000,00)	84,10	
2.16.03.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	5.360.000,00	4.508.000,00	(852.000,00)	84,10	
2.16.03.1.02.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	4.508.000,00	(852.000,00)	84,10	
2.16.03.1.02.0020	KOORDINASI PEMANFAATAN PUSAT DATA NASIONAL	9.420.000,00	8.437.300,00	(982.700,00)	89,57	
2.16.03.1.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	9.420.000,00	8.437.300,00	(982.700,00)	89,57	
2.16.03.1.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	8.437.300,00	(982.700,00)	89,57	
2.16.03.1.02.0021	KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI	14.056.000,00	11.857.000,00	(2.199.000,00)	84,36	
2.16.03.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	14.056.000,00	11.857.000,00	(2.199.000,00)	84,36	
2.16.03.1.02.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.056.000,00	11.857.000,00	(2.199.000,00)	84,36	
2.16.03.1.02.0022	KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PEMERINTAH DAERAH	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.03.1.02.0022.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.1.02.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.1.02.0024	FASILITASI PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SESUAI KEWENANGAN DINAS KOMINFO	9.900.000,00	6.557.000,00	(3.343.000,00)	66,23	
2.16.03.1.02.0024.5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	6.557.000,00	(3.343.000,00)	66,23	
2.16.03.1.02.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	6.557.000,00	(3.343.000,00)	66,23	
2.16.03.1.02.0025	KOORDINASI PENYUSUNAN PROSES BISNIS	9.290.000,00	5.397.000,00	(3.893.000,00)	58,09	
2.16.03.1.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	9.290.000,00	5.397.000,00	(3.893.000,00)	58,09	
2.16.03.1.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	5.397.000,00	(3.893.000,00)	58,09	
2.16.03.1.02.0026	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	14.713.347.000,00	12.480.113.512,00	(2.233.233.488,00)	84,82	
2.16.03.1.02.0026.5.1	BELANJA OPERASI	14.713.347.000,00	12.480.113.512,00	(2.233.233.488,00)	84,82	
2.16.03.1.02.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.713.347.000,00	12.480.113.512,00	(2.233.233.488,00)	84,82	
2.16.03.1.02.0027	KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	3.650.000,00	3.100.000,00	(550.000,00)	84,93	
2.16.03.1.02.0027.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.100.000,00	(550.000,00)	84,93	
2.16.03.1.02.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.100.000,00	(550.000,00)	84,93	
2.16.03.1.02.0028	KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	17.100.000,00	14.800.000,00	(2.300.000,00)	86,55	
2.16.03.1.02.0028.5.1	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	14.800.000,00	(2.300.000,00)	86,55	
2.16.03.1.02.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	14.800.000,00	(2.300.000,00)	86,55	
2.16.03.1.02.0029	PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH	1.459.902.000,00	1.411.843.999,00	(48.058.001,00)	96,71	
2.16.03.1.02.0029.5.1	BELANJA OPERASI	1.459.902.000,00	1.411.843.999,00	(48.058.001,00)	96,71	
2.16.03.1.02.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.902.000,00	1.411.843.999,00	(48.058.001,00)	96,71	
2.16.03.1.02.0030	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	6.058.980.000,00	5.920.226.200,00	(138.753.800,00)	97,71	
2.16.03.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	95.942.000,00	89.951.200,00	(5.990.800,00)	93,76	
2.16.03.1.02.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.942.000,00	89.951.200,00	(5.990.800,00)	93,76	
2.16.03.1.02.0030.5.2	BELANJA MODAL	5.963.038.000,00	5.830.275.000,00	(132.763.000,00)	97,77	
2.16.03.1.02.0030.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.963.038.000,00	5.830.275.000,00	(132.763.000,00)	97,77	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73	
2.20.02.1.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI	470.189.000,00	464.230.800,00	(5.958.200,00)	98,73	
2.20.02.1.01.0007	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	20.250.000,00	17.050.000,00	(3.200.000,00)	84,20	
2.20.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.250.000,00	17.050.000,00	(3.200.000,00)	84,20	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.20.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	17.050.000,00	(3.200.000,00)	84,20	
2.20.02.1.01.0008	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.1.01.0009	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	417.864.000,00	417.864.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	417.864.000,00	417.864.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.864.000,00	417.864.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.1.01.0009.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.1.01.0010	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	16.335.000,00	14.690.000,00	(1.645.000,00)	89,93	
2.20.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	16.335.000,00	14.690.000,00	(1.645.000,00)	89,93	
2.20.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	14.690.000,00	(1.645.000,00)	89,93	
2.20.02.1.01.0011	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	15.740.000,00	14.626.800,00	(1.113.200,00)	92,93	
2.20.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.740.000,00	14.626.800,00	(1.113.200,00)	92,93	
2.20.02.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	14.626.800,00	(1.113.200,00)	92,93	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	485.676.000,00	466.856.450,00	(18.819.550,00)	96,13	
2.21.02.1.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	471.276.000,00	453.756.450,00	(17.519.550,00)	96,28	
2.21.02.1.01.0001	PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	28.800.000,00	24.399.825,00	(4.400.175,00)	84,72	
2.21.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	24.399.825,00	(4.400.175,00)	84,72	
2.21.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	24.399.825,00	(4.400.175,00)	84,72	
2.21.02.1.01.0002	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	31.340.000,00	26.399.825,00	(4.940.175,00)	84,24	
2.21.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	31.340.000,00	26.399.825,00	(4.940.175,00)	84,24	
2.21.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.340.000,00	26.399.825,00	(4.940.175,00)	84,24	
2.21.02.1.01.0003	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	382.076.000,00	375.193.615,00	(6.882.385,00)	98,20	
2.21.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	382.076.000,00	375.193.615,00	(6.882.385,00)	98,20	
2.21.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.076.000,00	375.193.615,00	(6.882.385,00)	98,20	
2.21.02.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.21.02.1.01.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21.02.1.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	29.060.000,00	27.763.185,00	(1.296.815,00)	95,54	
2.21.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	29.060.000,00	27.763.185,00	(1.296.815,00)	95,54	
2.21.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.060.000,00	27.763.185,00	(1.296.815,00)	95,54	
2.21.02.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21.02.1.01.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21.02.1.02	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI	14.400.000,00	13.100.000,00	(1.300.000,00)	90,97	
2.21.02.1.02.0001	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	14.400.000,00	13.100.000,00	(1.300.000,00)	90,97	
2.21.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	13.100.000,00	(1.300.000,00)	90,97	
2.21.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	13.100.000,00	(1.300.000,00)	90,97	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	53.461.973.904,00	49.395.114.916,00	(4.066.858.988,00)	92,39	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.461.973.904,00)	(49.395.114.916,00)	4.066.858.988,00	92,39	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(53.461.973.904,00)	(49.395.114.916,00)	4.066.858.988,00	92,39	

2.17.0.00.0.00.01.0000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Satuan Kerja : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.521.924.652,00	18.070.718.687,00	(2.451.205.965,00)	88,06	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.17.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	706.425.600,00	514.131.200,00	(192.294.400,00)	72,78	
2.17.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	70.706.000,00	43.001.000,00	(27.705.000,00)	60,82	
2.17.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.706.000,00	43.001.000,00	(27.705.000,00)	60,82	
2.17.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.706.000,00	43.001.000,00	(27.705.000,00)	60,82	
2.17.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	9.889.000,00	8.196.000,00	(1.693.000,00)	82,88	
2.17.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.889.000,00	8.196.000,00	(1.693.000,00)	82,88	
2.17.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.889.000,00	8.196.000,00	(1.693.000,00)	82,88	
2.17.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.974.400,00	7.659.400,00	(3.315.000,00)	69,79	
2.17.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.974.400,00	7.659.400,00	(3.315.000,00)	69,79	
2.17.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.974.400,00	7.659.400,00	(3.315.000,00)	69,79	
2.17.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.897.200,00	2.970.000,00	(1.927.200,00)	60,65	
2.17.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.897.200,00	2.970.000,00	(1.927.200,00)	60,65	
2.17.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.897.200,00	2.970.000,00	(1.927.200,00)	60,65	
2.17.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.869.000,00	4.239.000,00	(630.000,00)	87,06	
2.17.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.869.000,00	4.239.000,00	(630.000,00)	87,06	
2.17.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.869.000,00	4.239.000,00	(630.000,00)	87,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	82.020.000,00	43.760.800,00	(38.259.200,00)	53,35	
2.17.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	82.020.000,00	43.760.800,00	(38.259.200,00)	53,35	
2.17.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.020.000,00	43.760.800,00	(38.259.200,00)	53,35	
2.17.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	361.515.000,00	289.641.000,00	(71.874.000,00)	80,12	
2.17.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	361.515.000,00	289.641.000,00	(71.874.000,00)	80,12	
2.17.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.515.000,00	289.641.000,00	(71.874.000,00)	80,12	
2.17.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	58.625.000,00	43.237.000,00	(15.388.000,00)	73,75	
2.17.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	58.625.000,00	43.237.000,00	(15.388.000,00)	73,75	
2.17.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.625.000,00	43.237.000,00	(15.388.000,00)	73,75	
2.17.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	102.930.000,00	71.427.000,00	(31.503.000,00)	69,39	
2.17.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	102.930.000,00	71.427.000,00	(31.503.000,00)	69,39	
2.17.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.930.000,00	71.427.000,00	(31.503.000,00)	69,39	
2.17.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.402.970.000,00	12.644.979.849,00	(1.757.990.151,00)	87,79	
2.17.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.058.000.000,00	12.360.309.674,00	(1.697.690.326,00)	87,92	
2.17.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.058.000.000,00	12.360.309.674,00	(1.697.690.326,00)	87,92	
2.17.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.058.000.000,00	12.360.309.674,00	(1.697.690.326,00)	87,92	
2.17.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	329.970.000,00	271.790.000,00	(58.180.000,00)	82,37	
2.17.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	329.970.000,00	271.790.000,00	(58.180.000,00)	82,37	
2.17.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.970.000,00	271.790.000,00	(58.180.000,00)	82,37	
2.17.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	9.885.000,00	7.880.175,00	(2.004.825,00)	79,72	
2.17.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.885.000,00	7.880.175,00	(2.004.825,00)	79,72	
2.17.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.885.000,00	7.880.175,00	(2.004.825,00)	79,72	
2.17.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	115.000,00	0,00	(115.000,00)	0,00	
2.17.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	115.000,00	0,00	(115.000,00)	0,00	
2.17.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	0,00	(115.000,00)	0,00	
2.17.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0007	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	94.925.000,00	84.599.650,00	(10.325.350,00)	89,12	
2.17.01.1.05.0001	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	55.250.000,00	54.739.650,00	(510.350,00)	99,08	
2.17.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	55.250.000,00	54.739.650,00	(510.350,00)	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.250.000,00	54.739.650,00	(510.350,00)	99,08	
2.17.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	10.230.000,00	9.915.000,00	(315.000,00)	96,92	
2.17.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.230.000,00	9.915.000,00	(315.000,00)	96,92	
2.17.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	9.915.000,00	(315.000,00)	96,92	
2.17.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100,00	
2.17.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	5.500.000,00	(9.500.000,00)	36,67	
2.17.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	5.500.000,00	(9.500.000,00)	36,67	
2.17.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.500.000,00	(9.500.000,00)	36,67	
2.17.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	659.399.720,00	626.759.690,00	(32.640.030,00)	95,05	
2.17.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.314.000,00	22.294.572,00	(19.428,00)	99,91	
2.17.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.314.000,00	22.294.572,00	(19.428,00)	99,91	
2.17.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.314.000,00	22.294.572,00	(19.428,00)	99,91	
2.17.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	183.414.000,00	183.304.619,00	(109.381,00)	99,94	
2.17.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	183.414.000,00	183.304.619,00	(109.381,00)	99,94	
2.17.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.414.000,00	183.304.619,00	(109.381,00)	99,94	
2.17.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.430.000,00	19.395.030,00	(34.970,00)	99,82	
2.17.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.430.000,00	19.395.030,00	(34.970,00)	99,82	
2.17.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.430.000,00	19.395.030,00	(34.970,00)	99,82	
2.17.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	105.350.000,00	105.213.225,00	(136.775,00)	99,87	
2.17.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	105.350.000,00	105.213.225,00	(136.775,00)	99,87	
2.17.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.350.000,00	105.213.225,00	(136.775,00)	99,87	
2.17.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	68.921.000,00	68.902.740,00	(18.260,00)	99,97	
2.17.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	68.921.000,00	68.902.740,00	(18.260,00)	99,97	
2.17.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.921.000,00	68.902.740,00	(18.260,00)	99,97	
2.17.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	248.536.000,00	216.214.935,00	(32.321.065,00)	87,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	248.536.000,00	216.214.935,00	(32.321.065,00)	87,00	
2.17.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.536.000,00	216.214.935,00	(32.321.065,00)	87,00	
2.17.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	11.434.720,00	11.434.569,00	(151,00)	100,00	
2.17.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	11.434.720,00	11.434.569,00	(151,00)	100,00	
2.17.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.434.720,00	11.434.569,00	(151,00)	100,00	
2.17.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	597.455.052,00	576.314.660,00	(21.140.392,00)	96,46	
2.17.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	50.958.000,00	48.725.000,00	(2.233.000,00)	95,62	
2.17.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	50.958.000,00	48.725.000,00	(2.233.000,00)	95,62	
2.17.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.958.000,00	48.725.000,00	(2.233.000,00)	95,62	
2.17.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	546.497.052,00	527.589.660,00	(18.907.392,00)	96,54	
2.17.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.666.052,00	0,00	(1.666.052,00)	0,00	
2.17.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.666.052,00	0,00	(1.666.052,00)	0,00	
2.17.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	544.831.000,00	527.589.660,00	(17.241.340,00)	96,84	
2.17.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	544.831.000,00	527.589.660,00	(17.241.340,00)	96,84	
2.17.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.07.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.798.425.280,00	2.465.103.512,00	(333.321.768,00)	88,09	
2.17.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	715.375.000,00	483.601.988,00	(231.773.012,00)	67,60	
2.17.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	715.375.000,00	483.601.988,00	(231.773.012,00)	67,60	
2.17.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.375.000,00	483.601.988,00	(231.773.012,00)	67,60	
2.17.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.346.000,00	2.211.520,00	(134.480,00)	94,27	
2.17.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.346.000,00	2.211.520,00	(134.480,00)	94,27	
2.17.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.346.000,00	2.211.520,00	(134.480,00)	94,27	
2.17.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.080.704.280,00	1.979.290.004,00	(101.414.276,00)	95,13	
2.17.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.704.280,00	1.979.290.004,00	(101.414.276,00)	95,13	
2.17.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.704.280,00	1.979.290.004,00	(101.414.276,00)	95,13	
2.17.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.256.324.000,00	1.152.830.126,00	(103.493.874,00)	91,76	
2.17.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	259.605.000,00	251.391.410,00	(8.213.590,00)	96,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	259.605.000,00	251.391.410,00	(8.213.590,00)	96,84	
2.17.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.605.000,00	251.391.410,00	(8.213.590,00)	96,84	
2.17.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	307.421.000,00	298.429.265,00	(8.991.735,00)	97,08	
2.17.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	307.421.000,00	298.429.265,00	(8.991.735,00)	97,08	
2.17.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.421.000,00	298.429.265,00	(8.991.735,00)	97,08	
2.17.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	129.918.000,00	82.887.250,00	(47.030.750,00)	63,80	
2.17.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	129.918.000,00	82.887.250,00	(47.030.750,00)	63,80	
2.17.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.918.000,00	82.887.250,00	(47.030.750,00)	63,80	
2.17.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	283.400.000,00	277.227.500,00	(6.172.500,00)	97,82	
2.17.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	283.400.000,00	277.227.500,00	(6.172.500,00)	97,82	
2.17.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.400.000,00	277.227.500,00	(6.172.500,00)	97,82	
2.17.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	75.580.000,00	47.144.701,00	(28.435.299,00)	62,38	
2.17.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	75.580.000,00	47.144.701,00	(28.435.299,00)	62,38	
2.17.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.580.000,00	47.144.701,00	(28.435.299,00)	62,38	
2.17.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	200.400.000,00	195.750.000,00	(4.650.000,00)	97,68	
2.17.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	200.400.000,00	195.750.000,00	(4.650.000,00)	97,68	
2.17.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.400.000,00	195.750.000,00	(4.650.000,00)	97,68	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.440.284.100,00	3.961.163.730,00	(479.120.370,00)	89,21	
2.17.03.1.01	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	(308.811.370,00)	90,60	
2.17.03.1.01.0003	PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	(308.811.370,00)	90,60	
2.17.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	(308.811.370,00)	90,60	
2.17.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	(308.811.370,00)	90,60	
2.17.03.1.02	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.155.830.000,00	985.521.000,00	(170.309.000,00)	85,27	
2.17.03.1.02.0002	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.155.830.000,00	985.521.000,00	(170.309.000,00)	85,27	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.155.830.000,00	985.521.000,00	(170.309.000,00)	85,27	
2.17.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.830.000,00	985.521.000,00	(170.309.000,00)	85,27	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	896.062.540,00	841.476.500,00	(54.586.040,00)	93,91	
2.17.05.1.01	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	896.062.540,00	841.476.500,00	(54.586.040,00)	93,91	
2.17.05.1.01.0001	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	896.062.540,00	841.476.500,00	(54.586.040,00)	93,91	
2.17.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	896.062.540,00	841.476.500,00	(54.586.040,00)	93,91	
2.17.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.062.540,00	841.476.500,00	(54.586.040,00)	93,91	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.474.939.910,00	1.330.801.354,00	(144.138.556,00)	90,23	
2.17.06.1.01	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.474.939.910,00	1.330.801.354,00	(144.138.556,00)	90,23	
2.17.06.1.01.0002	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	480.211.610,00	436.963.500,00	(43.248.110,00)	90,99	
2.17.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	480.211.610,00	436.963.500,00	(43.248.110,00)	90,99	
2.17.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.211.610,00	436.963.500,00	(43.248.110,00)	90,99	
2.17.06.1.01.0003	PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	194.193.900,00	176.786.029,00	(17.407.871,00)	91,04	
2.17.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	194.193.900,00	176.786.029,00	(17.407.871,00)	91,04	
2.17.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.193.900,00	176.786.029,00	(17.407.871,00)	91,04	
2.17.06.1.01.0009	PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	800.534.400,00	717.051.825,00	(83.482.575,00)	89,57	
2.17.06.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	800.534.400,00	717.051.825,00	(83.482.575,00)	89,57	
2.17.06.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.534.400,00	717.051.825,00	(83.482.575,00)	89,57	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.365.209.000,00	2.222.698.321,00	(142.510.679,00)	93,97	
2.17.07.1.01	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	2.365.209.000,00	2.222.698.321,00	(142.510.679,00)	93,97	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.07.1.01.0001	MENUMBUHKEMBANGKAN UMKM UNTUK MENJADI USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	190.754.000,00	187.471.257,00	(3.282.743,00)	98,28	
2.17.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	190.754.000,00	187.471.257,00	(3.282.743,00)	98,28	
2.17.07.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.754.000,00	187.471.257,00	(3.282.743,00)	98,28	
2.17.07.1.01.0002	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN	686.580.000,00	667.080.000,00	(19.500.000,00)	97,16	
2.17.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	686.580.000,00	667.080.000,00	(19.500.000,00)	97,16	
2.17.07.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.580.000,00	667.080.000,00	(19.500.000,00)	97,16	
2.17.07.1.01.0004	FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	400.000.000,00	366.468.000,00	(33.532.000,00)	91,62	
2.17.07.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	366.468.000,00	(33.532.000,00)	91,62	
2.17.07.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	366.468.000,00	(33.532.000,00)	91,62	
2.17.07.1.01.0005	PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA KECIL	494.220.000,00	452.129.664,00	(42.090.336,00)	91,48	
2.17.07.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	494.220.000,00	452.129.664,00	(42.090.336,00)	91,48	
2.17.07.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.220.000,00	452.129.664,00	(42.090.336,00)	91,48	
2.17.07.1.01.0006	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	547.700.000,00	506.020.400,00	(41.679.600,00)	92,39	
2.17.07.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	547.700.000,00	506.020.400,00	(41.679.600,00)	92,39	
2.17.07.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.700.000,00	506.020.400,00	(41.679.600,00)	92,39	
2.17.07.1.01.0010	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL USAHA KECIL	45.955.000,00	43.529.000,00	(2.426.000,00)	94,72	
2.17.07.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	45.955.000,00	43.529.000,00	(2.426.000,00)	94,72	
2.17.07.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.955.000,00	43.529.000,00	(2.426.000,00)	94,72	
2.17.07.1.01.0011	FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.787.425.600,00	4.228.196.561,00	(559.229.039,00)	88,32	
2.17.08.1.01	PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH	4.787.425.600,00	4.228.196.561,00	(559.229.039,00)	88,32	
2.17.08.1.01.0001	PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	4.601.837.600,00	4.050.825.561,00	(551.012.039,00)	88,03	
2.17.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.601.837.600,00	4.050.825.561,00	(551.012.039,00)	88,03	
2.17.08.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.601.837.600,00	4.050.825.561,00	(551.012.039,00)	88,03	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.08.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0002	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN LITERASI HUKUM DAN BANTUAN PENYELESAIAN PERKARA BAGI PELAKU UMKMRNN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0003	PENGEMBANGAN USAHA KECIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBASI SECARA TERPADU DAN BERJENJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0005	PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	185.588.000,00	177.371.000,00	(8.217.000,00)	95,57	
2.17.08.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	185.588.000,00	177.371.000,00	(8.217.000,00)	95,57	
2.17.08.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.588.000,00	177.371.000,00	(8.217.000,00)	95,57	
2.17.08.1.01.0006	FASILITASI INKUBATOR USAHA KECIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	34.485.845.802,00	30.655.055.153,00	(3.830.790.649,00)	88,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.485.845.802,00)	(30.655.055.153,00)	3.830.790.649,00	88,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.485.845.802,00)	(30.655.055.153,00)	3.830.790.649,00	88,89	

2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Satuan Kerja : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.290.838.396,00	21.239.322.714,00	(1.051.515.682,00)	95,28	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.18.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.600.000,00	51.507.500,00	(3.092.500,00)	94,34	
2.18.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.200.000,00	10.500.000,00	(2.700.000,00)	79,55	
2.18.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	10.500.000,00	(2.700.000,00)	79,55	
2.18.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	10.500.000,00	(2.700.000,00)	79,55	
2.18.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	
2.18.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	
2.18.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	
2.18.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	
2.18.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	
2.18.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.649.350,00	(50.650,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.708.800,00	(291.200,00)	94,18	
2.18.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.708.800,00	(291.200,00)	94,18	
2.18.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.708.800,00	(291.200,00)	94,18	
2.18.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.400.084.000,00	17.240.095.901,00	(159.988.099,00)	99,08	
2.18.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	17.116.200.000,00	16.956.231.901,00	(159.968.099,00)	99,07	
2.18.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.116.200.000,00	16.956.231.901,00	(159.968.099,00)	99,07	
2.18.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	17.116.200.000,00	16.956.231.901,00	(159.968.099,00)	99,07	
2.18.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	274.820.000,00	274.800.000,00	(20.000,00)	99,99	
2.18.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	274.820.000,00	274.800.000,00	(20.000,00)	99,99	
2.18.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.820.000,00	274.800.000,00	(20.000,00)	99,99	
2.18.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.468.000,00	4.468.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.468.000,00	4.468.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.000,00	4.468.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.596.000,00	4.596.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	4.596.000,00	4.596.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.000,00	4.596.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.700.000,00	7.633.470,00	(15.066.530,00)	33,63	
2.18.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	7.700.000,00	7.633.470,00	(66.530,00)	99,14	
2.18.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.700.000,00	7.633.470,00	(66.530,00)	99,14	
2.18.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.633.470,00	(66.530,00)	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
2.18.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
2.18.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
2.18.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	337.745.000,00	277.884.314,00	(59.860.686,00)	82,28	
2.18.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.700.000,00	10.735.191,00	(1.964.809,00)	84,53	
2.18.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	10.735.191,00	(1.964.809,00)	84,53	
2.18.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	10.735.191,00	(1.964.809,00)	84,53	
2.18.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.056.000,00	66.378.817,00	(8.677.183,00)	88,44	
2.18.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.056.000,00	66.378.817,00	(8.677.183,00)	88,44	
2.18.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.056.000,00	66.378.817,00	(8.677.183,00)	88,44	
2.18.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	79.229.000,00	67.114.500,00	(12.114.500,00)	84,71	
2.18.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.050.000,00	3.670.000,00	(11.380.000,00)	24,39	
2.18.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	3.670.000,00	(11.380.000,00)	24,39	
2.18.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	64.179.000,00	63.444.500,00	(734.500,00)	98,86	
2.18.01.1.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.179.000,00	63.444.500,00	(734.500,00)	98,86	
2.18.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.682.000,00	26.314.296,00	(1.367.704,00)	95,06	
2.18.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	27.682.000,00	26.314.296,00	(1.367.704,00)	95,06	
2.18.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.682.000,00	26.314.296,00	(1.367.704,00)	95,06	
2.18.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	133.078.000,00	98.841.510,00	(34.236.490,00)	74,27	
2.18.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	133.078.000,00	98.841.510,00	(34.236.490,00)	74,27	
2.18.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.078.000,00	98.841.510,00	(34.236.490,00)	74,27	
2.18.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	
2.18.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	
2.18.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	
2.18.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.579.553.400,00	1.238.216.220,00	(341.337.180,00)	78,39	
2.18.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	709.711.000,00	661.300.000,00	(48.411.000,00)	93,18	
2.18.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	709.711.000,00	661.300.000,00	(48.411.000,00)	93,18	
2.18.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	709.711.000,00	661.300.000,00	(48.411.000,00)	93,18	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	869.842.400,00	576.916.220,00	(292.926.180,00)	66,32	
2.18.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.242.400,00	8.880.000,00	(1.362.400,00)	86,70	
2.18.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.242.400,00	8.880.000,00	(1.362.400,00)	86,70	
2.18.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	859.600.000,00	568.036.220,00	(291.563.780,00)	66,08	
2.18.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	859.600.000,00	568.036.220,00	(291.563.780,00)	66,08	
2.18.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.833.803.996,00	1.592.117.302,00	(241.686.694,00)	86,82	
2.18.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	238.284.686,00	212.477.016,00	(25.807.670,00)	89,17	
2.18.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	238.284.686,00	212.477.016,00	(25.807.670,00)	89,17	
2.18.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.284.686,00	212.477.016,00	(25.807.670,00)	89,17	
2.18.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.595.519.310,00	1.379.640.286,00	(215.879.024,00)	86,47	
2.18.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.595.519.310,00	1.379.640.286,00	(215.879.024,00)	86,47	
2.18.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.519.310,00	1.379.640.286,00	(215.879.024,00)	86,47	
2.18.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.062.352.000,00	831.868.007,00	(230.483.993,00)	78,30	
2.18.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	205.460.000,00	196.479.800,00	(8.980.200,00)	95,63	
2.18.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	205.460.000,00	196.479.800,00	(8.980.200,00)	95,63	
2.18.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.460.000,00	196.479.800,00	(8.980.200,00)	95,63	
2.18.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	147.960.000,00	135.266.650,00	(12.693.350,00)	91,42	
2.18.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	147.960.000,00	135.266.650,00	(12.693.350,00)	91,42	
2.18.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.960.000,00	135.266.650,00	(12.693.350,00)	91,42	
2.18.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	78.708.000,00	73.914.602,00	(4.793.398,00)	93,91	
2.18.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	78.708.000,00	73.914.602,00	(4.793.398,00)	93,91	
2.18.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.708.000,00	73.914.602,00	(4.793.398,00)	93,91	
2.18.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	630.224.000,00	426.206.955,00	(204.017.045,00)	67,63	
2.18.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	630.224.000,00	426.206.955,00	(204.017.045,00)	67,63	
2.18.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.224.000,00	426.206.955,00	(204.017.045,00)	67,63	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	641.597.000,00	568.664.398,00	(72.932.602,00)	88,63	
2.18.02.1.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	275.000.000,00	210.053.485,00	(64.946.515,00)	76,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.02.1.01.0003	FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	275.000.000,00	210.053.485,00	(64.946.515,00)	76,38	
2.18.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	210.053.485,00	(64.946.515,00)	76,38	
2.18.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	210.053.485,00	(64.946.515,00)	76,38	
2.18.02.1.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	366.597.000,00	358.610.913,00	(7.986.087,00)	97,82	
2.18.02.1.02.0001	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	366.597.000,00	358.610.913,00	(7.986.087,00)	97,82	
2.18.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	366.597.000,00	358.610.913,00	(7.986.087,00)	97,82	
2.18.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.597.000,00	358.610.913,00	(7.986.087,00)	97,82	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.318.949.800,00	2.175.094.804,00	(143.854.996,00)	93,80	
2.18.03.1.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	2.318.949.800,00	2.175.094.804,00	(143.854.996,00)	93,80	
2.18.03.1.01.0002	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	1.918.949.800,00	1.787.331.806,00	(131.617.994,00)	93,14	
2.18.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.918.949.800,00	1.787.331.806,00	(131.617.994,00)	93,14	
2.18.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.949.800,00	1.787.331.806,00	(131.617.994,00)	93,14	
2.18.03.1.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.03.1.01.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.03.1.01.0003	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	400.000.000,00	387.762.998,00	(12.237.002,00)	96,94	
2.18.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	387.762.998,00	(12.237.002,00)	96,94	
2.18.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	387.762.998,00	(12.237.002,00)	96,94	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.567.280,00	1.690.557.280,00	(305.010.000,00)	84,72	
2.18.04.1.02	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	1.995.567.280,00	1.690.557.280,00	(305.010.000,00)	84,72	
2.18.04.1.02.0006	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	700.000.000,00	584.275.162,00	(115.724.838,00)	83,47	
2.18.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	584.275.162,00	(115.724.838,00)	83,47	
2.18.04.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	584.275.162,00	(115.724.838,00)	83,47	
2.18.04.1.02.0007	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1.045.520.000,00	889.171.588,00	(156.348.412,00)	85,05	
2.18.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.045.520.000,00	889.171.588,00	(156.348.412,00)	85,05	
2.18.04.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.520.000,00	889.171.588,00	(156.348.412,00)	85,05	
2.18.04.1.02.0008	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	250.047.280,00	217.110.530,00	(32.936.750,00)	86,83	
2.18.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	250.047.280,00	217.110.530,00	(32.936.750,00)	86,83	
2.18.04.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.047.280,00	217.110.530,00	(32.936.750,00)	86,83	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.04.1.02.0008.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.04.1.02.0008.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.207.200,00	1.026.703.420,00	(237.503.780,00)	81,21	
2.18.05.1.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	1.264.207.200,00	1.026.703.420,00	(237.503.780,00)	81,21	
2.18.05.1.01.0004	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	120.873.000,00	54.862.375,00	(66.010.625,00)	45,39	
2.18.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	120.873.000,00	54.862.375,00	(66.010.625,00)	45,39	
2.18.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.873.000,00	54.862.375,00	(66.010.625,00)	45,39	
2.18.05.1.01.0005	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	60.710.000,00	43.420.000,00	(17.290.000,00)	71,52	
2.18.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	60.710.000,00	43.420.000,00	(17.290.000,00)	71,52	
2.18.05.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.710.000,00	43.420.000,00	(17.290.000,00)	71,52	
2.18.05.1.01.0006	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	1.082.624.200,00	928.421.045,00	(154.203.155,00)	85,76	
2.18.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.082.624.200,00	928.421.045,00	(154.203.155,00)	85,76	
2.18.05.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.624.200,00	928.421.045,00	(154.203.155,00)	85,76	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	195.240.000,00	191.428.000,00	(3.812.000,00)	98,05	
2.18.06.1.01	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	195.240.000,00	191.428.000,00	(3.812.000,00)	98,05	
2.18.06.1.01.0002	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	195.240.000,00	191.428.000,00	(3.812.000,00)	98,05	
2.18.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	195.240.000,00	191.428.000,00	(3.812.000,00)	98,05	
2.18.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.240.000,00	191.428.000,00	(3.812.000,00)	98,05	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	28.706.399.676,00	26.891.770.616,00	(1.814.629.060,00)	93,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.706.399.676,00)	(26.891.770.616,00)	1.814.629.060,00	93,68	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(28.706.399.676,00)	(26.891.770.616,00)	1.814.629.060,00	93,68	

2.19.0.00.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Satuan Kerja : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.849.014.500,00	19.850.292.568,00	(1.998.721.932,00)	90,85	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.19.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	666.213.000,00	580.787.414,00	(85.425.586,00)	87,18	
2.19.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	56.746.400,00	56.456.659,00	(289.741,00)	99,49	
2.19.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.746.400,00	56.456.659,00	(289.741,00)	99,49	
2.19.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.746.400,00	56.456.659,00	(289.741,00)	99,49	
2.19.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	15.312.000,00	15.135.904,00	(176.096,00)	98,85	
2.19.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.312.000,00	15.135.904,00	(176.096,00)	98,85	
2.19.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.312.000,00	15.135.904,00	(176.096,00)	98,85	
2.19.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	13.506.000,00	13.318.732,00	(187.268,00)	98,61	
2.19.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.506.000,00	13.318.732,00	(187.268,00)	98,61	
2.19.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.506.000,00	13.318.732,00	(187.268,00)	98,61	
2.19.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.287.000,00	6.220.944,00	(66.056,00)	98,95	
2.19.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.287.000,00	6.220.944,00	(66.056,00)	98,95	
2.19.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.287.000,00	6.220.944,00	(66.056,00)	98,95	
2.19.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.055.000,00	6.959.760,00	(95.240,00)	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.055.000,00	6.959.760,00	(95.240,00)	98,65	
2.19.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	6.959.760,00	(95.240,00)	98,65	
2.19.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.902.400,00	36.534.433,00	(367.967,00)	99,00	
2.19.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	36.902.400,00	36.534.433,00	(367.967,00)	99,00	
2.19.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.902.400,00	36.534.433,00	(367.967,00)	99,00	
2.19.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	281.940.000,00	263.891.913,00	(18.048.087,00)	93,60	
2.19.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	281.940.000,00	263.891.913,00	(18.048.087,00)	93,60	
2.19.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.940.000,00	263.891.913,00	(18.048.087,00)	93,60	
2.19.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	22.406.000,00	19.431.900,00	(2.974.100,00)	86,73	
2.19.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	22.406.000,00	19.431.900,00	(2.974.100,00)	86,73	
2.19.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.406.000,00	19.431.900,00	(2.974.100,00)	86,73	
2.19.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	39.275.800,00	31.487.800,00	(7.788.000,00)	80,17	
2.19.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	39.275.800,00	31.487.800,00	(7.788.000,00)	80,17	
2.19.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.275.800,00	31.487.800,00	(7.788.000,00)	80,17	
2.19.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	186.782.400,00	131.349.369,00	(55.433.031,00)	70,32	
2.19.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	186.782.400,00	131.349.369,00	(55.433.031,00)	70,32	
2.19.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.782.400,00	131.349.369,00	(55.433.031,00)	70,32	
2.19.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.575.512.500,00	14.237.522.318,00	(1.337.990.182,00)	91,41	
2.19.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35	
2.19.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35	
2.19.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	(1.316.165.602,00)	91,35	
2.19.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	328.732.500,00	314.714.500,00	(14.018.000,00)	95,74	
2.19.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	328.732.500,00	314.714.500,00	(14.018.000,00)	95,74	
2.19.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.732.500,00	314.714.500,00	(14.018.000,00)	95,74	
2.19.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.200.000,00	6.637.500,00	(3.562.500,00)	65,07	
2.19.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	6.637.500,00	(3.562.500,00)	65,07	
2.19.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	6.637.500,00	(3.562.500,00)	65,07	
2.19.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	4.100.000,00	3.035.970,00	(1.064.030,00)	74,05	
2.19.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	3.035.970,00	(1.064.030,00)	74,05	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.035.970,00	(1.064.030,00)	74,05	
2.19.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
2.19.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
2.19.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
2.19.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	3.000.000,00	2.688.000,00	(312.000,00)	89,60	
2.19.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.688.000,00	(312.000,00)	89,60	
2.19.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.688.000,00	(312.000,00)	89,60	
2.19.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	6.610.000,00	6.217.450,00	(392.550,00)	94,06	
2.19.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.610.000,00	6.217.450,00	(392.550,00)	94,06	
2.19.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	6.217.450,00	(392.550,00)	94,06	
2.19.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.620.000,00	1.594.500,00	(25.500,00)	98,43	
2.19.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.594.500,00	(25.500,00)	98,43	
2.19.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.594.500,00	(25.500,00)	98,43	
2.19.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.500.200,00	0,00	(8.500.200,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	1.000.200,00	0,00	(1.000.200,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.200,00	0,00	(1.000.200,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.200,00	0,00	(1.000.200,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
2.19.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
2.19.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	736.708.680,00	639.620.801,00	(97.087.879,00)	86,82	
2.19.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.655.000,00	17.278.000,00	(377.000,00)	97,86	
2.19.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.655.000,00	17.278.000,00	(377.000,00)	97,86	
2.19.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.655.000,00	17.278.000,00	(377.000,00)	97,86	
2.19.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	89.992.680,00	88.627.910,00	(1.364.770,00)	98,48	
2.19.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	89.992.680,00	88.627.910,00	(1.364.770,00)	98,48	
2.19.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.992.680,00	88.627.910,00	(1.364.770,00)	98,48	
2.19.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	71.766.000,00	71.059.750,00	(706.250,00)	99,02	
2.19.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	71.766.000,00	71.059.750,00	(706.250,00)	99,02	
2.19.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.766.000,00	71.059.750,00	(706.250,00)	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	357.420.000,00	325.247.400,00	(32.172.600,00)	91,00	
2.19.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	357.420.000,00	325.247.400,00	(32.172.600,00)	91,00	
2.19.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.420.000,00	325.247.400,00	(32.172.600,00)	91,00	
2.19.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.800.000,00	37.123.641,00	(1.676.359,00)	95,68	
2.19.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	38.800.000,00	37.123.641,00	(1.676.359,00)	95,68	
2.19.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	37.123.641,00	(1.676.359,00)	95,68	
2.19.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	9.840.000,00	9.081.700,00	(758.300,00)	92,29	
2.19.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	9.840.000,00	9.081.700,00	(758.300,00)	92,29	
2.19.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	9.081.700,00	(758.300,00)	92,29	
2.19.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	151.235.000,00	91.202.400,00	(60.032.600,00)	60,31	
2.19.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	151.235.000,00	91.202.400,00	(60.032.600,00)	60,31	
2.19.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.235.000,00	91.202.400,00	(60.032.600,00)	60,31	
2.19.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12.663.540,00	0,00	(12.663.540,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.663.540,00	0,00	(12.663.540,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.227.540,00	0,00	(2.227.540,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.227.540,00	0,00	(2.227.540,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.436.000,00	0,00	(10.436.000,00)	0,00	
2.19.01.1.07.0006.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.031.850.980,00	2.760.978.150,00	(270.872.830,00)	91,07	
2.19.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.018.984.180,00	911.038.470,00	(107.945.710,00)	89,41	
2.19.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.018.984.180,00	911.038.470,00	(107.945.710,00)	89,41	
2.19.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.984.180,00	911.038.470,00	(107.945.710,00)	89,41	
2.19.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.012.866.800,00	1.849.939.680,00	(162.927.120,00)	91,91	
2.19.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.012.866.800,00	1.849.939.680,00	(162.927.120,00)	91,91	
2.19.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.012.866.800,00	1.849.939.680,00	(162.927.120,00)	91,91	
2.19.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.817.565.600,00	1.631.383.885,00	(186.181.715,00)	89,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.409.800,00	58.693.500,00	(8.716.300,00)	87,07	
2.19.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	67.409.800,00	58.693.500,00	(8.716.300,00)	87,07	
2.19.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.409.800,00	58.693.500,00	(8.716.300,00)	87,07	
2.19.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	986.296.000,00	831.631.385,00	(154.664.615,00)	84,32	
2.19.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	986.296.000,00	831.631.385,00	(154.664.615,00)	84,32	
2.19.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.296.000,00	831.631.385,00	(154.664.615,00)	84,32	
2.19.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	58.439.800,00	57.059.000,00	(1.380.800,00)	97,64	
2.19.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	58.439.800,00	57.059.000,00	(1.380.800,00)	97,64	
2.19.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.439.800,00	57.059.000,00	(1.380.800,00)	97,64	
2.19.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	705.420.000,00	684.000.000,00	(21.420.000,00)	96,96	
2.19.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	705.420.000,00	684.000.000,00	(21.420.000,00)	96,96	
2.19.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.420.000,00	684.000.000,00	(21.420.000,00)	96,96	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	909.746.800,00	858.306.737,00	(51.440.063,00)	94,35	
2.19.02.1.01	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI	305.513.300,00	271.530.908,00	(33.982.392,00)	88,88	
2.19.02.1.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0010	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN POTENSI PEMUDA	57.500.000,00	52.500.000,00	(5.000.000,00)	91,30	
2.19.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	52.500.000,00	(5.000.000,00)	91,30	
2.19.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	52.500.000,00	(5.000.000,00)	91,30	
2.19.02.1.01.0011	PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN SERTA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.02.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.02.1.01.0012	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT PROVINSI	941.100,00	0,00	(941.100,00)	0,00	
2.19.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	941.100,00	0,00	(941.100,00)	0,00	
2.19.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	941.100,00	0,00	(941.100,00)	0,00	
2.19.02.1.01.0013	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI	67.072.200,00	59.233.020,00	(7.839.180,00)	88,31	
2.19.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	67.072.200,00	59.233.020,00	(7.839.180,00)	88,31	
2.19.02.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.072.200,00	59.233.020,00	(7.839.180,00)	88,31	
2.19.02.1.01.0015	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRUSAHA MUDA TINGKAT PROVINSI	180.000.000,00	159.797.888,00	(20.202.112,00)	88,78	
2.19.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	159.797.888,00	(20.202.112,00)	88,78	
2.19.02.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	159.797.888,00	(20.202.112,00)	88,78	
2.19.02.1.02	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	604.233.500,00	586.775.829,00	(17.457.671,00)	97,11	
2.19.02.1.02.0004	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT PROVINSI	604.233.500,00	586.775.829,00	(17.457.671,00)	97,11	
2.19.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	604.233.500,00	586.775.829,00	(17.457.671,00)	97,11	
2.19.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.233.500,00	586.775.829,00	(17.457.671,00)	97,11	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	30.697.249.400,00	29.768.423.417,00	(928.825.983,00)	96,97	
2.19.03.1.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	2.641.404.800,00	2.501.831.281,00	(139.573.519,00)	94,72	
2.19.03.1.01.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS	1.233.374.900,00	1.171.366.931,00	(62.007.969,00)	94,97	
2.19.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.233.374.900,00	1.171.366.931,00	(62.007.969,00)	94,97	
2.19.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.374.900,00	1.171.366.931,00	(62.007.969,00)	94,97	
2.19.03.1.01.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT PROVINSI	1.408.029.900,00	1.330.464.350,00	(77.565.550,00)	94,49	
2.19.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	627.314.900,00	586.857.550,00	(40.457.350,00)	93,55	
2.19.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.314.900,00	586.857.550,00	(40.457.350,00)	93,55	
2.19.03.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	
2.19.03.1.01.0004.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	780.715.000,00	743.606.800,00	(37.108.200,00)	95,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.03.1.02	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	(38.154.394,00)	99,41	
2.19.03.1.02.0004	KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	(38.154.394,00)	99,41	
2.19.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	(38.154.394,00)	99,41	
2.19.03.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	(38.154.394,00)	99,41	
2.19.03.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.02.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.1.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	5.957.917.000,00	5.658.200.900,00	(299.716.100,00)	94,97	
2.19.03.1.03.0001	SELEKSI ATLET DAERAH	46.546.000,00	43.200.000,00	(3.346.000,00)	92,81	
2.19.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.546.000,00	43.200.000,00	(3.346.000,00)	92,81	
2.19.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.546.000,00	43.200.000,00	(3.346.000,00)	92,81	
2.19.03.1.03.0006	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	1.672.001.000,00	1.663.858.700,00	(8.142.300,00)	99,51	
2.19.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.672.001.000,00	1.663.858.700,00	(8.142.300,00)	99,51	
2.19.03.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.672.001.000,00	1.663.858.700,00	(8.142.300,00)	99,51	
2.19.03.1.03.0007	PEMUSATAN LATIHAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAAGAAN (SPORT SCIENCE)	66.724.000,00	61.380.000,00	(5.344.000,00)	91,99	
2.19.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	66.724.000,00	61.380.000,00	(5.344.000,00)	91,99	
2.19.03.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.724.000,00	61.380.000,00	(5.344.000,00)	91,99	
2.19.03.1.03.0009	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI PROVINSI	4.172.646.000,00	3.889.762.200,00	(282.883.800,00)	93,22	
2.19.03.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.172.646.000,00	3.889.762.200,00	(282.883.800,00)	93,22	
2.19.03.1.03.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.172.646.000,00	3.889.762.200,00	(282.883.800,00)	93,22	
2.19.03.1.04	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	15.600.772.000,00	15.149.390.030,00	(451.381.970,00)	97,11	
2.19.03.1.04.0003	PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAAGAAN PROVINSI DENGAN LEMBAGA TERKAIT	15.543.708.000,00	15.111.134.330,00	(432.573.670,00)	97,22	
2.19.03.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.543.708.000,00	15.111.134.330,00	(432.573.670,00)	97,22	
2.19.03.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.708.000,00	269.104.200,00	(24.603.800,00)	91,62	
2.19.03.1.04.0003.5.1.05	Belanja Hibah	15.250.000.000,00	14.842.030.130,00	(407.969.870,00)	97,32	
2.19.03.1.04.0005	PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN ORGANISASI KEOLAHRAAGAAN DI PROVINSI	57.064.000,00	38.255.700,00	(18.808.300,00)	67,04	
2.19.03.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	57.064.000,00	38.255.700,00	(18.808.300,00)	67,04	
2.19.03.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.064.000,00	38.255.700,00	(18.808.300,00)	67,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	245.706.702,00	(4.293.298,00)	98,28	
2.19.04.1.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	245.706.702,00	(4.293.298,00)	98,28	
2.19.04.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPRAMUKAAN BERBASIS ELEKTRONIK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.04.1.01.0002	PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN PROVINSI	250.000.000,00	245.706.702,00	(4.293.298,00)	98,28	
2.19.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	245.706.702,00	(4.293.298,00)	98,28	
2.19.04.1.01.0002.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	245.706.702,00	(4.293.298,00)	98,28	
2.19.04.1.01.0003	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	53.706.010.700,00	50.722.729.424,00	(2.983.281.276,00)	94,45	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.706.010.700,00)	(50.722.729.424,00)	2.983.281.276,00	94,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(53.706.010.700,00)	(50.722.729.424,00)	2.983.281.276,00	94,45	

2.23.2.24.0.00.02.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Satuan Kerja : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.962.272.100,00	22.773.988.521,00	(1.188.283.579,00)	95,04	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2.23.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	172.841.000,00	164.442.627,00	(8.398.373,00)	95,14	
2.23.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.809.000,00	8.808.832,00	(168,00)	100,00	
2.23.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.809.000,00	8.808.832,00	(168,00)	100,00	
2.23.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.809.000,00	8.808.832,00	(168,00)	100,00	
2.23.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.063.000,00	5.050.000,00	(13.000,00)	99,74	
2.23.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.063.000,00	5.050.000,00	(13.000,00)	99,74	
2.23.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.063.000,00	5.050.000,00	(13.000,00)	99,74	
2.23.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.23.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.23.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.23.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.23.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.23.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	5.633.000,00	(2.000,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.064.000,00	9.029.860,00	(34.140,00)	99,62	
2.23.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.064.000,00	9.029.860,00	(34.140,00)	99,62	
2.23.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.064.000,00	9.029.860,00	(34.140,00)	99,62	
2.23.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.693.000,00	57.373.080,00	(3.319.920,00)	94,53	
2.23.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	60.693.000,00	57.373.080,00	(3.319.920,00)	94,53	
2.23.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.693.000,00	57.373.080,00	(3.319.920,00)	94,53	
2.23.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	25.452.200,00	23.281.790,00	(2.170.410,00)	91,47	
2.23.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.452.200,00	23.281.790,00	(2.170.410,00)	91,47	
2.23.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.452.200,00	23.281.790,00	(2.170.410,00)	91,47	
2.23.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	47.196.800,00	44.340.065,00	(2.856.735,00)	93,95	
2.23.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	47.196.800,00	44.340.065,00	(2.856.735,00)	93,95	
2.23.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.196.800,00	44.340.065,00	(2.856.735,00)	93,95	
2.23.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.595.720.000,00	15.928.798.440,00	(666.921.560,00)	95,98	
2.23.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.285.600.000,00	15.641.668.440,00	(643.931.560,00)	96,05	
2.23.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.285.600.000,00	15.641.668.440,00	(643.931.560,00)	96,05	
2.23.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.285.600.000,00	15.641.668.440,00	(643.931.560,00)	96,05	
2.23.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	275.520.000,00	252.730.000,00	(22.790.000,00)	91,73	
2.23.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	275.520.000,00	252.730.000,00	(22.790.000,00)	91,73	
2.23.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.520.000,00	252.730.000,00	(22.790.000,00)	91,73	
2.23.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	90,91	
2.23.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	90,91	
2.23.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	90,91	
2.23.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	72.250.000,00	70.436.000,00	(1.814.000,00)	97,49	
2.23.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	57.250.000,00	55.436.000,00	(1.814.000,00)	96,83	
2.23.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	57.250.000,00	55.436.000,00	(1.814.000,00)	96,83	
2.23.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.250.000,00	55.436.000,00	(1.814.000,00)	96,83	
2.23.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	659.137.000,00	645.174.200,00	(13.962.800,00)	97,88	
2.23.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.113.000,00	16.817.500,00	(295.500,00)	98,27	
2.23.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.113.000,00	16.817.500,00	(295.500,00)	98,27	
2.23.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.113.000,00	16.817.500,00	(295.500,00)	98,27	
2.23.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	156.849.000,00	154.812.900,00	(2.036.100,00)	98,70	
2.23.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	156.849.000,00	154.812.900,00	(2.036.100,00)	98,70	
2.23.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.849.000,00	154.812.900,00	(2.036.100,00)	98,70	
2.23.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.445.000,00	58.639.800,00	(1.805.200,00)	97,01	
2.23.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	60.445.000,00	58.639.800,00	(1.805.200,00)	97,01	
2.23.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.445.000,00	58.639.800,00	(1.805.200,00)	97,01	
2.23.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	157.428.000,00	154.302.400,00	(3.125.600,00)	98,01	
2.23.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	157.428.000,00	154.302.400,00	(3.125.600,00)	98,01	
2.23.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.428.000,00	154.302.400,00	(3.125.600,00)	98,01	
2.23.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	103.404.000,00	101.169.500,00	(2.234.500,00)	97,84	
2.23.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	103.404.000,00	101.169.500,00	(2.234.500,00)	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.404.000,00	101.169.500,00	(2.234.500,00)	97,84	
2.23.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.658.000,00	157.153.100,00	(2.504.900,00)	98,43	
2.23.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	159.658.000,00	157.153.100,00	(2.504.900,00)	98,43	
2.23.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.658.000,00	157.153.100,00	(2.504.900,00)	98,43	
2.23.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.240.000,00	2.279.000,00	(1.961.000,00)	53,75	
2.23.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	4.240.000,00	2.279.000,00	(1.961.000,00)	53,75	
2.23.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	2.279.000,00	(1.961.000,00)	53,75	
2.23.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.035.004.400,00	1.024.391.286,00	(10.613.114,00)	98,97	
2.23.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	783.892.000,00	779.220.000,00	(4.672.000,00)	99,40	
2.23.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	783.892.000,00	779.220.000,00	(4.672.000,00)	99,40	
2.23.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	783.892.000,00	779.220.000,00	(4.672.000,00)	99,40	
2.23.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	251.112.400,00	245.171.286,00	(5.941.114,00)	97,63	
2.23.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.384.400,00	0,00	(2.384.400,00)	0,00	
2.23.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.384.400,00	0,00	(2.384.400,00)	0,00	
2.23.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	248.728.000,00	245.171.286,00	(3.556.714,00)	98,57	
2.23.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.728.000,00	245.171.286,00	(3.556.714,00)	98,57	
2.23.01.1.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.07.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.132.123.700,00	2.773.194.521,00	(358.929.179,00)	88,54	
2.23.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.516.104.000,00	1.367.431.131,00	(148.672.869,00)	90,19	
2.23.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.516.104.000,00	1.367.431.131,00	(148.672.869,00)	90,19	
2.23.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.104.000,00	1.367.431.131,00	(148.672.869,00)	90,19	
2.23.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	254.499.000,00	241.833.000,00	(12.666.000,00)	95,02	
2.23.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	254.499.000,00	241.833.000,00	(12.666.000,00)	95,02	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.499.000,00	241.833.000,00	(12.666.000,00)	95,02	
2.23.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.361.520.700,00	1.163.930.390,00	(197.590.310,00)	85,49	
2.23.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.361.520.700,00	1.163.930.390,00	(197.590.310,00)	85,49	
2.23.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.520.700,00	1.163.930.390,00	(197.590.310,00)	85,49	
2.23.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.295.196.000,00	2.167.551.447,00	(127.644.553,00)	94,44	
2.23.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	204.270.000,00	196.451.420,00	(7.818.580,00)	96,17	
2.23.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	204.270.000,00	196.451.420,00	(7.818.580,00)	96,17	
2.23.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.270.000,00	196.451.420,00	(7.818.580,00)	96,17	
2.23.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	467.740.000,00	432.013.500,00	(35.726.500,00)	92,36	
2.23.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	467.740.000,00	432.013.500,00	(35.726.500,00)	92,36	
2.23.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.740.000,00	432.013.500,00	(35.726.500,00)	92,36	
2.23.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	278.584.000,00	233.967.340,00	(44.616.660,00)	83,98	
2.23.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	278.584.000,00	233.967.340,00	(44.616.660,00)	83,98	
2.23.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.584.000,00	233.967.340,00	(44.616.660,00)	83,98	
2.23.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.344.602.000,00	1.305.119.187,00	(39.482.813,00)	97,06	
2.23.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.344.602.000,00	1.305.119.187,00	(39.482.813,00)	97,06	
2.23.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.602.000,00	1.305.119.187,00	(39.482.813,00)	97,06	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.549.233.300,00	2.275.826.622,00	(273.406.678,00)	89,27	
2.23.02.1.01	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.761.214.300,00	1.554.117.742,00	(207.096.558,00)	88,24	
2.23.02.1.01.0004	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	319.292.000,00	219.936.920,00	(99.355.080,00)	68,88	
2.23.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	319.292.000,00	219.936.920,00	(99.355.080,00)	68,88	
2.23.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.292.000,00	219.936.920,00	(99.355.080,00)	68,88	
2.23.02.1.01.0007	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	403.065.300,00	352.401.022,00	(50.664.278,00)	87,43	
2.23.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	403.065.300,00	352.401.022,00	(50.664.278,00)	87,43	
2.23.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.065.300,00	352.401.022,00	(50.664.278,00)	87,43	
2.23.02.1.01.0009	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	886.358.000,00	843.658.325,00	(42.699.675,00)	95,18	
2.23.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	284.338.000,00	272.774.051,00	(11.563.949,00)	95,93	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.338.000,00	272.774.051,00	(11.563.949,00)	95,93	
2.23.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	602.020.000,00	570.884.274,00	(31.135.726,00)	94,83	
2.23.02.1.01.0009.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.620.000,00	58.164.000,00	(4.456.000,00)	92,88	
2.23.02.1.01.0009.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	539.400.000,00	512.720.274,00	(26.679.726,00)	95,05	
2.23.02.1.01.0015	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	152.499.000,00	138.121.475,00	(14.377.525,00)	90,57	
2.23.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	152.499.000,00	138.121.475,00	(14.377.525,00)	90,57	
2.23.02.1.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.499.000,00	138.121.475,00	(14.377.525,00)	90,57	
2.23.02.1.02	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI	788.019.000,00	721.708.880,00	(66.310.120,00)	91,59	
2.23.02.1.02.0001	SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	712.240.000,00	653.008.160,00	(59.231.840,00)	91,68	
2.23.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	712.240.000,00	653.008.160,00	(59.231.840,00)	91,68	
2.23.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.240.000,00	653.008.160,00	(59.231.840,00)	91,68	
2.23.02.1.02.0003	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	56.774.000,00	51.555.910,00	(5.218.090,00)	90,81	
2.23.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	56.774.000,00	51.555.910,00	(5.218.090,00)	90,81	
2.23.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.774.000,00	51.555.910,00	(5.218.090,00)	90,81	
2.23.02.1.02.0004	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	19.005.000,00	17.144.810,00	(1.860.190,00)	90,21	
2.23.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	19.005.000,00	17.144.810,00	(1.860.190,00)	90,21	
2.23.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.005.000,00	17.144.810,00	(1.860.190,00)	90,21	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	870.645.700,00	757.202.076,00	(113.443.624,00)	86,97	
2.24.02.1.01	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI	417.460.700,00	335.969.800,00	(81.490.900,00)	80,48	
2.24.02.1.01.0004	PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	71.850.800,00	54.303.700,00	(17.547.100,00)	75,58	
2.24.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	71.850.800,00	54.303.700,00	(17.547.100,00)	75,58	
2.24.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.850.800,00	54.303.700,00	(17.547.100,00)	75,58	
2.24.02.1.01.0006	PENCIPTAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS	140.080.800,00	110.381.600,00	(29.699.200,00)	78,80	
2.24.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	140.080.800,00	110.381.600,00	(29.699.200,00)	78,80	
2.24.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.080.800,00	110.381.600,00	(29.699.200,00)	78,80	
2.24.02.1.01.0012	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEARSIPAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	205.529.100,00	171.284.500,00	(34.244.600,00)	83,34	
2.24.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	205.529.100,00	171.284.500,00	(34.244.600,00)	83,34	
2.24.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.529.100,00	171.284.500,00	(34.244.600,00)	83,34	
2.24.02.1.02	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI	302.659.000,00	278.641.900,00	(24.017.100,00)	92,06	
2.24.02.1.02.0001	PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI	40.018.000,00	38.916.900,00	(1.101.100,00)	97,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.24.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	40.018.000,00	38.916.900,00	(1.101.100,00)	97,25	
2.24.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.018.000,00	38.916.900,00	(1.101.100,00)	97,25	
2.24.02.1.02.0005	AKUISISI ARSIP STATIS	262.641.000,00	239.725.000,00	(22.916.000,00)	91,27	
2.24.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	258.471.000,00	235.675.000,00	(22.796.000,00)	91,18	
2.24.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.471.000,00	235.675.000,00	(22.796.000,00)	91,18	
2.24.02.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12	
2.24.02.1.02.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.170.000,00	4.050.000,00	(120.000,00)	97,12	
2.24.02.1.03	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI	150.526.000,00	142.590.376,00	(7.935.624,00)	94,73	
2.24.02.1.03.0001	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH PROVINSI MELALUI JIKN	150.526.000,00	142.590.376,00	(7.935.624,00)	94,73	
2.24.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.526.000,00	142.590.376,00	(7.935.624,00)	94,73	
2.24.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.526.000,00	142.590.376,00	(7.935.624,00)	94,73	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	549.336.000,00	488.989.629,00	(60.346.371,00)	89,01	
2.24.03.1.01	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN	124.412.000,00	108.211.144,00	(16.200.856,00)	86,98	
2.24.03.1.01.0003	PELAKSANA PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN	50.000.000,00	42.959.124,00	(7.040.876,00)	85,92	
2.24.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.959.124,00	(7.040.876,00)	85,92	
2.24.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.959.124,00	(7.040.876,00)	85,92	
2.24.03.1.01.0004	PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	74.412.000,00	65.252.020,00	(9.159.980,00)	87,69	
2.24.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	74.412.000,00	65.252.020,00	(9.159.980,00)	87,69	
2.24.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.412.000,00	65.252.020,00	(9.159.980,00)	87,69	
2.24.03.1.04	AUTENTIFIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA YANG DIKELOLA OLEH LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI	424.924.000,00	380.778.485,00	(44.145.515,00)	89,61	
2.24.03.1.04.0001	PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP	372.584.000,00	345.461.600,00	(27.122.400,00)	92,72	
2.24.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	372.584.000,00	345.461.600,00	(27.122.400,00)	92,72	
2.24.03.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.584.000,00	345.461.600,00	(27.122.400,00)	92,72	
2.24.03.1.04.0002	PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP	52.340.000,00	35.316.885,00	(17.023.115,00)	67,48	
2.24.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	52.340.000,00	35.316.885,00	(17.023.115,00)	67,48	
2.24.03.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.340.000,00	35.316.885,00	(17.023.115,00)	67,48	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	27.931.487.100,00	26.296.006.848,00	(1.635.480.252,00)	94,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.931.487.100,00)	(26.296.006.848,00)	1.635.480.252,00	94,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.931.487.100,00)	(26.296.006.848,00)	1.635.480.252,00	94,14	

3.25.0.00.0.00.01.0000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Satuan Kerja : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
3.25.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.386.558.000,00	1.338.819.932,00	(47.738.068,00)	96,56	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.386.558.000,00	1.338.819.932,00	(47.738.068,00)	96,56	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.386.558.000,00	1.338.819.932,00	(47.738.068,00)	96,56	
5	BELANJA DAERAH					
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.972.548.360,00	41.650.755.653,00	(3.321.792.707,00)	92,61	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.25.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	398.818.000,00	356.493.600,00	(42.324.400,00)	89,39	
3.25.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	64.824.000,00	58.877.900,00	(5.946.100,00)	90,83	
3.25.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	64.824.000,00	58.877.900,00	(5.946.100,00)	90,83	
3.25.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.824.000,00	58.877.900,00	(5.946.100,00)	90,83	
3.25.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.320.000,00	0,00	(6.320.000,00)	0,00	
3.25.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.320.000,00	0,00	(6.320.000,00)	0,00	
3.25.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	0,00	(6.320.000,00)	0,00	
3.25.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.310.000,00	6.110.000,00	(200.000,00)	96,83	
3.25.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.310.000,00	6.110.000,00	(200.000,00)	96,83	
3.25.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	6.110.000,00	(200.000,00)	96,83	
3.25.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.010.000,00	6.000.000,00	(10.000,00)	99,83	
3.25.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.010.000,00	6.000.000,00	(10.000,00)	99,83	
3.25.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	6.000.000,00	(10.000,00)	99,83	
3.25.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.739.000,00	33.585.900,00	(153.100,00)	99,55	
3.25.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	33.739.000,00	33.585.900,00	(153.100,00)	99,55	
3.25.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.739.000,00	33.585.900,00	(153.100,00)	99,55	
3.25.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.680.000,00	28.480.000,00	(1.200.000,00)	95,96	
3.25.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	29.680.000,00	28.480.000,00	(1.200.000,00)	95,96	
3.25.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.680.000,00	28.480.000,00	(1.200.000,00)	95,96	
3.25.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	239.295.000,00	210.799.800,00	(28.495.200,00)	88,09	
3.25.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	239.295.000,00	210.799.800,00	(28.495.200,00)	88,09	
3.25.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.295.000,00	210.799.800,00	(28.495.200,00)	88,09	
3.25.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	30.126.622.000,00	29.650.985.305,00	(475.636.695,00)	98,42	
3.25.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.613.200.000,00	29.154.060.305,00	(459.139.695,00)	98,45	
3.25.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.613.200.000,00	29.154.060.305,00	(459.139.695,00)	98,45	
3.25.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	29.613.200.000,00	29.154.060.305,00	(459.139.695,00)	98,45	
3.25.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	454.800.000,00	441.000.000,00	(13.800.000,00)	96,97	
3.25.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	454.800.000,00	441.000.000,00	(13.800.000,00)	96,97	
3.25.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.800.000,00	441.000.000,00	(13.800.000,00)	96,97	
3.25.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.913.000,00	10.442.000,00	(1.471.000,00)	87,65	
3.25.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.913.000,00	10.442.000,00	(1.471.000,00)	87,65	
3.25.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.913.000,00	10.442.000,00	(1.471.000,00)	87,65	
3.25.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	18.186.000,00	17.256.000,00	(930.000,00)	94,89	
3.25.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	18.186.000,00	17.256.000,00	(930.000,00)	94,89	
3.25.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.186.000,00	17.256.000,00	(930.000,00)	94,89	
3.25.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	9.693.000,00	9.397.000,00	(296.000,00)	96,95	
3.25.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	9.693.000,00	9.397.000,00	(296.000,00)	96,95	
3.25.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.693.000,00	9.397.000,00	(296.000,00)	96,95	
3.25.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	16.090.000,00	15.102.750,00	(987.250,00)	93,86	
3.25.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
3.25.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
3.25.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
3.25.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.210.000,00	9.342.750,00	(867.250,00)	91,51	
3.25.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.210.000,00	9.342.750,00	(867.250,00)	91,51	
3.25.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	9.342.750,00	(867.250,00)	91,51	
3.25.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.280.000,00	15.780.000,00	(20.500.000,00)	43,50	
3.25.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
3.25.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
3.25.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.280.000,00	5.780.000,00	(500.000,00)	92,04	
3.25.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	6.280.000,00	5.780.000,00	(500.000,00)	92,04	
3.25.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	5.780.000,00	(500.000,00)	92,04	
3.25.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.441.260.800,00	1.300.424.066,00	(140.836.734,00)	90,23	
3.25.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	158.872.000,00	157.299.443,00	(1.572.557,00)	99,01	
3.25.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	158.872.000,00	157.299.443,00	(1.572.557,00)	99,01	
3.25.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.872.000,00	157.299.443,00	(1.572.557,00)	99,01	
3.25.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	647.349.800,00	559.803.427,00	(87.546.373,00)	86,48	
3.25.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	647.349.800,00	559.803.427,00	(87.546.373,00)	86,48	
3.25.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.349.800,00	559.803.427,00	(87.546.373,00)	86,48	
3.25.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	189.658.000,00	186.126.386,00	(3.531.614,00)	98,14	
3.25.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	189.658.000,00	186.126.386,00	(3.531.614,00)	98,14	
3.25.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.658.000,00	186.126.386,00	(3.531.614,00)	98,14	
3.25.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	196.900.000,00	181.138.400,00	(15.761.600,00)	92,00	
3.25.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	196.900.000,00	181.138.400,00	(15.761.600,00)	92,00	
3.25.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.900.000,00	181.138.400,00	(15.761.600,00)	92,00	
3.25.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	102.380.000,00	99.565.300,00	(2.814.700,00)	97,25	
3.25.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	102.380.000,00	99.565.300,00	(2.814.700,00)	97,25	
3.25.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.380.000,00	99.565.300,00	(2.814.700,00)	97,25	
3.25.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	146.101.000,00	116.491.110,00	(29.609.890,00)	79,73	
3.25.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	146.101.000,00	116.491.110,00	(29.609.890,00)	79,73	
3.25.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.101.000,00	116.491.110,00	(29.609.890,00)	79,73	
3.25.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.767.635.000,00	1.301.797.285,00	(465.837.715,00)	73,65	
3.25.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	315.484.000,00	126.750.360,00	(188.733.640,00)	40,18	
3.25.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.773.000,00	4.122.000,00	(651.000,00)	86,36	
3.25.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.773.000,00	4.122.000,00	(651.000,00)	86,36	
3.25.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	310.711.000,00	122.628.360,00	(188.082.640,00)	39,47	
3.25.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.711.000,00	122.628.360,00	(188.082.640,00)	39,47	
3.25.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	165.805.000,00	159.729.615,00	(6.075.385,00)	96,34	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.333.000,00	948.000,00	(2.385.000,00)	28,44	
3.25.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.333.000,00	948.000,00	(2.385.000,00)	28,44	
3.25.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	162.472.000,00	158.781.615,00	(3.690.385,00)	97,73	
3.25.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.472.000,00	158.781.615,00	(3.690.385,00)	97,73	
3.25.01.1.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	671.346.000,00	668.140.000,00	(3.206.000,00)	99,52	
3.25.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.914.000,00	5.914.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.914.000,00	5.914.000,00	0,00	100,00	
3.25.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	665.432.000,00	662.226.000,00	(3.206.000,00)	99,52	
3.25.01.1.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.432.000,00	662.226.000,00	(3.206.000,00)	99,52	
3.25.01.1.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	615.000.000,00	347.177.310,00	(267.822.690,00)	56,45	
3.25.01.1.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	615.000.000,00	347.177.310,00	(267.822.690,00)	56,45	
3.25.01.1.07.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	615.000.000,00	347.177.310,00	(267.822.690,00)	56,45	
3.25.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.998.805.460,00	5.929.291.913,00	(1.069.513.547,00)	84,72	
3.25.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.959.104.540,00	1.438.448.444,00	(520.656.096,00)	73,42	
3.25.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.959.104.540,00	1.438.448.444,00	(520.656.096,00)	73,42	
3.25.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.959.104.540,00	1.438.448.444,00	(520.656.096,00)	73,42	
3.25.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.375.000,00	11.250.000,00	(125.000,00)	98,90	
3.25.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.375.000,00	11.250.000,00	(125.000,00)	98,90	
3.25.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	11.250.000,00	(125.000,00)	98,90	
3.25.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.028.325.920,00	4.479.593.469,00	(548.732.451,00)	89,09	
3.25.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.028.325.920,00	4.479.593.469,00	(548.732.451,00)	89,09	
3.25.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.028.325.920,00	4.479.593.469,00	(548.732.451,00)	89,09	
3.25.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.187.037.100,00	3.080.880.734,00	(1.106.156.366,00)	73,58	
3.25.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	624.628.350,00	517.379.116,00	(107.249.234,00)	82,83	
3.25.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	624.628.350,00	517.379.116,00	(107.249.234,00)	82,83	
3.25.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.628.350,00	517.379.116,00	(107.249.234,00)	82,83	
3.25.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.135.376.000,00	962.620.080,00	(172.755.920,00)	84,78	
3.25.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.376.000,00	962.620.080,00	(172.755.920,00)	84,78	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.376.000,00	962.620.080,00	(172.755.920,00)	84,78	
3.25.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	322.157.650,00	313.703.269,00	(8.454.381,00)	97,38	
3.25.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	322.157.650,00	313.703.269,00	(8.454.381,00)	97,38	
3.25.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.157.650,00	313.703.269,00	(8.454.381,00)	97,38	
3.25.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.104.875.100,00	1.287.178.269,00	(817.696.831,00)	61,15	
3.25.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.104.875.100,00	1.287.178.269,00	(817.696.831,00)	61,15	
3.25.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.104.875.100,00	1.287.178.269,00	(817.696.831,00)	61,15	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	669.362.500,00	625.185.800,00	(44.176.700,00)	93,40	
3.25.02.1.01	PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	360.384.000,00	343.179.000,00	(17.205.000,00)	95,23	
3.25.02.1.01.0002	PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN PENETAPAN DARI PEMERINTAH PUSAT	108.678.000,00	100.862.000,00	(7.816.000,00)	92,81	
3.25.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	108.678.000,00	100.862.000,00	(7.816.000,00)	92,81	
3.25.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.678.000,00	100.862.000,00	(7.816.000,00)	92,81	
3.25.02.1.01.0003	REHABILITASI WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	168.642.000,00	160.774.000,00	(7.868.000,00)	95,33	
3.25.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	168.642.000,00	160.774.000,00	(7.868.000,00)	95,33	
3.25.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.642.000,00	160.774.000,00	(7.868.000,00)	95,33	
3.25.02.1.01.0004	MITIGASI BENCANA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	83.064.000,00	81.543.000,00	(1.521.000,00)	98,17	
3.25.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	83.064.000,00	81.543.000,00	(1.521.000,00)	98,17	
3.25.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.064.000,00	81.543.000,00	(1.521.000,00)	98,17	
3.25.02.1.02	PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	56.267.500,00	52.389.900,00	(3.877.600,00)	93,11	
3.25.02.1.02.0006	PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SEBAGAI DATABASE PERIZINAN BERUSAHA	29.680.000,00	27.432.000,00	(2.248.000,00)	92,43	
3.25.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	29.680.000,00	27.432.000,00	(2.248.000,00)	92,43	
3.25.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.680.000,00	27.432.000,00	(2.248.000,00)	92,43	
3.25.02.1.02.0007	PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.587.500,00	24.957.900,00	(1.629.600,00)	93,87	
3.25.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	26.587.500,00	24.957.900,00	(1.629.600,00)	93,87	
3.25.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.587.500,00	24.957.900,00	(1.629.600,00)	93,87	
3.25.02.1.03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	252.711.000,00	229.616.900,00	(23.094.100,00)	90,86	
3.25.02.1.03.0001	PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	86.350.000,00	83.183.000,00	(3.167.000,00)	96,33	
3.25.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	86.350.000,00	83.183.000,00	(3.167.000,00)	96,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000,00	83.183.000,00	(3.167.000,00)	96,33	
3.25.02.1.03.0002	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	86.824.000,00	81.108.700,00	(5.715.300,00)	93,42	
3.25.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	86.824.000,00	81.108.700,00	(5.715.300,00)	93,42	
3.25.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.824.000,00	81.108.700,00	(5.715.300,00)	93,42	
3.25.02.1.03.0003	PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	33.132.000,00	20.857.000,00	(12.275.000,00)	62,95	
3.25.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	33.132.000,00	20.857.000,00	(12.275.000,00)	62,95	
3.25.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.132.000,00	20.857.000,00	(12.275.000,00)	62,95	
3.25.02.1.03.0004	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	46.405.000,00	44.468.200,00	(1.936.800,00)	95,83	
3.25.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	46.405.000,00	44.468.200,00	(1.936.800,00)	95,83	
3.25.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.405.000,00	44.468.200,00	(1.936.800,00)	95,83	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.604.556.000,00	3.090.956.098,00	(513.599.902,00)	85,75	
3.25.03.1.01	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	3.074.595.000,00	2.615.306.305,00	(459.288.695,00)	85,06	
3.25.03.1.01.0001	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	33.466.000,00	27.102.000,00	(6.364.000,00)	80,98	
3.25.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.466.000,00	27.102.000,00	(6.364.000,00)	80,98	
3.25.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.466.000,00	27.102.000,00	(6.364.000,00)	80,98	
3.25.03.1.01.0002	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	227.585.000,00	221.930.000,00	(5.655.000,00)	97,52	
3.25.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	227.585.000,00	221.930.000,00	(5.655.000,00)	97,52	
3.25.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.585.000,00	221.930.000,00	(5.655.000,00)	97,52	
3.25.03.1.01.0010	PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	2.813.544.000,00	2.366.274.305,00	(447.269.695,00)	84,10	
3.25.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.813.544.000,00	2.366.274.305,00	(447.269.695,00)	84,10	
3.25.03.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.813.544.000,00	2.366.274.305,00	(447.269.695,00)	84,10	
3.25.03.1.03	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	64.200.000,00	62.509.000,00	(1.691.000,00)	97,37	
3.25.03.1.03.0004	REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN UNTUK KAPAL UKURAN DIATAS 5 GT - 30 GT DAN BEROPERASI SAMPAI DENGAN 12 MIL	64.200.000,00	62.509.000,00	(1.691.000,00)	97,37	
3.25.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	62.509.000,00	(1.691.000,00)	97,37	
3.25.03.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	62.509.000,00	(1.691.000,00)	97,37	
3.25.03.1.06	PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	245.811.000,00	208.553.793,00	(37.257.207,00)	84,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.03.1.06.0002	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN	100.000.000,00	99.094.793,00	(905.207,00)	99,09	
3.25.03.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.094.793,00	(905.207,00)	99,09	
3.25.03.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.094.793,00	(905.207,00)	99,09	
3.25.03.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.03.1.06.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.03.1.06.0003	PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	145.811.000,00	109.459.000,00	(36.352.000,00)	75,07	
3.25.03.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	145.811.000,00	109.459.000,00	(36.352.000,00)	75,07	
3.25.03.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.811.000,00	109.459.000,00	(36.352.000,00)	75,07	
3.25.03.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.03.1.06.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.03.1.09	PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	44.000.000,00	29.840.000,00	(14.160.000,00)	67,82	
3.25.03.1.09.0003	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)	44.000.000,00	29.840.000,00	(14.160.000,00)	67,82	
3.25.03.1.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	29.840.000,00	(14.160.000,00)	67,82	
3.25.03.1.09.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	29.840.000,00	(14.160.000,00)	67,82	
3.25.03.1.10	PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	175.950.000,00	174.747.000,00	(1.203.000,00)	99,32	
3.25.03.1.10.0003	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)	175.950.000,00	174.747.000,00	(1.203.000,00)	99,32	
3.25.03.1.10.0003.5.1	BELANJA OPERASI	175.950.000,00	174.747.000,00	(1.203.000,00)	99,32	
3.25.03.1.10.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.950.000,00	174.747.000,00	(1.203.000,00)	99,32	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.201.098.300,00	3.038.199.767,00	(1.162.898.533,00)	72,32	
3.25.04.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	77.774.000,00	74.672.200,00	(3.101.800,00)	96,01	
3.25.04.1.01.0002	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	35.774.000,00	34.716.000,00	(1.058.000,00)	97,04	
3.25.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	35.774.000,00	34.716.000,00	(1.058.000,00)	97,04	
3.25.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.774.000,00	34.716.000,00	(1.058.000,00)	97,04	
3.25.04.1.01.0003	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	42.000.000,00	39.956.200,00	(2.043.800,00)	95,13	
3.25.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	39.956.200,00	(2.043.800,00)	95,13	
3.25.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	39.956.200,00	(2.043.800,00)	95,13	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	1.070.202.500,00	878.823.780,00	(191.378.720,00)	82,12	
3.25.04.1.05.0002	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	580.917.500,00	398.104.640,00	(182.812.860,00)	68,53	
3.25.04.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	576.951.500,00	394.139.640,00	(182.811.860,00)	68,31	
3.25.04.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.951.500,00	394.139.640,00	(182.811.860,00)	68,31	
3.25.04.1.05.0002.5.2	BELANJA MODAL	3.966.000,00	3.965.000,00	(1.000,00)	99,97	
3.25.04.1.05.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.966.000,00	3.965.000,00	(1.000,00)	99,97	
3.25.04.1.05.0004	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	415.347.000,00	410.212.140,00	(5.134.860,00)	98,76	
3.25.04.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	311.480.000,00	306.989.140,00	(4.490.860,00)	98,56	
3.25.04.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.480.000,00	306.989.140,00	(4.490.860,00)	98,56	
3.25.04.1.05.0004.5.2	BELANJA MODAL	103.867.000,00	103.223.000,00	(644.000,00)	99,38	
3.25.04.1.05.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.867.000,00	103.223.000,00	(644.000,00)	99,38	
3.25.04.1.05.0004.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.04.1.05.0007	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN DI KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	41.700.000,00	40.047.000,00	(1.653.000,00)	96,04	
3.25.04.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	41.700.000,00	40.047.000,00	(1.653.000,00)	96,04	
3.25.04.1.05.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	40.047.000,00	(1.653.000,00)	96,04	
3.25.04.1.05.0011	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.238.000,00	30.460.000,00	(1.778.000,00)	94,48	
3.25.04.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	32.238.000,00	30.460.000,00	(1.778.000,00)	94,48	
3.25.04.1.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.238.000,00	30.460.000,00	(1.778.000,00)	94,48	
3.25.04.1.06	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	3.053.121.800,00	2.084.703.787,00	(968.418.013,00)	68,28	
3.25.04.1.06.0003	PENYEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.000.000,00	1.497.327.887,00	(13.672.113,00)	99,10	
3.25.04.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.426.070.000,00	1.413.578.720,00	(12.491.280,00)	99,12	
3.25.04.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.426.070.000,00	1.413.578.720,00	(12.491.280,00)	99,12	
3.25.04.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	84.930.000,00	83.749.167,00	(1.180.833,00)	98,61	
3.25.04.1.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.930.000,00	83.749.167,00	(1.180.833,00)	98,61	
3.25.04.1.06.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.04.1.06.0004	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.542.121.800,00	587.375.900,00	(954.745.900,00)	38,09	
3.25.04.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	190.131.800,00	188.312.700,00	(1.819.100,00)	99,04	
3.25.04.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.131.800,00	188.312.700,00	(1.819.100,00)	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.04.1.06.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.351.990.000,00	399.063.200,00	(952.926.800,00)	29,52	
3.25.04.1.06.0004.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.351.990.000,00	399.063.200,00	(952.926.800,00)	29,52	
3.25.04.1.06.0004.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	539.414.000,00	522.351.060,00	(17.062.940,00)	96,84	
3.25.05.1.01	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL	414.485.000,00	409.127.360,00	(5.357.640,00)	98,71	
3.25.05.1.01.0013	PENGAWASAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
3.25.05.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
3.25.05.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
3.25.05.1.01.0013.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.05.1.01.0013.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.05.1.01.0014	PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SAMPAI DENGAN 12 MIL SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	47.000.000,00	46.622.000,00	(378.000,00)	99,20	
3.25.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	46.622.000,00	(378.000,00)	99,20	
3.25.05.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.622.000,00	(378.000,00)	99,20	
3.25.05.1.01.0016	PENGAWASAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN KEWENANGAN PROVINSI	47.000.000,00	46.700.000,00	(300.000,00)	99,36	
3.25.05.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	46.700.000,00	(300.000,00)	99,36	
3.25.05.1.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.700.000,00	(300.000,00)	99,36	
3.25.05.1.01.0017	PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	240.485.000,00	235.805.360,00	(4.679.640,00)	98,05	
3.25.05.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	240.485.000,00	235.805.360,00	(4.679.640,00)	98,05	
3.25.05.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.485.000,00	235.805.360,00	(4.679.640,00)	98,05	
3.25.05.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.05.1.01.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.05.1.02	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	124.929.000,00	113.223.700,00	(11.705.300,00)	90,63	
3.25.05.1.02.0004	PENGAWASAN USAHA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN/ATAU USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	45.000.000,00	40.505.700,00	(4.494.300,00)	90,01	
3.25.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	40.505.700,00	(4.494.300,00)	90,01	
3.25.05.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.505.700,00	(4.494.300,00)	90,01	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.05.1.02.0005	PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	34.929.000,00	32.331.000,00	(2.598.000,00)	92,56	
3.25.05.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	34.929.000,00	32.331.000,00	(2.598.000,00)	92,56	
3.25.05.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.929.000,00	32.331.000,00	(2.598.000,00)	92,56	
3.25.05.1.02.0006	PENGAWASAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	45.000.000,00	40.387.000,00	(4.613.000,00)	89,75	
3.25.05.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	40.387.000,00	(4.613.000,00)	89,75	
3.25.05.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.387.000,00	(4.613.000,00)	89,75	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.423.660.100,00	1.402.516.821,00	(21.143.279,00)	98,51	
3.25.06.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	60.300.000,00	58.610.500,00	(1.689.500,00)	97,20	
3.25.06.1.01.0004	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	28.600.000,00	28.182.000,00	(418.000,00)	98,54	
3.25.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.600.000,00	28.182.000,00	(418.000,00)	98,54	
3.25.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	28.182.000,00	(418.000,00)	98,54	
3.25.06.1.01.0007	PENERBITAN REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN DAN SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR	31.700.000,00	30.428.500,00	(1.271.500,00)	95,99	
3.25.06.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	31.700.000,00	30.428.500,00	(1.271.500,00)	95,99	
3.25.06.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	30.428.500,00	(1.271.500,00)	95,99	
3.25.06.1.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	376.024.600,00	367.735.991,00	(8.288.609,00)	97,80	
3.25.06.1.02.0003	PELAKSANAAN PEMBINAAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, DAN DAYA SAING SERTA PEMBERDAYAAN USAHA DALAM RANGKA MENGHASILKAN PRODUK YANG AMAN DAN BERMUTU UNTUK DIKONSUMSI ATAU DIGUNAKAN, DAN BERDAYA SAING	138.061.000,00	136.243.891,00	(1.817.109,00)	98,68	
3.25.06.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	138.061.000,00	136.243.891,00	(1.817.109,00)	98,68	
3.25.06.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.061.000,00	136.243.891,00	(1.817.109,00)	98,68	
3.25.06.1.02.0004	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	237.963.600,00	231.492.100,00	(6.471.500,00)	97,28	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.06.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	237.963.600,00	231.492.100,00	(6.471.500,00)	97,28	
3.25.06.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.963.600,00	231.492.100,00	(6.471.500,00)	97,28	
3.25.06.1.03	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	987.335.500,00	976.170.330,00	(11.165.170,00)	98,87	
3.25.06.1.03.0001	PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBUSI IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	30.600.000,00	29.081.500,00	(1.518.500,00)	95,04	
3.25.06.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	29.081.500,00	(1.518.500,00)	95,04	
3.25.06.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	29.081.500,00	(1.518.500,00)	95,04	
3.25.06.1.03.0002	PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	956.735.500,00	947.088.830,00	(9.646.670,00)	98,99	
3.25.06.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	956.735.500,00	947.088.830,00	(9.646.670,00)	98,99	
3.25.06.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.735.500,00	947.088.830,00	(9.646.670,00)	98,99	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	55.410.639.260,00	50.329.965.199,00	(5.080.674.061,00)	90,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.024.081.260,00)	(48.991.145.267,00)	5.032.935.993,00	90,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(54.024.081.260,00)	(48.991.145.267,00)	5.032.935.993,00	90,68	

3.26.0.00.0.00.01.0000

DINAS PARIWISATA

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Satuan Kerja : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.685.110.490,00	19.339.689.922,00	(1.345.420.568,00)	93,50	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.26.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	136.093.000,00	121.883.970,00	(14.209.030,00)	89,56	
3.26.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.107.000,00	25.605.534,00	(2.501.466,00)	91,10	
3.26.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.107.000,00	25.605.534,00	(2.501.466,00)	91,10	
3.26.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.107.000,00	25.605.534,00	(2.501.466,00)	91,10	
3.26.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	9.000.000,00	8.525.300,00	(474.700,00)	94,73	
3.26.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.525.300,00	(474.700,00)	94,73	
3.26.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.525.300,00	(474.700,00)	94,73	
3.26.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.000.000,00	6.526.800,00	(473.200,00)	93,24	
3.26.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.526.800,00	(473.200,00)	93,24	
3.26.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.526.800,00	(473.200,00)	93,24	
3.26.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	
3.26.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	
3.26.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	
3.26.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	
3.26.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	
3.26.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.574.420,00	(425.580,00)	92,91	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.550.000,00	11.126.520,00	(423.480,00)	96,33	
3.26.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	11.550.000,00	11.126.520,00	(423.480,00)	96,33	
3.26.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	11.126.520,00	(423.480,00)	96,33	
3.26.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.680.000,00	14.013.981,00	(5.666.019,00)	71,21	
3.26.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.680.000,00	14.013.981,00	(5.666.019,00)	71,21	
3.26.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	14.013.981,00	(5.666.019,00)	71,21	
3.26.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	12.600.000,00	11.978.587,00	(621.413,00)	95,07	
3.26.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	11.978.587,00	(621.413,00)	95,07	
3.26.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	11.978.587,00	(621.413,00)	95,07	
3.26.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.156.000,00	32.958.408,00	(3.197.592,00)	91,16	
3.26.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	36.156.000,00	32.958.408,00	(3.197.592,00)	91,16	
3.26.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.156.000,00	32.958.408,00	(3.197.592,00)	91,16	
3.26.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.917.000.000,00	15.157.796.758,00	(759.203.242,00)	95,23	
3.26.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.306.200.000,00	14.811.905.860,00	(494.294.140,00)	96,77	
3.26.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.306.200.000,00	14.811.905.860,00	(494.294.140,00)	96,77	
3.26.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	15.306.200.000,00	14.811.905.860,00	(494.294.140,00)	96,77	
3.26.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	562.800.000,00	298.992.000,00	(263.808.000,00)	53,13	
3.26.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	562.800.000,00	298.992.000,00	(263.808.000,00)	53,13	
3.26.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.800.000,00	298.992.000,00	(263.808.000,00)	53,13	
3.26.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	25.000.000,00	24.522.604,00	(477.396,00)	98,09	
3.26.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.522.604,00	(477.396,00)	98,09	
3.26.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.522.604,00	(477.396,00)	98,09	
3.26.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	5.000.000,00	4.761.001,00	(238.999,00)	95,22	
3.26.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.761.001,00	(238.999,00)	95,22	
3.26.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.761.001,00	(238.999,00)	95,22	
3.26.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.000.000,00	2.927.070,00	(72.930,00)	97,57	
3.26.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.927.070,00	(72.930,00)	97,57	
3.26.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.927.070,00	(72.930,00)	97,57	
3.26.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.000.000,00	4.936.725,00	(63.275,00)	98,73	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.936.725,00	(63.275,00)	98,73	
3.26.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.936.725,00	(63.275,00)	98,73	
3.26.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.831.830,00	(168.170,00)	96,64	
3.26.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.831.830,00	(168.170,00)	96,64	
3.26.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.831.830,00	(168.170,00)	96,64	
3.26.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000,00	4.919.668,00	(80.332,00)	98,39	
3.26.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.919.668,00	(80.332,00)	98,39	
3.26.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.919.668,00	(80.332,00)	98,39	
3.26.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	1.688.486,00	(311.514,00)	84,42	
3.26.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	500.000,00	230.000,00	(270.000,00)	46,00	
3.26.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	230.000,00	(270.000,00)	46,00	
3.26.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	230.000,00	(270.000,00)	46,00	
3.26.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	479.243,00	(20.757,00)	95,85	
3.26.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	26.000.000,00	22.982.573,00	(3.017.427,00)	88,39	
3.26.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	500.000,00	482.573,00	(17.427,00)	96,51	
3.26.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	482.573,00	(17.427,00)	96,51	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	482.573,00	(17.427,00)	96,51	
3.26.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.26.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.000.000,00	14.000.000,00	(3.000.000,00)	82,35	
3.26.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	14.000.000,00	(3.000.000,00)	82,35	
3.26.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	14.000.000,00	(3.000.000,00)	82,35	
3.26.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	829.001.000,00	630.609.270,00	(198.391.730,00)	76,07	
3.26.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.634.000,00	8.624.700,00	(1.009.300,00)	89,52	
3.26.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.634.000,00	8.624.700,00	(1.009.300,00)	89,52	
3.26.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.634.000,00	8.624.700,00	(1.009.300,00)	89,52	
3.26.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	358.349.000,00	249.162.200,00	(109.186.800,00)	69,53	
3.26.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	358.349.000,00	249.162.200,00	(109.186.800,00)	69,53	
3.26.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.349.000,00	249.162.200,00	(109.186.800,00)	69,53	
3.26.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	198.384.000,00	190.212.370,00	(8.171.630,00)	95,88	
3.26.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	198.384.000,00	190.212.370,00	(8.171.630,00)	95,88	
3.26.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.384.000,00	190.212.370,00	(8.171.630,00)	95,88	
3.26.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	35.111.500,00	(4.888.500,00)	87,78	
3.26.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	35.111.500,00	(4.888.500,00)	87,78	
3.26.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.111.500,00	(4.888.500,00)	87,78	
3.26.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.850.000,00	4.137.500,00	(6.712.500,00)	38,13	
3.26.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	10.850.000,00	4.137.500,00	(6.712.500,00)	38,13	
3.26.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	4.137.500,00	(6.712.500,00)	38,13	
3.26.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	154.612.000,00	95.933.000,00	(58.679.000,00)	62,05	
3.26.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	154.612.000,00	95.933.000,00	(58.679.000,00)	62,05	
3.26.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.612.000,00	95.933.000,00	(58.679.000,00)	62,05	
3.26.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5.000.000,00	3.850.000,00	(1.150.000,00)	77,00	
3.26.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.850.000,00	(1.150.000,00)	77,00	
3.26.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.850.000,00	(1.150.000,00)	77,00	
3.26.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	52.172.000,00	43.578.000,00	(8.594.000,00)	83,53	
3.26.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	52.172.000,00	43.578.000,00	(8.594.000,00)	83,53	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.172.000,00	43.578.000,00	(8.594.000,00)	83,53	
3.26.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	528.263.600,00	351.553.035,00	(176.710.565,00)	66,55	
3.26.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	528.263.600,00	351.553.035,00	(176.710.565,00)	66,55	
3.26.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.840.600,00	2.440.335,00	(1.400.265,00)	63,54	
3.26.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.600,00	2.440.335,00	(1.400.265,00)	63,54	
3.26.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	524.423.000,00	349.112.700,00	(175.310.300,00)	66,57	
3.26.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524.423.000,00	349.112.700,00	(175.310.300,00)	66,57	
3.26.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.386.728.890,00	2.205.175.346,00	(181.553.544,00)	92,39	
3.26.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	372.456.850,00	317.941.861,00	(54.514.989,00)	85,36	
3.26.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	372.456.850,00	317.941.861,00	(54.514.989,00)	85,36	
3.26.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.456.850,00	317.941.861,00	(54.514.989,00)	85,36	
3.26.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.014.272.040,00	1.887.233.485,00	(127.038.555,00)	93,69	
3.26.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.014.272.040,00	1.887.233.485,00	(127.038.555,00)	93,69	
3.26.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.014.272.040,00	1.887.233.485,00	(127.038.555,00)	93,69	
3.26.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	860.024.000,00	848.000.484,00	(12.023.516,00)	98,60	
3.26.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	241.239.000,00	238.121.421,00	(3.117.579,00)	98,71	
3.26.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	241.239.000,00	238.121.421,00	(3.117.579,00)	98,71	
3.26.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.239.000,00	238.121.421,00	(3.117.579,00)	98,71	
3.26.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	207.389.000,00	206.583.313,00	(805.687,00)	99,61	
3.26.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	207.389.000,00	206.583.313,00	(805.687,00)	99,61	
3.26.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.389.000,00	206.583.313,00	(805.687,00)	99,61	
3.26.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.200.000,00	45.875.000,00	(4.325.000,00)	91,38	
3.26.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.200.000,00	45.875.000,00	(4.325.000,00)	91,38	
3.26.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	45.875.000,00	(4.325.000,00)	91,38	
3.26.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	361.196.000,00	357.420.750,00	(3.775.250,00)	98,95	
3.26.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	361.196.000,00	357.420.750,00	(3.775.250,00)	98,95	
3.26.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.196.000,00	357.420.750,00	(3.775.250,00)	98,95	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.686.178.800,00	8.282.200.543,00	(1.403.978.257,00)	85,51	
3.26.02.1.01	PENGLOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	(616.952.423,00)	80,01	
3.26.02.1.01.0005	PENGADAAN, PEMELIHARAAN, REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA PROVINSI	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	(616.952.423,00)	80,01	
3.26.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	(616.952.423,00)	80,01	
3.26.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	(616.952.423,00)	80,01	
3.26.02.1.02	PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	4.123.719.900,00	3.728.427.237,00	(395.292.663,00)	90,41	
3.26.02.1.02.0002	PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	451.000.000,00	424.196.000,00	(26.804.000,00)	94,06	
3.26.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	451.000.000,00	424.196.000,00	(26.804.000,00)	94,06	
3.26.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.000.000,00	424.196.000,00	(26.804.000,00)	94,06	
3.26.02.1.02.0004	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	825.055.000,00	810.051.500,00	(15.003.500,00)	98,18	
3.26.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	825.055.000,00	810.051.500,00	(15.003.500,00)	98,18	
3.26.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.055.000,00	810.051.500,00	(15.003.500,00)	98,18	
3.26.02.1.02.0007	PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	677.912.900,00	665.044.000,00	(12.868.900,00)	98,10	
3.26.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	485.522.900,00	473.804.000,00	(11.718.900,00)	97,59	
3.26.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.522.900,00	473.804.000,00	(11.718.900,00)	97,59	
3.26.02.1.02.0007.5.2	BELANJA MODAL	192.390.000,00	191.240.000,00	(1.150.000,00)	99,40	
3.26.02.1.02.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.390.000,00	191.240.000,00	(1.150.000,00)	99,40	
3.26.02.1.02.0009	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGLOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	2.169.752.000,00	1.829.135.737,00	(340.616.263,00)	84,30	
3.26.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.169.752.000,00	1.829.135.737,00	(340.616.263,00)	84,30	
3.26.02.1.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.169.752.000,00	1.829.135.737,00	(340.616.263,00)	84,30	
3.26.02.1.03	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	2.044.417.800,00	1.732.403.729,00	(312.014.071,00)	84,74	
3.26.02.1.03.0002	PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	200.000.000,00	196.248.000,00	(3.752.000,00)	98,12	
3.26.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	196.248.000,00	(3.752.000,00)	98,12	
3.26.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	196.248.000,00	(3.752.000,00)	98,12	
3.26.02.1.03.0007	PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	1.844.417.800,00	1.536.155.729,00	(308.262.071,00)	83,29	
3.26.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.844.417.800,00	1.536.155.729,00	(308.262.071,00)	83,29	
3.26.02.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.844.417.800,00	1.536.155.729,00	(308.262.071,00)	83,29	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.02.1.04	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	432.451.100,00	352.732.000,00	(79.719.100,00)	81,57	
3.26.02.1.04.0009	FASILITASI PENDAMPINGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI)	89.217.000,00	58.310.000,00	(30.907.000,00)	65,36	
3.26.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	89.217.000,00	58.310.000,00	(30.907.000,00)	65,36	
3.26.02.1.04.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.217.000,00	58.310.000,00	(30.907.000,00)	65,36	
3.26.02.1.04.0010	PENGELOLAAN INVESTASI PARIWISATA PROVINSI	343.234.100,00	294.422.000,00	(48.812.100,00)	85,78	
3.26.02.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	343.234.100,00	294.422.000,00	(48.812.100,00)	85,78	
3.26.02.1.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.234.100,00	294.422.000,00	(48.812.100,00)	85,78	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.764.756.500,00	5.636.832.326,00	(127.924.174,00)	97,78	
3.26.03.1.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	5.764.756.500,00	5.636.832.326,00	(127.924.174,00)	97,78	
3.26.03.1.01.0001	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	3.854.034.500,00	3.762.370.777,00	(91.663.723,00)	97,62	
3.26.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.854.034.500,00	3.762.370.777,00	(91.663.723,00)	97,62	
3.26.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.854.034.500,00	3.762.370.777,00	(91.663.723,00)	97,62	
3.26.03.1.01.0005	MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	885.922.000,00	874.379.331,00	(11.542.669,00)	98,70	
3.26.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	885.922.000,00	874.379.331,00	(11.542.669,00)	98,70	
3.26.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.922.000,00	874.379.331,00	(11.542.669,00)	98,70	
3.26.03.1.01.0006	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	1.024.800.000,00	1.000.082.218,00	(24.717.782,00)	97,59	
3.26.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.024.800.000,00	1.000.082.218,00	(24.717.782,00)	97,59	
3.26.03.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.800.000,00	1.000.082.218,00	(24.717.782,00)	97,59	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.438.502.000,00	1.260.013.480,00	(178.488.520,00)	87,59	
3.26.04.1.01	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA KREATIF	490.211.000,00	424.164.480,00	(66.046.520,00)	86,53	
3.26.04.1.01.0006	PERLUASAN PASAR PRODUK KREATIF BAIK DI PASAR EKSPOR MAUPUN PASAR DOMESTIK	490.211.000,00	424.164.480,00	(66.046.520,00)	86,53	
3.26.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	490.211.000,00	424.164.480,00	(66.046.520,00)	86,53	
3.26.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.211.000,00	424.164.480,00	(66.046.520,00)	86,53	
3.26.04.1.02	PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF&NBSP;	948.291.000,00	835.849.000,00	(112.442.000,00)	88,14	
3.26.04.1.02.0008	PERLINDUNGAN HASIL KREATIVITAS	502.177.000,00	465.891.000,00	(36.286.000,00)	92,77	
3.26.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	502.177.000,00	465.891.000,00	(36.286.000,00)	92,77	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.04.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.177.000,00	465.891.000,00	(36.286.000,00)	92,77	
3.26.04.1.02.0013	FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	172.730.000,00	103.570.500,00	(69.159.500,00)	59,96	
3.26.04.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	172.730.000,00	103.570.500,00	(69.159.500,00)	59,96	
3.26.04.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.730.000,00	103.570.500,00	(69.159.500,00)	59,96	
3.26.04.1.02.0019	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF	273.384.000,00	266.387.500,00	(6.996.500,00)	97,44	
3.26.04.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	273.384.000,00	266.387.500,00	(6.996.500,00)	97,44	
3.26.04.1.02.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.384.000,00	266.387.500,00	(6.996.500,00)	97,44	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.781.833.000,00	2.577.874.801,00	(203.958.199,00)	92,67	
3.26.05.1.01	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN	2.076.494.000,00	2.036.901.751,00	(39.592.249,00)	98,09	
3.26.05.1.01.0004	FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	650.532.000,00	639.229.840,00	(11.302.160,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	650.532.000,00	639.229.840,00	(11.302.160,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.532.000,00	639.229.840,00	(11.302.160,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0014	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	973.150.000,00	956.247.091,00	(16.902.909,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	973.150.000,00	956.247.091,00	(16.902.909,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.150.000,00	956.247.091,00	(16.902.909,00)	98,26	
3.26.05.1.01.0017	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	452.812.000,00	441.424.820,00	(11.387.180,00)	97,49	
3.26.05.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	452.812.000,00	441.424.820,00	(11.387.180,00)	97,49	
3.26.05.1.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.812.000,00	441.424.820,00	(11.387.180,00)	97,49	
3.26.05.1.02	PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	705.339.000,00	540.973.050,00	(164.365.950,00)	76,70	
3.26.05.1.02.0001	PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	257.690.000,00	248.271.852,00	(9.418.148,00)	96,35	
3.26.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	257.690.000,00	248.271.852,00	(9.418.148,00)	96,35	
3.26.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.690.000,00	248.271.852,00	(9.418.148,00)	96,35	
3.26.05.1.02.0003	STANDARISASI USAHA DAN SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG EKONOMI KREATIF	447.649.000,00	292.701.198,00	(154.947.802,00)	65,39	
3.26.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	447.649.000,00	292.701.198,00	(154.947.802,00)	65,39	
3.26.05.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.649.000,00	292.701.198,00	(154.947.802,00)	65,39	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	40.356.380.790,00	37.096.611.072,00	(3.259.769.718,00)	91,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.356.380.790,00)	(37.096.611.072,00)	3.259.769.718,00	91,92	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(40.356.380.790,00)	(37.096.611.072,00)	3.259.769.718,00	91,92	

3.27.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERTANIAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Satuan Kerja : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
3.27.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.240.163.500,00	1.811.767.500,00	571.604.000,00	146,09	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
3.27.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.240.163.500,00	1.811.767.500,00	571.604.000,00	146,09	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.240.163.500,00	1.811.767.500,00	571.604.000,00	146,09	
5	BELANJA DAERAH					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.250.133.010,00	59.529.719.949,00	(4.720.413.061,00)	92,65	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.27.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	578.280.000,00	570.788.700,00	(7.491.300,00)	98,70	
3.27.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	175.613.500,00	174.644.100,00	(969.400,00)	99,45	
3.27.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	175.613.500,00	174.644.100,00	(969.400,00)	99,45	
3.27.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.613.500,00	174.644.100,00	(969.400,00)	99,45	
3.27.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	30.602.500,00	29.668.500,00	(934.000,00)	96,95	
3.27.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.602.500,00	29.668.500,00	(934.000,00)	96,95	
3.27.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.602.500,00	29.668.500,00	(934.000,00)	96,95	
3.27.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	19.423.200,00	19.391.200,00	(32.000,00)	99,84	
3.27.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.423.200,00	19.391.200,00	(32.000,00)	99,84	
3.27.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.423.200,00	19.391.200,00	(32.000,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	39.359.200,00	38.601.300,00	(757.900,00)	98,07	
3.27.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	39.359.200,00	38.601.300,00	(757.900,00)	98,07	
3.27.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.359.200,00	38.601.300,00	(757.900,00)	98,07	
3.27.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	44.768.000,00	44.733.000,00	(35.000,00)	99,92	
3.27.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	44.768.000,00	44.733.000,00	(35.000,00)	99,92	
3.27.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.768.000,00	44.733.000,00	(35.000,00)	99,92	
3.27.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.484.000,00	25.458.000,00	(26.000,00)	99,90	
3.27.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.484.000,00	25.458.000,00	(26.000,00)	99,90	
3.27.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.484.000,00	25.458.000,00	(26.000,00)	99,90	
3.27.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	120.270.000,00	116.591.000,00	(3.679.000,00)	96,94	
3.27.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	120.270.000,00	116.591.000,00	(3.679.000,00)	96,94	
3.27.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.270.000,00	116.591.000,00	(3.679.000,00)	96,94	
3.27.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	43.708.000,00	43.637.000,00	(71.000,00)	99,84	
3.27.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	43.708.000,00	43.637.000,00	(71.000,00)	99,84	
3.27.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.708.000,00	43.637.000,00	(71.000,00)	99,84	
3.27.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	39.720.000,00	38.739.000,00	(981.000,00)	97,53	
3.27.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	39.720.000,00	38.739.000,00	(981.000,00)	97,53	
3.27.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.720.000,00	38.739.000,00	(981.000,00)	97,53	
3.27.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	39.331.600,00	39.325.600,00	(6.000,00)	99,98	
3.27.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	39.331.600,00	39.325.600,00	(6.000,00)	99,98	
3.27.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.331.600,00	39.325.600,00	(6.000,00)	99,98	
3.27.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	46.595.970.000,00	42.473.708.779,00	(4.122.261.221,00)	91,15	
3.27.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	45.686.000.000,00	41.617.788.779,00	(4.068.211.221,00)	91,10	
3.27.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	45.686.000.000,00	41.617.788.779,00	(4.068.211.221,00)	91,10	
3.27.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	45.686.000.000,00	41.617.788.779,00	(4.068.211.221,00)	91,10	
3.27.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	709.970.000,00	656.570.000,00	(53.400.000,00)	92,48	
3.27.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	709.970.000,00	656.570.000,00	(53.400.000,00)	92,48	
3.27.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.970.000,00	656.570.000,00	(53.400.000,00)	92,48	
3.27.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	49.965.000,00	(35.000,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.965.000,00	(35.000,00)	99,93	
3.27.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.965.000,00	(35.000,00)	99,93	
3.27.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	45.000.000,00	44.940.000,00	(60.000,00)	99,87	
3.27.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.940.000,00	(60.000,00)	99,87	
3.27.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.940.000,00	(60.000,00)	99,87	
3.27.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	25.000.000,00	24.695.000,00	(305.000,00)	98,78	
3.27.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.695.000,00	(305.000,00)	98,78	
3.27.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.695.000,00	(305.000,00)	98,78	
3.27.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
3.27.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
3.27.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
3.27.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	48.460.000,00	45.259.800,00	(3.200.200,00)	93,40	
3.27.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	24.970.000,00	23.170.000,00	(1.800.000,00)	92,79	
3.27.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.970.000,00	23.170.000,00	(1.800.000,00)	92,79	
3.27.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.970.000,00	23.170.000,00	(1.800.000,00)	92,79	
3.27.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.490.000,00	22.089.800,00	(1.400.200,00)	94,04	
3.27.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	23.490.000,00	22.089.800,00	(1.400.200,00)	94,04	
3.27.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.490.000,00	22.089.800,00	(1.400.200,00)	94,04	
3.27.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.450.000,00	37.300.000,00	(150.000,00)	99,60	
3.27.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22.500.000,00	22.350.000,00	(150.000,00)	99,33	
3.27.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.350.000,00	(150.000,00)	99,33	
3.27.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.350.000,00	(150.000,00)	99,33	
3.27.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.341.871.074,00	1.328.516.518,00	(13.354.556,00)	99,00	
3.27.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	139.880.000,00	135.571.000,00	(4.309.000,00)	96,92	
3.27.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	139.880.000,00	135.571.000,00	(4.309.000,00)	96,92	
3.27.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.880.000,00	135.571.000,00	(4.309.000,00)	96,92	
3.27.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	335.892.000,00	335.168.775,00	(723.225,00)	99,78	
3.27.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	335.892.000,00	335.168.775,00	(723.225,00)	99,78	
3.27.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.892.000,00	335.168.775,00	(723.225,00)	99,78	
3.27.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	167.163.074,00	165.351.718,00	(1.811.356,00)	98,92	
3.27.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	167.163.074,00	165.351.718,00	(1.811.356,00)	98,92	
3.27.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.163.074,00	165.351.718,00	(1.811.356,00)	98,92	
3.27.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	149.370.000,00	149.258.575,00	(111.425,00)	99,93	
3.27.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	149.370.000,00	149.258.575,00	(111.425,00)	99,93	
3.27.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.370.000,00	149.258.575,00	(111.425,00)	99,93	
3.27.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	147.072.000,00	141.223.900,00	(5.848.100,00)	96,02	
3.27.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	147.072.000,00	141.223.900,00	(5.848.100,00)	96,02	
3.27.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.072.000,00	141.223.900,00	(5.848.100,00)	96,02	
3.27.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	402.494.000,00	401.942.550,00	(551.450,00)	99,86	
3.27.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	402.494.000,00	401.942.550,00	(551.450,00)	99,86	
3.27.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.494.000,00	401.942.550,00	(551.450,00)	99,86	
3.27.01.1.06.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	649.973.000,00	638.396.980,00	(11.576.020,00)	98,22	
3.27.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	178.498.000,00	172.980.230,00	(5.517.770,00)	96,91	
3.27.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.727.000,00	829.800,00	(1.897.200,00)	30,43	
3.27.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.727.000,00	829.800,00	(1.897.200,00)	30,43	
3.27.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	175.771.000,00	172.150.430,00	(3.620.570,00)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.01.1.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.622.000,00	71.658.000,00	(964.000,00)	98,67	
3.27.01.1.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.149.000,00	100.492.430,00	(2.656.570,00)	97,42	
3.27.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	471.475.000,00	465.416.750,00	(6.058.250,00)	98,72	
3.27.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.134.000,00	2.133.900,00	(100,00)	100,00	
3.27.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.134.000,00	2.133.900,00	(100,00)	100,00	
3.27.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	469.341.000,00	463.282.850,00	(6.058.150,00)	98,71	
3.27.01.1.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.341.000,00	463.282.850,00	(6.058.150,00)	98,71	
3.27.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.663.543.810,00	12.154.340.941,00	(509.202.869,00)	95,98	
3.27.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	36.293.000,00	36.052.800,00	(240.200,00)	99,34	
3.27.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.293.000,00	36.052.800,00	(240.200,00)	99,34	
3.27.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.293.000,00	36.052.800,00	(240.200,00)	99,34	
3.27.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.304.048.000,00	1.124.098.980,00	(179.949.020,00)	86,20	
3.27.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.304.048.000,00	1.124.098.980,00	(179.949.020,00)	86,20	
3.27.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.304.048.000,00	1.124.098.980,00	(179.949.020,00)	86,20	
3.27.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	11.323.202.810,00	10.994.189.161,00	(329.013.649,00)	97,09	
3.27.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.321.495.810,00	10.992.482.161,00	(329.013.649,00)	97,09	
3.27.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.321.495.810,00	10.992.482.161,00	(329.013.649,00)	97,09	
3.27.01.1.08.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.08.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	100,00	
3.27.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.334.585.126,00	2.281.408.231,00	(53.176.895,00)	97,72	
3.27.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	372.510.000,00	371.300.769,00	(1.209.231,00)	99,68	
3.27.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	372.510.000,00	371.300.769,00	(1.209.231,00)	99,68	
3.27.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.510.000,00	371.300.769,00	(1.209.231,00)	99,68	
3.27.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	666.948.000,00	635.786.890,00	(31.161.110,00)	95,33	
3.27.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	666.948.000,00	635.786.890,00	(31.161.110,00)	95,33	
3.27.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.948.000,00	635.786.890,00	(31.161.110,00)	95,33	
3.27.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	334.743.000,00	332.059.796,00	(2.683.204,00)	99,20	
3.27.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	334.743.000,00	332.059.796,00	(2.683.204,00)	99,20	
3.27.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.743.000,00	332.059.796,00	(2.683.204,00)	99,20	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	960.384.126,00	942.260.776,00	(18.123.350,00)	98,11	
3.27.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	960.384.126,00	942.260.776,00	(18.123.350,00)	98,11	
3.27.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.384.126,00	942.260.776,00	(18.123.350,00)	98,11	
3.27.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	35.922.917.845,00	34.762.851.805,00	(1.160.066.040,00)	96,77	
3.27.02.1.01	PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	6.259.000.000,00	6.025.961.730,00	(233.038.270,00)	96,28	
3.27.02.1.01.0001	PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	6.094.000.000,00	5.880.269.730,00	(213.730.270,00)	96,49	
3.27.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.492.360.000,00	5.391.539.730,00	(100.820.270,00)	98,16	
3.27.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.492.360.000,00	5.391.539.730,00	(100.820.270,00)	98,16	
3.27.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	601.640.000,00	488.730.000,00	(112.910.000,00)	81,23	
3.27.02.1.01.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	601.640.000,00	488.730.000,00	(112.910.000,00)	81,23	
3.27.02.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	93.000.000,00	78.200.000,00	(14.800.000,00)	84,09	
3.27.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	78.200.000,00	(14.800.000,00)	84,09	
3.27.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	78.200.000,00	(14.800.000,00)	84,09	
3.27.02.1.01.0003	PENGAWASAN SEBARAN SARANA PASCAPANEN PERKEBUNAN	25.000.000,00	21.710.000,00	(3.290.000,00)	86,84	
3.27.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.710.000,00	(3.290.000,00)	86,84	
3.27.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.710.000,00	(3.290.000,00)	86,84	
3.27.02.1.01.0004	PENGAWASAN SEBARAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN	25.000.000,00	24.225.000,00	(775.000,00)	96,90	
3.27.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.225.000,00	(775.000,00)	96,90	
3.27.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.225.000,00	(775.000,00)	96,90	
3.27.02.1.01.0006	PENGAWASAN SEBARAN SARANA PASCAPANEN HORTIKULTURA	22.000.000,00	21.557.000,00	(443.000,00)	97,99	
3.27.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.557.000,00	(443.000,00)	97,99	
3.27.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.557.000,00	(443.000,00)	97,99	
3.27.02.1.02	PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN	20.719.896.405,00	20.448.099.285,00	(271.797.120,00)	98,69	
3.27.02.1.02.0001	PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT BENIH	110.000.000,00	109.920.000,00	(80.000,00)	99,93	
3.27.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	109.920.000,00	(80.000,00)	99,93	
3.27.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	109.920.000,00	(80.000,00)	99,93	
3.27.02.1.02.0005	PENGAWASAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA, TANAMAN PANGAN, DAN PERKEBUNAN	20.091.346.405,00	19.824.172.935,00	(267.173.470,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.640.026.405,00	19.398.173.700,00	(241.852.705,00)	98,77	
3.27.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.640.026.405,00	19.398.173.700,00	(241.852.705,00)	98,77	
3.27.02.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	451.320.000,00	425.999.235,00	(25.320.765,00)	94,39	
3.27.02.1.02.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	451.320.000,00	425.999.235,00	(25.320.765,00)	94,39	
3.27.02.1.02.0007	PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK BATANG	238.558.000,00	237.728.950,00	(829.050,00)	99,65	
3.27.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	238.558.000,00	237.728.950,00	(829.050,00)	99,65	
3.27.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.558.000,00	237.728.950,00	(829.050,00)	99,65	
3.27.02.1.02.0012	PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN BERBENTUK BATANG	165.792.500,00	162.077.900,00	(3.714.600,00)	97,76	
3.27.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	165.792.500,00	162.077.900,00	(3.714.600,00)	97,76	
3.27.02.1.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.792.500,00	162.077.900,00	(3.714.600,00)	97,76	
3.27.02.1.02.0013	PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK BIJI/BENIH	97.388.000,00	97.388.000,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	97.388.000,00	97.388.000,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.388.000,00	97.388.000,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.02.0014	PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK UMBI	16.811.500,00	16.811.500,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	16.811.500,00	16.811.500,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.811.500,00	16.811.500,00	0,00	100,00	
3.27.02.1.03	PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN PROVINSI	100.000.000,00	99.319.897,00	(680.103,00)	99,32	
3.27.02.1.03.0002	PENILAIAN KULTIVAR SDG TUMBUHAN DAN MIKROORGANISME	100.000.000,00	99.319.897,00	(680.103,00)	99,32	
3.27.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.319.897,00	(680.103,00)	99,32	
3.27.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.319.897,00	(680.103,00)	99,32	
3.27.02.1.04	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	155.166.000,00	148.766.000,00	(6.400.000,00)	95,88	
3.27.02.1.04.0001	PEMBERIAN BIMBINGAN PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	155.166.000,00	148.766.000,00	(6.400.000,00)	95,88	
3.27.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	155.166.000,00	148.766.000,00	(6.400.000,00)	95,88	
3.27.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.166.000,00	148.766.000,00	(6.400.000,00)	95,88	
3.27.02.1.04.0004	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.02.1.05	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	1.935.455.440,00	1.649.006.963,00	(286.448.477,00)	85,20	
3.27.02.1.05.0003	PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK	100.100.000,00	97.887.808,00	(2.212.192,00)	97,79	
3.27.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.100.000,00	97.887.808,00	(2.212.192,00)	97,79	
3.27.02.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.100.000,00	97.887.808,00	(2.212.192,00)	97,79	
3.27.02.1.05.0004	PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	1.621.037.440,00	1.370.420.155,00	(250.617.285,00)	84,54	
3.27.02.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.621.037.440,00	1.370.420.155,00	(250.617.285,00)	84,54	
3.27.02.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.621.037.440,00	1.370.420.155,00	(250.617.285,00)	84,54	
3.27.02.1.05.0005	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, BAHAN PAKAN, PAKAN	214.318.000,00	180.699.000,00	(33.619.000,00)	84,31	
3.27.02.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	214.318.000,00	180.699.000,00	(33.619.000,00)	84,31	
3.27.02.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.318.000,00	180.699.000,00	(33.619.000,00)	84,31	
3.27.02.1.06	PENGAWASAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI TINGKAT DISTRIBUTOR	140.000.000,00	137.290.500,00	(2.709.500,00)	98,06	
3.27.02.1.06.0001	PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN	140.000.000,00	137.290.500,00	(2.709.500,00)	98,06	
3.27.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	137.290.500,00	(2.709.500,00)	98,06	
3.27.02.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	137.290.500,00	(2.709.500,00)	98,06	
3.27.02.1.07	PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	6.613.400.000,00	6.254.407.430,00	(358.992.570,00)	94,57	
3.27.02.1.07.0002	PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	142.000.000,00	140.042.500,00	(1.957.500,00)	98,62	
3.27.02.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	142.000.000,00	140.042.500,00	(1.957.500,00)	98,62	
3.27.02.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	140.042.500,00	(1.957.500,00)	98,62	
3.27.02.1.07.0004	PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	6.471.400.000,00	6.114.364.930,00	(357.035.070,00)	94,48	
3.27.02.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.471.400.000,00	6.114.364.930,00	(357.035.070,00)	94,48	
3.27.02.1.07.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.400.000,00	6.114.364.930,00	(357.035.070,00)	94,48	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.051.348.160,00	1.870.432.897,00	(180.915.263,00)	91,18	
3.27.03.1.01	PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	2.051.348.160,00	1.870.432.897,00	(180.915.263,00)	91,18	
3.27.03.1.01.0001	PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN	85.000.000,00	65.840.000,00	(19.160.000,00)	77,46	
3.27.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	65.840.000,00	(19.160.000,00)	77,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	65.840.000,00	(19.160.000,00)	77,46	
3.27.03.1.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JALAN USAHA TANI	52.000.000,00	48.380.000,00	(3.620.000,00)	93,04	
3.27.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	48.380.000,00	(3.620.000,00)	93,04	
3.27.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	48.380.000,00	(3.620.000,00)	93,04	
3.27.03.1.01.0004	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DI TINGKAT USAHA TANI	925.000.000,00	791.977.412,00	(133.022.588,00)	85,62	
3.27.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	925.000.000,00	791.977.412,00	(133.022.588,00)	85,62	
3.27.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.000.000,00	791.977.412,00	(133.022.588,00)	85,62	
3.27.03.1.01.0009	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	54.822.000,00	38.680.000,00	(16.142.000,00)	70,56	
3.27.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	54.822.000,00	38.680.000,00	(16.142.000,00)	70,56	
3.27.03.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.822.000,00	38.680.000,00	(16.142.000,00)	70,56	
3.27.03.1.01.0018	PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI TINGKAT PROVINSI	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	98,86	
3.27.03.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	98,86	
3.27.03.1.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	98,86	
3.27.03.1.01.0021	PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT HEWAN, KLINIK HEWAN, AMBULATORI, PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI/PUSKESWAN MANDIRI, ATAU TEMPAT PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER KESWAN	854.526.160,00	846.465.485,00	(8.060.675,00)	99,06	
3.27.03.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	10.916.860,00	9.264.800,00	(1.652.060,00)	84,87	
3.27.03.1.01.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.916.860,00	9.264.800,00	(1.652.060,00)	84,87	
3.27.03.1.01.0021.5.2	BELANJA MODAL	843.609.300,00	837.200.685,00	(6.408.615,00)	99,24	
3.27.03.1.01.0021.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.609.300,00	837.200.685,00	(6.408.615,00)	99,24	
3.27.03.1.01.0021.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.432.840.000,00	1.409.142.105,00	(23.697.895,00)	98,35	
3.27.04.1.01	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	574.340.000,00	564.967.895,00	(9.372.105,00)	98,37	
3.27.04.1.01.0004	PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS PADA HEWAN	112.000.000,00	111.557.000,00	(443.000,00)	99,60	
3.27.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	111.557.000,00	(443.000,00)	99,60	
3.27.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	111.557.000,00	(443.000,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.04.1.01.0005	PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER RUMAH SAKIT HEWAN DAN KLINIK HEWAN	94.000.000,00	93.721.129,00	(278.871,00)	99,70	
3.27.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	94.000.000,00	93.721.129,00	(278.871,00)	99,70	
3.27.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	93.721.129,00	(278.871,00)	99,70	
3.27.04.1.01.0007	PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	150.840.000,00	148.645.800,00	(2.194.200,00)	98,55	
3.27.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.840.000,00	148.645.800,00	(2.194.200,00)	98,55	
3.27.04.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.840.000,00	148.645.800,00	(2.194.200,00)	98,55	
3.27.04.1.01.0008	PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS PADA HEWAN	100.000.000,00	93.970.966,00	(6.029.034,00)	93,97	
3.27.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.970.966,00	(6.029.034,00)	93,97	
3.27.04.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.970.966,00	(6.029.034,00)	93,97	
3.27.04.1.01.0009	PENGELOLAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN ZONOSIS	117.500.000,00	117.073.000,00	(427.000,00)	99,64	
3.27.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	117.500.000,00	117.073.000,00	(427.000,00)	99,64	
3.27.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.500.000,00	117.073.000,00	(427.000,00)	99,64	
3.27.04.1.02	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN LINTAS DAERAH PROVINSI	191.000.000,00	188.898.000,00	(2.102.000,00)	98,90	
3.27.04.1.02.0006	PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK HEWAN	101.000.000,00	100.000.000,00	(1.000.000,00)	99,01	
3.27.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	101.000.000,00	100.000.000,00	(1.000.000,00)	99,01	
3.27.04.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	100.000.000,00	(1.000.000,00)	99,01	
3.27.04.1.02.0007	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM)	90.000.000,00	88.898.000,00	(1.102.000,00)	98,78	
3.27.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	88.898.000,00	(1.102.000,00)	98,78	
3.27.04.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	88.898.000,00	(1.102.000,00)	98,78	
3.27.04.1.03	PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	527.500.000,00	517.696.210,00	(9.803.790,00)	98,14	
3.27.04.1.03.0003	PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	300.000.000,00	291.196.210,00	(8.803.790,00)	97,07	
3.27.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	291.196.210,00	(8.803.790,00)	97,07	
3.27.04.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	291.196.210,00	(8.803.790,00)	97,07	
3.27.04.1.03.0007	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	227.500.000,00	226.500.000,00	(1.000.000,00)	99,56	
3.27.04.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	227.500.000,00	226.500.000,00	(1.000.000,00)	99,56	
3.27.04.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.500.000,00	226.500.000,00	(1.000.000,00)	99,56	
3.27.04.1.05	KESEJAHTERAAN HEWAN	140.000.000,00	137.580.000,00	(2.420.000,00)	98,27	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.04.1.05.0003	PENGLOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)	140.000.000,00	137.580.000,00	(2.420.000,00)	98,27	
3.27.04.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	137.580.000,00	(2.420.000,00)	98,27	
3.27.04.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	137.580.000,00	(2.420.000,00)	98,27	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.300.500.000,00	1.284.901.900,00	(15.598.100,00)	98,80	
3.27.05.1.01	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI	1.300.500.000,00	1.284.901.900,00	(15.598.100,00)	98,80	
3.27.05.1.01.0001	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	933.000.000,00	924.398.850,00	(8.601.150,00)	99,08	
3.27.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	933.000.000,00	924.398.850,00	(8.601.150,00)	99,08	
3.27.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.000.000,00	924.398.850,00	(8.601.150,00)	99,08	
3.27.05.1.01.0002	PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	265.500.000,00	258.663.050,00	(6.836.950,00)	97,42	
3.27.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	265.500.000,00	258.663.050,00	(6.836.950,00)	97,42	
3.27.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.500.000,00	258.663.050,00	(6.836.950,00)	97,42	
3.27.05.1.01.0005	PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	102.000.000,00	101.840.000,00	(160.000,00)	99,84	
3.27.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	101.840.000,00	(160.000,00)	99,84	
3.27.05.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	101.840.000,00	(160.000,00)	99,84	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	125.000.000,00	124.400.000,00	(600.000,00)	99,52	
3.27.06.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	124.400.000,00	(600.000,00)	99,52	
3.27.06.1.01.0002	PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN DI LINTAS KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0004	SERTIFIKASI UNIT USAHA PEMBIBITAN/BUDIDAYA TERNAK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.27.06.1.01.0005	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
3.27.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
3.27.06.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.277.501.000,00	5.199.526.355,00	(77.974.645,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.07.1.01	PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN	3.373.314.000,00	3.352.281.300,00	(21.032.700,00)	99,38	
3.27.07.1.01.0003	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN	69.628.600,00	68.728.600,00	(900.000,00)	98,71	
3.27.07.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	69.628.600,00	68.728.600,00	(900.000,00)	98,71	
3.27.07.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.628.600,00	68.728.600,00	(900.000,00)	98,71	
3.27.07.1.01.0004	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	3.303.685.400,00	3.283.552.700,00	(20.132.700,00)	99,39	
3.27.07.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.303.685.400,00	3.283.552.700,00	(20.132.700,00)	99,39	
3.27.07.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.303.685.400,00	3.283.552.700,00	(20.132.700,00)	99,39	
3.27.07.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.07.1.01.0004.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.07.1.02	PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	572.387.000,00	557.617.000,00	(14.770.000,00)	97,42	
3.27.07.1.02.0001	DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN	333.375.000,00	329.377.000,00	(3.998.000,00)	98,80	
3.27.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	333.375.000,00	329.377.000,00	(3.998.000,00)	98,80	
3.27.07.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.375.000,00	329.377.000,00	(3.998.000,00)	98,80	
3.27.07.1.02.0002	PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	239.012.000,00	228.240.000,00	(10.772.000,00)	95,49	
3.27.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	239.012.000,00	228.240.000,00	(10.772.000,00)	95,49	
3.27.07.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.012.000,00	228.240.000,00	(10.772.000,00)	95,49	
3.27.07.1.03	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	(42.171.945,00)	96,83	
3.27.07.1.03.0005	PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN KORPORASI PETANI	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	(42.171.945,00)	96,83	
3.27.07.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	(42.171.945,00)	96,83	
3.27.07.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	(42.171.945,00)	96,83	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	110.360.240.015,00	104.180.975.011,00	(6.179.265.004,00)	94,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.120.076.515,00)	(102.369.207.511,00)	6.750.869.004,00	93,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(109.120.076.515,00)	(102.369.207.511,00)	6.750.869.004,00	93,81	

3.29.0.00.0.00.01.0000

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Satuan Kerja : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.697.509.650,00	21.368.645.736,38	(1.328.863.913,62)	94,15	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.29.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	266.344.000,00	200.610.845,00	(65.733.155,00)	75,32	
3.29.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	62.250.000,00	56.505.845,00	(5.744.155,00)	90,77	
3.29.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	62.250.000,00	56.505.845,00	(5.744.155,00)	90,77	
3.29.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.250.000,00	56.505.845,00	(5.744.155,00)	90,77	
3.29.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	12.475.000,00	4.598.350,00	(7.876.650,00)	36,86	
3.29.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.475.000,00	4.598.350,00	(7.876.650,00)	36,86	
3.29.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	4.598.350,00	(7.876.650,00)	36,86	
3.29.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	12.484.000,00	7.873.200,00	(4.610.800,00)	63,07	
3.29.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.484.000,00	7.873.200,00	(4.610.800,00)	63,07	
3.29.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.484.000,00	7.873.200,00	(4.610.800,00)	63,07	
3.29.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.483.000,00	0,00	(7.483.000,00)	0,00	
3.29.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.483.000,00	0,00	(7.483.000,00)	0,00	
3.29.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.483.000,00	0,00	(7.483.000,00)	0,00	
3.29.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.486.000,00	2.802.500,00	(4.683.500,00)	37,44	
3.29.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.486.000,00	2.802.500,00	(4.683.500,00)	37,44	
3.29.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.486.000,00	2.802.500,00	(4.683.500,00)	37,44	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.220.000,00	7.308.625,00	(8.911.375,00)	45,06	
3.29.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	16.220.000,00	7.308.625,00	(8.911.375,00)	45,06	
3.29.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	7.308.625,00	(8.911.375,00)	45,06	
3.29.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	115.496.000,00	100.031.825,00	(15.464.175,00)	86,61	
3.29.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	115.496.000,00	100.031.825,00	(15.464.175,00)	86,61	
3.29.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.496.000,00	100.031.825,00	(15.464.175,00)	86,61	
3.29.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	12.810.000,00	6.318.000,00	(6.492.000,00)	49,32	
3.29.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	12.810.000,00	6.318.000,00	(6.492.000,00)	49,32	
3.29.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	6.318.000,00	(6.492.000,00)	49,32	
3.29.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.640.000,00	15.172.500,00	(4.467.500,00)	77,25	
3.29.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	19.640.000,00	15.172.500,00	(4.467.500,00)	77,25	
3.29.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	15.172.500,00	(4.467.500,00)	77,25	
3.29.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.680.017.800,00	18.724.574.042,00	(955.443.758,00)	95,15	
3.29.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.197.000.000,00	18.365.978.481,00	(831.021.519,00)	95,67	
3.29.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.197.000.000,00	18.365.978.481,00	(831.021.519,00)	95,67	
3.29.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.197.000.000,00	18.365.978.481,00	(831.021.519,00)	95,67	
3.29.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	424.705.000,00	303.445.000,00	(121.260.000,00)	71,45	
3.29.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	424.705.000,00	303.445.000,00	(121.260.000,00)	71,45	
3.29.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	(1.955.000,00)	(1.955.000,00)	0,00	
3.29.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.705.000,00	305.400.000,00	(119.305.000,00)	71,91	
3.29.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	15.148.000,00	12.815.007,00	(2.332.993,00)	84,60	
3.29.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.148.000,00	12.815.007,00	(2.332.993,00)	84,60	
3.29.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.148.000,00	12.815.007,00	(2.332.993,00)	84,60	
3.29.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.948.800,00	1.901.449,00	(47.351,00)	97,57	
3.29.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.948.800,00	1.901.449,00	(47.351,00)	97,57	
3.29.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.948.800,00	1.901.449,00	(47.351,00)	97,57	
3.29.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.832.000,00	8.759.800,00	(72.200,00)	99,18	
3.29.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.832.000,00	8.759.800,00	(72.200,00)	99,18	
3.29.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.832.000,00	8.759.800,00	(72.200,00)	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.080.000,00	3.982.121,00	(97.879,00)	97,60	
3.29.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	3.982.121,00	(97.879,00)	97,60	
3.29.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	3.982.121,00	(97.879,00)	97,60	
3.29.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	24.200.000,00	23.686.147,00	(513.853,00)	97,88	
3.29.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	24.200.000,00	23.686.147,00	(513.853,00)	97,88	
3.29.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	23.686.147,00	(513.853,00)	97,88	
3.29.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.104.000,00	4.006.037,00	(97.963,00)	97,61	
3.29.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	4.104.000,00	4.006.037,00	(97.963,00)	97,61	
3.29.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.104.000,00	4.006.037,00	(97.963,00)	97,61	
3.29.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.29.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.29.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.29.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.29.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.846.000,00	59.197.880,00	(648.120,00)	98,92	
3.29.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	10.000.000,00	9.893.100,00	(106.900,00)	98,93	
3.29.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.893.100,00	(106.900,00)	98,93	
3.29.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.893.100,00	(106.900,00)	98,93	
3.29.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	2.200.000,00	2.099.780,00	(100.220,00)	95,44	
3.29.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.099.780,00	(100.220,00)	95,44	
3.29.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.099.780,00	(100.220,00)	95,44	
3.29.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47.646.000,00	47.205.000,00	(441.000,00)	99,07	
3.29.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	47.646.000,00	47.205.000,00	(441.000,00)	99,07	
3.29.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.646.000,00	47.205.000,00	(441.000,00)	99,07	
3.29.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	308.074.800,00	244.239.745,00	(63.835.055,00)	79,28	
3.29.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.027.000,00	27.707.175,00	(2.319.825,00)	92,27	
3.29.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.027.000,00	27.707.175,00	(2.319.825,00)	92,27	
3.29.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.027.000,00	27.707.175,00	(2.319.825,00)	92,27	
3.29.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.625.000,00	89.598.384,00	(21.026.616,00)	80,99	
3.29.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.625.000,00	89.598.384,00	(21.026.616,00)	80,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.625.000,00	89.598.384,00	(21.026.616,00)	80,99	
3.29.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	32.429.000,00	30.475.180,00	(1.953.820,00)	93,98	
3.29.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	32.429.000,00	30.475.180,00	(1.953.820,00)	93,98	
3.29.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.429.000,00	30.475.180,00	(1.953.820,00)	93,98	
3.29.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	8.599.341,00	(1.400.659,00)	85,99	
3.29.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.599.341,00	(1.400.659,00)	85,99	
3.29.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.599.341,00	(1.400.659,00)	85,99	
3.29.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.000.000,00	10.320.000,00	(4.680.000,00)	68,80	
3.29.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.320.000,00	(4.680.000,00)	68,80	
3.29.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.320.000,00	(4.680.000,00)	68,80	
3.29.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	79.993.800,00	47.977.665,00	(32.016.135,00)	59,98	
3.29.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	79.993.800,00	47.977.665,00	(32.016.135,00)	59,98	
3.29.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.993.800,00	47.977.665,00	(32.016.135,00)	59,98	
3.29.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	30.000.000,00	29.562.000,00	(438.000,00)	98,54	
3.29.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.562.000,00	(438.000,00)	98,54	
3.29.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.562.000,00	(438.000,00)	98,54	
3.29.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.871.000,00	7.800.000,00	(1.071.000,00)	87,93	
3.29.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.871.000,00	7.800.000,00	(1.071.000,00)	87,93	
3.29.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
3.29.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
3.29.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	8.271.000,00	7.800.000,00	(471.000,00)	94,31	
3.29.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.271.000,00	7.800.000,00	(471.000,00)	94,31	
3.29.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.816.569.050,00	1.652.966.736,00	(163.602.314,00)	90,99	
3.29.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	221.564.600,00	147.366.944,00	(74.197.656,00)	66,51	
3.29.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	221.564.600,00	147.366.944,00	(74.197.656,00)	66,51	
3.29.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.564.600,00	147.366.944,00	(74.197.656,00)	66,51	
3.29.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.595.004.450,00	1.505.599.792,00	(89.404.658,00)	94,39	
3.29.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.595.004.450,00	1.505.599.792,00	(89.404.658,00)	94,39	
3.29.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.004.450,00	1.505.599.792,00	(89.404.658,00)	94,39	
3.29.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	557.587.000,00	479.256.488,38	(78.330.511,62)	85,95	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	160.203.000,00	132.230.500,00	(27.972.500,00)	82,54	
3.29.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.203.000,00	132.230.500,00	(27.972.500,00)	82,54	
3.29.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.203.000,00	132.230.500,00	(27.972.500,00)	82,54	
3.29.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	257.154.000,00	211.966.000,00	(45.188.000,00)	82,43	
3.29.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	257.154.000,00	211.966.000,00	(45.188.000,00)	82,43	
3.29.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.154.000,00	211.966.000,00	(45.188.000,00)	82,43	
3.29.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.230.000,00	47.421.000,00	(2.809.000,00)	94,41	
3.29.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.230.000,00	47.421.000,00	(2.809.000,00)	94,41	
3.29.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.230.000,00	47.421.000,00	(2.809.000,00)	94,41	
3.29.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.000.000,00	73.550.187,38	(1.449.812,62)	98,07	
3.29.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.550.187,38	(1.449.812,62)	98,07	
3.29.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.550.187,38	(1.449.812,62)	98,07	
3.29.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	14.088.801,00	(911.199,00)	93,93	
3.29.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.088.801,00	(911.199,00)	93,93	
3.29.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.088.801,00	(911.199,00)	93,93	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	949.436.000,00	913.444.728,00	(35.991.272,00)	96,21	
3.29.02.1.01	PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	844.340.000,00	814.125.728,00	(30.214.272,00)	96,42	
3.29.02.1.01.0001	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH	844.340.000,00	814.125.728,00	(30.214.272,00)	96,42	
3.29.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	844.340.000,00	814.125.728,00	(30.214.272,00)	96,42	
3.29.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.340.000,00	814.125.728,00	(30.214.272,00)	96,42	
3.29.02.1.03	PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	105.096.000,00	99.319.000,00	(5.777.000,00)	94,50	
3.29.02.1.03.0001	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI NILAI PEROLEHAN AIR TANAH	26.292.000,00	26.172.000,00	(120.000,00)	99,54	
3.29.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	26.292.000,00	26.172.000,00	(120.000,00)	99,54	
3.29.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.292.000,00	26.172.000,00	(120.000,00)	99,54	
3.29.02.1.03.0002	PENGHITUNGAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH	22.516.000,00	17.963.000,00	(4.553.000,00)	79,78	
3.29.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	22.516.000,00	17.963.000,00	(4.553.000,00)	79,78	
3.29.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.516.000,00	17.963.000,00	(4.553.000,00)	79,78	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.02.1.03.0003	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR TANAH	56.288.000,00	55.184.000,00	(1.104.000,00)	98,04	
3.29.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	56.288.000,00	55.184.000,00	(1.104.000,00)	98,04	
3.29.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.288.000,00	55.184.000,00	(1.104.000,00)	98,04	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.775.706.000,00	2.472.559.807,00	(1.303.146.193,00)	65,49	
3.29.03.1.01	PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	25.500.000,00	22.495.000,00	(3.005.000,00)	88,22	
3.29.03.1.01.0002	PENENTUAN DAN PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	25.500.000,00	22.495.000,00	(3.005.000,00)	88,22	
3.29.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	22.495.000,00	(3.005.000,00)	88,22	
3.29.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	22.495.000,00	(3.005.000,00)	88,22	
3.29.03.1.03	PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	3.649.606.000,00	2.350.483.547,00	(1.299.122.453,00)	64,40	
3.29.03.1.03.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN USULAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DALAM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN OLEH PEMERINTAH PUSAT	335.838.000,00	325.693.000,00	(10.145.000,00)	96,98	
3.29.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	335.838.000,00	325.693.000,00	(10.145.000,00)	96,98	
3.29.03.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.838.000,00	325.693.000,00	(10.145.000,00)	96,98	
3.29.03.1.03.0003	PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	17.840.000,00	17.710.000,00	(130.000,00)	99,27	
3.29.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.840.000,00	17.710.000,00	(130.000,00)	99,27	
3.29.03.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.840.000,00	17.710.000,00	(130.000,00)	99,27	
3.29.03.1.03.0004	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT	3.295.928.000,00	2.007.080.547,00	(1.288.847.453,00)	60,90	
3.29.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.295.928.000,00	2.007.080.547,00	(1.288.847.453,00)	60,90	
3.29.03.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.295.928.000,00	2.007.080.547,00	(1.288.847.453,00)	60,90	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.03.1.04	PENATAUSAHAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS MINERAL LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT	100.600.000,00	99.581.260,00	(1.018.740,00)	98,99	
3.29.03.1.04.0003	PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS MINERAL LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT	100.600.000,00	99.581.260,00	(1.018.740,00)	98,99	
3.29.03.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.600.000,00	99.581.260,00	(1.018.740,00)	98,99	
3.29.03.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.600.000,00	99.581.260,00	(1.018.740,00)	98,99	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	5.566.413.800,00	5.289.056.832,53	(277.356.967,47)	95,02	
3.29.05.1.07	PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI	5.566.413.800,00	5.289.056.832,53	(277.356.967,47)	95,02	
3.29.05.1.07.0007	PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT	5.566.413.800,00	5.289.056.832,53	(277.356.967,47)	95,02	
3.29.05.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	566.413.800,00	554.522.503,00	(11.891.297,00)	97,90	
3.29.05.1.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.413.800,00	554.522.503,00	(11.891.297,00)	97,90	
3.29.05.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	(265.465.670,47)	94,69	
3.29.05.1.07.0007.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	(265.465.670,47)	94,69	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	15.852.898.250,00	15.511.750.801,08	(341.147.448,92)	97,85	
3.29.06.1.01	PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	203.468.000,00	197.547.150,00	(5.920.850,00)	97,09	
3.29.06.1.01.0001	PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	54.900.000,00	50.649.500,00	(4.250.500,00)	92,26	
3.29.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	54.900.000,00	50.649.500,00	(4.250.500,00)	92,26	
3.29.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	50.649.500,00	(4.250.500,00)	92,26	
3.29.06.1.01.0002	PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	27.050.000,00	26.542.500,00	(507.500,00)	98,12	
3.29.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	27.050.000,00	26.542.500,00	(507.500,00)	98,12	
3.29.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	26.542.500,00	(507.500,00)	98,12	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.29.06.1.01.0003	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	121.518.000,00	120.355.150,00	(1.162.850,00)	99,04	
3.29.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	121.518.000,00	120.355.150,00	(1.162.850,00)	99,04	
3.29.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.518.000,00	120.355.150,00	(1.162.850,00)	99,04	
3.29.06.1.06	PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	15.649.430.250,00	15.314.203.651,08	(335.226.598,92)	97,86	
3.29.06.1.06.0003	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU	1.498.085.500,00	1.431.833.167,00	(66.252.333,00)	95,58	
3.29.06.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.498.085.500,00	1.431.833.167,00	(66.252.333,00)	95,58	
3.29.06.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.085.500,00	1.431.833.167,00	(66.252.333,00)	95,58	
3.29.06.1.06.0006	PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	14.151.344.750,00	13.882.370.484,08	(268.974.265,92)	98,10	
3.29.06.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.151.344.750,00	13.882.370.484,08	(268.974.265,92)	98,10	
3.29.06.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.437.000,00	1.057.935.696,08	(125.501.303,92)	89,40	
3.29.06.1.06.0006.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.967.907.750,00	12.824.434.788,00	(143.472.962,00)	98,89	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	48.841.963.700,00	45.555.457.904,99	(3.286.505.795,01)	93,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.841.963.700,00)	(45.555.457.904,99)	3.286.505.795,01	93,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(48.841.963.700,00)	(45.555.457.904,99)	3.286.505.795,01	93,27	

3.31.3.30.0.00.02.0000

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Satuan Kerja : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
3.31.3.30.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.500.000,00	65.245.000,00	20.745.000,00	146,62	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
3.31.3.30.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	44.500.000,00	65.245.000,00	20.745.000,00	146,62	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	44.500.000,00	65.245.000,00	20.745.000,00	146,62	
5	BELANJA DAERAH					
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	273.273.900,00	241.828.810,00	(31.445.090,00)	88,49	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.30.02.1.01	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA DAN REKOMENDASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) BAGI DISTRIBUTOR	19.340.000,00	7.543.000,00	(11.797.000,00)	39,00	
3.30.02.1.01.0001	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN SIUP-MB TOKO BEBAS BEA DAN REKOMENDASI SIUP-MB BAGI DISTRIBUTOR MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	19.340.000,00	7.543.000,00	(11.797.000,00)	39,00	
3.30.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.340.000,00	7.543.000,00	(11.797.000,00)	39,00	
3.30.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.340.000,00	7.543.000,00	(11.797.000,00)	39,00	
3.30.02.1.03	PENGENDALIAN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA PENGECER TERDAFTAR	21.389.400,00	18.595.810,00	(2.793.590,00)	86,94	
3.30.02.1.03.0002	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA	9.969.400,00	8.602.310,00	(1.367.090,00)	86,29	
3.30.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.969.400,00	8.602.310,00	(1.367.090,00)	86,29	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.969.400,00	8.602.310,00	(1.367.090,00)	86,29	
3.30.02.1.03.0003	PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA	11.420.000,00	9.993.500,00	(1.426.500,00)	87,51	
3.30.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.420.000,00	9.993.500,00	(1.426.500,00)	87,51	
3.30.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	9.993.500,00	(1.426.500,00)	87,51	
3.30.02.1.04	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SKA DAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)	232.544.500,00	215.690.000,00	(16.854.500,00)	92,75	
3.30.02.1.04.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA	232.544.500,00	215.690.000,00	(16.854.500,00)	92,75	
3.30.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	232.544.500,00	215.690.000,00	(16.854.500,00)	92,75	
3.30.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.544.500,00	215.690.000,00	(16.854.500,00)	92,75	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	247.301.900,00	230.636.970,00	(16.664.930,00)	93,26	
3.30.03.1.01	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS	247.301.900,00	230.636.970,00	(16.664.930,00)	93,26	
3.30.03.1.01.0002	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI	158.943.900,00	151.182.800,00	(7.761.100,00)	95,12	
3.30.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	158.943.900,00	151.182.800,00	(7.761.100,00)	95,12	
3.30.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.943.900,00	151.182.800,00	(7.761.100,00)	95,12	
3.30.03.1.01.0003	PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS	73.505.000,00	66.565.000,00	(6.940.000,00)	90,56	
3.30.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	73.505.000,00	66.565.000,00	(6.940.000,00)	90,56	
3.30.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.505.000,00	66.565.000,00	(6.940.000,00)	90,56	
3.30.03.1.01.0004	PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SRG DI MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI	14.853.000,00	12.889.170,00	(1.963.830,00)	86,78	
3.30.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.853.000,00	12.889.170,00	(1.963.830,00)	86,78	
3.30.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.853.000,00	12.889.170,00	(1.963.830,00)	86,78	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	780.098.500,00	750.647.755,00	(29.450.745,00)	96,22	
3.30.04.1.01	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH PROVINSI	139.720.000,00	128.382.600,00	(11.337.400,00)	91,89	
3.30.04.1.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DI TINGKAT DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR	102.700.000,00	92.042.600,00	(10.657.400,00)	89,62	
3.30.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	102.700.000,00	92.042.600,00	(10.657.400,00)	89,62	
3.30.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.700.000,00	92.042.600,00	(10.657.400,00)	89,62	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.04.1.01.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG PENTING DI TINGKAT DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR	37.020.000,00	36.340.000,00	(680.000,00)	98,16	
3.30.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.020.000,00	36.340.000,00	(680.000,00)	98,16	
3.30.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.020.000,00	36.340.000,00	(680.000,00)	98,16	
3.30.04.1.02	PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	511.300.000,00	502.659.330,00	(8.640.670,00)	98,31	
3.30.04.1.02.0001	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA	302.820.000,00	299.509.500,00	(3.310.500,00)	98,91	
3.30.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	302.820.000,00	299.509.500,00	(3.310.500,00)	98,91	
3.30.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.820.000,00	299.509.500,00	(3.310.500,00)	98,91	
3.30.04.1.02.0002	OPERASI PASAR DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN POKOK YANG DAMPAKNYA BEBERAPA DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	208.480.000,00	203.149.830,00	(5.330.170,00)	97,44	
3.30.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	208.480.000,00	203.149.830,00	(5.330.170,00)	97,44	
3.30.04.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.480.000,00	203.149.830,00	(5.330.170,00)	97,44	
3.30.04.1.03	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM MELAKUKAN PELAKSANAAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI DI WILAYAH KERJANYA	129.078.500,00	119.605.825,00	(9.472.675,00)	92,66	
3.30.04.1.03.0002	PENGAWASAN PENGADAAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT DAERAH PROVINSI	11.812.500,00	11.710.425,00	(102.075,00)	99,14	
3.30.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.812.500,00	11.710.425,00	(102.075,00)	99,14	
3.30.04.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.812.500,00	11.710.425,00	(102.075,00)	99,14	
3.30.04.1.03.0003	PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI	46.884.000,00	44.802.000,00	(2.082.000,00)	95,56	
3.30.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	46.884.000,00	44.802.000,00	(2.082.000,00)	95,56	
3.30.04.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.884.000,00	44.802.000,00	(2.082.000,00)	95,56	
3.30.04.1.03.0004	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA	30.398.000,00	26.515.000,00	(3.883.000,00)	87,23	
3.30.04.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.398.000,00	26.515.000,00	(3.883.000,00)	87,23	
3.30.04.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.398.000,00	26.515.000,00	(3.883.000,00)	87,23	
3.30.04.1.03.0005	PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI	39.984.000,00	36.578.400,00	(3.405.600,00)	91,48	
3.30.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	39.984.000,00	36.578.400,00	(3.405.600,00)	91,48	
3.30.04.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.984.000,00	36.578.400,00	(3.405.600,00)	91,48	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	746.609.000,00	680.352.150,00	(66.256.850,00)	91,13	
3.30.05.1.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI	746.609.000,00	680.352.150,00	(66.256.850,00)	91,13	
3.30.05.1.01.0001	PAMERAN DAGANG INTERNASIONAL/NASIONAL	414.266.000,00	396.935.350,00	(17.330.650,00)	95,82	
3.30.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	414.266.000,00	396.935.350,00	(17.330.650,00)	95,82	
3.30.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.266.000,00	396.935.350,00	(17.330.650,00)	95,82	
3.30.05.1.01.0002	PAMERAN DAGANG LOKAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.05.1.01.0003	MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	300.000.000,00	251.806.000,00	(48.194.000,00)	83,94	
3.30.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	251.806.000,00	(48.194.000,00)	83,94	
3.30.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	251.806.000,00	(48.194.000,00)	83,94	
3.30.05.1.01.0004	PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	32.343.000,00	31.610.800,00	(732.200,00)	97,74	
3.30.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	32.343.000,00	31.610.800,00	(732.200,00)	97,74	
3.30.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.343.000,00	31.610.800,00	(732.200,00)	97,74	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.713.763.700,00	3.038.498.441,00	(675.265.259,00)	81,82	
3.30.06.1.01	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.285.421.700,00	2.630.889.401,00	(654.532.299,00)	80,08	
3.30.06.1.01.0001	PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.168.377.700,00	2.553.655.401,00	(614.722.299,00)	80,60	
3.30.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.099.661.700,00	2.491.427.200,00	(608.234.500,00)	80,38	
3.30.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.099.661.700,00	2.491.427.200,00	(608.234.500,00)	80,38	
3.30.06.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	68.716.000,00	62.228.201,00	(6.487.799,00)	90,56	
3.30.06.1.01.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.716.000,00	62.228.201,00	(6.487.799,00)	90,56	
3.30.06.1.01.0001.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.06.1.01.0002	PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN	88.424.000,00	55.136.500,00	(33.287.500,00)	62,35	
3.30.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	88.424.000,00	55.136.500,00	(33.287.500,00)	62,35	
3.30.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.424.000,00	55.136.500,00	(33.287.500,00)	62,35	
3.30.06.1.01.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	28.620.000,00	22.097.500,00	(6.522.500,00)	77,21	
3.30.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	28.620.000,00	22.097.500,00	(6.522.500,00)	77,21	
3.30.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.620.000,00	22.097.500,00	(6.522.500,00)	77,21	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.06.1.02	PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	272.500.000,00	257.119.040,00	(15.380.960,00)	94,36	
3.30.06.1.02.0004	PENGEMBANGAN LAYANAN KALIBRASI	126.106.000,00	125.233.290,00	(872.710,00)	99,31	
3.30.06.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	126.106.000,00	125.233.290,00	(872.710,00)	99,31	
3.30.06.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.106.000,00	125.233.290,00	(872.710,00)	99,31	
3.30.06.1.02.0005	PENGEMBANGAN LAYANAN PENGUJIAN	114.543.000,00	102.355.750,00	(12.187.250,00)	89,36	
3.30.06.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	114.543.000,00	102.355.750,00	(12.187.250,00)	89,36	
3.30.06.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.543.000,00	102.355.750,00	(12.187.250,00)	89,36	
3.30.06.1.02.0006	PEMANTAUAN MUTU PRODUK	31.851.000,00	29.530.000,00	(2.321.000,00)	92,71	
3.30.06.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	31.851.000,00	29.530.000,00	(2.321.000,00)	92,71	
3.30.06.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.851.000,00	29.530.000,00	(2.321.000,00)	92,71	
3.30.06.1.03	PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.842.000,00	150.490.000,00	(5.352.000,00)	96,57	
3.30.06.1.03.0003	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA SERTA KEGIATAN PERDAGANGAN SESUAI PARAMETER KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	131.412.000,00	126.121.000,00	(5.291.000,00)	95,97	
3.30.06.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	131.412.000,00	126.121.000,00	(5.291.000,00)	95,97	
3.30.06.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.412.000,00	126.121.000,00	(5.291.000,00)	95,97	
3.30.06.1.03.0004	FASILITASI PENANGANAN TERHADAP PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	24.430.000,00	24.369.000,00	(61.000,00)	99,75	
3.30.06.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.430.000,00	24.369.000,00	(61.000,00)	99,75	
3.30.06.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.430.000,00	24.369.000,00	(61.000,00)	99,75	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	193.129.000,00	183.065.496,00	(10.063.504,00)	94,79	
3.30.07.1.01	PELAKSANAAN PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI	88.332.000,00	85.245.586,00	(3.086.414,00)	96,51	
3.30.07.1.01.0002	FASILITASI PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT PROVINSI	88.332.000,00	85.245.586,00	(3.086.414,00)	96,51	
3.30.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	88.332.000,00	85.245.586,00	(3.086.414,00)	96,51	
3.30.07.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.332.000,00	85.245.586,00	(3.086.414,00)	96,51	
3.30.07.1.02	PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	71.603.000,00	70.212.510,00	(1.390.490,00)	98,06	
3.30.07.1.02.0002	FASILITASI PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT PROVINSI	71.603.000,00	70.212.510,00	(1.390.490,00)	98,06	
3.30.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.603.000,00	70.212.510,00	(1.390.490,00)	98,06	
3.30.07.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.603.000,00	70.212.510,00	(1.390.490,00)	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.07.1.03	PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	33.194.000,00	27.607.400,00	(5.586.600,00)	83,17	
3.30.07.1.03.0004	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SANDANG PRODUKSI DALAM NEGERI	17.250.000,00	15.210.550,00	(2.039.450,00)	88,18	
3.30.07.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.250.000,00	15.210.550,00	(2.039.450,00)	88,18	
3.30.07.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	15.210.550,00	(2.039.450,00)	88,18	
3.30.07.1.03.0005	FASILITASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT PROVINSI	15.944.000,00	12.396.850,00	(3.547.150,00)	77,75	
3.30.07.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.944.000,00	12.396.850,00	(3.547.150,00)	77,75	
3.30.07.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.944.000,00	12.396.850,00	(3.547.150,00)	77,75	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.924.674.591,00	30.925.813.877,00	(998.860.714,00)	96,87	
3.31.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	537.145.000,00	514.242.529,00	(22.902.471,00)	95,74	
3.31.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	89.724.000,00	85.161.052,00	(4.562.948,00)	94,91	
3.31.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	89.724.000,00	85.161.052,00	(4.562.948,00)	94,91	
3.31.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.724.000,00	85.161.052,00	(4.562.948,00)	94,91	
3.31.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.167.000,00	10.058.066,00	(108.934,00)	98,93	
3.31.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.167.000,00	10.137.253,00	(29.747,00)	99,71	
3.31.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.167.000,00	10.137.253,00	(29.747,00)	99,71	
3.31.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.167.000,00	10.137.253,00	(29.747,00)	99,71	
3.31.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	11.167.000,00	10.497.840,00	(669.160,00)	94,01	
3.31.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.167.000,00	10.497.840,00	(669.160,00)	94,01	
3.31.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.167.000,00	10.497.840,00	(669.160,00)	94,01	
3.31.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	90.984.000,00	88.291.257,00	(2.692.743,00)	97,04	
3.31.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	90.984.000,00	88.291.257,00	(2.692.743,00)	97,04	
3.31.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.984.000,00	88.291.257,00	(2.692.743,00)	97,04	
3.31.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	160.232.000,00	156.552.663,00	(3.679.337,00)	97,70	
3.31.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	160.232.000,00	156.552.663,00	(3.679.337,00)	97,70	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.232.000,00	156.552.663,00	(3.679.337,00)	97,70	
3.31.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	65.736.000,00	60.281.732,00	(5.454.268,00)	91,70	
3.31.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	65.736.000,00	60.281.732,00	(5.454.268,00)	91,70	
3.31.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.736.000,00	60.281.732,00	(5.454.268,00)	91,70	
3.31.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.455.000,00	24.000.600,00	(1.454.400,00)	94,29	
3.31.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	25.455.000,00	24.000.600,00	(1.454.400,00)	94,29	
3.31.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.455.000,00	24.000.600,00	(1.454.400,00)	94,29	
3.31.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	63.346.000,00	59.204.000,00	(4.142.000,00)	93,46	
3.31.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	63.346.000,00	59.204.000,00	(4.142.000,00)	93,46	
3.31.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.346.000,00	59.204.000,00	(4.142.000,00)	93,46	
3.31.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.078.681.000,00	22.495.687.596,00	(582.993.404,00)	97,47	
3.31.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.579.000.000,00	22.067.117.066,00	(511.882.934,00)	97,73	
3.31.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.579.000.000,00	22.067.117.066,00	(511.882.934,00)	97,73	
3.31.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	22.579.000.000,00	22.067.117.066,00	(511.882.934,00)	97,73	
3.31.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	353.545.000,00	304.295.000,00	(49.250.000,00)	86,07	
3.31.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	353.545.000,00	304.295.000,00	(49.250.000,00)	86,07	
3.31.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.545.000,00	304.295.000,00	(49.250.000,00)	86,07	
3.31.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.500.000,00	9.877.480,00	(622.520,00)	94,07	
3.31.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	9.877.480,00	(622.520,00)	94,07	
3.31.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.877.480,00	(622.520,00)	94,07	
3.31.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	15.560.000,00	14.768.262,00	(791.738,00)	94,91	
3.31.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.560.000,00	14.768.262,00	(791.738,00)	94,91	
3.31.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	14.768.262,00	(791.738,00)	94,91	
3.31.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	24.220.000,00	18.417.691,00	(5.802.309,00)	76,04	
3.31.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.220.000,00	18.417.691,00	(5.802.309,00)	76,04	
3.31.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.220.000,00	18.417.691,00	(5.802.309,00)	76,04	
3.31.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	22.100.000,00	19.734.544,00	(2.365.456,00)	89,30	
3.31.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	22.100.000,00	19.734.544,00	(2.365.456,00)	89,30	
3.31.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	19.734.544,00	(2.365.456,00)	89,30	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	31.436.000,00	29.987.963,00	(1.448.037,00)	95,39	
3.31.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	31.436.000,00	29.987.963,00	(1.448.037,00)	95,39	
3.31.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.436.000,00	29.987.963,00	(1.448.037,00)	95,39	
3.31.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	42.320.000,00	31.489.590,00	(10.830.410,00)	74,41	
3.31.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	42.320.000,00	31.489.590,00	(10.830.410,00)	74,41	
3.31.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.320.000,00	31.489.590,00	(10.830.410,00)	74,41	
3.31.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.366.000,00	18.389.000,00	(2.977.000,00)	86,07	
3.31.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	10.000.000,00	9.879.000,00	(121.000,00)	98,79	
3.31.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.879.000,00	(121.000,00)	98,79	
3.31.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.879.000,00	(121.000,00)	98,79	
3.31.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	11.366.000,00	8.510.000,00	(2.856.000,00)	74,87	
3.31.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	11.366.000,00	8.510.000,00	(2.856.000,00)	74,87	
3.31.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.366.000,00	8.510.000,00	(2.856.000,00)	74,87	
3.31.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.354.831.911,00	1.288.003.614,00	(66.828.297,00)	95,07	
3.31.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	101.162.000,00	99.580.725,00	(1.581.275,00)	98,44	
3.31.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	101.162.000,00	99.580.725,00	(1.581.275,00)	98,44	
3.31.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.162.000,00	99.580.725,00	(1.581.275,00)	98,44	
3.31.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	375.171.191,00	360.981.869,00	(14.189.322,00)	96,22	
3.31.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	375.171.191,00	360.981.869,00	(14.189.322,00)	96,22	
3.31.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.171.191,00	360.981.869,00	(14.189.322,00)	96,22	
3.31.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	64.568.000,00	63.188.018,00	(1.379.982,00)	97,86	
3.31.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	64.568.000,00	63.188.018,00	(1.379.982,00)	97,86	
3.31.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.568.000,00	63.188.018,00	(1.379.982,00)	97,86	
3.31.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	206.409.000,00	205.242.562,00	(1.166.438,00)	99,43	
3.31.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	206.409.000,00	205.242.562,00	(1.166.438,00)	99,43	
3.31.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.409.000,00	205.242.562,00	(1.166.438,00)	99,43	
3.31.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	185.130.020,00	182.155.850,00	(2.974.170,00)	98,39	
3.31.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	185.130.020,00	182.155.850,00	(2.974.170,00)	98,39	
3.31.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.130.020,00	182.155.850,00	(2.974.170,00)	98,39	
3.31.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	37.752.000,00	36.970.950,00	(781.050,00)	97,93	
3.31.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	37.752.000,00	36.970.950,00	(781.050,00)	97,93	
3.31.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.752.000,00	36.970.950,00	(781.050,00)	97,93	
3.31.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	162.490.000,00	121.082.400,00	(41.407.600,00)	74,52	
3.31.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	162.490.000,00	121.082.400,00	(41.407.600,00)	74,52	
3.31.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.490.000,00	121.082.400,00	(41.407.600,00)	74,52	
3.31.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	216.941.700,00	213.593.240,00	(3.348.460,00)	98,46	
3.31.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	216.941.700,00	213.593.240,00	(3.348.460,00)	98,46	
3.31.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.941.700,00	213.593.240,00	(3.348.460,00)	98,46	
3.31.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	309.316.000,00	292.658.991,00	(16.657.009,00)	94,61	
3.31.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	95.842.000,00	93.809.430,00	(2.032.570,00)	97,88	
3.31.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	95.842.000,00	93.809.430,00	(2.032.570,00)	97,88	
3.31.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.842.000,00	93.809.430,00	(2.032.570,00)	97,88	
3.31.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	213.474.000,00	198.849.561,00	(14.624.439,00)	93,15	
3.31.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	213.474.000,00	198.849.561,00	(14.624.439,00)	93,15	
3.31.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.474.000,00	198.849.561,00	(14.624.439,00)	93,15	
3.31.01.1.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.07.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.774.237.280,00	4.528.358.407,00	(245.878.873,00)	94,85	
3.31.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	864.626.830,00	729.972.222,00	(134.654.608,00)	84,43	
3.31.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	864.626.830,00	729.972.222,00	(134.654.608,00)	84,43	
3.31.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.626.830,00	729.972.222,00	(134.654.608,00)	84,43	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.909.610.450,00	3.798.386.185,00	(111.224.265,00)	97,16	
3.31.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.909.610.450,00	3.798.386.185,00	(111.224.265,00)	97,16	
3.31.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.909.610.450,00	3.798.386.185,00	(111.224.265,00)	97,16	
3.31.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.849.097.400,00	1.788.473.740,00	(60.623.660,00)	96,72	
3.31.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	337.482.700,00	326.778.560,00	(10.704.140,00)	96,83	
3.31.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	337.482.700,00	326.778.560,00	(10.704.140,00)	96,83	
3.31.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.482.700,00	326.778.560,00	(10.704.140,00)	96,83	
3.31.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	607.272.900,00	570.657.730,00	(36.615.170,00)	93,97	
3.31.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	607.272.900,00	570.657.730,00	(36.615.170,00)	93,97	
3.31.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.272.900,00	570.657.730,00	(36.615.170,00)	93,97	
3.31.01.1.09.0005	PEMELIHARAAN MEBEL	14.166.600,00	14.014.860,00	(151.740,00)	98,93	
3.31.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	14.166.600,00	14.014.860,00	(151.740,00)	98,93	
3.31.01.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.166.600,00	14.014.860,00	(151.740,00)	98,93	
3.31.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	237.500.700,00	227.946.790,00	(9.553.910,00)	95,98	
3.31.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	237.500.700,00	227.946.790,00	(9.553.910,00)	95,98	
3.31.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.500.700,00	227.946.790,00	(9.553.910,00)	95,98	
3.31.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	154.732.000,00	153.986.400,00	(745.600,00)	99,52	
3.31.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	154.732.000,00	153.986.400,00	(745.600,00)	99,52	
3.31.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.732.000,00	153.986.400,00	(745.600,00)	99,52	
3.31.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	497.942.500,00	495.089.400,00	(2.853.100,00)	99,43	
3.31.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	497.942.500,00	495.089.400,00	(2.853.100,00)	99,43	
3.31.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.942.500,00	495.089.400,00	(2.853.100,00)	99,43	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.050.112.257,00	4.718.690.073,00	(2.331.422.184,00)	66,93	
3.31.02.1.01	PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI	7.050.112.257,00	4.718.690.073,00	(2.331.422.184,00)	66,93	
3.31.02.1.01.0001	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI	20.150.000,00	16.012.000,00	(4.138.000,00)	79,46	
3.31.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	16.012.000,00	(4.138.000,00)	79,46	
3.31.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	16.012.000,00	(4.138.000,00)	79,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.02.1.01.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	644.285.257,00	640.453.620,00	(3.831.637,00)	99,41	
3.31.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	644.285.257,00	640.453.620,00	(3.831.637,00)	99,41	
3.31.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.285.257,00	640.453.620,00	(3.831.637,00)	99,41	
3.31.02.1.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	290.900.000,00	287.853.348,00	(3.046.652,00)	98,95	
3.31.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	290.900.000,00	287.853.348,00	(3.046.652,00)	98,95	
3.31.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.900.000,00	287.853.348,00	(3.046.652,00)	98,95	
3.31.02.1.01.0004	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	4.964.354.000,00	2.679.117.026,00	(2.285.236.974,00)	53,97	
3.31.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.964.354.000,00	2.679.117.026,00	(2.285.236.974,00)	53,97	
3.31.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.964.354.000,00	2.679.117.026,00	(2.285.236.974,00)	53,97	
3.31.02.1.01.0005	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.107.363.000,00	1.072.203.079,00	(35.159.921,00)	96,82	
3.31.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.107.363.000,00	1.072.203.079,00	(35.159.921,00)	96,82	
3.31.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.363.000,00	1.072.203.079,00	(35.159.921,00)	96,82	
3.31.02.1.01.0006	EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	23.060.000,00	23.051.000,00	(9.000,00)	99,96	
3.31.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	23.060.000,00	23.051.000,00	(9.000,00)	99,96	
3.31.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	23.051.000,00	(9.000,00)	99,96	
3.31.02.1.01.0010	PELAKSANAAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) DI LEVEL PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	153.075.000,00	145.589.410,00	(7.485.590,00)	95,11	
3.31.03.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI), DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN PROVINSI	153.075.000,00	145.589.410,00	(7.485.590,00)	95,11	
3.31.03.1.01.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	117.420.000,00	110.600.000,00	(6.820.000,00)	94,19	
3.31.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	117.420.000,00	110.600.000,00	(6.820.000,00)	94,19	
3.31.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.420.000,00	110.600.000,00	(6.820.000,00)	94,19	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.03.1.01.0004	FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)	35.655.000,00	34.989.410,00	(665.590,00)	98,13	
3.31.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	35.655.000,00	34.989.410,00	(665.590,00)	98,13	
3.31.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.655.000,00	34.989.410,00	(665.590,00)	98,13	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.296.000,00	30.105.334,00	(190.666,00)	99,37	
3.31.04.1.01	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN PROVINSI BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	30.296.000,00	30.105.334,00	(190.666,00)	99,37	
3.31.04.1.01.0001	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP PROVINSI MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	18.386.000,00	18.215.484,00	(170.516,00)	99,07	
3.31.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.386.000,00	18.215.484,00	(170.516,00)	99,07	
3.31.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.386.000,00	18.215.484,00	(170.516,00)	99,07	
3.31.04.1.01.0003	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP PROVINSI DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	11.910.000,00	11.889.850,00	(20.150,00)	99,83	
3.31.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.910.000,00	11.889.850,00	(20.150,00)	99,83	
3.31.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.910.000,00	11.889.850,00	(20.150,00)	99,83	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	45.112.333.848,00	40.945.228.316,00	(4.167.105.532,00)	90,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.067.833.848,00)	(40.879.983.316,00)	4.187.850.532,00	90,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(45.067.833.848,00)	(40.879.983.316,00)	4.187.850.532,00	90,71	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.659.784.987,00	1.433.756.086,00	(226.028.901,00)	86,38	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.820.000,00	38.271.243,00	(12.548.757,00)	75,31	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.520.000,00	13.777.632,00	(3.742.368,00)	78,64	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.520.000,00	13.777.632,00	(3.742.368,00)	78,64	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	13.777.632,00	(3.742.368,00)	78,64	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	39,22	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.031.550,00	(68.450,00)	98,66	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.400.000,00	2.948.300,00	(2.451.700,00)	54,60	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	2.948.300,00	(2.451.700,00)	54,60	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.948.300,00	(2.451.700,00)	54,60	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.482.211,00	(17.789,00)	99,76	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.482.211,00	(17.789,00)	99,76	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.482.211,00	(17.789,00)	99,76	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	28.775.000,00	26.534.535,00	(2.240.465,00)	92,21	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	13.200.000,00	11.310.000,00	(1.890.000,00)	85,68	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	11.310.000,00	(1.890.000,00)	85,68	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	11.310.000,00	(1.890.000,00)	85,68	
4.01.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.000.000,00	4.759.535,00	(240.465,00)	95,19	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.759.535,00	(240.465,00)	95,19	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.759.535,00	(240.465,00)	95,19	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	10.575.000,00	10.465.000,00	(110.000,00)	98,96	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.575.000,00	10.465.000,00	(110.000,00)	98,96	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	10.465.000,00	(110.000,00)	98,96	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	90.463.000,00	56.507.610,00	(33.955.390,00)	62,46	
4.01.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	51.550.000,00	49.007.610,00	(2.542.390,00)	95,07	
4.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	51.550.000,00	49.007.610,00	(2.542.390,00)	95,07	
4.01.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.550.000,00	49.007.610,00	(2.542.390,00)	95,07	
4.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38.913.000,00	7.500.000,00	(31.413.000,00)	19,27	
4.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	38.913.000,00	7.500.000,00	(31.413.000,00)	19,27	
4.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.913.000,00	7.500.000,00	(31.413.000,00)	19,27	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	350.590.800,00	263.916.510,00	(86.674.290,00)	75,28	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.842.800,00	42.800.490,00	(10.042.310,00)	81,00	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	52.842.800,00	42.800.490,00	(10.042.310,00)	81,00	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.842.800,00	42.800.490,00	(10.042.310,00)	81,00	
4.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.950.000,00	69.884.000,00	(19.066.000,00)	78,57	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	88.950.000,00	69.884.000,00	(19.066.000,00)	78,57	
4.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.950.000,00	69.884.000,00	(19.066.000,00)	78,57	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.760.000,00	29.157.270,00	(7.602.730,00)	79,32	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	36.760.000,00	29.157.270,00	(7.602.730,00)	79,32	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.760.000,00	29.157.270,00	(7.602.730,00)	79,32	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	172.038.000,00	122.074.750,00	(49.963.250,00)	70,96	
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	172.038.000,00	122.074.750,00	(49.963.250,00)	70,96	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.038.000,00	122.074.750,00	(49.963.250,00)	70,96	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.139.136.187,00	1.048.526.188,00	(90.609.999,00)	92,05	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.139.136.187,00	1.048.526.188,00	(90.609.999,00)	92,05	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.139.136.187,00	1.048.526.188,00	(90.609.999,00)	92,05	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.136.187,00	1.048.526.188,00	(90.609.999,00)	92,05	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	985.862.000,00	911.789.106,00	(74.072.894,00)	92,49	
4.01.03.1.01	PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN	155.363.000,00	144.603.606,00	(10.759.394,00)	93,07	
4.01.03.1.01.0001	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	18.815.000,00	16.409.575,00	(2.405.425,00)	87,22	
4.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.815.000,00	16.409.575,00	(2.405.425,00)	87,22	
4.01.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.815.000,00	16.409.575,00	(2.405.425,00)	87,22	
4.01.03.1.01.0002	FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	42.800.000,00	38.637.473,00	(4.162.527,00)	90,27	
4.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	42.800.000,00	38.637.473,00	(4.162.527,00)	90,27	
4.01.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	38.637.473,00	(4.162.527,00)	90,27	
4.01.03.1.01.0003	FASILITASI PENATAAN WILAYAH	93.748.000,00	89.556.558,00	(4.191.442,00)	95,53	
4.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	93.748.000,00	89.556.558,00	(4.191.442,00)	95,53	
4.01.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.748.000,00	89.556.558,00	(4.191.442,00)	95,53	
4.01.03.1.02	PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	442.493.000,00	397.079.830,00	(45.413.170,00)	89,74	
4.01.03.1.02.0001	FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	107.725.000,00	102.424.632,00	(5.300.368,00)	95,08	
4.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	107.725.000,00	102.424.632,00	(5.300.368,00)	95,08	
4.01.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.725.000,00	102.424.632,00	(5.300.368,00)	95,08	
4.01.03.1.02.0002	PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN	79.231.000,00	74.048.398,00	(5.182.602,00)	93,46	
4.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	79.231.000,00	74.048.398,00	(5.182.602,00)	93,46	
4.01.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.231.000,00	74.048.398,00	(5.182.602,00)	93,46	
4.01.03.1.02.0003	EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	255.537.000,00	220.606.800,00	(34.930.200,00)	86,33	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	255.537.000,00	220.606.800,00	(34.930.200,00)	86,33	
4.01.03.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.537.000,00	220.606.800,00	(34.930.200,00)	86,33	
4.01.03.1.03	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	388.006.000,00	370.105.670,00	(17.900.330,00)	95,39	
4.01.03.1.03.0001	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH	353.842.000,00	343.158.170,00	(10.683.830,00)	96,98	
4.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	353.842.000,00	343.158.170,00	(10.683.830,00)	96,98	
4.01.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.842.000,00	343.158.170,00	(10.683.830,00)	96,98	
4.01.03.1.03.0002	FASILITASI KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA	16.754.000,00	12.416.500,00	(4.337.500,00)	74,11	
4.01.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.754.000,00	12.416.500,00	(4.337.500,00)	74,11	
4.01.03.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.754.000,00	12.416.500,00	(4.337.500,00)	74,11	
4.01.03.1.03.0003	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	17.410.000,00	14.531.000,00	(2.879.000,00)	83,46	
4.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.410.000,00	14.531.000,00	(2.879.000,00)	83,46	
4.01.03.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.410.000,00	14.531.000,00	(2.879.000,00)	83,46	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.185.291.800,00	13.455.816.933,00	(2.729.474.867,00)	83,14	
4.01.04.1.01	FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	15.780.331.800,00	13.164.143.633,00	(2.616.188.167,00)	83,42	
4.01.04.1.01.0001	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL	1.086.722.000,00	618.778.890,00	(467.943.110,00)	56,94	
4.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.086.722.000,00	618.778.890,00	(467.943.110,00)	56,94	
4.01.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.722.000,00	618.778.890,00	(467.943.110,00)	56,94	
4.01.04.1.01.0002	FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL	14.693.609.800,00	12.545.364.743,00	(2.148.245.057,00)	85,38	
4.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.693.609.800,00	12.545.364.743,00	(2.148.245.057,00)	85,38	
4.01.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.609.800,00	4.079.694.360,00	(1.562.915.440,00)	72,30	
4.01.04.1.01.0002.5.1.05	Belanja Hibah	9.051.000.000,00	8.465.670.383,00	(585.329.617,00)	93,53	
4.01.04.1.02	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR	165.000.000,00	122.992.500,00	(42.007.500,00)	74,54	
4.01.04.1.02.0001	FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PENDIDIKAN	55.000.000,00	45.958.000,00	(9.042.000,00)	83,56	
4.01.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	45.958.000,00	(9.042.000,00)	83,56	
4.01.04.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	45.958.000,00	(9.042.000,00)	83,56	
4.01.04.1.02.0002	FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEHATAN	55.000.000,00	37.677.000,00	(17.323.000,00)	68,50	
4.01.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	37.677.000,00	(17.323.000,00)	68,50	
4.01.04.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	37.677.000,00	(17.323.000,00)	68,50	
4.01.04.1.02.0003	FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG SOSIAL	55.000.000,00	39.357.500,00	(15.642.500,00)	71,56	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	39.357.500,00	(15.642.500,00)	71,56	
4.01.04.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	39.357.500,00	(15.642.500,00)	71,56	
4.01.04.1.03	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR	239.960.000,00	168.680.800,00	(71.279.200,00)	70,30	
4.01.04.1.03.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA	92.480.000,00	67.373.400,00	(25.106.600,00)	72,85	
4.01.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	92.480.000,00	67.373.400,00	(25.106.600,00)	72,85	
4.01.04.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.480.000,00	67.373.400,00	(25.106.600,00)	72,85	
4.01.04.1.03.0002	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	92.480.000,00	70.133.400,00	(22.346.600,00)	75,84	
4.01.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	92.480.000,00	70.133.400,00	(22.346.600,00)	75,84	
4.01.04.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.480.000,00	70.133.400,00	(22.346.600,00)	75,84	
4.01.04.1.03.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, DAN PERHUBUNGAN	55.000.000,00	31.174.000,00	(23.826.000,00)	56,68	
4.01.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	31.174.000,00	(23.826.000,00)	56,68	
4.01.04.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	31.174.000,00	(23.826.000,00)	56,68	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.830.938.787,00	15.801.362.125,00	(3.029.576.662,00)	83,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.830.938.787,00)	(15.801.362.125,00)	3.029.576.662,00	83,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.830.938.787,00)	(15.801.362.125,00)	3.029.576.662,00	83,91	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	486.057.000,00	437.314.337,00	(48.742.663,00)	89,97	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.819.000,00	22.285.000,00	(1.534.000,00)	93,56	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.284.000,00	10.215.000,00	(69.000,00)	99,33	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.284.000,00	10.215.000,00	(69.000,00)	99,33	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.284.000,00	10.215.000,00	(69.000,00)	99,33	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	2.050.000,00	(30.000,00)	98,56	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.260.000,00	1.600.000,00	(660.000,00)	70,80	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.260.000,00	1.600.000,00	(660.000,00)	70,80	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	1.600.000,00	(660.000,00)	70,80	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.260.000,00	2.230.000,00	(30.000,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.260.000,00	2.230.000,00	(30.000,00)	98,67	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	2.230.000,00	(30.000,00)	98,67	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.355.000,00	2.340.000,00	(15.000,00)	99,36	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.355.000,00	2.340.000,00	(15.000,00)	99,36	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	2.340.000,00	(15.000,00)	99,36	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.480.000,00	3.372.000,00	(108.000,00)	96,90	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.140.000,00	1.110.000,00	(30.000,00)	97,37	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.110.000,00	(30.000,00)	97,37	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.110.000,00	(30.000,00)	97,37	
4.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.230.000,00	1.152.000,00	(78.000,00)	93,66	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.230.000,00	1.152.000,00	(78.000,00)	93,66	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.152.000,00	(78.000,00)	93,66	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.600.000,00	13.100.000,00	(2.500.000,00)	83,97	
4.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.600.000,00	13.100.000,00	(2.500.000,00)	83,97	
4.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	13.100.000,00	(2.500.000,00)	83,97	
4.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	13.100.000,00	(2.500.000,00)	83,97	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	230.567.800,00	205.048.312,00	(25.519.488,00)	88,93	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	107.650.000,00	99.657.867,00	(7.992.133,00)	92,58	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	107.650.000,00	99.657.867,00	(7.992.133,00)	92,58	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.650.000,00	99.657.867,00	(7.992.133,00)	92,58	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.123.000,00	49.214.945,00	(4.908.055,00)	90,93	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	54.123.000,00	49.214.945,00	(4.908.055,00)	90,93	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.123.000,00	49.214.945,00	(4.908.055,00)	90,93	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	68.794.800,00	56.175.500,00	(12.619.300,00)	81,66	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	68.794.800,00	56.175.500,00	(12.619.300,00)	81,66	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.794.800,00	56.175.500,00	(12.619.300,00)	81,66	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.590.200,00	193.509.025,00	(19.081.175,00)	91,02	
4.01.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.140.000,00	1.050.000,00	(90.000,00)	92,11	
4.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.050.000,00	(90.000,00)	92,11	
4.01.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.050.000,00	(90.000,00)	92,11	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	211.450.200,00	192.459.025,00	(18.991.175,00)	91,02	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	211.450.200,00	192.459.025,00	(18.991.175,00)	91,02	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.450.200,00	192.459.025,00	(18.991.175,00)	91,02	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.853.760.800,00	1.698.047.498,00	(155.713.302,00)	91,60	
4.01.05.1.01	FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.040.854.800,00	917.722.398,00	(123.132.402,00)	88,17	
4.01.05.1.01.0001	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUMRNNPENATURAN	451.085.000,00	394.142.084,00	(56.942.916,00)	87,38	
4.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	451.085.000,00	394.142.084,00	(56.942.916,00)	87,38	
4.01.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.085.000,00	394.142.084,00	(56.942.916,00)	87,38	
4.01.05.1.01.0002	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUMRNNPENETAPAN	146.224.400,00	131.212.900,00	(15.011.500,00)	89,73	
4.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	146.224.400,00	131.212.900,00	(15.011.500,00)	89,73	
4.01.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.224.400,00	131.212.900,00	(15.011.500,00)	89,73	
4.01.05.1.01.0003	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA	206.915.400,00	176.320.814,00	(30.594.586,00)	85,21	
4.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	206.915.400,00	176.320.814,00	(30.594.586,00)	85,21	
4.01.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.915.400,00	176.320.814,00	(30.594.586,00)	85,21	
4.01.05.1.01.0004	FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUMRNNKABUPATEN/KOTA	236.630.000,00	216.046.600,00	(20.583.400,00)	91,30	
4.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	236.630.000,00	216.046.600,00	(20.583.400,00)	91,30	
4.01.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.630.000,00	216.046.600,00	(20.583.400,00)	91,30	
4.01.05.1.02	FASILITASI BANTUAN HUKUM	812.906.000,00	780.325.100,00	(32.580.900,00)	95,99	
4.01.05.1.02.0001	FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM	418.300.000,00	414.594.600,00	(3.705.400,00)	99,11	
4.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	418.300.000,00	414.594.600,00	(3.705.400,00)	99,11	
4.01.05.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.300.000,00	414.594.600,00	(3.705.400,00)	99,11	
4.01.05.1.02.0002	FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM	394.606.000,00	365.730.500,00	(28.875.500,00)	92,68	
4.01.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	394.606.000,00	365.730.500,00	(28.875.500,00)	92,68	
4.01.05.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.606.000,00	365.730.500,00	(28.875.500,00)	92,68	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.339.817.800,00	2.135.361.835,00	(204.455.965,00)	91,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.339.817.800,00)	(2.135.361.835,00)	204.455.965,00	91,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.339.817.800,00)	(2.135.361.835,00)	204.455.965,00	91,26	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	418.989.324,00	408.687.098,00	(10.302.226,00)	97,54	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.000.000,00	35.728.620,00	(271.380,00)	99,25	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.100.000,00	2.099.100,00	(900,00)	99,96	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.099.100,00	(900,00)	99,96	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.099.100,00	(900,00)	99,96	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.010.000,00	(90.000,00)	95,71	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.800.000,00	22.799.520,00	(480,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.799.520,00	(480,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.799.520,00	(480,00)	100,00	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.486.400,00	16.303.039,00	(183.361,00)	98,89	
4.01.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	3.276.800,00	3.275.723,00	(1.077,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.276.800,00	3.275.723,00	(1.077,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.276.800,00	3.275.723,00	(1.077,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.400,00	3.301.498,00	(902,00)	99,97	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.400,00	3.212.160,00	(90.240,00)	97,27	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.986.000,00	24.098.000,00	(888.000,00)	96,45	
4.01.01.1.05.0001	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18.986.000,00	18.098.000,00	(888.000,00)	95,32	
4.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	18.986.000,00	18.098.000,00	(888.000,00)	95,32	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.986.000,00	18.098.000,00	(888.000,00)	95,32	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.829.984,00	84.523.279,00	(4.306.705,00)	95,15	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.666.000,00	41.457.390,00	(1.208.610,00)	97,17	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	42.666.000,00	41.457.390,00	(1.208.610,00)	97,17	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.666.000,00	41.457.390,00	(1.208.610,00)	97,17	
4.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.200.000,00	12.153.000,00	(47.000,00)	99,61	
4.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.153.000,00	(47.000,00)	99,61	
4.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.153.000,00	(47.000,00)	99,61	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.423.984,00	7.028.481,00	(395.503,00)	94,67	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.423.984,00	7.028.481,00	(395.503,00)	94,67	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.423.984,00	7.028.481,00	(395.503,00)	94,67	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	14.140.000,00	11.684.408,00	(2.455.592,00)	82,63	
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	14.140.000,00	11.684.408,00	(2.455.592,00)	82,63	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	11.684.408,00	(2.455.592,00)	82,63	
4.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	6.200.000,00	6.000.000,00	(200.000,00)	96,77	
4.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.000.000,00	(200.000,00)	96,77	
4.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.000.000,00	(200.000,00)	96,77	
4.01.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	252.686.940,00	248.034.160,00	(4.652.780,00)	98,16	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	252.686.940,00	248.034.160,00	(4.652.780,00)	98,16	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	252.686.940,00	248.034.160,00	(4.652.780,00)	98,16	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.686.940,00	248.034.160,00	(4.652.780,00)	98,16	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.482.636.440,00	1.171.720.635,00	(310.915.805,00)	79,03	
4.01.02.1.01	FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	448.307.500,00	406.298.006,00	(42.009.494,00)	90,63	
4.01.02.1.01.0001	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	148.077.800,00	144.838.500,00	(3.239.300,00)	97,81	
4.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	148.077.800,00	144.838.500,00	(3.239.300,00)	97,81	
4.01.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.077.800,00	144.838.500,00	(3.239.300,00)	97,81	
4.01.02.1.01.0002	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA	114.696.800,00	98.688.117,00	(16.008.683,00)	86,04	
4.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	114.696.800,00	98.688.117,00	(16.008.683,00)	86,04	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.696.800,00	98.688.117,00	(16.008.683,00)	86,04	
4.01.02.1.01.0003	PENATAAN ANALISIS JABATAN	185.532.900,00	162.771.389,00	(22.761.511,00)	87,73	
4.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	185.532.900,00	162.771.389,00	(22.761.511,00)	87,73	
4.01.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.532.900,00	162.771.389,00	(22.761.511,00)	87,73	
4.01.02.1.02	FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1.034.328.940,00	765.422.629,00	(268.906.311,00)	74,00	
4.01.02.1.02.0001	PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	124.630.900,00	114.374.798,00	(10.256.102,00)	91,77	
4.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	124.630.900,00	114.374.798,00	(10.256.102,00)	91,77	
4.01.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.630.900,00	114.374.798,00	(10.256.102,00)	91,77	
4.01.02.1.02.0002	MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	181.199.600,00	156.534.763,00	(24.664.837,00)	86,39	
4.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	181.199.600,00	156.534.763,00	(24.664.837,00)	86,39	
4.01.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.199.600,00	156.534.763,00	(24.664.837,00)	86,39	
4.01.02.1.02.0003	EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA	122.248.440,00	113.030.223,00	(9.218.217,00)	92,46	
4.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	122.248.440,00	113.030.223,00	(9.218.217,00)	92,46	
4.01.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.248.440,00	113.030.223,00	(9.218.217,00)	92,46	
4.01.02.1.02.0004	PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN	184.970.000,00	178.458.145,00	(6.511.855,00)	96,48	
4.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	184.970.000,00	178.458.145,00	(6.511.855,00)	96,48	
4.01.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.970.000,00	178.458.145,00	(6.511.855,00)	96,48	
4.01.02.1.02.0005	FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	421.280.000,00	203.024.700,00	(218.255.300,00)	48,19	
4.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	421.280.000,00	203.024.700,00	(218.255.300,00)	48,19	
4.01.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.280.000,00	203.024.700,00	(218.255.300,00)	48,19	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.901.625.764,00	1.580.407.733,00	(321.218.031,00)	83,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.901.625.764,00)	(1.580.407.733,00)	321.218.031,00	83,11	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(1.901.625.764,00)	(1.580.407.733,00)	321.218.031,00	83,11	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	207.769.081.611,00	192.765.264.462,00	(15.003.817.149,00)	92,78	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	133.504.789,00	119.406.575,00	(14.098.214,00)	89,44	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.200.000,00	21.695.225,00	(504.775,00)	97,73	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	21.695.225,00	(504.775,00)	97,73	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	21.695.225,00	(504.775,00)	97,73	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	17.000.000,00	15.126.148,00	(1.873.852,00)	88,98	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	15.126.148,00	(1.873.852,00)	88,98	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	15.126.148,00	(1.873.852,00)	88,98	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	17.000.000,00	16.895.356,00	(104.644,00)	99,38	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.895.356,00	(104.644,00)	99,38	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.895.356,00	(104.644,00)	99,38	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	14.000.000,00	13.897.233,00	(102.767,00)	99,27	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.897.233,00	(102.767,00)	99,27	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.897.233,00	(102.767,00)	99,27	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.000.000,00	9.918.693,00	(81.307,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.918.693,00	(81.307,00)	99,19	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.918.693,00	(81.307,00)	99,19	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.404.789,00	25.072.110,00	(8.332.679,00)	75,06	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	33.404.789,00	25.072.110,00	(8.332.679,00)	75,06	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.404.789,00	25.072.110,00	(8.332.679,00)	75,06	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.900.000,00	16.801.810,00	(3.098.190,00)	84,43	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	16.801.810,00	(3.098.190,00)	84,43	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	16.801.810,00	(3.098.190,00)	84,43	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	117.010.720.372,00	108.844.424.649,00	(8.166.295.723,00)	93,02	
4.01.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	115.195.001.372,00	107.263.232.045,00	(7.931.769.327,00)	93,11	
4.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	115.195.001.372,00	107.263.232.045,00	(7.931.769.327,00)	93,11	
4.01.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	115.195.001.372,00	107.263.232.045,00	(7.931.769.327,00)	93,11	
4.01.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.542.819.000,00	1.327.350.000,00	(215.469.000,00)	86,03	
4.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.542.819.000,00	1.327.350.000,00	(215.469.000,00)	86,03	
4.01.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.542.819.000,00	1.327.350.000,00	(215.469.000,00)	86,03	
4.01.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	229.200.000,00	211.200.232,00	(17.999.768,00)	92,15	
4.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	229.200.000,00	211.200.232,00	(17.999.768,00)	92,15	
4.01.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.200.000,00	211.200.232,00	(17.999.768,00)	92,15	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	10.000.000,00	9.554.470,00	(445.530,00)	95,54	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.554.470,00	(445.530,00)	95,54	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.554.470,00	(445.530,00)	95,54	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.700.000,00	8.679.513,00	(20.487,00)	99,76	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.700.000,00	8.679.513,00	(20.487,00)	99,76	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.679.513,00	(20.487,00)	99,76	
4.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	2.000.000,00	1.924.400,00	(75.600,00)	96,22	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.924.400,00	(75.600,00)	96,22	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.924.400,00	(75.600,00)	96,22	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	20.000.000,00	19.552.889,00	(447.111,00)	97,76	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.552.889,00	(447.111,00)	97,76	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.552.889,00	(447.111,00)	97,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.000.000,00	2.931.100,00	(68.900,00)	97,70	
4.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.931.100,00	(68.900,00)	97,70	
4.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.931.100,00	(68.900,00)	97,70	
4.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	75.822.000,00	73.271.330,00	(2.550.670,00)	96,64	
4.01.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	14.000.000,00	13.502.340,00	(497.660,00)	96,45	
4.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.502.340,00	(497.660,00)	96,45	
4.01.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.502.340,00	(497.660,00)	96,45	
4.01.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	28.774.000,00	27.307.161,00	(1.466.839,00)	94,90	
4.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	28.774.000,00	27.307.161,00	(1.466.839,00)	94,90	
4.01.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.774.000,00	27.307.161,00	(1.466.839,00)	94,90	
4.01.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.000.000,00	6.934.086,00	(65.914,00)	99,06	
4.01.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.934.086,00	(65.914,00)	99,06	
4.01.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.934.086,00	(65.914,00)	99,06	
4.01.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	26.048.000,00	25.527.743,00	(520.257,00)	98,00	
4.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	26.048.000,00	25.527.743,00	(520.257,00)	98,00	
4.01.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.048.000,00	25.527.743,00	(520.257,00)	98,00	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12.487.635.475,00	12.176.349.423,00	(311.286.052,00)	97,51	
4.01.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	400.000.000,00	396.932.600,00	(3.067.400,00)	99,23	
4.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	396.932.600,00	(3.067.400,00)	99,23	
4.01.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	396.932.600,00	(3.067.400,00)	99,23	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	945.448.950,00	852.956.412,00	(92.492.538,00)	90,22	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	945.448.950,00	852.956.412,00	(92.492.538,00)	90,22	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.448.950,00	852.956.412,00	(92.492.538,00)	90,22	
4.01.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	273.404.000,00	270.752.282,00	(2.651.718,00)	99,03	
4.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	273.404.000,00	270.752.282,00	(2.651.718,00)	99,03	
4.01.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.404.000,00	270.752.282,00	(2.651.718,00)	99,03	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.568.371.000,00	2.489.691.864,00	(78.679.136,00)	96,94	
4.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.568.371.000,00	2.489.691.864,00	(78.679.136,00)	96,94	
4.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.568.371.000,00	2.489.691.864,00	(78.679.136,00)	96,94	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	800.365.700,00	730.699.150,00	(69.666.550,00)	91,30	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	800.365.700,00	730.699.150,00	(69.666.550,00)	91,30	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.365.700,00	730.699.150,00	(69.666.550,00)	91,30	
4.01.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.364.000,00	14.994.277,00	(5.369.723,00)	73,63	
4.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.289.000,00	14.994.277,00	(294.723,00)	98,07	
4.01.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.289.000,00	14.994.277,00	(294.723,00)	98,07	
4.01.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	5.075.000,00	0,00	(5.075.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0006.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.075.000,00	0,00	(5.075.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.885.622.825,00	5.884.930.500,00	(692.325,00)	99,99	
4.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.885.622.825,00	5.884.930.500,00	(692.325,00)	99,99	
4.01.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.885.622.825,00	5.884.930.500,00	(692.325,00)	99,99	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.231.756.000,00	1.210.403.734,00	(21.352.266,00)	98,27	
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.231.756.000,00	1.210.403.734,00	(21.352.266,00)	98,27	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.756.000,00	1.210.403.734,00	(21.352.266,00)	98,27	
4.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	362.303.000,00	324.988.604,00	(37.314.396,00)	89,70	
4.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	362.303.000,00	324.988.604,00	(37.314.396,00)	89,70	
4.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.303.000,00	324.988.604,00	(37.314.396,00)	89,70	
4.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.334.670.225,00	4.883.829.274,00	(450.840.951,00)	91,55	
4.01.01.1.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.07.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.760.576.000,00	1.581.683.914,00	(178.892.086,00)	89,84	
4.01.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.583.914,00	(166.086,00)	93,96	
4.01.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.583.914,00	(166.086,00)	93,96	
4.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.757.826.000,00	1.579.100.000,00	(178.726.000,00)	89,83	
4.01.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.757.826.000,00	1.579.100.000,00	(178.726.000,00)	89,83	
4.01.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	1.352.854.900,00	1.250.890.985,00	(101.963.915,00)	92,46	
4.01.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	528.017.700,00	448.828.402,00	(79.189.298,00)	85,00	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.017.700,00	448.828.402,00	(79.189.298,00)	85,00	
4.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	824.837.200,00	802.062.583,00	(22.774.617,00)	97,24	
4.01.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	824.837.200,00	802.062.583,00	(22.774.617,00)	97,24	
4.01.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.221.239.325,00	2.051.254.375,00	(169.984.950,00)	92,35	
4.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	126.602.525,00	119.233.418,00	(7.369.107,00)	94,18	
4.01.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.602.525,00	119.233.418,00	(7.369.107,00)	94,18	
4.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.094.636.800,00	1.932.020.957,00	(162.615.843,00)	92,24	
4.01.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.094.636.800,00	1.932.020.957,00	(162.615.843,00)	92,24	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.583.740.500,00	19.823.875.245,00	(1.759.865.255,00)	91,85	
4.01.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	272.057.000,00	258.887.520,00	(13.169.480,00)	95,16	
4.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	272.057.000,00	258.887.520,00	(13.169.480,00)	95,16	
4.01.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.057.000,00	258.887.520,00	(13.169.480,00)	95,16	
4.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.562.288.000,00	3.454.560.568,00	(107.727.432,00)	96,98	
4.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.562.288.000,00	3.454.560.568,00	(107.727.432,00)	96,98	
4.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.562.288.000,00	3.454.560.568,00	(107.727.432,00)	96,98	
4.01.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.429.227.500,00	2.390.904.868,00	(38.322.632,00)	98,42	
4.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.429.227.500,00	2.390.904.868,00	(38.322.632,00)	98,42	
4.01.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.429.227.500,00	2.390.904.868,00	(38.322.632,00)	98,42	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.320.168.000,00	13.719.522.289,00	(1.600.645.711,00)	89,55	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.320.168.000,00	13.719.522.289,00	(1.600.645.711,00)	89,55	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.320.168.000,00	13.719.522.289,00	(1.600.645.711,00)	89,55	
4.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.876.729.150,00	20.760.098.098,00	(1.116.631.052,00)	94,90	
4.01.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.355.863.000,00	1.332.177.154,00	(23.685.846,00)	98,25	
4.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.355.863.000,00	1.332.177.154,00	(23.685.846,00)	98,25	
4.01.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.355.863.000,00	1.332.177.154,00	(23.685.846,00)	98,25	
4.01.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.515.261.250,00	5.827.213.313,00	(688.047.937,00)	89,44	
4.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.515.261.250,00	5.827.213.313,00	(688.047.937,00)	89,44	
4.01.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.515.261.250,00	5.827.213.313,00	(688.047.937,00)	89,44	
4.01.01.1.09.0005	PEMELIHARAAN MEDEL	27.760.650,00	27.319.300,00	(441.350,00)	98,41	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	27.760.650,00	27.319.300,00	(441.350,00)	98,41	
4.01.01.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.760.650,00	27.319.300,00	(441.350,00)	98,41	
4.01.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	531.917.750,00	488.704.200,00	(43.213.550,00)	91,88	
4.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	531.917.750,00	488.704.200,00	(43.213.550,00)	91,88	
4.01.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.917.750,00	488.704.200,00	(43.213.550,00)	91,88	
4.01.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.737.393.500,00	4.658.282.181,00	(79.111.319,00)	98,33	
4.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.737.393.500,00	4.658.282.181,00	(79.111.319,00)	98,33	
4.01.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.737.393.500,00	4.658.282.181,00	(79.111.319,00)	98,33	
4.01.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.491.973.000,00	8.213.849.450,00	(278.123.550,00)	96,72	
4.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.491.973.000,00	8.213.849.450,00	(278.123.550,00)	96,72	
4.01.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.491.973.000,00	8.213.849.450,00	(278.123.550,00)	96,72	
4.01.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	216.560.000,00	212.552.500,00	(4.007.500,00)	98,15	
4.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	216.560.000,00	212.552.500,00	(4.007.500,00)	98,15	
4.01.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.560.000,00	212.552.500,00	(4.007.500,00)	98,15	
4.01.01.1.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	15.582.757.000,00	13.525.865.671,00	(2.056.891.329,00)	86,80	
4.01.01.1.11.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	12.411.629.000,00	10.577.094.556,00	(1.834.534.444,00)	85,22	
4.01.01.1.11.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.411.629.000,00	10.577.094.556,00	(1.834.534.444,00)	85,22	
4.01.01.1.11.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	12.411.629.000,00	10.577.094.556,00	(1.834.534.444,00)	85,22	
4.01.01.1.11.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	376.128.000,00	287.678.700,00	(88.449.300,00)	76,48	
4.01.01.1.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	376.128.000,00	287.678.700,00	(88.449.300,00)	76,48	
4.01.01.1.11.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.128.000,00	287.678.700,00	(88.449.300,00)	76,48	
4.01.01.1.11.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	120.000.000,00	31.362.900,00	(88.637.100,00)	26,14	
4.01.01.1.11.0003.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	31.362.900,00	(88.637.100,00)	26,14	
4.01.01.1.11.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	31.362.900,00	(88.637.100,00)	26,14	
4.01.01.1.11.0004	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.675.000.000,00	2.629.729.515,00	(45.270.485,00)	98,31	
4.01.01.1.11.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.675.000.000,00	2.629.729.515,00	(45.270.485,00)	98,31	
4.01.01.1.11.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000.000,00	2.629.729.515,00	(45.270.485,00)	98,31	
4.01.01.1.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	13.653.502.100,00	12.528.144.197,00	(1.125.357.903,00)	91,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.12.0001	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	8.185.341.750,00	7.631.558.626,00	(553.783.124,00)	93,23	
4.01.01.1.12.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.185.341.750,00	7.631.558.626,00	(553.783.124,00)	93,23	
4.01.01.1.12.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.185.341.750,00	7.631.558.626,00	(553.783.124,00)	93,23	
4.01.01.1.12.0002	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	3.846.950.600,00	3.436.410.171,00	(410.540.429,00)	89,33	
4.01.01.1.12.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.846.950.600,00	3.436.410.171,00	(410.540.429,00)	89,33	
4.01.01.1.12.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.950.600,00	3.436.410.171,00	(410.540.429,00)	89,33	
4.01.01.1.12.0003	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	1.621.209.750,00	1.460.175.400,00	(161.034.350,00)	90,07	
4.01.01.1.12.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.621.209.750,00	1.460.175.400,00	(161.034.350,00)	90,07	
4.01.01.1.12.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.621.209.750,00	1.460.175.400,00	(161.034.350,00)	90,07	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	207.769.081.611,00	192.765.264.462,00	(15.003.817.149,00)	92,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(207.769.081.611,00)	(192.765.264.462,00)	15.003.817.149,00	92,78	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(207.769.081.611,00)	(192.765.264.462,00)	15.003.817.149,00	92,78	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.728.287.490,00	1.628.609.482,00	(99.678.008,00)	94,23	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.866.000,00	49.190.124,00	(5.675.876,00)	89,66	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.294.000,00	4.949.600,00	(344.400,00)	93,49	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.294.000,00	4.949.600,00	(344.400,00)	93,49	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.294.000,00	4.949.600,00	(344.400,00)	93,49	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	5.558.000,00	5.321.790,00	(236.210,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.558.000,00	5.321.790,00	(236.210,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.558.000,00	5.321.790,00	(236.210,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.470.000,00	7.317.000,00	(153.000,00)	97,95	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.470.000,00	7.317.000,00	(153.000,00)	97,95	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	7.317.000,00	(153.000,00)	97,95	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.578.000,00	1.543.122,00	(1.034.878,00)	59,86	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.578.000,00	1.543.122,00	(1.034.878,00)	59,86	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.578.000,00	1.543.122,00	(1.034.878,00)	59,86	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.730.000,00	4.712.390,00	(17.610,00)	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.730.000,00	4.712.390,00	(17.610,00)	99,63	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	4.712.390,00	(17.610,00)	99,63	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.358.000,00	21.499.490,00	(2.858.510,00)	88,26	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.358.000,00	21.499.490,00	(2.858.510,00)	88,26	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.358.000,00	21.499.490,00	(2.858.510,00)	88,26	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.878.000,00	3.846.732,00	(1.031.268,00)	78,86	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.878.000,00	3.846.732,00	(1.031.268,00)	78,86	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.878.000,00	3.846.732,00	(1.031.268,00)	78,86	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.500.000,00	10.042.035,00	(457.965,00)	95,64	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.500.000,00	1.374.620,00	(125.380,00)	91,64	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.374.620,00	(125.380,00)	91,64	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.374.620,00	(125.380,00)	91,64	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	600.000,00	526.000,00	(74.000,00)	87,67	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	526.000,00	(74.000,00)	87,67	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	526.000,00	(74.000,00)	87,67	
4.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	2.150.000,00	2.110.000,00	(40.000,00)	98,14	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	2.110.000,00	(40.000,00)	98,14	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	2.110.000,00	(40.000,00)	98,14	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	5.250.000,00	5.063.415,00	(186.585,00)	96,45	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.063.415,00	(186.585,00)	96,45	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.063.415,00	(186.585,00)	96,45	
4.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.000.000,00	968.000,00	(32.000,00)	96,80	
4.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	968.000,00	(32.000,00)	96,80	
4.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	968.000,00	(32.000,00)	96,80	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	53.880.000,00	49.197.790,00	(4.682.210,00)	91,31	
4.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35.508.000,00	30.888.134,00	(4.619.866,00)	86,99	
4.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	35.508.000,00	30.888.134,00	(4.619.866,00)	86,99	
4.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.508.000,00	30.888.134,00	(4.619.866,00)	86,99	
4.01.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.372.000,00	18.309.656,00	(62.344,00)	99,66	
4.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	18.372.000,00	18.309.656,00	(62.344,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.372.000,00	18.309.656,00	(62.344,00)	99,66	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	379.660.600,00	310.567.968,00	(69.092.632,00)	81,80	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	132.278.600,00	114.675.280,00	(17.603.320,00)	86,69	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	132.278.600,00	114.675.280,00	(17.603.320,00)	86,69	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.278.600,00	114.675.280,00	(17.603.320,00)	86,69	
4.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	14.296.800,00	(5.703.200,00)	71,48	
4.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	14.296.800,00	(5.703.200,00)	71,48	
4.01.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.296.800,00	(5.703.200,00)	71,48	
4.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.204.600,00	69.432.290,00	(24.772.310,00)	73,70	
4.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	94.204.600,00	69.432.290,00	(24.772.310,00)	73,70	
4.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.204.600,00	69.432.290,00	(24.772.310,00)	73,70	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.872.400,00	20.428.166,00	(2.444.234,00)	89,31	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.872.400,00	20.428.166,00	(2.444.234,00)	89,31	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.872.400,00	20.428.166,00	(2.444.234,00)	89,31	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.305.000,00	91.735.432,00	(18.569.568,00)	83,17	
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	110.305.000,00	91.735.432,00	(18.569.568,00)	83,17	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.305.000,00	91.735.432,00	(18.569.568,00)	83,17	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.229.380.890,00	1.209.611.565,00	(19.769.325,00)	98,39	
4.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.800.000,00	22.540.000,00	(3.260.000,00)	87,36	
4.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	22.540.000,00	(3.260.000,00)	87,36	
4.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	22.540.000,00	(3.260.000,00)	87,36	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.203.580.890,00	1.187.071.565,00	(16.509.325,00)	98,63	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.203.580.890,00	1.187.071.565,00	(16.509.325,00)	98,63	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.580.890,00	1.187.071.565,00	(16.509.325,00)	98,63	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.348.891.100,00	1.247.290.513,00	(101.600.587,00)	92,47	
4.01.07.1.01	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	335.565.400,00	299.160.491,00	(36.404.909,00)	89,15	
4.01.07.1.01.0001	PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	138.395.000,00	111.936.752,00	(26.458.248,00)	80,88	
4.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	138.395.000,00	111.936.752,00	(26.458.248,00)	80,88	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.07.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.395.000,00	111.936.752,00	(26.458.248,00)	80,88	
4.01.07.1.01.0002	PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	79.395.000,00	70.014.950,00	(9.380.050,00)	88,19	
4.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	79.395.000,00	70.014.950,00	(9.380.050,00)	88,19	
4.01.07.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.395.000,00	70.014.950,00	(9.380.050,00)	88,19	
4.01.07.1.01.0003	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	117.775.400,00	117.208.789,00	(566.611,00)	99,52	
4.01.07.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	117.775.400,00	117.208.789,00	(566.611,00)	99,52	
4.01.07.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.775.400,00	117.208.789,00	(566.611,00)	99,52	
4.01.07.1.02	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	616.646.700,00	592.565.252,00	(24.081.448,00)	96,09	
4.01.07.1.02.0001	PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	539.905.700,00	522.414.071,00	(17.491.629,00)	96,76	
4.01.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	539.905.700,00	522.414.071,00	(17.491.629,00)	96,76	
4.01.07.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.905.700,00	522.414.071,00	(17.491.629,00)	96,76	
4.01.07.1.02.0002	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	41.411.000,00	39.850.900,00	(1.560.100,00)	96,23	
4.01.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	41.411.000,00	39.850.900,00	(1.560.100,00)	96,23	
4.01.07.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.411.000,00	39.850.900,00	(1.560.100,00)	96,23	
4.01.07.1.02.0003	PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	35.330.000,00	30.300.281,00	(5.029.719,00)	85,76	
4.01.07.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	35.330.000,00	30.300.281,00	(5.029.719,00)	85,76	
4.01.07.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.330.000,00	30.300.281,00	(5.029.719,00)	85,76	
4.01.07.1.03	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	396.679.000,00	355.564.770,00	(41.114.230,00)	89,64	
4.01.07.1.03.0001	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA	35.754.400,00	30.669.240,00	(5.085.160,00)	85,78	
4.01.07.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.754.400,00	30.669.240,00	(5.085.160,00)	85,78	
4.01.07.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.754.400,00	30.669.240,00	(5.085.160,00)	85,78	
4.01.07.1.03.0002	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	304.853.000,00	287.893.240,00	(16.959.760,00)	94,44	
4.01.07.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	304.853.000,00	287.893.240,00	(16.959.760,00)	94,44	
4.01.07.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.853.000,00	287.893.240,00	(16.959.760,00)	94,44	
4.01.07.1.03.0003	PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	56.071.600,00	37.002.290,00	(19.069.310,00)	65,99	
4.01.07.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	56.071.600,00	37.002.290,00	(19.069.310,00)	65,99	
4.01.07.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.071.600,00	37.002.290,00	(19.069.310,00)	65,99	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.077.178.590,00	2.875.899.995,00	(201.278.595,00)	93,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.077.178.590,00)	(2.875.899.995,00)	201.278.595,00	93,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.077.178.590,00)	(2.875.899.995,00)	201.278.595,00	93,46	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.292.757.928,00	1.269.642.754,00	(23.115.174,00)	98,21	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.784.000,00	37.792.812,00	(1.991.188,00)	95,00	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	13.566.616,00	(1.433.384,00)	90,44	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.566.616,00	(1.433.384,00)	90,44	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.566.616,00	(1.433.384,00)	90,44	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.196.000,00	4.916.400,00	(279.600,00)	94,62	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.196.000,00	4.916.400,00	(279.600,00)	94,62	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.196.000,00	4.916.400,00	(279.600,00)	94,62	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.159.999,00	(1,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.160.000,00	3.884.000,00	(276.000,00)	93,37	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	3.884.000,00	(276.000,00)	93,37	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	3.884.000,00	(276.000,00)	93,37	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.108.000,00	2.105.999,00	(2.001,00)	99,91	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.108.000,00	2.105.999,00	(2.001,00)	99,91	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.108.000,00	2.105.999,00	(2.001,00)	99,91	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.999.799,00	(201,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.799,00	(201,00)	100,00	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.799,00	(201,00)	100,00	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.148.000,00	13.128.000,00	(20.000,00)	99,85	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	809.600,00	789.600,00	(20.000,00)	97,53	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	809.600,00	789.600,00	(20.000,00)	97,53	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.600,00	789.600,00	(20.000,00)	97,53	
4.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	204.030.808,00	183.332.638,00	(20.698.170,00)	89,86	
4.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.673.608,00	96.148.125,00	(8.525.483,00)	91,86	
4.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	104.673.608,00	96.148.125,00	(8.525.483,00)	91,86	
4.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.673.608,00	96.148.125,00	(8.525.483,00)	91,86	
4.01.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.960.000,00	39.618.500,00	(1.341.500,00)	96,72	
4.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.960.000,00	39.618.500,00	(1.341.500,00)	96,72	
4.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.960.000,00	39.618.500,00	(1.341.500,00)	96,72	
4.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.652.200,00	29.859.013,00	(1.793.187,00)	94,33	
4.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	31.652.200,00	29.859.013,00	(1.793.187,00)	94,33	
4.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.652.200,00	29.859.013,00	(1.793.187,00)	94,33	
4.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.480.000,00	17.707.000,00	(8.773.000,00)	66,87	
4.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	26.480.000,00	17.707.000,00	(8.773.000,00)	66,87	
4.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.480.000,00	17.707.000,00	(8.773.000,00)	66,87	
4.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
4.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.035.795.120,00	1.035.389.304,00	(405.816,00)	99,96	
4.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.876.000,00	1.644.400,00	(231.600,00)	87,65	
4.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.876.000,00	1.644.400,00	(231.600,00)	87,65	
4.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.876.000,00	1.644.400,00	(231.600,00)	87,65	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.033.919.120,00	1.033.744.904,00	(174.216,00)	99,98	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.033.919.120,00	1.033.744.904,00	(174.216,00)	99,98	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.919.120,00	1.033.744.904,00	(174.216,00)	99,98	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.016.000,00	525.763.953,00	(124.252.047,00)	80,88	
4.01.06.1.01	PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	220.000.000,00	131.380.934,00	(88.619.066,00)	59,72	
4.01.06.1.01.0001	FASILITASI PENGELOLAAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	180.000.000,00	101.142.034,00	(78.857.966,00)	56,19	
4.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	101.142.034,00	(78.857.966,00)	56,19	
4.01.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	101.142.034,00	(78.857.966,00)	56,19	
4.01.06.1.01.0002	FASILITASI PENGELOLAAN KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO	40.000.000,00	30.238.900,00	(9.761.100,00)	75,60	
4.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	30.238.900,00	(9.761.100,00)	75,60	
4.01.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	30.238.900,00	(9.761.100,00)	75,60	
4.01.06.1.02	PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	157.200.000,00	150.429.050,00	(6.770.950,00)	95,69	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.06.1.02.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	86.000.000,00	82.880.050,00	(3.119.950,00)	96,37	
4.01.06.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	82.880.050,00	(3.119.950,00)	96,37	
4.01.06.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	82.880.050,00	(3.119.950,00)	96,37	
4.01.06.1.02.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	71.200.000,00	67.549.000,00	(3.651.000,00)	94,87	
4.01.06.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.200.000,00	67.549.000,00	(3.651.000,00)	94,87	
4.01.06.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000,00	67.549.000,00	(3.651.000,00)	94,87	
4.01.06.1.03	PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD	272.816.000,00	243.953.969,00	(28.862.031,00)	89,42	
4.01.06.1.03.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA	139.096.000,00	127.605.886,00	(11.490.114,00)	91,74	
4.01.06.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	139.096.000,00	127.605.886,00	(11.490.114,00)	91,74	
4.01.06.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.096.000,00	127.605.886,00	(11.490.114,00)	91,74	
4.01.06.1.03.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM, LIMBAH DAN SANITASI	104.760.000,00	99.646.083,00	(5.113.917,00)	95,12	
4.01.06.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	104.760.000,00	99.646.083,00	(5.113.917,00)	95,12	
4.01.06.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.760.000,00	99.646.083,00	(5.113.917,00)	95,12	
4.01.06.1.03.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.06.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.06.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.06.1.03.0004	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	28.960.000,00	16.702.000,00	(12.258.000,00)	57,67	
4.01.06.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.960.000,00	16.702.000,00	(12.258.000,00)	57,67	
4.01.06.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.960.000,00	16.702.000,00	(12.258.000,00)	57,67	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	457.500.000,00	426.257.809,00	(31.242.191,00)	93,17	
4.01.08.1.01	PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	272.000.000,00	263.189.173,00	(8.810.827,00)	96,76	
4.01.08.1.01.0001	PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD	130.000.000,00	129.743.743,00	(256.257,00)	99,80	
4.01.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.743.743,00	(256.257,00)	99,80	
4.01.08.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.743.743,00	(256.257,00)	99,80	
4.01.08.1.01.0002	PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN	71.000.000,00	65.109.499,00	(5.890.501,00)	91,70	
4.01.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	65.109.499,00	(5.890.501,00)	91,70	
4.01.08.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	65.109.499,00	(5.890.501,00)	91,70	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.08.1.01.0003	PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	71.000.000,00	68.335.931,00	(2.664.069,00)	96,25	
4.01.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	68.335.931,00	(2.664.069,00)	96,25	
4.01.08.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	68.335.931,00	(2.664.069,00)	96,25	
4.01.08.1.02	PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	185.500.000,00	163.068.636,00	(22.431.364,00)	87,91	
4.01.08.1.02.0001	ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	53.500.000,00	46.160.990,00	(7.339.010,00)	86,28	
4.01.08.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.500.000,00	46.160.990,00	(7.339.010,00)	86,28	
4.01.08.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	46.160.990,00	(7.339.010,00)	86,28	
4.01.08.1.02.0002	PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47.000.000,00	39.732.246,00	(7.267.754,00)	84,54	
4.01.08.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	39.732.246,00	(7.267.754,00)	84,54	
4.01.08.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	39.732.246,00	(7.267.754,00)	84,54	
4.01.08.1.02.0003	FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH	85.000.000,00	77.175.400,00	(7.824.600,00)	90,79	
4.01.08.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	77.175.400,00	(7.824.600,00)	90,79	
4.01.08.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	77.175.400,00	(7.824.600,00)	90,79	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.400.273.928,00	2.221.664.516,00	(178.609.412,00)	92,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.400.273.928,00)	(2.221.664.516,00)	178.609.412,00	92,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.400.273.928,00)	(2.221.664.516,00)	178.609.412,00	92,56	

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Satuan Kerja : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.818.515.400,00	8.181.973.050,00	(636.542.350,00)	92,78	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	333.895.000,00	310.806.732,00	(23.088.268,00)	93,09	
4.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	39.115.000,00	36.637.736,00	(2.477.264,00)	93,67	
4.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	39.115.000,00	36.637.736,00	(2.477.264,00)	93,67	
4.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.115.000,00	36.637.736,00	(2.477.264,00)	93,67	
4.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	6.700.000,00	3.188.000,00	(3.512.000,00)	47,58	
4.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	3.188.000,00	(3.512.000,00)	47,58	
4.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	3.188.000,00	(3.512.000,00)	47,58	
4.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	
4.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	
4.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	
4.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.700.000,00	3.496.500,00	(3.203.500,00)	52,19	
4.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	3.496.500,00	(3.203.500,00)	52,19	
4.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	3.496.500,00	(3.203.500,00)	52,19	
4.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	
4.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.573.620,00	(126.380,00)	98,11	
4.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	35.393.000,00	35.214.811,00	(178.189,00)	99,50	
4.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	35.393.000,00	35.214.811,00	(178.189,00)	99,50	
4.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.393.000,00	35.214.811,00	(178.189,00)	99,50	
4.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	216.481.000,00	203.373.495,00	(13.107.505,00)	93,95	
4.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	216.481.000,00	203.373.495,00	(13.107.505,00)	93,95	
4.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.481.000,00	203.373.495,00	(13.107.505,00)	93,95	
4.01.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	5.150.000,00	4.931.350,00	(218.650,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.150.000,00	4.931.350,00	(218.650,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	4.931.350,00	(218.650,00)	95,75	
4.01.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.956.000,00	10.817.600,00	(138.400,00)	98,74	
4.01.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.956.000,00	10.817.600,00	(138.400,00)	98,74	
4.01.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.956.000,00	10.817.600,00	(138.400,00)	98,74	
4.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	52.218.000,00	43.920.525,00	(8.297.475,00)	84,11	
4.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	8.200.000,00	7.938.225,00	(261.775,00)	96,81	
4.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	7.938.225,00	(261.775,00)	96,81	
4.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	7.938.225,00	(261.775,00)	96,81	
4.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.150.000,00	3.136.050,00	(13.950,00)	99,56	
4.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.136.050,00	(13.950,00)	99,56	
4.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.136.050,00	(13.950,00)	99,56	
4.01.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.660.000,00	1.107.000,00	(3.553.000,00)	23,76	
4.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.660.000,00	1.107.000,00	(3.553.000,00)	23,76	
4.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	1.107.000,00	(3.553.000,00)	23,76	
4.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	33.700.000,00	29.320.050,00	(4.379.950,00)	87,00	
4.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	33.700.000,00	29.320.050,00	(4.379.950,00)	87,00	
4.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	29.320.050,00	(4.379.950,00)	87,00	
4.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.508.000,00	2.419.200,00	(88.800,00)	96,46	
4.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.508.000,00	2.419.200,00	(88.800,00)	96,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.508.000,00	2.419.200,00	(88.800,00)	96,46	
4.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	213.702.000,00	191.431.351,00	(22.270.649,00)	89,58	
4.01.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	145.476.000,00	131.495.351,00	(13.980.649,00)	90,39	
4.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	145.476.000,00	131.495.351,00	(13.980.649,00)	90,39	
4.01.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.476.000,00	131.495.351,00	(13.980.649,00)	90,39	
4.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	68.226.000,00	59.936.000,00	(8.290.000,00)	87,85	
4.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	68.226.000,00	59.936.000,00	(8.290.000,00)	87,85	
4.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.226.000,00	59.936.000,00	(8.290.000,00)	87,85	
4.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	116.635.000,00	100.038.057,00	(16.596.943,00)	85,77	
4.01.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	99,90	
4.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	99,90	
4.01.01.1.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	99,90	
4.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	113.635.000,00	97.041.057,00	(16.593.943,00)	85,40	
4.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	113.635.000,00	97.041.057,00	(16.593.943,00)	85,40	
4.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.635.000,00	97.041.057,00	(16.593.943,00)	85,40	
4.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.732.767.400,00	2.499.141.600,00	(233.625.800,00)	91,45	
4.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.732.767.400,00	2.499.141.600,00	(233.625.800,00)	91,45	
4.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.732.767.400,00	2.499.141.600,00	(233.625.800,00)	91,45	
4.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.732.767.400,00	2.499.141.600,00	(233.625.800,00)	91,45	
4.01.01.1.13	FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3.852.571.000,00	3.539.629.556,00	(312.941.444,00)	91,88	
4.01.01.1.13.0001	PENYIAPAN MATERI PIMPINAN	616.185.000,00	541.609.099,00	(74.575.901,00)	87,90	
4.01.01.1.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	616.185.000,00	541.609.099,00	(74.575.901,00)	87,90	
4.01.01.1.13.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.185.000,00	541.609.099,00	(74.575.901,00)	87,90	
4.01.01.1.13.0002	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	1.567.504.000,00	1.467.593.816,00	(99.910.184,00)	93,63	
4.01.01.1.13.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.567.504.000,00	1.467.593.816,00	(99.910.184,00)	93,63	
4.01.01.1.13.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.504.000,00	1.467.593.816,00	(99.910.184,00)	93,63	
4.01.01.1.13.0003	PENGELOLAAN DOKUMENTASI PIMPINAN	1.668.882.000,00	1.530.426.641,00	(138.455.359,00)	91,70	
4.01.01.1.13.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.668.882.000,00	1.530.426.641,00	(138.455.359,00)	91,70	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.1.13.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.882.000,00	1.530.426.641,00	(138.455.359,00)	91,70	
4.01.01.1.14	FASILITASI KEPROTOKOLAN	1.516.727.000,00	1.497.005.229,00	(19.721.771,00)	98,70	
4.01.01.1.14.0001	FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN ACARA	678.080.000,00	671.746.342,00	(6.333.658,00)	99,07	
4.01.01.1.14.0001.5.1	BELANJA OPERASI	678.080.000,00	671.746.342,00	(6.333.658,00)	99,07	
4.01.01.1.14.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.080.000,00	671.746.342,00	(6.333.658,00)	99,07	
4.01.01.1.14.0002	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	420.171.000,00	407.925.398,00	(12.245.602,00)	97,09	
4.01.01.1.14.0002.5.1	BELANJA OPERASI	420.171.000,00	407.925.398,00	(12.245.602,00)	97,09	
4.01.01.1.14.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.171.000,00	407.925.398,00	(12.245.602,00)	97,09	
4.01.01.1.14.0003	PENGELOLAAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN	418.476.000,00	417.333.489,00	(1.142.511,00)	99,73	
4.01.01.1.14.0003.5.1	BELANJA OPERASI	418.476.000,00	417.333.489,00	(1.142.511,00)	99,73	
4.01.01.1.14.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.476.000,00	417.333.489,00	(1.142.511,00)	99,73	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.818.515.400,00	8.181.973.050,00	(636.542.350,00)	92,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.818.515.400,00)	(8.181.973.050,00)	636.542.350,00	92,78	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.818.515.400,00)	(8.181.973.050,00)	636.542.350,00	92,78	

4.02.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Satuan Kerja : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	328.504.791.859,00	288.257.189.005,16	(40.247.602.853,84)	87,75	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	714.625.500,00	652.185.050,00	(62.440.450,00)	91,26	
4.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	42.718.000,00	39.733.100,00	(2.984.900,00)	93,01	
4.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	42.718.000,00	39.733.100,00	(2.984.900,00)	93,01	
4.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.718.000,00	39.733.100,00	(2.984.900,00)	93,01	
4.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	23.100.000,00	22.400.000,00	(700.000,00)	96,97	
4.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	23.100.000,00	22.400.000,00	(700.000,00)	96,97	
4.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	22.400.000,00	(700.000,00)	96,97	
4.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	38.565.000,00	37.330.000,00	(1.235.000,00)	96,80	
4.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	38.565.000,00	37.330.000,00	(1.235.000,00)	96,80	
4.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.565.000,00	37.330.000,00	(1.235.000,00)	96,80	
4.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	14.088.000,00	13.378.400,00	(709.600,00)	94,96	
4.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.088.000,00	13.378.400,00	(709.600,00)	94,96	
4.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.088.000,00	13.378.400,00	(709.600,00)	94,96	
4.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	12.378.000,00	11.895.000,00	(483.000,00)	96,10	
4.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.378.000,00	11.895.000,00	(483.000,00)	96,10	
4.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.378.000,00	11.895.000,00	(483.000,00)	96,10	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	100.257.500,00	96.129.250,00	(4.128.250,00)	95,88	
4.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	100.257.500,00	96.129.250,00	(4.128.250,00)	95,88	
4.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.257.500,00	96.129.250,00	(4.128.250,00)	95,88	
4.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	116.127.000,00	92.793.600,00	(23.333.400,00)	79,91	
4.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	116.127.000,00	92.793.600,00	(23.333.400,00)	79,91	
4.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.127.000,00	92.793.600,00	(23.333.400,00)	79,91	
4.02.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	43.700.000,00	37.955.000,00	(5.745.000,00)	86,85	
4.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	43.700.000,00	37.955.000,00	(5.745.000,00)	86,85	
4.02.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	37.955.000,00	(5.745.000,00)	86,85	
4.02.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.288.000,00	10.048.000,00	(2.240.000,00)	81,77	
4.02.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	12.288.000,00	10.048.000,00	(2.240.000,00)	81,77	
4.02.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.288.000,00	10.048.000,00	(2.240.000,00)	81,77	
4.02.01.1.01.0010	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	14.850.000,00	13.450.000,00	(1.400.000,00)	90,57	
4.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	14.850.000,00	13.450.000,00	(1.400.000,00)	90,57	
4.02.01.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	13.450.000,00	(1.400.000,00)	90,57	
4.02.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	296.554.000,00	277.072.700,00	(19.481.300,00)	93,43	
4.02.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	296.554.000,00	277.072.700,00	(19.481.300,00)	93,43	
4.02.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.554.000,00	277.072.700,00	(19.481.300,00)	93,43	
4.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.048.740.000,00	23.756.201.322,00	(1.292.538.678,00)	94,84	
4.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.480.000.000,00	18.482.765.962,00	(997.234.038,00)	94,88	
4.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.480.000.000,00	18.482.765.962,00	(997.234.038,00)	94,88	
4.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.480.000.000,00	18.482.765.962,00	(997.234.038,00)	94,88	
4.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.842.200.000,00	1.597.130.540,00	(245.069.460,00)	86,70	
4.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.842.200.000,00	1.597.130.540,00	(245.069.460,00)	86,70	
4.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.200.000,00	1.597.130.540,00	(245.069.460,00)	86,70	
4.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.420.000.000,00	1.418.465.000,00	(1.535.000,00)	99,89	
4.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000.000,00	1.418.465.000,00	(1.535.000,00)	99,89	
4.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000.000,00	1.418.465.000,00	(1.535.000,00)	99,89	
4.02.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	268.270.000,00	259.049.750,00	(9.220.250,00)	96,56	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	268.270.000,00	259.049.750,00	(9.220.250,00)	96,56	
4.02.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.270.000,00	259.049.750,00	(9.220.250,00)	96,56	
4.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	170.000.000,00	164.314.000,00	(5.686.000,00)	96,66	
4.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	164.314.000,00	(5.686.000,00)	96,66	
4.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	164.314.000,00	(5.686.000,00)	96,66	
4.02.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	268.270.000,00	266.316.570,00	(1.953.430,00)	99,27	
4.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	268.270.000,00	266.316.570,00	(1.953.430,00)	99,27	
4.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.270.000,00	266.316.570,00	(1.953.430,00)	99,27	
4.02.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.500.000.000,00	1.471.879.500,00	(28.120.500,00)	98,13	
4.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.471.879.500,00	(28.120.500,00)	98,13	
4.02.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.471.879.500,00	(28.120.500,00)	98,13	
4.02.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	100.000.000,00	96.280.000,00	(3.720.000,00)	96,28	
4.02.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.280.000,00	(3.720.000,00)	96,28	
4.02.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.280.000,00	(3.720.000,00)	96,28	
4.02.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	370.214.000,00	273.518.000,00	(96.696.000,00)	73,88	
4.02.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	173.573.000,00	109.968.000,00	(63.605.000,00)	63,36	
4.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	173.573.000,00	109.968.000,00	(63.605.000,00)	63,36	
4.02.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.573.000,00	109.968.000,00	(63.605.000,00)	63,36	
4.02.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	196.641.000,00	163.550.000,00	(33.091.000,00)	83,17	
4.02.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	196.641.000,00	163.550.000,00	(33.091.000,00)	83,17	
4.02.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.641.000,00	163.550.000,00	(33.091.000,00)	83,17	
4.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.641.427.000,00	2.297.251.250,00	(344.175.750,00)	86,97	
4.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	144.900.000,00	0,00	(144.900.000,00)	0,00	
4.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	144.900.000,00	0,00	(144.900.000,00)	0,00	
4.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.900.000,00	0,00	(144.900.000,00)	0,00	
4.02.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	588.000.000,00	549.799.650,00	(38.200.350,00)	93,50	
4.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	588.000.000,00	549.799.650,00	(38.200.350,00)	93,50	
4.02.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.000.000,00	549.799.650,00	(38.200.350,00)	93,50	
4.02.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	582.635.000,00	528.223.250,00	(54.411.750,00)	90,66	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	582.635.000,00	528.223.250,00	(54.411.750,00)	90,66	
4.02.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.635.000,00	528.223.250,00	(54.411.750,00)	90,66	
4.02.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	89.580.000,00	64.805.750,00	(24.774.250,00)	72,34	
4.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	89.580.000,00	64.805.750,00	(24.774.250,00)	72,34	
4.02.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.580.000,00	64.805.750,00	(24.774.250,00)	72,34	
4.02.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.236.312.000,00	1.154.422.600,00	(81.889.400,00)	93,38	
4.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.236.312.000,00	1.154.422.600,00	(81.889.400,00)	93,38	
4.02.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.312.000,00	1.154.422.600,00	(81.889.400,00)	93,38	
4.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	27.800.874.600,00	27.475.106.681,00	(325.767.919,00)	98,83	
4.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	196.472.000,00	196.464.000,00	(8.000,00)	100,00	
4.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	196.472.000,00	196.464.000,00	(8.000,00)	100,00	
4.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.472.000,00	196.464.000,00	(8.000,00)	100,00	
4.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.850.196.400,00	5.771.041.210,00	(79.155.190,00)	98,65	
4.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.850.196.400,00	5.771.041.210,00	(79.155.190,00)	98,65	
4.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.196.400,00	5.771.041.210,00	(79.155.190,00)	98,65	
4.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	180.292.000,00	180.030.000,00	(262.000,00)	99,85	
4.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	180.292.000,00	180.030.000,00	(262.000,00)	99,85	
4.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.292.000,00	180.030.000,00	(262.000,00)	99,85	
4.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.123.483.600,00	7.059.996.350,00	(63.487.250,00)	99,11	
4.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.123.483.600,00	7.059.996.350,00	(63.487.250,00)	99,11	
4.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.123.483.600,00	7.059.996.350,00	(63.487.250,00)	99,11	
4.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.035.944.200,00	2.025.750.000,00	(10.194.200,00)	99,50	
4.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.035.944.200,00	2.025.750.000,00	(10.194.200,00)	99,50	
4.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.035.944.200,00	2.025.750.000,00	(10.194.200,00)	99,50	
4.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12.020.946.400,00	11.992.583.121,00	(28.363.279,00)	99,76	
4.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	12.020.946.400,00	11.992.583.121,00	(28.363.279,00)	99,76	
4.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.020.946.400,00	11.992.583.121,00	(28.363.279,00)	99,76	
4.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	393.540.000,00	249.242.000,00	(144.298.000,00)	63,33	
4.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	393.540.000,00	249.242.000,00	(144.298.000,00)	63,33	
4.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.540.000,00	249.242.000,00	(144.298.000,00)	63,33	
4.02.01.1.06.0010.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.06.0010.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.215.496.500,00	31.059.642.143,00	(28.155.854.357,00)	52,45	
4.02.01.1.07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.608.805.000,00	3.528.100.000,00	(80.705.000,00)	97,76	
4.02.01.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	540.000,00	0,00	(540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	0,00	(540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	3.608.265.000,00	3.528.100.000,00	(80.165.000,00)	97,78	
4.02.01.1.07.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.608.265.000,00	3.528.100.000,00	(80.165.000,00)	97,78	
4.02.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	1.718.305.000,00	1.699.314.988,00	(18.990.012,00)	98,89	
4.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	540.000,00	0,00	(540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	0,00	(540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	1.717.765.000,00	1.699.314.988,00	(18.450.012,00)	98,93	
4.02.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.717.765.000,00	1.699.314.988,00	(18.450.012,00)	98,93	
4.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	52.730.196.500,00	24.839.990.655,00	(27.890.205.845,00)	47,11	
4.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	615.046.600,00	602.855.000,00	(12.191.600,00)	98,02	
4.02.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.046.600,00	602.855.000,00	(12.191.600,00)	98,02	
4.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	52.115.149.900,00	24.237.135.655,00	(27.878.014.245,00)	46,51	
4.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.115.149.900,00	24.237.135.655,00	(27.878.014.245,00)	46,51	
4.02.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.057.650.000,00	992.236.500,00	(65.413.500,00)	93,82	
4.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.057.650.000,00	992.236.500,00	(65.413.500,00)	93,82	
4.02.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.650.000,00	992.236.500,00	(65.413.500,00)	93,82	
4.02.01.1.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.540.000,00	0,00	(100.540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.540.000,00	0,00	(100.540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.540.000,00	0,00	(100.540.000,00)	0,00	
4.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.798.021.170,00	23.528.734.052,00	(1.269.287.118,00)	94,88	
4.02.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	89.191.000,00	88.226.700,00	(964.300,00)	98,92	
4.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	89.191.000,00	88.226.700,00	(964.300,00)	98,92	
4.02.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.191.000,00	88.226.700,00	(964.300,00)	98,92	
4.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.158.838.200,00	2.074.634.717,00	(84.203.483,00)	96,10	
4.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.158.838.200,00	2.074.634.717,00	(84.203.483,00)	96,10	
4.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.838.200,00	2.074.634.717,00	(84.203.483,00)	96,10	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.190.596.000,00	2.018.437.433,00	(172.158.567,00)	92,14	
4.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.190.596.000,00	2.018.437.433,00	(172.158.567,00)	92,14	
4.02.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.596.000,00	2.018.437.433,00	(172.158.567,00)	92,14	
4.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	20.359.395.970,00	19.347.435.202,00	(1.011.960.768,00)	95,03	
4.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.359.395.970,00	19.347.435.202,00	(1.011.960.768,00)	95,03	
4.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.359.395.970,00	19.347.435.202,00	(1.011.960.768,00)	95,03	
4.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.321.567.000,00	47.007.067.763,16	(6.314.499.236,84)	88,16	
4.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.831.804.800,00	3.378.042.140,00	(2.453.762.660,00)	57,92	
4.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.831.804.800,00	3.378.042.140,00	(2.453.762.660,00)	57,92	
4.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.831.804.800,00	3.378.042.140,00	(2.453.762.660,00)	57,92	
4.02.01.1.09.0005	PEMELIHARAAN MEDEL	206.078.000,00	204.784.400,00	(1.293.600,00)	99,37	
4.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	206.078.000,00	204.784.400,00	(1.293.600,00)	99,37	
4.02.01.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.078.000,00	204.784.400,00	(1.293.600,00)	99,37	
4.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.580.494.000,00	3.081.766.180,00	(498.727.820,00)	86,07	
4.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.580.494.000,00	3.081.766.180,00	(498.727.820,00)	86,07	
4.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.494.000,00	3.081.766.180,00	(498.727.820,00)	86,07	
4.02.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	36.819.108.600,00	33.839.631.187,83	(2.979.477.412,17)	91,91	
4.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	34.641.108.600,00	31.679.811.187,83	(2.961.297.412,17)	91,45	
4.02.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.641.108.600,00	31.679.811.187,83	(2.961.297.412,17)	91,45	
4.02.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	2.178.000.000,00	2.159.820.000,00	(18.180.000,00)	99,17	
4.02.01.1.09.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.178.000.000,00	2.159.820.000,00	(18.180.000,00)	99,17	
4.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.884.081.600,00	6.502.843.855,33	(381.237.744,67)	94,46	
4.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	6.884.081.600,00	6.502.843.855,33	(381.237.744,67)	94,46	
4.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.884.081.600,00	6.502.843.855,33	(381.237.744,67)	94,46	
4.02.01.1.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	132.149.732.489,00	130.587.539.744,00	(1.562.192.745,00)	98,82	
4.02.01.1.15.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	129.322.692.489,00	127.893.068.244,00	(1.429.624.245,00)	98,89	
4.02.01.1.15.0001.5.1	BELANJA OPERASI	129.322.692.489,00	127.893.068.244,00	(1.429.624.245,00)	98,89	
4.02.01.1.15.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	129.322.692.489,00	127.893.068.244,00	(1.429.624.245,00)	98,89	
4.02.01.1.15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	2.412.040.000,00	2.281.621.500,00	(130.418.500,00)	94,59	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.1.15.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.412.040.000,00	2.281.621.500,00	(130.418.500,00)	94,59	
4.02.01.1.15.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.040.000,00	2.281.621.500,00	(130.418.500,00)	94,59	
4.02.01.1.15.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	415.000.000,00	412.850.000,00	(2.150.000,00)	99,48	
4.02.01.1.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	415.000.000,00	412.850.000,00	(2.150.000,00)	99,48	
4.02.01.1.15.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	412.850.000,00	(2.150.000,00)	99,48	
4.02.01.1.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	(824.150.600,00)	66,28	
4.02.01.1.16.0003	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	(824.150.600,00)	66,28	
4.02.01.1.16.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	(824.150.600,00)	66,28	
4.02.01.1.16.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	(824.150.600,00)	66,28	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	284.381.277.520,00	261.880.038.632,00	(22.501.238.888,00)	92,09	
4.02.02.1.01	PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	84.818.829.200,00	83.919.598.640,00	(899.230.560,00)	98,94	
4.02.02.1.01.0002	PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	969.840.000,00	742.071.840,00	(227.768.160,00)	76,51	
4.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	969.840.000,00	742.071.840,00	(227.768.160,00)	76,51	
4.02.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.840.000,00	742.071.840,00	(227.768.160,00)	76,51	
4.02.02.1.01.0003	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	124.600.000,00	110.505.100,00	(14.094.900,00)	88,69	
4.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	124.600.000,00	110.505.100,00	(14.094.900,00)	88,69	
4.02.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.600.000,00	110.505.100,00	(14.094.900,00)	88,69	
4.02.02.1.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	940.065.000,00	731.069.100,00	(208.995.900,00)	77,77	
4.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	940.065.000,00	731.069.100,00	(208.995.900,00)	77,77	
4.02.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.065.000,00	731.069.100,00	(208.995.900,00)	77,77	
4.02.02.1.01.0006	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH YANG DILAKUKAN BERSAMA OLEH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH	82.784.324.200,00	82.335.952.600,00	(448.371.600,00)	99,46	
4.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	82.784.324.200,00	82.335.952.600,00	(448.371.600,00)	99,46	
4.02.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.784.324.200,00	82.335.952.600,00	(448.371.600,00)	99,46	
4.02.02.1.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	406.125.000,00	161.201.500,00	(244.923.500,00)	39,69	
4.02.02.1.02.0001	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	81.225.000,00	50.040.000,00	(31.185.000,00)	61,61	
4.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	81.225.000,00	50.040.000,00	(31.185.000,00)	61,61	
4.02.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	50.040.000,00	(31.185.000,00)	61,61	
4.02.02.1.02.0002	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	81.225.000,00	62.260.500,00	(18.964.500,00)	76,65	
4.02.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	81.225.000,00	62.260.500,00	(18.964.500,00)	76,65	
4.02.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	62.260.500,00	(18.964.500,00)	76,65	
4.02.02.1.02.0003	PEMBAHASAN APBD	81.225.000,00	0,00	(81.225.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	81.225.000,00	0,00	(81.225.000,00)	0,00	
4.02.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	0,00	(81.225.000,00)	0,00	
4.02.02.1.02.0004	PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD	81.225.000,00	38.450.500,00	(42.774.500,00)	47,34	
4.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	81.225.000,00	38.450.500,00	(42.774.500,00)	47,34	
4.02.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	38.450.500,00	(42.774.500,00)	47,34	
4.02.02.1.02.0006	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	81.225.000,00	10.450.500,00	(70.774.500,00)	12,87	
4.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	81.225.000,00	10.450.500,00	(70.774.500,00)	12,87	
4.02.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	10.450.500,00	(70.774.500,00)	12,87	
4.02.02.1.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	251.877.500,00	154.556.830,00	(97.320.670,00)	61,36	
4.02.02.1.03.0001	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	43.575.500,00	5.433.270,00	(38.142.230,00)	12,47	
4.02.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.500,00	5.433.270,00	(38.142.230,00)	12,47	
4.02.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.500,00	5.433.270,00	(38.142.230,00)	12,47	
4.02.02.1.03.0002	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	43.575.500,00	22.923.750,00	(20.651.750,00)	52,61	
4.02.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.500,00	22.923.750,00	(20.651.750,00)	52,61	
4.02.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.500,00	22.923.750,00	(20.651.750,00)	52,61	
4.02.02.1.03.0003	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.575.500,00	35.584.570,00	(7.990.930,00)	81,66	
4.02.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.500,00	35.584.570,00	(7.990.930,00)	81,66	
4.02.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.500,00	35.584.570,00	(7.990.930,00)	81,66	
4.02.02.1.03.0004	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	43.575.500,00	22.651.440,00	(20.924.060,00)	51,98	
4.02.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.500,00	22.651.440,00	(20.924.060,00)	51,98	
4.02.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.500,00	22.651.440,00	(20.924.060,00)	51,98	
4.02.02.1.03.0005	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	43.575.500,00	35.363.800,00	(8.211.700,00)	81,16	
4.02.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.500,00	35.363.800,00	(8.211.700,00)	81,16	
4.02.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.500,00	35.363.800,00	(8.211.700,00)	81,16	
4.02.02.1.03.0006	PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	34.000.000,00	32.600.000,00	(1.400.000,00)	95,88	
4.02.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	32.600.000,00	(1.400.000,00)	95,88	
4.02.02.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	32.600.000,00	(1.400.000,00)	95,88	
4.02.02.1.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	41.462.425.520,00	36.824.629.680,00	(4.637.795.840,00)	88,81	
4.02.02.1.04.0002	PENDALAMAN TUGAS DPRD	3.824.500.000,00	2.880.101.200,00	(944.398.800,00)	75,31	
4.02.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.824.500.000,00	2.880.101.200,00	(944.398.800,00)	75,31	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.824.500.000,00	2.880.101.200,00	(944.398.800,00)	75,31	
4.02.02.1.04.0004	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	4.651.776.000,00	4.647.916.800,00	(3.859.200,00)	99,92	
4.02.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.651.776.000,00	4.647.916.800,00	(3.859.200,00)	99,92	
4.02.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.651.776.000,00	4.647.916.800,00	(3.859.200,00)	99,92	
4.02.02.1.04.0005	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	1.152.684.000,00	1.007.130.600,00	(145.553.400,00)	87,37	
4.02.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.684.000,00	1.007.130.600,00	(145.553.400,00)	87,37	
4.02.02.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.684.000,00	1.007.130.600,00	(145.553.400,00)	87,37	
4.02.02.1.04.0006	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	10.411.077.900,00	9.664.612.220,00	(746.465.680,00)	92,83	
4.02.02.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.411.077.900,00	9.664.612.220,00	(746.465.680,00)	92,83	
4.02.02.1.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.411.077.900,00	9.664.612.220,00	(746.465.680,00)	92,83	
4.02.02.1.04.0007	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	182.824.920,00	161.016.480,00	(21.808.440,00)	88,07	
4.02.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	182.824.920,00	161.016.480,00	(21.808.440,00)	88,07	
4.02.02.1.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.824.920,00	161.016.480,00	(21.808.440,00)	88,07	
4.02.02.1.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	21.239.562.700,00	18.463.852.380,00	(2.775.710.320,00)	86,93	
4.02.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	21.225.629.700,00	18.463.852.380,00	(2.761.777.320,00)	86,99	
4.02.02.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.225.629.700,00	18.463.852.380,00	(2.761.777.320,00)	86,99	
4.02.02.1.04.0008.5.2	BELANJA MODAL	13.933.000,00	0,00	(13.933.000,00)	0,00	
4.02.02.1.04.0008.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	13.933.000,00	0,00	(13.933.000,00)	0,00	
4.02.02.1.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	67.350.601.600,00	65.710.777.114,00	(1.639.824.486,00)	97,57	
4.02.02.1.05.0001	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	4.055.568.000,00	3.891.211.694,00	(164.356.306,00)	95,95	
4.02.02.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.055.568.000,00	3.891.211.694,00	(164.356.306,00)	95,95	
4.02.02.1.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.568.000,00	3.891.211.694,00	(164.356.306,00)	95,95	
4.02.02.1.05.0002	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	126.706.600,00	83.800.000,00	(42.906.600,00)	66,14	
4.02.02.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	126.706.600,00	83.800.000,00	(42.906.600,00)	66,14	
4.02.02.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.706.600,00	83.800.000,00	(42.906.600,00)	66,14	
4.02.02.1.05.0003	PELAKSANAAN RESES	63.168.327.000,00	61.735.765.420,00	(1.432.561.580,00)	97,73	
4.02.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	63.168.327.000,00	61.735.765.420,00	(1.432.561.580,00)	97,73	
4.02.02.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.168.327.000,00	61.735.765.420,00	(1.432.561.580,00)	97,73	
4.02.02.1.07	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	5.144.660.000,00	3.837.286.600,00	(1.307.373.400,00)	74,59	
4.02.02.1.07.0001	FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJA SAMA DAERAH	288.600.000,00	130.800.000,00	(157.800.000,00)	45,32	
4.02.02.1.07.0001.5.1	BELANJA OPERASI	288.600.000,00	130.800.000,00	(157.800.000,00)	45,32	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.1.07.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.600.000,00	130.800.000,00	(157.800.000,00)	45,32	
4.02.02.1.07.0002	PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	4.856.060.000,00	3.706.486.600,00	(1.149.573.400,00)	76,33	
4.02.02.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.856.060.000,00	3.706.486.600,00	(1.149.573.400,00)	76,33	
4.02.02.1.07.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.856.060.000,00	3.706.486.600,00	(1.149.573.400,00)	76,33	
4.02.02.1.08	FASILITASI TUGAS DPRD	84.946.758.700,00	71.271.988.268,00	(13.674.770.432,00)	83,90	
4.02.02.1.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	81.014.792.700,00	67.910.607.122,00	(13.104.185.578,00)	83,82	
4.02.02.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	81.014.792.700,00	67.910.607.122,00	(13.104.185.578,00)	83,82	
4.02.02.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.014.792.700,00	67.910.607.122,00	(13.104.185.578,00)	83,82	
4.02.02.1.08.0002	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	56.340.000,00	42.070.000,00	(14.270.000,00)	74,67	
4.02.02.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	56.340.000,00	42.070.000,00	(14.270.000,00)	74,67	
4.02.02.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.340.000,00	42.070.000,00	(14.270.000,00)	74,67	
4.02.02.1.08.0003	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	407.562.000,00	397.598.000,00	(9.964.000,00)	97,56	
4.02.02.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	407.562.000,00	397.598.000,00	(9.964.000,00)	97,56	
4.02.02.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.562.000,00	397.598.000,00	(9.964.000,00)	97,56	
4.02.02.1.08.0004	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	3.326.555.000,00	2.840.760.046,00	(485.794.954,00)	85,40	
4.02.02.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.326.555.000,00	2.840.760.046,00	(485.794.954,00)	85,40	
4.02.02.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.326.555.000,00	2.840.760.046,00	(485.794.954,00)	85,40	
4.02.02.1.08.0005	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS	141.509.000,00	80.953.100,00	(60.555.900,00)	57,21	
4.02.02.1.08.0005.5.1	BELANJA OPERASI	141.509.000,00	80.953.100,00	(60.555.900,00)	57,21	
4.02.02.1.08.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.509.000,00	80.953.100,00	(60.555.900,00)	57,21	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	612.886.069.379,00	550.137.227.637,16	(62.748.841.741,84)	89,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(612.886.069.379,00)	(550.137.227.637,16)	62.748.841.741,84	89,76	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(612.886.069.379,00)	(550.137.227.637,16)	62.748.841.741,84	89,76	

5.01.5.05.0.00.01.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Satuan Kerja : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.552.467.022,00	38.614.415.907,00	(1.938.051.115,00)	95,22	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	898.628.000,00	789.212.997,00	(109.415.003,00)	87,82	
5.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	32.000.000,00	31.492.197,00	(507.803,00)	98,41	
5.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.492.197,00	(507.803,00)	98,41	
5.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.492.197,00	(507.803,00)	98,41	
5.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	18.448.000,00	18.448.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	18.448.000,00	18.448.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.448.000,00	18.448.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	18.400.000,00	18.389.800,00	(10.200,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	18.400.000,00	18.389.800,00	(10.200,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	18.389.800,00	(10.200,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	16.000.000,00	15.991.000,00	(9.000,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.991.000,00	(9.000,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.991.000,00	(9.000,00)	99,94	
5.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	16.300.000,00	15.290.700,00	(1.009.300,00)	93,81	
5.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.300.000,00	15.290.700,00	(1.009.300,00)	93,81	
5.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	15.290.700,00	(1.009.300,00)	93,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	29.202.000,00	29.197.198,00	(4.802,00)	99,98	
5.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	29.202.000,00	29.197.198,00	(4.802,00)	99,98	
5.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.202.000,00	29.197.198,00	(4.802,00)	99,98	
5.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	67.750.000,00	62.848.088,00	(4.901.912,00)	92,76	
5.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	67.750.000,00	62.848.088,00	(4.901.912,00)	92,76	
5.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	62.848.088,00	(4.901.912,00)	92,76	
5.01.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.302.000,00	17.398.500,00	(4.903.500,00)	78,01	
5.01.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	22.302.000,00	17.398.500,00	(4.903.500,00)	78,01	
5.01.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.302.000,00	17.398.500,00	(4.903.500,00)	78,01	
5.01.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	646.326.000,00	548.257.514,00	(98.068.486,00)	84,83	
5.01.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	646.326.000,00	548.257.514,00	(98.068.486,00)	84,83	
5.01.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.326.000,00	548.257.514,00	(98.068.486,00)	84,83	
5.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	32.985.025.000,00	31.739.979.414,00	(1.245.045.586,00)	96,23	
5.01.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	32.662.600.000,00	31.419.735.524,00	(1.242.864.476,00)	96,19	
5.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	32.662.600.000,00	31.419.735.524,00	(1.242.864.476,00)	96,19	
5.01.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	32.662.600.000,00	31.419.735.524,00	(1.242.864.476,00)	96,19	
5.01.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	282.655.000,00	282.655.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	282.655.000,00	282.655.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.655.000,00	282.655.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.680.000,00	10.493.235,00	(186.765,00)	98,25	
5.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.680.000,00	10.493.235,00	(186.765,00)	98,25	
5.01.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	10.493.235,00	(186.765,00)	98,25	
5.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.230.000,00	1.169.257,00	(60.743,00)	95,06	
5.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.230.000,00	1.169.257,00	(60.743,00)	95,06	
5.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.169.257,00	(60.743,00)	95,06	
5.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.000.000,00	6.411.692,00	(588.308,00)	91,60	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.411.692,00	(588.308,00)	91,60	
5.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.411.692,00	(588.308,00)	91,60	
5.01.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.200.000,00	839.702,00	(360.298,00)	69,98	
5.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	839.702,00	(360.298,00)	69,98	
5.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	839.702,00	(360.298,00)	69,98	
5.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	19.200.000,00	18.230.207,00	(969.793,00)	94,95	
5.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.230.207,00	(969.793,00)	94,95	
5.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.230.207,00	(969.793,00)	94,95	
5.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	460.000,00	444.797,00	(15.203,00)	96,70	
5.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	460.000,00	444.797,00	(15.203,00)	96,70	
5.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	444.797,00	(15.203,00)	96,70	
5.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.999.936,00	11.871.673,00	(128.263,00)	98,93	
5.01.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.713.600,00	3.692.949,00	(20.651,00)	99,44	
5.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.713.600,00	3.692.949,00	(20.651,00)	99,44	
5.01.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.713.600,00	3.692.949,00	(20.651,00)	99,44	
5.01.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.321.536,00	4.257.665,00	(63.871,00)	98,52	
5.01.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.321.536,00	4.257.665,00	(63.871,00)	98,52	
5.01.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.321.536,00	4.257.665,00	(63.871,00)	98,52	
5.01.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.964.800,00	3.921.059,00	(43.741,00)	98,90	
5.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.964.800,00	3.921.059,00	(43.741,00)	98,90	
5.01.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.964.800,00	3.921.059,00	(43.741,00)	98,90	
5.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	48.361.760,00	38.262.837,00	(10.098.923,00)	79,12	
5.01.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	3.232.080,00	2.276.927,00	(955.153,00)	70,45	
5.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.232.080,00	2.276.927,00	(955.153,00)	70,45	
5.01.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.232.080,00	2.276.927,00	(955.153,00)	70,45	
5.01.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	3.040.000,00	3.028.500,00	(11.500,00)	99,62	
5.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.028.500,00	(11.500,00)	99,62	
5.01.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.028.500,00	(11.500,00)	99,62	
5.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	42.089.680,00	32.957.410,00	(9.132.270,00)	78,30	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	42.089.680,00	32.957.410,00	(9.132.270,00)	78,30	
5.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.089.680,00	32.957.410,00	(9.132.270,00)	78,30	
5.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.355.230.946,00	1.153.797.200,00	(201.433.746,00)	85,14	
5.01.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	52.037.000,00	48.149.877,00	(3.887.123,00)	92,53	
5.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	52.037.000,00	48.149.877,00	(3.887.123,00)	92,53	
5.01.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.037.000,00	48.149.877,00	(3.887.123,00)	92,53	
5.01.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	270.801.020,00	238.799.957,00	(32.001.063,00)	88,18	
5.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	270.801.020,00	238.799.957,00	(32.001.063,00)	88,18	
5.01.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.801.020,00	238.799.957,00	(32.001.063,00)	88,18	
5.01.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	134.253.000,00	125.279.762,00	(8.973.238,00)	93,32	
5.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	134.253.000,00	125.279.762,00	(8.973.238,00)	93,32	
5.01.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.253.000,00	125.279.762,00	(8.973.238,00)	93,32	
5.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	153.193.500,00	135.446.444,00	(17.747.056,00)	88,42	
5.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	153.193.500,00	135.446.444,00	(17.747.056,00)	88,42	
5.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.193.500,00	135.446.444,00	(17.747.056,00)	88,42	
5.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	118.336.376,00	113.804.088,00	(4.532.288,00)	96,17	
5.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	118.336.376,00	113.804.088,00	(4.532.288,00)	96,17	
5.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.336.376,00	113.804.088,00	(4.532.288,00)	96,17	
5.01.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	11.332.700,00	10.713.720,00	(618.980,00)	94,54	
5.01.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	11.332.700,00	10.713.720,00	(618.980,00)	94,54	
5.01.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.332.700,00	10.713.720,00	(618.980,00)	94,54	
5.01.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	52.935.000,00	44.117.000,00	(8.818.000,00)	83,34	
5.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	52.935.000,00	44.117.000,00	(8.818.000,00)	83,34	
5.01.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.935.000,00	44.117.000,00	(8.818.000,00)	83,34	
5.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	523.496.250,00	401.513.563,00	(121.982.687,00)	76,70	
5.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	523.496.250,00	401.513.563,00	(121.982.687,00)	76,70	
5.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.496.250,00	401.513.563,00	(121.982.687,00)	76,70	
5.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	28.510.100,00	26.630.297,00	(1.879.803,00)	93,41	
5.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	28.510.100,00	26.630.297,00	(1.879.803,00)	93,41	
5.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.510.100,00	26.630.297,00	(1.879.803,00)	93,41	
5.01.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	10.336.000,00	9.342.492,00	(993.508,00)	90,39	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.336.000,00	9.342.492,00	(993.508,00)	90,39	
5.01.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.336.000,00	9.342.492,00	(993.508,00)	90,39	
5.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	384.904.896,00	324.797.133,00	(60.107.763,00)	84,38	
5.01.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	123.537.096,00	88.551.495,00	(34.985.601,00)	71,68	
5.01.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.927.096,00	4.551.490,00	(375.606,00)	92,38	
5.01.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.927.096,00	4.551.490,00	(375.606,00)	92,38	
5.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	118.610.000,00	84.000.005,00	(34.609.995,00)	70,82	
5.01.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.610.000,00	84.000.005,00	(34.609.995,00)	70,82	
5.01.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	261.367.800,00	236.245.638,00	(25.122.162,00)	90,39	
5.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	726.800,00	686.397,00	(40.403,00)	94,44	
5.01.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.800,00	686.397,00	(40.403,00)	94,44	
5.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	260.641.000,00	235.559.241,00	(25.081.759,00)	90,38	
5.01.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.641.000,00	235.559.241,00	(25.081.759,00)	90,38	
5.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.516.406.160,00	2.411.119.663,00	(105.286.497,00)	95,82	
5.01.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.282.000,00	10.036.563,00	(245.437,00)	97,61	
5.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.282.000,00	10.036.563,00	(245.437,00)	97,61	
5.01.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.282.000,00	10.036.563,00	(245.437,00)	97,61	
5.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	353.271.900,00	311.628.764,00	(41.643.136,00)	88,21	
5.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	353.271.900,00	311.628.764,00	(41.643.136,00)	88,21	
5.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.271.900,00	311.628.764,00	(41.643.136,00)	88,21	
5.01.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	41.895.000,00	37.959.810,00	(3.935.190,00)	90,61	
5.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	41.895.000,00	37.959.810,00	(3.935.190,00)	90,61	
5.01.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.895.000,00	37.959.810,00	(3.935.190,00)	90,61	
5.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.110.957.260,00	2.051.494.526,00	(59.462.734,00)	97,18	
5.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.110.957.260,00	2.051.494.526,00	(59.462.734,00)	97,18	
5.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.110.957.260,00	2.051.494.526,00	(59.462.734,00)	97,18	
5.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.351.910.324,00	2.145.374.990,00	(206.535.334,00)	91,22	
5.01.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	281.852.000,00	270.570.764,00	(11.281.236,00)	96,00	
5.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	281.852.000,00	270.570.764,00	(11.281.236,00)	96,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.852.000,00	270.570.764,00	(11.281.236,00)	96,00	
5.01.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.171.065.000,00	1.005.412.701,00	(165.652.299,00)	85,85	
5.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.171.065.000,00	1.005.412.701,00	(165.652.299,00)	85,85	
5.01.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.065.000,00	1.005.412.701,00	(165.652.299,00)	85,85	
5.01.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	157.812.000,00	140.759.336,00	(17.052.664,00)	89,19	
5.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	157.812.000,00	140.759.336,00	(17.052.664,00)	89,19	
5.01.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.812.000,00	140.759.336,00	(17.052.664,00)	89,19	
5.01.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	202.202.000,00	197.756.300,00	(4.445.700,00)	97,80	
5.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	202.202.000,00	197.756.300,00	(4.445.700,00)	97,80	
5.01.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.202.000,00	197.756.300,00	(4.445.700,00)	97,80	
5.01.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	538.979.324,00	530.875.889,00	(8.103.435,00)	98,50	
5.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	538.979.324,00	530.875.889,00	(8.103.435,00)	98,50	
5.01.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.979.324,00	530.875.889,00	(8.103.435,00)	98,50	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.812.333.900,00	3.325.962.374,00	(486.371.526,00)	87,24	
5.01.02.1.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.688.028.000,00	1.642.694.260,00	(45.333.740,00)	97,31	
5.01.02.1.01.0001	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	46.155.000,00	46.100.000,00	(55.000,00)	99,88	
5.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.155.000,00	46.100.000,00	(55.000,00)	99,88	
5.01.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.155.000,00	46.100.000,00	(55.000,00)	99,88	
5.01.02.1.01.0002	KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	55.254.000,00	54.060.000,00	(1.194.000,00)	97,84	
5.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	55.254.000,00	54.060.000,00	(1.194.000,00)	97,84	
5.01.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.254.000,00	54.060.000,00	(1.194.000,00)	97,84	
5.01.02.1.01.0003	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	254.030.400,00	236.789.685,00	(17.240.715,00)	93,21	
5.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	254.030.400,00	236.789.685,00	(17.240.715,00)	93,21	
5.01.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.030.400,00	236.789.685,00	(17.240.715,00)	93,21	
5.01.02.1.01.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	26.084.600,00	25.834.600,00	(250.000,00)	99,04	
5.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	26.084.600,00	25.834.600,00	(250.000,00)	99,04	
5.01.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.084.600,00	25.834.600,00	(250.000,00)	99,04	
5.01.02.1.01.0005	PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI	253.650.000,00	247.350.000,00	(6.300.000,00)	97,52	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	253.650.000,00	247.350.000,00	(6.300.000,00)	97,52	
5.01.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.650.000,00	247.350.000,00	(6.300.000,00)	97,52	
5.01.02.1.01.0006	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	1.052.854.000,00	1.032.559.975,00	(20.294.025,00)	98,07	
5.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.854.000,00	1.032.559.975,00	(20.294.025,00)	98,07	
5.01.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.854.000,00	1.032.559.975,00	(20.294.025,00)	98,07	
5.01.02.1.02	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	256.784.000,00	228.094.849,00	(28.689.151,00)	88,83	
5.01.02.1.02.0001	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.650.000,00	25.151.000,00	(2.499.000,00)	90,96	
5.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.650.000,00	25.151.000,00	(2.499.000,00)	90,96	
5.01.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	25.151.000,00	(2.499.000,00)	90,96	
5.01.02.1.02.0002	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	108.279.000,00	90.096.999,00	(18.182.001,00)	83,21	
5.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	108.279.000,00	90.096.999,00	(18.182.001,00)	83,21	
5.01.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.279.000,00	90.096.999,00	(18.182.001,00)	83,21	
5.01.02.1.02.0003	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.400.000,00	10.398.500,00	(7.001.500,00)	59,76	
5.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	10.398.500,00	(7.001.500,00)	59,76	
5.01.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	10.398.500,00	(7.001.500,00)	59,76	
5.01.02.1.02.0004	PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	103.455.000,00	102.448.350,00	(1.006.650,00)	99,03	
5.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	103.455.000,00	102.448.350,00	(1.006.650,00)	99,03	
5.01.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.455.000,00	102.448.350,00	(1.006.650,00)	99,03	
5.01.02.1.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.405.260.900,00	998.846.880,00	(406.414.020,00)	71,08	
5.01.02.1.03.0001	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI	478.771.200,00	403.523.300,00	(75.247.900,00)	84,28	
5.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	478.771.200,00	403.523.300,00	(75.247.900,00)	84,28	
5.01.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.771.200,00	403.523.300,00	(75.247.900,00)	84,28	
5.01.02.1.03.0002	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH	446.418.700,00	117.753.530,00	(328.665.170,00)	26,38	
5.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	446.418.700,00	117.753.530,00	(328.665.170,00)	26,38	
5.01.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.418.700,00	117.753.530,00	(328.665.170,00)	26,38	
5.01.02.1.03.0003	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.100.000,00	14.400.000,00	(700.000,00)	95,36	
5.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.100.000,00	14.400.000,00	(700.000,00)	95,36	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	14.400.000,00	(700.000,00)	95,36	
5.01.02.1.03.0004	FASILITAS/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	464.971.000,00	463.170.050,00	(1.800.950,00)	99,61	
5.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	464.971.000,00	463.170.050,00	(1.800.950,00)	99,61	
5.01.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.971.000,00	463.170.050,00	(1.800.950,00)	99,61	
5.01.02.1.04	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	462.261.000,00	456.326.385,00	(5.934.615,00)	98,72	
5.01.02.1.04.0001	PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.1.04.0002	PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	444.261.000,00	438.326.985,00	(5.934.015,00)	98,66	
5.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	444.261.000,00	438.326.985,00	(5.934.015,00)	98,66	
5.01.02.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.261.000,00	438.326.985,00	(5.934.015,00)	98,66	
5.01.02.1.04.0003	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	5.400.000,00	5.399.400,00	(600,00)	99,99	
5.01.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.399.400,00	(600,00)	99,99	
5.01.02.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.399.400,00	(600,00)	99,99	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.763.066.488,00	1.637.026.314,00	(126.040.174,00)	92,85	
5.01.03.1.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	873.766.000,00	792.952.414,00	(80.813.586,00)	90,75	
5.01.03.1.01.0001	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	63.040.000,00	62.180.000,00	(860.000,00)	98,64	
5.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	63.040.000,00	62.180.000,00	(860.000,00)	98,64	
5.01.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.040.000,00	62.180.000,00	(860.000,00)	98,64	
5.01.03.1.01.0002	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	49.510.000,00	49.258.808,00	(251.192,00)	99,49	
5.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	49.510.000,00	49.258.808,00	(251.192,00)	99,49	
5.01.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.510.000,00	49.258.808,00	(251.192,00)	99,49	
5.01.03.1.01.0003	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	53.291.000,00	47.075.700,00	(6.215.300,00)	88,34	
5.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	53.291.000,00	47.075.700,00	(6.215.300,00)	88,34	
5.01.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.291.000,00	47.075.700,00	(6.215.300,00)	88,34	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.03.1.01.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	185.592.000,00	165.424.999,00	(20.167.001,00)	89,13	
5.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	185.592.000,00	165.424.999,00	(20.167.001,00)	89,13	
5.01.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.592.000,00	165.424.999,00	(20.167.001,00)	89,13	
5.01.03.1.01.0005	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	81.826.000,00	69.924.020,00	(11.901.980,00)	85,45	
5.01.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	81.826.000,00	69.924.020,00	(11.901.980,00)	85,45	
5.01.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.826.000,00	69.924.020,00	(11.901.980,00)	85,45	
5.01.03.1.01.0006	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	61.336.500,00	60.953.853,00	(382.647,00)	99,38	
5.01.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.336.500,00	60.953.853,00	(382.647,00)	99,38	
5.01.03.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.336.500,00	60.953.853,00	(382.647,00)	99,38	
5.01.03.1.01.0007	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	117.192.500,00	104.378.932,00	(12.813.568,00)	89,07	
5.01.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	117.192.500,00	104.378.932,00	(12.813.568,00)	89,07	
5.01.03.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.192.500,00	104.378.932,00	(12.813.568,00)	89,07	
5.01.03.1.01.0008	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	261.978.000,00	233.756.102,00	(28.221.898,00)	89,23	
5.01.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	261.978.000,00	233.756.102,00	(28.221.898,00)	89,23	
5.01.03.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.978.000,00	233.756.102,00	(28.221.898,00)	89,23	
5.01.03.1.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	521.426.400,00	492.741.900,00	(28.684.500,00)	94,50	
5.01.03.1.02.0001	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	29.040.000,00	29.005.000,00	(35.000,00)	99,88	
5.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.040.000,00	29.005.000,00	(35.000,00)	99,88	
5.01.03.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	29.005.000,00	(35.000,00)	99,88	
5.01.03.1.02.0002	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	25.820.000,00	25.785.000,00	(35.000,00)	99,86	
5.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.820.000,00	25.785.000,00	(35.000,00)	99,86	
5.01.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.820.000,00	25.785.000,00	(35.000,00)	99,86	
5.01.03.1.02.0003	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	98.180.000,00	98.130.000,00	(50.000,00)	99,95	
5.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	98.180.000,00	98.130.000,00	(50.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.03.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.180.000,00	98.130.000,00	(50.000,00)	99,95	
5.01.03.1.02.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	40.226.400,00	39.566.900,00	(659.500,00)	98,36	
5.01.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.226.400,00	39.566.900,00	(659.500,00)	98,36	
5.01.03.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.226.400,00	39.566.900,00	(659.500,00)	98,36	
5.01.03.1.02.0005	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	49.068.800,00	43.315.000,00	(5.753.800,00)	88,27	
5.01.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	49.068.800,00	43.315.000,00	(5.753.800,00)	88,27	
5.01.03.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.068.800,00	43.315.000,00	(5.753.800,00)	88,27	
5.01.03.1.02.0006	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	51.568.000,00	46.400.000,00	(5.168.000,00)	89,98	
5.01.03.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	51.568.000,00	46.400.000,00	(5.168.000,00)	89,98	
5.01.03.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.568.000,00	46.400.000,00	(5.168.000,00)	89,98	
5.01.03.1.02.0007	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	132.741.200,00	128.647.500,00	(4.093.700,00)	96,92	
5.01.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	132.741.200,00	128.647.500,00	(4.093.700,00)	96,92	
5.01.03.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.741.200,00	128.647.500,00	(4.093.700,00)	96,92	
5.01.03.1.02.0008	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	94.782.000,00	81.892.500,00	(12.889.500,00)	86,40	
5.01.03.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	94.782.000,00	81.892.500,00	(12.889.500,00)	86,40	
5.01.03.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.782.000,00	81.892.500,00	(12.889.500,00)	86,40	
5.01.03.1.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	367.874.088,00	351.332.000,00	(16.542.088,00)	95,50	
5.01.03.1.03.0001	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	18.276.188,00	17.498.200,00	(777.988,00)	95,74	
5.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.276.188,00	17.498.200,00	(777.988,00)	95,74	
5.01.03.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.276.188,00	17.498.200,00	(777.988,00)	95,74	
5.01.03.1.03.0002	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	10.900.900,00	10.880.900,00	(20.000,00)	99,82	
5.01.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.900.900,00	10.880.900,00	(20.000,00)	99,82	
5.01.03.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.900,00	10.880.900,00	(20.000,00)	99,82	
5.01.03.1.03.0003	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	156.017.000,00	150.562.000,00	(5.455.000,00)	96,50	
5.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	156.017.000,00	150.562.000,00	(5.455.000,00)	96,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.03.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.017.000,00	150.562.000,00	(5.455.000,00)	96,50	
5.01.03.1.03.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	45.430.000,00	44.982.500,00	(447.500,00)	99,01	
5.01.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	45.430.000,00	44.982.500,00	(447.500,00)	99,01	
5.01.03.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.430.000,00	44.982.500,00	(447.500,00)	99,01	
5.01.03.1.03.0005	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	16.940.000,00	14.855.400,00	(2.084.600,00)	87,69	
5.01.03.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.940.000,00	14.855.400,00	(2.084.600,00)	87,69	
5.01.03.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	14.855.400,00	(2.084.600,00)	87,69	
5.01.03.1.03.0006	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	9.520.000,00	9.338.000,00	(182.000,00)	98,09	
5.01.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.520.000,00	9.338.000,00	(182.000,00)	98,09	
5.01.03.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	9.338.000,00	(182.000,00)	98,09	
5.01.03.1.03.0007	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	105.530.000,00	97.975.000,00	(7.555.000,00)	92,84	
5.01.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	105.530.000,00	97.975.000,00	(7.555.000,00)	92,84	
5.01.03.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.530.000,00	97.975.000,00	(7.555.000,00)	92,84	
5.01.03.1.03.0008	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	5.260.000,00	5.240.000,00	(20.000,00)	99,62	
5.01.03.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.260.000,00	5.240.000,00	(20.000,00)	99,62	
5.01.03.1.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	5.240.000,00	(20.000,00)	99,62	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	(151.436.256,00)	90,66	
5.05.02.1.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	1.106.383.500,00	1.033.064.765,00	(73.318.735,00)	93,37	
5.05.02.1.01.0001	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	468.059.500,00	444.297.251,00	(23.762.249,00)	94,92	
5.05.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	468.059.500,00	444.297.251,00	(23.762.249,00)	94,92	
5.05.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.059.500,00	444.297.251,00	(23.762.249,00)	94,92	
5.05.02.1.01.0005	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI	24.162.000,00	20.936.310,00	(3.225.690,00)	86,65	
5.05.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.162.000,00	20.936.310,00	(3.225.690,00)	86,65	
5.05.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.162.000,00	20.936.310,00	(3.225.690,00)	86,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.05.02.1.01.0012	PENGLOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	590.000.000,00	567.831.204,00	(22.168.796,00)	96,24	
5.05.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	590.000.000,00	567.831.204,00	(22.168.796,00)	96,24	
5.05.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	567.831.204,00	(22.168.796,00)	96,24	
5.05.02.1.01.0014	FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN	24.162.000,00	0,00	(24.162.000,00)	0,00	
5.05.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	24.162.000,00	0,00	(24.162.000,00)	0,00	
5.05.02.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.162.000,00	0,00	(24.162.000,00)	0,00	
5.05.02.1.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	49.161.000,00	33.057.387,00	(16.103.613,00)	67,24	
5.05.02.1.02.0005	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	49.161.000,00	33.057.387,00	(16.103.613,00)	67,24	
5.05.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	49.161.000,00	33.057.387,00	(16.103.613,00)	67,24	
5.05.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.161.000,00	33.057.387,00	(16.103.613,00)	67,24	
5.05.02.1.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	175.266.800,00	149.433.012,00	(25.833.788,00)	85,26	
5.05.02.1.03.0002	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	77.504.000,00	70.898.505,00	(6.605.495,00)	91,48	
5.05.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	77.504.000,00	70.898.505,00	(6.605.495,00)	91,48	
5.05.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.504.000,00	70.898.505,00	(6.605.495,00)	91,48	
5.05.02.1.03.0005	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.700.800,00	50.192.800,00	(15.508.000,00)	76,40	
5.05.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	65.700.800,00	50.192.800,00	(15.508.000,00)	76,40	
5.05.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.700.800,00	50.192.800,00	(15.508.000,00)	76,40	
5.05.02.1.03.0013	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.062.000,00	28.341.707,00	(3.720.293,00)	88,40	
5.05.02.1.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	32.062.000,00	28.341.707,00	(3.720.293,00)	88,40	
5.05.02.1.03.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.062.000,00	28.341.707,00	(3.720.293,00)	88,40	
5.05.02.1.04	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	290.650.600,00	254.470.480,00	(36.180.120,00)	87,55	
5.05.02.1.04.0001	PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	76.344.400,00	72.830.100,00	(3.514.300,00)	95,40	
5.05.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	76.344.400,00	72.830.100,00	(3.514.300,00)	95,40	
5.05.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.344.400,00	72.830.100,00	(3.514.300,00)	95,40	
5.05.02.1.04.0003	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	159.527.600,00	144.437.780,00	(15.089.820,00)	90,54	
5.05.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	159.527.600,00	144.437.780,00	(15.089.820,00)	90,54	
5.05.02.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.527.600,00	144.437.780,00	(15.089.820,00)	90,54	
5.05.02.1.04.0004	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	40.873.600,00	24.138.600,00	(16.735.000,00)	59,06	
5.05.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.873.600,00	24.138.600,00	(16.735.000,00)	59,06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.05.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.873.600,00	24.138.600,00	(16.735.000,00)	59,06	
5.05.02.1.04.0005	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.905.000,00	13.064.000,00	(841.000,00)	93,95	
5.05.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	13.905.000,00	13.064.000,00	(841.000,00)	93,95	
5.05.02.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.905.000,00	13.064.000,00	(841.000,00)	93,95	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	47.749.329.310,00	45.047.430.239,00	(2.701.899.071,00)	94,34	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.749.329.310,00)	(45.047.430.239,00)	2.701.899.071,00	94,34	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(47.749.329.310,00)	(45.047.430.239,00)	2.701.899.071,00	94,34	

5.02.0.00.0.00.02.0000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Satuan Kerja : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.02.0000.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.526.424.482.000,00	3.406.827.664.671,00	(119.596.817.329,00)	96,61	
5.02.0.00.0.00.02.0000.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.526.424.482.000,00	3.406.827.664.671,00	(119.596.817.329,00)	96,61	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.526.424.482.000,00	3.406.827.664.671,00	(119.596.817.329,00)	96,61	
5	BELANJA DAERAH					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.541.612.335,00	37.842.404.520,00	(1.699.207.815,00)	95,70	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	289.145.000,00	269.658.430,00	(19.486.570,00)	93,26	
5.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.965.000,00	47.226.875,00	(3.738.125,00)	92,67	
5.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.965.000,00	47.226.875,00	(3.738.125,00)	92,67	
5.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.965.000,00	47.226.875,00	(3.738.125,00)	92,67	
5.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	20.800.000,00	20.783.200,00	(16.800,00)	99,92	
5.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	20.783.200,00	(16.800,00)	99,92	
5.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.783.200,00	(16.800,00)	99,92	
5.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	19.520.000,00	16.500.757,00	(3.019.243,00)	84,53	
5.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.520.000,00	16.500.757,00	(3.019.243,00)	84,53	
5.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	16.500.757,00	(3.019.243,00)	84,53	
5.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.300.000,00	9.292.200,00	(7.800,00)	99,92	
5.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.292.200,00	(7.800,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.292.200,00	(7.800,00)	99,92	
5.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.380.000,00	8.282.400,00	(97.600,00)	98,84	
5.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.380.000,00	8.282.400,00	(97.600,00)	98,84	
5.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	8.282.400,00	(97.600,00)	98,84	
5.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.640.000,00	17.271.981,00	(368.019,00)	97,91	
5.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	17.640.000,00	17.271.981,00	(368.019,00)	97,91	
5.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	17.271.981,00	(368.019,00)	97,91	
5.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	103.465.000,00	98.540.542,00	(4.924.458,00)	95,24	
5.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	103.465.000,00	98.540.542,00	(4.924.458,00)	95,24	
5.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.465.000,00	98.540.542,00	(4.924.458,00)	95,24	
5.02.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	21.360.000,00	21.196.900,00	(163.100,00)	99,24	
5.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	21.360.000,00	21.196.900,00	(163.100,00)	99,24	
5.02.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	21.196.900,00	(163.100,00)	99,24	
5.02.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.715.000,00	30.563.575,00	(7.151.425,00)	81,04	
5.02.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	37.715.000,00	30.563.575,00	(7.151.425,00)	81,04	
5.02.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.715.000,00	30.563.575,00	(7.151.425,00)	81,04	
5.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	33.079.446.080,00	32.003.000.156,00	(1.076.445.924,00)	96,75	
5.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.844.024.680,00	24.122.835.877,00	(721.188.803,00)	97,10	
5.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.844.024.680,00	24.122.835.877,00	(721.188.803,00)	97,10	
5.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	24.844.024.680,00	24.122.835.877,00	(721.188.803,00)	97,10	
5.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	8.207.390.000,00	7.853.202.000,00	(354.188.000,00)	95,68	
5.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.207.390.000,00	7.853.202.000,00	(354.188.000,00)	95,68	
5.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.207.390.000,00	7.853.202.000,00	(354.188.000,00)	95,68	
5.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	6.596.400,00	6.257.152,00	(339.248,00)	94,86	
5.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.596.400,00	6.257.152,00	(339.248,00)	94,86	
5.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.596.400,00	6.257.152,00	(339.248,00)	94,86	
5.02.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.999.800,00	1.898.481,00	(101.319,00)	94,93	
5.02.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.800,00	1.898.481,00	(101.319,00)	94,93	
5.02.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.898.481,00	(101.319,00)	94,93	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.091.200,00	3.011.603,00	(79.597,00)	97,43	
5.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.091.200,00	3.011.603,00	(79.597,00)	97,43	
5.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.091.200,00	3.011.603,00	(79.597,00)	97,43	
5.02.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.398.000,00	4.393.208,00	(4.792,00)	99,89	
5.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.398.000,00	4.393.208,00	(4.792,00)	99,89	
5.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.398.000,00	4.393.208,00	(4.792,00)	99,89	
5.02.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	9.957.600,00	9.564.275,00	(393.325,00)	96,05	
5.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	9.957.600,00	9.564.275,00	(393.325,00)	96,05	
5.02.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.957.600,00	9.564.275,00	(393.325,00)	96,05	
5.02.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.988.400,00	1.837.560,00	(150.840,00)	92,41	
5.02.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.988.400,00	1.837.560,00	(150.840,00)	92,41	
5.02.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.988.400,00	1.837.560,00	(150.840,00)	92,41	
5.02.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	18.680.000,00	18.218.924,00	(461.076,00)	97,53	
5.02.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.160.000,00	2.096.110,00	(63.890,00)	97,04	
5.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.096.110,00	(63.890,00)	97,04	
5.02.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.096.110,00	(63.890,00)	97,04	
5.02.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	4.468.000,00	4.420.013,00	(47.987,00)	98,93	
5.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.468.000,00	4.420.013,00	(47.987,00)	98,93	
5.02.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.000,00	4.420.013,00	(47.987,00)	98,93	
5.02.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.492.000,00	3.399.985,00	(92.015,00)	97,36	
5.02.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.492.000,00	3.399.985,00	(92.015,00)	97,36	
5.02.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.492.000,00	3.399.985,00	(92.015,00)	97,36	
5.02.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.900.000,00	1.855.704,00	(44.296,00)	97,67	
5.02.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.855.704,00	(44.296,00)	97,67	
5.02.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.855.704,00	(44.296,00)	97,67	
5.02.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.900.000,00	1.835.704,00	(64.296,00)	96,62	
5.02.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.835.704,00	(64.296,00)	96,62	
5.02.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.835.704,00	(64.296,00)	96,62	
5.02.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	
5.02.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	
5.02.01.1.03.0007	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	
5.02.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	
5.02.01.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.305.704,00	(74.296,00)	96,88	
5.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	42.300.000,00	2.481.900,00	(39.818.100,00)	5,87	
5.02.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	2.580.000,00	2.481.900,00	(98.100,00)	96,20	
5.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.580.000,00	2.481.900,00	(98.100,00)	96,20	
5.02.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.481.900,00	(98.100,00)	96,20	
5.02.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.720.000,00	0,00	(39.720.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	39.720.000,00	0,00	(39.720.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.720.000,00	0,00	(39.720.000,00)	0,00	
5.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.113.517.400,00	1.909.643.260,00	(203.874.140,00)	90,35	
5.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	66.414.000,00	64.828.440,00	(1.585.560,00)	97,61	
5.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	66.414.000,00	64.828.440,00	(1.585.560,00)	97,61	
5.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.414.000,00	64.828.440,00	(1.585.560,00)	97,61	
5.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	662.440.820,00	590.311.757,00	(72.129.063,00)	89,11	
5.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	662.440.820,00	590.311.757,00	(72.129.063,00)	89,11	
5.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.440.820,00	590.311.757,00	(72.129.063,00)	89,11	
5.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.392.000,00	13.160.160,00	(231.840,00)	98,27	
5.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.392.000,00	13.160.160,00	(231.840,00)	98,27	
5.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.392.000,00	13.160.160,00	(231.840,00)	98,27	
5.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	235.990.000,00	210.863.801,00	(25.126.199,00)	89,35	
5.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	235.990.000,00	210.863.801,00	(25.126.199,00)	89,35	
5.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.990.000,00	210.863.801,00	(25.126.199,00)	89,35	
5.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	642.652.580,00	596.092.475,00	(46.560.105,00)	92,76	
5.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	642.652.580,00	596.092.475,00	(46.560.105,00)	92,76	
5.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.652.580,00	596.092.475,00	(46.560.105,00)	92,76	
5.02.01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.694.000,00	2.886.000,00	(3.808.000,00)	43,11	
5.02.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	6.694.000,00	2.886.000,00	(3.808.000,00)	43,11	
5.02.01.1.06.0006.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.694.000,00	2.886.000,00	(3.808.000,00)	43,11	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	213.143.000,00	171.848.445,00	(41.294.555,00)	80,63	
5.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	213.143.000,00	171.848.445,00	(41.294.555,00)	80,63	
5.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.143.000,00	171.848.445,00	(41.294.555,00)	80,63	
5.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	33.513.000,00	33.428.082,00	(84.918,00)	99,75	
5.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	33.513.000,00	33.428.082,00	(84.918,00)	99,75	
5.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.513.000,00	33.428.082,00	(84.918,00)	99,75	
5.02.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	238.774.000,00	225.720.100,00	(13.053.900,00)	94,53	
5.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	218.997.000,00	208.720.100,00	(10.276.900,00)	95,31	
5.02.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.997.000,00	208.720.100,00	(10.276.900,00)	95,31	
5.02.01.1.06.0011.5.2	BELANJA MODAL	19.777.000,00	17.000.000,00	(2.777.000,00)	85,96	
5.02.01.1.06.0011.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	19.777.000,00	17.000.000,00	(2.777.000,00)	85,96	
5.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.583.000,00	40.486.140,00	(5.096.860,00)	88,82	
5.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.583.000,00	40.486.140,00	(5.096.860,00)	88,82	
5.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	45.583.000,00	40.486.140,00	(5.096.860,00)	88,82	
5.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.583.000,00	40.486.140,00	(5.096.860,00)	88,82	
5.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.867.810.719,00	2.626.173.285,00	(241.637.434,00)	91,57	
5.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	520.859.949,00	460.982.769,00	(59.877.180,00)	88,50	
5.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	520.859.949,00	460.982.769,00	(59.877.180,00)	88,50	
5.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.859.949,00	460.982.769,00	(59.877.180,00)	88,50	
5.02.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	182.084.000,00	176.814.120,00	(5.269.880,00)	97,11	
5.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	182.084.000,00	176.814.120,00	(5.269.880,00)	97,11	
5.02.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.084.000,00	176.814.120,00	(5.269.880,00)	97,11	
5.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.164.866.770,00	1.988.376.396,00	(176.490.374,00)	91,85	
5.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.164.866.770,00	1.988.376.396,00	(176.490.374,00)	91,85	
5.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.164.866.770,00	1.988.376.396,00	(176.490.374,00)	91,85	
5.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.085.130.136,00	972.742.425,00	(112.387.711,00)	89,64	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	120.239.926,00	112.358.445,00	(7.881.481,00)	93,45	
5.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	120.239.926,00	112.358.445,00	(7.881.481,00)	93,45	
5.02.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.239.926,00	112.358.445,00	(7.881.481,00)	93,45	
5.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	733.470.210,00	660.135.476,00	(73.334.734,00)	90,00	
5.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	733.470.210,00	660.135.476,00	(73.334.734,00)	90,00	
5.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.470.210,00	660.135.476,00	(73.334.734,00)	90,00	
5.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	131.430.000,00	103.768.210,00	(27.661.790,00)	78,95	
5.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	131.430.000,00	103.768.210,00	(27.661.790,00)	78,95	
5.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.430.000,00	103.768.210,00	(27.661.790,00)	78,95	
5.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	99.990.000,00	96.480.294,00	(3.509.706,00)	96,49	
5.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	99.990.000,00	96.480.294,00	(3.509.706,00)	96,49	
5.02.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.990.000,00	96.480.294,00	(3.509.706,00)	96,49	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.454.146.637.551,00	2.172.159.097.371,00	(281.987.540.180,00)	88,51	
5.02.02.1.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.974.741.240,00	2.661.983.482,00	(312.757.758,00)	89,49	
5.02.02.1.01.0001	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	76.537.000,00	68.243.880,00	(8.293.120,00)	89,16	
5.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	76.537.000,00	68.243.880,00	(8.293.120,00)	89,16	
5.02.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.537.000,00	68.243.880,00	(8.293.120,00)	89,16	
5.02.02.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	65.337.000,00	57.925.947,00	(7.411.053,00)	88,66	
5.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.337.000,00	57.925.947,00	(7.411.053,00)	88,66	
5.02.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.337.000,00	57.925.947,00	(7.411.053,00)	88,66	
5.02.02.1.01.0003	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA- SKPD	543.799.000,00	475.098.240,00	(68.700.760,00)	87,37	
5.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	543.799.000,00	475.098.240,00	(68.700.760,00)	87,37	
5.02.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.799.000,00	475.098.240,00	(68.700.760,00)	87,37	
5.02.02.1.01.0004	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	402.614.000,00	352.261.925,00	(50.352.075,00)	87,49	
5.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	402.614.000,00	352.261.925,00	(50.352.075,00)	87,49	
5.02.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.614.000,00	352.261.925,00	(50.352.075,00)	87,49	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.1.01.0005	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA- SKPD	243.475.000,00	241.230.608,00	(2.244.392,00)	99,08	
5.02.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	243.475.000,00	241.230.608,00	(2.244.392,00)	99,08	
5.02.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.475.000,00	241.230.608,00	(2.244.392,00)	99,08	
5.02.02.1.01.0006	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	329.928.000,00	259.659.383,00	(70.268.617,00)	78,70	
5.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	329.928.000,00	259.659.383,00	(70.268.617,00)	78,70	
5.02.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.928.000,00	259.659.383,00	(70.268.617,00)	78,70	
5.02.02.1.01.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	984.782.300,00	928.135.487,00	(56.646.813,00)	94,25	
5.02.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	984.782.300,00	928.135.487,00	(56.646.813,00)	94,25	
5.02.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	984.782.300,00	928.135.487,00	(56.646.813,00)	94,25	
5.02.02.1.01.0008	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	166.742.540,00	153.820.897,00	(12.921.643,00)	92,25	
5.02.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	166.742.540,00	153.820.897,00	(12.921.643,00)	92,25	
5.02.02.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.742.540,00	153.820.897,00	(12.921.643,00)	92,25	
5.02.02.1.01.0009	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	139.815.000,00	106.447.420,00	(33.367.580,00)	76,13	
5.02.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	139.815.000,00	106.447.420,00	(33.367.580,00)	76,13	
5.02.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.815.000,00	106.447.420,00	(33.367.580,00)	76,13	
5.02.02.1.01.0013	PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	21.711.400,00	19.159.695,00	(2.551.705,00)	88,25	
5.02.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	21.711.400,00	19.159.695,00	(2.551.705,00)	88,25	
5.02.02.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.711.400,00	19.159.695,00	(2.551.705,00)	88,25	
5.02.02.1.02	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.757.795.400,00	1.613.396.212,00	(144.399.188,00)	91,79	
5.02.02.1.02.0002	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	299.724.000,00	271.440.301,00	(28.283.699,00)	90,56	
5.02.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	299.724.000,00	271.440.301,00	(28.283.699,00)	90,56	
5.02.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.724.000,00	271.440.301,00	(28.283.699,00)	90,56	
5.02.02.1.02.0003	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	187.232.000,00	172.887.984,00	(14.344.016,00)	92,34	
5.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	187.232.000,00	172.887.984,00	(14.344.016,00)	92,34	
5.02.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.232.000,00	172.887.984,00	(14.344.016,00)	92,34	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.1.02.0004	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	92.190.000,00	91.488.716,00	(701.284,00)	99,24	
5.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	92.190.000,00	91.488.716,00	(701.284,00)	99,24	
5.02.02.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.190.000,00	91.488.716,00	(701.284,00)	99,24	
5.02.02.1.02.0006	SOSIALISASI REGULASI BIDANG KEUANGAN DAERAH	53.566.000,00	49.085.210,00	(4.480.790,00)	91,64	
5.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	53.566.000,00	49.085.210,00	(4.480.790,00)	91,64	
5.02.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.566.000,00	49.085.210,00	(4.480.790,00)	91,64	
5.02.02.1.02.0008	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	113.930.000,00	112.187.876,00	(1.742.124,00)	98,47	
5.02.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	113.930.000,00	112.187.876,00	(1.742.124,00)	98,47	
5.02.02.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.930.000,00	112.187.876,00	(1.742.124,00)	98,47	
5.02.02.1.02.0009	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	71.095.000,00	68.812.500,00	(2.282.500,00)	96,79	
5.02.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	71.095.000,00	68.812.500,00	(2.282.500,00)	96,79	
5.02.02.1.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.095.000,00	68.812.500,00	(2.282.500,00)	96,79	
5.02.02.1.02.0010	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	14.960.000,00	14.480.800,00	(479.200,00)	96,80	
5.02.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	14.960.000,00	14.480.800,00	(479.200,00)	96,80	
5.02.02.1.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	14.480.800,00	(479.200,00)	96,80	
5.02.02.1.02.0011	PEMBINAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.027.000,00	19.173.260,00	(853.740,00)	95,74	
5.02.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.027.000,00	19.173.260,00	(853.740,00)	95,74	
5.02.02.1.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.027.000,00	19.173.260,00	(853.740,00)	95,74	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.1.02.0012	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	905.071.400,00	813.839.565,00	(91.231.835,00)	89,92	
5.02.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	905.071.400,00	813.839.565,00	(91.231.835,00)	89,92	
5.02.02.1.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.071.400,00	813.839.565,00	(91.231.835,00)	89,92	
5.02.02.1.03	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	267.227.400,00	260.331.847,00	(6.895.553,00)	97,42	
5.02.02.1.03.0001	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	80.000.000,00	79.923.600,00	(76.400,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.923.600,00	(76.400,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.923.600,00	(76.400,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0003	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	30.000.000,00	29.971.204,00	(28.796,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.971.204,00	(28.796,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.971.204,00	(28.796,00)	99,90	
5.02.02.1.03.0005	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	31.940.800,00	31.456.268,00	(484.532,00)	98,48	
5.02.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	31.940.800,00	31.456.268,00	(484.532,00)	98,48	
5.02.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.940.800,00	31.456.268,00	(484.532,00)	98,48	
5.02.02.1.03.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)	95.286.600,00	89.134.421,00	(6.152.179,00)	93,54	
5.02.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	95.286.600,00	89.134.421,00	(6.152.179,00)	93,54	
5.02.02.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.286.600,00	89.134.421,00	(6.152.179,00)	93,54	
5.02.02.1.03.0009	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	30.000.000,00	29.846.354,00	(153.646,00)	99,49	
5.02.02.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.846.354,00	(153.646,00)	99,49	
5.02.02.1.03.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.846.354,00	(153.646,00)	99,49	
5.02.02.1.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	549.301.100,00	531.130.430,00	(18.170.670,00)	96,69	
5.02.02.1.04.0003	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	6.620.000,00	6.571.810,00	(48.190,00)	99,27	
5.02.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.620.000,00	6.571.810,00	(48.190,00)	99,27	
5.02.02.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	6.571.810,00	(48.190,00)	99,27	
5.02.02.1.04.0004	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUDRNNDAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	349.801.100,00	344.308.023,00	(5.493.077,00)	98,43	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	349.801.100,00	344.308.023,00	(5.493.077,00)	98,43	
5.02.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.801.100,00	344.308.023,00	(5.493.077,00)	98,43	
5.02.02.1.04.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI	175.726.000,00	164.130.552,00	(11.595.448,00)	93,40	
5.02.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	175.726.000,00	164.130.552,00	(11.595.448,00)	93,40	
5.02.02.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.726.000,00	164.130.552,00	(11.595.448,00)	93,40	
5.02.02.1.04.0007	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	2.715.000,00	2.713.500,00	(1.500,00)	99,94	
5.02.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.715.000,00	2.713.500,00	(1.500,00)	99,94	
5.02.02.1.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.715.000,00	2.713.500,00	(1.500,00)	99,94	
5.02.02.1.04.0008	PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02.1.04.0009	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	3.950.000,00	3.818.400,00	(131.600,00)	96,67	
5.02.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.950.000,00	3.818.400,00	(131.600,00)	96,67	
5.02.02.1.04.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.818.400,00	(131.600,00)	96,67	
5.02.02.1.04.0011	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH PROVINSI	10.489.000,00	9.588.145,00	(900.855,00)	91,41	
5.02.02.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.489.000,00	9.588.145,00	(900.855,00)	91,41	
5.02.02.1.04.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.489.000,00	9.588.145,00	(900.855,00)	91,41	
5.02.02.1.05	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.448.244.847.411,00	2.166.758.632.543,00	(281.486.214.868,00)	88,50	
5.02.02.1.05.0002	ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	150.000.000,00	133.176.728,00	(16.823.272,00)	88,78	
5.02.02.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	133.176.728,00	(16.823.272,00)	88,78	
5.02.02.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	133.176.728,00	(16.823.272,00)	88,78	
5.02.02.1.05.0004	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	774.000.000,00	773.451.522,00	(548.478,00)	99,93	
5.02.02.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	774.000.000,00	773.451.522,00	(548.478,00)	99,93	
5.02.02.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.000.000,00	773.451.522,00	(548.478,00)	99,93	
5.02.02.1.05.0008	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	153.867.909.000,00	141.218.435.696,00	(12.649.473.304,00)	91,78	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.1.05.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.289.000,00	14.005.038,00	(1.283.962,00)	91,60	
5.02.02.1.05.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.289.000,00	14.005.038,00	(1.283.962,00)	91,60	
5.02.02.1.05.0008.5.4	BELANJA TRANSFER	153.852.620.000,00	141.204.430.658,00	(12.648.189.342,00)	91,78	
5.02.02.1.05.0008.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.852.620.000,00	141.204.430.658,00	(12.648.189.342,00)	91,78	
5.02.02.1.05.0009	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	32.756.687.505,00	0,00	(32.756.687.505,00)	0,00	
5.02.02.1.05.0009.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.756.687.505,00	0,00	(32.756.687.505,00)	0,00	
5.02.02.1.05.0009.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.756.687.505,00	0,00	(32.756.687.505,00)	0,00	
5.02.02.1.05.0010	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI	2.260.696.250.906,00	2.024.633.568.597,00	(236.062.682.309,00)	89,56	
5.02.02.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	24.140.000,00	23.207.049,00	(932.951,00)	96,14	
5.02.02.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.140.000,00	23.207.049,00	(932.951,00)	96,14	
5.02.02.1.05.0010.5.4	BELANJA TRANSFER	2.260.672.110.906,00	2.024.610.361.548,00	(236.061.749.358,00)	89,56	
5.02.02.1.05.0010.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.260.672.110.906,00	2.024.610.361.548,00	(236.061.749.358,00)	89,56	
5.02.02.1.06	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	352.725.000,00	333.622.857,00	(19.102.143,00)	94,58	
5.02.02.1.06.0001	INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA BIDANG KEUANGAN DAERAH	64.762.000,00	62.619.012,00	(2.142.988,00)	96,69	
5.02.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	64.762.000,00	62.619.012,00	(2.142.988,00)	96,69	
5.02.02.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.762.000,00	62.619.012,00	(2.142.988,00)	96,69	
5.02.02.1.06.0002	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	24.756.000,00	22.830.044,00	(1.925.956,00)	92,22	
5.02.02.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.756.000,00	22.830.044,00	(1.925.956,00)	92,22	
5.02.02.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.756.000,00	22.830.044,00	(1.925.956,00)	92,22	
5.02.02.1.06.0003	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	263.207.000,00	248.173.801,00	(15.033.199,00)	94,29	
5.02.02.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	263.207.000,00	248.173.801,00	(15.033.199,00)	94,29	
5.02.02.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.207.000,00	248.173.801,00	(15.033.199,00)	94,29	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.599.870.575,00	4.362.714.691,00	(237.155.884,00)	94,84	
5.02.03.1.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.599.870.575,00	4.362.714.691,00	(237.155.884,00)	94,84	
5.02.03.1.01.0001	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	260.248.800,00	258.928.460,00	(1.320.340,00)	99,49	
5.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	260.248.800,00	258.928.460,00	(1.320.340,00)	99,49	
5.02.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.248.800,00	258.928.460,00	(1.320.340,00)	99,49	
5.02.03.1.01.0002	PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.03.1.01.0003	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	108.035.000,00	105.087.353,00	(2.947.647,00)	97,27	
5.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	108.035.000,00	105.087.353,00	(2.947.647,00)	97,27	
5.02.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.035.000,00	105.087.353,00	(2.947.647,00)	97,27	
5.02.03.1.01.0005	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	331.550.000,00	331.357.460,00	(192.540,00)	99,94	
5.02.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	331.550.000,00	331.357.460,00	(192.540,00)	99,94	
5.02.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.550.000,00	331.357.460,00	(192.540,00)	99,94	
5.02.03.1.01.0006	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	923.680.975,00	896.712.948,00	(26.968.027,00)	97,08	
5.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	923.680.975,00	896.712.948,00	(26.968.027,00)	97,08	
5.02.03.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.680.975,00	896.712.948,00	(26.968.027,00)	97,08	
5.02.03.1.01.0007	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	2.216.346.800,00	2.101.977.844,00	(114.368.956,00)	94,84	
5.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.118.654.800,00	2.008.737.844,00	(109.916.956,00)	94,81	
5.02.03.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.654.800,00	2.008.737.844,00	(109.916.956,00)	94,81	
5.02.03.1.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	97.692.000,00	93.240.000,00	(4.452.000,00)	95,44	
5.02.03.1.01.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.692.000,00	93.240.000,00	(4.452.000,00)	95,44	
5.02.03.1.01.0008	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	236.170.000,00	228.494.902,00	(7.675.098,00)	96,75	
5.02.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	236.170.000,00	228.494.902,00	(7.675.098,00)	96,75	
5.02.03.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.170.000,00	228.494.902,00	(7.675.098,00)	96,75	
5.02.03.1.01.0010	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	412.177.000,00	336.290.015,00	(75.886.985,00)	81,59	
5.02.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	412.177.000,00	336.290.015,00	(75.886.985,00)	81,59	
5.02.03.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.177.000,00	336.290.015,00	(75.886.985,00)	81,59	
5.02.03.1.01.0011	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	70.708.000,00	64.913.064,00	(5.794.936,00)	91,80	
5.02.03.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	70.708.000,00	64.913.064,00	(5.794.936,00)	91,80	
5.02.03.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.708.000,00	64.913.064,00	(5.794.936,00)	91,80	
5.02.03.1.01.0012	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	36.954.000,00	35.052.645,00	(1.901.355,00)	94,85	
5.02.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	36.954.000,00	35.052.645,00	(1.901.355,00)	94,85	
5.02.03.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.954.000,00	35.052.645,00	(1.901.355,00)	94,85	
5.02.03.1.01.0013	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
5.02.03.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
5.02.03.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.498.288.120.461,00	2.214.364.216.582,00	(283.923.903.879,00)	88,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.028.136.361.539,00	1.192.463.448.089,00	164.327.086.550,00	115,98	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.02.0000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	444.485.541.412,00	444.485.541.411,49	(0,51)	100,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	444.485.541.412,00	444.485.541.411,49	(0,51)	100,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	138.498.000.000,00	138.497.733.036,00	(266.964,00)	100,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000,00	138.497.733.036,00	(266.964,00)	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	305.987.541.412,00	305.987.808.375,49	266.963,49	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.334.123.902.951,00	1.498.451.256.464,49	164.327.353.513,49	112,32	

5.02.0.00.0.00.03.0000

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SEMUA SUB UNIT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Satuan Kerja : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.646.272.754.131,00	6.008.752.845.369,96	(637.519.908.761,04)	90,41	Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.01	Pajak Daerah	6.253.493.581.987,00	5.720.173.537.866,00	(533.320.044.121,00)	91,47	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.224.242.253,00	1.986.284.526,00	762.042.273,00	162,25	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.444.843.000,00	51.598.879.729,00	2.154.036.729,00	104,36	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	342.110.086.891,00	234.994.143.248,96	(107.115.943.642,04)	68,69	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490,00	6.383.604.000,00	36.840.510,00	100,58	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.3.01	Pendapatan Hibah	6.346.763.490,00	6.383.604.000,00	36.840.510,00	100,58	
5.02.0.00.0.00.03.0000.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	6.652.619.517.621,00	6.015.136.449.369,96	(637.483.068.251,04)	90,42	
5	BELANJA DAERAH					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	248.209.943.105,00	236.173.614.963,31	(12.036.328.141,69)	95,15	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.02.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	374.617.400,00	368.302.544,00	(6.314.856,00)	98,31	
5.02.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	48.566.000,00	48.167.097,00	(398.903,00)	99,18	
5.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	48.566.000,00	48.167.097,00	(398.903,00)	99,18	
5.02.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.566.000,00	48.167.097,00	(398.903,00)	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	24.152.800,00	24.112.697,00	(40.103,00)	99,83	
5.02.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.152.800,00	24.112.697,00	(40.103,00)	99,83	
5.02.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.152.800,00	24.112.697,00	(40.103,00)	99,83	
5.02.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	34.322.000,00	34.271.463,00	(50.537,00)	99,85	
5.02.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	34.322.000,00	34.271.463,00	(50.537,00)	99,85	
5.02.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.322.000,00	34.271.463,00	(50.537,00)	99,85	
5.02.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	31.604.800,00	31.425.259,00	(179.541,00)	99,43	
5.02.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.604.800,00	31.425.259,00	(179.541,00)	99,43	
5.02.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.604.800,00	31.425.259,00	(179.541,00)	99,43	
5.02.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	33.780.000,00	33.719.927,00	(60.073,00)	99,82	
5.02.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	33.780.000,00	33.719.927,00	(60.073,00)	99,82	
5.02.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.780.000,00	33.719.927,00	(60.073,00)	99,82	
5.02.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	115.118.300,00	112.973.479,00	(2.144.821,00)	98,14	
5.02.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	115.118.300,00	112.973.479,00	(2.144.821,00)	98,14	
5.02.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.118.300,00	112.973.479,00	(2.144.821,00)	98,14	
5.02.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	55.241.500,00	55.051.093,00	(190.407,00)	99,66	
5.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	55.241.500,00	55.051.093,00	(190.407,00)	99,66	
5.02.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.241.500,00	55.051.093,00	(190.407,00)	99,66	
5.02.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	12.480.000,00	12.452.051,00	(27.949,00)	99,78	
5.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	12.452.051,00	(27.949,00)	99,78	
5.02.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	12.452.051,00	(27.949,00)	99,78	
5.02.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.352.000,00	16.129.478,00	(3.222.522,00)	83,35	
5.02.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	19.352.000,00	16.129.478,00	(3.222.522,00)	83,35	
5.02.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.352.000,00	16.129.478,00	(3.222.522,00)	83,35	
5.02.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	137.538.901.050,00	133.508.676.998,00	(4.030.224.052,00)	97,07	
5.02.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	135.549.641.850,00	131.765.919.440,00	(3.783.722.410,00)	97,21	
5.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	135.549.641.850,00	131.765.919.440,00	(3.783.722.410,00)	97,21	
5.02.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	135.549.641.850,00	131.765.919.440,00	(3.783.722.410,00)	97,21	
5.02.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.778.559.000,00	1.566.670.000,00	(211.889.000,00)	88,09	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.778.559.000,00	1.566.670.000,00	(211.889.000,00)	88,09	
5.02.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.559.000,00	1.566.670.000,00	(211.889.000,00)	88,09	
5.02.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5.310.000,00	5.159.000,00	(151.000,00)	97,16	
5.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.310.000,00	5.159.000,00	(151.000,00)	97,16	
5.02.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	5.159.000,00	(151.000,00)	97,16	
5.02.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	31.873.000,00	17.517.370,00	(14.355.630,00)	54,96	
5.02.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.873.000,00	17.517.370,00	(14.355.630,00)	54,96	
5.02.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.873.000,00	17.517.370,00	(14.355.630,00)	54,96	
5.02.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	60.688.200,00	44.793.509,00	(15.894.691,00)	73,81	
5.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	60.688.200,00	44.793.509,00	(15.894.691,00)	73,81	
5.02.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.688.200,00	44.793.509,00	(15.894.691,00)	73,81	
5.02.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	26.029.900,00	24.628.935,00	(1.400.965,00)	94,62	
5.02.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	26.029.900,00	24.628.935,00	(1.400.965,00)	94,62	
5.02.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.029.900,00	24.628.935,00	(1.400.965,00)	94,62	
5.02.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	81.899.300,00	79.240.456,00	(2.658.844,00)	96,75	
5.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	81.899.300,00	79.240.456,00	(2.658.844,00)	96,75	
5.02.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.899.300,00	79.240.456,00	(2.658.844,00)	96,75	
5.02.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.899.800,00	4.748.288,00	(151.512,00)	96,91	
5.02.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	4.899.800,00	4.748.288,00	(151.512,00)	96,91	
5.02.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.899.800,00	4.748.288,00	(151.512,00)	96,91	
5.02.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	82.182.000,00	81.599.317,00	(582.683,00)	99,29	
5.02.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	8.360.000,00	8.230.600,00	(129.400,00)	98,45	
5.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.360.000,00	8.230.600,00	(129.400,00)	98,45	
5.02.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	8.230.600,00	(129.400,00)	98,45	
5.02.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	45.777.500,00	45.712.391,00	(65.109,00)	99,86	
5.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	45.777.500,00	45.712.391,00	(65.109,00)	99,86	
5.02.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.777.500,00	45.712.391,00	(65.109,00)	99,86	
5.02.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.850.000,00	6.640.000,00	(210.000,00)	96,93	
5.02.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.850.000,00	6.640.000,00	(210.000,00)	96,93	
5.02.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.640.000,00	(210.000,00)	96,93	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.03.0004	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.094.500,00	3.080.126,00	(14.374,00)	99,54	
5.02.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.094.500,00	3.080.126,00	(14.374,00)	99,54	
5.02.01.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.094.500,00	3.080.126,00	(14.374,00)	99,54	
5.02.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	8.100.000,00	8.012.000,00	(88.000,00)	98,91	
5.02.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.012.000,00	(88.000,00)	98,91	
5.02.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.012.000,00	(88.000,00)	98,91	
5.02.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.450.000,00	3.432.450,00	(17.550,00)	99,49	
5.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.432.450,00	(17.550,00)	99,49	
5.02.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.432.450,00	(17.550,00)	99,49	
5.02.01.1.03.0007	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.550.000,00	6.491.750,00	(58.250,00)	99,11	
5.02.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.550.000,00	6.491.750,00	(58.250,00)	99,11	
5.02.01.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.491.750,00	(58.250,00)	99,11	
5.02.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	265.005.600,00	258.584.202,00	(6.421.398,00)	97,58	
5.02.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	182.726.500,00	180.536.356,00	(2.190.144,00)	98,80	
5.02.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	182.726.500,00	180.536.356,00	(2.190.144,00)	98,80	
5.02.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.726.500,00	180.536.356,00	(2.190.144,00)	98,80	
5.02.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	10.580.000,00	10.425.130,00	(154.870,00)	98,54	
5.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.580.000,00	10.425.130,00	(154.870,00)	98,54	
5.02.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.580.000,00	10.425.130,00	(154.870,00)	98,54	
5.02.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	37.307.900,00	36.755.472,00	(552.428,00)	98,52	
5.02.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	37.307.900,00	36.755.472,00	(552.428,00)	98,52	
5.02.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.307.900,00	36.755.472,00	(552.428,00)	98,52	
5.02.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	20.480.000,00	17.220.000,00	(3.260.000,00)	84,08	
5.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.480.000,00	17.220.000,00	(3.260.000,00)	84,08	
5.02.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.480.000,00	17.220.000,00	(3.260.000,00)	84,08	
5.02.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.731.200,00	13.647.244,00	(83.956,00)	99,39	
5.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	13.731.200,00	13.647.244,00	(83.956,00)	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.731.200,00	13.647.244,00	(83.956,00)	99,39	
5.02.01.1.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
5.02.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	19.415.159.600,00	17.835.338.612,00	(1.579.820.988,00)	91,86	
5.02.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	489.194.300,00	467.529.115,00	(21.665.185,00)	95,57	
5.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	489.194.300,00	467.529.115,00	(21.665.185,00)	95,57	
5.02.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.194.300,00	467.529.115,00	(21.665.185,00)	95,57	
5.02.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.587.340.600,00	5.850.545.465,00	(736.795.135,00)	88,81	
5.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.587.340.600,00	5.850.545.465,00	(736.795.135,00)	88,81	
5.02.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.587.340.600,00	5.850.545.465,00	(736.795.135,00)	88,81	
5.02.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	388.969.400,00	372.243.183,00	(16.726.217,00)	95,70	
5.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	388.969.400,00	372.243.183,00	(16.726.217,00)	95,70	
5.02.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.969.400,00	372.243.183,00	(16.726.217,00)	95,70	
5.02.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.477.711.400,00	1.381.509.767,00	(96.201.633,00)	93,49	
5.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.477.711.400,00	1.381.509.767,00	(96.201.633,00)	93,49	
5.02.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.711.400,00	1.381.509.767,00	(96.201.633,00)	93,49	
5.02.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.178.258.900,00	6.770.798.091,00	(407.460.809,00)	94,32	
5.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.178.258.900,00	6.770.798.091,00	(407.460.809,00)	94,32	
5.02.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.178.258.900,00	6.770.798.091,00	(407.460.809,00)	94,32	
5.02.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	890.424.900,00	795.870.303,00	(94.554.597,00)	89,38	
5.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	890.424.900,00	795.870.303,00	(94.554.597,00)	89,38	
5.02.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.424.900,00	795.870.303,00	(94.554.597,00)	89,38	
5.02.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	534.867.100,00	454.144.508,00	(80.722.592,00)	84,91	
5.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	534.867.100,00	454.144.508,00	(80.722.592,00)	84,91	
5.02.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.867.100,00	454.144.508,00	(80.722.592,00)	84,91	
5.02.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	1.868.393.000,00	1.742.698.180,00	(125.694.820,00)	93,27	
5.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.868.393.000,00	1.742.698.180,00	(125.694.820,00)	93,27	
5.02.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.868.393.000,00	1.742.698.180,00	(125.694.820,00)	93,27	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12.875.598.000,00	12.012.514.046,00	(863.083.954,00)	93,30	
5.02.01.1.07.0005	PENGADAAN MEBEL	1.212.458.800,00	1.063.487.154,00	(148.971.646,00)	87,71	
5.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.508.800,00	3.487.154,00	(21.646,00)	99,38	
5.02.01.1.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.508.800,00	3.487.154,00	(21.646,00)	99,38	
5.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	1.208.950.000,00	1.060.000.000,00	(148.950.000,00)	87,68	
5.02.01.1.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.208.950.000,00	1.060.000.000,00	(148.950.000,00)	87,68	
5.02.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.663.139.200,00	10.949.026.892,00	(714.112.308,00)	93,88	
5.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	337.054.200,00	319.265.563,00	(17.788.637,00)	94,72	
5.02.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.054.200,00	319.265.563,00	(17.788.637,00)	94,72	
5.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	11.326.085.000,00	10.629.761.329,00	(696.323.671,00)	93,85	
5.02.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.326.085.000,00	10.629.761.329,00	(696.323.671,00)	93,85	
5.02.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.324.445.075,00	57.968.198.687,00	(4.356.246.388,00)	93,01	
5.02.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.449.155.500,00	9.426.288.683,00	(1.022.866.817,00)	90,21	
5.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.449.155.500,00	9.426.288.683,00	(1.022.866.817,00)	90,21	
5.02.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.449.155.500,00	9.426.288.683,00	(1.022.866.817,00)	90,21	
5.02.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.108.766.160,00	5.635.434.100,00	(473.332.060,00)	92,25	
5.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.108.766.160,00	5.635.434.100,00	(473.332.060,00)	92,25	
5.02.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.108.766.160,00	5.635.434.100,00	(473.332.060,00)	92,25	
5.02.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	45.766.523.415,00	42.906.475.904,00	(2.860.047.511,00)	93,75	
5.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	45.766.523.415,00	42.906.475.904,00	(2.860.047.511,00)	93,75	
5.02.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.766.523.415,00	42.906.475.904,00	(2.860.047.511,00)	93,75	
5.02.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.334.034.380,00	14.140.400.557,31	(1.193.633.822,69)	92,22	
5.02.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	702.185.300,00	663.606.530,00	(38.578.770,00)	94,51	
5.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	702.185.300,00	663.606.530,00	(38.578.770,00)	94,51	
5.02.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.185.300,00	663.606.530,00	(38.578.770,00)	94,51	
5.02.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.971.342.800,00	2.805.788.138,00	(165.554.662,00)	94,43	
5.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.971.342.800,00	2.805.788.138,00	(165.554.662,00)	94,43	
5.02.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.971.342.800,00	2.805.788.138,00	(165.554.662,00)	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.1.09.0005	PEMELIHARAAN MEDEL	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5.02.01.1.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5.02.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.819.085.400,00	1.615.914.867,00	(203.170.533,00)	88,83	
5.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.819.085.400,00	1.615.914.867,00	(203.170.533,00)	88,83	
5.02.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.085.400,00	1.615.914.867,00	(203.170.533,00)	88,83	
5.02.01.1.09.0006.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.157.491.580,00	3.837.297.894,77	(320.193.685,23)	92,30	
5.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.887.191.580,00	3.587.158.895,77	(300.032.684,23)	92,28	
5.02.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.887.191.580,00	3.587.158.895,77	(300.032.684,23)	92,28	
5.02.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	270.300.000,00	250.138.999,00	(20.161.001,00)	92,54	
5.02.01.1.09.0009.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	73.333.260,00	(1.666.740,00)	97,78	
5.02.01.1.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.300.000,00	176.805.739,00	(18.494.261,00)	90,53	
5.02.01.1.09.0009.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.226.290.300,00	3.867.125.778,00	(359.164.522,00)	91,50	
5.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	859.874.300,00	783.258.428,00	(76.615.872,00)	91,09	
5.02.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.874.300,00	783.258.428,00	(76.615.872,00)	91,09	
5.02.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	3.366.416.000,00	3.083.867.350,00	(282.548.650,00)	91,61	
5.02.01.1.09.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.366.416.000,00	3.083.867.350,00	(282.548.650,00)	91,61	
5.02.01.1.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.457.489.000,00	1.350.667.349,54	(106.821.650,46)	92,67	
5.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.389.806.000,00	1.283.699.859,00	(106.106.141,00)	92,37	
5.02.01.1.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.806.000,00	1.283.699.859,00	(106.106.141,00)	92,37	
5.02.01.1.09.0011.5.2	BELANJA MODAL	67.683.000,00	66.967.490,54	(715.509,46)	98,94	
5.02.01.1.09.0011.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.683.000,00	66.967.490,54	(715.509,46)	98,94	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.642.755.900,00	18.069.631.486,00	(2.573.124.414,00)	87,53	
5.02.04.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.642.755.900,00	18.069.631.486,00	(2.573.124.414,00)	87,53	
5.02.04.1.01.0001	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	420.516.000,00	287.177.656,00	(133.338.344,00)	68,29	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	420.516.000,00	287.177.656,00	(133.338.344,00)	68,29	
5.02.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.516.000,00	287.177.656,00	(133.338.344,00)	68,29	
5.02.04.1.01.0002	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	229.422.000,00	200.187.503,00	(29.234.497,00)	87,26	
5.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	229.422.000,00	200.187.503,00	(29.234.497,00)	87,26	
5.02.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.422.000,00	200.187.503,00	(29.234.497,00)	87,26	
5.02.04.1.01.0003	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	4.176.890.000,00	4.008.748.964,00	(168.141.036,00)	95,97	
5.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.176.890.000,00	4.008.748.964,00	(168.141.036,00)	95,97	
5.02.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.176.890.000,00	4.008.748.964,00	(168.141.036,00)	95,97	
5.02.04.1.01.0005	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	3.285.570.800,00	2.806.353.727,00	(479.217.073,00)	85,41	
5.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.285.570.800,00	2.806.353.727,00	(479.217.073,00)	85,41	
5.02.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.285.570.800,00	2.806.353.727,00	(479.217.073,00)	85,41	
5.02.04.1.01.0006	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	3.073.302.600,00	2.450.180.655,00	(623.121.945,00)	79,72	
5.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.388.843.600,00	1.840.419.382,00	(548.424.218,00)	77,04	
5.02.04.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.388.843.600,00	1.840.419.382,00	(548.424.218,00)	77,04	
5.02.04.1.01.0006.5.2	BELANJA MODAL	684.459.000,00	609.761.273,00	(74.697.727,00)	89,09	
5.02.04.1.01.0006.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	684.459.000,00	609.761.273,00	(74.697.727,00)	89,09	
5.02.04.1.01.0007	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	224.394.000,00	194.431.759,00	(29.962.241,00)	86,65	
5.02.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	224.394.000,00	194.431.759,00	(29.962.241,00)	86,65	
5.02.04.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.394.000,00	194.431.759,00	(29.962.241,00)	86,65	
5.02.04.1.01.0008	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	277.342.600,00	251.689.546,00	(25.653.054,00)	90,75	
5.02.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	277.342.600,00	251.689.546,00	(25.653.054,00)	90,75	
5.02.04.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.342.600,00	251.689.546,00	(25.653.054,00)	90,75	
5.02.04.1.01.0009	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	109.366.000,00	98.052.422,00	(11.313.578,00)	89,66	
5.02.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	109.366.000,00	98.052.422,00	(11.313.578,00)	89,66	
5.02.04.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.366.000,00	98.052.422,00	(11.313.578,00)	89,66	
5.02.04.1.01.0010	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	6.920.397.900,00	6.309.753.743,00	(610.644.157,00)	91,18	
5.02.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	6.920.397.900,00	6.309.753.743,00	(610.644.157,00)	91,18	
5.02.04.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.397.900,00	6.309.753.743,00	(610.644.157,00)	91,18	
5.02.04.1.01.0011	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	35.144.000,00	27.558.000,00	(7.586.000,00)	78,41	
5.02.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	35.144.000,00	27.558.000,00	(7.586.000,00)	78,41	
5.02.04.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.144.000,00	27.558.000,00	(7.586.000,00)	78,41	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.04.1.01.0012	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	523.944.000,00	284.834.137,00	(239.109.863,00)	54,36	
5.02.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	523.944.000,00	284.834.137,00	(239.109.863,00)	54,36	
5.02.04.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.944.000,00	284.834.137,00	(239.109.863,00)	54,36	
5.02.04.1.01.0013	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	1.066.466.000,00	918.745.135,00	(147.720.865,00)	86,15	
5.02.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.466.000,00	918.745.135,00	(147.720.865,00)	86,15	
5.02.04.1.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.466.000,00	918.745.135,00	(147.720.865,00)	86,15	
5.02.04.1.01.0014	ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	300.000.000,00	231.918.239,00	(68.081.761,00)	77,31	
5.02.04.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	231.918.239,00	(68.081.761,00)	77,31	
5.02.04.1.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	231.918.239,00	(68.081.761,00)	77,31	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	268.852.699.005,00	254.243.246.449,31	(14.609.452.555,69)	94,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.383.766.818.616,00	5.760.893.202.920,65	(622.873.615.695,35)	90,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.383.766.818.616,00	5.760.893.202.920,65	(622.873.615.695,35)	90,24	

5.03.0.00.0.00.01.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Satuan Kerja : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225.946.525.067,00	224.146.144.794,00	(1.800.380.273,00)	99,20	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	619.528.000,00	613.781.862,00	(5.746.138,00)	99,07	
5.03.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	435.971.000,00	434.588.237,00	(1.382.763,00)	99,68	
5.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	435.971.000,00	434.588.237,00	(1.382.763,00)	99,68	
5.03.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.971.000,00	434.588.237,00	(1.382.763,00)	99,68	
5.03.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	
5.03.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	
5.03.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	
5.03.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.974.515,00	(25.485,00)	99,75	
5.03.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	
5.03.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	
5.03.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.816.500,00	(183.500,00)	98,16	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.000.000,00	24.931.859,00	(68.141,00)	99,73	
5.03.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.931.859,00	(68.141,00)	99,73	
5.03.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.931.859,00	(68.141,00)	99,73	
5.03.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.591.000,00	68.105.556,00	(485.444,00)	99,29	
5.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	68.591.000,00	68.105.556,00	(485.444,00)	99,29	
5.03.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.591.000,00	68.105.556,00	(485.444,00)	99,29	
5.03.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	23.468.000,00	20.979.000,00	(2.489.000,00)	89,39	
5.03.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	23.468.000,00	20.979.000,00	(2.489.000,00)	89,39	
5.03.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.468.000,00	20.979.000,00	(2.489.000,00)	89,39	
5.03.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	26.498.000,00	25.595.180,00	(902.820,00)	96,59	
5.03.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	26.498.000,00	25.595.180,00	(902.820,00)	96,59	
5.03.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.498.000,00	25.595.180,00	(902.820,00)	96,59	
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	219.824.240.077,00	218.134.284.876,00	(1.689.955.201,00)	99,23	
5.03.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23	
5.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23	
5.03.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	(1.677.638.166,00)	99,23	
5.03.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	435.102.000,00	435.102.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	435.102.000,00	435.102.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.102.000,00	435.102.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	117.678.000,00	111.091.965,00	(6.586.035,00)	94,40	
5.03.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	117.678.000,00	111.091.965,00	(6.586.035,00)	94,40	
5.03.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.678.000,00	111.091.965,00	(6.586.035,00)	94,40	
5.03.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	20.000.000,00	19.767.204,00	(232.796,00)	98,84	
5.03.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.767.204,00	(232.796,00)	98,84	
5.03.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.767.204,00	(232.796,00)	98,84	
5.03.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	15.085.000,00	14.800.002,00	(284.998,00)	98,11	
5.03.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.085.000,00	14.800.002,00	(284.998,00)	98,11	
5.03.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.085.000,00	14.800.002,00	(284.998,00)	98,11	
5.03.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	17.310.000,00	15.312.875,00	(1.997.125,00)	88,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	17.310.000,00	15.312.875,00	(1.997.125,00)	88,46	
5.03.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.310.000,00	15.312.875,00	(1.997.125,00)	88,46	
5.03.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	20.000.000,00	19.248.711,00	(751.289,00)	96,24	
5.03.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.248.711,00	(751.289,00)	96,24	
5.03.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.248.711,00	(751.289,00)	96,24	
5.03.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	17.070.000,00	14.605.208,00	(2.464.792,00)	85,56	
5.03.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	17.070.000,00	14.605.208,00	(2.464.792,00)	85,56	
5.03.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.070.000,00	14.605.208,00	(2.464.792,00)	85,56	
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	59.010.000,00	57.246.870,00	(1.763.130,00)	97,01	
5.03.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.000.000,00	9.249.350,00	(750.650,00)	92,49	
5.03.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.249.350,00	(750.650,00)	92,49	
5.03.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.249.350,00	(750.650,00)	92,49	
5.03.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	20.000.000,00	19.915.050,00	(84.950,00)	99,58	
5.03.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.915.050,00	(84.950,00)	99,58	
5.03.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.915.050,00	(84.950,00)	99,58	
5.03.01.1.03.0003	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.000.000,00	9.555.760,00	(444.240,00)	95,56	
5.03.01.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.555.760,00	(444.240,00)	95,56	
5.03.01.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.555.760,00	(444.240,00)	95,56	
5.03.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.000.000,00	9.590.000,00	(410.000,00)	95,90	
5.03.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.590.000,00	(410.000,00)	95,90	
5.03.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.590.000,00	(410.000,00)	95,90	
5.03.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.010.000,00	8.936.710,00	(73.290,00)	99,19	
5.03.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.010.000,00	8.936.710,00	(73.290,00)	99,19	
5.03.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	8.936.710,00	(73.290,00)	99,19	
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	221.051.504,00	200.364.056,00	(20.687.448,00)	90,64	
5.03.01.1.05.0001	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	11.380.000,00	11.107.500,00	(272.500,00)	97,61	
5.03.01.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.380.000,00	11.107.500,00	(272.500,00)	97,61	
5.03.01.1.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	11.107.500,00	(272.500,00)	97,61	
5.03.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	105.663.600,00	96.522.604,00	(9.140.996,00)	91,35	
5.03.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	105.663.600,00	96.522.604,00	(9.140.996,00)	91,35	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.663.600,00	96.522.604,00	(9.140.996,00)	91,35	
5.03.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	14.430.000,00	(570.000,00)	96,20	
5.03.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.430.000,00	(570.000,00)	96,20	
5.03.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.430.000,00	(570.000,00)	96,20	
5.03.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	14.558.050,00	(441.950,00)	97,05	
5.03.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.558.050,00	(441.950,00)	97,05	
5.03.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.558.050,00	(441.950,00)	97,05	
5.03.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	30.830.000,00	28.426.327,00	(2.403.673,00)	92,20	
5.03.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.830.000,00	28.426.327,00	(2.403.673,00)	92,20	
5.03.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.830.000,00	28.426.327,00	(2.403.673,00)	92,20	
5.03.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00	
5.03.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00	
5.03.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00	
5.03.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.177.904,00	32.819.575,00	(358.329,00)	98,92	
5.03.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	33.177.904,00	32.819.575,00	(358.329,00)	98,92	
5.03.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.177.904,00	32.819.575,00	(358.329,00)	98,92	
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.582.804.420,00	1.574.709.783,00	(8.094.637,00)	99,49	
5.03.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	88.129.000,00	88.125.167,00	(3.833,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	88.129.000,00	88.125.167,00	(3.833,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.129.000,00	88.125.167,00	(3.833,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	380.505.500,00	380.485.091,00	(20.409,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	380.505.500,00	380.485.091,00	(20.409,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.505.500,00	380.485.091,00	(20.409,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	120.055.000,00	120.018.890,00	(36.110,00)	99,97	
5.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	120.055.000,00	120.018.890,00	(36.110,00)	99,97	
5.03.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.055.000,00	120.018.890,00	(36.110,00)	99,97	
5.03.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	381.055.000,00	380.404.735,00	(650.265,00)	99,83	
5.03.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	381.055.000,00	380.404.735,00	(650.265,00)	99,83	
5.03.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.055.000,00	380.404.735,00	(650.265,00)	99,83	
5.03.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	251.544.000,00	251.508.421,00	(35.579,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	251.544.000,00	251.508.421,00	(35.579,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.544.000,00	251.508.421,00	(35.579,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.000.000,00	20.562.751,00	(4.437.249,00)	82,25	
5.03.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	20.562.751,00	(4.437.249,00)	82,25	
5.03.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.562.751,00	(4.437.249,00)	82,25	
5.03.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	96.677.000,00	96.671.568,00	(5.432,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	96.677.000,00	96.671.568,00	(5.432,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.677.000,00	96.671.568,00	(5.432,00)	99,99	
5.03.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	108.035.000,00	108.032.127,00	(2.873,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	108.035.000,00	108.032.127,00	(2.873,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.035.000,00	108.032.127,00	(2.873,00)	100,00	
5.03.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	125.338.920,00	122.590.600,00	(2.748.320,00)	97,81	
5.03.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	125.338.920,00	122.590.600,00	(2.748.320,00)	97,81	
5.03.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.338.920,00	122.590.600,00	(2.748.320,00)	97,81	
5.03.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	6.465.000,00	6.310.433,00	(154.567,00)	97,61	
5.03.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	6.465.000,00	6.310.433,00	(154.567,00)	97,61	
5.03.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.465.000,00	6.310.433,00	(154.567,00)	97,61	
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	910.648.000,00	883.897.700,00	(26.750.300,00)	97,06	
5.03.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	909.288.000,00	882.537.800,00	(26.750.200,00)	97,06	
5.03.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.288.000,00	1.287.800,00	(200,00)	99,98	
5.03.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.000,00	1.287.800,00	(200,00)	99,98	
5.03.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	908.000.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05	
5.03.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	908.000.000,00	881.250.000,00	(26.750.000,00)	97,05	
5.03.01.1.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.360.000,00	1.359.900,00	(100,00)	99,99	
5.03.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	1.359.900,00	(100,00)	99,99	
5.03.01.1.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.359.900,00	(100,00)	99,99	
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.235.430.066,00	1.210.241.810,00	(25.188.256,00)	97,96	
5.03.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	25.048.000,00	25.001.534,00	(46.466,00)	99,81	
5.03.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.048.000,00	25.001.534,00	(46.466,00)	99,81	
5.03.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.048.000,00	25.001.534,00	(46.466,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	621.212.506,00	597.755.910,00	(23.456.596,00)	96,22	
5.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	621.212.506,00	597.755.910,00	(23.456.596,00)	96,22	
5.03.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.212.506,00	597.755.910,00	(23.456.596,00)	96,22	
5.03.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	584.881.560,00	583.196.366,00	(1.685.194,00)	99,71	
5.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	584.881.560,00	583.196.366,00	(1.685.194,00)	99,71	
5.03.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.881.560,00	583.196.366,00	(1.685.194,00)	99,71	
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.493.813.000,00	1.471.617.837,00	(22.195.163,00)	98,51	
5.03.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	211.748.000,00	211.741.375,00	(6.625,00)	100,00	
5.03.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	211.748.000,00	211.741.375,00	(6.625,00)	100,00	
5.03.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.748.000,00	211.741.375,00	(6.625,00)	100,00	
5.03.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	243.815.000,00	242.282.740,00	(1.532.260,00)	99,37	
5.03.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	243.815.000,00	242.282.740,00	(1.532.260,00)	99,37	
5.03.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.815.000,00	242.282.740,00	(1.532.260,00)	99,37	
5.03.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	445.013.000,00	441.439.722,00	(3.573.278,00)	99,20	
5.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	445.013.000,00	441.439.722,00	(3.573.278,00)	99,20	
5.03.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.013.000,00	441.439.722,00	(3.573.278,00)	99,20	
5.03.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	593.237.000,00	576.154.000,00	(17.083.000,00)	97,12	
5.03.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	593.237.000,00	576.154.000,00	(17.083.000,00)	97,12	
5.03.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.237.000,00	576.154.000,00	(17.083.000,00)	97,12	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.775.922.096,00	4.242.700.606,00	(533.221.490,00)	88,84	
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	2.062.033.500,00	2.044.866.534,00	(17.166.966,00)	99,17	
5.03.02.1.01.0001	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN ASN	9.180.000,00	8.631.684,00	(548.316,00)	94,03	
5.03.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.180.000,00	8.631.684,00	(548.316,00)	94,03	
5.03.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	8.631.684,00	(548.316,00)	94,03	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.1.01.0002	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	13.700.000,00	5.656.428,00	(8.043.572,00)	41,29	
5.03.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.700.000,00	5.656.428,00	(8.043.572,00)	41,29	
5.03.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	5.656.428,00	(8.043.572,00)	41,29	
5.03.02.1.01.0003	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	249.509.000,00	246.184.650,00	(3.324.350,00)	98,67	
5.03.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	249.509.000,00	246.184.650,00	(3.324.350,00)	98,67	
5.03.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.509.000,00	246.184.650,00	(3.324.350,00)	98,67	
5.03.02.1.01.0004	EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	7.466.000,00	7.445.542,00	(20.458,00)	99,73	
5.03.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.466.000,00	7.445.542,00	(20.458,00)	99,73	
5.03.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.466.000,00	7.445.542,00	(20.458,00)	99,73	
5.03.02.1.01.0005	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ASN	15.000.000,00	14.987.861,00	(12.139,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.987.861,00	(12.139,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.987.861,00	(12.139,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0006	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	21.363.000,00	20.625.600,00	(737.400,00)	96,55	
5.03.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	21.363.000,00	20.625.600,00	(737.400,00)	96,55	
5.03.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.363.000,00	20.625.600,00	(737.400,00)	96,55	
5.03.02.1.01.0007	EVALUASI PEMBERHENTIAN ASN	12.950.000,00	9.387.722,00	(3.562.278,00)	72,49	
5.03.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	12.950.000,00	9.387.722,00	(3.562.278,00)	72,49	
5.03.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	9.387.722,00	(3.562.278,00)	72,49	
5.03.02.1.01.0008	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1.000.000.000,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0008.5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	999.201.184,00	(798.816,00)	99,92	
5.03.02.1.01.0009	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	6.210.000,00	6.120.000,00	(90.000,00)	98,55	
5.03.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	6.210.000,00	6.120.000,00	(90.000,00)	98,55	
5.03.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.120.000,00	(90.000,00)	98,55	
5.03.02.1.01.0010	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	690.780.000,00	690.779.152,00	(848,00)	100,00	
5.03.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	690.780.000,00	690.779.152,00	(848,00)	100,00	
5.03.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.780.000,00	690.779.152,00	(848,00)	100,00	
5.03.02.1.01.0011	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.875.500,00	20.846.951,00	(28.549,00)	99,86	
5.03.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.875.500,00	20.846.951,00	(28.549,00)	99,86	
5.03.02.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.875.500,00	20.846.951,00	(28.549,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.1.01.0012	EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	14.999.760,00	(240,00)	100,00	
5.03.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.999.760,00	(240,00)	100,00	
5.03.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.999.760,00	(240,00)	100,00	
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	788.577.096,00	396.119.834,00	(392.457.262,00)	50,23	
5.03.02.1.02.0001	PENGELOLAAN MUTASI ASN	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98	
5.03.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98	
5.03.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.632.000,00	16.628.701,00	(3.299,00)	99,98	
5.03.02.1.02.0002	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87	
5.03.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87	
5.03.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.842.000,00	63.121.280,00	(720.720,00)	98,87	
5.03.02.1.02.0003	PENGELOLAAN PROMOSI ASN	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68	
5.03.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68	
5.03.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.103.096,00	316.369.853,00	(391.733.243,00)	44,68	
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.522.845.500,00	1.432.159.097,00	(90.686.403,00)	94,04	
5.03.02.1.03.0001	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	25.974.000,00	16.865.578,00	(9.108.422,00)	64,93	
5.03.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.974.000,00	16.865.578,00	(9.108.422,00)	64,93	
5.03.02.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.974.000,00	16.865.578,00	(9.108.422,00)	64,93	
5.03.02.1.03.0002	PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	1.282.751.000,00	1.270.755.960,00	(11.995.040,00)	99,06	
5.03.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.282.751.000,00	1.270.755.960,00	(11.995.040,00)	99,06	
5.03.02.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.282.751.000,00	1.270.755.960,00	(11.995.040,00)	99,06	
5.03.02.1.03.0003	PENGELOLAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN	24.600.000,00	15.853.046,00	(8.746.954,00)	64,44	
5.03.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	15.853.046,00	(8.746.954,00)	64,44	
5.03.02.1.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	15.853.046,00	(8.746.954,00)	64,44	
5.03.02.1.03.0004	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	43.650.000,00	30.190.956,00	(13.459.044,00)	69,17	
5.03.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	43.650.000,00	30.190.956,00	(13.459.044,00)	69,17	
5.03.02.1.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00	30.190.956,00	(13.459.044,00)	69,17	
5.03.02.1.03.0005	KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	12.784.500,00	12.682.300,00	(102.200,00)	99,20	
5.03.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.784.500,00	12.682.300,00	(102.200,00)	99,20	
5.03.02.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.784.500,00	12.682.300,00	(102.200,00)	99,20	
5.03.02.1.03.0006	FASILITASI SERTIFIKASI JABATAN ASN	18.650.000,00	5.725.393,00	(12.924.607,00)	30,70	
5.03.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	18.650.000,00	5.725.393,00	(12.924.607,00)	30,70	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	5.725.393,00	(12.924.607,00)	30,70	
5.03.02.1.03.0007	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	2.300.000,00	2.298.306,00	(1.694,00)	99,93	
5.03.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.298.306,00	(1.694,00)	99,93	
5.03.02.1.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.298.306,00	(1.694,00)	99,93	
5.03.02.1.03.0008	PENYUSUNAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL	15.000.000,00	2.143.581,00	(12.856.419,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	2.143.581,00	(12.856.419,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.143.581,00	(12.856.419,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0009	KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL	13.579.500,00	12.962.594,00	(616.906,00)	95,46	
5.03.02.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	13.579.500,00	12.962.594,00	(616.906,00)	95,46	
5.03.02.1.03.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.579.500,00	12.962.594,00	(616.906,00)	95,46	
5.03.02.1.03.0010	FASILITASI SERTIFIKASI FUNGSIONAL ASN	16.856.500,00	16.592.434,00	(264.066,00)	98,43	
5.03.02.1.03.0010.5.1	BELANJA OPERASI	16.856.500,00	16.592.434,00	(264.066,00)	98,43	
5.03.02.1.03.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.856.500,00	16.592.434,00	(264.066,00)	98,43	
5.03.02.1.03.0011	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI PEJABAT FUNGSIONAL	15.000.000,00	2.144.000,00	(12.856.000,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	2.144.000,00	(12.856.000,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.144.000,00	(12.856.000,00)	14,29	
5.03.02.1.03.0012	SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASN	18.710.000,00	17.515.799,00	(1.194.201,00)	93,62	
5.03.02.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	18.710.000,00	17.515.799,00	(1.194.201,00)	93,62	
5.03.02.1.03.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	17.515.799,00	(1.194.201,00)	93,62	
5.03.02.1.03.0013	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	13.890.000,00	12.628.000,00	(1.262.000,00)	90,91	
5.03.02.1.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	13.890.000,00	12.628.000,00	(1.262.000,00)	90,91	
5.03.02.1.03.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.890.000,00	12.628.000,00	(1.262.000,00)	90,91	
5.03.02.1.03.0014	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	8.200.000,00	7.701.150,00	(498.850,00)	93,92	
5.03.02.1.03.0014.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	7.701.150,00	(498.850,00)	93,92	
5.03.02.1.03.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	7.701.150,00	(498.850,00)	93,92	
5.03.02.1.03.0015	EVALUASI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	10.900.000,00	6.100.000,00	(4.800.000,00)	55,96	
5.03.02.1.03.0015.5.1	BELANJA OPERASI	10.900.000,00	6.100.000,00	(4.800.000,00)	55,96	
5.03.02.1.03.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	6.100.000,00	(4.800.000,00)	55,96	
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	402.466.000,00	369.555.141,00	(32.910.859,00)	91,82	
5.03.02.1.04.0001	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	17.500.000,00	17.426.200,00	(73.800,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.426.200,00	(73.800,00)	99,58	
5.03.02.1.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.426.200,00	(73.800,00)	99,58	
5.03.02.1.04.0002	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	161.400.000,00	146.115.300,00	(15.284.700,00)	90,53	
5.03.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	161.400.000,00	146.115.300,00	(15.284.700,00)	90,53	
5.03.02.1.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.400.000,00	146.115.300,00	(15.284.700,00)	90,53	
5.03.02.1.04.0003	EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	8.250.000,00	8.179.400,00	(70.600,00)	99,14	
5.03.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.179.400,00	(70.600,00)	99,14	
5.03.02.1.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.179.400,00	(70.600,00)	99,14	
5.03.02.1.04.0004	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	9.978.000,00	4.479.840,00	(5.498.160,00)	44,90	
5.03.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.978.000,00	4.479.840,00	(5.498.160,00)	44,90	
5.03.02.1.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.978.000,00	4.479.840,00	(5.498.160,00)	44,90	
5.03.02.1.04.0005	PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	2.000.000,00	192.000,00	(1.808.000,00)	9,60	
5.03.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	192.000,00	(1.808.000,00)	9,60	
5.03.02.1.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	192.000,00	(1.808.000,00)	9,60	
5.03.02.1.04.0006	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA APARATUR	15.000.000,00	14.272.400,00	(727.600,00)	95,15	
5.03.02.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.272.400,00	(727.600,00)	95,15	
5.03.02.1.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.272.400,00	(727.600,00)	95,15	
5.03.02.1.04.0007	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	119.341.000,00	111.036.360,00	(8.304.640,00)	93,04	
5.03.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	119.341.000,00	111.036.360,00	(8.304.640,00)	93,04	
5.03.02.1.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.341.000,00	111.036.360,00	(8.304.640,00)	93,04	
5.03.02.1.04.0008	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	40.960.000,00	40.591.400,00	(368.600,00)	99,10	
5.03.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.960.000,00	40.591.400,00	(368.600,00)	99,10	
5.03.02.1.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.960.000,00	40.591.400,00	(368.600,00)	99,10	
5.03.02.1.04.0009	PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	20.000.000,00	19.619.820,00	(380.180,00)	98,10	
5.03.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.619.820,00	(380.180,00)	98,10	
5.03.02.1.04.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.619.820,00	(380.180,00)	98,10	
5.03.02.1.04.0010	EVALUASI DISIPLIN ASN	8.037.000,00	7.642.421,00	(394.579,00)	95,09	
5.03.02.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.037.000,00	7.642.421,00	(394.579,00)	95,09	
5.03.02.1.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.037.000,00	7.642.421,00	(394.579,00)	95,09	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	230.722.447.163,00	228.388.845.400,00	(2.333.601.763,00)	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)		(230.722.447.163,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(230.722.447.163,00)	(228.388.845.400,00)	2.333.601.763,00	98,99	

5.04.0.00.0.00.01.0000

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Satuan Kerja : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.04.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.900.000,00	189.825.000,00	(16.075.000,00)	92,19	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
5.04.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	205.900.000,00	189.825.000,00	(16.075.000,00)	92,19	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	205.900.000,00	189.825.000,00	(16.075.000,00)	92,19	
5	BELANJA DAERAH					
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.719.290.039,00	31.594.170.698,00	(3.125.119.341,00)	91,00	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.04.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	317.000.000,00	262.664.504,00	(54.335.496,00)	82,86	
5.04.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	113.332.000,00	82.878.280,00	(30.453.720,00)	73,13	
5.04.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	113.332.000,00	82.878.280,00	(30.453.720,00)	73,13	
5.04.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.332.000,00	82.878.280,00	(30.453.720,00)	73,13	
5.04.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	11.858.000,00	10.222.750,00	(1.635.250,00)	86,21	
5.04.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.858.000,00	10.222.750,00	(1.635.250,00)	86,21	
5.04.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	10.222.750,00	(1.635.250,00)	86,21	
5.04.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	11.858.000,00	11.552.230,00	(305.770,00)	97,42	
5.04.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.858.000,00	11.552.230,00	(305.770,00)	97,42	
5.04.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	11.552.230,00	(305.770,00)	97,42	
5.04.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.858.000,00	11.310.334,00	(547.666,00)	95,38	
5.04.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.858.000,00	11.310.334,00	(547.666,00)	95,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	11.310.334,00	(547.666,00)	95,38	
5.04.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	11.858.000,00	10.117.230,00	(1.740.770,00)	85,32	
5.04.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.858.000,00	10.117.230,00	(1.740.770,00)	85,32	
5.04.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	10.117.230,00	(1.740.770,00)	85,32	
5.04.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	56.300.000,00	54.803.630,00	(1.496.370,00)	97,34	
5.04.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	56.300.000,00	54.803.630,00	(1.496.370,00)	97,34	
5.04.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	54.803.630,00	(1.496.370,00)	97,34	
5.04.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.918.000,00	30.608.800,00	(4.309.200,00)	87,66	
5.04.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	34.918.000,00	30.608.800,00	(4.309.200,00)	87,66	
5.04.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.918.000,00	30.608.800,00	(4.309.200,00)	87,66	
5.04.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	24.880.000,00	21.154.650,00	(3.725.350,00)	85,03	
5.04.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	24.880.000,00	21.154.650,00	(3.725.350,00)	85,03	
5.04.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	21.154.650,00	(3.725.350,00)	85,03	
5.04.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	40.138.000,00	30.016.600,00	(10.121.400,00)	74,78	
5.04.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.138.000,00	30.016.600,00	(10.121.400,00)	74,78	
5.04.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.138.000,00	30.016.600,00	(10.121.400,00)	74,78	
5.04.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	24.716.266.000,00	22.419.140.650,00	(2.297.125.350,00)	90,71	
5.04.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.310.000.000,00	22.070.630.353,00	(2.239.369.647,00)	90,79	
5.04.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.310.000.000,00	22.070.630.353,00	(2.239.369.647,00)	90,79	
5.04.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	24.310.000.000,00	22.070.630.353,00	(2.239.369.647,00)	90,79	
5.04.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	292.470.000,00	246.324.000,00	(46.146.000,00)	84,22	
5.04.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	292.470.000,00	246.324.000,00	(46.146.000,00)	84,22	
5.04.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.470.000,00	246.324.000,00	(46.146.000,00)	84,22	
5.04.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	74.712.000,00	68.820.000,00	(5.892.000,00)	92,11	
5.04.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	74.712.000,00	68.820.000,00	(5.892.000,00)	92,11	
5.04.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.712.000,00	68.820.000,00	(5.892.000,00)	92,11	
5.04.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	16.628.000,00	14.640.000,00	(1.988.000,00)	88,04	
5.04.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.628.000,00	14.640.000,00	(1.988.000,00)	88,04	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.628.000,00	14.640.000,00	(1.988.000,00)	88,04	
5.04.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.912.000,00	6.317.547,00	(594.453,00)	91,40	
5.04.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.912.000,00	6.317.547,00	(594.453,00)	91,40	
5.04.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.912.000,00	6.317.547,00	(594.453,00)	91,40	
5.04.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	3.636.000,00	2.605.000,00	(1.031.000,00)	71,64	
5.04.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.636.000,00	2.605.000,00	(1.031.000,00)	71,64	
5.04.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.000,00	2.605.000,00	(1.031.000,00)	71,64	
5.04.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	8.096.000,00	6.388.750,00	(1.707.250,00)	78,91	
5.04.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	8.096.000,00	6.388.750,00	(1.707.250,00)	78,91	
5.04.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.096.000,00	6.388.750,00	(1.707.250,00)	78,91	
5.04.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.812.000,00	3.415.000,00	(397.000,00)	89,59	
5.04.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.812.000,00	3.415.000,00	(397.000,00)	89,59	
5.04.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.812.000,00	3.415.000,00	(397.000,00)	89,59	
5.04.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.000.000,00	10.992.000,00	(8.000,00)	99,93	
5.04.01.1.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	11.000.000,00	10.992.000,00	(8.000,00)	99,93	
5.04.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.992.000,00	(8.000,00)	99,93	
5.04.01.1.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.992.000,00	(8.000,00)	99,93	
5.04.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	441.950.000,00	435.309.731,00	(6.640.269,00)	98,50	
5.04.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	98.090.000,00	92.409.731,00	(5.680.269,00)	94,21	
5.04.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	98.090.000,00	92.409.731,00	(5.680.269,00)	94,21	
5.04.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.090.000,00	92.409.731,00	(5.680.269,00)	94,21	
5.04.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	343.860.000,00	342.900.000,00	(960.000,00)	99,72	
5.04.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	343.860.000,00	342.900.000,00	(960.000,00)	99,72	
5.04.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.860.000,00	342.900.000,00	(960.000,00)	99,72	
5.04.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	670.000.000,00	627.356.150,00	(42.643.850,00)	93,64	
5.04.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	80.000.000,00	66.906.700,00	(13.093.300,00)	83,63	
5.04.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	66.906.700,00	(13.093.300,00)	83,63	
5.04.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	66.906.700,00	(13.093.300,00)	83,63	
5.04.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	84.416.210,00	(15.583.790,00)	84,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	84.416.210,00	(15.583.790,00)	84,42	
5.04.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	84.416.210,00	(15.583.790,00)	84,42	
5.04.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.509.000,00	(491.000,00)	97,54	
5.04.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.509.000,00	(491.000,00)	97,54	
5.04.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.509.000,00	(491.000,00)	97,54	
5.04.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	150.000.000,00	145.531.700,00	(4.468.300,00)	97,02	
5.04.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.531.700,00	(4.468.300,00)	97,02	
5.04.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.531.700,00	(4.468.300,00)	97,02	
5.04.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000,00	48.730.000,00	(1.270.000,00)	97,46	
5.04.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.730.000,00	(1.270.000,00)	97,46	
5.04.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.730.000,00	(1.270.000,00)	97,46	
5.04.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	200.000.000,00	197.083.340,00	(2.916.660,00)	98,54	
5.04.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	197.083.340,00	(2.916.660,00)	98,54	
5.04.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.083.340,00	(2.916.660,00)	98,54	
5.04.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	50.000.000,00	46.364.700,00	(3.635.300,00)	92,73	
5.04.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.364.700,00	(3.635.300,00)	92,73	
5.04.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.364.700,00	(3.635.300,00)	92,73	
5.04.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	20.000.000,00	18.814.500,00	(1.185.500,00)	94,07	
5.04.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.814.500,00	(1.185.500,00)	94,07	
5.04.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.814.500,00	(1.185.500,00)	94,07	
5.04.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	796.799.800,00	778.451.835,00	(18.347.965,00)	97,70	
5.04.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	796.799.800,00	778.451.835,00	(18.347.965,00)	97,70	
5.04.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	417.800,00	0,00	(417.800,00)	0,00	
5.04.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.800,00	0,00	(417.800,00)	0,00	
5.04.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	796.382.000,00	778.451.835,00	(17.930.165,00)	97,75	
5.04.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	736.872.000,00	720.176.835,00	(16.695.165,00)	97,73	
5.04.01.1.07.0006.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.510.000,00	58.275.000,00	(1.235.000,00)	97,92	
5.04.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.711.375.239,00	5.218.558.490,00	(492.816.749,00)	91,37	
5.04.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.555.182.360,00	1.390.563.265,00	(164.619.095,00)	89,41	
5.04.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.555.182.360,00	1.390.563.265,00	(164.619.095,00)	89,41	
5.04.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.555.182.360,00	1.390.563.265,00	(164.619.095,00)	89,41	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.156.192.879,00	3.827.995.225,00	(328.197.654,00)	92,10	
5.04.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.156.192.879,00	3.827.995.225,00	(328.197.654,00)	92,10	
5.04.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.156.192.879,00	3.827.995.225,00	(328.197.654,00)	92,10	
5.04.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.054.899.000,00	1.841.697.338,00	(213.201.662,00)	89,62	
5.04.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	281.644.000,00	269.606.200,00	(12.037.800,00)	95,73	
5.04.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	281.644.000,00	269.606.200,00	(12.037.800,00)	95,73	
5.04.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.644.000,00	269.606.200,00	(12.037.800,00)	95,73	
5.04.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	316.598.700,00	313.859.345,00	(2.739.355,00)	99,13	
5.04.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	316.598.700,00	313.859.345,00	(2.739.355,00)	99,13	
5.04.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.598.700,00	313.859.345,00	(2.739.355,00)	99,13	
5.04.01.1.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.456.656.300,00	1.258.231.793,00	(198.424.507,00)	86,38	
5.04.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.456.656.300,00	1.258.231.793,00	(198.424.507,00)	86,38	
5.04.01.1.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.656.300,00	1.258.231.793,00	(198.424.507,00)	86,38	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.706.976.000,00	14.202.966.955,00	(4.504.009.045,00)	75,92	
5.04.02.1.01	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	(2.113.832.505,00)	56,87	
5.04.02.1.01.0003	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	(2.113.832.505,00)	56,87	
5.04.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	(2.113.832.505,00)	56,87	
5.04.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	(2.113.832.505,00)	56,87	
5.04.02.1.02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	13.806.351.000,00	11.416.174.460,00	(2.390.176.540,00)	82,69	
5.04.02.1.02.0001	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, SUMBER BELAJAR, KERJASAMA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN, SERTA JABATAN FUNGSIONAL	403.000.000,00	357.383.447,00	(45.616.553,00)	88,68	
5.04.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	403.000.000,00	357.383.447,00	(45.616.553,00)	88,68	
5.04.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.000.000,00	357.383.447,00	(45.616.553,00)	88,68	
5.04.02.1.02.0003	PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	670.500.000,00	260.566.432,00	(409.933.568,00)	38,86	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	670.500.000,00	260.566.432,00	(409.933.568,00)	38,86	
5.04.02.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.500.000,00	260.566.432,00	(409.933.568,00)	38,86	
5.04.02.1.02.0005	PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	150.000.000,00	134.554.850,00	(15.445.150,00)	89,70	
5.04.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	134.554.850,00	(15.445.150,00)	89,70	
5.04.02.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	134.554.850,00	(15.445.150,00)	89,70	
5.04.02.1.02.0006	PENYUSUNAN STANDAR PERANGKAT PEMBELAJARAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, DAN JABATAN FUNGSIONAL	1.223.915.000,00	861.818.530,00	(362.096.470,00)	70,41	
5.04.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.223.915.000,00	861.818.530,00	(362.096.470,00)	70,41	
5.04.02.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.915.000,00	861.818.530,00	(362.096.470,00)	70,41	
5.04.02.1.02.0007	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	10.966.463.500,00	9.467.902.501,00	(1.498.560.999,00)	86,34	
5.04.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.966.463.500,00	9.467.902.501,00	(1.498.560.999,00)	86,34	
5.04.02.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.966.463.500,00	9.467.902.501,00	(1.498.560.999,00)	86,34	
5.04.02.1.02.0008	PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR, DAN KERJA SAMA, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	392.472.500,00	333.948.700,00	(58.523.800,00)	85,09	
5.04.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	392.472.500,00	333.948.700,00	(58.523.800,00)	85,09	
5.04.02.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.472.500,00	333.948.700,00	(58.523.800,00)	85,09	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	53.426.266.039,00	45.797.137.653,00	(7.629.128.386,00)	85,72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.220.366.039,00)	(45.607.312.653,00)	7.613.053.386,00	85,70	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(53.220.366.039,00)	(45.607.312.653,00)	7.613.053.386,00	85,70	

5.07.0.00.0.00.01.0000

BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Satuan Kerja : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.07.0.00.0.00.01.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.800.000,00	36.000.000,00	6.200.000,00	120,81	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
5.07.0.00.0.00.01.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	29.800.000,00	36.000.000,00	6.200.000,00	120,81	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	29.800.000,00	36.000.000,00	6.200.000,00	120,81	
5	BELANJA DAERAH					
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.366.734.700,00	8.681.118.983,00	(685.615.717,00)	92,68	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
5.07.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.076.000,00	10.253.600,00	(5.822.400,00)	63,78	
5.07.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.000.000,00	7.694.000,00	(3.306.000,00)	69,95	
5.07.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	7.694.000,00	(3.306.000,00)	69,95	
5.07.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.694.000,00	(3.306.000,00)	69,95	
5.07.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.07.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	639.900,00	(100,00)	99,98	
5.07.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	256.000,00	0,00	(256.000,00)	0,00	
5.07.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	256.000,00	0,00	(256.000,00)	0,00	
5.07.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.000,00	0,00	(256.000,00)	0,00	
5.07.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	0,00	
5.07.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	0,00	
5.07.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	0,00	
5.07.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.102.160.000,00	5.776.066.723,00	(326.093.277,00)	94,66	
5.07.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.924.450.000,00	5.626.222.523,00	(298.227.477,00)	94,97	
5.07.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.924.450.000,00	5.626.222.523,00	(298.227.477,00)	94,97	
5.07.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.924.450.000,00	5.626.222.523,00	(298.227.477,00)	94,97	
5.07.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	175.710.000,00	147.845.000,00	(27.865.000,00)	84,14	
5.07.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	175.710.000,00	147.845.000,00	(27.865.000,00)	84,14	
5.07.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	173.550.000,00	147.845.000,00	(25.705.000,00)	85,19	
5.07.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	0,00	
5.07.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.07.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.654.989.363,00	1.408.000.110,00	(246.989.253,00)	85,08	
5.07.01.1.03.0001	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.174.989.363,00	1.034.235.964,00	(140.753.399,00)	88,02	
5.07.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.899.363,00	962.751.964,00	(138.147.399,00)	87,45	
5.07.01.1.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.899.363,00	962.751.964,00	(138.147.399,00)	87,45	
5.07.01.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	74.090.000,00	71.484.000,00	(2.606.000,00)	96,48	
5.07.01.1.03.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.090.000,00	71.484.000,00	(2.606.000,00)	96,48	
5.07.01.1.03.0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	480.000.000,00	373.764.146,00	(106.235.854,00)	77,87	
5.07.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	373.764.146,00	(106.235.854,00)	77,87	
5.07.01.1.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	373.764.146,00	(106.235.854,00)	77,87	
5.07.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	1.499.700,00	(300,00)	99,98	
5.07.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
5.07.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
5.07.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
5.07.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
5.07.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	436.510.569,00	351.262.978,00	(85.247.591,00)	80,47	
5.07.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.209.000,00	4.784.100,00	(4.424.900,00)	51,95	
5.07.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.209.000,00	4.784.100,00	(4.424.900,00)	51,95	
5.07.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.209.000,00	4.784.100,00	(4.424.900,00)	51,95	
5.07.01.1.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.190.700,00	41.444.245,00	(16.746.455,00)	71,22	
5.07.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	58.190.700,00	41.444.245,00	(16.746.455,00)	71,22	
5.07.01.1.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.190.700,00	41.444.245,00	(16.746.455,00)	71,22	
5.07.01.1.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.982.000,00	12.814.290,00	(6.167.710,00)	67,51	
5.07.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	18.982.000,00	12.814.290,00	(6.167.710,00)	67,51	
5.07.01.1.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.982.000,00	12.814.290,00	(6.167.710,00)	67,51	
5.07.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.500.000,00	33.464.000,00	(36.000,00)	99,89	
5.07.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	33.500.000,00	33.464.000,00	(36.000,00)	99,89	
5.07.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.464.000,00	(36.000,00)	99,89	
5.07.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.882.000,00	17.207.450,00	(674.550,00)	96,23	
5.07.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.882.000,00	17.207.450,00	(674.550,00)	96,23	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.07.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.882.000,00	17.207.450,00	(674.550,00)	96,23	
5.07.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	298.226.869,00	241.548.893,00	(56.677.976,00)	81,00	
5.07.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	298.226.869,00	241.548.893,00	(56.677.976,00)	81,00	
5.07.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.226.869,00	241.548.893,00	(56.677.976,00)	81,00	
5.07.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	520.000,00	0,00	(520.000,00)	0,00	
5.07.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	520.000,00	0,00	(520.000,00)	0,00	
5.07.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	0,00	(520.000,00)	0,00	
5.07.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.155.498.768,00	1.134.035.872,00	(21.462.896,00)	98,14	
5.07.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	219.607.200,00	212.592.456,00	(7.014.744,00)	96,81	
5.07.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	219.607.200,00	212.592.456,00	(7.014.744,00)	96,81	
5.07.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.607.200,00	212.592.456,00	(7.014.744,00)	96,81	
5.07.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	935.891.568,00	921.443.416,00	(14.448.152,00)	98,46	
5.07.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	935.891.568,00	921.443.416,00	(14.448.152,00)	98,46	
5.07.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.891.568,00	921.443.416,00	(14.448.152,00)	98,46	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.060.193.500,00	982.662.420,00	(77.531.080,00)	92,69	
5.07.02.1.01	PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	1.060.193.500,00	982.662.420,00	(77.531.080,00)	92,69	
5.07.02.1.01.0001	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT	684.933.000,00	634.199.000,00	(50.734.000,00)	92,59	
5.07.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	684.933.000,00	634.199.000,00	(50.734.000,00)	92,59	
5.07.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.933.000,00	634.199.000,00	(50.734.000,00)	92,59	
5.07.02.1.01.0002	PELAYANAN KELEMBAGAAN APARATUR DAN MASYARAKAT	108.487.000,00	94.554.990,00	(13.932.010,00)	87,16	
5.07.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	108.487.000,00	94.554.990,00	(13.932.010,00)	87,16	
5.07.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.487.000,00	94.554.990,00	(13.932.010,00)	87,16	
5.07.02.1.01.0003	PENINGKATAN FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA	91.943.000,00	90.120.640,00	(1.822.360,00)	98,02	
5.07.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	91.943.000,00	90.120.640,00	(1.822.360,00)	98,02	
5.07.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.943.000,00	90.120.640,00	(1.822.360,00)	98,02	
5.07.02.1.01.0004	KEGIATAN FASILITASI PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA	131.245.000,00	129.653.890,00	(1.591.110,00)	98,79	
5.07.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	131.245.000,00	129.653.890,00	(1.591.110,00)	98,79	
5.07.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.245.000,00	129.653.890,00	(1.591.110,00)	98,79	
5.07.02.1.01.0005	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	43.585.500,00	34.133.900,00	(9.451.600,00)	78,31	
5.07.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.585.500,00	34.133.900,00	(9.451.600,00)	78,31	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.07.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.585.500,00	34.133.900,00	(9.451.600,00)	78,31	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	10.426.928.200,00	9.663.781.403,00	(763.146.797,00)	92,68	
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.397.128.200,00)	(9.627.781.403,00)	769.346.797,00	92,60	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(10.397.128.200,00)	(9.627.781.403,00)	769.346.797,00	92,60	

6.01.0.00.0.00.01.0000

INSPEKTORAT

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Satuan Kerja : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.613.702.550,00	62.347.559.744,00	(7.266.142.806,00)	89,56	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
6.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	213.255.500,00	125.046.174,00	(88.209.326,00)	58,64	
6.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	80.093.500,00	40.120.200,00	(39.973.300,00)	50,09	
6.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.093.500,00	40.120.200,00	(39.973.300,00)	50,09	
6.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.093.500,00	40.120.200,00	(39.973.300,00)	50,09	
6.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	16.150.000,00	8.200.000,00	(7.950.000,00)	50,77	
6.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.150.000,00	8.200.000,00	(7.950.000,00)	50,77	
6.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	8.200.000,00	(7.950.000,00)	50,77	
6.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	16.150.000,00	12.600.000,00	(3.550.000,00)	78,02	
6.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.150.000,00	12.600.000,00	(3.550.000,00)	78,02	
6.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	12.600.000,00	(3.550.000,00)	78,02	
6.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	17.300.000,00	9.398.800,00	(7.901.200,00)	54,33	
6.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.300.000,00	9.398.800,00	(7.901.200,00)	54,33	
6.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	9.398.800,00	(7.901.200,00)	54,33	
6.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	17.300.000,00	8.198.800,00	(9.101.200,00)	47,39	
6.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.300.000,00	8.198.800,00	(9.101.200,00)	47,39	
6.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	8.198.800,00	(9.101.200,00)	47,39	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.522.000,00	1.337.400,00	(7.184.600,00)	15,69	
6.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	8.522.000,00	1.337.400,00	(7.184.600,00)	15,69	
6.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.522.000,00	1.337.400,00	(7.184.600,00)	15,69	
6.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.740.000,00	1.200.000,00	(1.540.000,00)	43,80	
6.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.740.000,00	1.200.000,00	(1.540.000,00)	43,80	
6.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	1.200.000,00	(1.540.000,00)	43,80	
6.01.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	55.000.000,00	43.990.974,00	(11.009.026,00)	79,98	
6.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	43.990.974,00	(11.009.026,00)	79,98	
6.01.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	43.990.974,00	(11.009.026,00)	79,98	
6.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	61.870.640.000,00	56.545.742.187,00	(5.324.897.813,00)	91,39	
6.01.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	61.599.000.000,00	56.289.242.389,00	(5.309.757.611,00)	91,38	
6.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	61.599.000.000,00	56.289.242.389,00	(5.309.757.611,00)	91,38	
6.01.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	61.599.000.000,00	56.289.242.389,00	(5.309.757.611,00)	91,38	
6.01.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	239.550.000,00	227.250.000,00	(12.300.000,00)	94,87	
6.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	239.550.000,00	227.250.000,00	(12.300.000,00)	94,87	
6.01.01.1.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	33.600.000,00	21.300.000,00	(12.300.000,00)	63,39	
6.01.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.950.000,00	205.950.000,00	0,00	100,00	
6.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	32.090.000,00	29.249.798,00	(2.840.202,00)	91,15	
6.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	32.090.000,00	29.249.798,00	(2.840.202,00)	91,15	
6.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.090.000,00	29.249.798,00	(2.840.202,00)	91,15	
6.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.862.342.000,00	1.280.892.310,00	(581.449.690,00)	68,78	
6.01.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	167.903.000,00	115.135.812,00	(52.767.188,00)	68,57	
6.01.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	167.903.000,00	115.135.812,00	(52.767.188,00)	68,57	
6.01.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.903.000,00	115.135.812,00	(52.767.188,00)	68,57	
6.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.694.439.000,00	1.165.756.498,00	(528.682.502,00)	68,80	
6.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.694.439.000,00	1.165.756.498,00	(528.682.502,00)	68,80	
6.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.439.000,00	1.165.756.498,00	(528.682.502,00)	68,80	
6.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.179.872.700,00	783.368.519,00	(396.504.181,00)	66,39	
6.01.01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100.000.000,00	81.830.310,00	(18.169.690,00)	81,83	
6.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	81.830.310,00	(18.169.690,00)	81,83	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.1.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	81.830.310,00	(18.169.690,00)	81,83	
6.01.01.1.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	543.524.200,00	419.918.348,00	(123.605.852,00)	77,26	
6.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	543.524.200,00	419.918.348,00	(123.605.852,00)	77,26	
6.01.01.1.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.524.200,00	419.918.348,00	(123.605.852,00)	77,26	
6.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	175.000.000,00	148.803.960,00	(26.196.040,00)	85,03	
6.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	148.803.960,00	(26.196.040,00)	85,03	
6.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	148.803.960,00	(26.196.040,00)	85,03	
6.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	261.078.500,00	119.615.901,00	(141.462.599,00)	45,82	
6.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	261.078.500,00	119.615.901,00	(141.462.599,00)	45,82	
6.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.078.500,00	119.615.901,00	(141.462.599,00)	45,82	
6.01.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	100.270.000,00	13.200.000,00	(87.070.000,00)	13,16	
6.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.270.000,00	13.200.000,00	(87.070.000,00)	13,16	
6.01.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.270.000,00	13.200.000,00	(87.070.000,00)	13,16	
6.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	331.200.000,00	328.659.998,00	(2.540.002,00)	99,23	
6.01.01.1.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	331.200.000,00	328.659.998,00	(2.540.002,00)	99,23	
6.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	0,00	
6.01.01.1.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	0,00	
6.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	329.655.000,00	328.659.998,00	(995.002,00)	99,70	
6.01.01.1.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.655.000,00	328.659.998,00	(995.002,00)	99,70	
6.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.321.470.250,00	1.835.171.076,00	(486.299.174,00)	79,05	
6.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	642.504.000,00	420.529.267,00	(221.974.733,00)	65,45	
6.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	642.504.000,00	420.529.267,00	(221.974.733,00)	65,45	
6.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.504.000,00	420.529.267,00	(221.974.733,00)	65,45	
6.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.678.966.250,00	1.414.641.809,00	(264.324.441,00)	84,26	
6.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.678.966.250,00	1.414.641.809,00	(264.324.441,00)	84,26	
6.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.678.966.250,00	1.414.641.809,00	(264.324.441,00)	84,26	
6.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.834.922.100,00	1.448.679.480,00	(386.242.620,00)	78,95	
6.01.01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	53.874.000,00	36.859.348,00	(17.014.652,00)	68,42	
6.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.874.000,00	36.859.348,00	(17.014.652,00)	68,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.1.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.874.000,00	36.859.348,00	(17.014.652,00)	68,42	
6.01.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	489.810.000,00	320.247.360,00	(169.562.640,00)	65,38	
6.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	489.810.000,00	320.247.360,00	(169.562.640,00)	65,38	
6.01.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.810.000,00	320.247.360,00	(169.562.640,00)	65,38	
6.01.01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	192.200.000,00	92.541.942,00	(99.658.058,00)	48,15	
6.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	192.200.000,00	92.541.942,00	(99.658.058,00)	48,15	
6.01.01.1.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.200.000,00	92.541.942,00	(99.658.058,00)	48,15	
6.01.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.099.038.100,00	999.030.830,00	(100.007.270,00)	90,90	
6.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.099.038.100,00	999.030.830,00	(100.007.270,00)	90,90	
6.01.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.038.100,00	999.030.830,00	(100.007.270,00)	90,90	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.493.922.760,00	1.703.393.714,00	(790.529.046,00)	68,30	
6.01.02.1.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.866.634.760,00	1.383.740.714,00	(482.894.046,00)	74,13	
6.01.02.1.01.0001	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	278.355.000,00	192.510.000,00	(85.845.000,00)	69,16	
6.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	278.355.000,00	192.510.000,00	(85.845.000,00)	69,16	
6.01.02.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.355.000,00	192.510.000,00	(85.845.000,00)	69,16	
6.01.02.1.01.0002	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	618.040.000,00	551.625.000,00	(66.415.000,00)	89,25	
6.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	618.040.000,00	551.625.000,00	(66.415.000,00)	89,25	
6.01.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.040.000,00	551.625.000,00	(66.415.000,00)	89,25	
6.01.02.1.01.0003	REVIU LAPORAN KINERJA	83.302.000,00	16.200.000,00	(67.102.000,00)	19,45	
6.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	83.302.000,00	16.200.000,00	(67.102.000,00)	19,45	
6.01.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.302.000,00	16.200.000,00	(67.102.000,00)	19,45	
6.01.02.1.01.0004	REVIU LAPORAN KEUANGAN	349.566.000,00	233.508.000,00	(116.058.000,00)	66,80	
6.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	349.566.000,00	233.508.000,00	(116.058.000,00)	66,80	
6.01.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.566.000,00	233.508.000,00	(116.058.000,00)	66,80	
6.01.02.1.01.0006	KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	94.080.000,00	12.600.000,00	(81.480.000,00)	13,39	
6.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	94.080.000,00	12.600.000,00	(81.480.000,00)	13,39	
6.01.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.080.000,00	12.600.000,00	(81.480.000,00)	13,39	
6.01.02.1.01.0007	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	443.291.760,00	377.297.714,00	(65.994.046,00)	85,11	
6.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	243.291.760,00	183.047.714,00	(60.244.046,00)	75,24	
6.01.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.291.760,00	183.047.714,00	(60.244.046,00)	75,24	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.02.1.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	194.250.000,00	(5.750.000,00)	97,12	
6.01.02.1.01.0007.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	194.250.000,00	(5.750.000,00)	97,12	
6.01.02.1.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	627.288.000,00	319.653.000,00	(307.635.000,00)	50,96	
6.01.02.1.02.0001	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	153.720.000,00	21.300.000,00	(132.420.000,00)	13,86	
6.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	153.720.000,00	21.300.000,00	(132.420.000,00)	13,86	
6.01.02.1.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.720.000,00	21.300.000,00	(132.420.000,00)	13,86	
6.01.02.1.02.0002	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	473.568.000,00	298.353.000,00	(175.215.000,00)	63,00	
6.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	473.568.000,00	298.353.000,00	(175.215.000,00)	63,00	
6.01.02.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.568.000,00	298.353.000,00	(175.215.000,00)	63,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.569.417.800,00	845.416.699,00	(724.001.101,00)	53,87	
6.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANGNNPENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	260.592.400,00	62.329.995,00	(198.262.405,00)	23,92	
6.01.03.1.01.0001	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	260.592.400,00	62.329.995,00	(198.262.405,00)	23,92	
6.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	260.592.400,00	62.329.995,00	(198.262.405,00)	23,92	
6.01.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.592.400,00	62.329.995,00	(198.262.405,00)	23,92	
6.01.03.1.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.308.825.400,00	783.086.704,00	(525.738.696,00)	59,83	
6.01.03.1.02.0002	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DANRNNPENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	29.100.000,00	12.500.000,00	(16.600.000,00)	42,96	
6.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	29.100.000,00	12.500.000,00	(16.600.000,00)	42,96	
6.01.03.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	12.500.000,00	(16.600.000,00)	42,96	
6.01.03.1.02.0003	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	1.135.525.400,00	707.136.704,00	(428.388.696,00)	62,27	
6.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.525.400,00	707.136.704,00	(428.388.696,00)	62,27	
6.01.03.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.525.400,00	707.136.704,00	(428.388.696,00)	62,27	
6.01.03.1.02.0004	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	144.200.000,00	63.450.000,00	(80.750.000,00)	44,00	
6.01.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	144.200.000,00	63.450.000,00	(80.750.000,00)	44,00	
6.01.03.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.200.000,00	63.450.000,00	(80.750.000,00)	44,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	73.677.043.110,00	64.896.370.157,00	(8.780.672.953,00)	88,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.677.043.110,00)	(64.896.370.157,00)	8.780.672.953,00	88,08	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(73.677.043.110,00)	(64.896.370.157,00)	8.780.672.953,00	88,08	

8.01.0.00.0.00.01.0000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Satuan Kerja : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.726.262.420,00	15.331.379.963,00	(1.394.882.457,00)	91,66	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
8.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	361.215.740,00	338.446.169,00	(22.769.571,00)	93,70	
8.01.01.1.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	97.870.000,00	92.287.077,00	(5.582.923,00)	94,30	
8.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	97.870.000,00	92.287.077,00	(5.582.923,00)	94,30	
8.01.01.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.870.000,00	92.287.077,00	(5.582.923,00)	94,30	
8.01.01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	6.635.740,00	6.550.000,00	(85.740,00)	98,71	
8.01.01.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.635.740,00	6.550.000,00	(85.740,00)	98,71	
8.01.01.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.635.740,00	6.550.000,00	(85.740,00)	98,71	
8.01.01.1.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.400.000,00	6.364.900,00	(35.100,00)	99,45	
8.01.01.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.364.900,00	(35.100,00)	99,45	
8.01.01.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.364.900,00	(35.100,00)	99,45	
8.01.01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	30.650.000,00	28.376.640,00	(2.273.360,00)	92,58	
8.01.01.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.650.000,00	28.376.640,00	(2.273.360,00)	92,58	
8.01.01.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	28.376.640,00	(2.273.360,00)	92,58	
8.01.01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	125.780.000,00	116.718.627,00	(9.061.373,00)	92,80	
8.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	125.780.000,00	116.718.627,00	(9.061.373,00)	92,80	
8.01.01.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.780.000,00	116.718.627,00	(9.061.373,00)	92,80	
8.01.01.1.01.0008	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	22.460.000,00	21.160.000,00	(1.300.000,00)	94,21	
8.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	22.460.000,00	21.160.000,00	(1.300.000,00)	94,21	
8.01.01.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.460.000,00	21.160.000,00	(1.300.000,00)	94,21	
8.01.01.1.01.0009	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	32.960.000,00	29.560.000,00	(3.400.000,00)	89,68	
8.01.01.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	32.960.000,00	29.560.000,00	(3.400.000,00)	89,68	
8.01.01.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	29.560.000,00	(3.400.000,00)	89,68	
8.01.01.1.01.0011	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	28.160.000,00	27.128.925,00	(1.031.075,00)	96,34	
8.01.01.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	28.160.000,00	27.128.925,00	(1.031.075,00)	96,34	
8.01.01.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.160.000,00	27.128.925,00	(1.031.075,00)	96,34	
8.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.917.270.000,00	10.960.228.298,00	(957.041.702,00)	91,97	
8.01.01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.342.600.000,00	10.482.492.375,00	(860.107.625,00)	92,42	
8.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.342.600.000,00	10.482.492.375,00	(860.107.625,00)	92,42	
8.01.01.1.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.342.600.000,00	10.482.492.375,00	(860.107.625,00)	92,42	
8.01.01.1.02.0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	413.670.000,00	317.754.000,00	(95.916.000,00)	76,81	
8.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	413.670.000,00	317.754.000,00	(95.916.000,00)	76,81	
8.01.01.1.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.670.000,00	317.754.000,00	(95.916.000,00)	76,81	
8.01.01.1.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	23.988.000,00	23.772.790,00	(215.210,00)	99,10	
8.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	23.988.000,00	23.772.790,00	(215.210,00)	99,10	
8.01.01.1.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.988.000,00	23.772.790,00	(215.210,00)	99,10	
8.01.01.1.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	29.580.000,00	29.330.000,00	(250.000,00)	99,15	
8.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	29.580.000,00	29.330.000,00	(250.000,00)	99,15	
8.01.01.1.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	29.330.000,00	(250.000,00)	99,15	
8.01.01.1.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	29.000.000,00	28.788.233,00	(211.767,00)	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.788.233,00	(211.767,00)	99,27	
8.01.01.1.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.788.233,00	(211.767,00)	99,27	
8.01.01.1.02.0006	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	36.300.000,00	36.120.960,00	(179.040,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	36.300.000,00	36.120.960,00	(179.040,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.120.960,00	(179.040,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	28.875.000,00	28.733.880,00	(141.120,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	28.875.000,00	28.733.880,00	(141.120,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.875.000,00	28.733.880,00	(141.120,00)	99,51	
8.01.01.1.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	13.257.000,00	13.236.060,00	(20.940,00)	99,84	
8.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	13.257.000,00	13.236.060,00	(20.940,00)	99,84	
8.01.01.1.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.257.000,00	13.236.060,00	(20.940,00)	99,84	
8.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.431.600,00	13.119.312,00	(4.312.288,00)	75,26	
8.01.01.1.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	17.431.600,00	13.119.312,00	(4.312.288,00)	75,26	
8.01.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.600,00	987.012,00	(100.588,00)	90,75	
8.01.01.1.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.600,00	987.012,00	(100.588,00)	90,75	
8.01.01.1.03.0005.5.2	BELANJA MODAL	16.344.000,00	12.132.300,00	(4.211.700,00)	74,23	
8.01.01.1.03.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.344.000,00	12.132.300,00	(4.211.700,00)	74,23	
8.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	244.183.400,00	227.308.532,00	(16.874.868,00)	93,09	
8.01.01.1.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	97.300.000,00	88.242.780,00	(9.057.220,00)	90,69	
8.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	97.300.000,00	88.242.780,00	(9.057.220,00)	90,69	
8.01.01.1.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	88.242.780,00	(9.057.220,00)	90,69	
8.01.01.1.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	8.736.000,00	8.720.056,00	(15.944,00)	99,82	
8.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.736.000,00	8.720.056,00	(15.944,00)	99,82	
8.01.01.1.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.736.000,00	8.720.056,00	(15.944,00)	99,82	
8.01.01.1.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	45.360.000,00	41.286.618,00	(4.073.382,00)	91,02	
8.01.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	45.360.000,00	41.286.618,00	(4.073.382,00)	91,02	
8.01.01.1.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.360.000,00	41.286.618,00	(4.073.382,00)	91,02	
8.01.01.1.05.0005	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	33.134.400,00	33.020.430,00	(113.970,00)	99,66	
8.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	33.134.400,00	33.020.430,00	(113.970,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.1.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.134.400,00	33.020.430,00	(113.970,00)	99,66	
8.01.01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	12.912.000,00	10.720.000,00	(2.192.000,00)	83,02	
8.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	12.912.000,00	10.720.000,00	(2.192.000,00)	83,02	
8.01.01.1.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.912.000,00	10.720.000,00	(2.192.000,00)	83,02	
8.01.01.1.05.0010	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	46.441.000,00	45.318.648,00	(1.122.352,00)	97,58	
8.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	46.441.000,00	45.318.648,00	(1.122.352,00)	97,58	
8.01.01.1.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.441.000,00	45.318.648,00	(1.122.352,00)	97,58	
8.01.01.1.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
8.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
8.01.01.1.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
8.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	548.511.500,00	494.831.222,00	(53.680.278,00)	90,21	
8.01.01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	273.042.400,00	246.871.163,00	(26.171.237,00)	90,41	
8.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	273.042.400,00	246.871.163,00	(26.171.237,00)	90,41	
8.01.01.1.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.042.400,00	246.871.163,00	(26.171.237,00)	90,41	
8.01.01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	148.797.600,00	139.646.559,00	(9.151.041,00)	93,85	
8.01.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	148.797.600,00	139.646.559,00	(9.151.041,00)	93,85	
8.01.01.1.06.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.797.600,00	139.646.559,00	(9.151.041,00)	93,85	
8.01.01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	36.000.000,00	35.977.500,00	(22.500,00)	99,94	
8.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.977.500,00	(22.500,00)	99,94	
8.01.01.1.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.977.500,00	(22.500,00)	99,94	
8.01.01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.521.500,00	3.756.000,00	(16.765.500,00)	18,30	
8.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	20.521.500,00	3.756.000,00	(16.765.500,00)	18,30	
8.01.01.1.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.521.500,00	3.756.000,00	(16.765.500,00)	18,30	
8.01.01.1.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	20.850.000,00	19.980.000,00	(870.000,00)	95,83	
8.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.850.000,00	19.980.000,00	(870.000,00)	95,83	
8.01.01.1.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	19.980.000,00	(870.000,00)	95,83	
8.01.01.1.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	49.300.000,00	48.600.000,00	(700.000,00)	98,58	
8.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	49.300.000,00	48.600.000,00	(700.000,00)	98,58	
8.01.01.1.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	48.600.000,00	(700.000,00)	98,58	
8.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.410.747.080,00	2.200.985.145,00	(209.761.935,00)	91,30	
8.01.01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.500.000,00	12.224.100,00	(1.275.900,00)	90,55	

PMD 90/2019

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	12.224.100,00	(1.275.900,00)	90,55	
8.01.01.1.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	12.224.100,00	(1.275.900,00)	90,55	
8.01.01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	532.560.000,00	369.159.371,00	(163.400.629,00)	69,32	
8.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	532.560.000,00	369.159.371,00	(163.400.629,00)	69,32	
8.01.01.1.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.560.000,00	369.159.371,00	(163.400.629,00)	69,32	
8.01.01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	240.632.000,00	217.747.590,00	(22.884.410,00)	90,49	
8.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	240.632.000,00	217.747.590,00	(22.884.410,00)	90,49	
8.01.01.1.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.632.000,00	217.747.590,00	(22.884.410,00)	90,49	
8.01.01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.624.055.080,00	1.601.854.084,00	(22.200.996,00)	98,63	
8.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.624.055.080,00	1.601.854.084,00	(22.200.996,00)	98,63	
8.01.01.1.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.055.080,00	1.601.854.084,00	(22.200.996,00)	98,63	
8.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.226.903.100,00	1.096.461.285,00	(130.441.815,00)	89,37	
8.01.01.1.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	889.080.100,00	770.022.849,00	(119.057.251,00)	86,61	
8.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	889.080.100,00	770.022.849,00	(119.057.251,00)	86,61	
8.01.01.1.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.080.100,00	770.022.849,00	(119.057.251,00)	86,61	
8.01.01.1.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	145.927.000,00	135.841.800,00	(10.085.200,00)	93,09	
8.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	145.927.000,00	135.841.800,00	(10.085.200,00)	93,09	
8.01.01.1.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.927.000,00	135.841.800,00	(10.085.200,00)	93,09	
8.01.01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	191.896.000,00	190.596.636,00	(1.299.364,00)	99,32	
8.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	191.896.000,00	190.596.636,00	(1.299.364,00)	99,32	
8.01.01.1.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.896.000,00	190.596.636,00	(1.299.364,00)	99,32	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	(117.083.191,00)	96,46	
8.01.02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	(117.083.191,00)	96,46	
8.01.02.1.01.0002	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	193.464.700,00	188.676.499,00	(4.788.201,00)	97,53	
8.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	193.464.700,00	188.676.499,00	(4.788.201,00)	97,53	
8.01.02.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.464.700,00	188.676.499,00	(4.788.201,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.02.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	187.760.000,00	185.291.907,00	(2.468.093,00)	98,69	
8.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	187.760.000,00	185.291.907,00	(2.468.093,00)	98,69	
8.01.02.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.760.000,00	185.291.907,00	(2.468.093,00)	98,69	
8.01.02.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	140.433.000,00	133.518.910,00	(6.914.090,00)	95,08	
8.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	140.433.000,00	133.518.910,00	(6.914.090,00)	95,08	
8.01.02.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.433.000,00	133.518.910,00	(6.914.090,00)	95,08	
8.01.02.1.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	67.685.000,00	64.911.921,00	(2.773.079,00)	95,90	
8.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	67.685.000,00	64.911.921,00	(2.773.079,00)	95,90	
8.01.02.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.685.000,00	64.911.921,00	(2.773.079,00)	95,90	
8.01.02.1.01.0006	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	100.000.000,00	94.520.505,00	(5.479.495,00)	94,52	
8.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.520.505,00	(5.479.495,00)	94,52	
8.01.02.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.520.505,00	(5.479.495,00)	94,52	
8.01.02.1.01.0007	PENGANGKATAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.02.1.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.02.1.01.0008	PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA	402.857.076,00	398.010.970,00	(4.846.106,00)	98,80	
8.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	402.857.076,00	398.010.970,00	(4.846.106,00)	98,80	
8.01.02.1.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.857.076,00	398.010.970,00	(4.846.106,00)	98,80	
8.01.02.1.01.0009	PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	1.394.793.444,00	1.315.741.652,00	(79.051.792,00)	94,33	
8.01.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.394.793.444,00	1.315.741.652,00	(79.051.792,00)	94,33	
8.01.02.1.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.793.444,00	1.315.741.652,00	(79.051.792,00)	94,33	
8.01.02.1.01.0010	PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	511.724.000,00	506.674.531,00	(5.049.469,00)	99,01	
8.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	511.724.000,00	506.674.531,00	(5.049.469,00)	99,01	
8.01.02.1.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.724.000,00	506.674.531,00	(5.049.469,00)	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.02.1.01.0011	PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
8.01.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
8.01.02.1.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
8.01.02.1.01.0012	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	151.876.000,00	146.763.134,00	(5.112.866,00)	96,63	
8.01.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	151.876.000,00	146.763.134,00	(5.112.866,00)	96,63	
8.01.02.1.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.876.000,00	146.763.134,00	(5.112.866,00)	96,63	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	32.689.825.000,00	32.654.320.653,00	(35.504.347,00)	99,89	
8.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	32.689.825.000,00	32.654.320.653,00	(35.504.347,00)	99,89	
8.01.03.1.01.0001	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	22.506.000,00	22.305.161,00	(200.839,00)	99,11	
8.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.506.000,00	22.305.161,00	(200.839,00)	99,11	
8.01.03.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.506.000,00	22.305.161,00	(200.839,00)	99,11	
8.01.03.1.01.0002	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	26.010.000,00	26.005.980,00	(4.020,00)	99,98	
8.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	26.010.000,00	26.005.980,00	(4.020,00)	99,98	
8.01.03.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.010.000,00	26.005.980,00	(4.020,00)	99,98	
8.01.03.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	32.533.978.000,00	32.501.682.429,00	(32.295.571,00)	99,90	
8.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	32.533.978.000,00	32.501.682.429,00	(32.295.571,00)	99,90	
8.01.03.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.918.000,00	553.436.143,00	(25.481.857,00)	95,60	
8.01.03.1.01.0003.5.1.05	Belanja Hibah	31.955.060.000,00	31.948.246.286,00	(6.813.714,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.03.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	71.442.000,00	70.776.060,00	(665.940,00)	99,07	
8.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	71.442.000,00	70.776.060,00	(665.940,00)	99,07	
8.01.03.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.442.000,00	70.776.060,00	(665.940,00)	99,07	
8.01.03.1.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	35.889.000,00	33.551.023,00	(2.337.977,00)	93,49	
8.01.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	35.889.000,00	33.551.023,00	(2.337.977,00)	93,49	
8.01.03.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.889.000,00	33.551.023,00	(2.337.977,00)	93,49	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.825.213.346,00	(86.296.654,00)	98,24	
8.01.04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.825.213.346,00	(86.296.654,00)	98,24	
8.01.04.1.01.0001	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	13.376.000,00	11.824.339,00	(1.551.661,00)	88,40	
8.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.376.000,00	11.824.339,00	(1.551.661,00)	88,40	
8.01.04.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.376.000,00	11.824.339,00	(1.551.661,00)	88,40	
8.01.04.1.01.0002	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	114.020.000,00	108.464.572,00	(5.555.428,00)	95,13	
8.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	114.020.000,00	108.464.572,00	(5.555.428,00)	95,13	
8.01.04.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.020.000,00	108.464.572,00	(5.555.428,00)	95,13	
8.01.04.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	4.735.980.000,00	4.658.875.092,00	(77.104.908,00)	98,37	
8.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.735.980.000,00	4.658.875.092,00	(77.104.908,00)	98,37	
8.01.04.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.980.000,00	705.007.178,00	(30.972.822,00)	95,79	
8.01.04.1.01.0003.5.1.05	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	3.953.867.914,00	(46.132.086,00)	98,85	
8.01.04.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	25.090.000,00	23.089.879,00	(2.000.121,00)	92,03	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.090.000,00	23.089.879,00	(2.000.121,00)	92,03	
8.01.04.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	23.089.879,00	(2.000.121,00)	92,03	
8.01.04.1.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	23.044.000,00	22.959.464,00	(84.536,00)	99,63	
8.01.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	23.044.000,00	22.959.464,00	(84.536,00)	99,63	
8.01.04.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.044.000,00	22.959.464,00	(84.536,00)	99,63	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	760.350.000,00	719.068.508,00	(41.281.492,00)	94,57	
8.01.05.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	760.350.000,00	719.068.508,00	(41.281.492,00)	94,57	
8.01.05.1.01.0001	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	41.804.000,00	40.287.000,00	(1.517.000,00)	96,37	
8.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	41.804.000,00	40.287.000,00	(1.517.000,00)	96,37	
8.01.05.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.804.000,00	40.287.000,00	(1.517.000,00)	96,37	
8.01.05.1.01.0002	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	21.916.000,00	18.163.000,00	(3.753.000,00)	82,88	
8.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	21.916.000,00	18.163.000,00	(3.753.000,00)	82,88	
8.01.05.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.916.000,00	18.163.000,00	(3.753.000,00)	82,88	
8.01.05.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	515.160.000,00	496.804.778,00	(18.355.222,00)	96,44	
8.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	515.160.000,00	496.804.778,00	(18.355.222,00)	96,44	
8.01.05.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.160.000,00	496.804.778,00	(18.355.222,00)	96,44	
8.01.05.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	144.226.000,00	127.469.730,00	(16.756.270,00)	88,38	
8.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	144.226.000,00	127.469.730,00	(16.756.270,00)	88,38	
8.01.05.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.226.000,00	127.469.730,00	(16.756.270,00)	88,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.05.1.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	37.244.000,00	36.344.000,00	(900.000,00)	97,58	
8.01.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.244.000,00	36.344.000,00	(900.000,00)	97,58	
8.01.05.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.244.000,00	36.344.000,00	(900.000,00)	97,58	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	14.200.667.430,00	(526.669.570,00)	96,42	
8.01.06.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	14.200.667.430,00	(526.669.570,00)	96,42	
8.01.06.1.01.0001	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.06.1.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01.06.1.01.0002	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	32.850.000,00	29.212.000,00	(3.638.000,00)	88,93	
8.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	32.850.000,00	29.212.000,00	(3.638.000,00)	88,93	
8.01.06.1.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	29.212.000,00	(3.638.000,00)	88,93	
8.01.06.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	12.380.407.000,00	12.283.060.130,00	(97.346.870,00)	99,21	
8.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.380.407.000,00	12.283.060.130,00	(97.346.870,00)	99,21	
8.01.06.1.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.638.000,00	873.977.430,00	(40.660.570,00)	95,55	
8.01.06.1.01.0003.5.1.05	Belanja Hibah	11.465.769.000,00	11.409.082.700,00	(56.686.300,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.06.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	47.880.000,00	35.195.500,00	(12.684.500,00)	73,51	
8.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	47.880.000,00	35.195.500,00	(12.684.500,00)	73,51	
8.01.06.1.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	35.195.500,00	(12.684.500,00)	73,51	
8.01.06.1.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	200.000,00	199.800,00	(200,00)	99,90	
8.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	199.800,00	(200,00)	99,90	
8.01.06.1.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	199.800,00	(200,00)	99,90	
8.01.06.1.01.0006	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	2.263.000.000,00	1.850.000.000,00	(413.000.000,00)	81,75	
8.01.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.263.000.000,00	1.850.000.000,00	(413.000.000,00)	81,75	
8.01.06.1.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.263.000.000,00	1.850.000.000,00	(413.000.000,00)	81,75	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	73.126.477.640,00	70.924.759.929,00	(2.201.717.711,00)	96,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.126.477.640,00)	(70.924.759.929,00)	2.201.717.711,00	96,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(73.126.477.640,00)	(70.924.759.929,00)	2.201.717.711,00	96,99	

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.569.259.524.915,00	2.456.396.884.652,64	586.800.844.755,00	494.921.694.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.569.259.524.915,00	2.456.396.884.652,64	586.800.844.755,00	494.921.694.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.569.259.524.915,00	2.456.396.884.652,64	586.800.844.755,00	494.921.694.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.264.415.856.052,00	1.265.831.816.704,00	1.535.922.000,00	1.434.569.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.126.191.100,00	816.341.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.131.600,00	129.828.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.012.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.618.000,00	28.426.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.753.000,00	34.228.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34.893.000,00	32.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.840.000,00	16.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.521.400,00	123.132.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	332.201.800,00	211.337.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.766.000,00	32.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	23.809.000,00	21.371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	207.645.300,00	156.625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.238.407.452.174,00	1.243.534.135.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.225.788.856.674,00	1.234.868.519.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.403.920.000,00	8.456.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.200.000,00	11.743.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.650.000,00	12.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.650.000,00	12.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.650.000,00	12.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	152.325.500,00	148.700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.200.000,00	11.770.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	465.494.420,00	97.693.200,00	199.960.000,00	198.759.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000,00	0,00	199.960.000,00	198.759.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	361.932.420,00	92.968.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.978.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.954.151.200,00	1.385.117.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	341.200.000,00	339.163.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	140.202.000,00	122.619.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	267.392.000,00	23.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.205.357.200,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.795.378.222,00	5.151.504.901,00	369.815.000,00	356.755.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.385.600,00	294.684.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	403.449.000,00	385.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	326.313.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	831.802.600,00	461.900.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	148.890.600,00	65.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.729.850.422,00	3.617.533.894,00	369.815.000,00	356.755.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.534.300,00	76.980.691,00	927.203.000,00	853.239.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.435.100,00	1.321.600,00	470.210.000,00	451.707.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.499.000,00	1.317.000,00	97.733.000,00	90.226.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	36.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.600.200,00	37.750.291,00	359.260.000,00	311.306.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.555.480.536,00	10.514.998.854,00	38.944.000,00	25.814.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.299.906.700,00	1.787.567.328,00	12.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	874.894.990,00	794.032.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.370.678.846,00	7.933.398.647,00	26.132.000,00	25.814.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.969.174.100,00	4.255.044.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	499.496.000,00	453.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.298.074.000,00	1.081.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291.072.900,00	276.254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.100.000,00	87.320.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.790.431.200,00	2.356.943.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.303.554.614.563,00	1.189.467.960.737,64	585.264.922.755,00	493.487.125.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	516.119.304.870,00	477.849.590.885,64	220.526.225.320,00	217.523.998.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	28.700.000.000,00	27.839.161.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	650.000.000,00	634.769.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	500.000.000,00	487.048.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	750.000.000,00	731.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	45.635.145.000,00	44.619.910.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	0,00	0,00	200.000.000,00	191.145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	27.900.000.000,00	27.320.928.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	1.050.000.000,00	1.030.723.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	350.000.000,00	338.452.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	22.543.245.000,00	21.996.708.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	139.198.650,00	109.571.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	44.480.000,00	39.800.000,00	1.042.282.000,00	1.014.516.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	30.979.621.450,00	24.859.298.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.758.380.270,00	1.862.865.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	211.132.880.850,00	191.395.683.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	614.097.500,00	591.816.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	551.379.600,00	279.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	268.107.672.680,00	257.432.067.863,64	70.005.553.320,00	70.602.672.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	510.333.920,00	137.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	34.565.000,00	34.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	36.740.000,00	36.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	45.925.000,00	44.407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	107.103.300,00	98.345.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	360.573.400,00	325.700.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	153.439.300,00	136.085.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	450.000.000,00	439.881.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	2.850.000.000,00	2.768.891.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	0,00	0,00	600.000.000,00	587.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	17.300.000.000,00	16.920.666.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	334.973.950,00	283.231.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	207.940.000,00	182.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	718.866.049.271,00	644.817.145.483,00	334.169.575.105,00	265.728.983.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	109.333.278.200,00	55.258.913.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.363.918.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	0,00	3.679.536.802,00	3.527.147.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	0,00	0,00	1.116.000.000,00	175.600.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	4.060.000.000,00	3.835.700.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	25.045.640.000,00	23.565.345.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	0,00	0,00	416.840.000,00	414.460.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0,00	0,00	1.240.000.000,00	1.174.154.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	192.000.000,00	164.638.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	14.015.889.000,00	13.650.933.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	137.639.500,00	109.545.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.434.151.000,00	573.624.291,00	113.816.989.000,00	109.133.719.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	80.526.000.000,00	74.376.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.134.280.860,00	2.563.043.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	251.649.714.064,00	193.976.846.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	969.543.200,00	958.505.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	461.870.000,00	348.952.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	378.212.687.897,00	370.041.282.635,00	44.112.242.103,00	43.891.409.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	531.616.450,00	344.200.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	34.565.000,00	34.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	36.740.000,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	45.925.000,00	44.407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	109.869.250,00	89.784.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	357.246.100,00	317.727.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	196.684.250,00	167.770.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	0,00	0,00	2.622.000.000,00	1.299.471.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	6.883.160.000,00	2.402.540.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	3.880.000.000,00	3.652.802.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	618.729.750,00	503.379.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	408.786.950,00	334.594.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	256.000.000,00	218.227.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	68.569.260.422,00	66.801.224.369,00	30.569.122.330,00	10.234.143.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	23.710.540.000,00	3.526.343.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	1.322.460.000,00	1.286.122.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.891.903.000,00	1.803.056.771,00	690.247.000,00	679.966.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	7.097.250.000,00	6.948.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.628.195.900,00	5.401.793.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	21.226.499.352,00	20.466.824.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	113.228.750,00	96.207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	149.869.000,00	132.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	31.443.343.670,00	31.141.361.438,00	1.924.126.330,00	1.928.556.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	24.366.750,00	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20.000.000,00	19.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	8.870.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.205.000,00	6.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.030.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	248.855.100,00	189.617.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	49.170.000,00	26.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.741.250,00	10.208.250,00	2.921.749.000,00	2.813.153.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	391.001.000,00	306.708.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	239.731.650,00	204.992.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	253.969.800,00	176.846.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	78.136.800,00	34.334.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	70.000.000,00	34.334.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	8.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	175.833.000,00	142.511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	70.000.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	105.833.000,00	80.240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	875.415.500,00	833.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	875.415.500,00	833.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.519.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	835.896.500,00	805.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	159.669.000,00	87.041.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.123.000,00	38.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.023.000,00	25.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.100.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	59.546.000,00	48.483.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.452.000,00	15.339.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	34.094.000,00	33.143.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.000.676.338.738,00	993.306.228.274,78	70.962.002.777,00	70.090.258.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.000.676.338.738,00	993.306.228.274,78	70.962.002.777,00	70.090.258.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.174.667.270,00	507.822.572.867,50	30.994.750.403,00	30.743.682.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	597.196.200,00	566.631.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.589.000,00	230.634.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.430.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.670.000,00	8.668.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.250.000,00	12.225.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.537.200,00	13.481.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.840.000,00	30.720.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.141.000,00	200.961.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	37.170.000,00	34.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.264.178.725,00	137.959.796.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.085.273.925,00	136.813.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.150.894.000,00	1.118.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.674.800,00	7.600.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.920.000,00	18.654.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.416.000,00	1.396.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	414.448.000,00	412.804.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	414.448.000,00	412.804.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.261.992.900,00	5.932.224.265,00	68.704.000,00	68.559.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	375.866.600,00	357.267.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.453.425.200,00	1.434.502.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.694.533.700,00	1.560.957.057,00	24.424.000,00	24.409.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.246.649.500,00	1.233.714.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	955.505.000,00	947.270.246,00	44.280.000,00	44.150.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.403.900,00	313.714.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	86.609.000,00	84.797.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.770.200,00	207.999.739,00	13.506.741.613,00	13.275.005.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	4.738.000.000,00	4.715.800.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	120.000,00	120.000,00	627.064.000,00	616.344.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.650.200,00	8.512.939,00	6.453.863.813,00	6.287.610.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.366.800,00	1.374.700.800,00	1.347.557.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	313.113.000,00	307.692.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.849.653.029,00	86.615.271.708,00	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.211.836.414,00	3.885.615.030,00	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.637.816.615,00	82.729.656.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.974.052.000,00	8.692.889.438,50	195.000.000,00	194.547.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.176.000,00	80.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.937.783.000,00	1.877.940.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.232.224.000,00	2.122.750.391,00	195.000.000,00	194.547.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.930.167.000,00	2.913.376.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.876.000,00	281.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.469.826.000,00	1.417.081.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	267.554.376.216,00	267.393.505.479,00	17.216.790.790,00	17.198.056.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	267.554.376.216,00	267.393.505.479,00	17.216.790.790,00	17.198.056.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	465.363.320.212,00	464.154.881.913,28	39.967.252.374,00	39.346.575.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76.400.074.192,00	75.862.319.031,28	27.952.591.974,00	27.388.243.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.406.774.120,00	1.269.630.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	2.350.000.000,00	2.174.313.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	95.296.000,00	93.124.691,00	22.552.584.974,00	22.190.055.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	62.309.000,00	60.779.676,00	2.233.217.000,00	2.207.085.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	400.000.000,00	396.887.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.014.983.000,00	990.899.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	816.790.000,00	816.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	350.000.000,00	332.584.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	73.070.712.072,00	72.718.411.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	382.483.973.020,00	381.883.279.263,00	13.532.000,00	13.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	452.646.000,00	325.985.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	202.900.000,00	202.579.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.000.797.000,00	1.000.718.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	30.892.000,00	30.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	781.440.000,00	781.435.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	574.681.000,00	539.542.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.102.577.000,00	1.010.761.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	721.888.600,00	721.830.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.198.172.000,00	2.003.200.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	37.255.600,00	37.255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	718.743.000,00	714.910.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	124.558.000,00	124.545.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	370.899.917.620,00	370.876.629.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	154.551.000,00	154.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.778.899.000,00	1.689.755.325,00	13.532.000,00	13.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1.115.732.200,00	1.081.960.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	228.097.000,00	227.620.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	360.226.000,00	359.410.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	1.771.000.000,00	1.714.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	6.479.273.000,00	6.409.283.619,00	10.230.128.400,00	10.230.128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	270.782.000,00	270.254.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6.208.491.000,00	6.139.028.647,00	10.230.128.400,00	10.230.128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	20.068.472.256,00	19.267.770.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	19.354.392.256,00	18.638.024.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.289.297.256,00	18.572.929.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	714.080.000,00	629.745.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	646.435.000,00	564.530.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	67.645.000,00	65.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000,00	1.092.604.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	978.689.800,00	974.407.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	978.689.800,00	974.407.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	118.207.200,00	118.197.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	118.207.200,00	118.197.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000,00	968.397.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	620.902.000,00	617.539.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	620.902.000,00	617.539.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	352.080.000,00	350.858.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	352.080.000,00	350.858.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	563.249.280.950,68	526.919.146.356,00	377.309.070.992,32	350.866.307.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	563.249.280.950,68	526.919.146.356,00	377.309.070.992,32	350.866.307.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	107.643.606.259,90	101.799.999.054,00	6.208.156.230,00	6.008.652.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.513.230.000,00	3.368.693.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.450.000,00	25.543.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.800.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.800.000,00	16.269.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.680.000,00	54.725.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.016.590.000,00	958.878.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000,00	59.626.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.240.000,00	42.473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2.229.070.000,00	2.163.137.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.409.785.000,00	52.256.407.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.500.000.000,00	50.519.285.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.727.135.000,00	1.555.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.350.000,00	78.895.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.580.000,00	17.416.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.580.000,00	18.513.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.740.000,00	12.682.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.920.000,00	51.901.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.480.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.528.500,00	164.016.937,00	93.930.000,00	90.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.426.000,00	9.842.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	38.840.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.462.500,00	111.974.250,00	93.930.000,00	90.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.526.000,00	134.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.376.000,00	23.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.150.000,00	111.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.643.700,00	2.217.908.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.927.000,00	87.426.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	728.617.000,00	637.112.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.648.000,00	73.513.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.294.000,00	208.775.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.581.700,00	105.752.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	57.791.000,00	56.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	300.000.000,00	280.327.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	189.972.000,00	157.337.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.173.000,00	575.541.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.640.000,00	35.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.151.248,00	274.469.930,00	5.623.226.230,00	5.431.708.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	360.000,00	0,00	85.961.000,00	57.950.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.528.248,00	20.207.550,00	4.118.670.230,00	3.980.386.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	300.000.000,00	291.865.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	277.783.000,00	254.262.380,00	1.020.000.000,00	1.003.928.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480.000,00	0,00	98.595.000,00	97.578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.599.613.471,90	28.434.995.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.817.912.011,90	5.615.277.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.140.000,00	218.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.552.561.460,00	22.601.290.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.928.128.340,00	14.949.320.464,00	491.000.000,00	486.867.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	896.803.000,00	697.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.197.700.840,00	5.735.159.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5.679.960.400,00	5.513.331.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	631.106.000,00	582.145.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.850.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.872.869.100,00	1.832.320.476,00	491.000.000,00	486.867.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.160.000,00	144.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	476.679.000,00	421.165.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	72.009.158.682,00	68.003.628.246,00	82.595.696.950,00	73.497.158.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.484.746.932,00	46.697.465.808,00	25.095.308.870,00	23.508.355.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	208.506.000,00	144.873.877,00	19.483.022.800,00	17.937.252.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	25.103.637.932,00	23.740.578.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	323.670.000,00	224.711.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	3.670.435.000,00	3.543.403.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	13.592.955.100,00	12.837.321.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	2.732.043.900,00	2.396.127.497,00	62.620.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	63.062.000,00	46.296.984,00	2.300.271.000,00	2.300.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	3.790.437.000,00	3.764.152.013,00	3.249.395.070,00	3.210.831.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.524.411.750,00	21.306.162.438,00	57.500.388.080,00	49.988.803.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	594.330.000,00	499.412.607,00	51.111.245.080,00	43.695.203.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	19.218.562.100,00	18.196.659.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	583.005.650,00	560.487.611,00	797.686.000,00	715.461.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	1.471.306.000,00	1.407.769.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	657.208.000,00	641.833.451,00	5.591.457.000,00	5.578.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.374.972.600,00	3.835.655.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.374.972.600,00	3.835.655.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	12.910.000,00	8.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	887.922.000,00	811.071.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.052.712.000,00	1.831.713.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.421.428.600,00	1.184.086.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	370.462.000,00	257.287.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	370.462.000,00	257.287.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	12.850.000,00	9.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	357.612.000,00	247.303.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.422.792.000,00	1.339.338.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.422.792.000,00	1.339.338.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	13.600.000,00	9.203.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.409.192.000,00	1.330.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79.347.974.638,00	71.683.919.095,00	14.596.016.900,00	13.874.515.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	79.347.974.638,00	71.683.919.095,00	14.596.016.900,00	13.874.515.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	26.320.000,00	26.276.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	29.260.000,00	28.251.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.821.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	42.116.834.500,00	38.529.337.863,00	14.596.016.900,00	13.874.515.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	37.145.560.138,00	33.071.232.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	506.596.400,00	505.588.246,00	1.067.659.418,00	1.067.659.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	506.596.400,00	505.588.246,00	1.067.659.418,00	1.067.659.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	1.014.600.298,00	1.014.600.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	506.596.400,00	505.588.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	53.059.120,00	53.059.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	290.564.616.070,78	272.995.442.508,00	271.670.500.494,32	255.257.309.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	290.564.616.070,78	272.995.442.508,00	271.670.500.494,32	255.257.309.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	3.818.644.350,00	3.394.040.716,00	5.673.525.000,00	5.126.346.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5.856.687.207,10	5.672.060.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0029	Pelebaran Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	52.768.832.400,00	50.117.750.619,00	56.816.563.000,00	54.134.872.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	448.904.000,00	360.901.245,00	21.276.646.000,00	20.206.600.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	253.502.000,00	230.997.130,00	32.484.113.000,00	30.688.502.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	72.779.796.956,00	71.470.479.151,00	200.000.000,00	189.442.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	45.930.000,00	43.668.580,00	29.238.177.000,00	28.982.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	62.999.616.757,68	62.030.287.413,00	15.474.992.080,00	15.325.251.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	172.880.000,00	150.206.600,00	27.113.901.000,00	24.637.701.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11.677.473.400,00	11.473.044.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	79.300.047.000,00	67.639.321.639,00	83.392.583.414,32	75.965.907.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	442.302.000,00	412.684.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.169.180.500,00	2.813.508.754,00	1.171.041.000,00	1.161.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	687.904.500,00	662.111.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	316.615.500,00	299.387.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	284.122.000,00	281.359.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	87.167.000,00	81.364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.758.553.000,00	1.469.978.740,00	1.171.041.000,00	1.161.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	481.344.000,00	400.606.400,00	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	802.913.000,00	601.668.485,00	546.041.000,00	536.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	474.296.000,00	467.703.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	722.723.000,00	681.418.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	305.734.000,00	285.365.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	146.344.000,00	138.704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	270.645.000,00	257.348.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.835.421.800,00	3.684.779.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.413.450.000,00	1.358.311.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	45.342.000,00	34.829.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	19.814.000,00	15.653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	25.528.000,00	19.176.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	270.309.000,00	256.456.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.442.000,00	106.920.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	155.867.000,00	149.536.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	2.106.320.800,00	2.035.181.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	1.657.444.800,00	1.626.940.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	448.876.000,00	408.241.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	514.041.908.386,00	503.272.717.514,00	6.202.596.000,00	5.837.303.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	514.041.908.386,00	503.272.717.514,00	6.202.596.000,00	5.837.303.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.019.526.399,00	28.036.399.226,00	2.314.966.000,00	2.084.085.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.652.720.000,00	2.501.605.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.800.000,00	132.461.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	14.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	46.291.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000.000,00	358.112.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	850.000.000,00	826.963.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.400.000,00	95.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.014.520.000,00	986.347.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.527.725.750,00	16.989.307.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.297.600.000,00	15.806.990.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.960.000,00	523.969.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.203.750,00	340.179.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	9.999.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.430.000,00	100.429.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	9.999.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	189.532.000,00	187.748.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	9.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.332.500,00	204.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	120.000.000,00	99.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.332.500,00	104.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.665.500,00	370.987.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	187.625.500,00	176.812.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000,00	16.880.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	112.627.000,00	104.650.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.373.000,00	31.974.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.040.000,00	40.669.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.674.039.429,00	2.524.645.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	182.820.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.596.036,00	637.588.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	77.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.001.964,00	91.495.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	50.708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.218.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	230.000.000,00	225.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.192.223.429,00	1.118.867.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.259.000,00	9.255.000,00	1.914.966.000,00	1.685.744.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.259.000,00	9.255.000,00	1.914.966.000,00	1.685.744.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.728.673.720,00	3.454.258.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000,00	431.150.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.128.673.720,00	2.973.133.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.781.110.500,00	1.981.582.125,00	400.000.000,00	398.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.025.000,00	179.150.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.280.000.000,00	723.681.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.085.500,00	271.188.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	825.000.000,00	807.560.966,00	400.000.000,00	398.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.098.258.709,00	31.271.689.615,00	3.887.630.000,00	3.753.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.605.925.000,00	1.559.806.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	240.870.000,00	233.925.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	240.392.000,00	233.578.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	249.740.000,00	236.826.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	240.144.000,00	233.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	249.416.000,00	241.560.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	185.363.000,00	182.797.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	200.000.000,00	197.532.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	531.195.000,00	459.352.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	76.000.000,00	66.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	331.445.000,00	297.775.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	123.750.000,00	95.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	31.843.860.709,00	29.175.453.394,00	3.887.630.000,00	3.753.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.009.650.609,00	2.854.362.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	15.281.790.000,00	14.473.524.140,00	3.887.630.000,00	3.753.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	13.552.420.100,00	11.847.567.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	117.278.000,00	77.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	50.140.000,00	20.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	67.138.000,00	56.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.739.904.557,00	42.608.747.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	864.192.000,00	606.121.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	147.349.000,00	126.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	75.000.000,00	74.242.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	170.839.000,00	135.070.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	324.913.000,00	184.129.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	146.091.000,00	85.864.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	42.875.712.557,00	42.002.626.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.766.680.800,00	14.627.524.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	28.109.031.757,00	27.375.101.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	406.084.192.721,00	401.259.207.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	406.084.192.721,00	401.259.207.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.134.416.000,00	1.979.953.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	403.773.144.221,00	399.157.149.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	176.632.500,00	122.103.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000,00	96.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	100.026.000,00	96.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	100.026.000,00	96.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	61.288.092.202,00	55.945.450.948,00	679.348.000,00	569.837.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.480.093.280,00	33.674.686.177,00	282.815.000,00	209.742.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.801.733.280,00	30.952.648.394,00	191.355.000,00	119.665.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.383.600,00	203.717.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.557.000,00	22.768.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.700.000,00	2.971.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.350.000,00	26.118.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.720.000,00	104.696.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.682.600,00	16.397.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.674.000,00	22.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.015.560.000,00	22.438.779.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.730.200.000,00	22.157.251.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.360.000,00	261.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.596.700,00	385.332.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.896.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.444.700,00	357.284.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.740,00	0,00	191.355.000,00	119.665.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.740,00	0,00	191.355.000,00	119.665.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.075.675.240,00	6.909.668.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.273.000,00	1.015.150.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	928.367.000,00	907.057.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.906.000,00	60.174.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	47.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.480.339.000,00	1.867.777.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.418.767.000,00	1.302.159.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	38.000.000,00	30.759.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,00	9.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	5.000.000,00	4.049.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15.000.000,00	13.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	371.516.000,00	332.520.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	356.800.000,00	351.510.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	69.880.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	517.451.000,00	491.121.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	465.747.000,00	229.357.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	187.599.000,00	124.979.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30.336.000,00	30.156.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	163.634.000,00	37.494.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	20.946.000,00	12.621.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	19.980.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.720.000,00	14.599.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	27.532.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	595.825.000,00	336.260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	189.864.000,00	47.048.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	5.000.000,00	2.859.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	144.243.000,00	106.171.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	158.450.000,00	148.771.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	98.268.000,00	31.408.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.198.021.000,00	854.260.522,00	91.460.000,00	90.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	2.098.021.000,00	758.761.922,00	91.460.000,00	90.076.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80.000.000,00	51.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5.000.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.000.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	325.000.000,00	2.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	5.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5.000.000,00	826.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00	826.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	908.166.000,00	59.836.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00	826.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	190.968.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	521.315.000,00	415.123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	5.000.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	7.210.000,00	7.210.000,00	42.790.000,00	42.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.330.000,00	1.330.000,00	48.670.000,00	47.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000,00	95.498.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	40.000.000,00	39.882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	40.000.000,00	37.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20.000.000,00	17.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.807.998.922,00	22.270.764.771,00	396.533.000,00	360.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.547.869.122,00	19.020.507.542,00	396.533.000,00	360.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.032.000,00	184.546.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.130.000,00	15.018.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.070.000,00	3.997.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.070.000,00	3.705.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000,00	3.335.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.400.000,00	3.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.632.000,00	23.999.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.006.000,00	62.966.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	24.397.000,00	22.482.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.927.000,00	45.861.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.017.730.000,00	13.009.265.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.674.600.000,00	12.739.658.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.800.000,00	258.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	1.974.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.150.000,00	1.087.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.660.000,00	2.638.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.520.000,00	4.474.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000,00	480.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	480.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.388.000,00	324.194.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.360.000,00	8.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	43.443.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.826.000,00	10.562.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.940.000,00	52.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.104.000,00	41.108.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.958.000,00	160.447.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	396.533.000,00	360.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	396.533.000,00	360.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.912.554.871,00	3.721.968.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	444.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.874.851,00	418.505.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.022.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.413.208.020,00	3.297.018.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.067.854.251,00	1.773.222.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.955.000,00	184.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.260.907.000,00	1.063.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.660.000,00	357.379.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.000.000,00	143.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.332.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.599.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.260.129.800,00	3.250.257.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	587.384.000,00	570.004.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	587.384.000,00	570.004.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.639.271.400,00	1.589.139.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	88.857.100,00	76.605.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	251.870.800,00	247.621.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	235.800.000,00	232.093.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	64.913.000,00	64.748.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	376.961.500,00	369.354.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	620.869.000,00	598.716.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	974.961.000,00	264.461.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.310.000,00	37.280.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	66.104.000,00	58.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	819.417.000,00	122.727.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	47.130.000,00	45.471.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.058.513.400,00	826.652.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	698.301.400,00	598.851.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	84.620.000,00	81.103.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	16.192.000,00	7.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	37.494.000,00	20.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	105.588.000,00	36.146.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	30.444.000,00	18.304.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	40.299.000,00	34.028.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	19.265.000,00	14.077.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	26.310.000,00	15.975.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	71.206.616.562,00	68.412.592.346,72	933.329.000,00	916.623.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	71.206.616.562,00	68.412.592.346,72	933.329.000,00	916.623.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.072.069.062,00	30.462.529.468,72	933.329.000,00	916.623.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	540.859.000,00	458.108.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.226.000,00	175.620.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.345.000,00	23.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.590.000,00	38.897.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.600.000,00	44.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	56.119.000,00	52.190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.694.000,00	40.254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	17.250.000,00	13.994.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.734.170.000,00	18.630.255.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.110.000.000,00	18.015.828.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	564.810.000,00	556.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.687.000,00	44.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.696.000,00	8.527.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.378.000,00	1.335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.218.000,00	1.180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.228.000,00	1.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.153.000,00	1.116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.756.000,00	62.300.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	44.766.000,00	43.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	10.238.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.990.000,00	8.956.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.129.000,00	221.316.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	107.450.000,00	107.066.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.344.000,00	111.829.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.335.000,00	2.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.035.695.300,00	1.885.042.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.142.300,00	97.965.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.707.000,00	147.187.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.088.000,00	80.200.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.544.000,00	187.670.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.343.164.000,00	1.251.417.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.310.000,00	109.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.146.000,00	118.317.343,00	841.295.000,00	825.230.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	209.384.000,00	204.068.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.146.000,00	118.317.343,00	631.911.000,00	621.162.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.503.322.200,00	4.294.597.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.050.500,00	534.180.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.346.000,00	92.372.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.808.925.700,00	3.668.044.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.836.991.562,00	4.792.589.968,72	92.034.000,00	91.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.230.000,00	109.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493.360.000,00	478.125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.029.000,00	191.071.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315.134.000,00	309.715.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.717.238.562,00	3.704.079.840,72	92.034.000,00	91.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.293.911.000,00	1.176.744.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	114.010.000,00	113.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	114.010.000,00	113.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.179.901.000,00	1.063.460.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	301.875.000,00	297.374.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	498.162.000,00	402.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	189.202.000,00	181.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	190.662.000,00	182.354.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000,00	72.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	75.000.000,00	72.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	75.000.000,00	72.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.338.917.500,00	8.520.493.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.594.405.000,00	2.331.420.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	918.800.000,00	799.148.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	113.270.000,00	104.333.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	28.326.000,00	19.707.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	603.568.000,00	558.130.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.659.000,00	20.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	506.587.000,00	475.635.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	218.272.000,00	203.702.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	107.208.000,00	97.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.830.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.830.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	59.055.000,00	38.513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.844.305.000,00	1.782.245.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	803.289.000,00	789.352.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	71.095.000,00	64.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	68.748.000,00	67.615.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	54.224.000,00	50.537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	398.273.000,00	373.980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	11.087.000,00	10.753.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	279.375.000,00	278.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.679.000,00	24.410.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.491.000,00	14.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	46.464.000,00	44.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.114.617.000,00	2.977.687.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.681.940.000,00	1.653.533.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	278.962.000,00	261.729.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	115.330.000,00	108.260.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	387.950.000,00	381.108.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	234.019.000,00	193.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	182.636.000,00	165.939.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	37.068.000,00	37.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.977.000,00	5.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27.216.000,00	16.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.826.000,00	21.345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.455.000,00	15.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	57.238.000,00	54.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.365.612.000,00	1.034.908.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	437.500.000,00	197.409.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	208.728.000,00	188.091.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	8.520.000,00	7.147.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	11.050.000,00	9.468.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	22.455.000,00	20.710.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	526.257.000,00	473.341.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	3.766.000,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	17.946.000,00	17.203.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	419.978.500,00	394.230.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	264.250.000,00	248.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	149.858.500,00	140.180.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	25.924.337.000,00	25.890.910.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000,00	42.625.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	25.000.000,00	21.312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	25.000.000,00	21.312.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	25.874.337.000,00	25.848.285.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.128.867.000,00	20.126.386.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	56.288.000,00	56.082.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.689.182.000,00	5.665.816.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.502.382.000,00	2.289.131.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.502.382.000,00	2.289.131.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.712.551.000,00	1.550.638.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	119.200.000,00	118.674.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	298.120.000,00	249.808.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	262.450.000,00	261.065.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	110.061.000,00	108.944.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	73.504.705.012,00	69.386.493.190,00	8.692.214.539,00	7.780.945.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	73.504.705.012,00	69.386.493.190,00	8.692.214.539,00	7.780.945.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	73.504.705.012,00	69.386.493.190,00	8.692.214.539,00	7.780.945.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61.090.678.973,00	58.142.567.961,00	8.692.214.539,00	7.780.945.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	751.835.500,00	648.788.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.360.500,00	47.538.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.360.000,00	44.368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.400.000,00	20.368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.360.000,00	45.008.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.400.000,00	20.368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.775.000,00	20.626.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.085.000,00	56.081.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	136.175.000,00	136.067.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.560.000,00	54.718.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	17.075.000,00	10.740.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	222.285.000,00	192.902.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.822.758.100,00	43.751.864.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.128.400.000,00	43.289.772.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	598.680.000,00	407.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.320.000,00	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.356.600,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.167.500,00	9.695.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.655.000,00	13.525.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.549.000,00	5.706.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.753.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.753.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.643.000,00	174.293.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.643.000,00	174.293.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.586.999.150,00	1.295.237.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.510.000,00	71.210.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.071.000,00	408.907.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.001.000,00	65.120.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.994.150,00	222.037.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.223.000,00	94.460.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	237.450.000,00	180.540.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.750.000,00	214.241.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	38.717.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.696.500,00	22.435.098,00	5.708.624.670,00	5.442.081.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	3.150.000.000,00	3.058.556.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.696.500,00	22.435.098,00	2.558.624.670,00	2.383.525.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.839.677.623,00	9.808.834.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.405.032.983,00	4.807.313.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.185.000,00	414.799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.898.459.640,00	4.586.722.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.847.316.100,00	2.436.914.724,00	2.983.589.869,00	2.338.863.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.896.000,00	37.816.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.261.776.100,00	1.009.723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	514.284.000,00	416.719.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	997.360.000,00	972.655.336,00	2.983.589.869,00	2.338.863.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	179.330.600,00	126.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	179.330.600,00	126.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	69.309.600,00	50.634.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	65.051.000,00	46.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	44.970.000,00	28.924.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.421.530.839,00	7.839.819.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.924.508.839,00	7.387.105.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.044.123.839,00	6.561.467.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	842.480.000,00	788.292.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	37.905.000,00	37.345.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	255.735.000,00	238.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	255.735.000,00	238.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	171.996.000,00	151.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	171.996.000,00	151.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	69.291.000,00	62.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	69.291.000,00	62.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	987.889.600,00	813.172.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	522.249.600,00	468.375.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	51.835.000,00	47.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	74.720.000,00	69.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150.630.000,00	144.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	53.259.800,00	49.086.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	114.630.000,00	107.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	77.174.800,00	50.074.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	187.870.000,00	109.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	66.880.000,00	57.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	120.990.000,00	51.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	277.770.000,00	235.492.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	138.945.000,00	109.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	67.515.000,00	61.617.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	71.310.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.312.088.000,00	2.083.134.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	249.948.000,00	236.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	65.020.800,00	62.904.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	66.405.200,00	63.344.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	118.522.000,00	110.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	995.000.000,00	919.174.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	215.052.000,00	203.520.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	7.148.100,00	7.084.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	765.707.900,00	701.477.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1.067.140.000,00	927.249.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	861.862.000,00	742.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	205.278.000,00	184.822.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	513.187.000,00	381.391.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	513.187.000,00	381.391.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	181.070.000,00	137.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	55.000.000,00	31.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	277.117.000,00	212.093.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.944.421.769,00	29.081.261.799,00	255.394.000,00	170.049.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	32.944.421.769,00	29.081.261.799,00	255.394.000,00	170.049.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.567.204.969,00	20.418.076.866,00	127.911.000,00	127.199.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.115.200,00	241.030.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.074.000,00	23.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.890.000,00	10.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.996.800,00	13.996.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.330.400,00	11.330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.642.000,00	86.487.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.792.500,00	17.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	8.204.000,00	8.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.645.000,00	28.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.863.500,00	2.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	15.709.000,00	15.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	10.938.000,00	10.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.957.600.000,00	17.107.767.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.444.400.000,00	16.760.449.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.200.000,00	281.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.212.000,00	2.211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.480.000,00	10.479.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	45.440.000,00	45.439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.780.000,00	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.779.719,00	12.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.179.000,00	5.893.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.154.000,00	4.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.446.719,00	2.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.174.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.285.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	370.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.519.000,00	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.991.960,00	669.676.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.038.000,00	11.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.418.700,00	185.130.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.384.000,00	97.252.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.439.000,00	115.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.244.260,00	69.104.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.155.000,00	29.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.008.000,00	132.004.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.848.000,00	1.095.000,00	127.911.000,00	127.199.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.338.000,00	1.095.000,00	125.952.000,00	125.240.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.000,00	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.752.810.090,00	1.527.735.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	741.980.950,00	661.469.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.829.140,00	866.265.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.886.000,00	852.302.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.410.000,00	38.298.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.818.000,00	459.657.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.360.000,00	106.507.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253.298.000,00	247.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.660.013.000,00	3.517.147.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	322.255.000,00	289.711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	66.678.500,00	63.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	115.422.000,00	108.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	140.154.500,00	118.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.513.134.000,00	1.448.983.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.493.384.000,00	1.436.033.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	19.750.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.824.624.000,00	1.778.452.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	22.664.000,00	17.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.768.118.000,00	1.728.146.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	33.842.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.210.142.500,00	1.085.579.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	576.820.000,00	573.071.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	576.820.000,00	573.071.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.416.500,00	114.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90.328.000,00	53.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	140.088.500,00	61.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	402.906.000,00	397.914.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	371.850.000,00	370.810.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.056.000,00	27.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.867.656.800,00	1.737.172.056,00	43.024.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	27.435.000,00	23.758.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	24.110.000,00	20.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.378.379.000,00	1.282.098.556,00	43.024.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.378.379.000,00	1.282.098.556,00	43.024.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	461.842.800,00	431.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	461.842.800,00	431.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	81.813.000,00	74.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	81.813.000,00	74.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	50.685.000,00	45.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	31.128.000,00	29.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.440.091.000,00	1.373.383.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	248.080.000,00	242.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	225.250.000,00	220.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	22.830.000,00	21.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1.192.011.000,00	1.131.278.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1.131.325.000,00	1.071.792.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	40.474.000,00	39.273.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	20.212.000,00	20.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.117.500.500,00	874.989.089,00	84.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	586.624.000,00	556.699.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	455.980.000,00	432.859.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	8.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	122.544.000,00	116.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	380.176.500,00	173.874.000,00	84.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	113.496.000,00	56.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	266.680.500,00	117.579.000,00	84.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.700.000,00	144.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	42.034.000,00	39.629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	8.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	86.750.000,00	83.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.538.601.750,00	24.335.841.872,00	239.820.000,00	231.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	26.538.601.750,00	24.335.841.872,00	239.820.000,00	231.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.097.875.150,00	18.403.392.597,00	239.820.000,00	231.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.415.000,00	251.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.195.000,00	77.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.240.000,00	47.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	17.584.000,00	17.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.546.000,00	25.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.731.508.000,00	15.216.612.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.431.300.000,00	14.916.404.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	262.200.000,00	262.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.114.600,00	709.736.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.278.000,00	21.372.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.340.600,00	206.759.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.859.000,00	194.221.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.935.000,00	59.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.420.000,00	17.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.486.000,00	203.882.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	239.820.000,00	231.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	239.820.000,00	231.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.119.550,00	1.530.955.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	567.636.000,00	504.989.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.643.550,00	1.022.125.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.118.000,00	679.153.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.207.000,00	393.011.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.951.000,00	89.575.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.960.000,00	196.566.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.890.000,00	32.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	32.890.000,00	32.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	32.890.000,00	32.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.537.511.500,00	4.136.523.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	318.186.000,00	296.273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	53.260.000,00	47.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	29.656.000,00	29.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	41.886.000,00	35.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	28.361.000,00	24.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	81.320.000,00	78.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	83.703.000,00	81.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.469.263.000,00	2.117.629.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	36.864.000,00	32.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	398.239.000,00	350.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.991.150.000,00	1.692.551.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	43.010.000,00	41.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1.750.062.500,00	1.722.619.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.152.229.000,00	1.131.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	576.591.500,00	570.553.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	21.242.000,00	20.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.532.444.800,00	1.428.980.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	56.360.000,00	56.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	56.360.000,00	56.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.476.084.800,00	1.372.720.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.081.693.000,00	987.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	210.590.000,00	204.035.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	141.557.000,00	139.852.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	42.244.800,00	40.895.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	337.880.300,00	334.075.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	337.880.300,00	334.075.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	37.470.000,00	36.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.668.400,00	196.952.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	24.391.900,00	24.227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000,00	384.692.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	468.700.000,00	384.692.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000,00	62.055.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	84.350.000,00	62.055.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	84.350.000,00	62.055.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000,00	150.423.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	184.350.000,00	150.423.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.350.000,00	52.285.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.137.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	172.212.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	172.212.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000,00	85.537.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	86.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	60.432.585.907,00	59.258.896.915,00	2.332.466.898,00	2.319.217.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	60.432.585.907,00	59.258.896.915,00	2.332.466.898,00	2.319.217.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.455.294.407,00	48.365.239.469,00	2.054.687.298,00	2.041.847.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	479.494.000,00	478.077.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.598.000,00	88.292.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.570.000,00	12.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.662.000,00	9.660.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.700.000,00	56.697.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.478.000,00	172.675.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	11.870.000,00	11.806.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.230.000,00	71.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	32.254.000,00	32.252.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.586.078.800,00	35.818.870.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	473.938.800,00	465.067.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.880.000,00	12.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	4.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.580.000,00	13.513.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.480.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	54.953.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	4.957.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.996.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.103.583.500,00	1.082.201.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.055.000,00	50.071.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.556.900,00	365.341.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	472.190.600,00	464.501.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.364.000,00	36.090.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.167.000,00	132.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	1.811.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.250.000,00	24.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	807.250.702,00	801.773.626,00	1.394.687.298,00	1.384.337.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	764.000,00	762.000,00	161.253.600,00	160.274.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.288.000,00	51.523.126,00	404.611.000,00	401.578.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	754.198.702,00	749.488.500,00	828.822.698,00	822.485.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.251.209.705,00	7.009.415.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.050.939.500,00	1.929.126.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.200.270.205,00	5.080.288.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.164.037.700,00	3.111.306.613,00	660.000.000,00	657.509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.210.000,00	186.703.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	698.331.000,00	686.927.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.488.000,00	62.575.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.548.752.000,00	1.524.932.753,00	660.000.000,00	657.509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.256.700,00	650.167.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000,00	261.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	262.500.000,00	261.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	157.080.000,00	155.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	105.420.000,00	105.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.517.606.500,00	3.478.729.722,00	277.779.600,00	277.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	3.474.306.500,00	3.443.308.796,00	277.779.600,00	277.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42.740.000,00	42.209.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	125.260.000,00	125.259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	2.043.148.500,00	2.034.488.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	771.170.000,00	761.047.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	264.790.000,00	260.908.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	28.950.000,00	26.366.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	35.000.000,00	34.942.330,00	277.779.600,00	277.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	163.248.000,00	158.086.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43.300.000,00	35.420.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	43.300.000,00	35.420.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000,00	93.335.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	93.800.000,00	93.335.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	93.800.000,00	93.335.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000,00	118.558.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	121.550.000,00	118.558.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	45.360.000,00	43.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	76.190.000,00	75.045.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000,00	79.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	82.280.000,00	79.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	82.280.000,00	79.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000,00	41.069.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	41.250.000,00	41.069.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	7.500.000,00	7.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	33.750.000,00	33.623.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000,00	35.629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	35.650.000,00	35.629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.650.000,00	35.629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000,00	109.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	113.635.000,00	109.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	55.720.000,00	53.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	57.915.000,00	56.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	6.243.765.000,00	6.226.882.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	89.850.000,00	83.159.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	971.269.000,00	853.863.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	971.269.000,00	853.863.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	399.217.000,00	340.707.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	26.870.000,00	23.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	26.870.000,00	23.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	327.803.000,00	285.108.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	327.803.000,00	285.108.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	44.544.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	44.544.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	334.593.000,00	279.963.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.949.000,00	30.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	7.815.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	24.134.000,00	24.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	259.082.000,00	216.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	259.082.000,00	216.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	43.562.000,00	33.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	29.932.000,00	23.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	13.630.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	182.841.000,00	178.574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	156.553.000,00	156.424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.833.000,00	146.704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	26.288.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.288.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.618.000,00	54.617.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	54.618.000,00	54.617.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	31.386.000,00	31.385.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	23.232.000,00	23.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.614.788.690,00	21.283.575.048,00	2.145.932.000,00	2.038.006.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.614.788.690,00	21.283.575.048,00	2.145.932.000,00	2.038.006.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.277.455.190,00	15.093.859.879,00	2.145.932.000,00	2.038.006.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.607.300,00	252.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.622.400,00	83.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.473.900,00	85.908.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	74.602.000,00	60.098.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	24.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.083.830.000,00	11.592.777.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.808.100.000,00	11.357.850.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.530.000,00	222.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.379.000,00	2.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.790.000,00	50.455.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.790.000,00	50.455.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	691.964.000,00	428.222.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	48.811.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.354.000,00	129.808.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.606.000,00	27.732.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	55.095.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.800.000,00	27.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.603.800,00	74.423.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.600.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.000.200,00	53.383.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.683.000,00	2.985.240,00	2.145.932.000,00	2.038.006.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	869.000,00	747.500,00	69.291.000,00	67.665.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	871.000,00	724.800,00	1.578.032.000,00	1.570.794.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.943.000,00	1.512.940,00	498.609.000,00	399.546.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.304.189.890,00	2.095.816.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	709.706.000,00	653.382.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.594.483.890,00	1.442.434.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.012.000,00	669.022.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.118.000,00	35.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.160.000,00	343.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.998.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.240.000,00	124.651.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.496.000,00	61.038.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	120.657.200,00	111.031.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	120.657.200,00	111.031.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	22.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.1.01.0002	Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	30.657.200,00	28.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.1.01.0003	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	65.000.000,00	59.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	541.112.000,00	490.409.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.1.01	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	541.112.000,00	490.409.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.1.01.0001	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	216.927.000,00	193.939.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.1.01.0002	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	116.199.000,00	105.483.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.1.01.0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	207.986.000,00	190.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.165.240.000,00	1.069.536.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.165.240.000,00	1.069.536.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	67.372.000,00	61.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0003	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	24.902.000,00	23.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0004	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	24.902.000,00	23.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0005	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	23.958.000,00	22.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0006	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	37.302.000,00	35.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0008	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	464.850.000,00	444.198.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0009	Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	115.548.000,00	98.604.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	120.886.000,00	113.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	92.804.000,00	86.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	40.656.000,00	20.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	33.262.000,00	31.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	39.262.000,00	35.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24.902.000,00	23.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	54.634.000,00	51.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.510.324.300,00	4.518.738.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.510.324.300,00	4.518.738.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	508.872.000,00	430.940.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	803.298.000,00	680.230.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	344.381.000,00	280.126.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	277.943.000,00	234.615.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.736.226.200,00	359.180.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	337.342.000,00	155.036.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.502.262.100,00	2.378.607.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	414.400.000,00	401.894.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	402.276.000,00	391.310.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	71.225.000,00	71.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0005	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	17.461.000,00	17.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	13.715.000,00	12.714.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	28.156.000,00	27.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	258.524.000,00	250.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	13.195.000,00	12.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	12.124.000,00	10.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	12.124.000,00	10.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	439.703.800,00	410.627.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	394.565.400,00	370.589.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	81.729.400,00	73.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	270.164.000,00	256.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.007.000,00	27.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	15.665.000,00	13.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.138.400,00	40.038.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02.0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15.025.000,00	15.024.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	14.698.400,00	13.198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	15.415.000,00	11.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.001.268.100,00	2.956.203.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.227.056.800,00	1.196.875.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.580.800,00	7.549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1.219.476.000,00	1.189.325.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.774.211.300,00	1.759.328.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1.467.226.600,00	1.461.369.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	306.984.700,00	297.958.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	59.981.719.522,00	52.819.377.632,23	25.237.200.300,00	24.371.261.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	59.981.719.522,00	52.819.377.632,23	25.237.200.300,00	24.371.261.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.241.890.320,00	37.645.407.508,33	3.302.027.000,00	3.193.654.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.175.770,00	287.537.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.984.770,00	41.031.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.505.000,00	5.172.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.505.000,00	1.946.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.505.000,00	5.405.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.200.000,00	175.250.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.971.000,00	53.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.720.193.000,00	23.446.736.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.721.990.000,00	22.964.011.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000,00	391.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	63.005.000,00	59.669.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.464.000,00	20.591.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.886.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.100.000,00	20.675.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.100.000,00	20.675.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	74.974.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	74.974.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.548.000,00	635.627.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.130.000,00	58.255.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.000.000,00	257.754.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000,00	108.021.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.820.000,00	68.991.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.902.000,00	78.955.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.696.000,00	26.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000,00	37.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.505.000,00	264.754.287,00	3.256.317.000,00	3.148.710.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.000,00	1.115.000,00	2.548.700.000,00	2.484.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.446.000,00	299.700,00	348.554.000,00	343.645.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.759.000,00	263.339.587,00	359.063.000,00	321.064.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.708.372.550,00	10.672.505.685,00	45.710.000,00	44.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.537.501.200,00	3.724.093.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.170.871.350,00	6.948.412.420,00	45.710.000,00	44.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.342.996.000,00	2.242.595.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	497.930.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.221.230.000,00	1.204.611.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.766.000,00	113.149.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	426.903.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.916.780.230,00	14.545.658.784,90	21.730.021.200,00	20.974.386.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	216.304.000,00	111.991.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	120.388.000,00	98.311.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	95.916.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	8.711.668.972,00	8.208.066.827,00	18.228.298.400,00	17.588.730.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	359.807.800,00	275.955.444,00	2.318.338.200,00	2.272.029.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.868.936.000,00	6.557.750.500,00	15.691.312.000,00	15.103.561.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	305.130.000,00	295.829.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.177.795.172,00	1.078.531.793,00	218.648.200,00	213.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	90.330.630,00	83.165.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	90.330.630,00	83.165.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.358.716.328,00	2.846.961.031,00	472.643.800,00	466.224.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.908.133.128,00	1.510.619.206,00	69.592.000,00	69.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.446.533.200,00	1.336.341.825,00	403.051.800,00	396.960.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	15.560.000,00	8.094.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000,00	5.664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.560.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.521.278.300,00	1.431.628.798,00	3.029.079.000,00	2.919.432.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	52.476.800,00	14.299.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.000.000,00	4.453.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	40.053.000,00	37.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	5.000.000,00	4.533.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1.418.748.500,00	1.371.273.435,00	3.029.079.000,00	2.919.432.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.002.922.000,00	1.855.750.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.000.752.000,00	1.853.822.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.170.000,00	1.928.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	543.674.972,00	393.791.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	297.387.472,00	238.858.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	297.387.472,00	238.858.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	246.287.500,00	154.932.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	246.287.500,00	154.932.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	279.374.000,00	234.520.091,00	205.152.100,00	203.221.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	279.374.000,00	234.520.091,00	205.152.100,00	203.221.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	279.374.000,00	234.520.091,00	205.152.100,00	203.221.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46.175.861.904,00	42.282.469.952,00	6.330.247.000,00	6.181.557.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	46.175.861.904,00	42.282.469.952,00	6.330.247.000,00	6.181.557.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.046.061.075,00	15.718.980.668,00	249.376.000,00	235.953.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.772.800,00	287.072.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.228.000,00	35.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.128.000,00	40.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.622.000,00	81.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	33.910.000,00	33.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.657.800,00	18.157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.929.523.300,00	11.776.307.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.552.263.300,00	11.399.047.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.830.000,00	237.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.190.125,00	4.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.125,00	3.499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.733.100,00	562.754.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.874.400,00	26.782.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.886.800,00	177.135.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.536.000,00	37.358.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.329.900,00	188.844.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.642.000,00	95.319.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	27.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.291.500,00	0,00	249.376.000,00	235.953.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	922.000,00	0,00	169.692.000,00	168.410.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.770.500,00	0,00	72.594.000,00	60.550.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	599.000,00	0,00	7.090.000,00	6.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.644.167.450,00	2.511.156.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	656.350.100,00	566.556.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.987.817.350,00	1.944.600.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.182.800,00	560.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.410.000,00	36.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.808.000,00	416.529.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.816.000,00	6.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.549.000,00	82.457.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.599.800,00	17.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.309.985.829,00	10.074.317.673,00	117.833.000,00	115.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10.309.985.829,00	10.074.317.673,00	117.833.000,00	115.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	22.651.000,00	20.804.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	636.560.000,00	634.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	23.415.000,00	20.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11.280.000,00	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	2.535.323.029,00	2.378.554.894,00	117.833.000,00	115.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	10.800.000,00	10.799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	3.863.474.800,00	3.810.625.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	2.563.415.000,00	2.562.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	314.590.000,00	309.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	313.777.000,00	307.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14.700.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	18.819.815.000,00	16.489.171.611,00	5.963.038.000,00	5.830.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	178.098.000,00	160.256.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	178.098.000,00	160.256.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	18.641.717.000,00	16.328.915.011,00	5.963.038.000,00	5.830.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	7.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	10.000.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.267.400.000,00	2.261.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	15.900.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	5.360.000,00	4.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	9.420.000,00	8.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	14.056.000,00	11.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	9.900.000,00	6.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	9.290.000,00	5.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	14.713.347.000,00	12.480.113.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	3.650.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	17.100.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.459.902.000,00	1.411.843.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	95.942.000,00	89.951.200,00	5.963.038.000,00	5.830.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	33.890.056.802,00	30.078.740.493,00	595.789.000,00	576.314.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	33.890.056.802,00	30.078.740.493,00	595.789.000,00	576.314.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.926.135.652,00	17.494.404.027,00	595.789.000,00	576.314.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	706.425.600,00	514.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.706.000,00	43.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.889.000,00	8.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.974.400,00	7.659.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.897.200,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.869.000,00	4.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.020.000,00	43.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	361.515.000,00	289.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.625.000,00	43.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	102.930.000,00	71.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.402.970.000,00	12.644.979.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.058.000.000,00	12.360.309.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	329.970.000,00	271.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.885.000,00	7.880.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.925.000,00	84.599.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.250.000,00	54.739.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.230.000,00	9.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.399.720,00	626.759.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.314.000,00	22.294.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.414.000,00	183.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.430.000,00	19.395.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.350.000,00	105.213.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.921.000,00	68.902.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.536.000,00	216.214.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.434.720,00	11.434.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.666.052,00	0,00	595.789.000,00	576.314.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	50.958.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.666.052,00	0,00	544.831.000,00	527.589.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.798.425.280,00	2.465.103.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.375.000,00	483.601.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.346.000,00	2.211.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.080.704.280,00	1.979.290.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.256.324.000,00	1.152.830.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.605.000,00	251.391.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.421.000,00	298.429.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.918.000,00	82.887.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.400.000,00	277.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.580.000,00	47.144.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.400.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.440.284.100,00	3.961.163.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	3.284.454.100,00	2.975.642.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.155.830.000,00	985.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.155.830.000,00	985.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	896.062.540,00	841.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	896.062.540,00	841.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	896.062.540,00	841.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.474.939.910,00	1.330.801.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.474.939.910,00	1.330.801.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	480.211.610,00	436.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	194.193.900,00	176.786.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	800.534.400,00	717.051.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.365.209.000,00	2.222.698.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.365.209.000,00	2.222.698.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	190.754.000,00	187.471.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	686.580.000,00	667.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	400.000.000,00	366.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	494.220.000,00	452.129.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	547.700.000,00	506.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	45.955.000,00	43.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.787.425.600,00	4.228.196.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.787.425.600,00	4.228.196.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.601.837.600,00	4.050.825.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKMrn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	185.588.000,00	177.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.072.909.676,00	25.598.989.896,00	1.633.490.000,00	1.292.780.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.072.909.676,00	25.598.989.896,00	1.633.490.000,00	1.292.780.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.657.348.396,00	19.946.541.994,00	1.633.490.000,00	1.292.780.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.600.000,00	51.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.200.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.700.000,00	1.649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.700.000,00	1.649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.400.084.000,00	17.240.095.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.116.200.000,00	16.956.231.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	274.820.000,00	274.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.468.000,00	4.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.596.000,00	4.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.700.000,00	7.633.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.700.000,00	7.633.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.566.000,00	214.439.814,00	64.179.000,00	63.444.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.700.000,00	10.735.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.056.000,00	66.378.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.050.000,00	3.670.000,00	64.179.000,00	63.444.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.682.000,00	26.314.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.078.000,00	98.841.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.242.400,00	8.880.000,00	1.569.311.000,00	1.229.336.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	709.711.000,00	661.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.242.400,00	8.880.000,00	859.600.000,00	568.036.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.833.803.996,00	1.592.117.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.284.686,00	212.477.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.595.519.310,00	1.379.640.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.352.000,00	831.868.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.460.000,00	196.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.960.000,00	135.266.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.708.000,00	73.914.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	630.224.000,00	426.206.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	641.597.000,00	568.664.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	275.000.000,00	210.053.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	275.000.000,00	210.053.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	366.597.000,00	358.610.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	366.597.000,00	358.610.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.318.949.800,00	2.175.094.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.318.949.800,00	2.175.094.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.918.949.800,00	1.787.331.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	400.000.000,00	387.762.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.567.280,00	1.690.557.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.995.567.280,00	1.690.557.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	700.000.000,00	584.275.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.045.520.000,00	889.171.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250.047.280,00	217.110.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.207.200,00	1.026.703.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.264.207.200,00	1.026.703.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	120.873.000,00	54.862.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.710.000,00	43.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1.082.624.200,00	928.421.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	195.240.000,00	191.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	195.240.000,00	191.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	195.240.000,00	191.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52.914.859.700,00	49.979.122.624,00	791.151.000,00	743.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	52.914.859.700,00	49.979.122.624,00	791.151.000,00	743.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.838.578.500,00	19.850.292.568,00	10.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	666.213.000,00	580.787.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.746.400,00	56.456.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.312.000,00	15.135.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.506.000,00	13.318.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.287.000,00	6.220.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.055.000,00	6.959.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.902.400,00	36.534.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.940.000,00	263.891.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	22.406.000,00	19.431.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.275.800,00	31.487.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	186.782.400,00	131.349.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.575.512.500,00	14.237.522.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.218.800.000,00	13.902.634.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.732.500,00	314.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.200.000,00	6.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.100.000,00	3.035.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.610.000,00	6.217.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.620.000,00	1.594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.708.680,00	639.620.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.655.000,00	17.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.992.680,00	88.627.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.766.000,00	71.059.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357.420.000,00	325.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.800.000,00	37.123.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.840.000,00	9.081.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.235.000,00	91.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.227.540,00	0,00	10.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.227.540,00	0,00	10.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.031.850.980,00	2.760.978.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.018.984.180,00	911.038.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.012.866.800,00	1.849.939.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.565.600,00	1.631.383.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.409.800,00	58.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	986.296.000,00	831.631.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.439.800,00	57.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	705.420.000,00	684.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	909.746.800,00	858.306.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	305.513.300,00	271.530.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	57.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	67.072.200,00	59.233.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	180.000.000,00	159.797.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	604.233.500,00	586.775.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	604.233.500,00	586.775.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	29.916.534.400,00	29.024.816.617,00	780.715.000,00	743.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.860.689.800,00	1.758.224.481,00	780.715.000,00	743.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1.233.374.900,00	1.171.366.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	627.314.900,00	586.857.550,00	780.715.000,00	743.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	6.497.155.600,00	6.459.001.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.957.917.000,00	5.658.200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	46.546.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	1.672.001.000,00	1.663.858.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	66.724.000,00	61.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	4.172.646.000,00	3.889.762.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	15.600.772.000,00	15.149.390.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	15.543.708.000,00	15.111.134.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	57.064.000,00	38.255.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	245.706.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000,00	245.706.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	250.000.000,00	245.706.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	470.189.000,00	464.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	470.189.000,00	464.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	470.189.000,00	464.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	470.189.000,00	464.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	20.250.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	417.864.000,00	417.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	16.335.000,00	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	15.740.000,00	14.626.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	485.676.000,00	466.856.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	485.676.000,00	466.856.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	485.676.000,00	466.856.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	471.276.000,00	453.756.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	28.800.000,00	24.399.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	31.340.000,00	26.399.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	382.076.000,00	375.193.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	29.060.000,00	27.763.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	14.400.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	14.400.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.785.594.600,00	7.377.736.491,00	188.587.000,00	172.015.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.785.594.600,00	7.377.736.491,00	188.587.000,00	172.015.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	376.980.400,00	328.999.228,00	40.000.000,00	30.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.072.000,00	14.150.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.072.000,00	14.150.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	40.000.000,00	30.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	40.000.000,00	30.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.908.400,00	275.721.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.822.100,00	66.071.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.900.000,00	209.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	39.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.435.850.700,00	3.325.831.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	524.413.100,00	511.456.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	276.830.600,00	268.881.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	237.582.500,00	232.658.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	10.000.000,00	9.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	889.316.200,00	858.343.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	660.400.000,00	645.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	102.483.400,00	99.883.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	126.432.800,00	113.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.022.121.400,00	1.956.031.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.799.149.500,00	1.755.720.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	212.971.900,00	190.971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	9.340.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.283.909.300,00	1.258.011.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	164.830.000,00	162.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	54.400.000,00	54.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	110.430.000,00	108.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.065.517.000,00	1.046.062.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	115.000.000,00	113.428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	200.947.000,00	195.218.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	499.246.000,00	492.038.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	250.324.000,00	245.377.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	53.562.300,00	49.235.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	22.353.400,00	19.345.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	31.208.900,00	29.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.688.854.200,00	2.464.894.194,00	148.587.000,00	141.059.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.688.854.200,00	2.464.894.194,00	148.587.000,00	141.059.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2.172.959.200,00	2.032.174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	307.378.700,00	228.211.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	32.346.300,00	31.257.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	25.618.000,00	25.142.000,00	124.175.000,00	117.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	150.552.000,00	148.108.500,00	24.412.000,00	23.709.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	24.876.865.400,00	23.454.539.583,00	1.634.640.000,00	1.595.275.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24.876.865.400,00	23.454.539.583,00	1.634.640.000,00	1.595.275.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.929.652.100,00	21.749.597.235,00	1.032.620.000,00	1.024.391.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.841.000,00	164.442.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.809.000,00	8.808.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.063.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.635.000,00	5.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.635.000,00	5.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.064.000,00	9.029.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.693.000,00	57.373.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.452.200,00	23.281.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.196.800,00	44.340.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.595.720.000,00	15.928.798.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.285.600.000,00	15.641.668.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	275.520.000,00	252.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.250.000,00	70.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.250.000,00	55.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.137.000,00	645.174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.113.000,00	16.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.849.000,00	154.812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.445.000,00	58.639.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.428.000,00	154.302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.404.000,00	101.169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.658.000,00	157.153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.240.000,00	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.384.400,00	0,00	1.032.620.000,00	1.024.391.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	783.892.000,00	779.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.384.400,00	0,00	248.728.000,00	245.171.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.132.123.700,00	2.773.194.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.516.104.000,00	1.367.431.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.499.000,00	241.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.361.520.700,00	1.163.930.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.295.196.000,00	2.167.551.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.270.000,00	196.451.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.740.000,00	432.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.584.000,00	233.967.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.344.602.000,00	1.305.119.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.947.213.300,00	1.704.942.348,00	602.020.000,00	570.884.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.159.194.300,00	983.233.468,00	602.020.000,00	570.884.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	319.292.000,00	219.936.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	403.065.300,00	352.401.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	284.338.000,00	272.774.051,00	602.020.000,00	570.884.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	152.499.000,00	138.121.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	788.019.000,00	721.708.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	712.240.000,00	653.008.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	56.774.000,00	51.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	19.005.000,00	17.144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.415.811.700,00	1.242.141.705,00	4.170.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.415.811.700,00	1.242.141.705,00	4.170.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	866.475.700,00	753.152.076,00	4.170.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	417.460.700,00	335.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	71.850.800,00	54.303.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	140.080.800,00	110.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	205.529.100,00	171.284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	298.489.000,00	274.591.900,00	4.170.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	40.018.000,00	38.916.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	258.471.000,00	235.675.000,00	4.170.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	150.526.000,00	142.590.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150.526.000,00	142.590.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	549.336.000,00	488.989.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	124.412.000,00	108.211.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	50.000.000,00	42.959.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	74.412.000,00	65.252.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	424.924.000,00	380.778.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	372.584.000,00	345.461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	52.340.000,00	35.316.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.112.271.260,00	48.449.151.547,00	3.298.368.000,00	1.880.813.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52.112.271.260,00	48.449.151.547,00	3.298.368.000,00	1.880.813.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52.112.271.260,00	48.449.151.547,00	3.298.368.000,00	1.880.813.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.218.933.360,00	40.359.942.368,00	1.753.615.000,00	1.290.813.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.818.000,00	356.493.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.824.000,00	58.877.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.310.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.010.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.739.000,00	33.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.680.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	239.295.000,00	210.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.126.622.000,00	29.650.985.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.613.200.000,00	29.154.060.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	454.800.000,00	441.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.913.000,00	10.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.186.000,00	17.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.693.000,00	9.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.090.000,00	15.102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.210.000,00	9.342.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.280.000,00	15.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.280.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.441.260.800,00	1.300.424.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	158.872.000,00	157.299.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	647.349.800,00	559.803.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	189.658.000,00	186.126.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.900.000,00	181.138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.380.000,00	99.565.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.101.000,00	116.491.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.020.000,00	10.984.000,00	1.753.615.000,00	1.290.813.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.773.000,00	4.122.000,00	310.711.000,00	122.628.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.333.000,00	948.000,00	162.472.000,00	158.781.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.914.000,00	5.914.000,00	665.432.000,00	662.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	615.000.000,00	347.177.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.998.805.460,00	5.929.291.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.959.104.540,00	1.438.448.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.375.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.028.325.920,00	4.479.593.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.187.037.100,00	3.080.880.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.628.350,00	517.379.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.135.376.000,00	962.620.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	322.157.650,00	313.703.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.104.875.100,00	1.287.178.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	669.362.500,00	625.185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	360.384.000,00	343.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	108.678.000,00	100.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	168.642.000,00	160.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	83.064.000,00	81.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	56.267.500,00	52.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	29.680.000,00	27.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	26.587.500,00	24.957.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	252.711.000,00	229.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	86.350.000,00	83.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	86.824.000,00	81.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33.132.000,00	20.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.405.000,00	44.468.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.604.556.000,00	3.090.956.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.074.595.000,00	2.615.306.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	33.466.000,00	27.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	227.585.000,00	221.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.813.544.000,00	2.366.274.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	64.200.000,00	62.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	64.200.000,00	62.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	245.811.000,00	208.553.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	100.000.000,00	99.094.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	145.811.000,00	109.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	44.000.000,00	29.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	44.000.000,00	29.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	175.950.000,00	174.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	175.950.000,00	174.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.656.345.300,00	2.448.199.400,00	1.544.753.000,00	590.000.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.774.000,00	74.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	35.774.000,00	34.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	42.000.000,00	39.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	962.369.500,00	771.635.780,00	107.833.000,00	107.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	576.951.500,00	394.139.640,00	3.966.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	311.480.000,00	306.989.140,00	103.867.000,00	103.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	41.700.000,00	40.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.238.000,00	30.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.616.201.800,00	1.601.891.420,00	1.436.920.000,00	482.812.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.426.070.000,00	1.413.578.720,00	84.930.000,00	83.749.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.131.800,00	188.312.700,00	1.351.990.000,00	399.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	539.414.000,00	522.351.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	414.485.000,00	409.127.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	47.000.000,00	46.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	47.000.000,00	46.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	240.485.000,00	235.805.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	124.929.000,00	113.223.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	45.000.000,00	40.505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	34.929.000,00	32.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	45.000.000,00	40.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.423.660.100,00	1.402.516.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.300.000,00	58.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	28.600.000,00	28.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	31.700.000,00	30.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	376.024.600,00	367.735.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	138.061.000,00	136.243.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	237.963.600,00	231.492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	987.335.500,00	976.170.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.600.000,00	29.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	956.735.500,00	947.088.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.639.567.790,00	36.556.258.372,00	716.813.000,00	540.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	39.639.567.790,00	36.556.258.372,00	716.813.000,00	540.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.160.687.490,00	18.990.577.222,00	524.423.000,00	349.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.093.000,00	121.883.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.107.000,00	25.605.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000,00	8.525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000,00	6.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	5.574.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000,00	5.574.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.550.000,00	11.126.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.680.000,00	14.013.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.600.000,00	11.978.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.156.000,00	32.958.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.917.000.000,00	15.157.796.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.306.200.000,00	14.811.905.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	562.800.000,00	298.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	24.522.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	4.761.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.927.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	4.936.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.831.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.919.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.688.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000,00	479.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000,00	479.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000,00	22.982.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000,00	482.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.001.000,00	630.609.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.000,00	8.624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	358.349.000,00	249.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	198.384.000,00	190.212.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	35.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.850.000,00	4.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.612.000,00	95.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.172.000,00	43.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.840.600,00	2.440.335,00	524.423.000,00	349.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.840.600,00	2.440.335,00	524.423.000,00	349.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.386.728.890,00	2.205.175.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.456.850,00	317.941.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.014.272.040,00	1.887.233.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.024.000,00	848.000.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.239.000,00	238.121.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.389.000,00	206.583.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.200.000,00	45.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	361.196.000,00	357.420.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.493.788.800,00	8.090.960.543,00	192.390.000,00	191.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	3.085.590.000,00	2.468.637.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.931.329.900,00	3.537.187.237,00	192.390.000,00	191.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	451.000.000,00	424.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	825.055.000,00	810.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	485.522.900,00	473.804.000,00	192.390.000,00	191.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.169.752.000,00	1.829.135.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.044.417.800,00	1.732.403.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000,00	196.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.844.417.800,00	1.536.155.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	432.451.100,00	352.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	89.217.000,00	58.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	343.234.100,00	294.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.764.756.500,00	5.636.832.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.764.756.500,00	5.636.832.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.854.034.500,00	3.762.370.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	885.922.000,00	874.379.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.024.800.000,00	1.000.082.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.438.502.000,00	1.260.013.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	490.211.000,00	424.164.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	490.211.000,00	424.164.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	948.291.000,00	835.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	502.177.000,00	465.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	172.730.000,00	103.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	273.384.000,00	266.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.781.833.000,00	2.577.874.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.076.494.000,00	2.036.901.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	650.532.000,00	639.229.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	973.150.000,00	956.247.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	452.812.000,00	441.424.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	705.339.000,00	540.973.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	257.690.000,00	248.271.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	447.649.000,00	292.701.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	107.816.851.715,00	101.791.904.811,00	2.543.388.300,00	2.389.070.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	107.816.851.715,00	101.791.904.811,00	2.543.388.300,00	2.389.070.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.603.314.010,00	58.892.579.669,00	646.819.000,00	637.140.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	578.280.000,00	570.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.613.500,00	174.644.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.602.500,00	29.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.423.200,00	19.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.359.200,00	38.601.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	44.768.000,00	44.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.484.000,00	25.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.270.000,00	116.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	43.708.000,00	43.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.720.000,00	38.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	39.331.600,00	39.325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.595.970.000,00	42.473.708.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.686.000.000,00	41.617.788.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	709.970.000,00	656.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	49.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.000.000,00	44.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000,00	24.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.460.000,00	45.259.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.970.000,00	23.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.490.000,00	22.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.450.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.341.871.074,00	1.328.516.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.880.000,00	135.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.892.000,00	335.168.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.163.074,00	165.351.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.370.000,00	149.258.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147.072.000,00	141.223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.494.000,00	401.942.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.861.000,00	2.963.700,00	645.112.000,00	635.433.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.727.000,00	829.800,00	175.771.000,00	172.150.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.134.000,00	2.133.900,00	469.341.000,00	463.282.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.661.836.810,00	12.152.633.941,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.293.000,00	36.052.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.304.048.000,00	1.124.098.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.321.495.810,00	10.992.482.161,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.334.585.126,00	2.281.408.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	372.510.000,00	371.300.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	666.948.000,00	635.786.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.743.000,00	332.059.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	960.384.126,00	942.260.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	34.869.957.845,00	33.848.122.570,00	1.052.960.000,00	914.729.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.657.360.000,00	5.537.231.730,00	601.640.000,00	488.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.492.360.000,00	5.391.539.730,00	601.640.000,00	488.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	93.000.000,00	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	25.000.000,00	21.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	25.000.000,00	24.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	22.000.000,00	21.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	20.268.576.405,00	20.022.100.050,00	451.320.000,00	425.999.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	110.000.000,00	109.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	19.640.026.405,00	19.398.173.700,00	451.320.000,00	425.999.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	238.558.000,00	237.728.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	165.792.500,00	162.077.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	97.388.000,00	97.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	16.811.500,00	16.811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	99.319.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	100.000.000,00	99.319.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	155.166.000,00	148.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	155.166.000,00	148.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.935.455.440,00	1.649.006.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	100.100.000,00	97.887.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.621.037.440,00	1.370.420.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	214.318.000,00	180.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	140.000.000,00	137.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	140.000.000,00	137.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6.613.400.000,00	6.254.407.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	142.000.000,00	140.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6.471.400.000,00	6.114.364.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.207.738.860,00	1.033.232.212,00	843.609.300,00	837.200.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.207.738.860,00	1.033.232.212,00	843.609.300,00	837.200.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	85.000.000,00	65.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	52.000.000,00	48.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	925.000.000,00	791.977.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	54.822.000,00	38.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	80.000.000,00	79.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	10.916.860,00	9.264.800,00	843.609.300,00	837.200.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.432.840.000,00	1.409.142.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	574.340.000,00	564.967.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	112.000.000,00	111.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	94.000.000,00	93.721.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.840.000,00	148.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100.000.000,00	93.970.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	117.500.000,00	117.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	191.000.000,00	188.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	101.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	90.000.000,00	88.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	527.500.000,00	517.696.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.000.000,00	291.196.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	227.500.000,00	226.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	140.000.000,00	137.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	140.000.000,00	137.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.300.500.000,00	1.284.901.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.300.500.000,00	1.284.901.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	933.000.000,00	924.398.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	265.500.000,00	258.663.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	102.000.000,00	101.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	125.000.000,00	124.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	124.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.1.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	60.000.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.277.501.000,00	5.199.526.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.373.314.000,00	3.352.281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	69.628.600,00	68.728.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	3.303.685.400,00	3.283.552.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	572.387.000,00	557.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	333.375.000,00	329.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	239.012.000,00	228.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.331.800.000,00	1.289.628.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.859.390.000,00	3.661.764.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	113.080.000,00	104.276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	113.080.000,00	104.276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	32.830.000,00	26.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	32.830.000,00	26.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.899.894.000,00	1.778.640.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	88.740.000,00	86.026.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.312.455.000,00	1.220.522.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	288.970.000,00	269.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	25.269.000,00	23.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	184.460.000,00	179.131.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	670.158.000,00	660.616.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	12.705.000,00	12.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	657.453.000,00	648.431.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	316.455.000,00	309.828.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	12.815.000,00	11.490.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	192.800.000,00	189.461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	110.840.000,00	108.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	826.973.000,00	781.887.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	20.150.000,00	20.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	2.855.000,00	2.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	18.370.000,00	18.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.800.000,00	3.785.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	777.998.000,00	733.092.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	3.800.000,00	3.723.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.721.397.000,00	1.655.757.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	736.442.000,00	702.100.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	12.740.000,00	12.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	10.000.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	48.310.000,00	47.913.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	53.510.000,00	53.082.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	10.000.000,00	9.584.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	406.680.000,00	406.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.01.0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	195.202.000,00	162.704.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	11.515.000,00	10.897.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	11.515.000,00	10.897.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	973.440.000,00	942.759.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	209.615.000,00	198.785.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	763.825.000,00	743.973.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	596.529.000,00	579.239.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	338.737.000,00	329.452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	75.505.000,00	74.621.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	182.287.000,00	175.165.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000,00	860.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	896.300.000,00	860.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	873.928.000,00	838.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	22.372.000,00	22.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	43.833.692.700,00	40.813.123.575,46	5.008.271.000,00	4.742.334.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	43.833.692.700,00	40.813.123.575,46	5.008.271.000,00	4.742.334.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.689.238.650,00	21.360.845.736,38	8.271.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	266.344.000,00	200.610.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.250.000,00	56.505.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.475.000,00	4.598.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.484.000,00	7.873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.486.000,00	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.220.000,00	7.308.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.496.000,00	100.031.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.810.000,00	6.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.640.000,00	15.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.680.017.800,00	18.724.574.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.197.000.000,00	18.365.978.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.705.000,00	303.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.148.000,00	12.815.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.948.800,00	1.901.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.832.000,00	8.759.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.080.000,00	3.982.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.200.000,00	23.686.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.104.000,00	4.006.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.846.000,00	59.197.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	9.893.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.200.000,00	2.099.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.646.000,00	47.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.074.800,00	244.239.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.027.000,00	27.707.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.625.000,00	89.598.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.429.000,00	30.475.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	8.599.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.993.800,00	47.977.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	29.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	8.271.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000,00	0,00	8.271.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.816.569.050,00	1.652.966.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.564.600,00	147.366.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.595.004.450,00	1.505.599.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.587.000,00	479.256.488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.203.000,00	132.230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.154.000,00	211.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.230.000,00	47.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	73.550.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.088.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	949.436.000,00	913.444.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	844.340.000,00	814.125.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	844.340.000,00	814.125.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	105.096.000,00	99.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	26.292.000,00	26.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	22.516.000,00	17.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	56.288.000,00	55.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.775.706.000,00	2.472.559.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25.500.000,00	22.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25.500.000,00	22.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3.649.606.000,00	2.350.483.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	335.838.000,00	325.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	17.840.000,00	17.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3.295.928.000,00	2.007.080.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100.600.000,00	99.581.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100.600.000,00	99.581.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	566.413.800,00	554.522.503,00	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	566.413.800,00	554.522.503,00	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	566.413.800,00	554.522.503,00	5.000.000.000,00	4.734.534.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	15.852.898.250,00	15.511.750.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	203.468.000,00	197.547.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	54.900.000,00	50.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	27.050.000,00	26.542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	121.518.000,00	120.355.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15.649.430.250,00	15.314.203.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.498.085.500,00	1.431.833.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	14.151.344.750,00	13.882.370.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.885.460.000,00	5.062.801.421,00	68.716.000,00	62.228.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.885.460.000,00	5.062.801.421,00	68.716.000,00	62.228.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	273.273.900,00	241.828.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	19.340.000,00	7.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.340.000,00	7.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Teraftar	21.389.400,00	18.595.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	9.969.400,00	8.602.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	11.420.000,00	9.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	232.544.500,00	215.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	232.544.500,00	215.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	247.301.900,00	230.636.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	247.301.900,00	230.636.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	158.943.900,00	151.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	73.505.000,00	66.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	14.853.000,00	12.889.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	780.098.500,00	750.647.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	139.720.000,00	128.382.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	102.700.000,00	92.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	37.020.000,00	36.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	511.300.000,00	502.659.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	302.820.000,00	299.509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	208.480.000,00	203.149.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	129.078.500,00	119.605.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	11.812.500,00	11.710.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	46.884.000,00	44.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	30.398.000,00	26.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	39.984.000,00	36.578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	746.609.000,00	680.352.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	746.609.000,00	680.352.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	414.266.000,00	396.935.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	300.000.000,00	251.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	32.343.000,00	31.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.645.047.700,00	2.976.270.240,00	68.716.000,00	62.228.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.216.705.700,00	2.568.661.200,00	68.716.000,00	62.228.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	3.099.661.700,00	2.491.427.200,00	68.716.000,00	62.228.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	88.424.000,00	55.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	28.620.000,00	22.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	272.500.000,00	257.119.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	126.106.000,00	125.233.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	114.543.000,00	102.355.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	31.851.000,00	29.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	155.842.000,00	150.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	131.412.000,00	126.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	24.430.000,00	24.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	193.129.000,00	183.065.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	88.332.000,00	85.245.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	88.332.000,00	85.245.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	71.603.000,00	70.212.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	71.603.000,00	70.212.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	33.194.000,00	27.607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	17.250.000,00	15.210.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	15.944.000,00	12.396.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	38.848.841.848,00	35.527.539.703,00	309.316.000,00	292.658.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.848.841.848,00	35.527.539.703,00	309.316.000,00	292.658.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.615.358.591,00	30.633.154.886,00	309.316.000,00	292.658.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	537.145.000,00	514.242.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.724.000,00	85.161.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.167.000,00	10.058.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.167.000,00	10.058.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.167.000,00	10.137.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.167.000,00	10.497.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.984.000,00	88.291.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.232.000,00	156.552.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	65.736.000,00	60.281.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.455.000,00	24.000.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	63.346.000,00	59.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.078.681.000,00	22.495.687.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.579.000.000,00	22.067.117.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	353.545.000,00	304.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.500.000,00	9.877.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.560.000,00	14.768.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.220.000,00	18.417.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.100.000,00	19.734.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.436.000,00	29.987.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	42.320.000,00	31.489.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.366.000,00	18.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	9.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.366.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.354.831.911,00	1.288.003.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.162.000,00	99.580.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.171.191,00	360.981.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.568.000,00	63.188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.409.000,00	205.242.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.130.020,00	182.155.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.752.000,00	36.970.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.490.000,00	121.082.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	216.941.700,00	213.593.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	309.316.000,00	292.658.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	95.842.000,00	93.809.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	213.474.000,00	198.849.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.774.237.280,00	4.528.358.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.626.830,00	729.972.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.909.610.450,00	3.798.386.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.849.097.400,00	1.788.473.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	337.482.700,00	326.778.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	607.272.900,00	570.657.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	14.166.600,00	14.014.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.500.700,00	227.946.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.732.000,00	153.986.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	497.942.500,00	495.089.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.050.112.257,00	4.718.690.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.050.112.257,00	4.718.690.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	20.150.000,00	16.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	644.285.257,00	640.453.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	290.900.000,00	287.853.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.964.354.000,00	2.679.117.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.107.363.000,00	1.072.203.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	23.060.000,00	23.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	153.075.000,00	145.589.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	153.075.000,00	145.589.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	117.420.000,00	110.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	35.655.000,00	34.989.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.296.000,00	30.105.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.296.000,00	30.105.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	18.386.000,00	18.215.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	11.910.000,00	11.889.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	240.455.056.880,00	221.248.750.176,00	4.682.375.000,00	4.313.183.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	240.455.056.880,00	221.248.750.176,00	4.682.375.000,00	4.313.183.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	240.455.056.880,00	221.248.750.176,00	4.682.375.000,00	4.313.183.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	217.491.098.740,00	201.812.063.729,00	4.682.375.000,00	4.313.183.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	672.688.789,00	613.481.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.813.000,00	103.241.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.698.000,00	33.855.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.646.000,00	41.762.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.898.000,00	31.827.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	35.050.000,00	34.360.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.563.789,00	91.040.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.914.000,00	261.643.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.150.000,00	4.931.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.956.000,00	10.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.135.327.772,00	108.957.724.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115.195.001.372,00	107.263.232.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.542.819.000,00	1.327.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	232.502.400,00	214.501.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.191.200,00	36.467.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.702.000,00	17.542.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.144.000,00	15.234.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.857.400,00	73.565.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.110.400,00	9.830.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.822.000,00	73.271.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.000.000,00	13.502.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.774.000,00	27.307.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000,00	6.934.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.048.000,00	25.527.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	428.631.000,00	364.334.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.550.000,00	49.007.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	145.476.000,00	131.495.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.233.000,00	129.522.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.372.000,00	18.309.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.852.875.467,00	13.323.776.187,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000,00	396.932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.385.559.958,00	1.247.695.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	293.454.000,00	285.049.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.804.685.600,00	2.680.779.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	953.197.284,00	866.387.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.289.000,00	17.991.277,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.885.622.825,00	5.884.930.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.623.513.800,00	1.509.780.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	482.353.000,00	428.029.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	657.370.225,00	570.645.734,00	4.677.300.000,00	4.313.183.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.750.000,00	2.583.914,00	1.757.826.000,00	1.579.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	528.017.700,00	448.828.402,00	824.837.200,00	802.062.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.602.525,00	119.233.418,00	2.094.636.800,00	1.932.020.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.186.097.237,00	26.058.087.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	273.197.000,00	259.937.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.589.964.000,00	3.478.744.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.429.227.500,00	2.390.904.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.893.708.737,00	19.928.499.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.876.729.150,00	20.760.098.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.355.863.000,00	1.332.177.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.515.261.250,00	5.827.213.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	27.760.650,00	27.319.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	531.917.750,00	488.704.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.737.393.500,00	4.658.282.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.491.973.000,00	8.213.849.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.560.000,00	212.552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.582.757.000,00	13.525.865.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.411.629.000,00	10.577.094.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	376.128.000,00	287.678.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.000.000,00	31.362.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.675.000.000,00	2.629.729.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	13.653.502.100,00	12.528.144.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.185.341.750,00	7.631.558.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.846.950.600,00	3.436.410.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.621.209.750,00	1.460.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	3.852.571.000,00	3.539.629.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	616.185.000,00	541.609.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.13.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.567.504.000,00	1.467.593.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.668.882.000,00	1.530.426.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	1.516.727.000,00	1.497.005.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	678.080.000,00	671.746.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.171.000,00	407.925.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	418.476.000,00	417.333.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.482.636.440,00	1.171.720.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	448.307.500,00	406.298.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	148.077.800,00	144.838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	114.696.800,00	98.688.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	185.532.900,00	162.771.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.034.328.940,00	765.422.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	124.630.900,00	114.374.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	181.199.600,00	156.534.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	122.248.440,00	113.030.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	184.970.000,00	178.458.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	421.280.000,00	203.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	985.862.000,00	911.789.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	155.363.000,00	144.603.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	18.815.000,00	16.409.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	42.800.000,00	38.637.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	93.748.000,00	89.556.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	442.493.000,00	397.079.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	107.725.000,00	102.424.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	79.231.000,00	74.048.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	255.537.000,00	220.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	388.006.000,00	370.105.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	353.842.000,00	343.158.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	16.754.000,00	12.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17.410.000,00	14.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.185.291.800,00	13.455.816.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	15.780.331.800,00	13.164.143.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.086.722.000,00	618.778.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	14.693.609.800,00	12.545.364.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	165.000.000,00	122.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	55.000.000,00	45.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	55.000.000,00	37.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	55.000.000,00	39.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	239.960.000,00	168.680.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	92.480.000,00	67.373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	92.480.000,00	70.133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	55.000.000,00	31.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.853.760.800,00	1.698.047.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.040.854.800,00	917.722.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumrnnPengaturan	451.085.000,00	394.142.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumrnnPenetapan	146.224.400,00	131.212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	206.915.400,00	176.320.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumnnKabupaten/Kota	236.630.000,00	216.046.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	812.906.000,00	780.325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	418.300.000,00	414.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	394.606.000,00	365.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.016.000,00	525.763.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	220.000.000,00	131.380.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	180.000.000,00	101.142.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	40.000.000,00	30.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	157.200.000,00	150.429.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	86.000.000,00	82.880.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	71.200.000,00	67.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	272.816.000,00	243.953.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	139.096.000,00	127.605.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	104.760.000,00	99.646.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	28.960.000,00	16.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.348.891.100,00	1.247.290.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	335.565.400,00	299.160.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	138.395.000,00	111.936.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	79.395.000,00	70.014.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	117.775.400,00	117.208.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	616.646.700,00	592.565.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	539.905.700,00	522.414.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	41.411.000,00	39.850.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	35.330.000,00	30.300.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	396.679.000,00	355.564.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	35.754.400,00	30.669.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	304.853.000,00	287.893.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	56.071.600,00	37.002.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	457.500.000,00	426.257.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	272.000.000,00	263.189.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	130.000.000,00	129.743.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	71.000.000,00	65.109.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	71.000.000,00	68.335.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	185.500.000,00	163.068.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	53.500.000,00	46.160.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	47.000.000,00	39.732.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	85.000.000,00	77.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	553.252.956.479,00	518.512.856.994,16	59.633.112.900,00	31.624.370.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	553.252.956.479,00	518.512.856.994,16	59.633.112.900,00	31.624.370.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	268.885.611.959,00	256.632.818.362,16	59.619.179.900,00	31.624.370.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	714.625.500,00	652.185.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.718.000,00	39.733.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.100.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.565.000,00	37.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.088.000,00	13.378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.378.000,00	11.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.257.500,00	96.129.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.127.000,00	92.793.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	43.700.000,00	37.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.288.000,00	10.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	14.850.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	296.554.000,00	277.072.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.048.740.000,00	23.756.201.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.480.000.000,00	18.482.765.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.842.200.000,00	1.597.130.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.420.000.000,00	1.418.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	268.270.000,00	259.049.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	170.000.000,00	164.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	268.270.000,00	266.316.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000.000,00	1.471.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	96.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	370.214.000,00	273.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	173.573.000,00	109.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	196.641.000,00	163.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.641.427.000,00	2.297.251.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	588.000.000,00	549.799.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	582.635.000,00	528.223.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	89.580.000,00	64.805.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.236.312.000,00	1.154.422.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.800.874.600,00	27.475.106.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	196.472.000,00	196.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.850.196.400,00	5.771.041.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.292.000,00	180.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.123.483.600,00	7.059.996.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.035.944.200,00	2.025.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.020.946.400,00	11.992.583.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	393.540.000,00	249.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.774.316.600,00	1.595.091.500,00	57.441.179.900,00	29.464.550.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540.000,00	0,00	3.608.265.000,00	3.528.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	540.000,00	0,00	1.717.765.000,00	1.699.314.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	615.046.600,00	602.855.000,00	52.115.149.900,00	24.237.135.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.057.650.000,00	992.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.798.021.170,00	23.528.734.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.191.000,00	88.226.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.158.838.200,00	2.074.634.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.596.000,00	2.018.437.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.359.395.970,00	19.347.435.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.143.567.000,00	44.847.247.763,16	2.178.000.000,00	2.159.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.831.804.800,00	3.378.042.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	206.078.000,00	204.784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.580.494.000,00	3.081.766.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.641.108.600,00	31.679.811.187,83	2.178.000.000,00	2.159.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.884.081.600,00	6.502.843.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	132.149.732.489,00	130.587.539.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	129.322.692.489,00	127.893.068.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.412.040.000,00	2.281.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	415.000.000,00	412.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	284.367.344.520,00	261.880.038.632,00	13.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	84.818.829.200,00	83.919.598.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	969.840.000,00	742.071.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	124.600.000,00	110.505.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	940.065.000,00	731.069.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	82.784.324.200,00	82.335.952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	406.125.000,00	161.201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	81.225.000,00	50.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	81.225.000,00	62.260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	81.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	81.225.000,00	38.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	81.225.000,00	10.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	251.877.500,00	154.556.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	43.575.500,00	5.433.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	43.575.500,00	22.923.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43.575.500,00	35.584.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	43.575.500,00	22.651.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	43.575.500,00	35.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	34.000.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	41.448.492.520,00	36.824.629.680,00	13.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.824.500.000,00	2.880.101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.651.776.000,00	4.647.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.152.684.000,00	1.007.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.411.077.900,00	9.664.612.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	182.824.920,00	161.016.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	21.225.629.700,00	18.463.852.380,00	13.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	67.350.601.600,00	65.710.777.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.055.568.000,00	3.891.211.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	126.706.600,00	83.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	63.168.327.000,00	61.735.765.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.144.660.000,00	3.837.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	288.600.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.856.060.000,00	3.706.486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	84.946.758.700,00	71.271.988.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	81.014.792.700,00	67.910.607.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	56.340.000,00	42.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	407.562.000,00	397.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.326.555.000,00	2.840.760.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	141.509.000,00	80.953.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	45.748.616.410,00	43.257.845.349,00	379.251.000,00	319.559.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PERENCANAAN	45.748.616.410,00	43.257.845.349,00	379.251.000,00	319.559.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45.748.616.410,00	43.257.845.349,00	379.251.000,00	319.559.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.173.216.022,00	38.294.856.661,00	379.251.000,00	319.559.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	898.628.000,00	789.212.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000,00	31.492.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.448.000,00	18.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.400.000,00	18.389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000,00	15.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.300.000,00	15.290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.202.000,00	29.197.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.750.000,00	62.848.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.302.000,00	17.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	646.326.000,00	548.257.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.985.025.000,00	31.739.979.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.662.600.000,00	31.419.735.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.655.000,00	282.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.680.000,00	10.493.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.230.000,00	1.169.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	6.411.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.200.000,00	839.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.200.000,00	18.230.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	460.000,00	444.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.999.936,00	11.871.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.713.600,00	3.692.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.321.536,00	4.257.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.964.800,00	3.921.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.361.760,00	38.262.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.232.080,00	2.276.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.040.000,00	3.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.089.680,00	32.957.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.355.230.946,00	1.153.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.037.000,00	48.149.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.801.020,00	238.799.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	134.253.000,00	125.279.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.193.500,00	135.446.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.336.376,00	113.804.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.332.700,00	10.713.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.935.000,00	44.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.496.250,00	401.513.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.510.100,00	26.630.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.336.000,00	9.342.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.653.896,00	5.237.887,00	379.251.000,00	319.559.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.927.096,00	4.551.490,00	118.610.000,00	84.000.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	726.800,00	686.397,00	260.641.000,00	235.559.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.516.406.160,00	2.411.119.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.282.000,00	10.036.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.271.900,00	311.628.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.895.000,00	37.959.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.110.957.260,00	2.051.494.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.351.910.324,00	2.145.374.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.852.000,00	270.570.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.171.065.000,00	1.005.412.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.812.000,00	140.759.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.202.000,00	197.756.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	538.979.324,00	530.875.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.812.333.900,00	3.325.962.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.688.028.000,00	1.642.694.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	46.155.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	55.254.000,00	54.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	254.030.400,00	236.789.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26.084.600,00	25.834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	253.650.000,00	247.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.052.854.000,00	1.032.559.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	256.784.000,00	228.094.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27.650.000,00	25.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	108.279.000,00	90.096.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	17.400.000,00	10.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	103.455.000,00	102.448.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.405.260.900,00	998.846.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	478.771.200,00	403.523.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	446.418.700,00	117.753.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.100.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	464.971.000,00	463.170.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	462.261.000,00	456.326.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	444.261.000,00	438.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	5.400.000,00	5.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.763.066.488,00	1.637.026.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	873.766.000,00	792.952.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.040.000,00	62.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	49.510.000,00	49.258.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.291.000,00	47.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	185.592.000,00	165.424.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.826.000,00	69.924.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	61.336.500,00	60.953.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	117.192.500,00	104.378.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	261.978.000,00	233.756.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	521.426.400,00	492.741.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.040.000,00	29.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.820.000,00	25.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	98.180.000,00	98.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.226.400,00	39.566.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.068.800,00	43.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.568.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	132.741.200,00	128.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	94.782.000,00	81.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	367.874.088,00	351.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.276.188,00	17.498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.900.900,00	10.880.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	156.017.000,00	150.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.430.000,00	44.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.940.000,00	14.855.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.520.000,00	9.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	105.530.000,00	97.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.260.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	302.665.772.055,00	286.842.081.949,77	17.193.629.000,00	15.950.588.875,54	32.756.687.505,00	0,00	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.736.966.050,00	48.299.331.942,00	269.736.000,00	250.092.434,00	32.756.687.505,00	0,00	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.369.568.335,00	37.685.552.086,00	172.044.000,00	156.852.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.145.000,00	269.658.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.965.000,00	47.226.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.800.000,00	20.783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.520.000,00	16.500.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.300.000,00	9.292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.380.000,00	8.282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.640.000,00	17.271.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.465.000,00	98.540.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	21.360.000,00	21.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.715.000,00	30.563.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.079.446.080,00	32.003.000.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.844.024.680,00	24.122.835.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.207.390.000,00	7.853.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.596.400,00	6.257.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.999.800,00	1.898.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.091.200,00	3.011.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.398.000,00	4.393.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.957.600,00	9.564.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.988.400,00	1.837.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.680.000,00	18.218.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.160.000,00	2.096.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.468.000,00	4.420.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.492.000,00	3.399.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.900.000,00	1.855.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.900.000,00	1.835.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.380.000,00	2.305.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.380.000,00	2.305.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.300.000,00	2.481.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.580.000,00	2.481.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.087.046.400,00	1.889.757.260,00	26.471.000,00	19.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.414.000,00	64.828.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	662.440.820,00	590.311.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.392.000,00	13.160.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.990.000,00	210.863.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	642.652.580,00	596.092.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	6.694.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.143.000,00	171.848.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.513.000,00	33.428.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	218.997.000,00	208.720.100,00	19.777.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	45.583.000,00	40.486.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	45.583.000,00	40.486.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.867.810.719,00	2.626.173.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	520.859.949,00	460.982.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.084.000,00	176.814.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.164.866.770,00	1.988.376.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.140.136,00	876.262.131,00	99.990.000,00	96.480.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.239.926,00	112.358.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	733.470.210,00	660.135.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.430.000,00	103.768.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	99.990.000,00	96.480.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.865.219.140,00	6.344.305.165,00	0,00	0,00	32.756.687.505,00	0,00	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.974.741.240,00	2.661.983.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	76.537.000,00	68.243.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.337.000,00	57.925.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	543.799.000,00	475.098.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	402.614.000,00	352.261.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	243.475.000,00	241.230.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	329.928.000,00	259.659.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	984.782.300,00	928.135.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	166.742.540,00	153.820.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.815.000,00	106.447.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	21.711.400,00	19.159.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.757.795.400,00	1.613.396.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	299.724.000,00	271.440.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	187.232.000,00	172.887.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	92.190.000,00	91.488.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	53.566.000,00	49.085.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	113.930.000,00	112.187.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	71.095.000,00	68.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	14.960.000,00	14.480.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	20.027.000,00	19.173.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	905.071.400,00	813.839.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	267.227.400,00	260.331.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	80.000.000,00	79.923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	30.000.000,00	29.971.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31.940.800,00	31.456.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	95.286.600,00	89.134.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	30.000.000,00	29.846.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	549.301.100,00	531.130.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6.620.000,00	6.571.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDrnn dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	349.801.100,00	344.308.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	175.726.000,00	164.130.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2.715.000,00	2.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3.950.000,00	3.818.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	10.489.000,00	9.588.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	963.429.000,00	943.840.337,00	0,00	0,00	32.756.687.505,00	0,00	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	133.176.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	774.000.000,00	773.451.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	15.289.000,00	14.005.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.852.620.000,00	141.204.430.658,00
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	32.756.687.505,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	24.140.000,00	23.207.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.672.110.906,00	2.024.610.361.548,00
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	352.725.000,00	333.622.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	64.762.000,00	62.619.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	24.756.000,00	22.830.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	263.207.000,00	248.173.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.502.178.575,00	4.269.474.691,00	97.692.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.502.178.575,00	4.269.474.691,00	97.692.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	260.248.800,00	258.928.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	108.035.000,00	105.087.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	331.550.000,00	331.357.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	923.680.975,00	896.712.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.118.654.800,00	2.008.737.844,00	97.692.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	236.170.000,00	228.494.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	412.177.000,00	336.290.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.708.000,00	64.913.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.954.000,00	35.052.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4.000.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	251.928.806.005,00	238.542.750.007,77	16.923.893.000,00	15.700.496.441,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	231.970.509.105,00	221.082.879.794,77	16.239.434.000,00	15.090.735.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.617.400,00	368.302.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.566.000,00	48.167.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.152.800,00	24.112.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.322.000,00	34.271.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.604.800,00	31.425.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.780.000,00	33.719.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.118.300,00	112.973.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.241.500,00	55.051.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.480.000,00	12.452.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.352.000,00	16.129.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.538.901.050,00	133.508.676.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135.549.641.850,00	131.765.919.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.778.559.000,00	1.566.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.310.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.873.000,00	17.517.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.688.200,00	44.793.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.029.900,00	24.628.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	81.899.300,00	79.240.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.899.800,00	4.748.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.182.000,00	81.599.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.360.000,00	8.230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.777.500,00	45.712.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.850.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.094.500,00	3.080.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.100.000,00	8.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.450.000,00	3.432.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6.550.000,00	6.491.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265.005.600,00	258.584.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	182.726.500,00	180.536.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.580.000,00	10.425.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37.307.900,00	36.755.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.480.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.731.200,00	13.647.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.415.159.600,00	17.835.338.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	489.194.300,00	467.529.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.587.340.600,00	5.850.545.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	388.969.400,00	372.243.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.477.711.400,00	1.381.509.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.178.258.900,00	6.770.798.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	890.424.900,00	795.870.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	534.867.100,00	454.144.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.868.393.000,00	1.742.698.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.563.000,00	322.752.717,00	12.535.035.000,00	11.689.761.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.508.800,00	3.487.154,00	1.208.950.000,00	1.060.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.054.200,00	319.265.563,00	11.326.085.000,00	10.629.761.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.324.445.075,00	57.968.198.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.449.155.500,00	9.426.288.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.108.766.160,00	5.635.434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.766.523.415,00	42.906.475.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.629.635.380,00	10.739.426.717,77	3.704.399.000,00	3.400.973.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	702.185.300,00	663.606.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.971.342.800,00	2.805.788.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.819.085.400,00	1.615.914.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.887.191.580,00	3.587.158.895,77	270.300.000,00	250.138.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.874.300,00	783.258.428,00	3.366.416.000,00	3.083.867.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.389.806.000,00	1.283.699.859,00	67.683.000,00	66.967.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.958.296.900,00	17.459.870.213,00	684.459.000,00	609.761.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.958.296.900,00	17.459.870.213,00	684.459.000,00	609.761.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	420.516.000,00	287.177.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	229.422.000,00	200.187.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4.176.890.000,00	4.008.748.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.285.570.800,00	2.806.353.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.388.843.600,00	1.840.419.382,00	684.459.000,00	609.761.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	224.394.000,00	194.431.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	277.342.600,00	251.689.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	109.366.000,00	98.052.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	6.920.397.900,00	6.309.753.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.144.000,00	27.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	523.944.000,00	284.834.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.066.466.000,00	918.745.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	300.000.000,00	231.918.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	229.814.447.163,00	227.507.595.400,00	908.000.000,00	881.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	229.814.447.163,00	227.507.595.400,00	908.000.000,00	881.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225.038.525.067,00	223.264.894.794,00	908.000.000,00	881.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.528.000,00	613.781.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.971.000,00	434.588.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.974.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.931.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.591.000,00	68.105.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	23.468.000,00	20.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.498.000,00	25.595.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	219.824.240.077,00	218.134.284.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.181.995.077,00	217.504.356.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.102.000,00	435.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.678.000,00	111.091.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	19.767.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.085.000,00	14.800.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.310.000,00	15.312.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	19.248.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.070.000,00	14.605.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03	Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.010.000,00	57.246.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	9.249.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	19.915.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	9.555.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.010.000,00	8.936.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.051.504,00	200.364.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.380.000,00	11.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.663.600,00	96.522.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.558.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.830.000,00	28.426.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.177.904,00	32.819.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	1.582.804.420,00	1.574.709.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.129.000,00	88.125.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.505.500,00	380.485.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.055.000,00	120.018.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.055.000,00	380.404.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.544.000,00	251.508.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	20.562.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	96.677.000,00	96.671.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.035.000,00	108.032.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.338.920,00	122.590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.465.000,00	6.310.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.648.000,00	2.647.700,00	908.000.000,00	881.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.288.000,00	1.287.800,00	908.000.000,00	881.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000,00	1.359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.430.066,00	1.210.241.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.048.000,00	25.001.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.212.506,00	597.755.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.881.560,00	583.196.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.813.000,00	1.471.617.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.748.000,00	211.741.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.815.000,00	242.282.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.013.000,00	441.439.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.237.000,00	576.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.775.922.096,00	4.242.700.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.062.033.500,00	2.044.866.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	9.180.000,00	8.631.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	13.700.000,00	5.656.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	249.509.000,00	246.184.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	7.466.000,00	7.445.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15.000.000,00	14.987.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.363.000,00	20.625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	12.950.000,00	9.387.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.000.000.000,00	999.201.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	6.210.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.780.000,00	690.779.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	20.875.500,00	20.846.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.999.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	788.577.096,00	396.119.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	16.632.000,00	16.628.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.842.000,00	63.121.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	708.103.096,00	316.369.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.522.845.500,00	1.432.159.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	25.974.000,00	16.865.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.282.751.000,00	1.270.755.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	24.600.000,00	15.853.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43.650.000,00	30.190.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12.784.500,00	12.682.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	18.650.000,00	5.725.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2.300.000,00	2.298.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	15.000.000,00	2.143.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	13.579.500,00	12.962.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.856.500,00	16.592.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	15.000.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	18.710.000,00	17.515.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	13.890.000,00	12.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8.200.000,00	7.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.900.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	402.466.000,00	369.555.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.500.000,00	17.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	161.400.000,00	146.115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.250.000,00	8.179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	9.978.000,00	4.479.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.000.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000,00	14.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	119.341.000,00	111.036.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.960.000,00	40.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00	19.619.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	8.037.000,00	7.642.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	52.629.884.039,00	45.018.685.818,00	796.382.000,00	778.451.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52.629.884.039,00	45.018.685.818,00	796.382.000,00	778.451.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.922.908.039,00	30.815.718.863,00	796.382.000,00	778.451.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.000.000,00	262.664.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.332.000,00	82.878.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.858.000,00	10.222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.858.000,00	11.552.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.858.000,00	11.310.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.858.000,00	10.117.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.300.000,00	54.803.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.918.000,00	30.608.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	24.880.000,00	21.154.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.138.000,00	30.016.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.716.266.000,00	22.419.140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.310.000.000,00	22.070.630.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.470.000,00	246.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.712.000,00	68.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.628.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.912.000,00	6.317.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.636.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.096.000,00	6.388.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.812.000,00	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.000.000,00	10.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	10.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	441.950.000,00	435.309.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.090.000,00	92.409.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	343.860.000,00	342.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	670.000.000,00	627.356.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	66.906.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	84.416.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	145.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	48.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	197.083.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	46.364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000,00	18.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.800,00	0,00	796.382.000,00	778.451.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	417.800,00	0,00	796.382.000,00	778.451.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.711.375.239,00	5.218.558.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.555.182.360,00	1.390.563.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.156.192.879,00	3.827.995.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.054.899.000,00	1.841.697.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.644.000,00	269.606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.598.700,00	313.859.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.456.656.300,00	1.258.231.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.706.976.000,00	14.202.966.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4.900.625.000,00	2.786.792.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13.806.351.000,00	11.416.174.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	403.000.000,00	357.383.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	670.500.000,00	260.566.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	150.000.000,00	134.554.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	1.223.915.000,00	861.818.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10.966.463.500,00	9.467.902.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	392.472.500,00	333.948.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.621.461.900,00	1.470.025.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.106.383.500,00	1.033.064.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	468.059.500,00	444.297.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	24.162.000,00	20.936.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	590.000.000,00	567.831.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	24.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	49.161.000,00	33.057.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	49.161.000,00	33.057.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	175.266.800,00	149.433.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	77.504.000,00	70.898.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	65.700.800,00	50.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	32.062.000,00	28.341.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	290.650.600,00	254.470.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	76.344.400,00	72.830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	159.527.600,00	144.437.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	40.873.600,00	24.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	13.905.000,00	13.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.352.838.200,00	9.592.297.403,00	74.090.000,00	71.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	10.352.838.200,00	9.592.297.403,00	74.090.000,00	71.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.292.644.700,00	8.609.634.983,00	74.090.000,00	71.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.076.000,00	10.253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	7.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	640.000,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.000,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	640.000,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	640.000,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.102.160.000,00	5.776.066.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.924.450.000,00	5.626.222.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175.710.000,00	147.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.580.899.363,00	1.336.516.110,00	74.090.000,00	71.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.899.363,00	962.751.964,00	74.090.000,00	71.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	480.000.000,00	373.764.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.499.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.510.569,00	351.262.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.209.000,00	4.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.190.700,00	41.444.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.982.000,00	12.814.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.500.000,00	33.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.882.000,00	17.207.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.226.869,00	241.548.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.498.768,00	1.134.035.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.607.200,00	212.592.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	935.891.568,00	921.443.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.060.193.500,00	982.662.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.060.193.500,00	982.662.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	684.933.000,00	634.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	108.487.000,00	94.554.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	91.943.000,00	90.120.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	131.245.000,00	129.653.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	43.585.500,00	34.133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	73.147.388.110,00	64.373.460.159,00	529.655.000,00	522.909.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	73.147.388.110,00	64.373.460.159,00	529.655.000,00	522.909.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	73.147.388.110,00	64.373.460.159,00	529.655.000,00	522.909.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.284.047.550,00	62.018.899.746,00	329.655.000,00	328.659.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.255.500,00	125.046.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.093.500,00	40.120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.150.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.150.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.300.000,00	9.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.300.000,00	8.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.522.000,00	1.337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.740.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	55.000.000,00	43.990.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.870.640.000,00	56.545.742.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.599.000.000,00	56.289.242.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239.550.000,00	227.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.090.000,00	29.249.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.862.342.000,00	1.280.892.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	167.903.000,00	115.135.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.694.439.000,00	1.165.756.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.872.700,00	783.368.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	81.830.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	543.524.200,00	419.918.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.000.000,00	148.803.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.078.500,00	119.615.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.270.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.545.000,00	0,00	329.655.000,00	328.659.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.545.000,00	0,00	329.655.000,00	328.659.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.321.470.250,00	1.835.171.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	642.504.000,00	420.529.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.678.966.250,00	1.414.641.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.834.922.100,00	1.448.679.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.874.000,00	36.859.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	489.810.000,00	320.247.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.200.000,00	92.541.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.099.038.100,00	999.030.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.293.922.760,00	1.509.143.714,00	200.000.000,00	194.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.666.634.760,00	1.189.490.714,00	200.000.000,00	194.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	278.355.000,00	192.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	618.040.000,00	551.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	83.302.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	349.566.000,00	233.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	94.080.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	243.291.760,00	183.047.714,00	200.000.000,00	194.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	627.288.000,00	319.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	153.720.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	473.568.000,00	298.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.569.417.800,00	845.416.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangnnPengawasan dan Fasilitas Pengawasan	260.592.400,00	62.329.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	260.592.400,00	62.329.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.308.825.400,00	783.086.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danrnnPenilaian Reformasi Birokrasi	29.100.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.135.525.400,00	707.136.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	144.200.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	73.110.133.640,00	70.912.627.629,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.110.133.640,00	70.912.627.629,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.110.133.640,00	70.912.627.629,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.709.918.420,00	15.319.247.663,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.215.740,00	338.446.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.870.000,00	92.287.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.635.740,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.400.000,00	6.364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.650.000,00	28.376.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.780.000,00	116.718.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	22.460.000,00	21.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.960.000,00	29.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	28.160.000,00	27.128.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.917.270.000,00	10.960.228.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.342.600.000,00	10.482.492.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	413.670.000,00	317.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.988.000,00	23.772.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.580.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.000.000,00	28.788.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.300.000,00	36.120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28.875.000,00	28.733.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.257.000,00	13.236.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.087.600,00	987.012,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.087.600,00	987.012,00	16.344.000,00	12.132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.183.400,00	227.308.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.300.000,00	88.242.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.736.000,00	8.720.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.360.000,00	41.286.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.134.400,00	33.020.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.912.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.441.000,00	45.318.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.511.500,00	494.831.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.042.400,00	246.871.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	148.797.600,00	139.646.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	36.000.000,00	35.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.521.500,00	3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.850.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.300.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.410.747.080,00	2.200.985.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	12.224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	532.560.000,00	369.159.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.632.000,00	217.747.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.624.055.080,00	1.601.854.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.903.100,00	1.096.461.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	889.080.100,00	770.022.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	145.927.000,00	135.841.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.896.000,00	190.596.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.311.193.220,00	3.194.110.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	193.464.700,00	188.676.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	187.760.000,00	185.291.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	140.433.000,00	133.518.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	67.685.000,00	64.911.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100.000.000,00	94.520.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	402.857.076,00	398.010.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	1.394.793.444,00	1.315.741.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	511.724.000,00	506.674.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	151.876.000,00	146.763.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	32.689.825.000,00	32.654.320.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	32.689.825.000,00	32.654.320.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.506.000,00	22.305.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.010.000,00	26.005.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.533.978.000,00	32.501.682.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	71.442.000,00	70.776.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.889.000,00	33.551.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.825.213.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.911.510.000,00	4.825.213.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13.376.000,00	11.824.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	114.020.000,00	108.464.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.735.980.000,00	4.658.875.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.090.000,00	23.089.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.044.000,00	22.959.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	760.350.000,00	719.068.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	760.350.000,00	719.068.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	41.804.000,00	40.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.916.000,00	18.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	515.160.000,00	496.804.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	144.226.000,00	127.469.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37.244.000,00	36.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	14.200.667.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14.727.337.000,00	14.200.667.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.850.000,00	29.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.380.407.000,00	12.283.060.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.880.000,00	35.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.263.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah		7.137.130.606.274,68	6.810.065.159.830,76	1.189.126.004.461,32	1.035.060.394.253,81	32.756.687.505,00	0,00	2.414.524.730.906,00	2.165.814.792.206,00

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2025 (Audited)	SALDO 2024 (Audited)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	444.485.541.411	86.875.060.165
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN	444.485.541.411	86.875.060.165
3	Sub Total	-	(0)
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (Silpa/Sikpa)	44.703.689.990	444.485.541.412
5	Sub Total	44.703.689.990	444.485.541.412
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-
7	LAIN-LAIN	-	-
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	44.703.689.990	444.485.541.411

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) 5 = 3 - 4	(%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	PENDAPATAN - LO	10.516.289.464.924	12.625.955.695.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.347.267.487.406	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.719.902.391.393	8.552.678.801.729	(2.832.776.410.336)	(33,12)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	320.429.298.769	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	71.456.059.578	79.327.988.050	(7.871.928.471)	(9,92)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	235.479.737.666	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.976.969.361.771	3.056.848.218.167	920.121.143.604	30,10
9	Bagi Hasil Pajak -LO	1.561.948.265.100	695.565.550.000	866.382.715.100	124,56
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.868.585.000	2.611.971.000	(743.386.000)	(28,46)
	Bagi Hasil Lainnya - LO	906.874.000	-	906.874.000	-
11	Dana Alokasi Umum (DAU) -LO	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968	394.405.244	0,03
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) -LO	1.265.602.799.459	1.212.422.264.199	53.180.535.260	4,39
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
14	Dana Penyesuaian - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)
16	Pendapatan Hibah - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)
17	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
18	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	-
19	BEBAN	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)
20	BEBAN OPERASI	7.820.102.521.364	8.176.822.137.234	(356.719.615.870)	(4,36)
21	Beban Pegawai - LO	2.646.808.457.534	2.387.855.754.242	258.952.703.292	10,84
22	Beban Persediaan	362.301.467.682	384.397.060.097	(22.095.592.415)	(5,75)
23	Beban Jasa	1.673.969.314.320	1.894.097.138.935	(220.127.824.615)	(11,62)
24	Beban Pemeliharaan	182.159.326.802	208.936.231.188	(26.776.904.387)	(12,82)
25	Beban perjalanan Dinas	204.886.719.835	266.961.190.578	(62.074.470.743)	(23,25)
26	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	100.867.175.360	12.082.009.854	88.785.165.506	734,85
27	Beban Barang dan Jasa BOS	181.199.138.299	172.847.593.849	8.351.544.450	4,83
28	Beban Barang dan Jasa BLUD	133.315.037.293	103.264.860.303	30.050.176.990	29,10
29	Beban Bunga	-	1.029.672.328	(1.029.672.328)	-
30	Beban Subsidi	-	-	-	-
31	Beban Hibah	1.150.634.432.879	1.554.968.397.167	(404.333.964.288)	(26,00)
32	Beban Bantuan Sosial	37.691.434.638	42.988.034.478	(5.296.599.840)	(12,32)
33	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.144.283.735.242	1.141.848.570.703	2.435.164.539	0,21
34	Beban Penyisihan Piutang	(8.628.886)	94.199.631	(102.828.518)	(109,16)
35	Beban Lain-lain	-	75.000.000	(75.000.000)	-
36	Beban Aset Ekstrakomptabel	1.994.910.366	5.376.423.880	(3.381.513.514)	(62,90)
37	BEBAN TRANSFER	1.764.457.681.726	3.695.188.163.521	(1.930.730.481.795)	(52,25)
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.623.253.251.068	3.476.464.235.449	(1.853.210.984.381)	(53,31)
39	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	30.342.620.000	95.923.928.072	(65.581.308.072)	(68,37)
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.861.810.658	122.800.000.000	(11.938.189.342)	(9,72)
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
43	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
44	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58
45	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON	(53.784.150.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19
46	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
47	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
49	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
50	DEFISIT NON OPERASIONAL	54.062.605.219	41.729.621.165	12.332.984.055	29,55
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	39.377.499.561	40.762.274.451	(1.384.774.890)	(3,40)
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	14.685.105.658	967.346.714	13.717.758.944	1.418,08
54	POS LUAR BIASA	-	-	-	-
55	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-	-	-
56	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
57	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
58	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
59	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	877.945.111.615	712.315.084.003	165.630.027.612	23,25

Gubernur Banten

Andra Soni

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH

NOMOR :
TANGGAL : _____

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	19.647.022.442.809	19.184.343.785.908
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	877.945.111.615	712.315.084.003
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN (4 s.d 11)	(27.262.172.787)	(249.636.427.102
4	KOREKSI KAS	(47.267.100	(9.251.736
5	KOREKSI PIUTANG	196.910.563	52.492.913
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	2.970.414.116	-
7	KOREKSI ASET TETAP	(7.666.487.273)	(247.890.258.932
8	KOREKSI ASET LAINNYA	(5.982.529.800)	195.517.708
9	KOREKSI KEWAJIBAN	62.384.502	195.161.758
10	KOREKSI PENDAPATAN	-	-
11	KOREKSI INVESTASI	206.266.616	(2.180.088.813
12	LAIN-LAIN	(17.001.864.412)	-
13	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809

Gubernur Banten

Andra Soni

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	335.671.538	429.351.948.995
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	-	4.956.875.281
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.d	35.713.661.608	9.071.167.006
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e	2.797.507.593	1.105.550.130
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.f	-	47.270.000
9	Piutang Pajak		3.970.600	275.117.073
10	<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>		(19.853)	(1.375.585)
11	Piutang Pajak Netto (9 - 10)	5.3.1.1.g	3.950.747	273.741.488
12	Piutang Retribusi		547.855.163	5.848.313.932
13	<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>		(2.739.276)	(29.241.570)
14	Piutang Retribusi Netto (12 - 13)	5.3.1.1.h	545.115.887	5.819.072.362
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		19.601.311	19.601.311
16	<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>		(1.960.131)	(1.960.131)
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto (15 - 16)	5.3.1.1.i	17.641.180	17.641.180
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		350.763.862	1.480.924.162
19	<i>Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</i>		(849.074)	(7.404.621)
20	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto (18 - 19)	5.3.1.1.j	349.914.788	1.473.519.541
21	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto (23 + 24)		576.641.493.000	-
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
23	<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>	5.3.1.1.k	576.641.493.000	-
24	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.l	4.609.749.111	6.596.759.060
25	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		9.874.226.886	10.279.299.907
26	<i>Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</i>		(2.126.882.873)	(2.301.008.749)
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (22 - 23)	5.3.1.1.m	7.747.344.013	7.978.291.158
28	Piutang Lainnya		10.897.963.851	12.333.916.600
29	<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>		(5.041.114.600)	(12.333.916.600)
30	Piutang Lainnya Netto (25 - 26)	5.3.1.1.n	5.856.849.251	-
31	Persediaan	5.3.1.1.o	368.278.517.071	243.017.054.176
32	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d. 8+11+14+17+20+21+24+27+28)		1.002.897.415.787	709.708.890.375
33				
34	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
35	Investasi Permanen			
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2	1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
37	Jumlah Investasi Permanen (33)		1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34)		1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
39				
40	ASET TETAP	5.3.1.3		
41	Tanah	5.3.1.3.a	9.363.770.901.401	9.287.817.013.353
42	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	4.539.113.218.722	4.224.775.742.903
43	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	5.383.991.912.324	5.021.714.531.995
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	9.506.088.574.010	9.015.649.850.754
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	514.565.838.910	469.710.626.512
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	52.248.913.064	198.760.372.691
47	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(12.332.640.474.699)	(11.249.738.861.872)
48	JUMLAH ASET TETAP (38 s.d. 44)		17.027.138.883.732	16.968.689.276.337
49				
50	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
51	Properti Investasi	5.3.1.4	1.111.582.210.562	1.074.975.737.196
52	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4	(218.454.368.795)	(155.362.470.973)
53	JUMLAH PROPERTI INVESTASI (48 + 49)		893.127.841.767	919.613.266.223
54				
55	DANA CADANGAN	5.3.1.5		
56	Dana Cadangan	5.3.1.5	-	-
57	JUMLAH DANA CADANGAN (53)		-	-
58				
59	ASET LAINNYA	5.3.1.6		
60	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.a	13.570.000	19.714.286
61	Aset Tak Berwujud		43.236.427.125	35.732.344.452
62	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(19.012.792.891)	(10.830.873.904)
63	Aset Tak Berwujud Neto (58 + 59)	5.3.1.6.b	24.223.634.234	24.901.470.548
64	Aset Lain-lain		972.489.567.920	950.748.796.252
65	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(468.070.116.440)	(454.835.521.220)
66	Aset Lain-lain Neto (61 + 62)	5.3.1.6.c	504.419.451.480	495.913.275.032
67	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.d	-	-
68	JUMLAH ASET LAINNYA (57+60+63+64)		528.656.655.714	520.834.459.866
69				
70	JUMLAH ASET (29+35+45+50+54+65)		21.243.782.203.969	20.890.743.853.304

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	2	3	4	5
71				
72	KEWAJIBAN	5.3.2		
73	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
74	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	-	-
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.b	138.497.733.036	138.497.733.036
76	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.c	2.990.941.315	1.996.670.086
77	Utang Belanja	5.3.2.1.d	359.628.410.728	719.769.537.084
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.e	-	-
79	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (71 s/d 75)		501.117.085.079	860.263.940.206
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
81	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.3.2.2.a	244.959.737.253	383.457.470.289
82	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (78)		244.959.737.253	383.457.470.289
83				
84	JUMLAH KEWAJIBAN (76+79)		746.076.822.332	1.243.721.410.495
85				
86	EKUITAS	5.3.2.2	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.243.782.203.969	20.890.743.853.304

Gubernur Banten

Andra Soni

SALDO KAS PROVINSI BANTEN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KETERANGAN	NO REKENING	KAS DAN SETARA KAS		
			SALDO BANK	SALDO TUNAI	TOTAL
1	2	3	3	4	6 = 3+4+5
1	Kas Daerah - Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	0801202021	335.671.538	-	335.671.538
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	NIHIL
3	Kas di Bendahara BLUD	-	35.713.661.608	-	35.713.661.608
4	Kas di Bendahara BOS	-	2.797.507.593	-	2.797.507.593
5	Kas Lainnya	-	-	-	NIHIL
TOTAL					38.846.840.739

SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	UPT RSUD Banten	-
4	UPT RSUD Malingping	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
15	Dinas Perhubungan	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
22	Dinas Pariwisata	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
27	Biro Hukum	-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
29	Biro Umum	-
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-
32	Biro Administrasi Pimpinan	-
33	Sekretariat DPRD	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
39	Badan Penghubung	-
40	Inspektorat	-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
TOTAL		NIHIL

SALDO KAS DI BENDAHARA BLUD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO REKENING	KAS DI BENDAHARA BLUD		
			SALDO BANK	SALDO TUNAI	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	BLUD RSUD CILOGRANG	0890099157	117.343.925,94	-	117.343.926
2	BLUD RSUD LABUAN	0764008006	2.119.099.815,93	-	2.119.099.816
3	UPT RSUD Banten (BLUD)	0801000479	28.880.239.669,81	-	28.880.239.670
4	UPT RSUD Malingping (BLUD)	0821000009	4.596.978.196,58	-	4.596.978.197
TOTAL			35.713.661.608,26	-	35.713.661.608

SALDO KAS DIBENDAHARA BOS

Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
	KABUPATEN LEBAK			153.770.446
1	SKHN 01 LEBAK	0821000734	20601811 SKHN 01 LEBAK	-
2	SKHN 02 LEBAK	0821000742	20601812 SKHN 02 LEBAK	-
3	SKHN 03 LEBAK	0891000243	69919380 SKHN 03 LEBAK	-
4	SMAN 1 BANJARSARI	0821000521	20601867 SMAN 1 BANJARSARI	-
5	SMAN 1 BAYAH	0891000022	20601881 SMAN 1 BAYAH	68.002.032
6	SMAN 1 BOJONGMANIK	0821000696	20607981 SMAN 1 BOJONGMANIK	-
7	SMAN 1 CIBADAK	0821000572	20607980 SMAN 1 CIBADAK	-
8	SMAN 1 CIBEBER	0891000111	20607866 SMAN 1 CIBEBER	1.246.385
9	SMAN 1 CIGEMBLONG	0891000065	20623096 SMAN 1 CIGEMBLONG	-
10	SMAN 1 CIHARA	0891000006	69816881 SMAN 1 CIHARA	1.605.900
11	SMAN 1 CIJAKU	0891000138	20614930 SMAN 1 CIJAKU	-
12	SMAN 1 CIKULUR	0821000564	20607982 SMAN 1 CIKULUR	-
13	SMAN 1 CILELES	0821000459	20607819 SMAN 1 CILELES	27.726.970
14	SMAN 1 CILOGRANG	0891000057	20607867 SMAN 1 CILOGRANG	4.295.445
15	SMAN 1 CIMARGA	0821000530	20601880 SMAN 1 CIMARGA	-
16	SMAN 1 CIPANAS	0821000441	20601879 SMAN 1 CIPANAS	278.175
17	SMAN 1 CIRINTEN	0821005078	70011608 SMA NEGERI 1 CIRINTEN	-
18	SMAN 1 CURUGBITUNG	0821000513	20613913 SMAN 1 CURUGBITUNG	-
19	SMAN 1 GUNUNG KENCANA	0891000146	20601878 SMAN 1 GUNUNG KENCANA	-
20	SMAN 1 KALANGANYAR	0821000467	69816901 SMAN 1 KALANGANYAR	177.600
21	SMAN 1 LEUWIDAMAR	0821000556	20601877 SMAN 1 LEUWIDAMAR	11.159.200
22	SMAN 1 MAJA	0821000505	20601876 SMAN 1 MAJA	-
23	SMAN 1 MALINGPING	0891000162	20601875 SMAN 1 MALINGPING	-
24	SMAN 1 MUNCANG	0821000475	20607862 SMAN 1 MUNCANG	9.013.000

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
25	SMAN 1 PANGGARANGAN	0891000031	20607877 SMAN 1 PANGGARANGAN	-
26	SMAN 1 RANGKASBITUNG	0821000653	20601874 SMAN 1 RANGKASBITUNG	9.089.979
27	SMAN 1 SAJIRA	0821000548	20613868 SMAN 1 SAJIRA	-
28	SMAN 1 SOBANG	0821000483	20614150 SMAN 1 SOBANG	184.000
29	SMAN 1 WANASALAM	0891000049	20607854 SMAN 1 WANASALAM	3.250.000
30	SMAN 1 WARUNGGUNUNG	0821000777	20601873 SMAN 1 WARUNGGUNUNG	-
31	SMAN 2 BANJARSARI	0891000120	20613919 SMAN 2 BANJARSARI	-
32	SMAN 2 BAYAH	0891000090	69816866 SMAN 2 BAYAH	211.650
33	SMAN 2 CIBEBER	0821000661	20616229 SMAN 2 CIBEBER	-
34	SMAN 2 CIJAKU	0821005035	70011600 SMA NEGERI 2 CIJAKU	-
35	SMAN 2 LEUWIDAMAR	0821000688	60725227 SMAN 2 LEUWIDAMAR	-
36	SMAN 2 MAJA	0821000602	20623417 SMAN 2 MAJA	700.000
37	SMAN 2 MALINGPING	0891000103	69945798 SMAN 2 MALINGPING	-
38	SMAN 2 MUNCANG	0821005060	70011599 SMA NEGERI 2 MUNCANG	-
39	SMAN 2 Panggarangan	0891000863	69985722 SMAN 2 PANGGARANGAN	-
40	SMAN 2 RANGKASBITUNG	0821000629	20601872 SMAN 2 RANGKASBITUNG	-
41	SMAN 3 CIBEBER	0891000081	69946232 SMAN 3 CIBEBER	-
42	SMAN 3 PANGGARANGAN	0821005043	70011604 SMAN 3 PGRGN	-
43	SMAN 3 RANGKAS BITUNG	0821000491	20601871 SMAN 3 RANGKAS BITUNG	-
44	SMAN 4 PANGGARANGAN	0821005051	70011607 SMAN 4 PGRGN	-
45	SMAN 4 RANGKASBITUNG	0821005027	70011680 SMAN 4 RKSBTG	15.410.000
46	SMKN 1 BAYAH	0891000154	20613910 SMKN 1 BAYAH	-
47	SMKN 1 CIBEBER	0891001100	20615866 SMKN 1 CIBEBER	-
48	SMKN 1 CIHARA	0821005132	70011856 SMK NEGERI 1 CIHARA	-
49	SMKN 1 CIKULUR	0821000637	69883576 SMKN 1 CIKULUR	-
50	SMKN 1 CILELES	0821000700	69883594 SMKN 1 CILELES	-
51	SMKN 1 CIPANAS	0821000726	20607872 SMKN 1 CIPANAS	-
52	SMKN 1 CIRINTEN	0821000611	20616197 SMKN 1 CIRINTEN	-
53	SMKN 1 CURUGBITUNG	0821000645	20623421 SMKN 1 CURUGBITUNG	110,00
54	SMKN 1 GUNUNG KENCANA	0891000073	20616539 SMKN 1 GUNUNG KENCANA	540.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
55	SMKN 1 KALANGANYAR	0821005124	70011591 SMKN 1 KALANGANYAR	-
56	SMKN 1 LEBAKGEDONG	0821000751	20614881 SMKN 1 LEBAKGEDONG	-
57	SMKN 1 Leuwidamar	0821004357	70002729 SMKN 1 LEUWIDAMAR	-
58	SMKN 1 MAJA	0821005272	70011614 SMK NEGERI 1 MAJA	-
59	SMKN 1 MALINGPING	0891000201	20607873 SMKN 1 MALINGPING	-
60	SMKN 1 PANGGARANGAN	0821005094	70011857 SMKN 1 PANGGARANGAN	-
61	SMKN 1 RANGKASBITUNG	0821000670	20607803 SMKN 1 RANGKASBITUNG	880.000,00
62	SMKN 1 SAJIRA	0821005086	70011664 SMK NEGERI 1 SAJIRA	-
63	SMKN 1 SOBANG	0821000785	69946179 SMKN 1 SOBANG	-
64	SMKN 1 WANASALAM	0891000855	69987107 SMKN 1 WANASALAM	-
65	SMKN 1 WARUNGGUNUNG	0821000599	20623420 SMKN 1 WARUNGGUNUNG	-
66	SMKN 2 CIHARA	0821005108	70011795 SMK NEGERI 2 CIHARA	-
67	SMKN 2 MALINGPING	0821005116	70011896 SMKN 2 MALINGPING	-
68	SMKN 2 RANGKASBITUNG	0821000581	20601850 SMKN 2 RANGKASBITUNG	-
				-
	KABUPATEN PANDEGLANG			276.273.640
1	SKHN 01 PEMBINA PANDEGLANG	0831001178	20600448 SKHN 01 PEMBINA PDG	-
2	SMAN 1 PANDEGLANG	0831000872	20600451 SMAN 1 PANDEGLANG	-
3	SMAN 2 PANDEGLANG	0831000881	20600468 SMAN 2 PANDEGLANG	142.688.125
4	SMAN 3 PANDEGLANG	0762000091	20600467 SMAN 3 PANDEGLANG	-
5	SMAN 4 PANDEGLANG	0762000083	20600466 SMAN 4 PANDEGLANG	119.654
6	SMAN 5 PANDEGLANG	0831000911	20600465 SMAN 5 PANDEGLANG	14.850.000
7	SMAN 6 PANDEGLANG	0831000929	20600464 SMAN 6 PANDEGLANG	-
8	SMAN 7 PANDEGLANG	0831000937	20600463 SMAN 7 PANDEGLANG	9.220.079
9	SMAN 8 PANDEGLANG	0831000945	20600462 SMAN 8 PANDEGLANG	-
10	SMAN 9 PANDEGLANG	0901000301	20600461 SMAN 9 PANDEGLANG	-
11	SMAN 10 PANDEGLANG	0831000961	20600452 SMAN 10 PANDEGLANG	-
12	SMAN 11 PANDEGLANG	0831000970	20600453 SMAN 11 PANDEGLANG	-
13	SMAN 12 PANDEGLANG	0831000988	20600471 SMAN 12 PANDEGLANG	-
14	SMAN 13 PANDEGLANG	0831000996	20600470 SMAN 13 PANDEGLANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
15	SMAN 14 PANDEGLANG	0831001003	20600469 SMAN 14 PANDEGLANG	-
16	SMAN 15 PANDEGLANG	0762000067	20600460 SMAN 15 PANDEGLANG	-
17	SMAN 16 PANDEGLANG	0831000139	20600459 SMAN 16 PANDEGLANG	-
18	SMAN 17 PANDEGLANG	0831001038	20600434 SMAN 17 PANDEGLANG	522.540
19	SMAN 18 PANDEGLANG	0901000379	69985873 SMAN 18 PANDEGLANG	-
20	SMAN 19 PANDEGLANG	0831003871	70011722 SMAN 19 PANDEGLANG	2.900.000
21	SMAN CMBBS	0831001046	20607805 SMAN CMBBS	-
22	SMKN 1 PANDEGLANG	0831001054	20600458 SMKN 1 PANDEGLANG	-
23	SMKN 2 PANDEGLANG	0831001062	20600565 SMKN 2 PANDEGLANG	-
24	SMKN 3 PANDEGLANG	0762000075	20600571 SMKN 3 PANDEGLANG	-
25	SMKN 4 PANDEGLANG	0831001089	20600570 SMKN 4 PANDEGLANG	1.081.014
26	SMKN 5 PANDEGLANG	0831001097	20600569 SMKN 5 PANDEGLANG	-
34	SMKN 13 PANDEGLANG	0762000059	69986892 SMKN 13 PANDEGLANG	40.600.000
35	SMKN 14 PANDEGLANG	0831004550	69986573 SMKN 14 PANDEGLANG	733.880
36	SMKN 15 PANDEGLANG	0831003901	70011509 SMKN 15 PANDEGLANG	-
37	SMKN 16 PANDEGLANG	0831003898	70011552 SMKN 16 PANDEGLANG	-
38	SMKN 17 PANDEGLANG	0831003880	70011543 SMKN 17 PANDEGLANG	-
39	SMKN 18 PANDEGLANG	0831007818	70046226 SMKN 18 PANDEGLANG	826.500
	KOTA SERANG			201.138.068
1	SKHN 01 KOTA SERANG	0801010326	20605334 SKHN 01 KOTA SERANG	3.511.400
2	SKHN 02 KOTA SERANG	0801011055	20605332 SKHN 02 KOTA SERANG	3.372.350
3	SMAN 1 KOTA SERANG	0801010351	20605093 SMAN 1 KOTA SERANG	-
4	SMAN 2 KOTA SERANG	0801009964	20605103 SMAN 2 KOTA SERANG	-
5	SMAN 3 KOTA SERANG	0801010016	20605094 SMAN 3 KOTA SERANG	-
6	SMAN 4 KOTA SERANG	0801009981	20605106 SMAN 4 KOTA SERANG	-
7	SMAN 5 KOTA SERANG	0801013449	20605327 SMAN 5 KOTA SERANG	-
8	SMAN 6 KOTA SERANG	0801010024	20607979 SMAN 6 KOTA SERANG	-
9	SMAN 7 KOTA SERANG	0801010253	69734160 SMAN 7 KOTA SERANG	-
10	SMAN 8 KOTA SERANG	0801024335	69758396 SMAN 8 KOTA SERANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
11	SMKN 1 KOTA SERANG	0801010075	20605058 SMKN 1 KOTA SERANG	-
12	SMKN 2 KOTA SERANG	0801010164	20605059 SMKN 2 KOTA SERANG	38.735.118
13	SMKN 3 KOTA SERANG	0801010199	20605126 SMKN 3 KOTA SERANG	-
14	SMKN 4 KOTA SERANG	0801010202	20607900 SMKN 4 KOTA SERANG	155.519.200
15	SMKN 5 KOTA SERANG	0801010032	20614350 SMKN 5 KOTA SERANG	-
16	SMKN 6 KOTA SERANG	0801010458	20616187 SMKN 6 KOTA SERANG	-
17	SMKN 7 KOTA SERANG	0801010130	69771387 SMKN 7 KOTA SERANG	-
18	SMKN 8 KOTA SERANG	0801010580	20615095 SMKN 8 KOTA SERANG	-
	KABUPATEN SERANG			512.348.704
1	SMAN 1 ANYER	0811000337	20605353 SMAN 1 ANYER	-
2	SMAN 1 BANDUNG	0801010091	20613795 SMAN 1 BANDUNG	-
3	SMAN 1 BAROS	0801010059	20605097 SMAN 1 BAROS	-
4	SMAN 1 BINUANG	0801010083	20613796 SMAN 1 BINUANG	-
5	SMAN 1 BOJONEGARA	0801010105	20605354 SMAN 1 BOJONEGARA	321.500
6	SMAN 1 CARENANG	0801010440	20605366 SMAN 1 CARENANG	-
7	SMAN 1 CIKANDE	0801009867	20613970 SMAN 1 CIKANDE	-
8	SMAN 1 CIKEUSAL	0801010181	20605228 SMAN 1 CIKEUSAL	-
9	SMAN 1 CINANGKA	0811000213	20605090 SMAN 1 CINANGKA	-
10	SMAN 1 CIOMAS	0801010318	20605102 SMAN 1 CIOMAS	-
11	SMAN 1 CIRUAS	0801010407	20605104 SMAN 1 CIRUAS	65.480.000
12	SMAN 1 GUNUNG SARI	0801024866	20613794 SMAN 1 GUNUNG SARI	-
13	SMAN 1 JAWILAN	0801009930	20605105 SMAN 1 JAWILAN	-
14	SMAN 1 KIBIN	0801010008	20605107 SMAN 1 KIBIN	161.690.601
15	SMAN 1 KOPO	0801009956	20613788 SMAN 1 KOPO	2.560.000
16	SMAN 1 KRAGILAN	0801010393	69759246 SMAN 1 KRAGILAN	-
17	SMAN 1 KRAMAT WATU	0801024858	20605108 SMAN 1 KRAMAT WATU	1.600.000
18	SMAN 1 LEBAK WANGI	0801023657	69986036 SMAN 1 LEBAK WANGI	-
19	SMAN 1 MANCAK	0801009948	20605109 SMAN 1 MANCAK	-
20	SMAN 1 PABUARAN	0801009883	20605110 SMAN 1 PABUARAN	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
21	SMAN 1 PADARINCANG	0801009841	20605101 SMAN 1 PADARINCANG	-
22	SMAN 1 PAMARAYAN	0801009859	20605100 SMAN 1 PAMARAYAN	-
23	SMAN 1 PETIR	0801009832	20605091 SMAN 1 PETIR	-
24	SMAN 1 PONTANG	0801010121	20605092 SMAN 1 PONTANG	-
25	SMAN 1 PULOAMPEL	0801010148	20622300 SMAN 1 PULOAMPEL	-
26	SMAN 1 TIRTAYASA	0801009921	20605095 SMAN 1 TIRTAYASA	-
27	SMAN 1 WARINGINKURUNG	0801009999	20605096 SMAN 1 WARINGINKURUNG	-
28	SMKN 1 ANYER	0811000841	20623155 SMK NEGERI 1 ANYER	-
29	SMKN 1 BAROS	0881005123	70046399 SMKN 1 BAROS	9.492.490
30	SMKN 1 CIKANDE	0801010610	20605057 SMKN 1 CIKANDE	-
31	SMKN 1 CINANGKA	0801010229	20622311 SMKN 1 CINANGKA	-
32	SMKN 1 CIRUAS	0801010156	20622312 SMKN 1 CIRUAS	-
33	SMKN 1 KRAGILAN	0801010041	20607901 SMKN 1 KRAGILAN	256.347.430
34	SMKN 1 KRAMATWATU	0811000523	69788590 SMKN 1 KRAMATWATU	-
35	SMKN 1 PADARINCANG	0881001853	69986692 SMKN 1 PADARINCANG	-
36	SMKN 1 PULOAMPEL	0811000612	20613866 SMKN 1 PULOAMPEL	-
37	SMKN 1 TANARA	0801010601	20614541 SMKN 1 TANARA	14.856.683
38	SMKN 1 TUNJUNG TEJA	0801010474	20622313 SMKN 1 TUNJUNG TEJA	-
39	SMKN 1 WARINGINKURUNG	0811010103	69986693 SMKN 1 WARINGINKURUNG	-
	KOTA CILEGON			461.752.676
1	SKHN 01 KOTA CILEGON	0811001724	69994894 SKHN 01 KOTA CILEGON	-
2	SMAN 1 CILEGON	0811000647	20606289 SMAN 1 CILEGON	-
3	SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON	0811000361	20606271 SMAN 2 KS CILEGON	-
4	SMAN 3 CILEGON	0811000272	20606270 SMAN 3 CILEGON	-
5	SMAN 4 CILEGON	0811000426	20613531 SMAN 4 CILEGON	-
6	SMAN 5 CILEGON	0811000302	20606269 SMAN 5 CILEGON	24.057.200
7	SMKN 1 CILEGON	0811000485	20606250 SMKN 1 CILEGON	437.695.476
8	SMKN 2 CILEGON	0811000248	20606249 SMKN 2 CILEGON	-
9	SMKN 3 CILEGON	0811000931	20615483 SMKN 3 CILEGON	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
10	SMKN 4 CILEGON	0811000451	20616304 SMKN 4 CILEGON	-
	KABUPATEN TANGERANG			561.471.169
1	SKHN 01 KABUPATEN TANGERANG	0732001549	20615486 SKHN 01 KAB TANGERANG	-
2	SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	0732000763	20613470 SMAN 1 KAB TANGERANG	-
3	SMAN 2 KABUPATEN TANGERANG	0732001182	20603367 SMAN 2 KAB TANGERANG	-
4	SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG	0732000194	20603361 SMAN 3 KAB TANGERANG	150.784.427
5	SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG	0732000933	20603358 SMAN 4 KAB TANGERANG	10.408.947
6	SMAN 5 KABUPATEN TANGERANG	0732001034	20603364 SMAN 5 KAB TANGERANG	-
7	SMAN 6 KABUPATEN TANGERANG	0732000810	20603269 SMAN 6 KAB TANGERANG	-
8	SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG	0732001158	20603365 SMAN 7 KAB TANGERANG	-
9	SMAN 8 KABUPATEN TANGERANG	0732000160	20603360 SMAN 8 KAB TANGERANG	105.136.657
10	SMAN 9 KABUPATEN TANGERANG	0732001069	20603366 SMAN 9 KAB TANGERANG	100.000
11	SMAN 10 KABUPATEN TANGERANG	0732000968	20603362 SMAN 10 KAB TANGERANG	-
12	SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG	0732000691	20603251 SMAN 11 KAB TANGERANG	-
13	SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG	0732001361	20603268 SMAN 12 KAB TANGERANG	899.810
14	SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG	0732001484	20603384 SMAN 13 KAB TANGERANG	-
15	SMAN 14 KABUPATEN TANGERANG	0732000780	20613543 SMAN 14 KAB TANGERANG	-
16	SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG	0732000721	20613603 SMAN 15 KAB TANGERANG	-
17	SMAN 16 KABUPATEN TANGERANG	0732001247	20603363 SMAN 16 KAB TANGERANG	136.682.460
18	SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG	0732000631	20613528 SMAN 17 KAB TANGERANG	-
19	SMAN 18 KABUPATEN TANGERANG	0732000844	20614413 SMAN 18 KAB TANGERANG	114.000
20	SMAN 19 KABUPATEN TANGERANG	0732000305	20613465 SMAN 19 KAB TANGERANG	-
21	SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG	0732001093	20613548 SMAN 20 KAB TANGERANG	-
22	SMAN 21 KABUPATEN TANGERANG	0732001123	20613544 SMAN 21 KAB TANGERANG	-
23	SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG	0732001301	20613519 SMAN 22 KAB TANGERANG	-
24	SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG	0732000585	20613785 SMAN 23 KAB TANGERANG	-
25	SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG	0732001450	20613464 SMAN 24 KAB TANGERANG	-
26	SMAN 25 KABUPATEN TANGERANG	0732001514	20613833 SMAN 25 KAB TANGERANG	122.500
27	SMAN 26 KABUPATEN TANGERANG	0732000828	20614057 SMAN 26 KAB TANGERANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
28	SMAN 27 KABUPATEN TANGERANG	0732001395	20613471 SMAN 27 KAB TANGERANG	-
29	SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG	0702000131	20613771 SMAN 28 KAB TANGERANG	-
30	SMAN 29 KABUPATEN TANGERANG	0732001271	20613561 SMAN 29 KAB TANGERANG	168.729
31	SMAN 30 KABUPATEN TANGERANG	0732100911	69990896 SMAN 30 KAB TANGERANG	-
32	SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG	0732103635	70011662 SMAN 31 KAB TANGERANG	-
33	SMAN 32 KABUPATEN TANGERANG	0732103660	70011668 SMAN 32 KAB TANGERANG	-
34	SMKN 1 KABUPATEN TANGERANG	0732001336	20607834 SMKN 1 KAB TANGERANG	-
35	SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG	0732000437	20607835 SMKN 2 KAB TANGERANG	156.953.639
36	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	0732000135	20614735 SMKN 3 KAB TANGERANG	-
37	SMKN 4 KABUPATEN TANGERANG	0732001212	20613439 SMKN 4 KAB TANGERANG	-
38	SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG	0732001662	20607837 SMKN 5 KAB TANGERANG	-
39	SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG	0732001573	20614727 SMKN 6 KAB TANGERANG	-
40	SMKN 7 KABUPATEN TANGERANG	0732001603	20614509 SMKN 7 KAB TANGERANG	-
41	SMKN 8 KABUPATEN TANGERANG	0732001425	20614732 SMKN 8 KAB TANGERANG	-
42	SMKN 9 KABUPATEN TANGERANG	0732000640	20622176 SMKN 9 KAB TANGERANG	-
43	SMKN 10 KABUPATEN TANGERANG	0732001638	69786933 SMKN 10 KAB TANGERANG	-
44	SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG	0732000658	69824463 SMKN 11 KAB TANGERANG	-
45	SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG	0732001000	69897080 SMKN 12 KAB TANGERANG	100.000
46	SMKN 13 KABUPATEN TANGERANG	0732104488	70046641 SMKN 13 KAB TANGERANG	-
47	SMKN 14 KABUPATEN TANGERANG	0732100466	70046137 SMKN 14 KAB TANGERANG	-
	KOTA TANGERANG			145.907.907
1	SKHN 01 TANGERANG	0710999813	70046546 SKHN 01 KOTA TGR	-
2	SMAN 1 TANGERANG	0712001194	20606853 SMAN 1 TANGERANG	2.200.372
3	SMAN 2 TANGERANG	0712000040	20606848 SMAN 2 TANGERANG	8.781.868
4	SMAN 3 TANGERANG	0131000103	20606847 SMAN 3 TANGERANG	8.710.615
5	SMAN 4 TANGERANG	0722000021	20606846 SMAN 4 TANGERANG	3.067.605
6	SMAN 5 TANGERANG	0722000072	20606831 SMAN 5 TANGERANG	9.183.152
7	SMAN 6 TANGERANG	0712002883	20606830 SMAN 6 TANGERANG	20.796.622
8	SMAN 7 TANGERANG	0131000090	20606829 SMAN 7 TANGERANG	12.581.552

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
9	SMAN 8 TANGERANG	0722000048	20606814 SMAN 8 TANGERANG	17.389.803
10	SMAN 9 TANGERANG	0131000111	20606813 SMAN 9 TANGERANG	23.616.432
11	SMAN 10 TANGERANG	0131000120	20606852 SMAN 10 TANGERANG	-
12	SMAN 11 TANGERANG	0722000030	20606851 SMAN 11 TANGERANG	22.606.098
13	SMAN 12 TANGERANG	0137001926	20606850 SMAN 12 TANGERANG	1.995.992
14	SMAN 13 TANGERANG	0131000146	20606849 SMAN 13 TANGERANG	8.209.993
15	SMAN 14 TANGERANG	0712001224	20607501 SMAN 14 TANGERANG	5.462.891
16	SMAN 15 TANGERANG	0722000056	20607924 SMAN 15 TANGERANG	1.304.912
17	SMKN 1 TANGERANG	0712001259	20606915 SMKN 1 TANGERANG	-
18	SMKN 2 TANGERANG	0722000081	20606900 SMKN 2 TANGERANG	-
19	SMKN 3 TANGERANG	0712001283	20606899 SMKN 3 TANGERANG	-
20	SMKN 4 TANGERANG	0712004177	20606898 SMKN 4 TANGERANG	-
21	SMKN 5 TANGERANG	0712001372	20607929 SMKN 5 TANGERANG	-
22	SMKN 6 TANGERANG	0712002913	20614355 SMKN 6 TANGERANG	-
23	SMKN 7 TANGERANG	0722000102	20615542 SMKN 7 TANGERANG	-
24	SMKN 8 TANGERANG	0722000064	20616265 SMKN 8 TANGERANG	-
25	SMKN 9 TANGERANG	0722000099	20616266 SMKN 9 TANGERANG	-
	KOTA TANGERANG SELATAN			484.844.983
1	SKHN 01 KOTA TANGERANG SELATAN	0702002192	70012340 SKHN 01 KOTA TANGSEL	-
2	SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000369	20603359 SMAN 1 KOTA TGR SLTN	-
3	SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000033	20613477 SMAN 2 KOTA TGR SLTN	23.943.000
4	SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000386	20603368 SMAN 3 KOTA TGR SLTN	26.059.346
5	SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000334	20603270 SMAN 4 KOTA TGR SLTN	-
6	SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000393	20603312 SMAN 5 KOTA TGR SLTN	11.561.100
7	SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000416	20613768 SMAN 6 KOTA TGR SLTN	121.426.967
8	SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN	0742000303	20603267 SMAN 7 KOTA TGR SLTN	60.552.000
9	SMAN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000423	20613552 SMAN 8 KOTA TGR SLTN	5.915.301
10	SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000360	20613518 SMAN 9 KOTA TGR SLTN	11.143.927
11	SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN	0702003261	20613553 SMAN 10 KOTA TGR SLTN	21.609.398

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
12	SMAN 11 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000394	20613563 SMAN 11 KOTA TGR SLTN	58.214.532
13	SMAN 12 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000408	69756084 SMAN 12 KOTA TGR SLTN	47.703.167
14	SMKN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000149	20607836 SMKN 1 KOTA TANGSEL	-
15	SMKN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000173	20614730 SMKN 2 KOTA TANGSEL	87.368.245
16	SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000165	20616038 SMKN 3 KOTA TANGSEL	-
17	SMKN 4 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000424	69760703 SMKN 4 TANGSEL	-
18	SMKN 5 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000084	69757487 SMKN 5 TANGSEL	-
19	SMKN 6 KOTA TANGERANG SELATAN	0742000206	69939071 SMKN 6 KOTA TANGSEL	9.348.000
20	SMKN 7 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000106	69939073 SMKN 7 KOTA TANGSEL	-
21	SMKN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	0702005531	70046138 SMKN 8 TANGSEL	-
	<i>TOTAL</i>			<i>2.797.507.593</i>

SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	UPT RSUD Banten	-
4	UPT RSUD Malingping	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
15	Dinas Perhubungan	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
22	Dinas Pariwisata	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
27	Biro Hukum	-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
29	Biro Umum	-
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-
32	Biro Administrasi Pimpinan	-
33	Sekretariat DPRD	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
39	Badan Penghubung	-
40	Inspektorat	-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
TOTAL		NIHIL

REKAPITULASI PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 6 Neraca

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Piutang Pajak Daerah	3.970.600	19.853	3.950.747
	Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I	-	-	-
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II	-	-	-
	Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-
	Pajak Air Permukaan	3.970.600	19.853	3.950.747
	Pajak Rokok	-	-	-
2	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	545.115.887
	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	545.115.887
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311	1.960.131	17.641.180
	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	19.601.311	1.960.131	17.641.180
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	350.763.862	849.074	349.914.788
	Piutang Jasa Giro	180.948.977	0	180.948.977
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	168.276.785	841.384	167.435.401
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.690	1.530.410
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	576.641.493.000
	Piutang Dana Perimbangan	576.641.493.000	-	576.641.493.000
6	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	4.609.749.111
	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	4.609.749.111
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	2.126.882.873	7.747.344.013
	Piutang TP	-	-	-
	Piutang TGR	9.874.226.886	2.126.882.873	7.747.344.013
8	Piutang Lainnya	10.897.963.851	5.041.114.600	5.856.849.251
	Piutang Rekanan atas Uang Muka 20% pengadaan Alkes TA 2013 oleh Dinkes	5.041.114.600	5.041.114.600	-
	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	5.856.849.251	-	5.856.849.251
	Jumlah	602.945.623.784	7.173.565.807	595.772.057.977

REKAPITULASI TOTAL PIUTANG PAJAK LANCAR PKB, BBNKB, ABT/AP, PBBKB
PER 31 DESEMBER 2025

NO	UPTD	TOTAL PIUTANG PAJAK LANCAR					SALDO PENYISIHAN PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG	SALDO PIUTANG BERSIH
		SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN TUNGGAKAN	DALUARSA	PENURUNAN TUNGGAKAN	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
							Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13= 7-12
1	UPTD SERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	UPTD CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD PANDEGLANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	6.927.400	-	-	6.927.400	-	-	-	-	-	-	-
4	UPTD LEBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	UPTD CIKANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPTD SERPONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPTD CIKOKOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD CIPUTAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	UPTD BALARAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	UPTD CILEDUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	UPTD MALINGPNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	3.970.600	-	-	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
12	UPTD KELAPA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PBBKB	268.189.673	-	-	268.189.673	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SELURUHNYA		275.117.073	3.970.600	-	275.117.073	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747

REKAPITULASI TOTAL PIUTANG PAJAK PKB, BBNKB, ABT/AP

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TOTAL PIUTANG PAJAK					SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN TUNGGAKAN	DALUARSA	PENURUNAN TUNGGAKAN	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
							Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13= 7-12
1	PKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BBNKB I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BBNKB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ABT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	-	3.970.600	-	-	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
6	PAJAK ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PBBKB	268.189.673	-	-	268.189.673	-	-	-	-	-	-	-
8	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		268.189.673	3.970.600	-	268.189.673	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747

PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 8 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PIUTANG BLUD)
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan	RSUD BANTEN	2.368.835.100	-	-	2.368.835.100	-	-	-	-	-	-	-
2	Piutang BLUD - BPJS Ketenagakerjaan	RSUD BANTEN	-	-	240.976.600	-	240.976.600	1.204.883	-	-	-	1.204.883	239.771.717
3	Piutang BLUD - PT. Asuransi Jasaraharja	RSUD BANTEN	-	-	98.151.825	-	98.151.825	490.759	-	-	-	490.759	97.661.066
4	Piutang BLUD - PT. Taspen	RSUD BANTEN	-	-	67.976.500	-	67.976.500	339.883	-	-	-	339.883	67.636.618
5	Piutang BLUD - BKD Provinsi Banten	RSUD BANTEN	-	-	2.280.000	-	2.280.000	11.400	-	-	-	11.400	2.268.600
6	Piutang BLUD - RS Drajat Prawiranegara	RSUD BANTEN	-	-	6.500.000	-	6.500.000	32.500	-	-	-	32.500	6.467.500
	SUB JUMLAH RSUD BANTEN		2.368.835.100	-	415.884.925	2.368.835.100	415.884.925	2.079.425	-	-	-	2.079.425	413.805.500
7	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan	RSUD MALINGPING	3.479.478.832	-	-	3.479.478.832	-	-	-	-	-	-	-
8	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan Obat Kronis	RSUD MALINGPING	-	-	129.762.238	-	129.762.238	648.811	-	-	-	648.811	129.113.427
	SUB JUMLAH RSUD MALINGPING		3.479.478.832	-	129.762.238	3.479.478.832	129.762.238	648.811	-	-	-	648.811	129.113.427
10	Piutang BLUD - PT Cemindo Gemilang, Tbk	RSUD CILOGRANG	-	-	2.208.000	-	2.208.000	11.040	-	-	-	11.040	2.196.960
	SUB JUMLAH RSUD CILOGRANG		-	-	2.208.000	-	2.208.000	11.040	-	-	-	11.040	2.196.960
	JUMLAH		5.848.313.932	-	547.855.163	5.848.313.932	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA PIUTANG : PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2024	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	BAPENDA	19.601.311	-	-	-	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
	Jumlah		19.601.311	-	-	-	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 10 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Pengembalian Jasa Giro Hibah PWRI	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengembalian Jasa giro LPTQ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembalian Jasa giro Baznas		-		639.147	-	639.147	-	-	-	-	-	639.147
4	Piutang Jasa Giro Rekening Giro Pemerintah Posisi Tanggal 25 s/d 31	Badan Pendapatan Daerah	366.671.526	-	180.309.830	366.671.526	180.309.830	-	-	-	-	0	180.309.830
	20606853 SMAN 1 TANGERANG		19.582	-	904	19.582	904	-				-	904
	BEND PENG PEMB UPTD CIKOKOL		11.231	-	1.561	11.231	1.561	-				-	1.561
	UPTD PENG DAS CIDURIAN CISADAN		237.688	-	0	237.688	0	-				-	0
	20606814 SMAN 8 TANGERANG		6.181	-	7.146	6.181	7.146	-				-	7.146
	20614413 SMAN 18 KAB TANGERANG		58	-	47	58	47	-				-	47
	KCD KABUPATEN TANGERANG		342	-	44	342	44	-				-	44
	BENDPENGPEM KCD WIL KOTANGSEL		3.801	-	-	3.801	-	-				-	-
	BEND PENG PEM UPT KELAPA DUA		3.528	-	234	3.528	234	-				-	234
	UPTDPJJ TANGERANG		-	-	34.116	-	34.116	-				-	34.116
	69986892 SMKN 13 PANDEGLANG		13.815	-	16.685	13.815	16.685	-				-	16.685
	KAS BLUD RSU BANTEN		12.829.568	-		12.829.568	-	-				-	-
	20605094 SMAN 3 KOTA SERANG		-	-	-	-	-	-				-	-
	20605354 SMAN 1 BOJONEGARA		6.464	-	132	6.464	132	-				-	132
	20607900 SMKN 4 KOTA SERANG		-	-	63.912	-	63.912	-				-	63.912
	20605057 SMKN 1 CIKANDE		-	-	-	-	-	-				-	-
	BPKAD PROVINSI BANTEN		10.208	-	15.303	10.208	15.303	-				-	15.303
	BEND PENG DISNAKER PROV BANTEN		8.629	-	1.650	8.629	1.650	-				-	1.650
	DPUPR PROVINSI BANTEN		255.190	-	134.922	255.190	134.922	-				-	134.922
	BEND PENG DIKBUD PROV BANTEN		148.727	-	9.213.797	148.727	9.213.797	-				-	9.213.797

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	BEND PENG DKP PROV BANTEN		84.986	-	-	84.986	-	-				-	-
	BIRO ADPIM SETDA PROV BANTEN		14.355	-	15.081	14.355	15.081	-				-	15.081
	BEND PENG DISPAR PROV BANTEN		-	-	-	-	-	-				-	-
	BEND PENG DISHUB PROV BANTEN		189.267	-	278.555	189.267	278.555	-				-	278.555
	SEKRETARIAT DAERAH PROV BANTEN		41.359	-	105.737	41.359	105.737	-				-	105.737
	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN		1.463.731	-	2.789.161	1.463.731	2.789.161	-				-	2.789.161
	BEND PENG DINKES PROV BANTEN		147.791	-	180.367	147.791	180.367	-				-	180.367
	UPTD DAS CIUJUNG CIDANAU		5.671	-	-	5.671	-	-				-	-
	UPTD P DAS CILIMAN CISAWARNA		29.074	-	-	29.074	-	-				-	-
	BEND PENG DPK PROV BANTEN		52.876	-	46.001	52.876	46.001	-				-	46.001
	BEND PENG DLHK PROV BANTEN		95.485	-	54.811	95.485	54.811	-				-	54.811
	BEND PENG BAPPEDA PROV BANTEN		324.594	-	-	324.594	-	-				-	-
	BEND PENG DP3AKKB PROV BANTEN		79.007	-	41.315	79.007	41.315	-				-	41.315
	BEND PENG PEM UPTD LABKESDA		19.715	-	62.454	19.715	62.454	-				-	62.454
	BENG PENG PEM UPTD PELKES		28.373	-	77.144	28.373	77.144	-				-	77.144
	BEND PENG PEM UPTD PJJSC		55.809	-	1.827	55.809	1.827	-				-	1.827
	BEND PENG PEM KCD SERAGON		2.444	-	822	2.444	822	-				-	822
	RKUD PROVINSI BANTEN		346.623.285	-	157.507.550	346.623.285	157.507.550	-				-	157.507.550
	BEND PENG PEM UPTD PBKBIK		-	-	19.927	-	19.927	-				-	19.927
	20605090 SMAN 1 CINANGKA		-	-	-	-	-	-				-	-
	BEND PENG PEMB UPT CILEGON		3.066	-	12.842	3.066	12.842	-				-	12.842
	BLUD RSUD MALINGPING		1.339.069	-		1.339.069	-	-				-	-
	UPTDPJL		75.877	-	16.005	75.877	16.005	-				-	16.005
	BEND PENG PEMBANTU KCD LEBAK		1.094	-	1.633	1.094	1.633	-				-	1.633
	BEND PENG PEM UPTD PPD RANGKAS		212	-	8.629	212	8.629	-				-	8.629
	BENDPENGPEM DIKBUD KCD KAB PDG		22	-	3.100	22	3.100	-				-	3.100
	BEND PENG BPSDMD PROV BANTEN		126.568	-	-	126.568	-	-				-	-
	BEND PENG BAPENDA PROV BANTEN		113.358	-	814.446	113.358	814.446	-				-	814.446
	BEND PENG INSPEKTORAT BANTEN		2.238	-	272.518	2.238	272.518	-				-	272.518
	BEND PENG PRKP PROV BANTEN		68.886	-	106.413	68.886	106.413	-				-	106.413
	BEND PENG BPBD PROV BANTEN		12.897	-	45.079	12.897	45.079	-				-	45.079
	BEND PENG DPMPSTSP PROV BANTEN		58.326	-	220.320	58.326	220.320	-				-	220.320
	BEND PENG DISPERINDAG	6.257	-	-	6.257	-	-				-	-	
	BEND PENG PEMB RSUD BANTEN	132.328	-	2.338.555	132.328	2.338.555	-				-	2.338.555	
	BEND PENG DISPORA	413.599	-	4.921	413.599	4.921	-				-	4.921	
	BEND PENG KETAPANG	49.390	-	1.076	49.390	1.076	-				-	1.076	
	BEND PENG KOMINFOTIKSAN BANTEN	44.633	-	10.106	44.633	10.106	-				-	10.106	
	BEND PENG PEMB BIRO HUKUM	18.453	-	-	18.453	-	-				-	-	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih	
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun			
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13	
	BEND PENG DPMD PROV BANTEN		3.657	-	-	3.657	-	-				-	-	
	BEND PENG DINSOS PROV BANTEN		127.306	-	83.465	127.306	83.465	-				-	83.465	
	BEND PENG KESBANGPOL BANTEN		3.153	-	-	3.153	-	-				-	-	
	BEND PENG BKD PROV BANTEN		151.098	-	9.192	151.098	9.192	-				-	9.192	
	BEND PENG PEM BPTJJP WIL PDG		64.384	-	-	64.384	-	-				-	-	
	BEND PENG RSUD MALINGPING		137.875	-	725.493	137.875	725.493	-				-	725.493	
	BEND PENG DISTAN PROV BANTEN		173.701		59.622	173.701	59.622	-				-	59.622	
	BEND PENG SATPOLPP PROV BANTEN		152.115		60.182	152.115	60.182	-				-	60.182	
	20603361 SMAN 3 KAB TANGERANG		51.082		61.966	51.082	61.966	-				-	61.966	
	20613563 SMAN 11 KOTA TGR SLTN		48.278		23.924	48.278	23.924	-				-	23.924	
	BEND PENG DINKOP DAN UKM		44.823		-	44.823	-	-				-	-	
	20601874 SMAN 1 RANGKASBITUNG		43.492		3.736	43.492	3.736	-				-	3.736	
	20605059 SMKN 2 KOTA SERANG		33.125		15.919	33.125	15.919	-				-	15.919	
	20601879 SMAN 1 CIPANAS		32.679		114	32.679	114	-				-	114	
	20603268 SMAN 12 KAB TANGERANG		31.030		370	31.030	370	-				-	370	
	20601877 SMAN 1 LEUWIDAMAR		24.264		985	24.264	985	-				-	985	
	20613553 SMAN 10 KOTA TGR SLTN		19.083		8.881	19.083	8.881	-				-	8.881	
	20603358 SMAN 4 KAB TANGERANG		16.072		4.278	16.072	4.278	-				-	4.278	
	20607867 SMAN 1 CILOGRANG		15.310		1.765	15.310	1.765	-				-	1.765	
	20600453 SMAN 11 PANDEGLANG		11.971		-	11.971	-	-				-	-	
	20613543 SMAN 14 KAB TANGERANG		11.928		-	11.928	-	-				-	-	
	20614730 SMKN 2 KOTA TANGSEL		11.618		35.905	11.618	35.905	-				-	35.905	
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		11.222		20.713	11.222	20.713	-				-	20.713	
	20603312 SMAN 5 KOTA TGR SLTN		9.964		4.751	9.964	4.751	-				-	4.751	
	BEND PENG PEM UPT CIKANDE		9.671		24.228	9.671	24.228	-				-	24.228	
	69756084 SMAN 12 KOTA TGR SLTN		7.669		19.604	7.669	19.604	-				-	19.604	
	20603363 SMAN 16 KAB TANGERANG		6.801		56.171	6.801	56.171	-				-	56.171	
	20605104 SMAN 1 CIRUAS		6.614		26.910	6.614	26.910	-				-	26.910	
	20606830 SMAN 6 TANGERANG		6.147		8.547	6.147	8.547	-				-	8.547	
	BEND PENG PEMB UPT BALARAJAJA		6.133		1.726	6.133	1.726	-				-	1.726	
	20613552 SMAN 8 KOTA TGR SLTN		5.623		2.431	5.623	2.431	-				-	2.431	
	69824463 SMKN 11 KAB TANGERANG		5.596		-	5.596	-	-				-	-	
	BEND PENG PEMB UPT CILEDUG		5.580		62.642	5.580	62.642	-				-	62.642	
	20606851 SMAN 11 TANGERANG		5.365		9.290	5.365	9.290	-				-	9.290	
	20613518 SMAN 9 KOTA TGR SLTN		4.935		4.580	4.935	4.580	-				-	4.580	
	69994894 SKHN 01 KOTA CILEGON		4.688		-	4.688	-	-				-	-	
	BEND PENG PEMB UPT SERANG		4.672		14.935	4.672	14.935	-				-	14.935	
	70011668 SMAN 32 KAB TANGERANG			4.437		-	4.437	-	-				-	-

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	20613465 SMAN 19 KAB TANGERANG		4.015		-	4.015	-	-				-	-
	BEND PENG BPHB PROV BANTEN		3.924		-	3.924	-	-				-	-
	UPTD LATIHAN KERJA PROV BANTEN		3.437		19.730	3.437	19.730	-				-	19.730
	BEND PENG PEMB UPT CIPUTAT		3.392		11.679	3.392	11.679	-				-	11.679
	20603362 SMAN 10 KAB TANGERANG		2.861		-	2.861	-	-				-	-
	20606269 SMAN 5 CILEGON		2.772		9.887	2.772	9.887	-				-	9.887
	20613470 SMAN 1 KAB TANGERANG		2.605		-	2.605	-	-				-	-
	20613471 SMAN 27 KAB TANGERANG		2.525		-	2.525	-	-				-	-
	20603270 SMAN 4 KOTA TGR SLTN		2.502		-	2.502	-	-				-	-
	69816866 SMAN 2 BAYAH		2.493		87	2.493	87	-				-	87
	BEND PENG DESDM PROV BANTEN		2.357		968.155	2.357	968.155	-				-	968.155
	69986692 SMKN 1 PADARINCANG		2.191		-	2.191	-	-				-	-
	20622313 SMKN 1 TUNJUNG TEJA		2.055		-	2.055	-	-				-	-
	20605101 SMAN 1 PADARINCANG		2.030		-	2.030	-	-				-	-
	20600463 SMAN 7 PANDEGLANG		1.806		3.789	1.806	3.789	-				-	3.789
	20601876 SMAN 1 MAJA		1.708		-	1.708	-	-				-	-
	20606829 SMAN 7 TANGERANG		1.686		5.171	1.686	5.171	-				-	5.171
	20605332 SKHN 02 KOTA SERANG		1.681		1.386	1.681	1.386	-				-	1.386
	20600467 SMAN 3 PANDEGLANG		1.485		-	1.485	-	-				-	-
	20613785 SMAN 23 KAB TANGERANG		1.449		-	1.449	-	-				-	-
	20605126 SMKN 3 KOTA SERANG		1.393		-	1.393	-	-				-	-
	20601881 SMAN 1 BAYAH		1.288		27.946	1.288	27.946	-				-	27.946
	20605334 SKHN 01 KOTA SERANG		1.192		1.443	1.192	1.443	-				-	1.443
	20600468 SMAN 2 PANDEGLANG		1.161		58.639	1.161	58.639	-				-	58.639
	20613768 SMAN 6 KOTA TGR SLTN		1.149		49.902	1.149	49.902	-				-	49.902
	20606289 SMAN 1 CILEGON		1.117		-	1.117	-	-				-	-
	20607980 SMAN 1 CIBADAK		1.016		-	1.016	-	-				-	-
	BEND PENG PEMB UPT PANDEGLANG		1.007		8.518	1.007	8.518	-				-	8.518
	20603267 SMAN 7 KOTA TGR SLTN		887		24.884	887	24.884	-				-	24.884
	20607982 SMAN 1 CIKULUR		860		-	860	-	-				-	-
	20606271 SMAN 2 KS CILEGON		841		-	841	-	-				-	-
	20601880 SMAN 1 CIMARGA		803		-	803	-	-				-	-
	20607501 SMAN 14 TANGERANG	746		2.245	746	2.245	-				-	2.245	
	20615095 SMKN PERTANIAN	737			737	-	-				-	-	
	20606831 SMAN 5 TANGERANG	725		3.774	725	3.774	-				-	3.774	
	20603251 SMAN 11 KAB TANGERANG	697		-	697	-	-				-	-	
	20606852 SMAN 10 TANGERANG	695		-	695	-	-				-	-	
	20613868 SMAN 1 SAJIRA	648		-	648	-	-				-	-	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	69897080 SMKN 12 KAB TANGERANG		623		41	623	41	-				-	41
	20613833 SMAN 25 KAB TANGERANG		618		50	618	50	-				-	50
	20600452 SMAN 10 PANDEGLANG		609		-	609	-	-				-	-
	20603366 SMAN 9 KAB TANGERANG		577		41	577	41	-				-	41
	20606848 SMAN 2 TANGERANG		570		3.609	570	3.609	-				-	3.609
	20607873 SMKN 1 MALINGPING		566		-	566	-	-				-	-
	20601867 SMAN 1 BANJARSARI		559		-	559	-	-				-	-
	20600448 SKHN 01 PEMBINA PDG		536		-	536	-	-				-	-
	20613603 SMAN 15 KAB TANGERANG		510		-	510	-	-				-	-
	20600451 SMAN 1 PANDEGLANG		472		-	472	-	-				-	-
	69990896 SMAN 30 KAB TANGERANG		468		-	468	-	-				-	-
	20613548 SMAN 20 KAB TANGERANG		459		-	459	-	-				-	-
	20605091 SMAN 1 PETIR		413		-	413	-	-				-	-
	20613919 SMAN 2 BANJARSARI		409		-	409	-	-				-	-
	20613795 SMAN 1 BANDUNG		401		-	401	-	-				-	-
	20605096 SMAN 1 WARINGINKURUNG		360		-	360	-	-				-	-
	20606850 SMAN 12 TANGERANG		336		820	336	820	-				-	820
	20603365 SMAN 7 KAB TANGERANG		327		-	327	-	-				-	-
	BEND PENG PEM UPT MALINGPING		326		5.127	326	5.127	-				-	5.127
	20622300 SMAN 1 PULOAMPEL		325		-	325	-	-				-	-
	20601873 SMAN 1 WARUNGGUNUNG		314		-	314	-	-				-	-
	69816901 SMAN 1 KALANGANYAR		288		73	288	73	-				-	73
	BEND PENG BIRO PEMKESRA BANTEN		268		-	268	-	-				-	-
	20607866 SMAN 1 CIBEBER		255		512	255	512	-				-	512
	20603359 SMAN 1 KOTA TGR SLTN		240		-	240	-	-				-	-
	20607854 SMAN 1 WANASALAM		225		1.336	225	1.336	-				-	1.336
	20600465 SMAN 5 PANDEGLANG		222		6.103	222	6.103	-				-	6.103
	70011662 SMAN 31 KAB TANGERANG		190		-	190	-	-				-	-
	69985873 SMAN 18 PANDEGLANG		184		-	184	-	-				-	-
	69986693 SMKN 1 WARINGINKURUNG		183		-	183	-	-				-	-
	20601871 SMAN 3 RANGKAS BITUNG		168		-	168	-	-				-	-
	20613561 SMAN 29 KAB TANGERANG		165		69	165	69	-				-	69
	20601811 SKHN 01 LEBAK		158		-	158	-	-				-	-
	69734160 SMAN 7 KOTA SERANG		141		-	141	-	-				-	-
	20616187 SMKN 6 KOTA SERANG		130		-	130	-	-				-	-
	20607819 SMAN 1 CILELES		125		11.395	125	11.395	-				-	11.395
	20600466 SMAN 4 PANDEGLANG		114		49	114	49	-				-	49
	20607862 SMAN 1 MUNCANG		79		3.704	79	3.704	-				-	3.704

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	20614150 SMAN 1 SOBANG		79		76	79	76	-				-	76
	20605058 SMKN 1 KOTA SERANG		53		-	53	-	-				-	-
	BEND PENG PEM UPT SERPONG		44		2.957	44	2.957	-				-	2.957
	20613866 SMKN 1 PULOAMPEL		37		-	37	-	-				-	-
	20603367 SMAN 2 KAB TANGERANG		37		-	37	-	-				-	-
	20606846 SMAN 4 TANGERANG		35		1.261	35	1.261	-				-	1.261
	20607981 SMAN 1 BOJONGMANIK		27		-	27	-	-				-	-
	69986573 SMKN 14 PANDEGLANG		24		302	24	302	-				-	302
	20616197 SMKN 1 CIRINTEN		19		-	19	-	-				-	-
	20601878 SMAN 1 GUNUNG KENCANA		14		-	14	-	-				-	-
	70011722 SMAN 19 PANDEGLANG		14		1.192	14	1.192	-				-	1.192
	20603384 SMAN 13 KAB TANGERANG		6		-	6	-	-				-	-
	20601872 SMAN 2 RANGKASBITUNG		4		-	4	-	-				-	-
	20613528 SMAN 17 KAB TANGERANG		4		-	4	-	-				-	-
	20605092 SMAN 1 PONTANG		4		-	4	-	-				-	-
	69919380 SKHN 03 LEBAK		3		-	3	-	-				-	-
	20600469 SMAN 14 PANDEGLANG		3		-	3	-	-				-	-
	20614057 SMAN 26 KAB TANGERANG		2		-	2	-	-				-	-
	20600568 SMKN 6 PANDEGLANG		1		25.574	1	25.574	-				-	25.574
	20623417 SMAN 2 MAJA		1		288	1	288	-				-	288
	20623421 SMKN 1 CURUGBITUNG		0		0	0	0	-				-	0
	BEND PENG RSUD CILOGRANG		-		1.450.810	-	1.450.810	-				-	1.450.810
	BEND PENG RSUD LABUAN		-		1.196.790	-	1.196.790	-				-	1.196.790
	20605107 SMAN 1 KIBIN		-		66.448	-	66.448	-				-	66.448
	20613788 SMAN 1 KOPO		-		1.052	-	1.052	-				-	1.052
	20605108 SMAN 1 KRAMAT WATU		-		658	-	658	-				-	658
	70046399 SMKN 1 BAROS		-		3.901	-	3.901	-				-	3.901
	20607901 SMKN 1 KRAGILAN		-		105.331	-	105.331	-				-	105.331
	20614541 SMKN 1 TANARA		-		6.105	-	6.105	-				-	6.105
	20606250 SMKN 1 CILEGON		-		179.875	-	179.875	-				-	179.875
	69816881 SMAN 1 CIHARA		-		660	-	660	-				-	660
	70011680 SMAN 4 RKSBTG		-		6.333	-	6.333	-				-	6.333
	20616539 SMKN 1 GUNUNG KENCANA		-		222	-	222	-				-	222
	20607803 SMKN 1 RANGKASBITUNG		-		362	-	362	-				-	362
	20603360 SMAN 8 KAB TANGERANG		-		43.207	-	43.207	-				-	43.207
	20607835 SMKN 2 KAB TANGERANG		-		64.502	-	64.502	-				-	64.502
	20600434 SMAN 17 PANDEGLANG		-		215	-	215	-				-	215
	20600570 SMKN 4 PANDEGLANG		-		444	-	444	-				-	444

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	70046226 SMKN 18 PANDEGLANG		-		340	-	340	-				-	340
	20606847 SMAN 3 TANGERANG		-		3.580	-	3.580	-				-	3.580
	20606813 SMAN 9 TANGERANG		-		9.705	-	9.705	-				-	9.705
	20606849 SMAN 13 TANGERANG		-		3.374	-	3.374	-				-	3.374
	20607924 SMAN 15 TANGERANG		-		536	-	536	-				-	536
	20613477 SMAN 2 KOTA TGR SLTN		-		9.840	-	9.840	-				-	9.840
	20603368 SMAN 3 KOTA TGR SLTN		-		10.709	-	10.709	-				-	10.709
	69939071 SMKN 6 KOTA TANGSEL		-		3.842	-	3.842	-				0	3.841
	Jumlah		366.671.526	-	180.948.977	366.671.526	180.948.977	-	-	-	-	0	180.948.977

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih	Keterangan
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun			
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13	15
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.113.771.536	-	89.694.073	1.035.188.824	168.276.785	841.383,90	-	-	-	841.383,90	167.435.401	
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	481.100	-	1.538.100	481.100	1.538.100	7.690	-	-	-	7.690	1.530.410	
Jumlah			1.114.252.636	-	91.232.173	1.035.669.924	169.814.885	849.074,20	-	-	-	849.074,20	168.965.811	-

PIUTANG TRANSFER
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 12 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG TRANSFER DANA BAGI HASIL
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	Piutang DBH PPh Pasal 21	BPKAD	-	-	540.262.847.000	867.832.000	539.395.015.000	-				-	539.395.015.000
	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	BPKAD	-	-	30.755.866.000		30.755.866.000	-				-	30.755.866.000
	Piutang DBH PBB	BPKAD	-	-	5.679.866.000		5.679.866.000	-				-	5.679.866.000
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	BPKAD	-	-	311.969.000		311.969.000	-				-	311.969.000
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	BPKAD	-	-	52.984.000		52.984.000	-				-	52.984.000
	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	BPKAD	-	-	445.793.000		445.793.000	-				-	445.793.000
	Jumlah		-	-	577.509.325.000	867.832.000	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000

No.	Uraian	Nama	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2024	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2025	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2026	Aset Lainnya JT Setelah 2026	< 1 TAHUN Lancar (0,5%)	1-3 TAHUN Kurang Lancar (10%)	3-5 TAHUN Diragukan (50%)	> 5 TAHUN Macet (100%)	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	SALDO PIUTANG BERSIH
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)																
1	Kehilangan Uang pada KPUD Provinsi Banten	WIDAWARTI SUHARA (19600924 198503 2 001)	29 Maret 2004		78.010.180,00	-	-	78.010.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah TP					78.010.180,00			78.010.180	-	-		-	-	-	-	-	-
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)																
2	Penggunaan Uang Muka pada Sekretariat DPRD Prov.Banten	Drs Iya Sukiya	14 Juli 2009		566.197.262,00			-	566.197.262	566.197.262					566.197.262	566.197.262	-
3	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 580	TB.Ismu Abunazar, A,md	5 Juni 2009		101.000.000,00			-	101.000.000	101.000.000					101.000.000	101.000.000	-
4	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 613	Budhi Priatna			101.000.000,00			-	101.000.000	101.000.000					101.000.000	101.000.000	-
5	Kehilangan Motor Mega Pro No.Pol A 2127 B	Rudi Wahyu Rudito,STP	16 Desember 2015	24 bulan	6.000.060,00			-	6.000.060	6.000.060					6.000.060	6.000.060	-
6	Kerugian Belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/166-Inspektorat/IV/2018 tanggal 20 April 2018	Jajang	desember 2018	24 bulan	64.994.037,50			-	64.994.038	64.994.038					64.994.038	64.994.038	-
7	Kerugian belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/402.14-Inspektorat/X/2015	Drs. Sumarno Nurpai Putra	desember 2018	3 bulan	5.460.000,00			2.730.000	2.730.000	2.730.000					2.730.000	2.730.000	-
8	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Mohammad Faizal Reza, ST, MM (2020)	6 Januari 2020	24 bulan	63.999.377,00			63.999.377	-	-				-		-	-
9	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Riska Indira,SE	14 September 2020	24 bulan	63.844.816,00			6.000.000	57.844.816	57.844.816				28.922.408		28.922.408	28.922.408
10	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	H.Babar dan Wahyudin Sastrawijaya,S.SO S.,M.SI	18 Desember 2020	24 bulan	358.080.000,00			11.500.000	346.580.000	346.580.000				173.290.000		173.290.000	173.290.000
11	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Endang Saprudin	17 November 2021	24 bulan	153.494.100,00			27.000.000	126.494.100	126.494.100				63.247.050		63.247.050	63.247.050
12	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ir Widodo Hadi, Ir. Cucu Suhara, Indarto Djoemir	19 Januari 2022	10 bulan	8.050.029.000,00			-	8.050.029.000	8.050.029.000			805.002.900			805.002.900	7.245.026.100
13	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ibnu Jafar Safi'l (2022)	6 Oktober 2022	24 bulan	4.360.000,00			4.360.000	-	-			-			-	-
14	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Irfan Oktaviansyah	12 Juni 2022	24 bulan	4.404.000,00			4.404.000	-	-			-			-	-
15	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Agung Sugiarto	31 Juli 2023	24 bulan	7.320.550,00			7.320.550	-	-			-			-	-
16	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Atep, S.Sos	18 JUNI 2019		8.400.000,00			-	8.400.000	8.400.000					8.400.000	8.400.000	-
17	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Chaerudin, ST	7 November 2023	24 bulan	14.300.000,00			14.300.000	-	-			-			-	-
18	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Baron Suhadiman	5 Desember 2023	40 bulan	34.500.000,00			18.000.000	16.500.000	12.375.000	4.125.000		1.237.500			1.237.500	11.137.500
19	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2024	Nefi Sukasah	November 2024	2 Bulan	999.250,00			999.250	-	-		-				-	-
20	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Bustomi	Mei 2025	20 Bulan	-		13.400.000	10.000.000	3.400.000	3.400.000		17.000				17.000	3.383.000
21	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Ani Kurniasih	Agustus 2025	1 Bulan	-		1.283.000	1.283.000	-	-		-	-			-	-
22	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Hendra Gunawan	Oktober 2025	24 Bulan	-		11.700.000	1.200.000	10.500.000	5.850.000	4.650.000	29.250				29.250	5.820.750
23	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Iip Muripudin Tarigan, AMTE	November 2025	20 Bulan	-		9.200.000	460.000	8.740.000	5.520.000	3.220.000	27.600				27.600	5.492.400
24	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Ajum Suryana	November 2025	16 Bulan	-		8.400.000	525.000	7.875.000	6.300.000	1.575.000	31.500				31.500	6.268.500
35	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Cahya Budi, S.Pd. (BOS)	5 Februari 2021	24 bulan	517.950.000,00			189.608.950	328.341.050	328.341.050	-	-		164.170.525		164.170.525	164.170.525
	TOTAL TGR RKUD				10.126.332.453	-	43.983.000	363.690.127	9.806.625.326	9.793.055.326	13.570.000	105.350	806.240.400	429.629.983	850.321.360	2.086.297.093	7.706.758.233
36	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Mukhsin R (BOS)	18 November 2021	24 bulan	94.671.560,00	(3.000.000,00)		10.500.000	81.171.560	81.171.560	-	-		40.585.780		40.585.780	40.585.780
	TOTAL TGR BOS				94.671.560	(3.000.000)	-	10.500.000	81.171.560	81.171.560	-	-	-	40.585.780	-	40.585.780	40.585.780
	TOTAL TGR				10.221.004.013	(3.000.000)	43.983.000	374.190.127	9.887.796.886	9.874.226.886	13.570.000	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
	TOTAL TP/TGR				10.299.014.193	(3.000.000)	43.983.000	452.200.307	9.887.796.886	9.874.226.886	13.570.000	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013

PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAINNYA
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG LAINNYA	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN PIUTANG	PEMBAYARAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
				D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
							Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5-6)	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7-12
1	Piutang Rekanan atas Uang Muka 20% pengadaan Alkes TA 2013 oleh Dinkes	DINAS KESEHATAN	12.333.916.600	-	7.292.802.000	5.041.114.600	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	-
2	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	592.241.558	-	592.241.558	-	-	-	-	-	592.241.558
3	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	UPTD RSUD Labuan		482.551		482.551	-	-	-	-	-	482.551
4	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		321.942.288		321.942.288	-	-	-	-	-	321.942.288
5	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		55.089.600		55.089.600	-	-	-	-	-	55.089.600
6	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS SOSIAL		2.608.860		2.608.860	-	-	-	-	-	2.608.860
7	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		32.327.442		32.327.442	-	-	-	-	-	32.327.442
8	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	SEKRETARIAT DPRD		387.802.328		387.802.328	-	-	-	-	-	387.802.328
9	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		4.197.759.342		4.197.759.342	-	-	-	-	-	4.197.759.342
10	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENDAPATAN DAERAH		166.065.800		166.065.800	-	-	-	-	-	166.065.800
11	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENGHUBUNG		100.529.483		100.529.483	-	-	-	-	-	100.529.483
	Jumlah		12.333.916.600	5.856.849.251	7.292.802.000	10.897.963.851	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	5.856.849.251

REKAPITULASI BELANJA DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SEWA TEMPAT	PREMI ASURANSI	LAINNYA	BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.904.110			216.904.110
2	Dinas Kesehatan	-			-
3	UPT RSUD Banten	-			-
4	UPT RSUD Malingping	-			-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.338.798	174.757.563		281.096.361
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	20.371.738		20.371.738
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
9	Dinas Sosial	-			-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	22.027.397			22.027.397
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	57.869.863			57.869.863
12	Dinas Ketahanan Pangan	-			-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.808.743			104.808.743
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	12.600.000		12.600.000
15	Dinas Perhubungan	-	76.678.962	93.845.455	170.524.416
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-		89.913.093	89.913.093
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	8.677.049		8.677.049
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	11.886.509		11.886.509
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	59.280.435		59.280.435
22	Dinas Pariwisata	114.042.819			114.042.819
23	Dinas Pertanian	-	5.175.401		5.175.401
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	41.516.339		41.516.339
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.186.760	54.380.150		107.566.910

26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			-
27	Biro Hukum	-			-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-			-
29	Biro Umum	89.051.781	13.825.137		102.876.917
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	68.154.000			68.154.000
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-			-
32	Biro Administrasi Pimpinan	13.643.836			13.643.836
33	Sekretariat DPRD	43.961.644	408.063.760	-	452.025.404
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	85.352.003		85.352.003
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.852.459		6.502.732	15.355.191
36	Badan Pendapatan Daerah	2.316.821.577	161.002.603		2.477.824.180
37	Badan Kepegawaian Daerah	-			-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-		22.906.557	22.906.557
39	Badan Penghubung	-		13.725.249	13.725.249
40	Inspektorat	-			-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	33.624.590		33.624.590
	JUMLAH	3.215.663.786	1.167.192.239	226.893.086	4.609.749.111

REKAPITULASI BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 15.1 Neraca

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung KCD Kotangsel)	100.3.7/947/Cadintangkotsel/2025	30-Sep-25	PT. ATLANTIS CIPTA KARYA (M. ISNA SURYA HIDAYAT)	290.000.000	959.4/009236/LS/BUD/2025	365	01-Oct-25	30-Sep-26	31-Dec-25	273	216.904.110
JUMLAH													216.904.110
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.219.1 /UPTDPJJL/2025	07-Aug-25	SRI MULYANAH, SE	35.000.000	36.00/04.0/001253/GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025	366	07-Aug-25	07-Aug-26	31-Dec-25	219	20.942.623
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.219 /UPTDPJJL/2025	07-Aug-25	SARJA	35.000.000	36.00/04.0/001253/GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025	366	07-Aug-25	07-Aug-26	31-Dec-25	219	20.942.623
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.337.1 /UPTDPJJL/2025	03-Dec-25	SUBADRA	35.000.000	36.00/04.0/001954/TU/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	366	03-Dec-25	03-Dec-26	31-Dec-25	337	32.226.776
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.337 /UPTDPJJL/2025	03-Dec-25	MUHAMAD WILDAN	35.000.000	36.00/04.0/001954/TU/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	366	03-Dec-25	03-Dec-26	31-Dec-25	337	32.226.776
JUMLAH													106.338.798
3	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sewa Bangunan Gedung Kantor	900.1.7.2/0087/KORWIL/PL/DTKT/2025	11-Jul-25	BONAULI REAL ESTATE PT	160.800.000	959.4/006216/LS/BUD/2025	365	20-Feb-25	19-Feb-26	31-Dec-25	50	22.027.397
JUMLAH													22.027.397
4	Dinas Pemberdayaan	Belanja Sewa Tanah Bangunan	900.1.3.6/687/SPK/DP3AKKB/2025	19-Dec-25	Kuasa Pemilik Rumah	59.500.000	959.4/016693/LS/BUD/2025	365	22-Dec-25	21-Dec-26	31-Dec-25	355	57.869.863
JUMLAH													57.869.863
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEWA GEDUNG	17	26-Sep-25	AHMAD	140.000.000	959.4/010402/LS/BUD/2025	366	01-Oct-25	01-Oct-26	31-Dec-25	274	104.808.743
JUMLAH													104.808.743
6	Dinas Pariwisata	Sewa Billboard di Kawasan Keraton Kesultanan Banten	500.13/1566-Dispar/2025	24-Mar-25	CV. CITRA SEROJA	168.720.000	36.00/04.0/000045/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025	365	24-Mar-25	23-Mar-26	31-Dec-25	82	37.904.219
		Sewa Billboard Pariwisata di Kabupaten Pandeglang	500.13/2740-Dispar/2025	03-Jun-25	CV. WARNA CURUG ANGSA	319.680.000	36.00/04.0/000081/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025	240	03-Jun-25	28-Jan-26	31-Dec-25	28	37.296.000
		Sewa Billboard di Kawasan Keraton Kesultanan Serang	500.13/2796-Dispar/2025	04-Jun-25	CV. PUTRA JIWANTAKA MANDIRI	321.456.000	36.00/04.0/000082/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025	240	04-Jun-25	29-Jan-26	31-Dec-25	29	38.842.600
JUMLAH													114.042.819
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belanja Sewa Gedung Kantor	EP-01K3FJ6KT3V1HWTRBXC6WEOY45	25-Aug-25	INAPROC	79.999.920	No SPM : 931/00079/SPM.GU/INDAG/2025	364	01-Sep-25	30-Aug-26	31-Dec-25	242	53.186.760
JUMLAH													53.186.760

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
8	Biro Umum	Belanja Sewa Bangunan Gudang Belanja Sewa Bangunan Peralatan Sarana dan Prasarana	027/56212462/SPK/UMPLK/25	25-Feb-25	RETMi NAINGGOLAN	112.900.000	36.00/04.0/000133/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025	365	27-Feb-25	26-Feb-26	31-Dec-25	57	17.630.959
		Belanja Sewa Bangunan Gudang Penyimpanan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretaris Daerah	000.3.2/56212672/SPK/UmPlk/25	20-May-25	HJ. EUIS AGUSTINI, S.Pd., M.Pd	112.900.000	36.00/04.0/000238/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025	365	23-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	43.922.740
		Belanja Sewa Bangunan Gudang Belanja Bangunan Gedung Kantor Penyimpanan Barang Milik Daerah (BMD) APK Setda	000.3.2/56212840/SPK/UmPlk/25	14-May-25	Drs. MUKHNIZAR	73.800.000	36.00/04.0/000237/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025	365	17-May-25	16-May-26	31-Dec-25	136	27.498.082
JUMLAH													89.051.781
9	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Belanja Sewa Peralatan Jaringan- Sewa Collocation Server LPSE	#EP-01JSP83K072TEF5EZRGEPAFSM4	28-Apr-25	PT. NEWTON CIPTA INFORMATIKA	204.462.000	959.4/004365/LS/BUD/2025	366	02-May-25	02-May-26	31-Dec-25	122	68.154.000
JUMLAH													68.154.000
10	Biro Administrasi Pimpinan	Perpanjangan Sewa Gudang untuk Arsip	027/53836498/SPSG/TU.Biro/ADPIMP	25-Mar-25	Ruri Apriyanti, SKM	60.000.000	959.4/003331/LS/BUD/2025	365	25-Mar-25	24-Mar-26	31-Dec-25	83	13.643.836
JUMLAH													13.643.836
11	Sekretariat DPRD	Sewa Gudang	000.3.1/Perbend.524.PROKEU/SPK.PA	06-Aug-25	ANTON TANTOWI	71.000.000	36.00/04.0/000431/LS/4.02.0.	365	15-Aug-25	14. Aug. 2026	31. Dec. 2025	226	43.961.644
JUMLAH													43.961.644
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Sewa Bangunan Gudang	027/55759263/PJL/ASET/BPKAD/2025	22-Mar-25	AZIZI	40.000.000		366	22-Mar-25	22-Mar-26	31-Dec-25	81	8.852.459
JUMLAH													8.852.459
13	Badan Pendapatan Daerah												
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Pembayaran pekerjaan belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Kepandean UPTD PPD Serang	000.3.2/130/SPK/PJL/UPTD PPD SRG/2025	18-Okt-25	MOHAMAD NASIR	89.000.000	959.4/011323/LS/BUD/2025	365	18-Oct-25	17-Oct-26	31-Dec-25	290	70.712.329
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas	UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN SEWA GEDUNG GERAI CIKANDE UTK UPTD PPD CIRUAS 2025	000.3.2/007/SPK/PJL/UPTD PPD CRS/2025	08-Mar-25	STEVENSON HERI HARTOLO	122.745.900	959.4/001484/LS/BUD/2025	365	08-Mar-25	07-Mar-26	31-Dec-25	66	22.195.149
		UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN SEWA GEDUNG GERAI ANYER UTK UPTD PPD Ciruas	000.3.2/015/SPK/PJL/UPTD PPD CRS/2025	27-Mar-25	H.SUJA'1 A SAYUTI	103.000.000	959.4/002927/LS/BUD/2025	366	04-Apr-25	04-Apr-26	31-Dec-25	94	26.453.552
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Saketi TA. 2024	000.3.2/002/PJL/SPK-UPTD PPD PDG/2025	13-Mar-25	DR.KARTIRINI	98.000.000	959.4/001520/LS/BUD/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Dec-25	72	19.278.689
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Panimbang TA. 2024	000.3.2/03/PJL/SPK-UPTD PPD PDG/2025	26-Mar-25	H. ABDUL ROHMAN	82.626.050	959.4/002312/LS/BUD/2025	365	02-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	20.599.919

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa Gerai Samsat Graha Raya Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PPD Serpong	000.3.2/004/PJL/SPK/UPTD PPD SRP/2025	15-Feb-25	Bayumi Umar	159.600.000	959.4/001337/LS/BUD/2025	365	15-Feb-25	14-Feb-26	31-Dec-25	45	19.676.712
		Pembayaran Pekerjaan Sewa Ruko	000.3.2/011/SPK/PJL/UPTD PPD	16-Jun-25	KOPERASI	165.000.000	959.4/005287/LS/BUD/2025	365	16-Jun-25	15-Jun-26	31-Dec-25	166	75.041.096
		Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/012/PJL/SPK/UPTD PPD	21-Nov-25	ANSIS WIJAYA	163.000.000	959.4/013776/LS/BUD/2025	365	21-Nov-25	20-Nov-26	31-Dec-25	324	144.690.411
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Pembayaran Belanja Sewa Gedung Gerai Samsat Kronjo pada UPTD PPD	000.3.2/004/SPK/PJL/BLRJ/2025	14-Mar-25	SOBRI BIN H BONJAN	125.243.000	959.4/001559/LS/BUD/2025	365	14-Mar-25	13-Mar-26	31-Dec-25	72	24.705.468
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung	000.3.2/003/SPK/PJL/BLRJ/2025	08-Mar-25	H. HASANUDIN	156.554.000	959.4/001358/LS/BUD/2025	365	08-Mar-25	07-Mar-26	31-Dec-25	66	28.308.395
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung	000.3.2/014/SPK/PJL/BLRJ/2025	20-Sep-25	RICKI SHUTANTO	89.268.050	959.4/009867/LS/BUD/2025	365	21-Sep-25	20-Sep-26	31-Dec-25	263	64.321.910
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	embayaran Pekerjaan Sewa Gerai Sangiang	000.3.2/02/PJL/SPK/UPTD.CKL/2025	15-Feb-25	VICTOR WIDJAJA	163.000.000	959.4/000970/LS/BUD/2025	365	15-Feb-25	14-Feb-26	31-Dec-25	45	20.095.890
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Pembayaran Belanja Sewa Gedung (Gerai Samsat Ramanuju) UPTD PPD Cilegon	000.3.2/67/SPK/PJL/UPTD PPD CLG/2025	02-Apr-25	HARUN AL RASYID	140.000.000	959.4/002652/LS/BUD/2025	365	02-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	34.904.110
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung (Gerai Samsat Cibeber) UPTD PPD Cilegon	000.3.2/67.1/SPK/PJL/UPTD PPD CLG/2025	03-Apr-25	ZANDRAWATI TOHIR	109.910.800	959.4/002400/LS/BUD/2025	364	03-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	27.477.700
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	900/57759540/PJL/SPK/UPTDKD/2025	26-Mar-25	PT. GITA SEJAHTERA	1.914.430.320	959.4/002832/LS/BUD/2025	365	08-Apr-25	07-Apr-26	31-Dec-25	97	508.766.414
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa	900/55094123/PJL/SP/UPTKD/2025	31-Jul-25	PT.PURINUSA	152.000.000	959.4/007792/LS/BUD/2025	365	02-Aug-25	01-Aug-26	31-Dec-25	213	88.701.370
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa	900/61109646/PJL/SPK/UPTD	01-Nov-25	PT.GITA SEJAHTERA	119.999.880	959.4/013775/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Oct-26	31-Dec-25	304	99.945.106
		Pembayaran Belanja Sewa Bangunan	900/55095500/PJL/SPKUPTKD/2025	01-Nov-25	BENJAMIN IRAWAN	151.000.000	959.4/011387/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Oct-26	31-Dec-24	669	276.764.384
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa Gerai Samsat Sepatan UPTD PPD Kelapa Dua	900/55094715/PJL/SP/UPTKD/2025	01-Nov-25	TJIPTO SURYA	151.000.000	959.4/011386/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Oct-26	31-Dec-25	304	125.764.384
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa Gedung Arsip UPTD PPD Kelapa Dua	900/55096901/PJL/SP/UPTKD/2025	31-Oct-25	HANS MULYADI	156.000.000	959.4/011388/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Oct-26	31-Dec-25	304	129.928.767
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/19.2.2/SPK/PJL/MLP/2025	08-May-25	H OKEU OKTAVIANA ST	70.500.000	959.4/004496/LS/BUD/2025	365	08-May-25	07-May-26	31-Dec-25	127	24.530.137
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/54884422/E-	28-Nov-25	SOPIAH	47.000.000	900/TU-0002/UPTD PPD	365	01-Dec-25	30-Nov-26	31-Dec-25	334	43.008.219
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/54884021/E-	28-Nov-25	KIKI JUNIANSAH	51.700.000	900/TU-0002/UPTD PPD	365	01-Dec-25	30-Nov-26	31-Dec-25	334	47.309.041
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3/212/SPK/PJL/UPTD PPD	09-May-25	Monica	148.586.000	959.4/005766/LS/BUD/2025	365	10-May-25	09-May-26	31-Dec-25	129	52.513.956
		Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/312/SPK/PJL/UPTD PPD	01-Nov-25	EVY MARLINA	107.964.000	959.4/011879/LS/BUD/2025	366	01-Nov-25	01-Nov-26	31-Dec-25	305	89.970.000
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Belanja Sewa Gedung	027/60262219/SPK/PJL/UPTD PPD	02-Aug-25	NUGRAHA	80.000.000	959.4/008129/LS/BUD/2025	366	04-Aug-25	04-Aug-26	31-Dec-25	216	47.213.115
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Belanja Sewa Gedung	003.2/57326769/SPK/PJL/UPTD PP	03-Nov-25	Dra. Hj. IDA FARIDA	100.000.000	959.4/013774/LS/BUD/2025	366	03-Nov-25	03-Nov-26	31-Dec-25	307	83.879.781
	INDUK	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/60905389/SPK/PJL/Bapenda/2	2-Des-25	Tri Hastuti	109.000.000	959.4/015426/LS/BUD/2025	366	02-Dec-25	02-Dec-26	31-Dec-25	336	100.065.574
JUMLAH													2.316.821.577
JUMLAH SEWA DIBAYAR DIMUKA													3.215.663.786

REKAPITULASI BELANJA PREMI ASURANSI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	EP- 01KBPMVGB9EK9Y6AJ2M QX0BW5	18022225000542	09-Dec-25	PT. ASURANSI RAMAYANA, TBK	186.476.000	36.00/04.0/002413/LS/ 1.03.0.00.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	366	09-Dec-25	09-Dec-26	31-Dec-25	343	174.757.563
JUMLAH														174.757.563
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	027/2011125/SPK/DRPKP/20 25	0203-2525-1225-0014-00	25-Nov-25	PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA	22.458.000	SPJ No. 21/SPJ/1.04.2.10.0. 00.01.0000/2025	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	20.371.738
JUMLAH														20.371.738
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Dinas Pejabat Esselon II)	000.3.2/5921/Adendum/SP- DPMD/X/2025	18022225000136	17-Oct-25	PT. Asuransi Ramayana Tbk.	6.000.000	36.00/04.0/000101/ GU/2.13.0.00.0.00.0 1.0000/PR/11/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Dec-25	72	1.180.328
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Roda 4)	000.3.2/5923/Adendum/SP- DPMD/X/2025	18022225000479	17-Oct-25	PT. Asuransi Ramayana Tbk.	58.050.000	36.00/04.0/000090/L S/2.13.0.00.0.00.01. 0000/PR/11/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Dec-25	72	11.419.672
JUMLAH														12.600.000
4	Dinas Perhubungan	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54445216/SPK- DISHUB/2025	18022225000250	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	22.435.000	959.4/006877/GU/B UD/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	10.052.842
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54438471/SPK- DISHUB/2025	18022225000248	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	89.745.000	36.00/04.0/000140/L S/2.15.0.00.0.00.01. 000/P/7/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	40.213.607
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54438332/SPK- DISHUB/2025	18022225000249	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	58.945.000	36.00/04.0/000139/L S/2.15.0.00.0.00.01. 000/P/7/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	26.412.514
JUMLAH														76.678.962
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belanja Asuransi Baang Milik Daerah	027/008/A.h.1/SP/K- UKM/2025	1024022125030028	20-Mar-25	PT ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967	40.200.000	36.00/04.0/000076/ GU/2.17.0.0.0.0.00. 01.0000 P2/4/2025	366	20-Mar-25	20-Mar-26	31-Dec-25	79	8.677.049
JUMLAH														8.677.049
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	000.4.7.2/200- Dispora/IV/2025	126000221042500037	24-Apr-25	JASA RAHARJA PUTERA	38.161.950	36.00/04.0/000103/ GU/2.19.0.00.0.00.0 1.0000/P2/6/2025	366	24-Apr-25	24-Apr-26	31-Dec-25	114	11.886.509
JUMLAH														11.886.509
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		102402212580015-1	30-Aug-25	Bumida	19.180.000	959.4/008171/GU/B UD/2025	366	30-Aug-25	30-Aug-26	31-Dec-25	242	12.681.858
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125080015	30-Aug-25	Bumida	34.195.000	959.4/008171/GU/B UD/2025	366	30-Aug-25	30-Aug-26	31-Dec-25	242	22.609.809

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 2		1024020525100007	09-Oct-25	Bumida	3.779.400	959.4/010573/GU/BU/2025	366	09-Oct-25	09-Oct-26	31-Dec-25	282	2.911.997
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125120003	03-Dec-25	Bumida	3.245.000		366	03-Dec-25	03-Dec-26	31-Dec-25	337	2.987.883
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125120003-1	03-Dec-25	Bumida	19.645.500		366	03-Dec-25	03-Dec-26	31-Dec-25	337	18.088.889
JUMLAH														59.280.435
8	Dinas Pertanian	Asuransi Kendaraan Roda 4		12500002272295	04-Nov-25	SINARMAS	6.149.989		366	04/11/2025	04/11/2026	31/12/2025	308	5.175.401
JUMLAH														5.175.401
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan R2 1. Honda Megapro 2011 (1 Unit) A2103Z 2. Honda Verza 2013 (2 Unit) A2646Z, A2644Z 3. Honda Vario Tecno 2014 (3 Unit) A2991Z, A2990Z, A2989Z 4. Honda Verza 2014 (5 Unit) A2994Z, A2996Z, A3998Z, A2993Z, A2995Z, 5. Kawasaki Dtracker 2013 (2 Unit) A2723Z, A2722Z 6. Honda Megapro 2008 (1 Unit) A2537Z, 7. Gesits 2022 (8 Unit) A4679Z, A4694Z, A4696Z, A4689Z, A4688Z, A4684Z, A4678Z, A4691Z 8. Honda Supra X 2008 (2 Unit) A2533Z, A2536Z 9. Yamaha Jupiter MX 2012 (1 Unit) A2382Z, 10. Honda Satia FU 2015 (2 Unit) A3423Z, A3422Z, 11. Yamaha Xeon 2012 (2 Unit) A2398Z, A24008Z 12. Honda Vario Tecno 2013 (1 Unit) A2683Z, 13. Kawasaki KLX 150 S 2020 (1 Unit) A4348Z,	#EP-01JYDV1S8NKKBCAS5X4PXYGC5F	1024020525070002	26-Jun-25	PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	8.637.600	959.4/006458/GU/BU/2025	366	26-Jun-25	26-Jun-26	31-Dec-25	177	4.177.200
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan R4 1. Toyota Avanza 1.5 S 2009 (4 Unit) A713, A714, A715, A716 2. Toyota Rush 2008 (4 Unit) A664, A668, A662, A71, A667 3. Toyota Avanza Veloz 2013 (1 Unit) A1211 4. Toyota Innova G MT 2008 (1 Unit) A40 5. Suzuki APV 2009 (1 Unit) A687	#EP-01JYGB5WCK7BZ2TCNWWY1A9N25Z	1024022125070006	26-Jun-25	PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	11.600.000	959.4/006458/GU/BU/2025	366	26-Jun-25	26-Jun-26	31-Dec-25	177	5.609.836

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan R4 1. Honda CRV 2011 (1Unit) A165 2. Toyota Hilux Double Cabin 2016 (2Unit) A8344, A8346 3. Toyota Avanza Veloz 2013 (1Unit) A1213 4. TOYOTA KIJANG INNOVA G A/T TAHUN 2012 (1Unit) A1060 5. Toyota Fortuner 2017 (1Unit) A1728	EP-01KATR0P2MJAQ8899YDS5RA3YT	1024022125120001	02-Dec-25	PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	34.562.276	959.4/013283/TU/BUD/2025	366	02-Dec-25	02-Dec-26	31-Dec-25	336	31.729.303
JUMLAH														41.516.339
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Asuransi	EP-01K0DWCKAHFRHD4CBNK2GD2MGM	18022225000309	18-Jul-25	INAPROC (ASURANSI RAMAYANA)	61.200.000	NO SPM : 931/000065/SPM.GU/INDAG/2025	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	33.944.262
		Asuransi	EP-01K0DSV5HRTE5ZXEZYVEQ6YPCH	18022225000306	18-Jul-25	INAPROC (ASURANSI RAMAYANA)	36.845.000	NO SPM : 931/000065/SPM.GU/INDAG/2025	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	20.435.888
JUMLAH														54.380.150
11	Biro Umum	(Belanja Asuransi Barang Milik Daerah) Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Gubernur	#EP-01JRVPGMQ59YNQJXAGC NRRZ8AR	1024022125050006	25-Apr-25	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	44.000.000	36.00/04.0/000263/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025	366	25-Apr-25	25-Apr-26	31-Dec-25	115	13.825.137
JUMLAH														13.825.137
12	Sekretariat DPRD	Belanja Asuransi kendaraan Roda Empat (4)	EP-01KBPY0MZ88EYGN6T281MHK4F4	Q2802012500011	24-Dec-25	PT. BOSOWA ASURANSI	107.274.000	36.00/04.0/000731/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	365	24. Dec. 2025	23. Dec. 2026	31. Dec. 2025	357	104.922.789
		Belanja Asuransi kendaraan Roda Empat (4)	EP-01KBPY0MZ88EYGN6T281MHK4F4	18022225000565	23-Dec-25	PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk Cabang Serpong	107.404.900	36.00/04.0/000793/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	365	23. Dec. 2025	22. Dec. 2026	31. Dec. 2025	356	104.756.560
		Asuransi kendaraan Roda Empat (4)	000.3.1/UM.PLK.01.ASRNS/SP/PPK/ SET-DPRD /2025	1024022125120013	24-Dec-25	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	202.830.000	36.00/04.0/000790/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000 /PPR1/12/2025	365	24. Dec. 2025	23. Dec. 2026	31. Dec. 2025	357	198.384.411
JUMLAH														408.063.760
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	EP-01JY701JF1N72KWPEZN31ZZV14	17027225000081	23-Jun-2025	PT. ASURANSI RAMAYANA, TBK CABANG SERPONG	42.102.610	36.00/04.0/000072/GU/5.01.5.05.0.00.01.0000/P2/7/2025	366	25-Jun-2025	25-Jun-2026	31-Dec-25	176	20.246.064
		Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	EP-01JY3QQC01KSCESHMB1F7ZSB2	17027225000082	23-Jun-2025	PT. ASURANSI RAMAYANA, TBK CABANG SERPONG	135.390.760	36.00/04.0/000072/GU/5.01.5.05.0.00.01.0000/P2/7/2025	366	25-Jun-2025	25-Jun-2026	31-Dec-25	176	65.105.939
JUMLAH														85.352.003

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
14	Badan Pendapatan Daerah													
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	BELANJA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN/ ASURANSI KENDARAAN DINAS JABATAN BULAN JUNI 2025	00206/UPTD PPD CIPUTAT/2025	10240221250600001	02-Jun-25	ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA	6.389.000	959.4/005392/GU/BUD/2025	366	02-Jun-25	02-Jun-26	31-Dec-25	153	2.670.811
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	ASURANSI KENDARAAN OPRASIONAL UPTD PPD KELAPA DUA	EP-01KAJX8R6WEPTRK8272G WKJR1W	18022225000509	24-Nov-25	ASURANSI RAMAYANA	6.500.000	00001/SPJ-TU/III/2025	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Dec-25	328	5.825.137
		ASURANSI KENDARAAN DINAS JABATAN UPTD PPD KELAPA DUA	EP-01KAJX8R6WEPTRK8272G WKJR1W	18022225000508	06-Nov-25	ASURANSI RAMAYANA	28.440.000	00001/SPJ-TU/II/2025	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Dec-25	328	25.487.213
	INDUK	Pembayaran Pekerjaan Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Bapenda	000.3.2/53879150.1/SPK/PJ BAPENDA/2025	128020125000091	11-Nov-25	PT BOSOWA ASURANSI	118.583.755	959.4/014859/LS/BUD/2025	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Dec-25	315	102.059.789
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional Lapangan Roda 4 (Rush) A 1157	EP-01KBEJNE3QWJCCC86HFC QGZKFJ	180222250000551	04-Dec-25	Asuransi Ramayana	4.605.000	TUP-04 -00007	366	13-Dec-25	13-Dec-26	31-Dec-25	347	4.365.943
		Belanja Asuransi Kendaraan Lpangan/ Oprasional Roda 4 Isuzu Elp A 7084 B dan 8258	EP-01KBEKDYVVSQ5YVJE1HJ 68KE9T	18022225000554 / 18022225000553	13-Dec-25	Asuransi Ramayana	13.980.000	TUP-04 -00008	366	13-Dec-25	13-Dec-26	31-Dec-25	347	13.254.262
		Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional / Lapangan Roda 2 A 6247 Z (nilai di polis 449.720) karena di kuarta saat pengajuan tu salah perencanaan dan sisa diajukan di gu nihil	EP-01KBEK8X1BXB31AKAKW4 Y1E1H5	180222250000552	04-Dec-25	Asuransi Ramayana	802.000	TUP-04 -00009	366	13-Dec-25	13-Dec-26	31-Dec-25	347	760.366
		Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 Xpander A 1594	EP-01KBEJVVZ2T57KRE5SD9AV HYKY3	180222250000550	03-Dec-25	Asuransi Ramayana	6.695.000	TUP-03 -00003	366	13-Dec-25	13-Dec-26	31-Dec-25	347	6.347.445
		Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional R2 NMAX (nilai di polis 596.600) karena di kuarta saat pengajuan tu salah perencanaan dan sisa diajukan di gu nihil	EP-01KBEK8X1BXB31AKAKW4 Y1E1H5	180222250000549	02-Dec-25	Asuransi Ramayana	244.320	GU 14-0024	366	13-Dec-25	13-Dec-26	31-Dec-25	347	231.637
JUMLAH														161.002.603
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	EP-01JQ8ND3MAVXDY0W72T4 19AR6K	1024022125040000	26-Mar-25	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	143.100.000	36.00/04.0/000039/LS/8.01.0..00.0.00.01 .0000/P2/4/2025	366	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Dec-25	86	33.624.590
JUMLAH														33.624.590
TOTAL PREMI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA														1.167.192.239

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DI MUKA - LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(11-10)	(10)	(11)	(12)	13=(11-12)	(14)=(13/9)*7
1	Dinas Perhubungan	Belanja Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan - Jaringan	EP-01K61YK2T8K8 A4F9QKNM6G2 DM0	03-Oct-25	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	366.300.000	959.4/017134 /LS/BUD/2025	121	03-Oct-25	31-Jan-26	31-Dec-25	31	93.845.455
													93.845.455
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan- Lisensi Video Conference	027/59780408-PNDSPPD/SP /E- Pur/DISKOMINF OSP/2025	11-Jul-25	Alva Media Teknologi PT	32.967.000	36.00/04.0/0001 94/GU/2.16.2.20 .2.21.04.0000/P 2/9/2025	366	04-Aug-25	04-Aug-26	31-Dec-25	216	19.455.934
		Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan - Lisensi C-Panel dan Lisensi SSL	027/55560687-PNDSPPD/SP /E- Pur/DISKOMINF OSP/2025	21-Apr-25	Alva Media Teknologi PT	61.494.000	36.00/04.0/0001 54/LS/2.16.2.20. 2.21.04.0000/P2 /6/2025	366	08-May-25	08-May-26	31-Dec-25	128	21.506.098
		Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan- Sewa IP Publik	027/54545505-PNDSPPD/SP /E- Pur/DISKOMINF OSP/2025	24-Nov-25	Solusindo Basis Teknologi PT	27.750.000	36.00/04.0/0002 45/TU/2.16.2.20 .2.21.04.0000/P R/11/2025	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	25.172.131
		Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan - Belanja Sewa Domain (.go.id), Belanja Sewa	027/55560461-PNDSPPD/SP /E- Pur/DISKOMINF OSP/2025	08-Sep-25	Antsoft Media Computindo CV	33.732.900	36.00/04.0/0002 18/GU/2.16.2.20 .2.21.04.0000/P R/10/2025	366	15-Sep-25	15-Sep-26	31-Dec-25	258	23.778.930
													89.913.093
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Zoom Meeting Sepesifikasi 500 partcipian	#EP-01JREXKRT4A 8WfV8Q7JZQ6 KXXV	10-Apr-25	PT. SOLID ABSOLUT MANDIRI	17.000.000		366	20-May-25	20-May-26	31-Dec-25	140	6.502.732
													6.502.732

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(11-10)	(10)	(11)	(12)	13=(11-12)	(14)=(13/9)*7
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Belanja lisensi video conference zoom meeting	000.3.2/PJPUP D-016/SP/BPSDM D/2025	10-Nov-25	CV. DWI PERWIRA PUTRA	20.300.000	36.00/04.0/000150/TU/5.04.0.00.0.00.01.0000/P R/11/2025 Tgl 24 November 2025	366	10-Nov-25	10-Nov-26	31-Dec-25	314	17.415.847
			000.3.2/PJPUP D-017/SP/BPSDM D/2025	10-Nov-25	CV. DWI PERWIRA PUTRA	6.400.000	36.00/04.0/000150/TU/5.04.0.00.0.00.01.0000/P R/11/2025 Tgl 24 November 2025	366	10-Nov-25	10-Nov-26	31-Dec-25	314	5.490.710
													22.906.557
5	Badan Penghubung	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan untuk Delapan	-	15-May-25	PT. MNC Sky Vision, Tbk	17.636.600	36.00/04.0/000052/GU/5.07.0.00.0.00.01.0000/P 2/5/2025	366	15-May-25	15-May-26	31-Dec-25	135	6.505.303
		Belanja Registrasi/Kean ggotaan (Pembuatan Pas Bandara	17659584555767	17-Dec-25	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	2.500.000	SPJ No. 0019/BANHUB /SPJ.SAH/01.0 000/2025	366	17-Dec-25	17-Dec-26	31-Dec-25	351	2.397.541
		Belanja Registrasi/Kean ggotaan (Pembuatan Pas Bandara untuk Kegiatan	17661378947004	19-Dec-25	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	5.000.000	SPJ No. 0019/BANHUB /SPJ.SAH/01.0 000/2025	366	19-Dec-25	19-Dec-26	31-Dec-25	353	4.822.404
													13.725.249
TOTAL BEBAN DIBAYAR DIMUKA-LAINNYA													226.893.086

**PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 16 Neraca

NO	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto	Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
			0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Piutang Pajak Daerah	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
	Pajak Air Permukaan	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
2	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887
	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	350.763.862	849.074	-	-	-	849.074	349.914.788
	Piutang Jasa Giro	180.948.977	-	-	-	-	-	180.948.977
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	168.276.785	841.384	-	-	-	841.384	167.435.401
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.691	-	-	-	7.691	1.530.410
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000
	Piutang Dana Perimbangan	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
7	Piutang Lainnya	10.897.963.851	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	5.856.849.251
	Pengadaan Alkes - Dinkes	5.041.114.600	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	-
	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	5.856.849.251	-	-	-	-	-	5.856.849.251
8	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	-	-	-	-	4.609.749.111
	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	-	-	-	-	4.609.749.111
	Jumlah	602.945.623.784	3.713.553	808.200.531	470.215.763	5.891.435.960	7.173.565.807	595.772.057.977

REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 17 Neraca

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.982.205	37.666.594	17.946.500	18.020.225	54.577.294	-	3.518.800	-	16.180.426	16.158.000	2.052.000	27.060.467
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.489.062.536
3	UPTD RSUD LABUAN	70.629.989	53.108.280	44.136.016	6.791.124	10.061.372	-	54.690.810	-	27.081.597	-	-	9.962.895.590
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	109.880.757	24.391.103	679.999	-	85.284.630	123.354.456	-	-	-	-	7.920.499.678
5	UPT RSUD BANTEN	391.900	27.047.865	363.636	-	-	-	148.070	-	54.439.000	-	-	6.153.493.841
6	UPT RSUD MALINGPING	-	23.885.213	-	-	-	-	-	-	22.040.000	-	-	8.059.982.215
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.483.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.070.000
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000	20.185.350	-	3.885.000	-	-	-	671.424.032	-	-	-	2.064.600
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	304.551.600	-	-	178.438.450	-	-	389.747.700	-	-	-	18.175.584
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	896.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.060.757.342	577.222.654	86.837.255	29.376.348	243.077.116	85.284.630	181.712.135	1.061.171.732	119.741.023	16.158.000	2.052.000	35.685.304.512

NO	SKPD	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG ALAT BENGKEL	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS	BAHAN KOMPUTER
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.708.819	6.524.759	24.409.150	115.118.237	10.229.781	2.605.822.803	1.172.244.791	3.460.000	26.145.000	1.161.684.774
2	Dinas Kesehatan	430.106.217	-	-	6.882.000	-	11.981.835	185.370	-	2.790.000	9.622.000
3	UPTD RSUD LABUAN	520.358.138	-	1.010.000	2.253.250	-	566.397.786	110.963.210	-	-	66.386.996
4	UPTD RSUD CILOGRANG	1.534.192.914	-	-	1.530.912	-	502.482.719	189.294.201	-	645.000	665.049.074
5	UPT RSUD BANTEN	13.488.600	-	-	244.000	-	130.383.867	75.854.815	3.058.000	-	90.020.739
6	UPT RSUD MALINGPING	1.779.562.433	-	5.333.328	-	-	942.525.192	120.004.979	-	-	320.053.994
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	26.800.950	8.057.968	-	-	17.567.967
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	6.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	16.620.945	5.390.671	-	-	10.228.002
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	16.133.146	20.675.836	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	18.302.500	15.107.400	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	1.912.620	4.104.780	-	-	1.198.800
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	4.466.400	2.584.800	-	-	2.774.000
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	15.427.429	9.129.750	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	1.057.000	1.214.995	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	8.065.625	1.486.845	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	8.107.422	3.602.832	-	-	2.918.700
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	58.000	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	1.100.000	-	-	-	31.261.076	13.707.350	-	-	16.999.400
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	1.625.000	2.644.575	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	7.867.587	10.399.375	-	-	8.604.999
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	2.244.422	2.747.250	-	-	2.402.260
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	3.687.350	11.688.300	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	1.374.000	-	-	1.408.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.279.380	-	20.039.500	-	-	5.874.480	17.029.819	-	-	2.783.132
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	2.298.000	12.136.500	-	-	15.357.960
27	Dinas Pertanian	9.962.300	-	11.076.675	-	-	39.931.815	43.185.650	-	-	14.678.250
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	2.027.940	2.836.362	-	-	15.396.286
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.257.604	-	-	-	-	10.698.195	23.630.496	4.010.500	-	2.670.660
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	116.651.733	142.363.384	-	-	95.087.830
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	4.500.000	7.639.020	-	-	4.500.000
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	9.781.902	1.764.900	-	-	14.287.476
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	375.565.650	154.541.000	-	-	313.750.014
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	14.673.700	6.560.700	-	-	11.252.300
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	106.750.521	28.776.750	-	-	209.897.300
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	5.592.952.490	99.700.676	-	-	1.225.645.371
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	1.729.270	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	2.374.500	5.826.000	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	9.773.008	3.244.330	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	35.824.150	29.640.027	-	-	19.454.501
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	17.056.430	10.292.420	-	-	10.226.430
	Total	4.359.657.404	7.624.759	61.868.653	126.028.399		11.269.966.188	2.373.361.397	10.528.500	29.580.000	4.331.907.715

NO	SKPD	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.337.982.663	732.821.222	16.139.649	565.317.948	82.034.720	124.347.734	161.024.060	1.690.000	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	5.006.100	7.899.315	-	-	-	-	10.925.788.316	-	39.543.750	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	973.221.618	83.653.322	19.044.598	-	67.673.259	277.251.151	8.835.756.210	-	-	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	867.014.756	144.576.684	-	-	295.921.900	292.480.515	8.938.500.324	-	52.049.800	-	-
5	UPT RSUD BANTEN	717.891.030	136.505.909	8.550.000	-	-	128.995.419	4.791.890.757	-	-	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	434.607.389	137.892.424	7.600.000	-	-	77.337.974	3.776.458.719	-	-	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	16.147.725	5.118.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.866.154	16.166.817	-	-	-	-	-	-	48.963.732.769	193.818.824.495	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.548.554	20.644.990	-	-	-	-	-	-	6.591.433.140	396.618.116	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	97.101.800	21.800.000	-
13	Dinas Sosial	4.921.647	1.951.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.398.000	3.668.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	61.300.000	-	-	-	-	-	-	-	293.655.000	-	3.831.053.987
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.814.978	11.449.000	-	-	19.199.998	-	-	-	48.980.900	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.509.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	17.143.955	118.378.639	3.492.000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.589.298	3.821.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	4.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.516.500	11.047.000	11.810.400	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	3.508.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	22.304.960	33.684.000	-	-	-	-	41.410.110	5.564.513	313.548.139	-	2.639.250
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	623.784	89.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	4.600.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	173.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	64.264.895	12.115.706	-	-	31.381.920	251.970	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	14.310.000	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	54.230.000	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.149.460	3.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	25.019.400	-	-	28.600.000	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	64.857.587	35.858.299	53.935.000	-	277.598.482	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	3.484.500	6.038.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	1.202.480	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	18.564.353	-	-	19.647.000	-	-	-	-	-	-
	Total	4.636.803.194	1.586.639.402	120.571.647	565.317.948	890.597.280	900.664.763	37.471.978.496	7.254.513	56.400.045.298	194.237.242.612	3.833.693.237

NO	SKPD	NATURA	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
1	2	36	37	38	39	40	41=3+...+40
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.553.210	-	-	2.250.000	-	8.555.671.831
2	Dinas Kesehatan	944.466.879	-	-	-	-	15.873.334.318
3	UPTD RSUD LABUAN	1.438.306.263	-	35.493.506	-	-	23.227.164.084
4	UPTD RSUD CILOGRANG	1.047.708.928	-	-	-	-	22.795.538.349
5	UPT RSUD BANTEN	482.949.527	-	-	-	-	12.815.716.975
6	UPT RSUD MALINGPING	77.240.176	-	-	-	-	15.784.524.037
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	73.693.375
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	6.741.000
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	243.684.313.101
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	7.057.053.783
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	33.409.900
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	179.338.000
13	Dinas Sosial	23.832.152	-	-	-	-	40.530.949
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	29.623.859
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	2.271.995
16	Dinas Ketahanan Pangan	1.386.836.675	-	-	-	-	5.582.398.132
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	108.073.831
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	1.567.600
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	126.213.000	-	328.295.420
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	4.269.575
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	32.282.877
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	7.965.932
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	19.745.650
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	2.782.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.465.000	97.231.000	-	-	-	886.905.193
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	33.301.170
27	Dinas Pertanian	-	31.219.875	149.030.000	-	-	1.609.148.871
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	210.900	-	-	-	-	22.082.025
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	50.868.395
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	173.160
33	Biro Umum dan Perlengkapan	23.254.048	-	-	-	-	485.371.486
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	18.839.020
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	40.144.278
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	898.086.664
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	41.300.160
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	399.043.971
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	7.350.547.906
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	1.729.270
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	8.200.500
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	22.540.138
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	88.141.158
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	75.786.632
	Total	5.456.823.757	128.450.875	184.523.506	128.463.000	-	368.278.517.071

REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN UNTUK OPERASIONAL PEMDA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBakaran	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.982.205	37.666.594	17.946.500	18.020.225	54.577.294	-	3.518.800	-	16.180.426	16.158.000	2.052.000	27.060.467
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.489.062.536
3	UPTD RSUD LABUAN	70.629.989	53.108.280	44.136.016	6.791.124	10.061.372	-	54.690.810	-	27.081.597	-	-	9.962.895.590
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	109.880.757	24.391.103	679.999	-	85.284.630	123.354.456	-	-	-	-	7.920.499.678
5	UPT RSUD BANTEN	391.900	27.047.865	363.636	-	-	-	148.070	-	54.439.000	-	-	6.153.493.841
6	UPT RSUD MALINGPING	-	23.885.213	-	-	-	-	-	-	22.040.000	-	-	8.059.982.215
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.483.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.070.000
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000	20.185.350	-	3.885.000	-	-	-	671.424.032	-	-	-	2.064.600
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	304.551.600	-	-	178.438.450	-	-	389.747.700	-	-	-	18.175.584
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	896.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.060.757.342	577.222.654	86.837.255	29.376.348	243.077.116	85.284.630	181.712.135	1.061.171.732	119.741.023	16.158.000	2.052.000	35.685.304.512

NO	SKPD	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG ALAT BENGKEL	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.708.819	6.524.759	24.409.150	115.118.237	10.229.781	2.605.822.803	1.172.244.791	3.460.000	26.145.000	1.161.684.774	1.337.982.663
2	Dinas Kesehatan	430.106.217	-	-	6.882.000	-	11.981.835	185.370	-	2.790.000	9.622.000	5.006.100
3	UPTD RSUD LABUAN	520.358.138	-	1.010.000	2.253.250	-	566.397.786	110.963.210	-	-	66.386.996	973.221.618
4	UPTD RSUD CILOGRANG	1.534.192.914	-	-	1.530.912	-	502.482.719	189.294.201	-	645.000	665.049.074	867.014.756
5	UPT RSUD BANTEN	13.488.600	-	-	244.000	-	130.383.867	75.854.815	3.058.000	-	90.020.739	717.891.030
6	UPT RSUD MALINGPING	1.779.562.433	-	5.333.328	-	-	942.525.192	120.004.979	-	-	320.053.994	434.607.389
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	26.800.950	8.057.968	-	-	17.567.967	16.147.725
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	6.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	16.620.945	5.390.671	-	-	10.228.002	4.866.154
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	16.133.146	20.675.836	-	-	-	11.548.554
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	18.302.500	15.107.400	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	1.912.620	4.104.780	-	-	1.198.800	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	4.466.400	2.584.800	-	-	2.774.000	4.921.647
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	15.427.429	9.129.750	-	-	-	1.398.000
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	1.057.000	1.214.995	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	8.065.625	1.486.845	-	-	-	61.300.000
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	8.107.422	3.602.832	-	-	2.918.700	13.814.978
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	58.000	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	1.100.000	-	-	-	31.261.076	13.707.350	-	-	16.999.400	17.143.955
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	1.625.000	2.644.575	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	7.867.587	10.399.375	-	-	8.604.999	1.589.298
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	2.244.422	2.747.250	-	-	2.402.260	572.000
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	3.687.350	11.688.300	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	1.374.000	-	-	1.408.500	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.279.380	-	20.039.500	-	-	5.874.480	17.029.819	-	-	2.783.132	3.516.500
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	2.298.000	12.136.500	-	-	15.357.960	-
27	Dinas Pertanian	9.962.300	-	11.076.675	-	-	39.931.815	43.185.650	-	-	14.678.250	22.304.960
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	2.027.940	2.836.362	-	-	15.396.286	623.784
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.257.604	-	-	-	-	10.698.195	23.630.496	4.010.500	-	2.670.660	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.160
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	116.651.733	142.363.384	-	-	95.087.830	64.264.895
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	4.500.000	7.639.020	-	-	4.500.000	2.200.000
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	9.781.902	1.764.900	-	-	14.287.476	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	375.565.650	154.541.000	-	-	313.750.014	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	14.673.700	6.560.700	-	-	11.252.300	5.149.460
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	106.750.521	28.776.750	-	-	209.897.300	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	5.592.952.490	99.700.676	-	-	1.225.645.371	64.857.587
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	1.729.270	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	2.374.500	5.826.000	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	9.773.008	3.244.330	-	-	-	3.484.500
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	35.824.150	29.640.027	-	-	19.454.501	1.202.480
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	17.056.430	10.292.420	-	-	10.226.430	-
	Total	4.359.657.404	7.624.759	61.868.653	126.028.399	10.229.781	11.269.966.188	2.373.361.397	10.528.500	29.580.000	4.331.907.715	4.636.803.194

NO	SKPD	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	NATURA	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	732.821.222	16.139.649	565.317.948	82.034.720	124.347.734	161.024.060	1.690.000	19.553.210	-	-	2.250.000
2	Dinas Kesehatan	7.899.315	-	-	-	-	10.925.788.316	-	944.466.879	-	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	83.653.322	19.044.598	-	67.673.259	277.251.151	8.835.756.210	-	1.438.306.263	-	35.493.506	-
4	UPTD RSUD CIOGRANG	144.576.684	-	-	295.921.900	292.480.515	8.938.500.324	-	1.047.708.928	-	-	-
5	UPT RSUD BANTEN	136.505.909	8.550.000	-	-	128.995.419	4.791.890.757	-	482.949.527	-	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	137.892.424	7.600.000	-	-	77.337.974	3.776.458.719	-	77.240.176	-	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	5.118.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.166.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.644.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	1.951.950	-	-	-	-	-	-	23.832.152	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.668.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	1.386.836.675	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.449.000	-	-	19.199.998	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.509.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	118.378.639	3.492.000	-	-	-	-	-	-	-	-	126.213.000
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.821.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.047.000	11.810.400	-	-	-	-	-	12.465.000	97.231.000	-	-
26	Dinas Pariwisata	3.508.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	33.684.000	-	-	-	-	41.410.110	5.564.513	-	31.219.875	149.030.000	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	89.758	-	-	-	-	-	-	210.900	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.600.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	12.115.706	-	-	31.381.920	251.970	-	-	23.254.048	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	14.310.000	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	54.230.000	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.019.400	-	-	28.600.000	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	35.858.299	53.935.000	-	277.598.482	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	6.038.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.564.353	-	-	19.647.000	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.586.639.402	120.571.647	565.317.948	890.597.280	900.664.763	37.471.978.496	7.254.513	5.456.823.757	128.450.875	184.523.506	128.463.000

NO	SKPD	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
1	2	37	38=3+...+37
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	8.555.671.831
2	Dinas Kesehatan	-	15.833.790.568
3	UPTD RSUD LABUAN	-	23.227.164.084
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	22.743.488.549
5	UPT RSUD BANTEN	-	12.815.716.975
6	UPT RSUD MALINGPING	-	15.784.524.037
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	73.693.375
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	6.741.000
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	901.755.837
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	69.002.526
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	33.409.900
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	60.436.200
13	Dinas Sosial	-	40.530.949
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	29.623.859
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	2.271.995
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.457.689.145
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	59.092.931
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.567.600
19	Dinas Perhubungan	-	328.295.420
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	4.269.575
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	32.282.877
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	7.965.932
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	19.745.650
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	2.782.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	886.905.193
26	Dinas Pariwisata	-	33.301.170
27	Dinas Pertanian	-	1.292.961.482
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	22.082.025
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	50.868.395
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-
31	Biro Hukum	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	173.160
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	485.371.486
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	18.839.020
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	40.144.278
37	Sekretariat DPRD	-	898.086.664
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	41.300.160
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	399.043.971
40	Badan Pendapatan Daerah	-	7.350.547.906
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.729.270
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	8.200.500
43	Badan Penghubung	-	22.540.138
44	Inspektorat Provinsi	-	88.141.158
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	75.786.632
	Total	-	113.807.535.924

REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN UNTUK DI JUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	39.543.750	-	-	39.543.750
3	UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	52.049.800	-	-	52.049.800
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.963.732.769	193.818.824.495	-	242.782.557.264
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.591.433.140	396.618.116	-	6.988.051.256
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.101.800	21.800.000	-	118.901.800
13	Dinas Sosial	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	293.655.000	-	3.831.053.987	4.124.708.987
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.980.900	-	-	48.980.900
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	TOTAL
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	313.548.139	-	2.639.250	316.187.389
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	Total	56.400.045.298	194.237.242.612	3.833.693.237	254.470.981.147

REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN USANG / RUSAK / KEDALUWARSA / LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG ALAT BENGKEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.177.832	-	-	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.239	7.840.000	-	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	299.108.700	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	299.108.700	-	-	-	65.512.071	7.840.000	-	-	-

SKPD	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/CEN DERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA
2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD CILOGRANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.863.492	-	-	-	-
UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.726.791	-	-	-	-
UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.236.854	-	-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	-	650.155.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	650.155.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.590.283	-	110.236.854	-	-

SKPD	NATURA	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
2	36	37	38	39	40	41=3+...+40
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD CILOGRANG	818.780	-	-	-	-	818.780
UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	-	370.041.325
UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	-	93.901.029
UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-
Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	409.345.554
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-
Biro Hukum	-	-	-	-	-	-
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-
Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	650.155.930
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-
Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-
Total	818.780	-	-	-	-	1.524.262.618

INVESTASI JANGKA PANJANG
SALDO PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	PERUSAHAAN/LEMBAGA	NILAI PENYERTAAN PROVINSI BANTEN PER 31 DESEMBER 2024	MODAL DISETOR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	MODAL SAHAM PERUSAHAAN / LEMBAGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN	Tambahan Nilai Penyertaan Modal	Koreksi	Kapitalisasi Laba (Rugi)	Dividen	Divestasi	NILAI PENYERTAAN PROVINSI BANTEN PER 31 DESEMBER 2025 AUDITED
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5	7	8	9	10	11	12 = 3+7+8+9-10-11
	METODE EKUITAS										
1.	PT. BGD	34.721.539.545	35.361.227.000	35.515.394.013	99,57%		206.266.615	4.309.105.229	-	-	39.236.911.389
2.	PT. BPD BANTEN	1.383.460.775.300	2.165.600.000.000	4.308.864.000.000	66,11%*		-	34.143.170.600	-		1.417.603.945.900
3.	PT. JAMKRIDA	73.191.148.631	51.000.000.000	56.500.000.000	90,27%		-	4.825.144.137	4.329.948.642		73.686.344.126
4.	PD. BPR SERANG	38.886.384.121	15.000.000.000	48.439.478.950	30,97%		-	2.008.449.973	2.049.590.915		38.845.243.179
5.	PD. BPR KERTA RAHARJA	27.481.433.695	15.000.000.000	71.650.000.000	20,94%		-	1.912.437.613	690.411.116		28.703.460.193
6.	PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	77.409.215.211	80.000.000.000	80.000.000.000	100,00%		-	(20.271.177.029)	-		57.138.038.182
	METODE HARGA PEROLEHAN										
7.	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	130.147.464.000	2.630.361.000.000	4,95%		-	-	-		130.147.464.000
8.	PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	3.000.000.000	50.000.000.000	6,00%		-	-	-		3.000.000.000
9.	PT. LKM RANGKASBITUNG	1.350.000.000	470.700.000	7.503.500.000	17,99%		-	-	-		1.350.000.000
10.	PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000	1,00%		-	-	-		300.000.000
11.	PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	900.000.000	12.300.000.000	7,32%		-	-	-		900.000.000
12.	PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	1.050.000.000	15.000.000.000	7,00%		-	-	-		1.050.000.000
	JUMLAH	1.771.897.960.504	2.497.829.391.000	7.346.133.372.963		-	206.266.615	26.927.130.522	7.069.950.673	-	1.791.961.406.968

REKAPITULASI ASET TETAP SKPD PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	SKPD	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	872.644.051.924	1.410.357.423.971	2.380.999.813.262	90.073.846.715	388.612.151.935	26.727.857.322	5.169.415.145.129
2	Dinas Kesehatan	43.569.317.990	437.198.419.911	281.695.094.945	9.389.868.056	237.532.142	702.196.100	772.792.429.144
3	UPT RSUD MALINGPING	10.260.537.974	177.738.300.004	147.569.894.339	32.579.376.765	6.105.000	1.105.059.450	369.259.273.532
4	UPT RSUD BANTEN	53.021.148.643	705.950.092.281	459.830.761.079	34.728.796.676	160.139.000	91.985.700	1.253.782.923.378
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.639.942.220.449	346.089.552.930	356.959.122.317	9.055.175.176.354	94.439.002.468	12.463.030.722	17.505.068.105.240
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.097.597.447	36.841.644.417	283.481.777.850	57.836.965.467	5.189.100.913	1.160.566.000	416.607.652.093
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	14.768.766.232	629.578.050	-	-	-	15.398.344.282
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	62.637.519.622	29.141.495.276	153.560.000	-	-	91.932.574.898
9	Dinas Sosial	4.657.100.000	18.268.953.661	36.756.064.019	949.595.629	516.975.600	91.393.000	61.240.081.908
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	76.831.550.000	86.059.674.624	97.491.402.147	605.877.000	36.168.910	95.016.000	261.119.688.680
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	13.576.659.091	15.041.232.884	-	26.565.000	-	28.644.456.975
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	9.655.358.238	11.236.096.092	45.900.000	-	-	20.937.354.330
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.307.436.714	53.061.724.484	30.254.155.689	5.920.511.105	14.800.000	-	91.558.627.993
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	13.548.907.997	26.994.427.681	-	42.173.000	-	40.585.508.678
15	Dinas Perhubungan	683.905.125	121.104.019.536	45.912.788.083	55.705.958.519	568.828.700	-	223.975.499.963
16	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6.000.000	70.570.605.359	17.193.868.502	2.255.778.885	184.152.500	-	90.210.405.247
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	392.250.000	12.920.450.171	21.785.819.938	357.553.250	992.736.000	-	36.448.809.359
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	14.818.944.709	18.891.501.738	309.245.253	-	-	34.019.691.700
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	534.493.020	17.612.708.598	32.856.796.578	478.205.930	102.367.000	-	51.584.571.126
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.784.504.400	17.846.386.403	47.602.929.837	500.405.000	10.969.404.807	-	83.703.630.447
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.949.536.145	43.618.726.005	79.574.910.088	69.522.321.615	1.047.435.200	2.748.896.670	219.461.825.724
22	Dinas Pariwisata	-	13.499.479.117	25.500.980.848	710.308.471	106.510.000	-	39.817.278.436
23	Dinas Pertanian	78.793.935.531	69.099.520.525	56.202.266.690	7.679.293.623	176.123.700	-	211.951.140.069
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.309.850.000	21.489.070.987	20.916.556.895	51.781.367.558	48.840.000	-	95.545.685.440
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.953.705.871	30.873.714.699	42.103.730.872	1.154.836.000	190.290.000	-	148.276.277.442

NO	S K P D	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	8.694.740.185	-	-	700.000.000	-	9.394.740.185
27	Biro Hukum	-	4.139.255.832	-	-	226.938.995	-	4.366.194.827
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	4.480.094.573	-	-	-	-	4.480.094.573
29	Biro Umum dan Perlengkapan	299.478.882.999	159.702.076.485	154.635.096.294	6.268.706.470	5.934.122.494	709.356.600	626.728.241.342
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	10.051.875.966	-	-	-	-	10.051.875.966
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	11.589.348.960	146.747.500	-	4.730.000	-	11.740.826.460
32	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	17.457.820.524	-	-	180.918.016	-	17.638.738.540
33	Sekretariat DPRD	-	203.475.435.121	181.326.018.310	9.690.574.270	1.778.340.100	6.353.555.500	402.623.923.302
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	25.088.819.560	24.755.413.188	208.384.240	266.176.100	-	50.318.793.088
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.356.473.746	30.154.458.878	68.500.279.416	601.981.167	222.230.000	-	163.835.423.207
36	Badan Pendapatan Daerah	60.102.813.422	153.016.223.329	231.518.682.854	5.783.582.760	1.217.624.475	-	451.638.926.840
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	23.660.022.546	27.353.308.882	44.598.500	-	-	51.057.929.928
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.972.600.000	26.629.130.344	80.290.938.857	4.687.592.733	75.775.850	-	119.656.037.784
39	Badan Penghubung	11.120.990.000	5.619.089.929	6.753.033.527	45.018.000	255.810.000	-	23.793.941.456
40	Inspektorat Provinsi	-	18.190.960.049	22.431.865.310	792.588.000	26.381.004	-	41.441.794.364
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	17.957.242.869	19.657.462.489	50.800.000	9.390.000	-	37.674.895.357
	HARGA PEROLEHAN	9.363.770.901.401	4.539.113.218.722	5.383.991.912.324	9.506.088.574.010	514.565.838.910	52.248.913.064	29.359.779.358.431
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	3.668.547.668.380	2.338.707.763.571	6.286.748.522.860	38.636.519.886	-	12.332.640.474.699
	NILAI BUKU	9.363.770.901.401	870.565.550.342	3.045.284.148.752	3.219.340.051.149	475.929.319.023	52.248.913.064	17.027.138.883.732

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP SKPD PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	SKPD	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.366.769.901	189.951.212.450	275.740.183.243	19.174.949.409	45.411.784.324	25.277.818.152	648.922.717.478
2	Dinas Kesehatan	(5.681.285.000)	(35.933.408.499)	(183.775.775.561)	(220.625.200)	-	(97.653.000)	(225.708.747.260)
3	UPT RSUD MALINGPING	-	16.214.071.157	18.863.893.760	70.004.592	-	(18.884.544.635)	16.263.424.874
4	UPT RSUD BANTEN	-	60.278.445	2.831.542.181	327.381.838	-	-	3.219.202.464
5	UPTD RSUD LABUAN	659.508.000	74.366.209.636	95.075.999.419	482.000.920	-	97.653.000	170.681.370.975
6	UPTD RSUD CILOGRANG	5.021.777.000	11.334.050.535	90.521.841.485	-	-	-	106.877.669.020
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.583.226.034	5.376.553.216	15.007.635.040	448.629.985.516	-	(153.556.710.744)	357.040.689.062
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(37.498.715.366)	1.196.843.662	1.336.287.000	-	-	-	(34.965.584.704)
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	(24.122.830)	-	-	-	-	(24.122.830)
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	504.495.100	-	-	-	-	504.495.100
11	Dinas Sosial	-	(770.087.253)	-	-	-	91.393.000	(678.694.253)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	4.471.273.714	1.499.534.815	-	-	-	5.970.808.529
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	168.090.151	-	-	-	-	168.090.151
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	231.900.000	-	-	-	-	231.900.000
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(24.075.786)	805.537.631	2.856.719.498	358.649.483	(9.905.600)	(49.522.000)	3.937.403.226
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.638.460.350	399.546.366	-	-	-	2.038.006.716
17	Dinas Perhubungan	-	5.548.670.342	3.455.851.625	8.460.866.050	-	-	17.465.388.017
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	6.140.365.500	-	-	-	-	6.140.365.500
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	576.314.660	(4.117.131.144)	-	-	-	(3.540.816.484)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.278.285.720	396.206.955	-	-	-	1.674.492.675
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	1.508.092.000	743.606.800	-	-	-	2.251.698.800
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	(897.163.918)	-	-	512.720.274	-	(384.443.644)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.071.929.990	(1.354.689.011)	199.473.500	(197.600.000)	-	(280.885.521)

NO	S K P D	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
24	Dinas Pariwisata	-	349.112.700	-	191.240.000	-	-	540.352.700
25	Dinas Pertanian	-	2.464.714.702	752.346.564	98.455.020	(834.672.600)	(99.250.000)	2.381.593.686
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	7.800.000	-	4.734.534.330	-	-	4.742.334.330
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(922.703.135)	96.887.192	33.288.557	-	-	-	(792.527.386)
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	(925.645.000)	-	-	-	-	(925.645.000)
29	Biro Hukum	-	433.065.091	-	-	-	-	433.065.091
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	348.309.476	-	-	-	-	348.309.476
31	Biro Umum dan Perlengkapan	(296.501.000)	(1.771.664.719)	(206.972.890)	-	-	709.356.600	(1.565.782.009)
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	(108.115.014)	-	-	-	-	(108.115.014)
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	182.870.256	-	-	-	-	182.870.256
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	(105.216.500)	-	-	-	-	(105.216.500)
35	Sekretariat DPRD	-	18.042.573.583	38.136.667.856	7.914.312.060	-	-	64.093.553.499
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	168.959.246	-	-	-	-	168.959.246
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(17.870.032.199)	428.406.915	49.276.119	-	2.886.000	-	(17.389.463.165)
38	Badan Pendapatan Daerah	(2.384.080.402)	6.450.753.618	2.168.302.264	17.495.739	-	-	6.252.471.220
39	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.004.050.000	-	-	-	-	1.004.050.000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	720.176.835	58.275.000	-	-	-	778.451.835
41	Badan Penghubung	-	1.347.251.284	706.104.964	-	(30.000.000)	-	2.023.356.248
42	Inspektorat Provinsi	-	373.202.094	908.242.788	-	-	-	1.281.444.882
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	12.132.300	190.596.636	-	-	-	202.728.936
	HARGA PEROLEHAN	75.953.888.048	314.337.475.820	362.277.380.329	490.438.723.256	44.855.212.398	(146.511.459.627)	1.141.351.220.224

SALDO KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024 (Audited) Dan 2025

Lampiran 24 Neraca

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.160.566.000	-	-	-	1.160.566.000	
		A. GEDUNG DAN BANGUNAN	99.319.000	-	-	-	99.319.000	
		1 DED Gedung Satpol PP Provinsi Banten	99.319.000,00	-	-	-	99.319.000	
		B. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.061.247.000	-	-	-	1.061.247.000	
		1 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Wanasalam	543.006.000	-	-	-	543.006.000	
		2 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Cimuncang	518.241.000	-	-	-	518.241.000	
2	DINAS KESEHATAN		512.410.000	-	-	-	512.410.000	
		1 Perencanaan Gardu Induk RSj dan KO Banten	90.860.000	-	-	-	90.860.000	
		2 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi (Penyusunan Andal Lalin RSJKO)	99.057.000	-	-	-	99.057.000	
		3 Blj Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perenc. & Perancangan Lingk. Bangunan & Landscape (Pembuatan DED Pekerjaan Slasar dan Lansc	96.137.000	-	-	-	96.137.000	
		4 Feasibility Study (FS) Pengembangan RS Labuan	97.653.000	-	-	-	97.653.000	
		5 Belanja Modal Pagar (DED Pemagaran Instalasi Farmasi Provinsi Banten)	29.950.000	-	-	-	29.950.000	
		6 Jasa Konsultasi Manajemen (Review DED RSJKO)	98.753.000	-	-	-	98.753.000	
3	RSUD BANTEN		18.976.530.335	-	18.976.530.335	91.985.700	91.985.700	
		1 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Tekanan/Positif Ruang Ranap dan ICU Gedung Belakang	146.513.675	-	146.513.675	-	0	
		2 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pusat Penanganan Kekerasan	96.866.000	-	96.866.000	-	-	
		3 Pembangunan Bunker Radioterapi	6.537.154.964,00	-	6.537.154.964,00	-	-	
		4 Bangunan Kesehatan (Penguatan Sistem Kesehatan Pembangunan Bunker Brachitheraphy)	6.406.411.865,00	-	6.406.411.865,00	-	-	
		5 JASA KONSULTASI PERENCANAAN BUNKER RADIOTERAPI	198.937.000,00	-	198.937.000	-	-	
		6 asa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan BUNKER Radioterapi	699.148.500,00	-	699.148.500	-	-	
		7 Bangunan Kesehatan (Penguatan Sistem Kesehatan Pembangunan Bunker Branchitheraphy	4.891.498.331,00	-	4.891.498.331	-	-	
		8 Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Singgah untuk Keluarga Pasien				91.985.700	91.985.700	

NO	SKPD	URAIAN		2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
4	RSUD MALINGPING			1.105.059.450	-	-	-	1.105.059.450	
		1	DED Pengembangan Gedung dan Lingkungan Lahan Baru Uang Muka 20%	655.420.150	-	-	-	655.420.150	
		2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Belakang (DED)	449.639.300	-	-	-	449.639.300	
5	UPTD PELATIHAN KESEHATAN			47.186.100	-	-	-	47.186.100	
		1	DED PENGEMBANGAN GEDUNG UPTD PELATIHAN KESEHATAN	47.186.100	-	-	-	47.186.100	
6	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			142.600.000	-	-	-	142.600.000	
		1	Jasa Konsultan Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Gedung Laboratorium BSL 2	47.850.000,00	-		-	47.850.000	
		2	DED Pembangunan Gedung BSL 2	94.750.000,00	-		-	94.750.000	
7	DINAS SOSIAL			-	-	-	91.393.000,00	91.393.000,00	
		1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan DED Pagar	-			91.393.000,00	91.393.000,00	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1.450.039.170	-	1.325.416.470	26.603.234.622	26.727.857.322	
		1	Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan Umpeg DIndikbud	579.978.500	-	579.978.500	-	-	
		2	Jasa Konsultansi Kelayakan Gedung SMAN 15 Kota Tangerang	99.600.000	-	-	-	99.600.000	
		3	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		4	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		5	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		6	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		7	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		8	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		9	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		10	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		11	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		12	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		13	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9		
		14	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		15	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		16	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		17	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		18	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		19	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		20	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		21	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		22	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		23	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		24	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		25	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		26	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		27	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		28	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		29	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		30	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		31	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		32	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		33	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		34	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		
		35	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-		

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		36	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		37	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		38	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		39	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		40	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		41	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		42	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		43	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		44	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		45	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		46	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		47	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		48	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		49	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		50	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		51	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		52	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		53	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		54	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.477	-	9.090.477	-	-
		55	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SKh Negeri 01 Kab. Serang	99.469.000	-	99.469.000	-	-
		56	asa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 1 Cilegon	2.494.140	-	2.494.140	-	-
		57	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 2 KS Cilegon	20.949.600	-	20.949.600	-	-

NO	SKPD	URAIAN		2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		58	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 3 Cilegon	25.438.800	-	25.438.800	-	-	
		59	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 4 Cilegon	29.928.000	-	29.928.000	-	-	
		60	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 5 Cilegon	20.949.600	-	20.949.600	-	-	
		61	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 5 Kota Serang	18.767.000	-	18.767.000	-	-	
		62	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 3 Kota Serang	12.511.300	-	12.511.300	-	-	
		63	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 2 Kota Serang	7.819.500	-	7.819.500	-	-	
		64	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 6 Kota Serang	25.022.700	-	-	-	25.022.700	
		65	Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 8 Kota Serang	34.406.430	-	34.406.430	-	-	
		66	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		67	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		68	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		69	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		70	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		71	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		72	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas				24.811.275	24.811.275	

NO	SKPD	URAIAN		2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		73	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas				24.811.275	24.811.275	
		74	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas				24.811.275	24.811.275	
		75	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas				24.811.275	24.811.275	
		76	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja				33.081.700	33.081.700	
		77	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja				33.081.700	33.081.700	
		78	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja				33.081.700	33.081.700	
		79	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari				33.081.700	33.081.700	
		80	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari				33.081.700	33.081.700	
		81	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari				33.081.700	33.081.700	
		82	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang,SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		83	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang,SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		84	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang,SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		85	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang,SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		86	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020
		87	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020
		88	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020
		89	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020
		90	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020
		91	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020
		92	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360
		93	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360
		94	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360
		95	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360
		96	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360
		97	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		98 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		99 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		100 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		101 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		102 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		103 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 25 Kabtang				14.177.874	14.177.874	
		104 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		105 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		106 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		107 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	
		108 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	
		109 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	
		110 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	
		111 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		112	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang			24.802.950	24.802.950	
		113	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang			24.802.950	24.802.950	
		114	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan			33.081.700	33.081.700	
		115	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan			33.081.700	33.081.700	
		116	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan			33.081.700	33.081.700	
		117	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang			24.811.275	24.811.275	
		118	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang			24.811.275	24.811.275	
		119	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang			24.811.275	24.811.275	
		120	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang			24.811.275	24.811.275	
		121	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA & SMAN 9 Serang			49.647.525	49.647.525	
		122	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA & SMAN 9 Serang			49.647.525	49.647.525	
		123	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SKh Negeri 02 Kabupaten Lebak			97.425.000	97.425.000	
		124	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan USB SKh Negeri 01 Kota Tangerang			98.385.000	98.385.000	
		125	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SKh Negeri 01 Kabupaten Serang			97.000.000	97.000.000	
		126	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 16 Kabupaten Tangerang			7.622.260.288	7.622.260.288	
		127	Pembnagunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 12 Kota Tangerang			8.572.934.295	8.572.934.295	
		128	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros			5.955.877.094	5.955.877.094	
		129	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Panggarangan			992.652.927	992.652.927	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		130 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam				1.647.094.307	1.647.094.307	
		131 Jasa FS dan Jasa Appraisal Lahan SMKN 7 Kota Tangerang				130.190.960	130.190.960	
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		166.019.741.476	-	164.981.043.144	11.424.332.400	12.463.030.722	
		A. TANAH	1.098.204.546	-	932.131.836	-	166.072.700	
		1 Ruas Jalan Citeras - Tigaraksa	148.500.000,00	-	148.500.000,00	-	-	
		2 BOP TANAH UNTUK JALAN RUAS PALIMA BAROS (lingkar baros	159.605.000,00	-	159.605.000,00	-	-	
		3 BOBP Persiapan Ruas Jalan Palima - Baros (Lingkar Baros)	624.026.836,00	-	624.026.836,00	-	-	
		4 Jasa Konsultansi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang	96.131.550,00	-			96.131.550	
		5 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	69.941.150,00	-			69.941.150	
		C. GEDUNG DAN BANGUNAN	21.013.767.630	-	20.565.339.008	420.463.200	868.891.822	
		1 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	448.428.622,00	-		-	448.428.622	
		2 Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten	610.179.880,00		610.179.880	-	-	
		3 Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Bank Banten	19.955.159.128		19.955.159.128	-	-	
		4 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan				420.463.200	420.463.200	
		D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	143.907.769.300	-	143.483.572.300	11.003.869.200	11.428.066.200	
		1 Penyusunan Dokumen Teknis Kelayakan Pembangunan Jalan Baru Palima - Baros.	48.983.000	-	48.983.000	-	-	
		2 Penyusunan Pengadaan Tanah Kelayakan Pembangunan Jalan Baru Palima - Baros	49.258.000	-	49.258.000	-	-	
		3 DED Jalan Palima - Baros	200.154.000	-	200.154.000	-	-	
		4 Pengadaan Lahan Palima - Baros	373.617.700	-	373.617.700	-	-	
		5 DED Pengaman Pantai Binuangeun	424.197.000,00	-		-	424.197.000	
		6 Jalan Provinsi Pembangunan Jalan Ciparay Cikumpay	69.281.521.750,00	-	69.281.521.750,00	-	-	
		7 Jalan Provinsi Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya	73.530.037.850,00	-	73.530.037.850,00	-	-	
		8 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Baros Petir		-		10.815.652.000	10.815.652.000	
		9 Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cimanyangray Saluran Irigasi				188.217.200	188.217.200	
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.748.896.670	-	-	-	2.748.896.670	
		1 Perencanaan Fisik, Pertamanan dll - DED Normalisasi Sungai UPTD PPBAPL Curug Barang	68.500.000	-		-	68.500.000	
		2 Jasa Konsultansi DED Zona PPBAPL 3	215.326.125,00	-		-	215.326.125	
		3 Pembayaran termin 1 DED Jetty PP Cikeusik	129.796.740,00	-		-	129.796.740	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		4	DED pembangunan Laboratorium UPTD PPBAPL	49.506.000,00	-	-	49.506.000	
		5	Reviw Masterplant PPBAPL Curugbarang	162.565.050,00	-	-	162.565.050	
		6	Belanja Jasa Konsultansi Review Masterplan PPBPL Curug Barang	81.349.900,00	-	-	81.349.900	
		7	Jasa Konsultansi DED Kawasan PPBAPL Cigorondong Zona 4	190.642.500,00	-	-	190.642.500	
		8	Konsultan Perencanaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) PPP Labuan	292.067.640,00	-	-	292.067.640	
		9	Pembayaran Termin 2 DED Jetty	216.851.820,00	-	-	216.851.820	
		10	Review Masterplan PPP Labuan	195.909.450,00	-	-	195.909.450	
		11	Konsultan Perencanaan Pembuatan Feasibility Study Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	195.900.570,00	-	-	195.900.570	
		12	Jasa Konsultansi DED Kawasan PPBAPL Cigorondong Zoon 4	192.307.500,00	-	-	192.307.500	
		13	Jasa Konsultansi DED Kwasan PPBAPL Cigorondong Zona 3	217.573.875,00	-	-	217.573.875	
		14	DED Dermaga	98.734.500,00	-	-	98.734.500	
		15	Dokumen Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	441.865.000,00	-	-	441.865.000	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		49.522.000	-	49.522.000	-	-	
		1	Jasa Konsultan Penyusunan DED Jalan Paving ke Daerah Puteran	49.522.000	-	49.522.000	-	-
			-				-	
12	DINAS PERTANIAN		99.250.000	-	99.250.000	-	-	
		1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25.000.000	-	25.000.000	-	-
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (DED Perencanaan Auning Parkir Dinas Pertanian)	24.700.000	-	24.700.000	-	-
		3	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainya (DED Perencanaan Pagar Dinas Pertanian)	24.800.000	-	24.800.000	-	-
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencana Asitektur-Jasa Lainnya (Pemagaran Citeras DINAS PERTANIAN)	24.750.000	-	24.750.000	-	-
13	SEKREATRIAT DPRD		6.353.555.500	-	-	-	6.353.555.500	
		1	Konsultan Perencanaan Gedung Fraksi	3.521.892.500,00	-	-	3.521.892.500	
		2	JASA KONSULTASI AMDAL GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN & JASA KONSULTASI ANDALALIN GEDUNG DPRD	2.432.931.000,00	-	-	2.432.931.000	
		3	DED Partisi Dinding Lantai 1	99.683.000,00		-	99.683.000	
		4	DED Partisi Dinding Lantai 2	99.683.000,00		-	99.683.000	
		5	DED Partisi Dinding Lantai 3	99.683.000,00		-	99.683.000	
		6	DED Lantai Paripurna	99.683.000,00		-	99.683.000	
14	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		95.016.000,00	-	-	-	95.016.000,00	

NO	SKPD	URAIAN		2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		1	Jasa Desain Arsitekturat (Reviu DED)	95.016.000,00	-	-	0,00	95.016.000	
15	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN			-			709.356.599,45	709.356.599,45	
		1	Jasa Konsultan DED Penataan Gedung Gerai Dekranasda dan Perpustakaan Lingkungan Pendopo Lama	-			63.780.600	63.780.600	
		2	Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya Lingkungan Rumah Dinas Wakil Gubernur Gubernur				43.856.100	43.856.100	
		3	Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pendopo gubernur				43.245.600	43.245.600	
		4	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkungan Pendopo Lama				43.689.600	43.689.600	
		5	Jasa Konsultasi DED Penataan Landscap Area Lingkungan Pendopo Lama				63.447.600	63.447.600	
		6	Jasa Konsultasi DED Penataan Landscap Area Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pendopo Gubernur				63.447.600	63.447.600	
		7	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Exterior Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				97.069.500	97.069.500	
		8	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Interior Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				96.903.000	96.903.000	
		9	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan AC FRV Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				96.958.500	96.958.500	
		10	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan AC FRV Gedung Pendopo Gubernur Provinsi Banten				96.958.500	96.958.500	
				198.760.372.701,00	-	185.431.761.948,65	38.920.302.321,51	52.248.913.064	

SALDO ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

NO		URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI KURANG SALDO AWAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	2025	KETERANGAN
1		2	3	4	5=3-4	6	7	8=5+6-7	
A		Tuntutan Ganti Rugi	19.714.286	-	19.714.286	13.570.000	19.714.286	13.570.000	
B		Aset Tidak Berwujud	35.732.344.452	-	35.732.344.452	7.553.082.673	19.061.792.891	24.223.634.234	
C		Aset Lain-lain							
	1.	Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif & Biaya Operasional Pimpinan DPRD	237.655.000	-	237.655.000	-	-	237.655.000	
	2.	Uang Sitaan Kejaksaan atas Tunjangan Perumahan	169.000.000	-	169.000.000	-	-	169.000.000	
	3.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Saldo Kas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat)	-	-	-	-	-	-	
	4.	Aset tetap yang kondisinya rusak berat	869.829.006.066	-	869.829.006.066	108.712.165.309	498.211.195.785	480.329.975.588	
	5.	Uang Titipan Perkara Pajak di UPT Kepala Dua Bapenda Provinsi Banten di Kejaksaan Tinggi Banten	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	
	6.	Kerugian atas permasalahan Pajak Daerah sudah ada penetapan pembebanan namun belum didukung jaminan penyelesaian TGR	4.829.369.200	-	4.829.369.200	-	-	4.829.369.200	
	7.	Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-	
	8	Aset Tetap yang dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota	69.715.747.188	-	69.715.747.188	-	50.862.295.497	18.853.451.691	
		Jumlah Aset Lain-lain	950.763.307.254	-	950.763.307.254	108.712.165.309	555.056.021.082	504.419.451.480	
		JUMLAH ASET LAINNYA	986.515.365.992	-	986.515.365.992	116.278.817.982	574.137.528.259	528.656.655.714	

No	Uraian	Perolehan s.d 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Perolehan Setelah Koreksi	Akumulasi amortisasi sd 2024	Koreksi Akumulasi amortisasi	Penambahan 2025	Pengurangan (Reklas ke aset lain-lain)	Pengurangan (Reklas ke aset tetap)	Akumulasi amortisasi Reklas ke penyusutan aset lain-lain	Perolehan s.d 2025	Beban amortisasi	Akumulasi amortisasi sd 2025	Nilai Buku 2025
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=5+8-9-10	13	14= 6+7+13-11	15= 12- 14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	269.130.000	-	269.130.000	93.546.667	-	213.002.500	-	-	-	482.132.500	59.983.354	153.530.021	328.602.479
2	Dinas Kesehatan	14.547.907.321	-	14.547.907.321	769.163.084	-	1.350.755.500	-	-	-	15.898.662.821	3.663.880.070	4.433.043.154	11.465.619.667
3	RSU Malingping	6.240.278.215	-	6.240.278.215	130.005.796	-	-	-	-	-	6.240.278.215	1.560.069.554	1.690.075.350	4.550.202.865
4	RSUD Banten	4.955.238.000	-	4.955.238.000	3.184.549.208	-	1.387.500.000	-	-	-	6.342.738.000	994.736.500	4.179.285.708	2.163.452.292
5	RSUD Labuan	-	-	-	-	-	1.419.605.000	-	-	-	1.419.605.000	59.150.208	59.150.208	1.360.454.792
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	1.419.672.500	-	-	-	1.419.672.500	59.153.021	59.153.021	1.360.519.479
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	475.858.700	-	475.858.700	400.932.367	-	49.700.000	-	-	-	525.558.700	74.328.250	475.260.617	50.298.083
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	338.500.032	-	338.500.032	100.744.455	-	-	-	-	-	338.500.032	89.158.341	189.902.796	148.597.236
9	Satuan Polisi Pamong Praja	138.250.000	-	138.250.000	41.361.458	-	-	-	-	-	138.250.000	24.737.500	66.098.958	72.151.042
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.306.000	-	188.306.000	43.192.917	-	-	-	-	-	188.306.000	47.076.500	90.269.417	98.036.583
11	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	384.075.100	-	384.075.100	362.525.504	-	-	-	-	-	384.075.100	21.549.596	384.075.100	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	300.812.000	-	300.812.000	292.645.333	-	49.500.000	49.000.000	-	-	301.312.000	8.666.667	301.312.000	-
14	Dinas Ketahanan Pangan	127.280.000	-	127.280.000	113.692.500	-	-	-	-	-	127.280.000	10.870.000	124.562.500	2.717.500
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	179.250.000	-	179.250.000	56.592.708	-	-	-	-	-	179.250.000	44.812.500	101.405.208	77.844.792
17	Dinas Perhubungan	229.500.000	-	229.500.000	172.125.000	-	566.225.000	-	-	-	795.725.000	586.475.000	758.600.000	37.125.000
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.094.107.660	-	3.094.107.660	1.794.590.180	-	-	-	-	-	3.094.107.660	283.511.915	2.078.102.095	1.016.005.565
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.095.000	-	210.095.000	210.095.000	-	-	-	-	-	210.095.000	-	210.095.000	(0)
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	109.400.000	-	109.400.000	84.329.167	-	-	-	-	-	109.400.000	25.070.833	109.400.000	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.900.000	-	216.900.000	160.433.974	-	-	-	-	-	216.900.000	56.466.026	216.900.000	0
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.250.000	-	67.250.000	23.817.708	-	-	-	-	-	67.250.000	16.812.500	40.630.208	26.619.792
24	Dinas Pariwisata	120.379.500	-	120.379.500	40.965.938	-	-	-	-	-	120.379.500	30.094.875	71.060.813	49.318.688
25	Dinas Pertanian	95.000.000	-	95.000.000	49.479.167	-	-	-	-	-	95.000.000	23.750.000	73.229.167	21.770.833
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	96.623.510	-	96.623.510	17.259.805	-	94.005.900	-	-	-	190.629.410	38.399.196	55.659.000	134.970.410
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	135.725.000	-	135.725.000	135.725.000	-	-	-	-	-	135.725.000	-	135.725.000	(0)
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	58.782.360	-	58.782.360	34.289.710	-	-	-	-	-	58.782.360	14.695.590	48.985.300	9.797.060
31	Biro Umum dan Perlengkapan	466.830.500	-	466.830.500	292.770.687	-	-	-	-	-	466.830.500	116.161.063	408.931.750	57.898.750
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	92.800.000	-	92.800.000	79.266.667	-	-	-	-	-	92.800.000	13.533.333	92.800.000	-

No	Uraian	Perolehan s.d 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Perolehan Setelah Koreksi	Akumulasi amortisasi sd 2024	Koreksi Akumulasi amortisasi	Penambahan 2025	Pengurangan (Reklas ke aset lain-lain)	Pengurangan (Reklas ke aset tetap)	Akumulasi amortisasi Reklas ke penyusutan aset lain-lain	Perolehan s.d 2025	Beban amortisasi	Akumulasi amortisasi sd 2025	Nilai Buku 2025
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=5+8-9-10	13	14= 6+7+13-11	15= 12- 14
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	241.285.000	-	241.285.000	42.250.000	-	-	-	-	-	241.285.000	39.000.000	81.250.000	160.035.000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.633.055.554	-	1.633.055.554	1.528.189.529	-	199.105.000	-	-	-	1.832.160.554	156.404.533	1.684.594.061	147.566.493
38	Badan Pendapatan Daerah	369.690.000	-	369.690.000	226.299.375	-	609.761.273	-	-	-	979.451.273	59.325.188	285.624.563	693.826.710
39	Badan Kepegawaian Daerah	350.035.000	-	350.035.000	350.035.000	-	-	-	-	-	350.035.000	-	350.035.000	-
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Inspektorat	-	-	-	-	-	194.250.000	-	-	-	194.250.000	4.046.875	4.046.875	190.203.125
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	JUMLAH	35.732.344.452	-	35.732.344.452	10.830.873.904	-	7.553.082.673	49.000.000	-	-	43.236.427.125	8.181.918.987	19.012.792.891	24.223.634.234

REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan sd 2024	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Nilai Perolehan sd 2025	Akumulasi Penyusutan 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6=3+4-6	7	8=6+7	9
1	Sisa piutang atas Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Dana Operasional Pimpinan DPRD	237.655.000	-	-	237.655.000	-	237.655.000	
2	Uang Sitaan Kejaksaan yang disita dari anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan masa bakti 1999–2004	169.000.000	-	-	169.000.000	-	169.000.000	
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Saldo Kas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat)	-	-	-	-	-	-	
4	Aset tetap yang kondisinya rusak berat	869.829.006.066	108.712.165.309	42.066.674.844	936.474.496.532	456.144.520.943	480.329.975.588	
5	Uang Titipan Perkara Pajak di UPT Kepala Dua Bapenda Provinsi Banten di Kejaksaan Tinggi Banten	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	-	-	
6	Kerugian atas permasalahan Pajak Daerah sudah ada penetapan pembebanan namun belum didukung jaminan penyelesaian TGR	4.829.369.200	-	-	4.829.369.200	-	4.829.369.200	
7	Aset Tetap yang dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota	69.715.747.188	-	38.936.700.000	30.779.047.188	11.925.595.497	18.853.451.691	
	JUMLAH	950.763.307.254	108.712.165.309	86.985.904.644	972.489.567.920	468.070.116.440	504.419.451.480	

REKAP BARANG RUSAK BERAT MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
S/D 2025

NO	SKPD	HARGA PEROLEHAN sd 2024 (AUDITED)	koreksi tambah/ kurang saldo awal	PENGHAPUSAN	MUTASI DEBIT		MUTASI KREDIT	PEROLEHAN 2025	AK PENY				NILAI BUKU
					Audited	Hasil Koreksi			s.d 2024 (Audited)	Koreksi	2025	s.d 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5-6-7-8	10	11	12	13=10+11+12	14=9-13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.903.157.231,98	-	16.090.055.927,26	7.788.067.945,01	-	197.600.000,00	145.403.569.249,73	124.519.326.070,97	-	494.919.615,27	124.024.406.455,70	21.379.162.794,03
2	Dinas Kesehatan	7.767.051.758,01	-	-	-	-	-	7.767.051.758,01	3.246.301.579,68	-	-	3.246.301.579,68	4.520.750.178,33
3	RSUD Malingping	1.435.777.000,00	-	14.511.000,00	29.691.000,00	-	-	1.450.957.000,00	1.435.777.000,00	-	15.180.000,00	1.450.957.000,00	-
4	RSUD Banten	5.854.669.794,22	-	243.379.675,00	243.379.675,00	-	-	5.854.669.794,22	5.806.280.732,54	-	-	5.806.280.732,54	48.389.061,68
5	RSUD Labuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DINKES	15.057.498.552,23	-	257.890.675,00	273.070.675,00	-	-	15.072.678.552,23	10.488.359.312,22	-	15.180.000,00	10.503.539.312,22	4.569.139.240,01
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	510.531.940.858,97	-	3.581.378.536,00	18.912.489.943,00	-	794.366.200,00	525.068.686.065,97	179.663.151.383,21	-	450.034.000,46	180.113.185.383,67	344.955.500.682,30
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.609.009.465,09	-	3.275.015.000,00	4.156.783.308,85	-	-	49.490.777.773,94	23.290.470.253,04	-	881.768.308,85	24.172.238.561,89	25.318.539.212,05
9	Satuan Polisi Pamong Praja	810.410.735,00	-	-	575.961.600,00	-	-	1.386.372.335,00	724.319.068,32	-	575.961.600,00	1.300.280.668,32	86.091.666,68
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.149.901.612,00	-	-	-	-	-	1.149.901.612,00	1.149.901.612,00	-	-	1.149.901.612,00	-
11	Dinas Sosial	1.653.069.351,00	-	-	1.511.611.756,07	-	-	3.164.681.107,07	1.340.853.092,67	-	1.511.611.756,07	2.852.464.848,74	312.216.258,33
12	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	846.998.494,55	-	-	2.521.296.864,65	-	-	3.368.295.359,20	786.016.608,33	-	2.519.774.189,65	3.305.790.797,98	62.504.561,22
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	135.295.000,00	-	-	49.000.000,00	-	49.500.000,00	134.795.000,00	135.295.000,00	-	8.666.666,67	126.628.333,33	8.166.666,67
14	Dinas Ketahanan Pangan	275.030.000,00	-	-	-	-	-	275.030.000,00	275.030.000,00	-	-	275.030.000,00	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.283.303.800,00	-	38.725.000,00	62.800.785,64	-	-	2.307.379.585,64	2.189.540.508,33	-	-	2.189.540.508,33	117.839.077,31
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	154.790.000,00	-	-	-	-	-	154.790.000,00	154.790.000,00	-	-	154.790.000,00	-
17	Dinas Perhubungan	21.119.963.793,00	-	1.002.225.000,00	23.582.500,00	-	566.225.000,00	19.575.096.293,00	10.054.302.849,06	-	626.174.166,67	9.428.128.682,39	10.146.967.610,61
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.320.264.800,00	-	-	-	-	-	2.320.264.800,00	2.264.456.175,00	-	-	2.264.456.175,00	55.808.625,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.087.999.003,00	-	-	209.700.000,00	-	-	1.297.699.003,00	1.012.999.003,00	-	209.700.000,00	1.222.699.003,00	75.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.708.632.250,00	-	-	-	-	-	2.708.632.250,00	2.607.404.437,50	-	-	2.607.404.437,50	101.227.812,50
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	358.360.000,00	-	-	30.750.000,00	-	-	389.110.000,00	344.331.875,00	-	30.750.000,00	375.081.875,00	14.028.125,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	602.618.000,00	-	-	1.979.719.204,35	-	-	2.582.337.204,35	602.618.000,00	-	1.932.471.912,68	2.535.089.912,68	47.247.291,67
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.280.648.602,38	-	3.274.988.937,18	3.680.927.050,00	-	-	8.686.586.715,20	3.779.067.102,71	-	653.129.895,51	3.125.937.207,20	5.560.649.508,00
24	Dinas Pariwisata	257.305.200,00	-	-	-	-	-	257.305.200,00	61.324.000,01	-	-	61.324.000,01	195.981.199,99
25	Dinas Pertanian	5.394.574.611,64	-	308.210.000,00	627.688.857,77	-	-	5.714.053.469,41	2.765.638.544,15	-	598.888.857,77	3.364.527.401,92	2.349.526.067,49
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	43.594.645.544,00	-	-	-	-	-	43.594.645.544,00	29.898.045.825,87	-	-	29.898.045.825,87	13.696.599.718,13
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.700.734.492,33	-	882.509.500,00	258.000.000,00	-	89.350.000,00	1.986.874.992,33	1.962.976.044,83	-	80.787.291,67	1.882.188.753,16	104.686.239,17
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	750.935.000,00	-	183.000.000,00	432.250.000,00	-	-	1.000.185.000,00	750.935.000,00	-	249.250.000,00	1.000.185.000,00	-
29	Biro Hukum	431.381.552,00	-	-	-	-	-	431.381.552,00	431.381.552,00	-	-	431.381.552,00	-
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	113.267.500,00	-	-	126.000.000,00	-	-	239.267.500,00	113.267.500,00	-	126.000.000,00	239.267.500,00	-
31	Biro Umum dan Perlengkapan	21.269.306.216,00	-	2.225.038.751,00	4.851.881.914,00	-	21.053.000,00	23.875.096.379,00	19.648.617.513,51	-	2.375.840.908,84	22.024.458.422,35	1.850.637.956,65
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	35.365.013,76	-	35.365.013,76	147.865.013,76	-	-	147.865.013,76	35.365.013,76	-	112.500.000,00	147.865.013,76	-
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.097.540.000,00	-	9.000.000,00	21.910.000,00	-	-	1.110.450.000,00	1.085.352.500,00	-	12.910.000,00	1.098.262.500,00	12.187.500,00
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	2.035.403.500,00	-	-	173.840.500,00	-	-	2.209.244.000,00	2.035.403.500,00	-	173.840.500,00	2.209.244.000,00	-
35	Sekretariat DPRD	1.320.137.613,00	-	2.249.000.000,00	2.249.000.000,00	-	-	1.320.137.613,00	1.259.630.240,13	-	-	1.259.630.240,13	60.507.372,87
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.773.198.248,00	-	80.500.000,00	150.600.000,00	-	-	1.843.298.248,00	1.717.536.779,17	-	70.100.000,00	1.787.636.779,17	55.661.468,83
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.655.869.294,00	-	779.056.294,00	51.736.808.530,60	-	-	54.613.621.530,60	2.803.385.406,50	-	2.879.168.969,01	5.682.554.375,51	48.931.067.155,09
38	Badan Pendapatan Daerah	5.653.285.127,91	-	5.330.315.936,81	5.775.027.830,80	-	-	6.097.997.021,90	5.575.393.373,66	-	444.711.893,99	6.020.105.267,65	77.891.754,25
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.311.749.500,00	-	-	-	-	-	1.311.749.500,00	1.311.749.500,00	-	-	1.311.749.500,00	-
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.889.530.547,00	-	282.374.000,00	-	-	-	1.607.156.547,00	1.596.956.963,67	-	-	1.596.956.963,67	10.199.583,33
41	Badan Penghubung	836.163.071,76	-	463.932.071,76	385.531.029,98	-	-	757.762.029,98	814.463.071,76	-	86.701.041,78	727.762.029,98	30.000.000,00
42	Inspektorat	1.672.050.260,16	-	-	-	-	-	1.672.050.260,16	1.637.757.668,49	-	-	1.637.757.668,49	34.292.591,67
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.147.672.225,65	-	-	-	-	-	2.147.672.225,65	2.037.024.375,65	-	-	2.037.024.375,65	110.647.850,00
		869.829.006.066,40	-	40.348.580.642,77	108.712.165.309,48	-	1.718.094.200,00	936.474.496.533,11	442.924.436.724,52	-	17.120.841.574,89	456.144.520.944,27	480.329.975.588,84

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	UTANG Perhitungan Fihak Ketiga	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA										UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
					UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL (PENGADAAN ASET TETAP)	UTANG BELANJA BAGI HASIL	JUMLAH UTANG BELANJA		
						UTANG BELANJA BARANG	JUMLAH UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARA AN	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12	13	14	15=11+12+13+14	16	17= 3+4+5+15+16
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	75.418.424	-	-	75.418.424	-	14.938.400.068	-	15.013.818.492	-	15.013.818.492
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	402.993.487	-	-	402.993.487	-	-	-	402.993.487	-	402.993.487
3	RSUD Malingping	-	-	-	-	-	125.437.990	-	-	125.437.990	-	-	-	125.437.990	-	125.437.990
4	RSUD Banten	-	-	50.061.533	-	-	468.158.137	-	6.915.163.718	7.383.321.855	-	-	-	7.383.321.855	-	7.433.383.388
5	RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan	-	-	-	-	-	204.785.296	-	-	204.785.296	-	-	-	204.785.296	-	204.785.296
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	80.033.568	-	-	80.033.568	-	-	-	80.033.568	-	80.033.568
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2.583.362.568	-	6.510.544.931	624.559.899	87.050.775	-	7.222.155.605	2.579.582.396	15.055.200.238	-	24.856.938.239	-	27.440.300.806
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	630.293.394	41.631.504	-	-	671.924.898	-	-	-	671.924.898	-	671.924.898
9	Satuan Polisi Pamong Praja						-			-				-	-	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						28.873.740			28.873.740				28.873.740	-	28.873.740
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						36.568.826			36.568.826				36.568.826	-	36.568.826
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	38.254.285	-	-	38.254.285	-	-	-	38.254.285	-	38.254.285
13	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi						57.863.948			57.863.948				57.863.948	-	57.863.948
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana						32.255.508			32.255.508				32.255.508	-	32.255.508
15	Dinas Ketahanan Pangan						14.257.825			14.257.825				14.257.825	-	14.257.825
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						33.543.368			33.543.368				33.543.368	-	33.543.368
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						19.596.436			19.596.436				19.596.436	-	19.596.436
18	Dinas Perhubungan						317.362.937			317.362.937				317.362.937	-	317.362.937
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						36.685.074			36.685.074				36.685.074	-	36.685.074
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						32.489.624			32.489.624				32.489.624	-	32.489.624
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1.840.000	20.127.580			21.967.580				21.967.580	-	21.967.580
22	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga						42.877.544			42.877.544				42.877.544	-	42.877.544
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						40.103.564			40.103.564				40.103.564	-	40.103.564
24	Dinas Kelautan dan Perikanan						134.606.527			134.606.527				134.606.527	-	134.606.527
25	Dinas Pariwisata						27.164.012			27.164.012				27.164.012	-	27.164.012

NO.	SKPD	UTANG Perhitungan Fihak Ketiga	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA										UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
					UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL (PENGADAAN ASET TETAP)	UTANG BELANJA BAGI HASIL	JUMLAH UTANG BELANJA		
						UTANG BELANJA BARANG	JUMLAH UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARA AN	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12	13	14	15=11+12+13+14	16	17= 3+4+5+15+16
26	Dinas Pertanian						85.895.912			85.895.912				85.895.912	-	85.895.912
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						12.066.567			12.066.567				12.066.567	-	12.066.567
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						58.200.054			58.200.054				58.200.054	-	58.200.054
29	Sekretariat DPRD						194.909.902			194.909.902				194.909.902	-	194.909.902
30	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						-			-				-	-	-
31	Biro Hukum						-			-				-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi						-			-				-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan						304.944.251			304.944.251				304.944.251	-	304.944.251
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa						-			-				-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan						-			-				-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan						-			-				-	-	-
37	Badan Penghubung						23.327.773			23.327.773				23.327.773	-	23.327.773
38	Inspektorat Provinsi						35.536.194			35.536.194				35.536.194	-	35.536.194
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						27.889.191			27.889.191				27.889.191	-	27.889.191
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	357.517.214	-	-	453.328.359	-	-	453.328.359	-	-	-	453.328.359	-	810.845.573
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	138.497.733.036	-	-	-	37.859.314	-	-	37.859.314	-	-	308.629.634.987	308.667.494.301	-	447.165.227.337
42	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	2.280.000	-	33.387.489	-	-	33.387.489	-	-	-	35.667.489	-	35.667.489
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						75.426.112			75.426.112				75.426.112	-	75.426.112
JUMLAH		-	138.497.733.036	2.990.941.315	2.280.000	7.142.678.325	4.278.420.221	87.050.775	6.915.163.718	18.423.313.039	2.579.582.396	29.993.600.306	308.629.634.987	359.628.410.728	-	501.117.085.079

UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Utang PPN	-	-	-	-	Nihil
2	Utang PPh 21	-	-	-	-	Nihil
3	Utang PPh 22	-	-	-	-	Nihil
4	Utang PPh 23	-	-	-	-	Nihil
JUMLAH		-	-	-	-	

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
(UTANG DARI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 28 Neraca

NO	TANGGAL	NO BUKTI	PENYEDIA PINJAMAN	URAIAN	SALDO 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
1	31/12/2024	001/JP-UTANG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	Utang jangka pendek bagian utang jangka panjang	138.497.733.036	-	-	138.497.733.036	
2	02/01/2025	40/KM.7/I.1- PENDAPATAN/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[2] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	126.956.255.283	
3	31/01/2025	40/KM.7/I.2- UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[4] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	115.414.777.530	
4	28/02/2024	40/KM.7/II-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[5] Selisih Pendapatan DAU berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	103.873.299.777	
5	27/03/2024	40/KM.7/III-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[8] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	92.331.822.024	
6	30/04/2024	40/KM.7/IV-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[14] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	80.790.344.271	
7	28/05/2024	40/KM.7/V-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[19] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	69.248.866.518	
8	30/06/2024	40/KM.7/VI-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[25] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	57.707.388.765	

NO	TANGGAL	NO BUKTI	PENYEDIA PINJAMAN	URAIAN	SALDO 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
9	31/07/2024	40/KM.7/VII-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[38] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	46.165.911.012	
10	29/08/2024	40/KM.7/VIII-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[40] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	34.624.433.259	
11	30/09/2024	40/KM.7/IX-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[56] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	23.082.955.506	
12	31/10/2024	40/KM.7/X-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[64] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	11.541.477.753	
13	28/11/2024	40/KM.7/XI-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[97] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	-	
14	31/12/2025	55/MK/PK/2025	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	Reklas dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	138.497.733.036	-	138.497.733.036	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/MK/PK/2025
JUMLAH					138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 29 Neraca

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
1. Badan Pendapatan Daerah												
1	SPBUN 38.423-29 Binuangeun Kabupaten Lebak	SEWA TANAH PANGKALAN SPBUN	032/2771-DKP/2022	23-Sep-22	PT. UTAMA WANA JAYA	158.400.000	1462	5-Jan-22	5-Jan-26	31-Dec-25	5	541.724
2	Sekretariat Daerah Provinsi Banten	SEWA ATM Bank Banten	B-0002.3.2/1125/BPKA D/2024	02-Jan-24	Bank Banten	49.972.500	1096	1-Jan-24	31-Dec-26	31-Dec-25	365	16.642.302
3	Kantor Bapenda dan 11 UPT PPD	SEWA ATM Bank Banten	100.3.7/012-Bapenda/2025	21-Apr-25	Bank Banten	459.022.000	730	1-Jan-25	31-Dec-26	31-Dec-25	365	229.511.000
4	Kantor BPKAD & DPRD	SEWA ATM Bank Banten	900.1.14.3/012-BPKAD/2025	02-Jan-25	Bank Banten	82.208.000	730	2-Jan-25	1-Jan-27	31-Dec-25	366	41.216.614
5	UPTD.PPD Cikokol	SEWA ATM Bank BRI	100.3.7/011-Bapenda/2025	21-Apr-25	PT. BRI (Persero) TBK	47.290.000	730	1-Jan-25	31-Dec-26	31-Dec-25	365	23.645.000
6	UPTD.PPD Serpong	SEWA ATM Bank BRI	100.3.7/010-Bapenda/2025	21-Apr-25	PT. BRI (Persero) TBK	40.826.600	547	3-Jul-24	31-Dec-25	31-Dec-25	-	-
7	Kantor BPKAD/ Bapenda Kantor Kas	Sewa Kantor Kas	001 A/PKS/DIR-BB/1/2025	02-Jan-25	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk.	91.670.000	730	02-Jan-25	01-Jan-27	31-Dec-25	366	45.960.575
JUMLAH 1						929.389.100						357.517.214
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	Sewa Tanah terbangun Gudang	100.3.7/5217-DPUPR/2025	29-Dec-25	PT. POPULER KACA UTAMA	1.798.609.000	366	29-Dec-25	29-Dec-26	31-Dec-25	363	1.783.866.303
2	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran Kota Serang An. CV. Alfa Pratama Mandiri	Retribusi Jalan	500.10.29.15/331-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	Alfa Pratama Mandiri	Rp10.500.000	366	8-Jan-25	8-Jan-26	31-Dec-25	8	229.508
3	Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan Untuk penggunaan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Cipare (Depan Rumah Sakit DKT) Kota Serang An. PT. Innova perkasa	Retribusi Jalan	500.10.29.15/3214-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	PT. Innova perkasa	Rp4.900.000	700	20-Jan-25	20-Dec-26	31-Dec-25	354	2.478.000
4	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Serang Cilegon Lampu Merah Kepandean Kota Serang An. PT. Ms Kemakmuran	Retribusi Jalan	593/097.4-DPUPR/2023	3 Februari 2023 s/d 3 Februari 2026	PT. Ms Kemakmuran	Rp3.780.000	366	5-Mar-25	5-Mar-26	31-Dec-25	64	660.984

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
5	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Yusuf Martadilaga Kota Serang An. CV. Muda Karya Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/3306-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	CV. Muda Karya Utama	Rp2.016.000	366	5-Mar-25	5-Mar-26	31-Dec-25	64	352.525
6	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Videotron pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Depan Giant BSD City) Kota Tangerang An. PT. Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.8-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp45.000.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	12.786.885
7	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Serpong Sektor VI dan VII BSD City) Kota Tangerang Selatan An. PT Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.7-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp50.400.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	14.321.311
8	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Depan Kantor Old Managemen Office Omo BSD City) Kota Tangerang Selatan An. PT Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.6-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp50.400.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	14.321.311
9	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Veteran (Depan Mall Ramayana) Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/371-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.640.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	3.441.093
10	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Ahmad Yani (Depan Pizza Dominos) Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/365-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	22-Apr-25	22-Apr-26	31-Dec-25	112	942.514
11	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Taktakan Gunung Sari Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/370-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	22-Apr-25	22-Apr-26	31-Dec-25	112	942.514
12	Izin Pemanfaatan Pemakaian Bahu Jalan Jenis Penggunaan Pendirian Papan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan SMAN 1) Kota Serang an.PT. DINAMIS MEDIA BANTEN	Retribusi Jalan	500.10.29.15/368-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	2.911.694
13	Izin Pemanfaatan Jenis Penggunaan Pendirian Papan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Pisang Mas) Kota Serang an. PT. DINAMIS MEDIA BANTEN	Retribusi Jalan	500.10.29.15/363-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	2.911.694

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
14	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Samping Alun-alun Serang) Kota Serang An. PT Global Promo Agency	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1407-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Global Promo Agency	Rp5.425.000	366	20-May-25	20-May-26	31-Dec-25	140	2.075.137
15	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Samping Bank BNI) Kota Serang An. PT Global Promo Agency	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1406-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Global Promo Agency	Rp10.850.000	366	20-May-25	20-May-26	31-Dec-25	140	4.150.273
16	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan SPBU Pertamina EX Petronas)) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1315-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
17	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Ruko Paramount/Sumarecom Serpong) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1314-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
18	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan RS Ashobirin) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1316-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
19	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Serpong Plaza) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1318-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
20	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Tangcity) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1317-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
21	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Curug Legok Parungpanjang (Pertigaan LG) Kabupaten Tangerang An. CV. Bagus Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1704-DPUPR/2025	12 Juni 2025 s/d 12 Juni 2028	CV. Bagus Advertising	Rp7.840.000	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	3.513.005
22	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Curug Legok Parungpanjang (Pertigaan LG) Kabupaten Tangerang An. CV. Bagus Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1705-DPUPR/2025	12 Juni 2025 s/d 12 Juni 2028	CV. Bagus Advertising	Rp3.080.000	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	1.380.109
23	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya, Kota Tangerang Selatan (depan Lottemart Alam Sutera) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1312-DPUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp49.860.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	22.750.328

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
24	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya, Kota Tangerang Selatan (depan agen Bus Rosalia) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/131-1-DUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp49.860.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	22.750.328
25	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan (depan Samsat BSD) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/131-3-DUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp44.320.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	20.222.514
26	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Birjen Sam'un Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/903-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp3.080.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	1.607.322
27	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Veteran (Depan Mall Ramayana) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/899-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp50.000.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	26.092.896
28	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Depan Bank BNI) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/900-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
29	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Jamsostek) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/898-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
30	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Kantor PP) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/901-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
31	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan SMA 1) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/902-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp7.140.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	3.726.066
32	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Ciceri Carrefour/McD Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/897-DUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp46.000.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	24.005.464
33	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani (Perempatan Trip Jamaksari Mcd Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.1-DUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp2.520.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	1.342.623
34	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Alun Alun Timur Seberang Kantor Pos) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.2-DUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp7.560.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	4.027.869

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungsaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
35	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Mayor Syafei (Pertigaan Rutan Serang) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.3-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp2.520.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	1.342.623
36	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani (KH. Abdul Fatahasan Perempatan Carrefour) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp6.650.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	3.543.033
37	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PDAM Serpong) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.5-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp5.040.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	2.685.246
38	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT. Pratama Abadi Industri) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.4-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp43.200.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	23.016.393
39	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan WTC Serpong) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.6-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp71.600.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	38.147.541
40	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan SD Podok Jagung) Kota Tangerang Selatan An. PT Menara Niaga Lestari	Retribusi Jalan	570/1028 - DPUPR/2022	29 September 2023 s/d '29 Sept2026	PT Menara Niaga Lestari	Rp52.920.000	366	23-Dec-25	23-Dec-26	31-Dec-25	357	51.618.689
41	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Thamrin Kec Pinang Kota Tangerang An. PT Menara Niaga Lestari	Retribusi Jalan	570/491-DPUPR/2022	8 Agustus 2023 s/d '8 Agust 2025	PT Menara Niaga Lestari	Rp39.900.000	366	14-Aug-25	14-Aug-26	31-Dec-25	226	24.637.705
42	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu Kota Tangherang Selatan An. CV Media Lapan Enem	Retribusi Jalan	500.10.29.15/203 3-DPUPR/2025	11 Juli 2025 s/d '3 Juli 2028	CV Media Lapan Enem	Rp7.000.000	366	8-Aug-25	8-Aug-26	31-Dec-25	220	4.207.650
43	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Serpong Raya Kota Tangerang Selatan An PT. Caturkarda Depo Bangunan	Retribusi Jalan	500.10.29.15/174 8-DPUPR/2025	17 Juni 2025 s/d 17Juni 2028	PT. Caturkarda Depo Bangunan	Rp39.600.000	366	6-Oct-25	6-Oct-26	31-Dec-25	279	30.186.885
44	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu (Depan Teras Kota) Kota Tangerang Selatan An PT. Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	500.10.29.15/309 1-DPUPR/2025	28 Agustus 2025 s/d 28 Agustus 2028	PT. Bumi Serpong Damai	Rp75.200.000	366	15-Oct-25	15-Oct-26	31-Dec-25	288	59.173.770

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
45	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Bangunan Utilitas Pada Ruas Jalan Pakupatan Palima (syeh Nawawi Al-Bantani) Kota Serang An PT. Aplikanusa Linatasarta	Retribusi Jalan	500.10.29.15/435 9-DPUPR/2025	21 Oktober 2025 s/d '21 Oktober 2028	PT. Aplikanusa Linatasarta	Rp95.000.000	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Dec-25	315	81.762.295
46	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Thamrin (Depan Pabrik Tifico) Kota Tangerang An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/337.2-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp50.760.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	46.044.590
47	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Tahmirin (Tol Tangerang Jakarta KM 19-00) Kota Tangerang An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	'570/336.1-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp10.000.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	9.071.038
48	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada Billboard Pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT .Indah Kiat) Kota Tangerang Selatan An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/337.1-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp5.950.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	5.397.268
49	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT .Indah Kiat) Kota Tangerang Selatan An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/336.2-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp47.385.000	366	3-Dec-25	3-Dec-26	31-Dec-25	337	43.630.451
50	Izin Pemanfaatan Sepamdan Situ pada Ruas Jalan Situ Terate An. PT. Sarana Catur Tirtakelola.	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/376-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2027	PT. Sarana Catur Tirtakelola	Rp 840.000	366	13-Feb-25	13-Feb-26	31-Dec-25	44	100.984
51	Izin Pemanfaatan Sepamdan Pantai pada Ruas Jalan ;Pantai Binuangeun Wanasalam Kab. Lebak An. PT. DINAR DARUM LESTARI	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/131 9-DPUPR/2025	9 Mei 2025 s/d 9 Mei 2028	PT. DINAR DARUM LESTARI	Rp 592.000	366	28-May-25	28-May-26	31-Dec-25	148	239.388
52	Izin Pemanfaatan Sepamdan Sungai Pada Ruas Jalan Sungai Cinambul Kabupaten Pandeglang An. PT. UJUNG GUNUNG SALJU	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/150 4-DPUPR/2025	3 Juni 2025 s/d 3 Juni 2028	PT. UJUNG GUNUNG SALJU	Rp 272.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	124.109
53	Izin Pemanfaatan Sepamdan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Cidikit dan Cimadur Bayah Kab. Lebak An. PT.CEMINDO GEMILANG Tbk	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/158 3-DPUPR/2025	3 Juni 2025 s/d 3 Juni 2028	PT. CEMINDO GEMILANG Tbk	Rp 25.875.750	366	18-Jun-25	18-Jun-26	31-Dec-25	169	11.948.092
54	Izin Pemanfaatan Sepamdan Sungai pada Ruas Sungai Cilemer Kabupaten Pandeglang An. CV. DM TIRTA PERSADA	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/153 3.1-DPUPR/2025	28 Mei 2025 s/d 28 Mei 2028	CV. DM TIRTA PERSADA	Rp 7.924.500	366	27-Jun-25	27-Jun-26	31-Dec-25	178	3.853.992
55	Izin Pemanfaatan Sepamdan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Ciliman Kabupaten Pandeglang An. PT. Jascleans Hydro Power	Retribusi Sempadam	500.10.29./1984-DPUPR/2025	9 Juli 2025 s/d 9 Juli 2028	PT. Jascleans Hydro Power	Rp 44.037.000	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	24.424.893

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
56	Izin Penggunaan Tambak Udang pada Ruas Jalan Pantai Pagelaran Kec. Malingping Kab. Lebak An. PT. ROYAL GIHON SAMUDERA	Retribusi Sempadam	500.10.29./1896-DPUPR/2025	1 Juli 2025 s/d 1 Juli 2028	PT. ROYAL GIHON SAMUDERA	Rp 5.500.000	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	3.050.546
57	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Cilemer Kab. Pandeglang An. PT. Karya Cipta Mandalawangi	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/223 9-DPUPR/2025	1 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2028	PT. Karya Cipta Mandalawangi	Rp 7.509.000	366	20-Aug-25	20-Aug-26	31-Dec-25	232	4.759.803
58	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Cijalarang pada Ruas Jala Sungai Cijalarang Kabupaten Pandeglang An. PT. Globalindo Agro Lestari	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/224 0-DPUPR/2025	1 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2028	PT. Globalindo Agro Lestari	Rp 408.000	366	21-Aug-25	21-Aug-26	31-Dec-25	233	259.738
59	Izin Penggunaan Tambak Udang pada Ruas Jalan Pantai Pagelaran Kab. Lebak An. PT. SUKSES DAMAI BAHARI	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/189 5-DPUPR/2025	21 Agustus 2025 s/d 21 Agustus 2028	PT. SUKSES DAMAI BAHARI	Rp 6.000.000	366	28-Aug-25	28-Aug-26	31-Dec-25	240	3.934.426
60	Izin Penggunaan Jalan Jembatan untuk Akses Perumahan pada Ruas Jalan Daerah Irigasi Cicinta An. PT. Maja Karya Dev		500.10.29.15/100 5-DPUPR/2024	03 April 2024 s/d 03 April 2027	PT. Maja Karya Dev	Rp 384.000	366	30-Aug-25	30-Aug-26	31-Dec-25	242	253.902
61	Izin Pemanfaatan Sempadan Pantai pada Ruas Jalan Pantai Binuangeun Wanasalam Kab. Lebak An. PT. RADJA UDANG MALINGPING	Retribusi Sempadam	570/075.21-DPUPR/2022	18/04/2022 s/d 18 April 2025	PT. RADJA UDANG MALINGPING	Rp 4.500.000	366	27-Oct-25	27-Oct-26	31-Dec-25	300	3.688.525
62	Izin Pemasangan pipa ke penampungan /tandon pada Ruas Jalan Pantai Binuangeun An. PT. Jonchin Agromina Sejahtera	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/491 1-DPPR/2025	28 November 2025 s/d 28 November 2028	PT. Jonchin Agromina Sejahtera	Rp 1.200.000	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Dec-25	315	1.032.787
63	Izin Pemasangan Jembatan Penyebrangan pada Ruas Jalan Daerah Irigasi Cibanten An. PT. CAHAYA MATAHARI PERKASA	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 8-DPUPR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	PT. Cahaya Matahari Perkasa	Rp 1.725.750	366	17-Nov-25	17-Nov-26	31-Dec-25	321	1.513.568
64	Izin Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air pada Ruas Sungai Cihara Kabupaten Lebak An. PT. Banyu Daya Perkasa	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/264 3-DPUPR/2023	18 Desember 2023 s/d 18 Desember 2026	PT. Banyu Daya Perkasa	Rp 6.174.000	366	21-Nov-25	21-Nov-26	31-Dec-25	325	5.482.377
65	Izin Pemasangan Jembatan Penyebrangan pada Ruas JalanDaerah Irigasi Cibanten An. Hj. Jumairah	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 7-DPUPR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	Perorangan	Rp 326.250	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Dec-25	328	292.377
67	Izin Pemanfaatan Sempadan untuk jaringan pipa air desa karang suraga sungai cipasauran, kec. Cinangka, Kab. Serang, PT. Krakatau Tirta Industri	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 5-DPUPR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	PT. Krakatau Tirta Industri	Rp 11.866.250	366	11-Dec-25	11-Dec-26	31-Dec-25	345	11.185.400
JUMLAH 2						3.212.009.500						2.583.362.568

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
3. RSUD Banten												
1	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Mini Market Gd Garuda Lt.2 dan Gd Rajawali Lt.1	T-100.3.7/0701/RSUB/2025	5-Mar-25	Epi Oliyani, S.Sos	55.958.000,00	365	29/02/2025	28-Feb-26	31-Dec-25	59	9.045.265,75
2	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.1	T-100.3.7/0878/RSUB/2025		Sarmenah	9.000.000,00	365	13-Mar-25	12-Mar-26	31-Dec-25	71	1.750.684,93
3	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.2	T-100.3.7/1247/RSUB/2025/RSUB/2025	14-Apr-25	Nadya Ratu Gusnia	9.000.000,00	365	15-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	2.564.383,56
4	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.3	T-100.3.7/0582/RSUB/2025	21-Mar-25	Sairoh	9.000.000,00	365	20-Feb-25	19-Feb-26	31-Dec-25	50	1.232.876,71
5	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.4	T-100.3.7/1563/RSUB/2025	16-May-25	E. Sa'diyah, Sp.di.,M.Ap	9.000.000,00	365	16-May-25	15-May-26	31-Dec-25	136	3.353.424,66
6	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.5	T-100.3.7/0892/RSUB/2025	14-Mar-25	H. Asrori Gojali	9.000.000,00	365	22-Feb-25	21-Feb-26	31-Dec-25	52	1.282.191,78
7	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.6	B-100.3.7/1538/RSUB/2025	2-May-25	Muhamad Saefullah Rahman	9.000.000,00	365	13-May-25	12-May-26	31-Dec-25	133	3.279.452,05
8	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.7	T-100.3.7/1363/RSUB/2025	2-May-25	Kasman	9.000.000,00	365	19-Apr-25	18-Apr-26	31-Dec-25	108	2.663.013,70
9	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.8	T-100.3.7/1562/RSUB/2025	20-May-25	Yusi Yustiani	9.000.000,00	365	20-May-25	19-May-26	31-Dec-25	140	3.452.054,79
10	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.9	T-100.3.7/1561/RSUB/2025	13-May-25	Randy Granata	9.000.000,00	365	13-May-25	12-May-26	31-Dec-25	132	3.254.794,52
12	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.2			Ely Nursamsiah, SH, MKn	9.000.000,00	365	1-Jan-26	31-Dec-26	31-Dec-25	365	9.000.000,00

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
13	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.3			Joharudin	9.000.000,00	365	4-Dec-25	3-Dec-26	31-Dec-25	337	8.309.589,04
14	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.4	T-100.3.7/0088/RSUB/2025/RSUB/2025	14-Apr-25	Nurhasanah Aida	7.087.500,00	365	8-Jan-25	7-Jan-26	31-Dec-25	7	135.924,66
15	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 no.7	T-100.3.7/0406/RSUB/2025/RSUB/2025	16-Apr-25	Ruli Herdiana	7.087.500,00	365	8-Feb-25	7-Feb-26	31-Dec-25	38	737.876,71
JUMLAH 3						169.133.000						50.061.532,88
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (1+2+3)						4.310.531.600,24						2.990.941.315

UTANG BELANJA PEGAWAI - MEDICAL CHECK UP UJI KESEHATAN TERTENTU UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tagihan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Pegawai BKD Provinsi Banten	-	-	2.280.000	-	2.280.000	
JUMLAH			-	-	2.280.000	-	2.280.000	

UTANG BELANJA BARANG PAKAI HABIS-BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 30.2 Neraca

No	Nama SKPD/KEGIATAN	Kontrak		Berita Acara Serah Terima/Kemajuan Pekerjaan		Nama Rekanan	Nilai Kontrak/PHO	Tanggal pembayaran	No SP2D	Utang 2024	Pembayaran 2025	Koreksi (Hasil Verifikasi Inspektorat)	Utang 2025	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 8+11-12+13	15
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN													
1	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kelurahan Ketapang RW. 001 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.1162.PDPP/P erkim-3/2024	15 Oktober 2024	600/BASTHP/1162.UP PSU/Dperkim/2024	22 Januari 2025	CV.Kirana Bangun Konstruksi	-			187.300.000	187.300.000	-	-	
2	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Indah RW. 002 & 005 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.1122.PDPP/P erkim-3/2024	14 Oktober 2024	600/BASTHP/1122.UP PSU/Dperkim/2024	22 Januari 2025	CV.Kirana Bangun Konstruksi	-			373.600.000	373.600.000	-	-	
3	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sinagar, Ds. Jatake, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	600/SPK.198.BP/UPPS U/Perkim-3/2024	29 Oktober 2024	600/BASTHP/198P.UP PSU/Dperkim/2024	03 Februari 2025	CV. Tugu Raksa Mandiri	-			186.050.000	186.050.000	-	-	
4	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Makmur RW. 008 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.0435/UPPSU/ Perkim-3/2024	26 Agustus 2024	600/BASTHP/0435.UP PSU/Dperkim/2024	10 Februari 2025	CV.Putra Darma Intan Perkasa	-			187.630.000	187.630.000	-	-	
5	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Indah RW. 005, 007, 010 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.0457/UPPSU/ Perkim-3/2024	26 Agustus 2024	600/BASTHP/0457.UP PSU/Dperkim/2024	10 Februari 2025	CV.Putra Darma Intan Perkasa	-			562.630.000	562.630.000	-	-	
6	Pembangunan Mesjid di Kab Tangerang Lokasi Desa Merak Kec Sukamulya Kab Tangerang	600/SPK.02.BP/UPPSU /Perkim-3/2024	12 September 2024	600/BASTHP- 2/PSU/PRKMN/DPERK IM/2024	21 Januari 2025	CV. Bogan	-			828.140.000	828.140.000	-	-	
7	Pembangunan Mesjid di Kab Serang Lokasi Desa Pamarayan Kec Pamarayan Kab Serang	600/SPK.03BP/UPPSU/ Perkim-3/2024	12 September 2024	600/BASTHP- 3/PSU/PRKMN/DPERK IM/2024	21 Januari 2025	CV. Impala Jaya Perkasa	-			691.600.000	691.600.000	-	-	
8	Pembangunan Mesjid dan Landscape Lokasi Kel Tinggar Kec Curug Kota Serang	600/SPK.01.BP/UPPSU /Perkim-3/2024	02 September 2024	600/BASTHP- 1/PSU/PRKMN/DPERK IM/2024	06 Januari 2025	CV. Zulfa Bintang Pratama	-			459.190.000	459.190.000	-	-	
9	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 1	600/SP.233/P2TP/PER KIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	PT. Berkah Teknis Konsultan	-			162.931.000	162.931.000	-	-	
10	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 2	600/SP.234/P2TP/PER KIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	CV. Ratu Cipta Management	-			162.097.000	162.097.000	-	-	
11	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 3	600/SP.235/P2TP/PER KIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	CV. Ratu Cipta Management	-			218.815.000	218.815.000	-	-	
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	600/SPK.1509.UPPSU/ DPerkim-3/2025					189.170.000			-	-	(945.850)	188.224.150	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	600/SPK.1351.UPPSU/ DPerkim-3/2025					849.792.244	31/12/2025	959.4/01728 9/LS/BUD/ 2025.	-	752.528.000	-	97.264.244	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
14	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	000.13/012.14/Perkim-Bid.Perum/2025					299.640.000			-	-	-	299.640.000	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
15	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	000.13/012.16/Perkim-Bid.Perum/2025					45.165.000			-	-	-	45.165.000	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
	JUMLAH						1.383.767.244			4.019.983.000	4.772.511.000	(945.850)	630.293.394	

UTANG BELANJA BARANG PAKAI HABIS-MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO 2024-AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1.840.000	-	1.840.000	
JUMLAH		-	1.840.000	-	1.840.000	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI UTANG BELANJA (Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		PEMBAYARAN KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
I. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds.Cemplang Kec.Ciomas)	CV. Wijaya Karsa	398.556.000,00	85,00%	324.105.739,00	81,32%	74.450.261,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	CV. Dwi Perkasa	398.337.800,00	91,00%	346.656.805,00	87,03%	51.680.995,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH I									126.131.256	
II. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain										
1	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Pasirputeuy - Cijahe	CV. Habib Ridho	4.432.451.000,00	41,75%	2.532.580.775,00	57,14%	1.899.870.225,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH II									1.899.870.225	
III. Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds.Cemplang Kec.Ciomas)	CV. Haza Multi Inovasi	42.920.000,00	91,00%	38.628.000,00	90,00%	4.292.000,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	CV. Balabeja Kencana	42.933.000,00	91,00%	38.639.700,00	90,00%	4.293.300,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
JUMLAH III									8.585.300	
IV. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Utama)	CV. Banten Putra Perkasa	3.687.378.100,00	98,00%	3.431.105.322,00	93,05%	256.272.778,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap 1	CV. Pratama Karya	9.176.705.000,00	91,00%	7.823.241.012,00	85,25%	1.353.463.988,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
3	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten	PT. Zhafira Artha Konsulindo	128.958.000,00	91,00%	122.510.100,00	95,00%	6.447.900,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		PEMBAYARAN KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
4	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Tk Adiyaksa Kejaksaan Tinggi Banten	CV. Adipura Legon Persada	49.615.000,00	91,00%	47.134.250,00	95,00%	2.480.750,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
5	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Binda Provinsi Banten Tahap I	PT. Bighi Konsultan Prakasa	128.566.000,00	91,00%	109.281.100,00	85,00%	19.284.900,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
JUMLAH IV									1.637.950.316	
V. Utang Belanja Modal (Pengadaan Aset Tetap)										
1	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dl. Cibuungeun	CV. Putra Ciceri	8.419.007.700,00	98,00%	7.838.096.169,00	93,10%	580.911.531,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilemer	PT. Khodijah Putri Jaya Perkasa	7.378.915.860,00	65,00%	4.556.480.544,00	61,75%	2.822.435.316,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
3	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisata	CV. Cipta Nayra	8.432.312.320,00	90,00%	7.209.627.034,00	85,50%	1.222.685.286,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
4	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisangu Atas	CV. Mahatama Karya	7.621.699.300,00	80,00%	5.792.491.468,00	76,00%	1.829.207.832,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
5	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak	CV. Stara Maju Perkasa	7.762.700.500,00	90,00%	6.637.108.927,00	85,50%	1.125.591.573,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH V									7.580.831.538	
JUMLAH I+II+III+IV+V									11.253.368.634,51	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI KEWAJIBAN (RETENSI 5%)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
I. Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain					89.690.869.000,00		84.899.065.949,00		4.484.543.450	
1	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Gobang - Mayak Akses SMKN 1 Curugbitung Desa Ciburuy - Desa Mayak. Kab. Lebak (IJKD)	CV. Mitra Perkasa Mandiri	9.058.826.000,00	100,00%	8.600.001.700,00	94,94%	452.941.300	Pembayaran Retensi 5%
2	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Mejau - Mekarwangi. Kab. Pandeglang (IJKD)	CV. Cakra Dua Bersama	3.846.430.000,00	100,00%	3.605.365.500,00	93,73%	192.321.500,00	Pembayaran Retensi 5%
3	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Sodong - Kadubera Kabupaten Pandeglang (IJKD)	CV. Vir Maju Bersama	3.896.448.000,00	100,00%	3.666.714.600,00	94,10%	194.822.400,00	Pembayaran Retensi 5%
4	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Sukanagara - Sukajaya Kabupaten Serang (IJKD)	CV. Abu Said Contractor	4.326.787.000,00	100,00%	4.101.199.650,00	94,79%	216.339.350,00	Pembayaran Retensi 5%
5	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Surianeun - Pasir Gadung Desa Cimoyan Kabupaten Pandeglang (IJKD)	CV. Masa Agung Jaya	9.377.518.000,00	100,00%	8.900.232.099,00	94,91%	468.875.900,00	Pembayaran Retensi 5%
6	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Warung Jaud - Kasemen Kota Serang (IJKD)	CV. Arya Putra Perkasa	2.848.088.000,00	100,00%	2.702.413.600,00	94,89%	142.404.400,00	Pembayaran Retensi 5%
7	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Desa Sindang Asih - Desa Badak Anom - Desa Daon Kecamatan Sindangjaya	CV. Putra Utama Bajabir	5.732.815.000,00	100,00%	5.441.114.250,00	94,91%	286.640.750,00	Pembayaran Retensi 5%
8	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cadasari - Kaduela	CV. Delta Maputra	7.721.276.000,00	100,00%	7.262.188.600,00	94,05%	386.063.800,00	Pembayaran Retensi 5%
9	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cikeusik - Pasir Tuhur	CV. Putra Cemerlang Utama	3.839.316.000,00	100,00%	3.641.528.200,00	94,85%	191.965.800,00	Pembayaran Retensi 5%
10	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cimaung - Sukarame	CV. Putra Dua Mandiri	7.199.576.000,00	100,00%	6.824.321.200,00	94,79%	359.978.800,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
11	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Kedomas Banjar	CV. Wirama Persada Grup	7.031.752.000,00	100,00%	6.643.092.400,00	94,47%	351.587.600,00	Pembayaran Retensi 5%
12	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Kemuning - Malanggah	CV. Putra Utama Bajabir	2.329.529.000,00	100,00%	2.209.181.550,00	94,83%	116.476.450,00	Pembayaran Retensi 5%
13	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Lambang Sari (Wadas Lambangsari)	CV. Nurbuat	3.043.959.000,00	100,00%	2.887.708.050,00	94,87%	152.197.950,00	Pembayaran Retensi 5%
14	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Pakupatan - Bendung	CV. Kongsi Baru	3.834.789.000,00	100,00%	3.595.724.550,00	93,77%	191.739.450,00	Pembayaran Retensi 5%
15	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Sukadame - Kubangkondang	CV. Bogan	4.376.965.000,00	100,00%	4.152.824.750,00	94,88%	218.848.250,00	Pembayaran Retensi 5%
16	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Tanjungjaya	CV. Salam Mahaka Karya	2.954.971.000,00	100,00%	2.807.222.450,00	95,00%	147.748.550,00	Pembayaran Retensi 5%
17	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Pintas Kampung Cibangkong RT. 003/003 dengan Kampung Cibaregbeg RT. 002/003	CV. Arfiristi Berkah	3.209.834.000,00	100,00%	3.049.342.300,00	95,00%	160.491.700,00	Pembayaran Retensi 5%
18	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Usaha Tani Kec Wanasalam Lebak (Binuangan Bunut)	CV. Masa Agung Jaya	5.061.990.000,00	100,00%	4.808.890.500,00	95,00%	253.099.500,00	Pembayaran Retensi 5%
II. Belanja Pemeliharaan					1.741.015.500,00		1.653.964.725,00		87.050.775,00	
19	CIPTA KARYA	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan Kantor Gedung Ex Bliki Serpong	CV. Putra Utama Bajabir	1.741.015.500,00	100,00%	1.653.964.725,00	95,00%	87.050.775,00	Pembayaran Retensi 5%
III. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat					18.832.641.600,00		17.791.366.220,00		941.632.080,00	
20	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Mess Pegawai pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten	PT. Graha Kencana Damai	13.085.304.500,00	100,00%	12.331.395.975,00	94,24%	654.265.225,00	Pembayaran Retensi 5%
21	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dan Pendopo Kejaksaan Tinggi Banten)	PT. Aries Total Mandiri	2.834.255.100,00	100,00%	2.692.542.345,00	95,00%	141.712.755,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
22	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (TK Adiyaksa)	PT. Sampurna Indo Perkasa	2.664.227.700,00	100,00%	2.531.016.315,00	95,00%	133.211.385,00	Pembayaran Retensi 5%
24	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Pembangunan Kanopi Parkir Kejati)	CV. Sinar Putra Perkasa	248.854.300,00	100,00%	236.411.585,00	95,00%	12.442.715,00	Pembayaran Retensi 5%
IV. Utang Belanja Modal (Pengadaan Aset Tetap)					124.874.032.000,00		118.025.698.301,00		7.474.368.700,00	
23	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penataan Pagar dan Parkir BIS	CV. Putra Ciceri	14.296.016.900,00	100,00%	13.581.216.055,00	95,00%	714.800.845,00	Pembayaran Retensi 5%
25	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe Raya	CV. Tetra Jaya Mandiri	7.272.757.000,00	100,00%	6.904.119.151,00	94,93%	363.637.850,00	Pembayaran Retensi 5%
26	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Bayah - Batas Jabar	CV. Putra Cemerlang Utama	9.699.452.000,00	100,00%	9.214.479.400,00	95,00%	484.972.600,00	Pembayaran Retensi 5%
29	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Picung	CV. Trisula Karya Putra	2.588.639.000,00	100,00%	2.420.546.050,00	93,51%	129.431.950,00	Pembayaran Retensi 5%
30	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Maja - Citeras	CV. Naga Hitam Kusuma	5.889.192.000,00	100,00%	5.593.215.400,00	94,97%	294.459.600,00	Pembayaran Retensi 5%
31	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Teluknaga - Dadap	CV. Bina Cipta Kreasi	7.625.823.000,00	100,00%	7.239.835.850,00	94,94%	381.291.150,00	Pembayaran Retensi 5%
32	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Tigaraksa - Maja	CV. Hanan Putra Pratama	7.761.631.000,00	100,00%	7.373.549.450,00	95,00%	388.081.550,00	Pembayaran Retensi 5%
33	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Tigaraksa - Cisoka	CV. Jala Bangun Indonesia	2.842.914.000,00	100,00%	2.664.839.300,00	93,74%	142.145.700,00	Pembayaran Retensi 5%
34	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	CV. Karya Pelita Abadi	7.513.901.000,00	100,00%	7.138.205.950,00	95,00%	375.695.050,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
35	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Gn. Sari - Mancak - Anyer	CV. Karya Pelita Abadi	9.399.553.000,00	100,00%	8.929.575.350,00	95,00%	469.977.650,00	Pembayaran Retensi 5%
36	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari	CV. Galih Cantigi	9.020.969.000,00	100,00%	8.569.920.550,00	95,00%	451.048.450,00	Pembayaran Retensi 5%
37	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Cimoyan Ruas Jalan Picung - Munjul	CV. Cahaya Surya Imani	6.076.538.000,00	100,00%	5.522.655.100,00	90,88%	303.826.900,00	Pembayaran Retensi 5%
38	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Curug Ciung Ruas Jalan Munjul - Cikeusik	CV. Sumur Ranje	4.274.712.000,00	100,00%	4.035.233.400,00	94,40%	213.735.600,00	Pembayaran Retensi 5%
39	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Pelawad 2 Kota Tangerang	CV. Mulia Arinda	6.916.064.000,00	100,00%	6.499.170.800,00	93,97%	345.803.200,00	Pembayaran Retensi 5%
40	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Speelwijk Ruas Jalan Terate - Banten Lama	CV. Sinar Putra Perkasa	4.112.752.000,00	100,00%	3.815.791.400,00	92,78%	205.637.600,00	Pembayaran Retensi 5%
41	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikoncang	CV. Pandeglang Raya Putri	7.491.280.100,00	100,00%	7.085.278.395,00	94,58%	374.564.005,00	Pembayaran Retensi 5%
42	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilampe	CV. Arga Arta Meridien	4.714.918.100,00	100,00%	4.464.542.395,00	94,69%	235.745.905,00	Pembayaran Retensi 5%
43	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Kali Angke	CV. Wijaya Karsa	3.585.634.000,00	100,00%	3.394.515.300,00	94,67%	179.281.700,00	Pembayaran Retensi 5%
44	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Zaitun	CV. Sejahtera Bersama	3.791.285.900,00	100,00%	3.579.009.005,00	94,40%	189.564.295,00	Pembayaran Retensi 5%
45	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Cipanas - Ciparay	PT. Daya Manunggal Kontraktor	14.940.434.000,00	100,00%	14.110.516.300,00	94,45%	747.021.700,00	Pembayaran Retensi 5%
46	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay	CV. Al-Patir	9.672.908.000,00	100,00%	9.177.999.600,00	94,88%	483.645.400,00	Pembayaran Retensi 5%
JUMLAH									12.987.595.005,00	

UTANG BELANJA JASA KANTOR - JASA TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	RSUD MALINGPING	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	948.943.985	-	-	-	948.943.985	Utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD Bulan November 2023 dan Utang Jasa Pelayanan ke dr. Ahmad Bahrudin TA. 2023
		Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	1.083.333.333	-	1.083.333.333	Utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD Bulan Desember 2025
JUMLAH			948.943.985	-	1.083.333.333	-	2.032.277.318	

UTANG BELANJA JASA KANTOR - JASA TENAGA AHLI, JASA KONSULTASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	26.901.600	-	-	26.901.600	-	
JUMLAH			26.901.600	-	-	26.901.600	-	

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - BELANJA KONTRIBUSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI KEPADA BPJS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO 2024-AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7
1	DINAS KESEHATAN	-	270.874.300	-	270.874.300	
JUMLAH		-	270.874.300	-	270.874.300	

UTANG BELANJA JASA KANTOR
(Listrik, Air, Telepon, Internet)
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	SALDO KEWAJIBAN 2025										
		UTANG JASA TENAGA KESEHATAN	UTANG JASA TENAGA KEBERSI- HAN	UTANG JASA PENGOLAHAN SAMPAH	TELPON	AIR	LISTRIK	LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR / MAJALAH	UTANG KAWAT / FAKSIMILI / INTERNET / TV BERLANGGAN AN	UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI	JAMINAN / ASURANSI- IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3	JUMLAH
1		3	3	3	5	4	3	7	6			8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	148.500	72.737.924	-	2.532.000	-	-	75.418.424
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	3.341.322	-	126.805.665,00	-	1.972.200	-	270.874.300	402.993.487
3	RSUD Malingping	-	-	-	238.650	-	125.199.340	-	-	-	-	125.437.990
4	RSUD Banten	-	-	-	1.218.734	25.122.695	441.816.708	-	-	-	-	468.158.137
5	RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan	-	5.208.000	32.667.300	610.500	5.249.320	105.476.916	-	55.573.260	-	-	204.785.296
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	9.803.960	70.229.608	-	-	-	-	80.033.568
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	615.974.599	-	-	8.585.300	-	624.559.899
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	41.631.504	-	-	-	-	41.631.504
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	28.873.740	-	-	-	-	28.873.740
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	36.568.826	-	-	-	-	36.568.826
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	36.714.435	-	1.539.850	-	-	38.254.285
13	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	627.552	-	53.643.856	-	3.592.540	-	-	57.863.948
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	32.255.508	-	-	-	-	32.255.508
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	90.798	-	14.167.027	-	-	-	-	14.257.825
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	33.543.368	-	-	-	-	33.543.368
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	19.596.436	-	-	-	-	19.596.436
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	1.398.600	-	315.664.637	-	299.700	-	-	317.362.937
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	36.685.074	-	-	-	-	36.685.074
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	32.489.624	-	-	-	-	32.489.624
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	17.177.580	2.950.000	-	-	-	20.127.580
22	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga	-	-	-	1.959.150	-	39.054.044	-	1.864.350	-	-	42.877.544
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	40.103.564	-	-	-	-	40.103.564
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	141.989	2.169.445	128.208.063	-	4.087.030	-	-	134.606.527
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	27.164.012	-	-	-	-	27.164.012
26	Dinas Pertanian	-	-	-	6.071.304	-	79.824.608	-	-	-	-	85.895.912
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	12.066.567	-	-	-	-	12.066.567

No	SKPD	SALDO KEWAJIBAN 2025										
		UTANG JASA TENAGA KESEHATAN	UTANG JASA TENAGA KEBERSI- HAN	UTANG JASA PENGOLAHAN SAMPAH	TELPON	AIR	LISTRIK	LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR / MAJALAH	UTANG KAWAT / FAKSIMILI / INTERNET / TV BERLANGGAN AN	UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI	JAMINAN / ASURANSI- IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPJ DAN BP KELAS 3	JUMLAH
1		3	3	3	5	4	3	7	6			8
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	5.143.840	-	53.056.214	-	-	-	-	58.200.054
29	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	194.909.902	-	-	-	-	194.909.902
30	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	286.927.051	-	18.017.200	-	-	304.944.251
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Penghubung	-	-	-	2.343.321	-	20.984.452	-	-	-	-	23.327.773
38	Inspektorat Provinsi	-	-	-	58.941	-	35.477.253	-	-	-	-	35.536.194
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	27.889.191	-	-	-	-	27.889.191
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.949.724	412.217.130	-	37.161.505	-	-	453.328.359
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	37.859.314	-	-	-	-	37.859.314
42	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	58.941	-	33.328.548	-	-	-	-	33.387.489
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	14.747.446	60.678.666	-	-	-	-	75.426.112
JUMLAH		-	5.208.000	32.667.300	23.303.642	61.191.090	3.747.000.954	2.950.000	126.639.635	8.585.300	270.874.300	4.278.420.221

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - BLUD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2023-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	RSUD BANTEN	Biaya grabfood & grabmart 16-12-2024 s.d 30-12-2024 (PT. Grab Teknologi Indonesia)	11.323.199	-	-	11.323.199	-	
2	RSUD BANTEN	Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk ke Biomed Periode November (Biomed)	10.400.000	-	-	10.400.000	-	
3	RSUD BANTEN	Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk ke Biomed Periode Desember (Biomed)	13.000.000	-	-	13.000.000	-	
4	RSUD BANTEN	BHP Hemodialisa set BPJS Lengkap non AV Fistula (PT. Sinar Roda Utama)	478.410.000	-	-	478.410.000	-	
5	RSUD BANTEN	Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Droping Bulan Desember 2024 (PMI Kabupaten Serang)	282.420.000	-	-	282.420.000	-	
6	RSUD BANTEN	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	2.999.117.185	-	2.999.117.185	
6	RSUD CILOGRANG	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	375.651.474	-	375.651.474	
7	RSUD MALINGPING	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	2.032.277.318	-	2.032.277.318	
8	RSUD BANTEN	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	1.508.117.741	-	1.508.117.741	
JUMLAH			795.553.199	-	6.915.163.718	795.553.199	6.915.163.718	

UTANG PENGADAAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 30.8 Neraca

No	Nama SKPD/KEGIATAN	Nomor Kontrak	Nama Rekanan	Keterangan	Nilai Kontrak/PHO	Tanggal pembayaran	No SP2D	Pembayaran/ Koreksi 2024	Utang 2024	Pembayaran 2025	Koreksi	Penambahan 2025	Utang 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6-11	14 = 10+12+13	15
1. RSUD BANTEN														
	Peningkatan Pelayanan BLUD - Pembangunan Bunker Radioterapi		PT. Lambok Ulina	033/OE5-P2407-9919735- E- kat/SPK/RSUB/VIII/2024 TANGGAL 1 AGUSTUS 2024	13.074.309.929			12.943.566.829,00	130.743.100,00	130.743.100	-	-	-	
						04 September 2024	0812/S-PD- LS.01/BLUD/RSUB/IX/2024	3.268.577.482,00	-	-				
						15 November 2024	1237/S-PD-LS.03/BLUD/RSUB/XI /2024	3.268.577.482,00	-	-				
						31 Desember 2024	1536/S-PD-LS.01/BLUD/RSUB/XI I/2024	6.406.411.865,00		-				
	JUMLAH 1				13.074.309.929			25.887.133.658	130.743.100	130.743.100	-	-	-	
2. DINAS SOSIAL														
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				385.843.100			90.869.538	294.973.562	294.973.562	-	-	-	
	Pembangunan Konstruksi Kanopi Parkiran Mobil	SPK No: 027/39428127/SPK/DI NSOS/2023	CV. ALFIN JAYA ABADI	-	187.533.481	-	-	29.720.847,96	157.812.633,04	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Lingkungan Paving Block	SPK No: 027/42125209/SPK/DI NSOS/2023	CV. ADRIAN RIZKY ABADI	-	198.309.619	-	-	61.148.690,32	137.160.928,68	-	-	-	-	
	JUMLAH 2				385.843.100			90.869.538	294.973.562	294.973.562	-	-	-	
3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 16 Kab Tangerang				7.390.021.235	-	36.00/04.0/000849/LS/1.01.2.22 .00.02.0000/PR/10/2025	-	-	2.217.006.371	- 580.116.667	5.173.014.864	4.592.898.197	Progres Fisik 92,15%
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 12 Kota Tangerang				8.844.467.342	-	36.00/04.0/000873/LS/1.01.2.22 .00.02.0000/PR/10/2025	-	-	2.653.340.203	- 1.111.749.545	6.191.127.139	5.079.377.594	Progres Fisik 87,43%
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros				5.858.757.600	-	36.00/04.0/000846/LS/1.01.2.22 .00.02.0000/PR/10/2025	-	-	1.757.627.280	- 547.793.836	4.101.130.320	3.553.336.484	Progres Fisik 90,65%
4	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Panggarangan				881.964.927	-	-	-	-	-	- 64.912.619	881.964.927	817.052.308	Progres Fisik 92,64%
5	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam				1.559.971.239	-	36.00/04.0/000851/LS/1.01.2.22 .00.02.0000/PR/10/2025	-	-	467.991.372	- 196.244.382	1.091.979.867	895.735.485	Progres Fisik 87,42%
	JUMLAH 3				24.535.182.343			-	-	7.095.965.226	- 2.500.817.049	17.439.217.117	14.938.400.068	
	JUMLAH (1+2+3)				37.995.335.372			25.978.003.196	425.716.662	7.521.681.888	- 2.500.817.048,64	17.439.217.117	14.938.400.068	

UTANG BELANJA TRANSFER (BAGI HASIL PAJAK)
KE KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 30.9 Neraca

No	Kabupaten / Kota	Jenis Pajak Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah (yang dibagi hasilkan)	Perhitungan Bagi Hasil	Hutang BHP 2024	Jumlah Realisasi 2025			Hutang 2025		
						Pembayaran Hutang BHP 2024	Realisasi BHP Tahun 2025	Total	Hutang 2024	Hutang 2025	Total Hutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-7	11=5-8	12 = 10+11
1	KABUPATEN LEBAK	PKB	949.662.600	284.898.780	2.244.678.840	2.244.678.840	284.898.780	2.529.577.620	-	-	-
		BBNKB	522.032.000	156.609.600	1.787.989.500	1.787.989.500	156.609.600	1.944.599.100	-	-	-
		AP	1.690.987.300	845.493.650	64.576.850	64.576.850	750.965.400	815.542.250	-	94.528.250	94.528.250
		PBBKB	64.032.380.608	68.487.667.930	-	-	62.393.874.074	62.393.874.074	-	6.093.793.856	6.093.793.856
		PAJAK ROKOK	119.437.529.346	83.981.589.354	-	-	71.262.073.117	71.262.073.117	-	12.719.516.237	12.719.516.237
		JUMLAH	186.632.591.854	153.756.259.314	4.097.245.190	4.097.245.190	134.848.420.971	138.945.666.161	-	18.907.838.343	18.907.838.343
2	KABUPATEN PANDEGLANG	PKB	857.011.000	257.103.300	1.967.653.260	1.967.653.260	257.103.300	2.224.756.560	-	-	-
		BBNKB	368.224.000	110.467.200	1.411.518.900	1.411.518.900	110.467.200	1.521.986.100	-	-	-
		AP	812.751.600	406.375.800	498.350	498.350	375.536.950	376.035.300	-	30.838.850	30.838.850
		PBBKB	55.942.436.845	60.671.933.610	-	-	55.270.508.121	55.270.508.121	-	5.401.425.489	5.401.425.489
		PAJAK ROKOK	96.818.278.041	63.527.915.671	-	-	51.336.383.423	51.336.383.423	-	12.191.532.248	12.191.532.248
		JUMLAH	154.798.701.486	124.973.795.581	3.379.670.510	3.379.670.510	107.349.998.994	110.729.669.504	-	17.623.796.587	17.623.796.587
3	KABUPATEN SERANG	PKB	1.602.444.300	480.733.290	4.008.475.500	4.008.475.500	480.733.290	4.489.208.790	-	-	-
		BBNKB	628.772.500	188.631.750	1.907.563.050	1.907.563.050	188.631.750	2.096.194.800	-	-	-
		AP	16.012.897.800	8.006.448.900	524.864.950	524.864.950	5.996.650.800	6.521.515.750	-	2.009.798.100	2.009.798.100
		PBBKB	89.798.831.629	90.127.095.115	3.613.746.023	3.613.746.023	66.243.108.017	69.856.854.040	-	23.883.987.098	23.883.987.098
		PAJAK ROKOK	135.261.035.335	93.796.169.018	-	-	79.584.009.164	79.584.009.164	-	14.212.159.854	14.212.159.854
		JUMLAH	243.303.981.564	192.599.078.073	10.054.649.523	10.054.649.523	152.493.133.021	162.547.782.544	-	40.105.945.052	40.105.945.052
4	KABUPATEN TANGERANG	PKB	8.304.307.000	2.491.292.100	94.453.741.460	94.453.741.460	2.491.292.100	96.945.033.560	-	-	-
		BBNKB	6.289.187.000	1.886.756.100	60.647.038.470	60.647.038.470	1.886.756.100	62.533.794.570	-	-	-
		AP	7.899.134.800	3.949.567.400	1.288.641.600	1.288.641.600	3.340.315.500	4.628.957.100	-	609.251.900	609.251.900
		PBBKB	346.479.115.452	220.876.343.091	75.813.337.324	75.813.337.324	164.678.421.180	240.491.758.504	-	56.197.921.911	56.197.921.911
		PAJAK ROKOK	236.974.791.908	156.884.448.412	-	-	133.058.402.950	133.058.402.950	-	23.826.045.462	23.826.045.462
		JUMLAH	605.946.536.160	386.088.407.103	232.202.758.854	232.202.758.854	305.455.187.830	537.657.946.684	-	80.633.219.273	80.633.219.273
5	KOTA CILEGON	PKB	1.428.948.700	428.684.610	10.079.731.830	10.079.731.830	428.684.610	10.508.416.440	-	-	-
		BBNKB	330.141.000	99.042.300	6.444.532.650	6.444.532.650	99.042.300	6.543.574.950	-	-	-
		AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PBBKB	125.974.608.401	63.969.370.431	19.397.029.256	19.397.029.256	48.369.968.487	67.766.997.743	-	15.599.401.944	15.599.401.944
		PAJAK ROKOK	55.310.480.512	44.206.584.381	-	-	37.527.807.181	37.527.807.181	-	6.678.777.200	6.678.777.200
		JUMLAH	183.044.178.613	108.703.681.722	35.921.293.736	35.921.293.736	86.425.502.578	122.346.796.314	-	22.278.179.144	22.278.179.144

No	Kabupaten / Kota	Jenis Pajak Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah (yang dibagi hasilkan)	Perhitungan Bagi Hasil	Hutang BHP 2024	Jumlah Realisasi 2025			Hutang 2025		
						Pembayaran Hutang BHP 2024	Realisasi BHP Tahun 2025	Total	Hutang 2024	Hutang 2025	Total Hutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-7	11=5-8	12 = 10+11
6	KOTA SERANG	PKB	1.501.868.700	450.560.610	6.456.606.240	6.456.606.240	450.560.610	6.907.166.850	-	-	-
		BBNKB	514.057.500	154.217.250	4.815.018.150	4.815.018.150	154.217.250	4.969.235.400	-	-	-
		AP	1.593.795.400	796.897.700	66.669.400	66.669.400	726.239.300	792.908.700	-	70.658.400	70.658.400
		PBBKB	91.303.640.799	64.911.548.254	5.064.636.674	5.064.636.674	59.322.919.816	64.387.556.490	-	5.588.628.438	5.588.628.438
		PAJAK ROKOK	72.329.654.359	54.762.780.818	-	-	46.470.733.026	46.470.733.026	-	8.292.047.792	8.292.047.792
		JUMLAH	167.243.016.758	121.076.004.632	16.402.930.464	16.402.930.464	107.124.670.002	123.527.600.466	-	13.951.334.630	13.951.334.630
7	KOTA TANGERANG	PKB	8.737.951.700	2.621.385.510	102.203.078.896	102.203.078.896	2.621.385.510	104.824.464.406	-	-	-
		BBNKB	3.334.254.000	1.000.276.200	61.110.484.350	61.110.484.350	1.000.276.200	62.110.760.550	-	-	-
		AP	12.468.806.500	6.234.403.250	1.511.885.650	1.511.885.650	4.644.604.100	6.156.489.750	-	1.589.799.150	1.589.799.150
		PBBKB	286.209.111.338	185.982.278.259	55.281.912.582	55.281.912.582	139.139.107.764	194.421.020.346	-	46.843.170.495	46.843.170.495
		PAJAK ROKOK	145.094.204.626	99.895.223.388	-	-	84.815.846.214	84.815.846.214	-	15.079.377.174	15.079.377.174
		JUMLAH	455.844.328.164	295.733.566.607	220.107.361.478	220.107.361.478	232.221.219.788	452.328.581.266	-	63.512.346.819	63.512.346.819
8	KOTA TANGERANG SELATAN	PKB	8.497.901.900	2.549.370.570	89.050.624.650	89.050.624.650	2.549.370.570	91.599.995.220	-	-	-
		BBNKB	4.373.576.300	1.312.072.890	55.239.485.250	55.239.485.250	1.312.072.890	56.551.558.140	-	-	-
		AP	6.967.979.600	3.483.989.800	801.412.950	801.412.950	2.496.992.200	3.298.405.150	-	986.997.600	986.997.600
		PBBKB	235.643.661.685	151.742.414.039	42.729.312.862	42.729.312.862	113.395.424.086	156.124.736.948	-	38.346.989.953	38.346.989.953
		PAJAK ROKOK	115.008.727.084	81.234.610.737	-	-	68.951.623.151	68.951.623.151	-	12.282.987.586	12.282.987.586
		JUMLAH	370.491.846.569	240.322.458.036	187.820.835.712	187.820.835.712	188.705.482.897	376.526.318.609	-	51.616.975.139	51.616.975.139
	JUMLAH PKB		31.880.095.900	9.564.028.770	310.464.590.676	310.464.590.676	9.564.028.770	320.028.619.446	-	-	-
	JUMLAH BBNKB		16.360.244.300	4.908.073.290	193.363.630.320	193.363.630.320	4.908.073.290	198.271.703.610	-	-	-
	JUMLAH AP		47.446.353.000	23.723.176.500	4.258.549.750	4.258.549.750	18.331.304.250	22.589.854.000	-	5.391.872.250	5.391.872.250
	JUMLAH PBBKB		1.295.383.786.757	906.768.650.729	201.899.974.721	201.899.974.721	708.813.331.545	910.713.306.266	-	197.955.319.184	197.955.319.184
	JUMLAH PAJAK ROKOK		976.234.701.211	678.289.321.779	-	-	573.006.878.226	573.006.878.226	-	105.282.443.553	105.282.443.553
	JUMLAH		2.367.305.181.168	1.623.253.251.068	709.986.745.467	709.986.745.467	1.314.623.616.081	2.024.610.361.548	-	308.629.634.987	308.629.634.987

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-Audited	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8
1			NIHIL				
JUMLAH			-	-	-	-	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		5.720.173.537.866	8.552.409.195.856
4	Penerimaan Retribusi Daerah		326.976.698.150	238.989.988.258
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		51.598.879.729	51.909.734.739
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		235.632.368.589	180.454.955.943
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		986.117.518.100	988.546.837.000
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.057.839.000	5.887.789.000
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		906.874.000	1.146.248.432.968
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		1.146.642.838.212	1.212.441.264.199
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		1.265.613.302.359	-
12	Penerimaan Insentif Fiskal		6.489.293.000	19.619.982.000
13	Penerimaan Hibah		6.383.604.000	6.430.560.000
14	Penerimaan Lainnya		-	-
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)		9.747.592.753.005	12.402.938.739.963
16	Arus Keluar Kas	5.5.2		
17	Pembayaran Pegawai		2.646.806.177.534	2.387.855.754.242
18	Pembayaran Barang dan Jasa		3.612.190.835.012	3.762.827.581.502
19	Pembayaran Bunga		-	1.029.672.328
20	Pembayaran Beban Hibah		513.376.712.647	977.158.618.012
21	Pembayaran Beban Bantuan Sosial		37.691.434.638	42.988.034.478
22	Pembayaran Tak Terduga		-	75.000.000
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		2.024.610.361.548	3.386.606.564.438
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		141.204.430.658	218.723.928.072
25	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 24)		8.975.879.952.037	10.777.265.153.072
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 25)		771.712.800.969	1.625.673.586.891
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.3		
28	Arus Masuk Kas			
29	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Penjualan Aset Lainnya		2.063.474.900	1.064.385.900
31	Pencairan Dana Cadangan		-	-
32	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 31)		2.063.474.900	1.064.385.900
33	Arus Keluar Kas			
34	Perolehan Tanah		117.739.329.059	46.092.332.880
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		360.377.599.640	337.794.670.558
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		205.562.940.358	171.787.754.271
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		299.055.992.016	536.407.648.367
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		48.066.730.408	35.525.505.663
39	Perolehan Aset Lainnya		4.257.802.773	3.021.846.769
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 42)		1.035.060.394.254	1.130.629.758.508
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32 - 43)		(1.032.996.919.354)	(1.129.565.372.608)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.4		
45	Arus Masuk Kas			
46	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		-	-
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		138.497.733.036	138.497.733.036
50	Jumlah Arus Keluar Kas (50)		138.497.733.036	138.497.733.036
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 51)		(138.497.733.036)	(138.497.733.036)
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		534.105.593.385	560.104.246.397
55	Koreksi Silpa		-	-
56	Penerimaan Transito		-	47.270.000
57	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 57)		534.105.593.385	560.151.516.397
58	Arus Keluar Kas			
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		534.105.593.385	560.104.246.397
60	Koreksi Silpa		-	-
61	Pengeluaran Transito		5.904.119.251	593.448.591
62	Jumlah Arus Keluar Kas (60 s/d 63)		540.009.712.636	560.697.694.988
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58 - 64)		(5.904.119.251)	(546.178.591)
64	Kenaikan/Penurunan Kas (26+44+52+65)		(405.685.970.673)	357.064.302.655
65	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		444.532.811.411	87.468.508.756
66	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di B. Pengeluaran, Kas BOS, Kas di BLUD, dan Kas Lainnya (66+67)		38.846.840.739	444.532.811.411
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
68	Saldo Akhir Kas (68+69)		38.846.840.739	444.532.811.411

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025 6.2. Mandatory Spending 6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan 6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan 6.5. Hubungan antara Kewajiban Jangka Pendek, Silpa TA 2025 dan Penyediaan Dukungan Dana untuk Pembayaran Kewajiban Pada APBD TA 2026
BAB VII	PENUTUP

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Provinsi Banten TA 2025 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 disajikan dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

- Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan

- f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- r. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

- v. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- w. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dengan nomenklatur struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45/46/47/48 dan 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk:

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
4. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe A sejumlah 12 (dua belas) Perangkat Daerah;
5. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe B sejumlah 9 (sembilan) Perangkat Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tipe A;
7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah;
8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 4 (empat) Perangkat Daerah;
9. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Provinsi Banten dipimpin oleh Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2025 sampai dengan sekarang.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten pada periode bulan September 2024 sampai dengan Tahun 2029 diketuai oleh H. Fahmi Hakim, S.E. dengan empat wakilnya sebagai berikut:

1. Yudi Budi Wibowo
2. H. Imron Rosadi, Lc.
3. Eko Susilo, S.E.
4. Barhum HS, S.IP.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi
- 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
- 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025
- 6.2. Mandatory Spending
- 6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.5. Hubungan antara Kewajiban Jangka Pendek, Silpa TA 2025 dan Penyediaan Dukungan Dana untuk Pembayaran Kewajiban Pada APBD TA 2026

BAB VII. PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan penjabaran sasaran dan program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah serta program kewilayahan. Penjabaran tersebut disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang memprioritaskan 4 (empat) upaya di antaranya:

- 1) Kolaborasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan ketenteraman masyarakat dengan berbagai stakeholders;
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;
- 3) Mendorong kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip green ecosystem, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan; dan
- 4) Reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan *Good and Clean Governance* serta Layanan Berbasis *E-government*.

Adapun tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu *Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing*.

Pencapaian target pembangunan menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Indikator makroekonomi digunakan dalam menilai ketercapaian target pembangunan tersebut. Indikator makroekonomi mencakup beberapa aspek seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pencapaian Pembangunan merupakan akumulasi hasil dari interaksi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Penetapan target makro ekonomi Provinsi Banten tahun 2025, juga telah dilakukan sinkronisasi terhadap target makro ekonomi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,20	5,37
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,24	6,63
3	Tingkat Kemiskinan	5,50	5,51
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,00 - 76,50	77,25
5	Indeks Gini	0,344 - 0,365	0,312

Selanjutnya pencapaian kondisi makro ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025 secara rinci, dipaparkan, sebagai berikut.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Banten pada Tahun 2025 Tumbuh 5,37 Persen. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 10/02/36/Th.XX tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan bahwa Perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp74,67 juta. Ekonomi Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,60 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen.

Ekonomi Provinsi Banten Triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,22 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 27,76 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,41 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,6	0,48
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,85	~0
C.	Industri Pengolahan	5,37	1,8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,22	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,4	~0
F.	Konstruksi	5,89	0,61

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	0,61
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,2	0,26
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	0,18
J.	Informasi dan Komunikasi	5,62	0,4
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,72	-0,05
L.	Real Estat	5,94	0,53
M,N.	Jasa Perusahaan	6,51	0,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	0,09
P.	Jasa Pendidikan	7,57	0,22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	0,06
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	5,58	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,37	5,37

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, diolah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan)

Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 telah melaksanakan program peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, magang, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, pelatihan ketenagakerjaan, pemberdayaan industri ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Seiring dengan meningkatnya kompetensi/keterampilan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Berita Resmi Statistik No. 13/02/36/Th. XX, tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 6,48 juta orang, naik 314 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,75 persen, naik sebesar 3,09 persen poin dibanding Agustus 2025. Penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 6,05 juta orang, naik 296,34 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 159,35 ribu orang.

Pada November 2025 penduduk bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,19 juta orang (52,72 persen), turun 2,16 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat setengah pengangguran sebesar 7,35 persen naik sebesar 0,69 persen poin, sementara tingkat pekerja paruh waktu sebesar 17,55 persen turun 0,04 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 6,63 persen, turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–November 2025

KONDISI KETENAGAKERJAAN	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025–Nov 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.441,30	9.539,82	9.567,77	27,95	0,29
Angkatan Kerja	6.213,96	6.168,28	6.482,28	314	5,09
- Bekerja	5.801,25	5.755,93	6.052,26	296,34	5,15
- Pengangguran	412,71	412,36	430,02	17,66	4,28

KONDISI KETENAGAKERJAAN	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025–Nov 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bukan Angkatan Kerja	3.227,34	3.371,54	3.085,49	-286,05	-8,48
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,82	64,66	67,75	3,09	
- Laki-Laki	84,11	81,96	83,87	1,91	
- Perempuan	46,99	46,87	51,18	4,32	

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, diolah

2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan program pembangunan dalam rangka menangani kemiskinan telah dilaksanakan melalui program perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan krisis kesehatan, pengurangan pengangguran, pengamanan persediaan pangan melalui *buffer stock* beras cadangan pangan, dan pengendalian inflasi.

Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menjadi dasar bagi pelaksanaan optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Damanatkan agar menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 11/07/36/Th. XX tanggal 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 760,85 ribu orang, turun 11,9 ribu orang terhadap Maret 2025 dan turun 16,64 ribu orang terhadap September 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 5,35 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 (5,58 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 sebesar 6,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 (5,89 persen). Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan turun sebanyak 12,9 ribu orang (dari 627,88 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 615,02 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,9 ribu orang (dari 144,90 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 145,84 ribu orang pada September 2025).

Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp715,288/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp524,678 (73,35 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp190,610 (26,65 persen). Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.698.039/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2024 – September 2025

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	1	2	3
1	Perkotaan		
	Sep-24	606,52	5,57
	Maret 2025	627,88	5,58
	Sep-25	615,02	5,35
2	Perdesaan		
	Sep-24	170,98	6,2
	Maret 2025	144,9	5,89
	Maret 2025	145,84	6,27
	Total		
	Sep-24	777,49	5,7
	Maret 2025	772,78	5,63
	Sep-25	760,85	5,51

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

2.1.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25, meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,35. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Banten rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 sebesar 75,33 tahun, meningkat 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 tahun menjadi 13,11 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun, dari 9,23 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat sebesar 401 ribu rupiah menjadi 13,50 juta rupiah (tumbuh 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya).

Peningkatan IPM Provinsi Banten tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Terdapat indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,48 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 3,58 persen. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Banten adalah 74,12 tahun dan pada 2025 mencapai 75,33 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,36 tahun atau 0,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,27 persen per tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Banten rata-rata meningkat 0,34 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,46 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,01 tahun atau 0,08 persen dibandingkan tahun 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,40 persen. Sementara itu, RLS pada 2025 meningkat 0,33 tahun atau 3,58 persen dibandingkan 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,94 persen.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Banten mencapai 13,50 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 401 ribu rupiah atau 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 2,29 persen per tahun. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97	75,33
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,89	13,02	13,05	13,09	13,1	13,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23	9,56
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu (Rp)	11.964	12.033	12.216	12.601	13.097	13.498

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

2.1.5. GINI RATIO

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 12/02/36/Th. XX tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan bahwa pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,312. Angka ini menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,330 dan menurun 0,047 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,359.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,314; turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,335 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,361. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,234; naik dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,221 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,246.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2025 adalah sebesar 21,84 persen. Jika dirinci

berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,82 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 25,77 persen. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

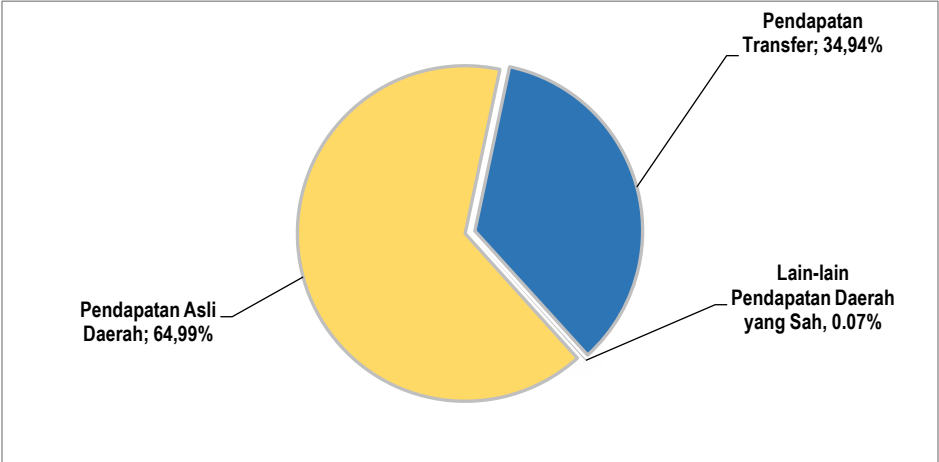
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2025–September 2025 di antaranya distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2025 mengalami penurunan 1,55 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,10 poin persen dan sebesar 0,45 poin persen.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, bagian PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

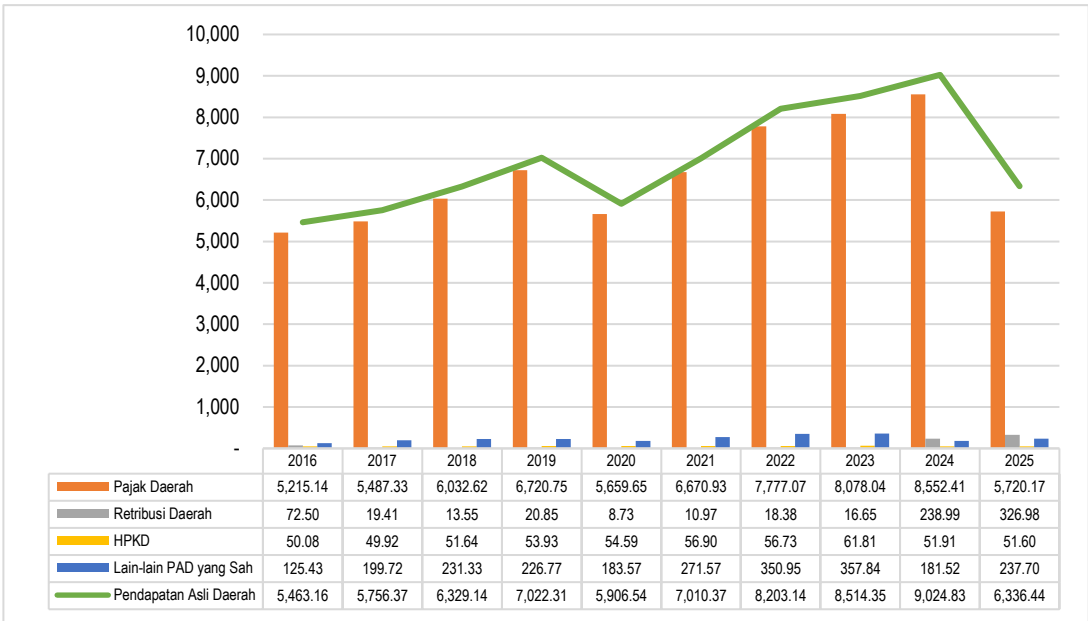
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 64,99% lebih kecil dari rasio Tahun 2024 yaitu sebesar 72,76%.

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2025



Pendapatan Asli Daerah dalam rentang tahun 2016-2024 selalu menunjukkan tren meningkat kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Sedangkan, pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 2,668 triliun rupiah atau 29,79% menjadi sebesar 6,336 triliun rupiah, sebagaimana dalam grafik berikut:

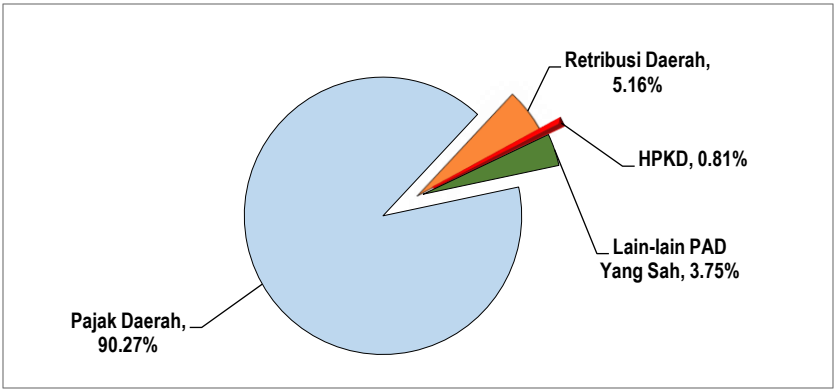
Grafik 2.2 Perkembangan Nilai PAD TA 2016 - 2025 (dalam miliar rupiah)



Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 disebabkan oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak dengan mekanisme *split payment*, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tersebut diberlakukan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Setelah Undang-Undang tersebut berjalan, penerimaan PKB dan BBNKB tidak lagi ditampung sementara pada RKUD Provinsi Banten, melainkan langsung masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Penurunan Pendapatan Asli Daerah juga disebabkan tidak tercapainya target pendapatan pada Tahun Anggaran 2025, khususnya pada penerimaan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Komposisi masing-masing objek pendapatan dari kelompok PAD TA 2025 yaitu: Pajak Daerah sebesar 90,27%, Retribusi Daerah sebesar 5,16%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,81% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,75%.

Grafik 2.3 Komposisi Realisasi PAD TA 2025



2.3. Kebijakan Keuangan

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBD;
- e. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - 1) Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, SKPD Penghasil harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016;
- 6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 10) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis Pendapatan Retribusi Daerah, objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 11) Pemanfaatan penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- c. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah
- 1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil kerja sama daerah;
 - c) Jasa giro;
 - d) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) Pendapatan bunga;
 - f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h) Pendapatan denda pajak daerah;
 - i) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k) Pendapatan dari pengembalian;
 - l) Pendapatan dari BLUD; dan
 - m) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

2. Dana Perimbangan/Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPH) terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 serta pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Penganggaran DBH Pajak tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika realisasi penerimaan negara, antara lain dengan mempertimbangkan realisasi DBH Pajak Tahun Anggaran sebelumnya pada Pemerintah Provinsi Banten, serta prinsip kehati-hatian fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Sehubungan dengan penetapan kurang bayar dan/atau lebih bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025, penyaluran kurang bayar dan/atau penyelesaian lebih bayar DBH dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Oleh karena itu, pengakuan realisasi DBH Pajak dalam APBD Provinsi Banten hanya dilakukan setelah terdapat penyaluran resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Dalam hal alokasi DBH Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengalami perubahan atau penetapan lanjutan setelah Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Banten wajib menyesuaikan alokasi DBH Pajak tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dilakukan, maka realisasi pendapatan DBH Pajak, termasuk yang bersumber dari penyaluran kurang bayar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025, dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan

DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sisa DBH-CHT di Rekening Kas Umum Daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2025 secara bertahap atau sekaligus;

- 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan

DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dana Bagi Hasil Sawit

DBH Sawit dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar penyaluran dan ketentuan pengelolaannya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 6) Dalam penyusunan penganggaran saat Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas: a) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum; c) Dana Alokasi Khusus Fisik; d) Dana Otonomi Khusus; e) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan f) Dana Desa.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran

DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, memperhatikan hal hal sebagai berikut:

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Target pendapatan daerah dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapatan Daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan Pendapatan Daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Namun, target pendapatan daerah pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebab mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Penyesuaian target pendapatan ini juga dipengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pajak daerah kewenangan kabupaten/kota. Skema opsen ini mengubah struktur pendapatan dari pola bagi hasil menjadi hak pemungutan langsung oleh kabupaten/kota.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp11.837.699.357.260 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8.319.775.525.770 turun 4,02% atau Rp348.276.507.779 dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.668.052.033.549. Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.934.779.242.245;

2. Pendapatan Transfer sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp3.511.577.068.000 naik 14,32% atau Rp439.946.459.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.071.630.609.000. Pendapatan Transfer setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.526.424.482.000;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya ditargetkan berasal dari hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp6.346.763.490 naik 0,32% atau Rp20.000.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.326.763.490. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan tidak mengalami perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp6.346.763.490. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2025, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencapaian target pendapatan melalui Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 1) Melakukan Intensifikasi/tindak lanjut status 8 hasil penelusuran KBMDU, untuk dilakukan Penagihan di masing-masing UPTD;
 - 2) Optimalisasi pelaksanaan Razia Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD;
 - 3) Optimalisasi Penambahan Jam Pelayanan Samsat Induk, Samling dan Gerai dimasing-masing UPTD;
 - 4) Pelaksanaan Penghargaan Pajak Award;
 - 5) Informasi Pajak melalui WA Blast;
 - 6) Sinergitas Pendataan dan Penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 1) Berperan serta dalam Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week dan Adira Expo;
 - 2) Koordinasi Tim Pembina Samsat terkait Percepatan Proses Kendaraan Baru/BBN I;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Dealer atau Asosiasi Otomotif Banten (AOB) yang ada di Provinsi Banten, melalui Percepatan Proses STNK dan BBN I (kendaraan baru) di Samsat;
 - 4) Koordinasi dengan Perusahaan Angkutan, khususnya Taxi di Tangerang Selatan;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 1) Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka sinergitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBBKB;
 - 2) Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh wajib PBBKB se-Povinsi Banten dalam rangka mensosialisasikan kebijakankebijakan yang ada di Provinsi Banten sekaligus mengedukasi seluruh Wajib PBBKB untuk selalu taat membayar pajak.

d. Pajak Air Permukaan

- 1) Melakukan pendataan terhadap potensi AP dan melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
- 2) Berkoordinasi dengan perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum menjadi wajib pajak dan belum memiliki SIPPA agar segera mendaftar sebagai WP Air Permukaan dengan melengkapi persyaratan seperti tercantum pada Peraturan Gubernur Banten nomor: 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Menerbitkan SK NPWPD bagi perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan permukaan air permukaan;
- 4) Melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Orang Prbadi/Badan Usaha yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum memiliki SIPPA tetapi sudah memiliki SK NPWPD;
- 5) Memberitahukan kepada WP Air Permukaan agar segera mengurus perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air jika masa berlakunya sudah habis;
- 6) Berkoordinasi dengan WP Air Permukaan agar dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan harus sesuai dengan nilai yang tertera pada SKPD untuk mencegah terjadinya lebih bayar atau kurang bayar;
- 7) Melakukan penagihan piutang Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak apabila memiliki piutang;
- 8) Melakukan penetapan SKPD bagi wajib pajak baru dan sudah memiliki NPWPD;
- 9) Berkoordinasi dengan WP AP agar membayar tagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

e. Pajak Rokok

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk penyaluran alokasi bagi hasil pajak rokok yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan estimasi pemungutan atas Cukai Rokok;
- 2) Kesepakatan penyaluran dan penggunaan bagi hasil Pajak Rokok telah dilakukan sesuai rencana dan dapat membiayai berbagai klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Banten;

f. Pajak Alat Berat

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Perda tersebut mengamatkan tahun 2024 pajak alat berat mulai dipungut;
- 2) Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;
- 3) Koordinasi dengan OPD Kesatuan Pol PP Penegakan PERDA;
- 4) Koordinasi dengan OPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait data alat berat di perusahaan seluruh Provinsi Banten;
- 5) koordinasi dengan BAPENDA/BPKAD kota/kabupaten yang memiliki penerimaan pajak MBLB meminta data WP MBLB dimana di WP MBLB terdapat Alat Berat;
- 6) melakukan Pendataan Potensi Alat Berat di setiap wilayah UPTD PPD.

- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - 1) Kerjasama teknis dengan ESDM Provinsi Banten, dalam rangka Optimalisasi Pendapatan MBLB.
 - h. Retribusi Daerah
 - 1) Optimalisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah seperti sewa stadion BIS, Kawasan KP3B, Situ atau Danau, Sewa BMD untuk Perbankan;
 - 2) Melakukan sosialisasi melalui media online, media cetak, media luar ruang terkait layanan Retribusi apa saja yang ada di Provinsi Banten;
 - 3) Memfasilitasi Bina Konsumen (Calon Konsumen dan Pelanggan) kepada OPD Penghasil, terhadap Layanan dan Kebijakan;
 - 4) Bersama - sama dengan OPD Penghasil melaksanakan inventarisasi aset daerah yang dapat di manfaatkan, sebagai sumber Pendapatan Retribusi Daerah (pemanfaatan aset situ, bangunan yang tidak dimanfaatkan, serta lahan yang kosong);
 - 5) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait Pengelola Retribusi (OPD, Perbankan, dll) dalam rangka inventansir permasalahan yang ada, dan bersama - sama melakukan upaya penyelesaiannya;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan retribusi daerah, seperti rekonsiliasi data penerimaan (antara Rekening koran RKUD, SIREDA, Kuarta dan SIPD), supaya tidak ada lebih setor, kurang setor, kesalahan penetapan SKRD, dan kesalahan pelunasan pada STS.
 - i. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh BUMD di Provinsi Banten beserta perangkat daerah terkait, dalam rangka menginventarisir permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan;
 - 2) Melakukan koordinasi langsung ke BUMD dalam rangka konfirmasi penyetoran deviden (bagi yang belum menyetorkan) dan menginventarisir permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada pimpinan.
 - j. Lain-lain PAD yang Sah
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan lain-lain PAD yang Sah seperti rekonsiliasi data penerimaan lain-lain PAD yang Sah dengan OPD agar dapat mengidentifikasi transaksi dengan tepat
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait antara lain dengan kepolisian, pelaku usaha dan masyarakat;
- a. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, pengujian bahan, pengujian konstruksi, pemanfaatan sempadan SDA, dan penyediaan tempat kegiatan usaha (kantin KP3B);
 - 2) Retribusi Alat Berat, meningkatkan potensi alat berat di wilayah Provinsi Banten yang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan alat berat sebagai penunjang pembangunan tersebut.

- b. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pertanian
 - 1) Melaksanakan pemanfaatan aset daerah serta hasil produksi usaha daerah;
 - 2) Membuat dan mengembangkan tempat wisata edukasi.
- c. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Retribusi Jalan Kepelabuhan, melakukan pengawasan secara intensif terhadap tempat, serta penjualan hasil produksi usaha daerah.

2.3.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp444.485.541.412 yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp138.498.000.000 yang ditujukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2025 seluruhnya merupakan pengembalian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp138.497.733.036.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indeks/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program ke depan.

2.4.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD TA 2025 ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp11.837.699.357.260 dan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten setelah Perubahan sebesar Rp10.467.550.487.735 dengan realisasi mencapai 93,14% atau sebesar Rp9.749.656.227.905. Capaian realisasi Pendapatan TA 2025 lebih rendah sebesar Rp2.654.346.897.958 dari TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.404.003.125.863 atau turun sebesar 21,40%.

Pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Serang dan Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang;

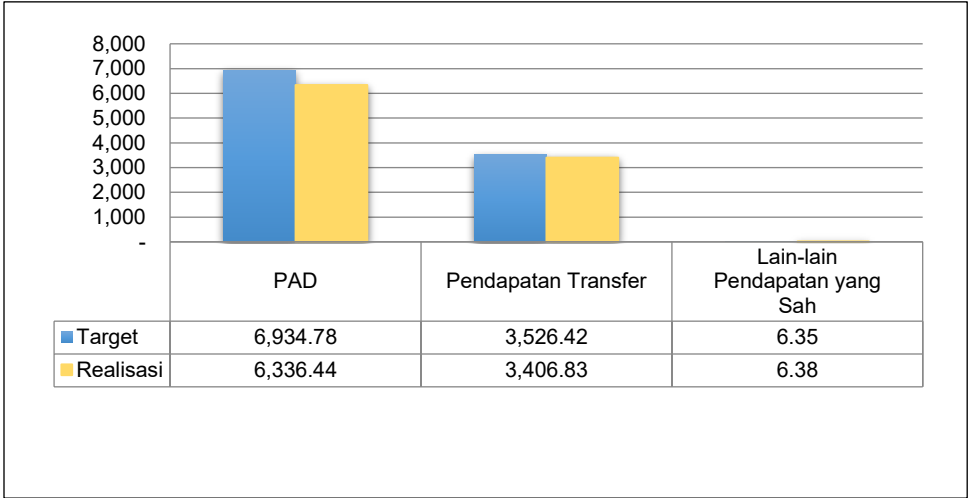
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
15. Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
16. Pergub Banten Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan TA 2025 ini berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.319.775.525.770 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.934.779.242.245 tercapai sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37%, sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan pada APBD sebesar Rp3.511.577.068.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.526.424.482.000 tercapai sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61% yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, sedangkan Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan pada APBD sebesar Rp6.346.763.490 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.346.763.490 tercapai sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58%. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

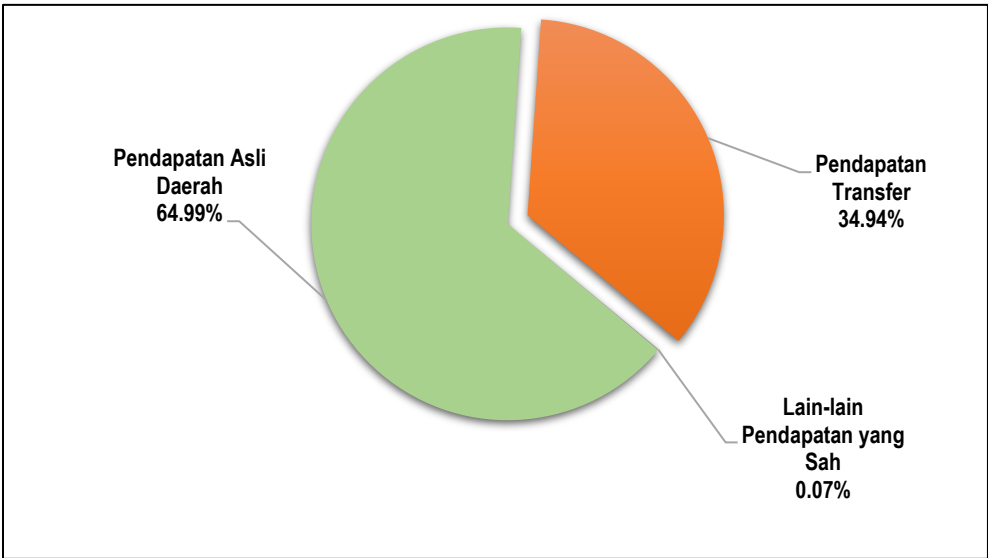
Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
Pendapatan Transfer	3.511.577.068.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.346.763.490	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58
JUMLAH	11.837.699.357.260	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14

Grafik 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025 (Milyar Rupiah)



Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2025



2.4.2. Belanja

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten TA 2025 sebesar Rp9.604.643.652.748 dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2025 sebesar Rp8.359.013.298.241 dengan realisasi sebesar Rp7.845.125.554.085 atau 93,85% dengan rincian sebagai berikut:

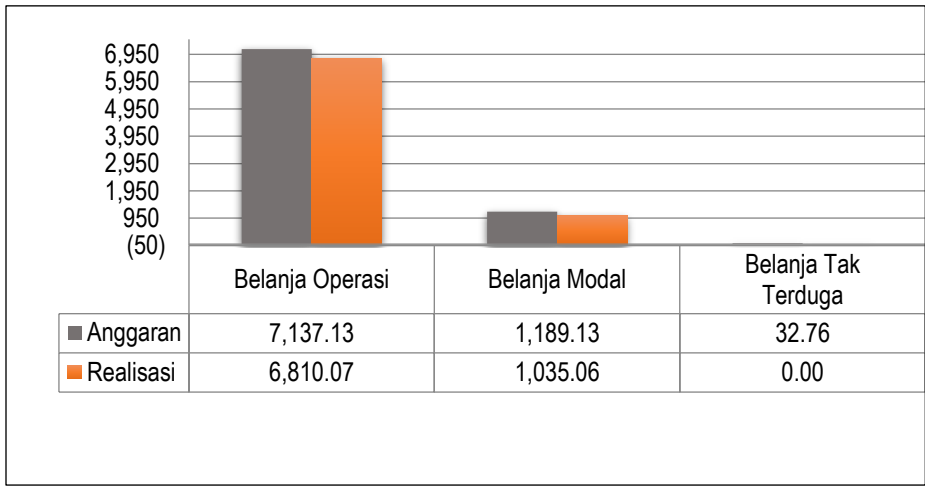
- 1. Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan program pembangunan Kabupaten/Kota ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.019.522.158.684 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.137.130.606.275 dengan realisasi sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42%
- 2. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.525.026.595.733 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.189.126.004.461 dengan realisasi sebesar Rp1.035.060.394.254 atau 87,04%
- 3. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp60.094.898.331 dan Perubahan APBD sebesar Rp32.756.687.505 dengan realisasi sebesar Rp0 atau 0,00%

Secara ringkas target dan realisasi belanja TA 2025 seperti yang tercantum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Belanja Operasi	8.019.522.158.684	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42
Belanja Modal	1.525.026.595.733	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04
Belanja Tak Terduga	60.094.898.331	32.756.687.505	-	0,00
JUMLAH	9.604.643.652.748	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85

Grafik 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2025 (Milyar Rupiah)



2.4.3. Transfer

Transfer TA 2025 ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp2.237.093.338.749 dan Perubahan APBD sebesar Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Transfer TA 2025

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	123.800.000.000	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	30.352.620.000	30.342.620.000	99,97
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	123.800.000.000	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77
JUMLAH	2.237.093.338.749	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70

2.4.4. Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp147.535.634.237 dan Perubahan APBD sebesar Rp444.485.541.412 dengan realisasi sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp143.498.000.000 dan Perubahan APBD sebesar Rp138.498.000.000 dengan realisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.
- c. Pembiayaan Neto
Pembiayaan Neto ditargetkan dalam APBD sebesar Rp4.037.634.237 dan Perubahan APBD sebesar Rp305.987.541.412 dengan realisasi sebesar Rp305.987.808.375 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	143.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
PEMBIAYAAN NETO	4.037.634.237	305.987.541.412	305.987.808.375	100,00

2.5. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai macam inovasi daerah dan telah memperoleh berbagai penghargaan yang merupakan *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Banten, antara lain:

2.4.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten TA. 2025

- a. Penjabat Gubernur Banten raih BAZNAS *Award* 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik dari BAZNAS (2/2024);
- b. Penjabat Gubernur Banten raih Ekbispar *Award* 2024 Provinsi Banten kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/ Lembaga Terbaik (3/2024);
- c. Pemerintah Provinsi Banten raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (4/2024);
- d. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Lencana Abdi Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
- e. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas Kontribusi dan Kerja Keras dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
- f. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tertinggi ke-4 Tingkat Nasional dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (8/2024);
- g. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan atas Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8/2024);
- h. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas capaian 99% *Universal Health Coverage* Provinsi Banten dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (8/2024);
- i. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) *Award* 2024 kategori Inisiator dan Berkomitmen Dalam Pelaksanaan RAN PE dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (8/2024);
- j. Pemerintahan Provinsi Banten sebagai Pengelola Terbaik IV Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (8/2024);
- k. Provinsi Banten meraih Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Terbaik Tahun 2024 dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (8/2024);

- l. Penjabat Gubernur Banten meraih Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (8/2024);
- m. Provinsi Banten meraih Stand Terbaik, Terunik, dan Inspiratif pada Pameran Kriyanusa 2024 dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Indonesia (8/2024);
- n. Pemerintah Provinsi Banten meraih Penghargaan Atas Komitmen Mencapai *Universal Health Coverage* Tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (8/2024);
- o. Pemerintah Provinsi Banten meraih Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Silver sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Memuaskan tingkat Provinsi dari *Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)* (9/2024);
- p. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih Apresiasi Tokoh Indonesia Tahun 2024 kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Tempo Media Group (9/2024);
- q. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
- r. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Penurunan *Stunting* Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
- s. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Belanja Daerah Tahun 2024 (9/2024);
- t. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Investasi 2024 kategori Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (9/2024);
- u. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Provinsi Yang Tidak Ditemukan Kasus Rabies Pada Hewan 14 Tahun Terakhir dari Kementerian Pertanian (10/2024);
- v. Masjid Raya Al-Bantani Pemerintah Provinsi Banten Juara 2 Masjid Percontohan Nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia (10/2024);
- w. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Anugerah Upakarya Wanua Nugraha atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (10/2024);
- x. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Daerah Penyalur Bantuan Pangan Pengentasan *Stunting* dari ID FOOD, Induk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero (10/2024);
- y. Gubernur Provinsi Banten sebagai Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (10/2024);
- z. Provinsi Banten merupakan Daerah Capaian Tertinggi Nasional dalam Pelaksanaan PIN Polio dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (10/2024);
- aa. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Kepatuhan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia (11/2024);
- bb. Pemerintah Provinsi Banten menerima 5 sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. yakni: Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Toapekong 12 Tahunan, dan Carita Pantun Baduy (11/2024);
- cc. Pemerintah Provinsi Banten Terbaik ke-2 Pelaksanaan Program Tuberkulosis Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (12/2024);

- dd. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik kedua Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Daerah pada SIPD Republik Indonesia terhadap Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri (12/2024).

2.4.2 Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, diantaranya:
1. Sistem Informasi Penatausahaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas (SIPELNAS);
 2. SIBANKUM (Sistem Layanan Bantuan Hukum);
 3. Elektronik Medical Record (EMR) RSUD Banten;
 4. Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 5. Tita Gina (Tim Tatalaksana Gizi Anak) di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;
 6. LMS Banten Ceria;
 7. Lumbung Data;
 8. Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SIMAKIP);
 9. Absensi Siswa Digital SMAN 1 CINANGKA;
 10. PAKU KUMKM (Pusat Asistensi, Kompetensi, dan Usaha Koperasi dan UMKM);
 11. Grand Design E - Audit Di Lingkungan Pem Provinsi Banten (Masa Depan Transformasi Digital Pembinaan dan Pengawasan);
 12. KATANA (Keluarga Tanggap Bencana);
 13. DESTANA (Desa Tangguh Bencana);
 14. Dashboard Pimpinan;
 15. Satu Portal Layanan Provinsi Banten;
 16. Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD Online);
 17. Klinik Holistik Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten;
 18. Layanan Cuti Online ASN;
 19. Layanan Presensi Online ASN;
 20. Layanan Kenaikan Gaji Berkala ASN;
 21. Sistem Informasi Biro Umum (SIBIRU);
 22. Sileupeut Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
 23. Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS);
 24. Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Banten (SIMASTEN);
 25. Layanan Izin Belajar Bagi ASN Secara Online;
 26. Klinik Reformasi Birokrasi (KLINIK RB);
 27. SIM CERIA;
 28. BanKeuDes (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintahan Desa) Provinsi Banten;
 29. Legal Drafter (Hybrid);
 30. KPU LC (Klinik Perundang-Undangan) Legislation Clinic;
 31. SiDAKEP (Sistem Informasi Data Ketahanan Pangan);
 32. Sistem Informasi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ);
 33. SIBENDA (Sistem Informasi Bencana Daerah);
 34. Jambore Relawan FPRB BPBD Provinsi Banten;
 35. Edukasi Penanggulangan Bencana Tingkat Pendidikan;
 36. Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA);
 37. Dawai Denova;
 38. Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP);
 39. GERTAM Goes To Ponpes (Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Goes To Ponpes);
 40. Serambi Banten.
- b. Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Banten, diantaranya:
1. SIG Potensi Investasi Banten;
 2. SIJALU (Sistem Informasi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan);
 3. Jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah (JKPD) dengan Open Journal Sistem (OJS);

4. Batupusaka Mobile (Banten Satu Pustaka Mobile);
5. Geliat Asa;
6. E-Reservasi RSUD Banten;
7. Laboratorium Information System (LIS) RSUD Banten;
8. Loker Samsat Sonten (SAMSON);
9. Aplikasi Samsat Banten Hebat (SAMBAT);
10. Aplikasi Samsat Cepat, Ringkas dan Aman (SAMSAT CERIA);
11. Pelayanan Kolaborasi Untuk Lindungi, Tanggulangi dan Intervensi Penurunan Stunting (KULINTANG INTERNUSA) RSUD Banten;
12. Upaya Menurunkan Angka Stunting melalui Digitalisasi Pelayanan Gizi Pasien Post Rawat Inap RSUD Malingping;
13. BETA RAKIT ANTING (Bergandengan Tangan, Rumah Sakit Turunkan Stunting);
14. MUDA Integrated Project - Model Produksi Kolaboratif Lintas Keahlian Siswa SMK 02 Tangsel;
15. PIN SHOLAT (SMKS TI PGRI 11 Serpong Tangerang Selatan);
16. Hidroponik Cerdas Berbasis IoT Dengan Energi Terbarukan (SMKN 2 Kota Tangsel);
17. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
18. 12 Hijau Berkilau;
19. Program Pembelajaran Berbasis Industri di SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
20. Mobile Learning System (MLS) SKENSA BESTARI;
21. MANAGE-OBSERVE TEACH SYSTEM (MOCHY) - Pengawas SMK KAB. LEBAK;
22. EDUTRACK DKV SKENSA BESTARI;
23. Alat Pendeteksi Kekeringan Tanaman Pot;
24. Penerapan KURASSAKI (Kurangi Sampah Sekolah Kita) di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang;
25. Sistem Informasi Pelayanan LPSE;
26. Sabtu Seru Bersama Pendongeng (SARUNDENG);
27. Layanan Klinik Kemasan Keliling (LAKI KELING);
28. Geographic Information System (GIS) Tata Ruang;
29. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah berbasis SLIMS (Senayan Library Management System);
30. HARGA BAPOK;
31. Poster Cetting Banten;
32. Sisik Ikan Banten;
33. Jawara Mudik;
34. Sistem Informasi Jaringan Jalan (SIJJ);
35. Pengaduan Jalan Banten;
36. Belajar Berkarya Bersama Menyajikan Menu Nusantara;
37. Motor Roda Tiga dari Kompresor Bekas: Solusi Mobilitas dan Edukasi Berbasis Green Engineering di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang;
38. Sistem Informasi Telusur Status Pajak (SITAPAK);
39. Samsat Drive Thru;
40. Inovasi Pembuatan Aplikasi SIP-TRIKABTA (Sistem Informasi Parenting) sebagai Transformasi Digital dalam Sarana Pelayanan Publik;
41. Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (SITAPAP);
42. Ruang Layanan Pengaduan dan Informasi Samsat;
43. Sistem Pembayaran Retribusi Daerah (SIREDA);
44. Info Pajak Kendaraan Bermotor (INPAK);
45. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC);
46. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QRIS;
47. Loker Samsat Non Tunai (SANTUN);
48. Pendaftaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QR-Code;
49. Pintu Perlintasan Sebidang;
50. Rumah Singgah Peduli Masyarakat Banten;

51. Sidataperum Perkim Banten;
52. Ruang Pojok Baca Samsat;
53. Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Metode Risha;
54. SIORMAS/Sistem Informasi Ormas;
55. Journal of Civil Engineering, Technology and Sciences (JOCETS) - Open Jurnal Sistem DPUPR;
56. Media Informasi Digital di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
57. Smart DPRD;
58. Program Bangun Jalan Desa Rakyat Sejahtera (BANG ANDRA);
59. Kelas Pemustaka;
60. SiLOKER;
61. Pembangunan Akses Jalan Banten Lama;
62. TV DPUPR Banten;
63. Pembangunan Akses Jalan Sumur – Taman Jaya;
64. SIMONOV SDA DPUPR Provinsi Banten;
65. e-PPID;
66. Gada Banten (Penegakan Peraturan Daerah Banten);
67. Jari Banten;
68. SIL (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN);
69. Sikadu (Sistem informasi Koperasi Terpadu);
70. SiDatuk (Sistem Informasi Pendataan Usaha Kecil);
71. Peningkatan Kapasitas Klinik Hewan menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten;
72. Love Banten (Layanan Online Veteriner Provinsi Banten);
73. E-Dasawisma (Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Banten);
74. New Sport Science (Seleksi Atlet Berbasis Teknologi);
75. Silat Banten;
76. SAYAP MALIK (Sentra Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik);
77. Siaga Wisata;
78. Sistem Informasi dan Data Ketenagalistrikan (SIDAK);
79. Sistem Informasi Pertambangan (SIP);
80. Akses permodalan bagi Nelayan di Provinsi Banten;
81. RIS (Radiologi Information System);
82. Online Campaign Specialist (OCS);
83. PTS (Pneumatic Tube System);
84. Program Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Personalized Learning di Sekolah Citra Berkas Tangerang;
85. SIMANTAP (Sistem Manajemen Transportasi);
86. SisDEWI (Sistem Informasi Standardisasi Destinasi Wisata);
87. Gerak Cepat Atasi Aduan Masyarakat (GERCEP SI DUMAS);
88. Notifikasi Informasi masa Kadaluwarsa Izin dan Penyampaian LKPM;
89. mobil layanan perizinan dan investasi;
90. Aplikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Online;
91. Banten Parlemen TV atau BPTV;
92. Sistem Pemanfaatan Agens Pengendali Hayati (SIAPH);
93. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Digital;
94. Banten Satu Pustaka V.2 (BATUPUSAKA V.2);
95. Banten Satu Pustaka V.3 (BATUPUSAKA V.3);
96. Survei Kepuasan Masyarakat Banten (SUKA BANTEN).

c. Inovasi Daerah Lainnya, diantaranya:

1. Pendidikan Anti Korupsi;
2. Gya Inovasi;
3. Pagelaran Seni Budaya Banten;

4. Gipang Ketan (Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kelembagaan desa pada desa tertinggal di Provinsi Banten);
5. GAUNG SDGs;
6. Strategi Kebijakan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Jalan Melalui Program Bangun Jalan Mantap Untuk Rakyat;
7. Aplikasi Jawara Menabung;
8. Mini Jumper Accu (AZEDU);
9. LUDO RAKSASA SEJARAH (Mengajarkan Computational Thinking Di Sekolah);
10. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Strategi B-Kompleks di SMAN 10 Pandeglang;
11. KP3B Report;
12. PSP3B (Pemasaran Sektor Publik Pemerintah Provinsi Banten);
13. *Influencer/content creator* sebagai mitra komunikasi pimpinan;
14. Komunikasi Strategis Pemerintah Daerah;
15. Implementasi Pembelajaran Terdiferensiasi pada Materi Perakitan Produk di SMKN 2 Kab. Tangerang;
16. Program Kewirausahaan Karya Inovasi Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Pot Bunga;
17. Mobile Klinik Berbasis Telemedicine;
18. Penentuan Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP);
19. Sistem Satu Data Indonesia;
20. Sipanganten (Sistem Informasi Pengelolaan dan Penyebarluasan Konten);
21. Verifikasi faktual pada sub-kegiatan hibah dan bansos;
22. Perjanjian Kerjasama Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat tentang pengendalian penyakit hewan menular strategis/zoonosis, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta penguatan pelayanan;
23. Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi);
24. T&J Teh Berbahan Dasar Bunga Telang Dan Jeruk Nipis Sebagai Minuman Kesehatan;
25. NHI Tinta Dari Bahan Alam Yang Aman Dan Ramah Lingkungan - SMKN 5 Tangsel;
26. SMKN 5 Tangsel One Stop Information;
27. Satu Data Geospasial;
28. Fasilitas Bantuan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
29. Sabun Dari Minyak Jelantah Dan Ekstrak Bayam Merah Untu Mengurangi Pencemaran Lingkungan;
30. Aplikasi Sistem Pelaporan Sahabat Perempuan Dan Anak (e-SAPA);
31. Inovasi Kompor Berbahan Bakar Limbah Aluminium (ALUFLAME) SMKN 1 CIRUAS;
32. Electrical Smart Monitoring System (Sistem Pemantauan Penggunaan Energi Listrik Cerdas);
33. KATIBAN INTEN (Konsultasi Berkelanjutan Integrasi Pengarusutamaan Gender Banten);
34. Si Jagur.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah Rp11.837.699.357.260.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 menjadi Rp10.467.550.487.735.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan TA 2025 sebesar Rp9.749.656.227.905 atau 93,14% dari target yang direncanakan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp10.467.550.487.735. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.404.003.125.863 realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.654.346.897.958 atau 21,40%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kemudian alokasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp7.137.130.606.275, untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.189.126.004.461 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp32.756.687.505. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42% dari nilai anggaran Belanja Operasi. Sedangkan realisasi Belanja Modal Rp1.035.060.394.254 atau 87,04% dari nilai anggaran Belanja Modal dan realisasi Belanja Tak Terduga 0,00% dari nilai anggaran belanja tak terduga. Untuk Belanja Transfer dialokasikan Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp444.485.541.412 terealisasi sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari nilai penerimaan pembiayaan yang dianggarkan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp138.498.000.000 terealisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari nilai pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi

Adapun Realisasi anggaran Per Urusan dan Fungsi Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi TA 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01	PELAYANAN UMUM	4.144.914.972.577	3.734.910.816.713	90,11
01.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	971.269.000	853.863.279	87,91

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690	23.321.581.764	84,01
01.2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	470.189.000	464.230.800	98,73
01.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.419.981.700	1.246.191.705	87,76
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880	225.561.933.716	92,01
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379	550.137.227.637	89,76
01.5.01	PERENCANAAN	46.127.867.410	43.577.404.595,00	94,47
01.5.02	KEUANGAN	2.767.140.819.466	2.468.607.463.031	89,21
01.5.03	KEPEGAWAIAN	230.722.447.163	228.388.845.400	98,99
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.426.266.039	45.797.137.653	85,72
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900	1.470.025.644	90,66
01.5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	10.426.928.200	9.663.781.403	92,68
01.6.01	INSPEKTORAT DAERAH	73.677.043.110	64.896.370.157	88,08
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640	70.924.759.929	96,99
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	61.967.440.202	56.515.288.318	91,20
03.1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	61.967.440.202	56.515.288.318	91,20
04	EKONOMI	1.510.661.820.271	1.404.200.609.866	92,95
04.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943	877.785.453.408	93,33
04.2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	82.196.919.551	77.167.438.691	93,88
04.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.778.421.750	24.567.741.872	91,74
04.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	85.218.919.822	77.190.639.579	90,58
04.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52.506.108.904	48.464.027.666	92,30
04.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	34.485.845.802	30.655.055.153	88,89
04.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.706.399.676	26.891.770.616	93,68
04.2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	485.676.000	466.856.450	96,13
04.3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260	50.329.965.199	90,83
04.3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	110.360.240.015	104.180.975.011	94,40
04.3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700	45.555.457.905	93,27
04.3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.954.176.000	5.125.029.622	86,07
04.3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.158.157.848	35.820.198.694	91,48
05	LINGKUNGAN HIDUP	70.307.368.805	68.720.383.651	97,74
05.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000	384.692.297	82,08
05.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.765.052.805	61.578.114.175	98,11
05.3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179	95,53

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	520.244.504.386	509.110.021.285	97,86
06.1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386	509.110.021.285	97,86
07	KESEHATAN	1.075.493.713.415	1.067.165.212.920	99,23
07.1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.071.638.341.515	1.063.396.486.338	99,23
07.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900	3.768.726.582	97,75
08	PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	91,92
08.3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	91,92
10	PENDIDIKAN	3.244.252.067.370	3.034.640.875.406	93,54
10.1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.156.060.369.670	2.951.318.579.248	93,51
10.2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	53.706.010.700	50.722.729.424	94,45
10.2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.974.181.600	7.549.751.591	94,68
10.2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	26.511.505.400	25.049.815.143	94,49
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	105.339.761.331	98.580.527.060	93,58
11.1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.139.945.562	69.329.216.110	96,10
11.2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.199.815.769	29.251.310.950	88,11
	JUMLAH	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92

3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Adapun Realisasi anggaran Per Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, yang telah diurutkan berdasarkan serapan realisasi tertinggi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja TA 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	S/D Periode Ini	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN				
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.540.000	13.680.000	7.140.000	209,17
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.290.464.800	6.620.503.670	2.330.038.870	154,31
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44.500.000	65.245.000	20.745.000	146,62
4	DINAS PERTANIAN	1.240.163.500	1.811.767.500	571.604.000	146,09
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.276.721.814	1.686.041.654	409.319.840	132,06
6	BADAN PENGHUBUNG	29.800.000	36.000.000	6.200.000	120,81
7	DINAS KESEHATAN	277.500.000.000	313.363.522.756	35.863.522.756	112,92
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.190.420.000	2.254.566.852	64.146.852	102,93
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	(119.596.817.329)	96,61
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.386.558.000	1.338.819.932	(47.738.068)	96,56
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	335.420.000	312.141.500	(23.278.500)	93,06

No	Uraian	Pagu Anggaran	S/D Periode Ini	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	205.900.000	189.825.000	(16.075.000)	92,19
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.652.619.517.621	6.015.136.449.370	(637.483.068.251)	90,42
	JUMLAH PENDAPATAN	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	(717.894.259.830)	93,14
	BELANJA				
1	DINAS KESEHATAN	1.071.638.341.515	1.063.396.486.338	(8.241.855.177)	99,23
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	230.722.447.163	228.388.845.400	(2.333.601.763)	98,99
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	69.838.668.805	68.335.691.354	(1.502.977.451)	97,85
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.713.204.386	509.494.713.582	(11.218.490.804)	97,85
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640	70.924.759.929	(2.201.717.711)	96,99
6	DINAS SOSIAL	72.139.945.562	69.329.216.110	(2.810.729.452)	96,10
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.852.699.005	254.243.246.449	(14.609.452.556)	94,57
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53.706.010.700	50.722.729.424	(2.983.281.276)	94,45
9	DINAS PERTANIAN	110.360.240.015	104.180.975.011	(6.179.265.004)	94,40
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47.749.329.310	45.047.430.239	(2.701.899.071)	94,34
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27.931.487.100	26.296.006.848	(1.635.480.252)	94,14
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	82.196.919.551	77.167.438.691	(5.029.480.860)	93,88
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28.706.399.676	26.891.770.616	(1.814.629.060)	93,68
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.164.034.551.270	2.958.868.330.839	(205.166.220.431)	93,52
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943	877.785.453.408	(62.772.898.535)	93,33
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700	45.555.457.905	(3.286.505.795)	93,27
17	BADAN PENGHUBUNG	10.426.928.200	9.663.781.403	(763.146.797)	92,68
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	53.461.973.904	49.395.114.916	(4.066.858.988)	92,39
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.762.908.280	33.884.428.447	(2.878.479.833)	92,17
20	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880	225.561.933.716	(19.575.498.164)	92,01
21	DINAS PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	(3.259.769.718)	91,92
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	26.778.421.750	24.567.741.872	(2.210.679.878)	91,74
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260	50.329.965.199	(5.080.674.061)	90,83
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.112.333.848	40.945.228.316	(4.167.105.532)	90,76
25	DINAS PERHUBUNGAN	85.218.919.822	77.190.639.579	(8.028.280.243)	90,58
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.204.531.922	22.630.859.871	(2.573.672.051)	89,79
27	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379	550.137.227.637	(62.748.841.742)	89,76
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	38.026.456.669	33.873.900.811	(4.152.555.858)	89,08
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	34.485.845.802	30.655.055.153	(3.830.790.649)	88,89
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.498.288.120.461	2.214.364.216.582	(283.923.903.879)	88,64
31	INSPEKTORAT	73.677.043.110	64.896.370.157	(8.780.672.953)	88,08
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.426.266.039	45.797.137.653	(7.629.128.386)	85,72
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690	23.321.581.764	(4.439.138.927)	84,01
	JUMLAH BELANJA	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	(762.597.682.856)	92,92

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan meskipun tidak semua jenis pendapatan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pajak Daerah mencapai realisasi sebesar Rp5.720.173.537.866 atau 91,47% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.253.493.581.987. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya beberapa penerimaan pajak, yaitu:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditargetkan sebesar Rp2.183.554.967.000 dengan realisasi sebesar Rp2.112.638.943.700 atau 96,75%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditargetkan sebesar Rp1.627.134.122.550 dengan realisasi sebesar Rp1.272.028.812.300 atau 78,18%;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditargetkan sebesar Rp1.347.285.989.000 dengan realisasi sebesar Rp1.295.383.786.757 atau 96,15%;
 - d. Pajak Rokok dari yang ditargetkan sebesar Rp1.027.591.869.237 dengan realisasi Rp976.234.701.211 atau 95,00%;
 - e. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang ditargetkan sebesar Rp23.683.549.000 dengan realisasi sebesar Rp16.309.820.498 atau 68,87%.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai dikarenakan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat, mengakibatkan menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional sehingga turut mengurangi penerimaan pajaknya, kemudian terdapat adanya penurunan tarif pajak kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum yang semula 1% menjadi 0,5%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya;
 - c. Terjadi penurunan PBBKB dikarenakan adanya kebijakan terkait insentif fiskal untuk kendaraan pribadi dan/atau alat berat sebesar 50% serta untuk kendaraan yang digunakan untuk operasional komponen utama atau penunjang alat peralatan pertahanan keamanan TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar 80%, selain itu terjadi penurunan konsumsi BBM seperti peningkatan efisiensi BBKB. Kemudian terjadinya *out of stock* di sebagian besar perusahaan BBM swasta seperti diantaranya PT. Shell Indonesia, PT. Vivo Energy Indonesia dan beberapa perusahaan swasta lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan PBBKB;
 - d. Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto;
 - e. Tidak tercapainya Opsen Pajak MBLB dikarenakan bahwa Opsen MBLB merupakan sumber pendapatan baru diterapkan di Tahun 2025, sehingga masih ada penyesuaian aturan dan proses di lapangan, realisasi Opsen Pajak MBLB sangat bergantung pada efektifitas Kabupaten/Kota dalam memungut Pajak MBLB.
2. Lain-lain PAD yang Sah mencapai realisasi sebesar Rp237.695.843.489 atau sebesar 69,11% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp343.934.086.891. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp137.355.870.027 tercapai realisasi sebesar Rp23.366.145.489 atau 17,01%. Tidak tercapainya target merupakan dampak pemberian insentif pajak kepada

masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

- 3. Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar Rp3.406.827.664.671 atau sebesar 96,61% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.526.424.482.000. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditargetkan sebesar Rp1.124.231.784.000 dengan realisasi Rp988.082.231.100 atau 87,89%;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) dari yang ditargetkan sebesar Rp1.167.199.457.000 tercapai realisasi Rp1.146.642.838.212 atau 98,00%;

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan dari Pendapatan Transfer tersebut adalah:

- a. Penyaluran dana transfer DBH Pajak (DBH PPh 21, DBH PPh 25/29 dan DBH PBB) pada bulan desember tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf F Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana lokasi Umum bahwa Periode penyaluran DBH Pajak mulai tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan ketentuan bulan Desember sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya yaitu sebesar Rp100.062.703.900. Kemudian terdapat sisa DBH Kurang Bayar s.d 2023 yang masih belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 sebesar Rp69.353.669.000;
- b. Tidak tercapainya target realisasi Dana Alokasi Umum disebabkan adanya Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah, yaitu akibat pengangkatan dan penggajian PPPK tahun 2025 hanya sebanyak 11.265 orang sebesar Rp196.636.648.162 tidak sesuai dengan KMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebanyak 11.737 orang yaitu sebesar Rp218.133.328.000.

Berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran. Namun demikian, realisasi belanja dari program dan kegiatan mencapai 92,92%. Belum optimalnya realisasi belanja tersebut, secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kendala Rendahnya Realisasi Belanja TA 2025

No	Uraian	Kendala
1	Belanja Modal Tanah	Belum optimalnya realisasi disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disebabkan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk kebutuhan SKHN 01 Kota Tangerang, SMK 12 Kota Tangerang, dan SMKN 6 Kota Serang, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya kesepakatan harga tanah antara Pemerintah Daerah dan pihak pemilik tanah, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Atas kondisi tersebut, anggaran Belanja Modal Tanah yang telah dialokasikan menjadi tidak terealisasi seluruhnya. Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat kendala realisasi untuk alokasi pembayaran uang ganti rugi Rumah Sakit Adhyaksa yaitu terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu rekomendasi Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian yang sampai saat ini masih dalam proses.

Rincian lebih lanjut realisasi kegiatan dibawah 80% dapat dilihat pada Lampiran 1 CaLK.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses akuntansi. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Selanjutnya, output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

1. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
2. Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
3. Pendapatan – LRA dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan-LRA. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan Penerimaan Bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan – LRA dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.
8. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA yang mencakup Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan Atau pun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Oleh Daerah, Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan Dari Pengembalian, Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum, Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
9. Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menurut jenis yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.
10. Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
11. Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirinci menurut rincian objek yang mencakup Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal.
12. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,

dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Penganggaran dan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya dicatat sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan asli daerah mencatat Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah mencatat Pendapatan Retribusi Daerah.
15. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Penerimaan Jasa Giro-LRA, Pendapatan Bunga-LRA, Tuntutan Ganti Rugi Daerah-LRA, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA;
 - b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Pendapatan Denda Pajak-LRA; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah sebagai berikut Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA, Pendapatan Denda Retribusi LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LRA, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA, Pendapatan BLUD-LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA.
16. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
2. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja

- dibukukan dalam pendapatan–LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA periode berikutnya. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;
3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan;
 4. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
 5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial;
 6. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
 7. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal Perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya;
 8. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00
1.8	Alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.10	Komputer	1.000.000,00
1.11	Alat Eksplorasi	2.500.000,00
1.12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	2.500.000,00
	- Alat Pengeboran Non Mesin	1.000.000,00
1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10.000.000,00
1.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00
1.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
	- Alat Kerja Penerbangan	2.500.000,00
1.16	Alat Peraga	1.000.000,00

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1.17	Peralatan Proses/Produksi	2.500.000,00
1.18	Rambu-Rambu	15.000.000,00
1.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Monumen	15.000.000,00
2.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	
3.1	Alat Musik	
	- Alat Musik Modern	1.000.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
4.1	Jalan	50.000.000,00
4.2	Jembatan	50.000.000,00
4.3	Bangunan Air Irigasi	50.000.000,00
4.4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50.000.000,00
4.5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	50.000.000,00
4.6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000,00
4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	50.000.000,00
4.8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00
4.9	Bangunan Air Kotor	50.000.000,00
4.10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00
4.11	Instalasi Air Kotor	50.000.000,00
4.12	Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00
4.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	50.000.000,00
4.14	Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00
4.15	Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00
4.16	Instalasi Pertahanan	50.000.000,00
4.17	Instalasi Gas	50.000.000,00
4.18	Instalasi Pengaman	50.000.000,00
4.19	Instalasi Lain	50.000.000,00
4.20	Jaringan Air Minum	50.000.000,00
4.21	Jaringan Listrik	50.000.000,00
4.22	Jaringan Telepon	50.000.000,00
4.23	Jaringan Gas	50.000.000,00

9. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap pada paragraf 8.e akan diperlakukan sebagai Aset Lainnya;
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam (wabah/pandemi), bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan kebutuhan tanggap darurat bencana;
11. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kab/kota termasuk pemerintah desa;

12. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan Sosial
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Transfer
13. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah;
14. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
15. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual;
16. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah;
2. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal Badan Layanan Umum, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi;
8. Seluruh pendapatan transfer baik berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai pendapatan transfer;
9. Seluruh beban transfer baik berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang oleh entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/ hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan;
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan;
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
6. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
7. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
8. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO berbasis akrual atau Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO, Surplus Non Operasional – LO; dan Pendapatan Luar Biasa – LO;
3. Pendapatan – LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
4. Pendapatan – LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
 - b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
5. Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;

6. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
7. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
8. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan;
9. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi;
10. Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas;
11. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan;
12. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
13. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
14. Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
16. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
18. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

19. Akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan – LO untuk SKPD;
20. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan-LO yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
21. Pendapatan-LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
22. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah – LO yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem *official assessment* terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan pajak daerah – LO yang berasal dari sistem *self assessment*:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak;
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan – LO;
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan – LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
23. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek Pendapatan-LO sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD;
25. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek Pendapatan-LO yang mencakup Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Daerah, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
26. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berupa Pendapatan atas bagian laba BUMD-LO diakui pada saat suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah;
27. Pendapatan Bunga/Jasa Giro – LO diakui saat kas diterima di RKUD;

28. Pendapatan Penjualan dan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pengelolaannya-LO diakui saat serah terima aset dan kas diterima;
29. Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-LO diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
30. Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD;
31. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO secara umum diakui pada saat sudah menjadi hak dan pendapatan diterima RKUD;
32. Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO;
33. Pengakuan Surplus Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul;
34. Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima;
35. Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul;
36. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (*basis kas*) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi;
37. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
40. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
41. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan – LO;
42. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
4. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
8. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah;
9. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
10. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
11. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban;
12. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
13. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul;
14. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian;
15. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini;
16. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
17. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*);
18. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;

20. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
21. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
22. Termasuk dalam Beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Beban Penjualan Aset Non Lancar, Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
24. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
25. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
26. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
27. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi;
- c. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Dari sudut peruntukan selanjutnya masing-masing penguasa kas perlu memilah kas menjadi:

- Kas yang belum ditentukan penggunaannya;
 - Kas yang telah ditentukan penggunaannya
- e. Kas yang belum ditentukan penggunaannya adalah kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- f. Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa BPJS, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).
- g. Kas lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS termasuk di dalamnya transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga dan saldo kas yang berasal dari hibah yang tidak teranggarkan dalam APBD. Termasuk dalam transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga adalah Retur SP2D terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya kesalahan nomor dan nama pemilik rekening tujuan) sehingga oleh bank penerima SP2D tersebut dikembalikan ke rekening penampung (*escrow account*) pada bank tempat penyimpanan RKUD.
- h. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- i. Kas Pemerintah di luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas Pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum meliputi:
- 1) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;

Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja pemerintah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
 - 2) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;

Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

 - i. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
 - ii. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan

iii. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

5) Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung Saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

j. Pada akhir periode pelaporan di mungkin terdapat dana yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, namun pembayaran tersebut belum sampai pada pihak penerima. Dan dana tersebut tersimpan di bank tempat kas daerah, tetapi bukan pada rekening kas daerah. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam saldo kas daerah, karena sudah menjadi belanja daerah. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan mengenai jumlah pembayaran yang belum sampai ke penerima.

2. Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
- b. Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;

- c. Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, Piutang dari Perikatan, Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan, Piutang dari Kerugian Daerah, dan Piutang Lainnya;
- d. Piutang atas pungutan Pendapatan Daerah terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam sub bagian tersendiri;
- f. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang dipersamakan;
- g. Piutang Pajak yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan;
- h. Piutang pajak yang berasal dari sistem *self assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- i. Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- j. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusan Pembukuan dan Penghapustagihan Piutang:

- a. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- b. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca;
- c. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- e. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;
- f. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo- saldo piutang yang masih *outstanding*;
- g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;

- h. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib:
 - 1) Menilai Kualitas Piutang;
 - 2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- i. Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo Piutang; dan
 - 2) upaya penagihan.
- j. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet;
- k. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- l. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - 2) Pajak ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*).
- m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 0 (nol) tahun s.d. 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- n. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

- c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - o. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
 - p. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - q. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - r. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
3. Persediaan
- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor termasuk didalamnya adalah seluruh komponen rekening Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan (*supplies*) dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas contoh ban mobil bekas pakai.
- d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- f. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti pupuk, cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kerbau, kambing, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman diakui sebagai Persediaan.
- h. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam kategori usang adalah barang kuasi yang sudah tidak berlaku lagi.
- i. Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah" diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak dan hilang.
- j. Barang berupa *wallpaper* dan barang sejenis diperlakukan sebagai barang pakai habis
- k. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 3) Pada akhir periode pelaporan, persediaan dicatat disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) di gudang/tempat penyimpanan lain yang diakui OPD sedangkan untuk Rumah Sakit dilakukan di gudang dan Depo.
- 4) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar).
- 5) Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan.
- l. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- m. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
- n. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in First out* (FIFO).

- o. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - p. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
 - q. Pada akhir periode pelaporan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*), yaitu dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
 - r. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
4. Investasi
- a. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh investor (dhi. Pemerintah Daerah) berupa kas dan/atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya;
 - b. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar;
 - d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen;
 - e. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
 - f. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
 - g. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas;
 - h. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
 - i. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
 - j. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan;
 - k. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - 3) Berisiko rendah.
 - l. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - 1) Investasi yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - 2) Investasi yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu

- lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
- 3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- m. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas
- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual Kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - 4) Reksa dana.
- n. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- o. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- p. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- q. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - 4) Investasi nonpermanen lainnya.
- r. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau Lembaga/Organisasi tertentu;
- s. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini;
- t. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri;
- u. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- v. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - w. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul;
 - x. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan;
 - y. Penilaian investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah;
 - z. Penggunaan metode-metode ini berdasarkan pada kriteria:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% s.d. 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - aa. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - 3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
 - bb. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

- cc. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari perhitungan perolehan dana bergulir ditambah dengan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir yang tidak bisa tertagih.

5. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- c. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:
 - 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - 2) Hak atas tanah.
- d. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
- e. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Gedung dan bangunan
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan.
- f. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- g. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- h. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- i. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- j. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi;
- k. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- l. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- m. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- n. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
 - o. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
 - p. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 - q. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
 - r. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;
 - s. Aset Tetap Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan;
 - t. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai asetnya Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan;
 - u. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang berkenaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 4) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - 5) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi;
 - v. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - w. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
 - x. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut. Misalnya Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) yang digunakan bersama, biaya perawatan dan pemeliharaan dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga pengakuan aset tetap Gedung SKPD terpadu diakui/dicatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - y. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak;

- z. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- aa. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap;
- bb. Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam pengeluaran setelah perolehan) dan memenuhi kriteria:
 - a. Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang tercatat;
 - b. Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata;
 - c. Memenuhi batas kapitalisasi sebagaimana tabel umur masa manfaat, batas minimal kapitalisasi BMD dan penambahan umur masa manfaat.
- cc. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- ee. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, terdiri atas:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan;
 - 2) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 3) Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan;
 - 4) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- ff. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- gg. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- hh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya persiapan tempat;
 - 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 5) Biaya konstruksi.

- ii. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- jj. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- kk. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;
- ll. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- mm. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- nn. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- oo. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
- pp. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- qq. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
- rr. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- ss. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- tt. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian,

apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

- uu. Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
 - b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;
 - c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
 - e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;
 - f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - g. barang telah melewati batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa; dan
 - h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
 - i. menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- b. Aset Lainnya terdiri dari:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - Sewa

- Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
- Bangun, Kelola/Guna, Serah
Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
 - Bangun, Serah, Kelola/Guna
Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 4) Aset Tak Berwujud, merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain Perangkat Lunak (*software*), hak paten, hak cipta, hak merek, serta Hasil riset dan pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang;
 - 5) Aset lain-lain. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
- c. Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah
 - Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.
 - Bangun, Kelola/Guna, Serah
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
 - Bangun, Serah, Kelola/Guna
Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada

Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- d. Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan;
- e. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- f. Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tidak Berwujud berupa:
 - 1) *Software* komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu;
 - 2) Lisensi dan *Franchise*;
 - 3) Hak Paten dan Hak Cipta;
 - 4) Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti Film/Karya Seni/Budaya yang mempunyai manfaat dimasa depan bagi Pemerintah;
 - 6) ATB dalam Pengerjaan yaitu suatu perolehan ATB khususnya yang diperoleh secara internal namun belum selesai dikerjakan menjadi ATB, namun diniatkan akan digunakan dalam operasional pemerintahan.
- g. Berdasarkan cara perolehannya, ATB Pemerintah dapat berasal dari:
 - 1) Pembelian
 - 2) Pengembangan Secara Internal
 - 3) Pertukaran
 - 4) Kerjasama
 - 5) Donasi/Hibah
 - 6) Warisan Budaya/Sejarah (*Intangible Heritage Assets*).
- h. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*).
 - 2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- i. Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran dan untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah;
- j. Nilai Wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran;
- k. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - 1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau dikembangkan oleh Pihak Ketiga / Kontraktor. Dalam hal dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga;
 - 2) Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus perkasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka *software* seperti ini dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian dari harga

perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

- l. Aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap Awal Kegiatan;
 - b) Tahap Pengembangan Aplikasi;
 - c) Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi. Semua aktivitas pada Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi dapat dibagi menjadi:
 - (1) *Upgrade* (Peningkatan). Aktivitas dapat dikategorikan *upgrade* jika memenuhi kriteria meningkatkan fungsi dan/atau efisiensi *software/website* termasuk peningkatan versi yang lama menjadi yang paling mutakhir.
 - (2) *Update* (Pembaharuan). Aktivitas *Update* cenderung terkait dengan penambahan atau pembaharuan database *software* maupun konten website.
 - (3) *Maintenance* (perawatan/perbaikan). Aktivitas *maintenance* terkait dengan perawatan maupun perbaikan *software/website* ke kondisi semula agar dapat dioperasikan kembali.Setiap aktivitas *upgrade* dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB, sedangkan aktivitas *update* dan *maintenance* dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
- m. Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
 - a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
 - b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi;
 - c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- n. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;
- o. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - 1) Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
 - 2) Lisensi;
 - 3) Waralaba (*franchise*);
 - 4) Hak Cipta (*copyright*); dan
 - 5) Hak Paten.
- p. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak diamortisasi;
- q. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup;
- r. Metode Amortisasi untuk ATB menggunakan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis ATB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Nilai Amortisasi ATB

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	4 Tahun	25%
Lisensi	10 Tahun	10%
Waralaba (<i>Franchise</i>)	5 Tahun	20%
Hak Paten	10 Tahun	10%
Hak Cipta (<i>Copyright</i>)	50 Tahun	2%

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (*government- related events*);
 - d. kejadian yang diakui pemerintah daerah (*government- acknowledged events*).
4. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;
6. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
7. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya;
8. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
9. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
10. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

11. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang;
12. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

1. BLUD merupakan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai SKPD/Unit Kerja, BLUD menerapkan Kebijakan Akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan;
2. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
3. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
4. Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
5. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
6. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD;
 7. Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun. Dan sebagai entitas akuntansi, periode pelaporan mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Banten yang berlaku untuk seluruh entitas;
 8. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu;
 9. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit – LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan – LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Surplus/defisit – LRA;
 - 4) Penerimaan pembiayaan;
 - 5) Pengeluaran pembiayaan;
 - 6) Pembiayaan neto; dan
 - 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah Provinsi Banten;
 - d. SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan;
 - e. Pendapatan – LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - f. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan – LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan – LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD;
 - g. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu disebabkan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- i. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Provinsi Banten;
- k. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Provinsi Banten;
- l. Pendapatan – LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- m. Pendapatan – LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- n. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - 5) Pendapatan BLUD lainnya
- o. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 1) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- p. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya;
- q. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 3) adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- r. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 4) adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa;
- s. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 5), antara lain berupa:
 - 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - 2) jasa giro;
 - 3) pendapatan bunga;
 - 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau;
 - 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- t. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual;
- u. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari pembayaran jasa pelayanan masyarakat miskin;
- v. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- w. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;

- x. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
 - y. Selisih antara pendapatan – LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit;
 - z. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang;
 - aa. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - bb. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - cc. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - dd. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
 - ee. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
 - ff. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut;
 - gg. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ff adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD;
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - d. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari Kebijakan. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan;
11. Neraca
- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- b. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas;
 - 2) Investasi jangka pendek;
 - 3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - 4) persediaan;
 - 5) Investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) aset lainnya;
 - 8) kewajiban jangka pendek;
 - 9) kewajiban jangka panjang; dan
 - 10) ekuitas.
- c. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- d. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih;
- e. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- f. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD;
- g. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas;
- h. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g antara lain:
 - 1) Dana titipan pihak ketiga;
 - 2) Uang jaminan; dan
 - 3) Uang muka pasien rumah sakit.
- i. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya;
- j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah;
- k. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Gubernur. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen;
- l. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal;
- m. Investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - 3) Investasi nonpermanen lainnya.
- n. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD;
- o. BLUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

12. Laporan Operasional

- a. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;

- b. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan – LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan non operasional;
 - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa; dan
 - 7) Surplus/Defisit – LO.
- c. BLUD menyajikan pendapatan – LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Pendapatan – LO pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- f. Pendapatan – LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- g. Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- h. Pendapatan – LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- i. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- j. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- k. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- l. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- m. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas;
- n. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD;

- o. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- p. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- q. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi;

13. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD;

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;

a. Aktifitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai;
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga; dan
- 4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas;

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang;

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap;
- 2) Penjualan Aset Lainnya;
- 3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- 4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 3) dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 4) merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD;

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Penyertaan Modal;
- 4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf l angka 3), pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf i angka 4), dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf angka 5) merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pinjaman; dan
- 2) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf m angka 2) merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada Neraca;

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 2) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf p angka 2) merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

d. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

14. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
- a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan kedalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - c. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD;
 - d. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - e. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - f. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah;
 - g. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya;
 - h. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan;
16. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa
- a. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja/Unit Kerja pemerintah daerah;
 - b. Dalam hal satuan kerja/unit kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas:
2. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
4. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
7. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
8. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
9. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
10. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - e. Penerimaan Transfer.
 - f. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
11. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang dan jasa;
 - c. Pembayaran Bunga;
 - d. Pembayaran Subsidi;
 - e. Pembayaran Hibah;
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa/tak terduga; dan
 - h. Pembayaran Transfer.
12. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
13. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
14. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
15. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
16. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Pencairan Dana Cadangan;
 - d. Penerimaan dari Divestasi;
 - e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
17. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya;

- c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah;
 - e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.
18. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
 19. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
 20. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a. Penerimaan utang dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Penerimaan dari utang obligasi;
 - c. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
 21. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a. Pembayaran pokok utang dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Pembayaran pokok utang obligasi;
 - c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.
 22. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
 23. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, kiriman uang, dan transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
 24. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran serta transaksi penerimaan transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.
 25. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran serta transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.
 26. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
 27. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
 28. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 29. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 30. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
 31. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 32. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 33. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

34. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
35. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
36. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
37. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
38. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
39. Investasi pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
40. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
41. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
42. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
43. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.
44. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
46. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
47. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
48. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
49. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa

50. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
51. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra;
52. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;
53. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
54. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
55. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud;
56. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset;
57. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra;
58. Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi;
59. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan;
60. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
61. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban;
62. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra;

63. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa;
64. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur;
65. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi;
66. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran;
67. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan;
68. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
3. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
5. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut;
6. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan;
7. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);
8. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan;

9. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya;
10. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
11. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit;
12. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar;
13. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama;
14. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya;
15. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan;
16. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan;
17. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci;
18. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
19. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
20. Pengukuran setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
21. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten yang mengatur Aset Tetap;
22. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
23. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;

24. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya;
25. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui;
26. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut;
27. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas;
28. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti;
29. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
30. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi;
31. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
32. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa;
33. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan;
34. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;
35. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya;
36. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut;

37. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga;
38. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut;
39. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang;
40. Penyajian Laporan Keuangan Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar;
41. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya;
42. Dalam hal pengungkapan entitas mengungkapkan paling sedikit:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
 - f. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit.
43. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya;
44. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

BAB V
PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

5.1.1. Pendapatan – LRA Rp9.749.656.227.905

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp10.467.550.487.735 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.749.656.227.905 atau 93,14% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696	(29,79)
Pendapatan Transfer	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167	1,01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000	(0,73)
JUMLAH	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863	(21,40)

Tabel 5.1.1 di atas menunjukkan realisasi pendapatan Tahun 2025 menurun sebesar Rp2.654.346.897.958 atau 21,40% dibandingkan pendapatan tahun 2024. Penurunan jumlah pendapatan daerah terutama dikarenakan:

- 1. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak dengan mekanisme *split payment*, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sebelumnya, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota;
- 2. Tidak tercapainya target pendapatan terutama pada Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah.

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2. Pendapatan Asli Daerah Rp6.336.444.959.234

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37% dari target sebesar Rp6.934.779.242.245 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.024.828.260.696, realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat penurunan Rp2.688.383.301.462 atau berkurang 29,79%.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pajak Daerah	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.856	(33,12)
Retribusi Daerah	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.988.258	36,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739	(0,60)
Lain-lain PAD yang Sah	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843	30,95
JUMLAH	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696	(29,79)

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah Rp5.720.173.537.866

Rekening Pendapatan Pajak Daerah menampung sumber Pendapatan dari Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

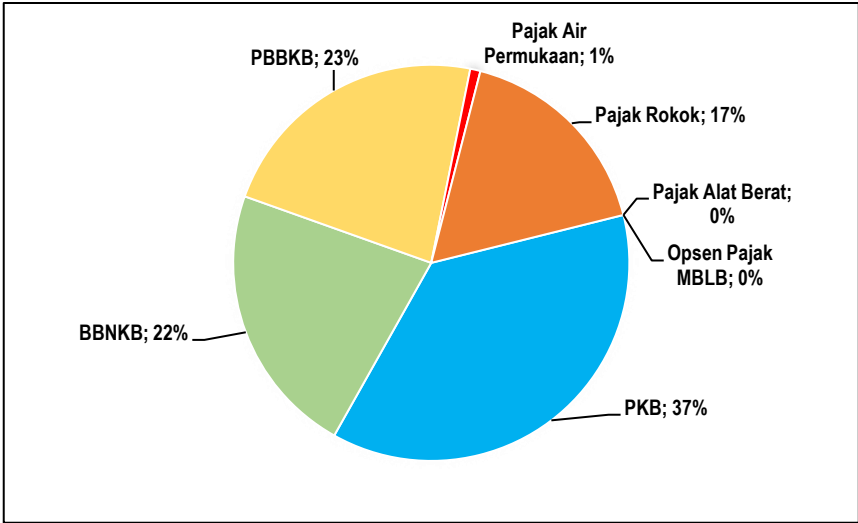
Realisasi Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp5.720.173.537.866 atau 91,47% dari target sebesar Rp6.253.493.581.987 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.552.409.195.856, realisasi Pajak Daerah berkurang Rp2.832.235.657.990 atau turun 33,12%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Pajak Daerah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PKB	2.183.554.967.000	2.112.638.943.700	96,75	3.570.962.779.800	(40,84)
BBNKB	1.627.134.122.550	1.272.028.812.300	78,18	2.676.106.930.100	(52,47)
PBBKB	1.347.285.989.000	1.295.383.786.757	96,15	1.307.931.401.139	(0,96)
Pajak Air Permukaan	44.176.880.000	47.446.353.000	107,40	43.583.445.000	8,86
Pajak Rokok	1.027.591.869.237	976.234.701.211	95,00	953.821.306.817	2,35
Pajak Alat Berat	66.205.200	131.120.400	198,05	3.333.000	3834,01
Opsen MBLB	23.683.549.000	16.309.820.498	68,87	-	0,00
JUMLAH	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.856	(33,12)

Grafik 5.1.1 Komposisi Pajak Daerah TA 2025



Adapun rincian jenis penerimaan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.112.638.943.700

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700 atau 96,75% dari target sebesar Rp2.183.554.967.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berkurang Rp1.458.323.836.100 atau turun 40,84%.

Tidak tercapainya target realisasi PKB tersebut diantaranya disebabkan:

1. Adanya penurunan tarif PKB untuk kendaraan dinas dan angkutan umum di Banten dari 1% menjadi 0,5%, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Perda tersebut menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang spesifik atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5%, menggantikan tarif progresif sebelumnya yang lebih tinggi, dengan tujuan mendukung sektor transportasi dan meringankan beban masyarakat;
2. Menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional dikarenakan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat yang dibebaskan dari objek PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
3. Adanya Pengurangan Pokok PKB sebesar 12,15% dari tarif pokok PKB yang telah ditetapkan sebesar 1,2% dan/atau tarif progresif yang dikenakan kepada wajib pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Melakukan Intensifikasi/tindak lanjut status 8 (wajib pajak siap membayar) berdasarkan hasil penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), yang kemudian dilakukan Penagihan di masing-masing UPTD;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Razia Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD;
- c. Optimalisasi Pelayanan Samsat Induk, Samling dan Gerai di masing-masing UPTD melalui penambahan Jam Pelayanan;
- d. Pelaksanaan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor (Penghargaan Pajak Award) yang berlangsung pada 24 November 2025 sampai dengan 20 Desember 2025;
- e. Penyampaian Informasi Pajak melalui WA Blast;
- f. Sinergitas Pendataan dan Penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.272.028.812.300

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300 atau 78,18% dari target sebesar Rp1.627.134.122.550 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkurang Rp1.404.078.117.800 atau turun 52,47%.

Tidak tercapainya target realisasi pendapatan pajak BBNKB tersebut diantaranya disebabkan:

1. Menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional dikarenakan meningkatnya pembelian kendaraan listrik oleh Masyarakat yang dibebaskan dari objek BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
2. Dibatasinya objek Pajak BBNKB hanya pada penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya tidak lagi menjadi objek Pajak BBNKB sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Adanya Pengurangan Pokok BBNKB sebesar 37,25% dari tarif pokok BBNKB yang telah ditetapkan sebesar 12% yang dikenakan kepada wajib pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Berperan serta dalam Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 30 November 2025 di ICE BSD City, dan Turut berperan serta dalam Event-Event Adira Expo 2025;

- b. Melakukan koordinasi Tim Pembina Samsat terkait Percepatan Proses Kendaraan Baru/BBN I;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dealer atau Asosiasi Otomotif Banten (AOB) yang ada di Provinsi Banten, melalui Percepatan Proses STNK dan BBN I (kendaraan baru) di Samsat;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Angkutan, khususnya Taxi di Tangerang Selatan.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.295.383.786.757

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp1.295.383.786.757 atau 96,15% dari target sebesar Rp1.347.285.989.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.307.931.401.139, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkurang Rp12.547.614.382 atau turun 0,96%.

Tidak tercapainya target PBBKB diantaranya disebabkan Penerapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

- 1. Adanya Pengurangan Pokok PBBKB sebesar 50% dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB yang digunakan untuk kendaraan pribadi dan/atau alat berat;
- 2. Adanya Pengurangan Pokok PBBKB sebesar 80% dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB yang digunakan untuk operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka sinergitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBBKB;
- b. Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh wajib PBBKB se-Povinsi Banten dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten sekaligus mengedukasi seluruh Wajib PBBKB untuk selalu taat membayar pajak.

4) Pajak Air Permukaan (PAP) Rp47.446.353.000

Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2025 sebesar Rp47.446.353.000 atau 107,40% dari target sebesar Rp44.176.880.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp43.583.445.000, realisasi Pajak Air Permukaan bertambah Rp3.862.908.000 atau naik 8,86%.

Pelampauan target realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap potensi PAP dan melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
- b. Melakukan penertiban terhadap perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum menjadi wajib pajak dan belum memiliki Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) agar segera mendaftar sebagai wajib pajak Air Permukaan dengan melengkapi

persyaratan seperti tercantum pada Peraturan Gubernur Banten nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Menerbitkan SK Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- d. Melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Orang Pribadi/Badan Usaha yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum memiliki SIPA tetapi sudah memiliki SK NPWPD;
- e. Menyampaikan kepada wajib pajak Air Permukaan agar segera mengurus perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air jika masa berlakunya sudah habis;
- f. Berkoordinasi dengan wajib pajak Air Permukaan agar dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan harus sesuai dengan nilai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk mencegah terjadinya lebih bayar atau kurang bayar;
- g. Melakukan penagihan piutang Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak apabila memiliki piutang;
- h. Melakukan penetapan SKPD bagi wajib pajak baru dan sudah memiliki NPWPD; dan
- i. Berkoordinasi dengan wajib pajak AP agar membayar tagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

5) Pajak Rokok **Rp976.234.701.211**

Realisasi Pajak Rokok TA 2025 sebesar Rp976.234.701.211 atau 95,00% dari target sebesar Rp1.027.591.869.237 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp953.821.306.817, realisasi Pajak Rokok bertambah Rp22.413.394.394 atau naik 2,35%.

Tidak tercapainya target dikarenakan realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto.

6) Pajak Alat Berat **Rp131.120.400**

Realisasi Pajak Alat Berat TA 2025 sebesar Rp131.120.400 atau 198,05% dari target sebesar Rp66.205.200 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.333.000, realisasi Pajak Alat Berat bertambah Rp127.787.400 atau naik 3.834,01%.

Pelampauan target realisasi Pajak Alat Berat (PAB) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

1. Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan Pajak Alat Berat;
2. Sosialisasi Peraturan Pajak Alat Berat diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah; dan

e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait data alat berat di seluruh perusahaan se-Provinsi Banten;
5. Melaksanakan koordinasi dengan BAPENDA dan BPKAD/BPKD/BKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang memiliki penerimaan pajak MBLB guna mendapatkan data WP MBLB, dimana WP MBLB tentu memiliki Alat Berat yang juga seharusnya menjadi WP PAB;
6. melakukan Pendataan Potensi Alat Berat di setiap wilayah UPTD PPD.

7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MBLB) Rp16.309.820.498

Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 sebesar Rp16.309.820.498 atau 68,87% dari target sebesar Rp23.683.549.000.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Opsen Pajak MBLB merupakan sumber pendapatan yang baru diterapkan di Tahun 2025, sehingga masih terdapat penyesuaian aturan dan proses di lapangan, dimana realisasi Opsen Pajak MBLB sangat bergantung pada efektifitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memungut Pajak MBLB.

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp326.976.698.150

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp326.976.698.150 atau 113,57% dari target sebesar Rp287.906.730.367 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp238.989.988.258, realisasi Retribusi Daerah bertambah Rp87.986.709.893 atau naik 36,82%.

Peningkatan realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, diantaranya:

1. Optimalisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah seperti sewa Banten International Stadium (BIS), Kawasan KP3B, Situ atau Danau, dan Penyewaan Barang Milik Daerah untuk Perbankan;
2. Melakukan sosialisasi melalui media online, media cetak, maupun media luar ruang untuk memperkenalkan layanan-layanan Retribusi yang disediakan Provinsi Banten;
3. Memfasilitasi Bina Konsumen (Calon Konsumen dan Pelanggan) terhadap Layanan dan Kebijakan;
4. Melaksanakan inventarisasi aset daerah yang dapat di dimanfaatkan, sebagai sumber Pendapatan Retribusi Daerah (pemanfaatan aset situ, bangunan yang tidak dimanfaatkan, serta lahan yang kosong);
5. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait pengelola retribusi dalam rangka inventarisir permasalahan yang ada, dan bersama-sama melakukan upaya penyelesaiannya.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Retribusi Jasa Umum	275.500.560.000	310.614.687.336	112,75	228.658.468.898	35,84
Retribusi Pelayanan Kesehatan	275.500.560.000	310.614.687.336	112,75	228.658.468.898	35,84
Retribusi Jasa Usaha	10.246.170.367	14.145.231.962	138,05	8.634.759.600	63,82
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	21.000.000	25.000.000	119,05	22.000.000	13,64
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.689.456.824	2.251.346.134	133,26	7.555.847.600	(70,20)
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	772.258.000	703.820.932	91,14	346.434.500	103,16
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	86.370.000	95.163.000	110,18	57.187.000	66,41
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.187.543.500	1.664.261.500	140,14	603.318.000	175,85
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.489.542.043	9.405.640.396	144,94	49.972.500	18.721,63
Retribusi Perizinan Tertentu	2.160.000.000	2.216.778.852	102,63	1.696.759.760	30,65
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.160.000.000	2.216.778.852	102,63	1.696.759.760	30,65
JUMLAH	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.988.258	36,82

Adapun Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Jasa Umum** **Rp310.614.687.336**
- Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp310.614.687.336 atau 112,75% dari target sebesar Rp275.500.560.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp228.658.468.898, realisasi Retribusi Jasa Umum bertambah Rp81.956.218.439 atau naik 35,84%.
- Retribusi Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 seluruhnya bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdapat pada beberapa UPTD dan BLUD di Dinas Kesehatan, yaitu:
1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten dengan realisasi sebesar Rp2.129.466.000 atau 121,68% dari target sebesar Rp1.750.000.000 dengan kontribusi utama bersumber dari realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.081.970.000 atau 132,23% dari target sebesar 1.574.560.000;

2. BLUD RSUD Banten dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp238.977.528.683 atau 113,15% dari target sebesar Rp211.200.000.000;

3. BLUD RSUD Malingping dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp56.377.299.245 atau 108,97% dari target sebesar Rp51.736.000.000.

4. BLUD RSUD Ciligrang dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp4.091.468.443 atau 102,54% dari target sebesar Rp3.990.000.000;

5. BLUD RSUD Labuan dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.086.420.965 atau 129,81% dari target sebesar Rp7.000.000.000.

Pelampauan tersebut dikarenakan:

1. Terdapat peningkatan retribusi melalui kegiatan MCU calon mahasiswa baru POLTEKKES Banten di bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025;
2. Terdapat pemeriksaan Narkotika yang signifikan pada bulan-bulan tertentu;
3. Telah dilakukan kerjasama antara Labkesda Banten dengan 3 (Tiga) Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, serta Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Banten dalam pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, sehingga secara rutin dan berkala specimen hadir dan diperiksa di Labkesda Banten;
4. Meningkatnya frekuensi jadwal kegiatan Prolanis dengan beberapa PKM di Kabupaten Serang.
5. Meningkatnya jumlah klaim BPJS Kesehatan melalui pengembangan layanan medis dan penunjang serta perbaikan casemix yang berdampak pada tingginya nilai klaim BPJS Kesehatan di RSUD Malingping dan RSUD Ciligrang pada TA 2025;
6. Adanya peningkatan sarana, prasarana, serta tenaga medis dokter spesialis sehingga meningkatkan pelayanan terhadap pasien dan klaim yang lebih tinggi;
7. Tingginya antusias masyarakat untuk berobat di RSUD Labuan dikarenakan Lokasi RSUD Labuan yang strategis dan sarana prasarana serta jumlah dokter spesialis yang memadai;
8. Adanya klaim covid yang di bayarkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan hasil revidi BPKP terkait klaim kedaluwarsa dibuka Kembali untuk tahun layanan 2020, 2021, dan 2022 pada RSUD Banten.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Rp14.145.231.962

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp14.145.231.962 atau 138,05% dari target sebesar Rp10.246.170.367 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.634.759.600, realisasi Retribusi Jasa Usaha bertambah Rp5.510.472.362 atau naik 63,82%.

Pelampauan target terutama bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

a) **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila** **Rp25.000.000**

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila TA 2025 sebesar Rp25.000.000 atau 119,05% dari target sebesar Rp21.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp22.000.000, realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila bertambah Rp3.000.000 atau naik 13,64%.

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diterima/dipungut dan dicatat oleh Badan Penghubung Provinsi Banten yang merupakan hasil dari penyewaan kamar di Wisma Banten.

b) **Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya** **Rp2.251.346.134**

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya TA 2025 sebesar

Rp2.251.346.134 atau 133,26% dari target sebesar Rp1.689.456.824 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.555.847.600, realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berkurang Rp5.304.501.466 atau turun 70,20%.

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diterima/dipungut dan dicatat oleh 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana sebanyak 8 dari 9 Perangkat Daerah berhasil mencapai target realisasi Retribusi tersebut. 9 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp440.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp2.700.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, dengan realisasi Sebesar Rp9.375.000 Atau 133,93% dari Target Sebesar Rp7.000.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin. Pelampauan target tersebut karena adanya penambahan luasan ruang usaha yang disewa oleh subjek retribusi yang diperuntukkan sebagai ruang saji, sehingga menambah nilai sewa dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa objek retribusi berbasis sewa ruang usaha di lingkungan BPSDMD memiliki potensi yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan pemanfaatan ruang yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penyewa;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp333.408.200 Atau 142,83% Dari Target Sebesar Rp233.437.800 yang diantaranya merupakan hasil dari penyewaan kantin di DPUPR, Kantin di Danau KP3B, tempat usaha (tenant) di Situ Cipondoh, tempat usaha di Pasar Rajeg, dan tempat usaha di Sepatan. Pelampauan target tersebut diantaranya karena:
 - (a) Terdapat Perusahaan (PT Ghi Gha Company) yang melakukan pembayaran retribusi secara sekaligus untuk periode 4 tahun (2022-2025). Pembayaran tersebut mencakup 10 titik billboard yang dimiliki Perusahaan yang sebelumnya tidak teranggarkan;
 - (b) Terdapat wajib retribusi baru yaitu PT. Jesclean Hidro Power yang memulai konstruksi di area sempadan Sungai Ciliman untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan Sungai Cilemer untuk Pariwisata Curug Goong yang sebelumnya tidak teranggarkan;
 - (c) Terdapat penambahan penyewaan diluar PKS dan MoU dalam rangka peminjaman Banten International Stadium untuk pertandingan liga 1 dan liga 2 2025/2026 secara rutin sesuai dengan jadwal PSSI serta pemanfaatan BMD Situ Cipondoh.
5. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp11.780.000 atau 87,78% dari target sebesar Rp13.420.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin di Disnakertrans dan UPTD Latihan Kerja Disnakertrans. Tidak tercapainya target diantaranya karena adanya penyewa yang tidak memperpanjang sewa tempat usaha;

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp6.120.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.680.000 atau 109,09% dari target sebesar Rp1.540.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.686.020.054 Atau 132,06% dari target sebesar Rp1.276.721.814 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin SMAN/SMKN/SKhN se-Provinsi Banten.
9. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp199.822.880 atau 134,95% dari target sebesar Rp148.077.210 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin di Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kantin di Bappeda, serta Kantin dan Fotocopy di Bapenda, Samsat Bapenda, dan BPKAD.

Pada TA 2025 terdapat perubahan nomenkelatur sub rekening objek yang sebelumnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi dua sub rekening objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; dan
- (2) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila.

c) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Rp703.820.932

Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2025 sebesar Rp703.820.932 atau 91,14% dari target sebesar Rp772.258.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp346.434.500, realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan bertambah Rp357.386.432 atau naik 103,16%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tidak tercapainya target dikarenakan pada UPT PPP Labuan terdapat docking kapal yang peralatannya mengalami kerusakan diantaranya roda dan rel untuk menarik kapal dari laut ke darat tidak berfungsi.

d) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Rp95.163.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp95.163.000 atau 110,18% dari target sebesar Rp86.370.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp57.187.000, realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga bertambah Rp37.976.000 atau naik 66,41%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diterima/dipungut dan dicatat oleh perangkat daerah sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp0 dari target sebesar Rp600.000. Tidak tercapainya realisasi disebabkan oleh rendahnya minat konsumen terhadap fasilitas

- olahraga yang tersedia di BPSDMD Provinsi Banten, seperti lapangan bulutangkis dan lapangan tenis, karena kondisi lapangan yang belum memenuhi standar;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp41.100.000 atau 135,78% dari target sebesar Rp30.270.000. Pelampauan target dikarenakan meningkatnya volume penyewaan tempat olahraga DPUPR Provinsi Banten oleh masyarakat;
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp51.233.000 atau 103,5% dari target sebesar Rp49.500.000. Pelampauan target dikarenakan meningkatnya kunjungan wisata Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dikelola oleh DLHK Provinsi Banten ; dan
 4. Dinas Pertanian Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp2.830.000 atau 47,17% dari target sebesar Rp6.000.000. tidak tercapainya target disebabkan pada TA 2025 banyak dilakukan Pemeliharaan terhadap Kandang Hewan di UPT PPPT Sitandu sehingga kunjungan wisata edukasi sempat ditutup sementara.

e) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Rp1.664.261.500
Pemerintah Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah TA 2025 sebesar Rp1.664.261.500 atau 140,14% dari target sebesar Rp1.187.543.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp603.318.000, realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah bertambah Rp1.060.943.500 atau naik 175,85%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Hasil Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp88.154.000 atau 73,62% dari target sebesar Rp119.750.000. tidak tercapainya target diantaranya dikarenakan:
 1. Produksi ikan berkurang disebabkan pasokan air terhambat karena adanya perbaikan aliran air sungai besar;
 2. Menurunnya penjualan ikan konsumsi;
 3. hasil benih banyak dihibahkan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan.
2. Dinas Pertanian Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.576.107.500 atau 147,60% dari target sebesar Rp1.067.793.500. Realisasi tersebut bersumber dari Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak) sebesar Rp567.762.500 dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (UPTD PPV) sebesar Rp 1.008.345.000. Pelampauan target diantaranya karena:
 1. Harga jual baik produk ternak (telur dan susu) maupun ternak lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran;
 2. Adanya peningkatan kelahiran ternak dan peningkatan produksi produk hasil ternak;
 3. Pelanggan yang datang ke UPTD PPV meningkat baik pelayanan laboratorium maupun Rumah Sakit Hewan (RSH);
 4. Sarana di Rumah Sakit Hewan meningkat (terdapat USG, X-Ray dan

- penunjang lainnya);
5. Ruang lingkup akreditasi pengujian bertambah (penambahan kemampuan pengujian dan peningkatan kompetensi penguji);
 6. Penerapan pembayaran dengan Qris.

f) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp9.405.640.396

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 sebesar Rp9.405.640.396 atau 144,94% dari target sebesar Rp6.489.542.043 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp49.972.500, realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah bertambah Rp9.355.667.896 atau naik 18.721,63%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diterima/dipungut dan dicatat oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan – UPTD Labkesda, dengan realisasi sebesar Rp 47.056.000 atau 26,89% dari target sebesar Rp175.000.000. Tidak tercapainya target dikarenakan terdapat potensi pendapatan dari layanan unggulan Labkesda Banten yang tidak diatur dalam regulasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti layanan kalibrasi, Magang/Praktek Kerja Lapangan, dan penelitian bagi mahasiswa. Sehingga layanan tersebut tidak dapat dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan.
2. Badan Penghubung, dengan realisasi sebesar Rp11.000.000 atau 125% dari target sebesar Rp8.800.000. Pelampauan target dikarenakan tingginya permintaan sewa ruang rapat di Wisma Banten;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp544.145.000 atau 110,63% dari target sebesar Rp491.850.000. Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa Mutu Pakan Ternak (UPTD P3T) sebesar Rp238.985.000 dan pemanfaatan aset daerah lainnya sebesar Rp305.160.000. Pelampauan target tersebut diantaranya karena:
 - (a) Menjalin Kerjasama Pelayanan Pengujian melalui MoU dengan UPT BPPMHKP KKP yang berlokasi di Bandara Soekarno Hata dan SKIPM Merak;
 - (b) Adanya realisasi dari Sewa Bangunan Permanen dan gedung TPI Binuangeun yang sebelumnya tidak ditargetkan;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan realisasi sebesar Rp180.450.000 atau 91% dari target sebesar Rp198.300.000. Tidak tercapainya target disebabkan Aset daerah yang dimiliki khususnya ruang kelas, asrama, guest house, dan aula lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan, terutama bagi peserta pelatihan yang berasal dari kabupaten/kota, instansi vertikal, serta instansi lainnya, sehingga pemanfaatan aset untuk tujuan komersial (objek retribusi) menjadi terbatas.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan realisasi sebesar Rp6.245.664.250 atau 155,10% dari target sebesar Rp4.026.757.000 yang bersumber dari:
 - (a) pemanfaatan aset daerah berupa Pemakaian Bahu Jalan sebesar Rp2.093.476.000;

- (b) Pengujian Bahan sebesar Rp371.155.000;
- (c) Pengujian Konstruksi sebesar Rp1.051.775.000;
- (d) Pemanfaatan Sempadan SDA sebesar Rp 85.501.000; dan
- (e) Pemanfaatan Aset Daerah lainnya sebesar Rp2.508.608.000.

Pelampauan target tersebut diantaranya karena:

- (a) Adanya peningkatan permintaan pengujian *quality control* pada kegiatan dibidang kebinamargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (b) Adanya peningkatan permintaan pengujian kuat tekan paving blok;
- (c) Adanya peningkatan permohonan pengujian bahan baik dari sektor pemerintahan seperti pekerjaan pembangunan Kementerian PUPR dan pembangunan jalan tol maupun dari pihak swasta; dan
- (d) Banyaknya permintaan penggunaan alat berat untuk membuka lahan program ketahanan pangan dan penanggulangan bencana alam.

6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dengan realisasi sebesar Rp26.000.000 atau 152,94% dari target sebesar Rp17.000.000 yang bersumber dari penyewaan aula/ ruangan pelatihan pada UPTD Latihan Kerja. target pendapatan tahun 2025 mengalami penyesuaian dikarenakan beberapa ruangan pelatihan pada UPTD Latihan Kerja dimanfaatkan menjadi sekolah rakyat.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan realisasi sebesar Rp254.788.500 atau 91,06% dari target sebesar Rp279.800.000; Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa:
 - (a) Pemanfaatan Aset Daerah (Laboratorium) sebesar Rp246.512.500; dan
 - (b) Pemanfaatan Aset Daerah (Taman Hutan Raya) sebesar Rp8.276.000.
8. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi sebesar Rp12.000.000 atau 240% dari target sebesar Rp5.000.000. pelampauan target tersebut dikarenakan adanya peningkatan permintaan masyarakat atas layanan sewa mobil toilet portable, seiring meningkatnya jumlah pertandingan olah raga dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Banten;
9. Badan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp1.786.461.646 atau 166% dari target sebesar Rp1.076.165.043. Realisasi bersumber dari perpanjangan sewa aset untuk Lahan ATM, Kantor Kas Bank Banten, BJB, dan BRI yang habis masa perjanjiannya pada tahun 2025. Pelampauan target tersebut dikarenakan adanya penambahan sewa kantor pusat Bank Banten dan kantor cabang Bank Banten yang sebelumnya direncanakan sebagai inbreng pada bank banten, namun proses inbreng belum selesai pada tahun 2025.
10. Dinas Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp232.830.000 atau 139,95% dari target sebesar Rp166.370.000. Pelampauan target tersebut dikarenakan:
 - (a) Ruang lingkup akreditasi pengujian bertambah (penambahan kemampuan pengujian dan peningkatan kompetensi penguji)
 - (b) Sudah terakreditasinya Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak ISO 17025: 2018 dan ISO 9001:2015;

- (c) Meningkatnya Pelanggan yang datang ke UPT Pelayanan dan Pengujian Veteriner (PPV), baik pelayanan laboratorium maupun klinik hewan;
 - (d) Adanya peningkatan pengawasan dan audit Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di unit usaha sehingga unit usaha banyak yang mengirimkan sampel uji laboratorium di UPTD PPV; dan
 - (e) Manajemen UPTD PPV memberikan pelayanan secara proaktif dan mempermudah cara pembayaran ke pelanggan dari bendahara UPT.
11. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dengan realisasi sebesar Rp65.245.000 atau 146,62% dari target sebesar Rp44.500.000. Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa:
- (a) Pelayanan Rumah Kemasan oleh UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (PTSI) sebesar Rp57.000.000; dan
 - (b) Pemanfaatan Aset Daerah Lainnya oleh UPTD PTSI sebesar Rp8.245.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp2.216.778.852

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebesar Rp2.216.778.852 atau 102,63% dari target sebesar Rp2.160.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.696.759.760, realisasi Retribusi Perizinan Tertentu bertambah Rp520.019.092 atau naik 30,65%.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 seluruhnya bersumber dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pelampauan target tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang semula pada tahun 2024 berjumlah 93 orang TKA menjadi 114 orang TKA pada tahun 2025.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp51.598.879.729

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan dividen yang diterima dari investasi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp51.598.879.729 atau 104,36% dari target sebesar Rp49.444.843.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp51.909.734.739, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang Rp310.855.010 atau turun 0,60%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk.	44.380.285.224	44.380.285.224	100,00	49.482.065.813	(10,31)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	734.609.134	2.888.645.863	393,20	2.427.668.926	18,99
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	4.329.948.642	4.329.948.642	100,00	-	0,00
JUMLAH	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739	(0,60)

Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Rp44.380.285.224

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. TA 2025 sebesar Rp44.380.285.224 atau 100% dari target sebesar Rp44.380.285.224 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp49.482.065.813, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. berkurang Rp5.101.780.589 atau turun 10,31%.

2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Rp 2.888.645.863

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2025 sebesar Rp2.888.645.863 atau 393,2% dari target sebesar Rp734.609.134 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.427.668.926, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK bertambah Rp460.976.937 atau naik 18,99%.

Tabel rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2025 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PT. BPR BERKAH	44.198.349	60.504.259	(26,95)
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	-	2.900	(100,00)
PT. LKM RANGKASBITUNG	19.785.311	19.455.276	1,70
PT. BPR LEBAK SEJAHTERA	84.660.172	106.928.054	(20,83)
PT. BPR SERANG	2.049.590.915	1.716.744.179	19,39
PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG	690.411.116	524.034.258	31,75
PT. BPR LPK BERKAH KAB. PANDEGLANG	-	-	-
JUMLAH	2.888.645.863	2.427.668.926	18,99

3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten Rp4.329.948.642

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT. Jamkrida Banten TA 2025 sebesar Rp4.329.948.642. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

Rp0, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.Jamkrida Banten bertambah Rp4.329.948.642 atau naik 100%.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp237.695.843.489**

Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp237.695.843.489 atau 69,11% dari target sebesar Rp343.934.086.891 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp181.519.341.843, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah Rp56.176.501.646 atau naik 30,95%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.592.698.600	2.063.474.900	129,56	1.064.385.900	93,87
Hasil Kerja Sama Daerah	6.687.190.000	7.050.778.000	105,44	6.566.193.200	7,38
Jasa Giro	17.064.710.000	19.610.625.109	114,92	20.983.882.679	(6,54)
Pendapatan Bunga	428.715.632	428.715.632	100,00	4.909.702.882	(91,27)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	103.181.450	441.700.307	428,08	558.961.572	(20,98)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	66.501.985	111.346.114	167,43	133.726.463	(16,74)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.131.145	1.354.883.748	4.816,31	2.699.948.075	(49,82)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	137.355.870.027	23.366.145.489	17,01	129.571.115.205	(81,97)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.541.260	-	33.624	28.276,34
Pendapatan Dari Pengembalian	178.783.088.052	180.557.293.511	100,99	2.171.897.700	8.213,34
Pendapatan BLUD	1.824.000.000	2.701.339.420	148,10	2.319.539.021	16,46
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	10.539.955.522	(100,00)
JUMLAH	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843	30,95

Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan **Rp2.063.474.900**

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp2.063.474.900 atau 129,56% dari target sebesar Rp1.592.698.600 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.064.385.900, realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan bertambah Rp999.089.000 atau naik 93,87%.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/ Usang). Pelampauan target pada TA 2025 disebabkan meningkatnya lelang bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten (sekolah, gedung, dll).

- 2)

Hasil Kerja Sama Daerah

Rp7.050.778.000
- Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 sebesar Rp7.050.778.000 atau 105,44% dari target sebesar Rp6.687.190.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.566.193.200, realisasi Hasil Kerja Sama Daerah bertambah Rp484.584.800 atau naik 7,38%.

Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 bersumber dari Fasilitas Pelatihan (diklat) di BPSDMD yang sebelumnya dikategorikan sebagai pendapatan Retribusi.
- 3)

Jasa Giro

Rp19.610.625.109
- Realisasi Jasa Giro TA 2025 sebesar Rp19.610.625.109 atau 114,92% dari target sebesar Rp17.064.710.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.983.882.679, realisasi Jasa Giro berkurang Rp1.373.257.570 atau turun 6,54%.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2025 antara lain bersumber dari:

(a)

Jasa Giro pada Kas Daerah (RKUD Provinsi Banten) sebesar Rp16.643.770.461,55 atau 115,06% dari target sebesar Rp14.464.710.000; dan

(b)

Jasa Giro pada Kas di Bendahara (Rekening Giro Pemerintah Provinsi Banten lainnya) sebesar Rp2.966.854.647,46 atau 114,11% dari target sebesar Rp2.600.000.000;

Realisasi jasa Giro dihitung berdasarkan saldo akhir harian dengan tingkat bunga per tahun sebesar 2,5%. Realisasi tersebut sudah termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2024, namun belum termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2025 yang diakui sebagai piutang Jasa Giro TA 2025.

Penurunan realisasi TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan Jasa Giro mengikuti jumlah saldo pada RKUD.
- 4)

Pendapatan Bunga

Rp428.715.632
- Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 sebesar Rp428.715.632 atau 100,00% dari target sebesar Rp428.715.632 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.909.702.882, realisasi Pendapatan Bunga berkurang Rp4.480.987.250 atau turun 91,27%.

Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang ditempatkan pada Bank Indonesia pada 29 Desember 2024.

Penurunan Pendapatan Bunga TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan saldo TDF pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan saldo TDF pada TA 2024, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
- 5)

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Rp441.700.307
- Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 sebesar Rp441.700.307 atau 428,08% dari target sebesar Rp103.181.450 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp558.961.572, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berkurang Rp117.261.265 atau turun 20,98%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025

Pelampauan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Tahun Anggaran 2025 di karenakan upaya optimalisasi penagihan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp111.346.114 atau 167,43% dari target sebesar Rp66.501.985 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp133.726.463, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain berkurang Rp22.380.350 atau turun 16,74%. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari transaksi kelebihan setoran retribusi, pajak, serta denda keterlambatan pelaporan PBBKB, serta penerimaan-penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada kode rekening lainnya.

Pendapatan Denda tersebut bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah. Pelampauan target Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 disebabkan adanya paket pekerjaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten yang belum dilaksanakan secara tepat waktu.

- (a) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp21.535.014.473 atau 15,87% dari target sebesar Rp135.709.688.543. Realisasi tersebut terutama dari Pendapatan Denda PKB Mobil Penumpang Minibus sebesar Rp11.045.155.200, Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp4.703.983.800, dan Mobil Penumpang Jeep sebesar Rp2.271.556.800.
- (b) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan realisasi sebesar Rp413.154.300,00 atau 161,76% dari target sebesar Rp255.414.300. Realisasi tersebut terutama dari Pendapatan Denda BBNKB Mobil Barang/ Beban Light Truck sebesar Rp116.019.000, Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp 89.418.800, dan Mobil Penumpang Minibus sebesar Rp77.060.500. Pelampauan Denda BBNKB khususnya pada mobil barang (light truck), sepeda motor roda dua, dan minibus dikarenakan banyak pemilik

kendaraan/pihak dealer yang tidak segera melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan setelah transaksi pembelian, sehingga dikenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda BBNKB.

- (c) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan realisasi sebesar Rp1.384.039.131 atau 100,23% dari target sebesar Rp1.380.798.562.
- (d) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan dengan realisasi sebesar Rp6.885.900 atau 331,28% dari target sebesar Rp2.078.600. pelampauan tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang terlambat membayarkan kewajibannya.

9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp9.541.260

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp9.541.260 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp33.624, realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bertambah Rp9.507.636 atau naik 28.276,34%.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 bersumber dari:

- (a) Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dengan realisasi sebesar Rp29.600;
- (b) Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp9.511.660.

10) Pendapatan Dari Pengembalian Rp180.557.293.511

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2025 sebesar Rp180.557.293.511 atau 100,99% dari target sebesar Rp178.783.088.052 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.171.897.700, realisasi Pendapatan Dari Pengembalian bertambah Rp178.385.395.811 atau naik 8.213,34%.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari:

- (a) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp22.740.820 atau 126,02% dari target sebesar Rp18.044.820;
- (b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp184.913.261 atau 221,39% dari target sebesar Rp83.523.523;
- (c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp2.047.905.062,50 atau 101,63% dari target sebesar Rp2.015.137.163;
- (d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa dengan realisasi sebesar Rp125.035.950 dari target sebesar Rp0;
- (e) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp7.000.000 atau 140% dari target sebesar Rp5.000.000;
- (f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp174.041.840.897 atau 100% dari target sebesar Rp174.041.840.897 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) KPU sebesar Rp149.384.281.340;
 - (2) Bawaslu sebesar Rp24.657.011.981;
 - (3) Sisa dana hibah Pilkada sebesar Rp47.576;

- (4) Pendapatan dari pengembalian belanja Kwarda sebesar Rp500.000.
- (g) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan realisasi sebesar Rp47.802.024 atau 100% dari target sebesar Rp47.802.024;
- (h) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan realisasi sebesar Rp 2.204.500.000 atau 100,07% dari target sebesar Rp 2.203.000.000;
- (i) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp 1.116.886.000 atau 558,44% dari target sebesar Rp200.000.000;
- (j) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan dengan realisasi sebesar Rp175.610.808,12 dari target sebesar Rp0;
- (k) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi dengan realisasi sebesar Rp9.727.997 dari target sebesar Rp0;
- (l) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp 827.000 dari target sebesar Rp0;
- (m) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp307.809.425 atau 182,42% dari target sebesar Rp168.739.625;
- (n) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP dengan realisasi sebesar Rp176.324.643 dari target sebesar Rp0;
- (o) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dengan realisasi sebesar Rp 88.369.623,13 dari target sebesar Rp0.

11) Pendapatan BLUD

Rp2.701.339.420

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 sebesar Rp2.701.339.420 atau 148,10% dari target sebesar Rp1.824.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.319.539.021, realisasi Pendapatan BLUD bertambah Rp381.800.399 atau naik 16,46%.

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 bersumber dari:

- (a) Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dengan realisasi sebesar Rp1.841.926.175,29 atau 171,50% dari target sebesar Rp1.074.000.000;
- (b) Lain-Lain Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp859.413.244,89 atau 114,59% dari target sebesar Rp750.000.000. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp822.688.309,89 dan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD sebesar Rp36.724.935.

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Rp0

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.539.955.522.

Hal ini dikarenakan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 telah dikelompokkan dalam pendapatan atas pengembalian

belanja berkenaan.

5.1.1.3. Pendapatan Transfer

Rp3.406.827.664.671

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61% dari target sebesar Rp3.526.424.482.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.372.744.305.167, realisasi Pendapatan Transfer terdapat kenaikan Rp34.083.359.504 atau bertambah 1,01%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167	1,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)
JUMLAH	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167	1,01

Adapun penjelasan rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp3.400.338.371.671

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp3.400.338.371.671 atau 96,60% dari target sebesar Rp3.519.935.189.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.353.124.323.167, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah Rp47.214.048.504 atau naik 1,41%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.124.231.784.000	988.082.231.100	87,89	994.434.626.000	(0,64)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.640.869.000	6.761.789.300	88,50	7.388.386.000	(8,48)
DBH PPh Pasal 21	1.074.805.005.000	944.663.936.800	87,89	942.425.758.000	0,24
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	39.770.965.000	34.691.792.000	87,23	38.719.273.000	(10,40)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	0,00	13.420.000	(100,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	530.228.000	488.386.000	92,11	552.270.000	(11,57)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	409.832.000	401.440.000	97,95	377.914.000	6,23
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.406.000	1.407.000	100,07	2.885.376.000	(99,95)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	166.605.000	166.606.000	100,00	259.794.000	(35,87)
DBH Sawit	906.874.000	906.874.000	100,00	1.812.435.000	(49,96)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.167.199.457.000	1.146.642.838.212	98,24	1.146.248.432.968	0,03
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	809.119.261.000	809.039.537.900	99,99	984.894.795.000	(17,86)

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	358.080.196.000	337.603.300.312	94,28	161.353.637.968	109,23
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	218.133.328.000	197.656.432.312	90,61	14.443.947.968	1268,44
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	94.757.611.000	94.757.611.000	100,00	134.395.612.000	(29,49)
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	45.189.257.000	45.189.257.000	100,00	12.514.078.000	261,11
Dana Alokasi Khusus (DAK) :	1.228.503.948.000	1.265.613.302.359	103,02	1.212.441.264.199	4,39
Dana Alokasi Khusus Fisik	123.222.552.000	119.572.322.275	97,04	151.638.021.459	(21,15)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.105.281.396.000	1.146.040.980.084	103,69	1.060.803.242.740	8,04
JUMLAH	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167	1,41

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp988.082.231.100

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp988.082.231.100 atau 87,89% dari target sebesar Rp1.124.231.784.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp994.434.626.000, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang Rp6.352.394.900 atau turun 0,64%.

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025, dan mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Realiasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil tidak mencapai target karena:

1. Penyaluran dana transfer DBH Pajak (DBH PPh 21, DBH PPh 25/29 dan DBH PBB) pada bulan desember tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf F Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana lokasi Umum bahwa Periode penyaluran DBH Pajak mulai tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan ketentuan bulan Desember sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya.
2. Terdapat sisa DBH Kurang Bayar s.d 2023 yang masih belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Berikut rincian Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang belum ditransfer:

**Tabel 5.1.10 Pendapatan Rincian Dana Transfer Yang Belum di Transfer ke
Pemerintah Daerah TA 2025 dan 2024**

No	Jenis Dana Transfer	Sisa Anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024	DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	Total
1	2	3	4	5=3+4
1	DBH PBB	693.305.700	403.094.000	1.096.399.700
2	DBH PPh Pasal 21	96.070.620.200	64.978.599.000	161.049.219.200
3	DBH PPh Pasal 25/29	3.298.778.000	3.862.984.000	7.161.762.000
4	DBH SDA Minerba Landrent	0	18.208.000	18.208.000
5	DBH SDA Panas Bumi	0	90.784.000	90.784.000
TOTAL		100.062.703.900	69.353.669.000	169.416.372.900

Selisih penyaluran DBH TA 2025 sebesar Rp100.062.703.900 belum diatur sebagai kurang salur oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan DBH Kurang Bayar sebesar Rp69.353.669.000 telah diatur dalam PMK 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 dan telah diakui sebagai piutang transfer.

Rincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp6.761.789.300
--------------------------------	-----------------

Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp6.761.789.300 atau 88,50% dari target sebesar Rp7.640.869.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.388.386.000, realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan berkurang Rp626.596.700 atau turun 8,48%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11 Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	6.239.751.300	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	217.320.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	304.718.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		6.761.789.300	

b) **DBH PPh Pasal 21** **Rp944.663.936.800**

Realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2025 sebesar Rp944.663.936.800 atau 87,89% dari target sebesar Rp1.074.805.005.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp942.425.758.000, realisasi DBH PPh Pasal 21 bertambah Rp2.238.178.800 atau naik 0,24%. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 DBH PPh Pasal 21 Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	864.635.581.800	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	30.908.151.000	KMK 44/KM.7/2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	49.120.204.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		944.663.936.800	

c) **DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN** **Rp34.691.792.000**

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2025 sebesar Rp34.691.792.000 atau 87,23% dari target sebesar Rp39.770.965.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp38.719.273.000, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN berkurang Rp4.027.481.000 atau turun 10,40%. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.13 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	29.689.002.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	2.082.589.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	2.920.201.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		34.691.792.000	

d) **DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)** **Rp0**

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.420.000.

Pada Tahun 2025 tidak ada penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang disalurkan ke RKUD.

e) **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi** **Rp488.386.000**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2025 sebesar Rp488.386.000 atau 92,11% dari target sebesar Rp530.228.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp552.270.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi berkurang Rp63.884.000 atau turun 11,57%.

**Tabel 5.1.14 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	370.818.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	48.942.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	68.626.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		488.386.000	

f) **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent** **Rp401.440.000**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent TA 2025 sebesar Rp401.440.000 atau 97,95% dari target sebesar Rp409.832.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

Rp377.914.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent bertambah Rp23.526.000 atau naik 6,23%.

**Tabel 5.1.15 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-Landrent Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	377.859.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	9.816.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	13.765.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		401.440.000	

**g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp1.407.000
Mineral dan Batubara-Royalty**

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty TA 2025 sebesar Rp1.407.000 atau 100,07% dari target sebesar Rp1.406.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.885.376.000, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty berkurang Rp2.883.969.000 atau turun 99,95%.

**Tabel 5.1.16 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-RoyaltyTahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	1.406.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	1.000	KMK 44/KM.7/2024
Total		1.407.000	

**h) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Rp166.606.000
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2025 sebesar Rp166.606.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp166.605.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp259.794.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berkurang Rp93.188.000 atau turun 35,87%.

**Tabel 5.1.17 DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	166.605.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran Melalui TDF	1.000	KMK 44/KM.7/2024
Total		166.606.000	

i) DBH Sawit Rp906.874.000

Realisasi DBH Sawit TA 2025 sebesar Rp906.874.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp906.874.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.812.435.000, realisasi DBH Sawit berkurang Rp905.561.000 atau turun 49,96%.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.146.642.838.212

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 sebesar Rp1.146.642.838.212 atau 98,24% dari target sebesar Rp1.167.199.457.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.146.248.432.968, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp394.405.244 atau naik 0,03%.

Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari :

- a) Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Realisasi Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp809.039.537.900,- atau 99,99% dari target. Realisasi ini tidak tercapai 100% diakibatkan adanya pemotongan dikarenakan terdapat sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) sebesar Rp79.723.100,- tahun sebelumnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024.
- b) Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.18 Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Tahun 2025

Jenis	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyaluran 2025 (Rp)	%	Sisa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja 2025 (Rp)	Sisa di RKUD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	218.133.328.000	197.656.432.312	90,61%	0	196.636.648.162	1.019.784.150
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	94.757.611.000	94.757.611.000	100%	1.022.060	90.254.477.940	4.504.155.120
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	45.189.257.000	45.189.257.000	100%	547.000.766	45.351.472.687	384.785.079
TOTAL	358.080.196.000	337.603.300.312	94,28%	548.022.826	332.242.598.789	5.908.724.349

Tidak tercapainya target realisasi Dana Alokasi Umum disebabkan adanya Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah, yaitu akibat Pengangkatan dan penggajian PPPK tahun 2025 hanya sebanyak 11.265 orang sebesar Rp196.636.648.162 tidak sesuai dengan KMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebanyak 11.737 orang sebesar Rp218.133.328.000.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rp1.265.613.302.359

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 sebesar Rp1.265.613.302.359 atau 103,02% dari target sebesar Rp1.228.503.948.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.212.441.264.199, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp53.172.038.160 atau naik 4,39%. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

a) DAK Fisik

Rp119.572.322.275

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 sebesar Rp119.572.322.275 atau 97,04% dari target sebesar Rp123.222.552.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp151.638.021.459, realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik berkurang Rp32.065.699.184 atau turun 21,15%.

Realisasi DAK Fisik diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah secara bertahap dan sekaligus berdasarkan PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Tidak tercapainya target DAK Fisik disebabkan penyaluran dilakukan berdasarkan nilai yang sudah terkontrak dan efisiensi.

Tabel 5.1.19 Rekapitulasi DAK Fisik Tahun 2025

Sub Bidang	Anggaran	Realisasi Penyaluran	%	Realisasi Belanja	Sisa TA 2025
1	2	3	4	5	6=3-5
Sekolah Menengah Kejuruan (SMA)	1.086.762.000	1.054.316.024	97,01%	1.054.316.024	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	115.251.140.000	111.826.814.186	97,03%	109.740.507.413	2.086.306.773
Sekolah Luar Biasa (SLB)	2.182.150.000	2.173.165.545	99,59%	2.161.965.545	11.200.000
DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan (RSUD Banten dan RSUD Malingping)	4.702.500.000	4.518.026.520	96,08%	4.518.026.520	0
Jumlah	123.222.552.000	119.572.322.275	97,04%	117.474.815.502	2.097.506.773

b) DAK Non Fisik

Rp1.146.040.980.084

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 sebesar Rp1.146.040.980.084 atau 103,69% dari target sebesar Rp1.105.281.396.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.060.803.242.740, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik bertambah Rp85.237.737.344 atau naik 8,04%. Tahapan dan Realisasi DAK Non Fisik terdiri dari:

Tabel 5.1.20 DAK Non Fisik Tahun 2025

DAK Non Fisik	Sisa Dana di RKUD 2024 dan di Bendahara BOS	Anggaran 2025	Potongan	Realisasi Transfer/ Penyaluran dari pusat	Pengembalian atas TGR	%	Realisasi (penyerapan) Belanja	Sisa Dana di RKUD 2025 dan di Bendahara BOS
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8	9=(2+5)-8
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.105.550.130	778.812.926.000	0	776.705.666.873	23.641.400	99,73%	775.037.350.810	2.797.507.593
DAK Non Fisik-TPG PNSD	6.929.586.432	293.771.347.000	0	337.246.437.300		114,80%	341.826.649.992	2.349.373.740
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	107.953.101	1.295.750.000	0	1.082.000.000		83,50%	1.189.000.000	953.101
DAK Non Fisik-TKG PNSD	41.167.933	755.182.000	0	735.960.300		97,45%	774.163.900	2.964.333
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	123.759.272	18.569.584.000	123.759.272	18.445.824.728		99,33%	18.544.579.553	25.004.447
DAK Non Fisik-PK2UKM	267.930.048	6.694.587.000	267.930.048	6.426.656.952		96,00%	6.093.293.000	601.294.000
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0	4.640.000.000	0	4.640.000.000		100,00%	2.371.426.704	2.268.573.296
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	7.227.469	400.660.000	7.227.469	393.432.531		98,20%	266.754.887	133.905.113
DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	200.000.000	0	200.000.000		100,00%	184.669.108	15.330.892
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0	141.360.000	0	141.360.000		100,00%	130.720.000	10.640.000
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	79.723.100	0	79.723.100	0		0,00%	0	0
Jumlah	8.662.897.485	1.105.281.396.000	478.639.889	1.146.017.338.684	23.641.400	103,69%	1.146.418.607.954	8.205.546.515

Penjelasan rincian realisasi DAK Non Fisik sebagai berikut:

- (1) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp337.246.437.300 atau 114,80% dari target sebesar Rp293.771.347.000 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp273.356.152.600, bertambah Rp63.890.284.700 atau naik 23,37%.
- (2) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp735.960.300 atau 97,45% dari target sebesar Rp755.182.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp495.153.000, bertambah Rp240.807.300 atau naik 48,63%.
- (3) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.082.000.000 atau 83,50% dari target sebesar Rp1.295.750.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.642.599.000, berkurang Rp560.599.000 atau turun 34,13%.
- (4) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp762.050.416.873 atau 99,%73 dari target sebesar Rp764.157.676.000,. Dibandingkan

dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp761.603.210.805 bertambah Rp470.847.468 atau naik 0,06% dari tahun sebelumnya.

Dan terdapat Penerimaan TGR an. Muksin SMKN 13 Pandeglang Rp10.500.000, STS tahun berjalan SMAN 2 Kota Serang Rp13.138.500 dan koreksi tambah SKH 3 Lebak Rp2.900, dengan total Rp23.641.400.

- (5) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebesar Rp14.655.250.000 atau 100,00% dari target. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.431.250.000. meningkat sebesar Rp1.224.000.000 atau berkurang 9,11%.
- (6) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp6.426.656.952 atau 96,00% dari target sebesar Rp6.694.587.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.161.338.724 bertambah Rp4.265.318.228 atau 197,35%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp267.930.048 atas sisa salur tahun 2024.
- (7) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp393.432.531 atau 98,20% dari target sebesar Rp400.660.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp316.551.566 menurun sebesar Rp76.880.965 atau 24,29%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp7.227.469 atas sisa salur tahun 2024.
- (8) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp4.640.000.000 atau 100,00% dari target.
- (9) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp200.000.000 atau 100,00% dari target.
- (10) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp141.360.000 atau 100,00% dari target.
- (11) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 bahwa Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Banten tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal tetapi masih terdapat sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp79.723.100 di RKUD, sehingga terbit KMK Nomor 43 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa dilakukan pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Bulan Oktober sebesar Rp79.723.100 atas sisa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal TA. 2025 tersebut.
- (12) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp18.544.579.553 atau 99,33% dari target sebesar Rp18.445.824.728. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.470.070.245 atau menurun sebesar 146,93%. Tidak maksimalnya penyaluran tahun 2025 karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2024 sebesar Rp123.759.272.

2. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya** **Rp6.489.293.000**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2025 sebesar Rp6.489.293.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.489.293.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp19.619.982.000, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berkurang Rp13.130.689.000 atau turun 66,93%. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya seluruhnya berupa Dana insentif Fiskal.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Dana Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)	Sisa Dana di RKUD
Insentif Fiskal	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)	17.659.276
JUMLAH	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)	17.659.276

Dana Insentif Fiskal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah Dana Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya yang berdasarkan Pasal 8 ayat 2 PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah bahwa indikator kinerja yang dinilai adalah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah
- 2. Pelayanan Umum Pemerintahan
- 3. Pelayanan Dasar

Yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

5.1.1.4. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** **Rp6.383.604.000**

Rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58% dari target sebesar Rp6.346.763.490 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.430.560.000, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat penurunan Rp46.956.000 atau berkurang 0,73%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp6.383.604.000.

5.1.2. Belanja dan Transfer

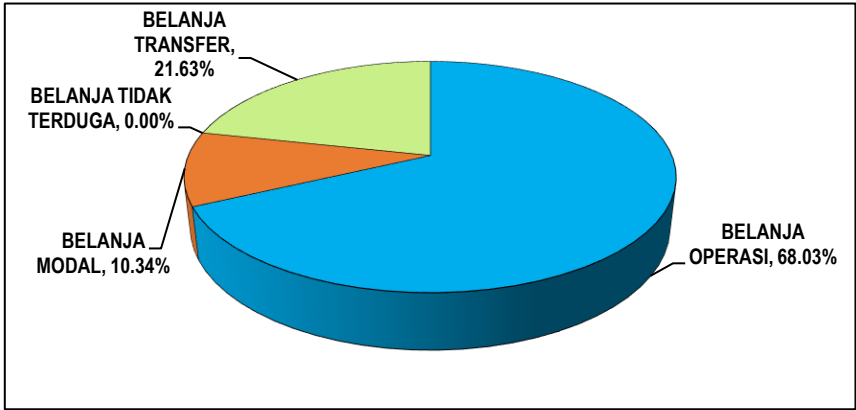
Rp10.010.940.346.291

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebesar Rp10.010.940.346.291 atau 92,92% dari target sebesar Rp10.773.538.029.147 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.907.894.911.581, realisasi Belanja dan Transfer terdapat penurunan Rp1.896.954.565.290 atau berkurang 15,93%. Secara ringkas Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
BELANJA OPERASI	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562	(5,04)
BELANJA MODAL	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508	(8,45)
BELANJA TAK TERDUGA	32.756.687.505	-	0,00	75.000.000	(100,00)
BELANJA TRANSFER	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)
JUMLAH	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581	(15,93)

Grafik 5.1.2 Komposisi Belanja dan Transfer TA 2025



Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja dan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Rp6.810.065.159.831

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42% dari target sebesar Rp7.137.130.606.275 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.171.859.660.562, realisasi Belanja Operasi berkurang Rp361.794.500.732 atau turun 5,04%. Secara ringkas perbandingan Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242	10,84
Belanja Barang dan Jasa	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502	(4,00)
Belanja Bunga	-	-	0,00	1.029.672.328	(100,00)
Belanja Hibah	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012	(47,46)
Belanja Bantuan Sosial	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478	(12,32)
JUMLAH	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562	(5,04)

Adapun penjelasan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rp2.646.806.177.534

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp2.646.806.177.534 atau 98,21% dari target sebesar Rp2.695.013.553.512 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242, realisasi Belanja Pegawai bertambah Rp258.950.423.292 atau naik 10,84%.

Pada tahun 2025, terdapat pengalihan kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN ke kode rekening belanja tambahan penghasilan ASN.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.031.059.940.543	994.346.146.816	96,44	802.999.872.291	23,83
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.470.700.106.335	1.462.633.081.415	99,45	1.058.296.870.636	38,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	0,00	391.251.955.793	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	128.645.892.489	127.216.268.244	98,89	90.446.260.739	40,65
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.845.241.641	1.687.001.656	91,42	1.251.132.000	34,84
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	11.243.187.359	9.566.892.900	85,09	12.917.398.500	(25,94)
Belanja Pegawai BLUD	51.519.185.145	51.356.786.503	99,68	30.692.264.283	67,33
JUMLAH	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242	10,84

Kenaikan belanja pegawai sebesar 10,84% diantaranya disebabkan karena:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan disebabkan adanya Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025 .

2. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota dewan sebanyak 15 orang. Yaitu dari periode 2019 s.d 2024 sebanyak 85 orang dan periode 2025 s.d 2029 sebanyak 100 orang.

3. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH disebabkan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif pada tahun 2025.

4. Terdapat kenaikan pada Belanja Pegawai BLUD dikarenakan pada tahun 2025 belanja pegawai honorer periode Januari sampai dengan Juli yang semula bersumber dana APBD beralih ke sumber dana BLUD. Setelah pangangkatan status menjadi PPPK maka Periode Agustus sampai dengan Desember belanja pegawai bersumber dana DAU.

Kurang optimalnya realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH disebabkan biaya penunjang operasional KDH dan WKDH dihitung berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp3.612.190.835.012

Belanja Barang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp3.612.190.835.012 atau 93,01% dari target sebesar Rp3.883.634.692.693 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.762.827.581.502, realisasi Belanja Barang dan Jasa berkurang Rp150.636.746.491 atau turun 4,00%.

Termasuk dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 adalah Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp61.997.830.179 terdiri dari:

1) Peralatan dan Mesin	Rp	1.323.916.512
Terdiri dari:		
a) Atribusi	Rp	9.975.000
b) Kapitalisasi	Rp	1.313.941.512
2) Gedung dan Bangunan	Rp	58.415.475.156
Terdiri dari:		
a) Atribusi	Rp	28.330.000
b) Kapitalisasi	Rp	58.387.145.156
3) Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.149.441.011
4) Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	Rp	7.830.000
5) Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	709.356.600
6) Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	391.810.900

Secara ringkas, perbandingan Belanja Barang dan Jasa 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang	1.140.652.576.178	1.087.176.991.796	95,31	1.033.034.186.729	5,24
Belanja Jasa	1.654.592.310.034	1.505.623.672.416	91,00	1.746.148.002.634	(13,77)
Belanja Pemeliharaan	248.334.211.683	231.821.079.954	93,35	235.104.649.989	(1,40)
Belanja Perjalanan Dinas	231.206.802.300	204.886.719.835	88,62	265.476.636.938	(22,82)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.158.200.000	102.605.675.360	91,48	26.930.389.104	281,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	280.655.401.427	264.039.976.675	94,08	285.938.548.010	(7,66)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	216.035.191.071	216.036.718.976	100,00	170.195.168.099	26,93
JUMLAH	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502	(4,00)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Rp1.087.176.991.796

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp1.087.176.991.796 atau 95,31% dari target sebesar Rp1.140.652.576.178 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.033.034.186.729, realisasi Belanja Barang bertambah

Rp54.142.805.067 atau naik 5,24%. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Pakai Habis	1.140.030.122.178	1.086.637.761.696	95,32	1.031.785.146.729	5,32
Belanja Barang Tak Pakai Habis	622.454.000	539.230.100	86,63	1.204.075.000	(55,22)
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	0,00	44.965.000	(100,00)
JUMLAH	1.140.652.576.178	1.087.176.991.796	95,31	1.033.034.186.729	5,24

Adapun rincian dari Belanja Barang Pakai Habis dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.707.446.240	4.827.933.186	84,59
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.324.770.100	2.244.756.591	96,56
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.829.111.940	11.076.845.246	86,34
Belanja Bahan-Bahan Baku	85.157.000	68.160.750	80,04
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	799.460.200	777.505.195	97,25
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.148.749.000	828.422.008	72,12
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	921.753.097	804.828.727	87,32
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	242.019.000	139.132.800	57,49
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.433.000	7.160.180	84,91
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	391.212.200	373.299.200	95,42
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	43.714.000	43.190.150	98,80
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	29.708.118.266	29.574.853.077	99,55
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.499.436.023	3.486.332.467	99,63
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.288.000	6.141.550	84,27
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	567.783.000	478.640.877	84,30
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	20.508.800	19.173.135	93,49
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.846.000	3.826.500	99,49
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.632.061.862	44.430.331.712	89,52
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.287.881.350	7.770.650.449	93,76
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.299.783.250	6.905.342.341	94,60
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	833.420.300	646.297.325	77,55
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.006.021.612	10.167.002.462	92,38
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.396.180.565	7.661.098.640	91,25
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.587.948.029	4.299.075.250	93,70
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.168.298.000	4.866.374.887	94,16
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.329.217.000	3.241.402.319	97,36
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	14.168.308.900	12.486.911.925	88,13

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	807.865.000	739.423.158	91,53
Belanja Obat-Obatan-Obat	33.594.263.718	33.346.784.042	99,26
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	70.303.000	69.690.073	99,13
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	172.763.522.472	165.295.356.932	95,68
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	562.832.114.158	543.904.545.814	96,64
Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.723.616.846	16.608.830.310	93,71
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.439.864.000	2.104.231.655	86,24
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	607.471.000	591.702.460	97,40
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.506.328.250	35.739.046.031	90,46
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	101.262.513.000	99.575.317.429	98,33
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	23.922.619.000	19.365.915.450	80,95
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.360.025.000	2.003.342.036	84,89
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.490.570.000	3.286.725.493	94,16
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	333.500.000	260.128.500	78,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	474.088.000	403.963.800	85,21
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.651.073.000	1.567.513.831	94,94
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	146.305.000	143.605.939	98,16
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	233.192.000	202.980.000	87,04
Belanja Pakaian KORPRI	20.350.000	13.261.892	65,17
Belanja Pakaian Adat Daerah	558.260.000	412.622.000	73,91
Belanja Pakaian Batik Tradisional	920.415.000	745.641.439	81,01
Belanja Pakaian Olahraga	3.293.937.000	3.022.444.463	91,76
JUMLAH	1.140.030.122.178	1.086.637.761.696	95,32

Adapun rincian dari Belanja Barang Tak Pakai Habis dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28 Rincian Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	521.404.000	438.460.000	84,09
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	101.050.000	100.770.100	99,72
JUMLAH	622.454.000	539.230.100	86,63

2) Belanja Jasa
Rp1.505.623.672.416

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp1.505.623.672.416 atau 91,00% dari target sebesar Rp1.654.592.310.034 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.746.148.002.634, realisasi Belanja Jasa berkurang Rp240.524.330.217 atau turun 13,77%. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29 Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Jasa Kantor	1.120.492.423.914	994.846.904.394	88,79	1.192.914.558.892	(16,60)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	404.509.485.160	398.590.812.514	98,54	393.784.764.965	1,22
Belanja Sewa Tanah	131.553.000	108.051.000	82,13	-	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.516.825.400	10.722.711.147	85,67	14.948.742.132	(28,27)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.372.841.360	18.765.385.366	87,80	25.743.939.457	(27,11)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.188.201.000	1.139.657.345	95,91	1.401.198.388	(18,67)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	23.854.037.600	22.752.289.326	95,38	13.735.723.230	65,64
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	27.011.219.500	23.683.985.899	87,68	50.770.553.493	(53,35)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	0,00	5.130.115.550	(100,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.975.259.000	14.143.499.310	67,43	11.490.784.363	23,09
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	22.540.344.100	20.870.376.115	92,59	35.833.022.164	(41,76)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	120.000	-	0,00	394.600.000	(100,00)
JUMLAH	1.654.592.310.034	1.505.623.672.416	91,00	1.746.148.002.634	(13,77)

Peningkatan Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar 65,64% antara lain dipengaruhi oleh naiknya Belanja Modal untuk pembangunan gedung dan bangunan tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sehingga kebutuhan akan perencanaan dan pengawasan yang biasanya menyertai kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi bertambah.

Kurang Optimalnya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan fasilitas internal, metode pelatihan blended learning serta penyesuaian kebutuhan peserta dan narasumber yang berdampak pada pengurangan biaya operasional.

Adapun rincian dari Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Rincian Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.583.670.000	45.994.179.500	84,26
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.866.700.000	5.255.615.000	89,58
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	614.800.000	614.800.000	100,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.883.560.000	5.459.747.334	92,80

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Honorarium Rohaniwan	56.400.000	22.000.000	39,01
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	578.220.000	549.370.000	95,01
Honorarium Penyelenggara Ujian	132.750.000	129.250.000	97,36
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.254.675.000	6.904.130.000	74,60
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	693.400.000	667.300.000	96,24
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	417.265.178.760	351.650.256.740	84,28
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	81.155.273.504	79.962.721.482	98,53
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.931.015.120	1.825.176.189	94,52
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.893.544.000	23.366.771.000	97,80
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.217.400.000	6.083.070.000	97,84
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	98.000.000	98.000.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.931.540.000	2.831.915.000	96,60
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	327.450.000	327.450.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.534.400.000	1.184.225.000	77,18
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.123.200.000	3.270.354.272	79,32
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.253.620.000	74.090.957.500	94,68
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	911.334.000	847.430.000	92,99
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.008.653.658	50.421.837.275	96,95
Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.741.185.000	41.862.734.675	91,52
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.181.568.000	54.574.652.858	90,68
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.672.776.460	52.720.935.213	89,86
Belanja Jasa Tenaga Supir	5.306.680.000	4.621.475.000	87,09
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.700.000.000	2.326.789.400	86,18
Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	118.000.000	118.000.000	100,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	2.562.000.000	2.262.400.000	88,31
Belanja Jasa Tata Rias	100.002.000	99.465.000	99,46
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.604.000.000	5.307.500.000	94,71
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.642.000	7.603.500	99,50
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	774.000.000	773.451.522	99,93
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	17.000.000	17.000.000	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	550.000.000	546.064.500	99,28
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.466.163.965	11.674.938.597	93,65
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	171.050.000	142.205.800	83,14
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	459.580.000	390.692.983	85,01
Belanja Jasa Kalibrasi	613.703.000	500.857.693	81,61
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.423.715.158	1.135.945.714	79,79
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	655.364.000	580.215.255	88,53
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	225.986.120	9.603.264	4,25
Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	58.927.057.000	55.129.507.903	93,56
Belanja Tagihan Telepon	1.161.652.000	597.223.416	51,41
Belanja Tagihan Air	493.272.775	392.769.724	79,63
Belanja Tagihan Listrik	43.876.499.565	36.933.598.940	84,18

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.408.341.600	2.136.732.903	88,72
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	21.368.072.929	18.449.441.459	86,34
Belanja Paket / Pengiriman	2.644.723.000	2.277.480.796	86,11
Belanja Penambahan Daya	37.503.000	12.501.000	33,33
Belanja Registrasi / Keanggotaan	1.307.682.000	1.150.538.300	87,98
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	827.537.800	486.200.080	58,75
Belanja Pengolahan Air Limbah	57.059.000	57.014.929	99,92
Belanja Lembur	2.323.345.000	1.859.401.000	80,03
Belanja Medical Check Up	485.000.000	396.362.900	81,72
Belanja Sewa Jasa Internet	3.180.908.000	2.892.869.678	90,94
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33.672.770.500	30.297.376.100	89,98
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.045.800.000	538.798.000	51,52
JUMLAH	1.120.492.423.914	994.846.904.394	88,79

Dalam Belanja Jasa Kantor termasuk didalamnya Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan yang merupakan biaya pengelolaan pinjaman ke-6 tahun 2025 kepada PT. SMI sebesar Rp774.000.000, sedangkan tahun 2024 dianggarkan pada kode rekening Belanja Bunga dengan realisasi sebesar Rp1.029.672.328.

3)
Belanja Pemeliharaan
Rp231.821.079.954

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp231.821.079.954 atau 93,35% dari target sebesar Rp248.334.211.683 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp235.104.649.989, realisasi Belanja Pemeliharaan berkurang Rp3.283.570.035 atau turun 1,40%. Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.31 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Tanah	5.483.767.500	5.428.849.000	99,00	13.359.775.175	(59,36)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.017.398.600	55.711.889.622	88,41	56.125.346.541	(0,74)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.898.848.074	75.298.814.367	93,08	60.082.596.101	25,33
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.886.197.509	95.351.782.965	96,43	105.487.242.888	(9,61)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48.000.000	29.744.000	61,97	49.689.284	(40,14)
JUMLAH	248.334.211.683	231.821.079.954	93,35	235.104.649.989	(1,40)

Pada tahun 2025, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar 25,33%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh:

- Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp32.533.158.727,83 yang dialokasikan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten diantaranya untuk Kantin, Gudang APK, Partisi Dinding (Lantai 1, 2 dan 3), Ruang Paripurna (Lantai 1 dan 2), Pagar dan Pos Jaga, dan Ruang Komisi 1 sampai dengan Komisi 5.

- 2. Pada Dinas Sosial sebesar Rp3.815.210.632,72 yang dialokasikan untuk Gedung kantor induk pada ruangan pada bidang perlindungan sosial, ruangan pada UPTD Perlindungan sosial (seperti Wisma Isolasi/Bayi, Gudang, Kantor Utama, Wisma Anak, Mushola, Pos Satpam, Dapur Umum, Wisma Mawar dan Wisma Melati), dan ruangan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial untuk gedung pendidikan (ruang kelas A, B, C dan ruang seksi penerimaan dan penyaluran).
- 3. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.191.465.726,31 yang dialokasikan diantaranya untuk Pemeliharaan lobby, lapangan, ruang server, pagar dan jaringan air bersih.

4) Belanja Perjalanan Dinas **Rp204.886.719.835**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp204.886.719.835 atau 88,62% dari target sebesar Rp231.206.802.300 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp265.476.636.938, realisasi Belanja Perjalanan Dinas berkurang Rp60.589.917.103 atau turun 22,82%.

Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 seluruhnya merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Tidak optimalnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 disebabkan terdapat efisiensi anggaran tahun 2025.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp102.605.675.360**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp102.605.675.360 atau 91,48% dari target sebesar Rp112.158.200.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp26.930.389.104, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp75.675.286.256 atau naik 281,00%.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 terdiri dari:

1) Hadiah Perlombaan	Rp	1.109.500.000
2) Penghargaan atas Prestasi	Rp	7.937.170.360
3) Beasiswa	Rp	93.559.005.000

Belanja Beasiswa terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.405.000 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp93.538.600.000. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang diberikan untuk:

1) Program Sekolah Gratis untuk SMA Swasta	Rp	13.530.600.000
2) Program Sekolah Gratis untuk SMK Swasta	Rp	74.376.820.000
3) Program Sekolah Gratis untuk SKH Swasta	Rp	5.631.180.000

6) Belanja Barang dan Jasa BOSP **Rp264.039.976.675**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp264.039.976.675 atau 94,08% dari target sebesar Rp280.655.401.427 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp285.938.548.010, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP berkurang Rp21.898.571.335 atau turun 7,66%.

7) **Belanja Barang dan Jasa BLUD** **Rp216.036.718.976**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp216.036.718.976 atau 100,00% dari target sebesar Rp216.035.191.071 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp170.195.168.099, realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD bertambah Rp45.841.550.877 atau naik 26,93%.

c. **Belanja Bunga** **Rp0**

Tidak ada realisasi Belanja Bunga pada tahun 2025, disebabkan biaya pengelolaan pinjaman pada PT. SMI dialihkan penganggarannya ke kode rekening Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan.

d. **Belanja Hibah** **Rp513.376.712.647**

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp513.376.712.647 atau 98,60% dari target sebesar Rp520.643.952.320 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp977.158.618.012, realisasi Belanja Hibah berkurang Rp463.781.905.365 atau turun 47,46%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.734.009.500	53.068.193.359	93,54	429.040.590.380	(87,63)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.301.000.000	35.233.144.026	97,06	124.641.687.161	(71,73)
Belanja Hibah Dana BOS	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000	30.500.640.000	100,00	28.774.909.666	6,00
Belanja Hibah Dana BOSP	130.300.858.000	134.021.623.121	102,86	-	0,00
JUMLAH	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012	(47,46)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat** **Rp53.068.193.359**

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan Hibah yang diberikan kepada satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten yang berupa uang dan barang.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp53.068.193.359 atau 93,54% dari target sebesar Rp56.734.009.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp429.040.590.380, realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat berkurang Rp375.972.397.021 atau turun 87,63%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.245.189.000	15.135.661.455	99,28	394.679.209.875	(96,17)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	41.488.820.500	37.932.531.904	91,43	34.361.380.505	10,39
JUMLAH	56.734.009.500	53.068.193.359	93,54	429.040.590.380	(87,63)

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 15.135.661.455

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp15.135.661.455 atau 99,28% dari target sebesar Rp15.245.189.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp394.679.209.875, realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat berkurang Rp379.543.548.420 atau turun 96,17%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34 Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten	-	-	0,00	287.120.264.000	(100,00)
Badan Narkotika Nasional Provinsi banten	3.500.000.000	3.453.972.469	98,68	749.128.125	361,07
Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	6.454.339.000	6.397.652.800	99,12	31.000.000.000	(79,36)
Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya	-	-	0,00	6.415.678.000	(100,00)
Satgas Andalas Bais TNI	300.000.000	300.000.000	100,00	-	0,00
Komando Pasukan Khusus Grup I	500.000.000	500.000.000	100,00	1.819.421.750	(72,52)
Komando Resort Militer 052/Wjayakrama	400.000.000	399.999.900	99,99	3.000.000.000	(86,67)
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	6.265.770.000	(84,04)
Detasemen Polisi Militer III/4	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	750.000.000	33,33
Pangkalan TNI AL Banten	400.000.000	400.000.000	100,00	1.000.000.000	(60,00)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten	1.454.420.000	1.447.606.286	99,53	55.558.948.000	(97,39)
Komando Daerah Militer III/Siliwangi Detasemen Intelijen	-	-	0,00	1.000.000.000	(100,00)
SUBKOGARTAP 0623 / CILEGON	236.430.000	236.430.000,00	100,00	-	0,00
Jumlah	15.245.189.000	15.135.661.455	99,28	394.679.209.875	(96,17)

Penurunan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2025 terbesar pada Belanja Hibah untuk KPU. Hal ini dikarenakan telah selesainya kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2024. Sedangkan kenaikan

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 terbesar pada Belanja Hibah untuk BNN. Hal ini dalam rangka mendukung kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Rincian penerima Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.1 CaLK**.

b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.932.531.904

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp37.932.531.904 atau 91,43% dari target sebesar Rp41.488.820.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.361.380.505, realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp3.571.151.399 atau naik 10,39%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten	16.599.946.000	15.617.312.717	94,08	11.491.934.541	35,90
Polda Banten	-	-	0,00	3.209.550.000	(100,00)
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	-	-	0,00	2.898.104.575	(100,00)
Grup 1 Kopassus	300.000.000	296.109.100	98,70	3.202.261.800	(90,75)
Kementerian Agama	-	-	0,00	9.664.699.000	(100,00)
BPK Perwakilan Provinsi Banten	13.385.250.500	12.624.003.975	94,31	3.894.830.589	224,12
Badan Intelijen Daerah Banten/ Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten	9.800.000.000	8.031.846.112	81,96	-	0,00
Brimob Banten	1.403.624.000	1.363.260.000	97,12	-	0,00
Jumlah	41.488.820.500	37.932.531.904	91,43	34.361.380.505	10,39

Alokasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 digunakan untuk:

1. Pada Kejaksaan Tinggi Banten, pembangunan peningkatan infrastruktur layanan berupa pembebasan lahan dan pembangunan gedung TK Adhyaksa, gedung tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta pendopo Kejaksaan Tinggi Banten.
2. Pada BPK Perwakilan Provinsi Banten, pembangunan mess BPK tahap II;
3. Pada Grup 1 Koppasus, renovasi Lapangan Tenis Grup 1 Kopassus;
4. Pada Badan Intelijen Daerah Banten/ Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten, Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap I;
5. Brimob Banten, Pembangunan Gedung PPID Satuan Brimob Polda Banten.

Rincian penerima Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.2 CALK**.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp35.233.144.026

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp35.233.144.026 atau 97,06% dari target sebesar Rp36.301.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp124.641.687.161, realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berkurang Rp89.408.543.135 atau turun 71,73%.

Tabel 5.1.36 Belanja Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.251.000.000	34.183.942.842	96,97	69.424.687.714	(50,76)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	0,00	52.581.675.000	(100,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.050.000.000	1.049.201.184	99,92	2.635.324.447	(60,19)
JUMLAH	36.301.000.000	35.233.144.026	97,06	124.641.687.161	(71,73)

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 6.3 CALK**.

Pada tahun 2024 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar adalah belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) / Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Pada Tahun 2025 Belanja Hibah tersebut dianggarkan pada kode rekening sub rincian objek Belanja Beasiswa rekening jenis Belanja Barang dan Jasa.

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 6.4 CALK**.

3) Belanja Hibah Dana BOS Rp260.553.112.141

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 sebesar Rp260.553.112.141 atau 97,66% dari target sebesar Rp266.807.444.820 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp394.701.430.805, realisasi Belanja Hibah Dana BOS berkurang Rp134.148.318.664 atau turun 33,99%.

Penurunan belanja Hibah Dana BOS dikarenakan beralihnya alokasi belanja Hibah Dana Bos untuk SMA dan SKH Swasta ke sub kode rekening belanja Hibah Dana BOSP-BOS. Pada Tahun 2025, belanja hibah dana BOS hanya dialokasikan untuk belanja hibah bos kepada SMK Swasta.

Secara ringkas Realisasi Belanja Hibah Dana BOS 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.37 Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	15.123.600.000	13.985.441.000	92,47	22.839.855.900	(38,77)
Kabupaten Pandeglang	19.370.800.000	18.281.208.500	94,38	29.088.742.980	(37,15)
Kota Cilegon	11.060.890.000	10.866.486.068	98,24	36.799.960.200	(70,47)
Kota Serang	10.181.004.820	9.442.800.000	92,75	120.938.380.446	(92,19)
Kabupaten Serang	26.768.640.000	24.318.511.706	90,85	16.062.490.550	51,40
Kabupaten Tangerang	82.245.720.000	81.522.425.870	99,12	13.565.296.455	500,96
Kota Tangerang	56.833.290.000	56.329.064.900	99,11	85.887.431.735	(34,42)
Kota Tangerang Selatan	45.223.500.000	45.807.174.097	101,29	69.519.272.539	(34,11)
Jumlah	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)

Tabel diatas merupakan Belanja Hibah Dana BOS berdasarkan kabupaten/kota. Lebih rinci lagi, Belanja Hibah Dana BOS dibedakan kepada tujuan penerimanya, yakni Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.38 Belanja Hibah Dana Bos Tahun 2025 dan 2024 berdasarkan kode rekening per Kabupaten/Kota

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	NAIK / (TURUN)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	368.346.432.146	(29,26)
Kabupaten Lebak	15.123.600.000	13.985.441.000	92,47	20.599.455.900	(32,11)
Kabupaten Pandeglang	19.370.800.000	18.281.208.500	94,38	23.819.492.980	(23,25)
Kota Cilegon	11.060.890.000	10.866.486.068	98,24	35.119.960.200	(69,06)
Kota Serang	10.181.004.820	9.442.800.000	92,75	115.792.869.656	(91,85)
Kabupaten Serang	26.768.640.000	24.318.511.706	90,85	15.080.340.550	61,26
Kabupaten Tangerang	82.245.720.000	81.522.425.870	99,12	12.448.955.586	554,85
Kota Tangerang	56.833.290.000	56.329.064.900	99,11	80.805.371.735	(30,29)
Kota Tangerang Selatan	45.223.500.000	45.807.174.097	101,29	64.679.985.539	(29,18)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	-	-	26.354.998.659	(100,00)
Kabupaten Lebak	-	-	-	2.240.400.000	(100,00)
Kabupaten Pandeglang	-	-	-	5.269.250.000	(100,00)
Kota Cilegon	-	-	-	1.680.000.000	(100,00)
Kota Serang	-	-	-	5.145.510.790	(100,00)
Kabupaten Serang	-	-	-	982.150.000	(100,00)
Kabupaten Tangerang	-	-	-	1.116.340.869	(100,00)
Kota Tangerang	-	-	-	5.082.060.000	(100,00)
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	4.839.287.000	(100,00)
Total	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta dapat dilihat pada Lampiran 6.5 CALK.

4) **Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik** **Rp30.500.640.000**

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 sebesar Rp30.500.640.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp30.500.640.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp28.774.909.666, realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertambah Rp1.725.730.334 atau naik 6,00%.

Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.39 Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 Kepada Partai Politik

URAIAN	Jumlah Per Suara Sah	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Partai Demokrat Provinsi Banten	586.689	2.933.445.000	2.933.445.000,00	100	2.758.668.333	6,34
DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	886.432	4.432.160.000	4.432.160.000	100	4.498.028.333	(1,46)
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Banten	932.670	4.663.350.000	4.663.350.000	100	4.020.596.667	15,99
DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Banten	-	-	-	0,00	446.263.333	(100,00)
DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Banten	525.069	2.625.345.000	2.625.345.000	100,00	1.799.991.667	45,85
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten	217.762	1.088.810.000	1.088.810.000	100,00	852.295.000	27,75
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten	853.565	4.267.825.000	4.267.825.000	100,00	4.324.801.667	(1,32)
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten	442.724	2.213.620.000	2.213.620.000	100,00	1.863.690.000	18,78
DPW Partai Berkarya Banten	-	-	-	0,00	608.263.333	(100,00)
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten	773.102	3.865.510.000	3.865.510.000	100,00	3.492.276.333	10,69
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten	566.720	2.833.600.000	2.833.600.000	100,00	2.432.930.000	16,47
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten	315.395	1.576.975.000	1.576.975.000	100,00	1.677.105.000	(5,97)
JUMLAH	6.100.128	30.500.640.000	30.500.640.000	100,00	28.774.909.666	6,00

Rincian penerima Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 6.6 CALK**.

5) **Belanja Hibah Dana BOSP** **Rp134.021.623.121**

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP TA 2025 sebesar Rp134.021.623.121 atau 102,86% dari target sebesar Rp130.300.858.000.

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS terdiri dari belanja hibah kepada SMA

dan SKH Swasta, yang pada tahun 2024 direalisasikan pada kode rekening objek Belanja Hibah Bos.

Tabel 5.1.40 Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 Dana BOSP per Kabupaten/Kota

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	6.823.458.000	6.882.958.000	100,87	-	100
Kabupaten Pandeglang	9.553.000.000	9.909.483.037	103,73	-	100
Kota Cilegon	4.588.660.000	4.782.725.000	104,23	-	100
Kota Serang	3.156.000.000	3.243.945.313	102,79	-	100
Kabupaten Serang	10.615.750.000	11.070.216.530	104,28	-	100
Kabupaten Tangerang	39.633.800.000	40.378.152.647	101,88	-	100
Kota Tangerang	29.800.710.000	30.801.489.931	103,36	-	100
Kota Tangerang Selatan	26.085.340.000	26.952.652.663	103,32	-	100
SKH Swasta di provinsi banten	44.140.000	-	0,00	-	100
Jumlah	130.300.858.000	134.021.623.121	102,86	-	100

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dapat dilihat pada Lampiran 6.7 CALK.

e. Belanja Bantuan Sosial Rp37.691.434.638

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp37.691.434.638 atau 99,61% dari target sebesar Rp37.838.407.750 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp42.988.034.478, realisasi Belanja Bantuan Sosial berkurang Rp5.296.599.840 atau turun 12,32%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bantuan Sosial 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.41 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.100.000.000	1.096.499.850	99,68	10.588.034.478	(89,64)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	36.738.407.750	36.594.934.788	99,61	32.400.000.000	12,95
JUMLAH	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478	(12,32)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.096.499.850 seluruhnya merupakan Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial. Belanja bantuan sosial terdiri dari:
- a. Bantuan kepada 600 orang Anak Terlantar dengan total sebesar Rp298.500.120 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 780 gram;

b. Bantuan kepada 1.000 orang Lanjut Usia Terlantar dengan total sebesar Rp499.499.610 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 600 gram; dan

c. Bantuan kepada 600 orang Penyandang Disabilitas dengan total sebesar Rp298.500.120 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 780 gram.

Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Anak Terlantar Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kota Cilegon	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
2	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
3	Kab. Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
4	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
5	Kab. Pandeglang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
6	Kab. Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
7	Kota Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
8	Kota Tangerang Selatan	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
TOTAL		600		300.000.000	600		298.500.120	99,50

Tabel 5.1.43 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Lanjut Usia Terlantar Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kota Cilegon	85	500.000	42.500.000	85	499.500	42.457.467	99,90
2	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	499.500	37.462.471	99,90
3	Kab. Serang	135	500.000	67.500.000	135	499.500	67.432.447	99,90
4	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	499.500	37.462.471	99,90
5	Kab. Pandeglang	145	500.000	72.500.000	145	499.500	72.427.443	99,90
6	Kab. Tangerang	145	500.000	72.500.000	145	499.500	72.427.443	99,90
7	Kota Tangerang	175	500.000	87.500.000	175	499.500	87.412.432	99,90
8	Kota Tangerang Selatan	165	500.000	82.500.000	165	499.500	82.417.436	99,90
JUMLAH		1.000		500.000.000	1.000		499.499.610	99,90

Tabel 5.1.44 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Penyandang Disabilitas Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	KABUPATEN SERANG	100	500.000	50.000.000	100	497.500	49.750.020	99,50
2	KABUPATEN PANDEGLANG	100	500.000	50.000.000	100	497.500	49.750.020	99,50
3	KABUPATEN LEBAK	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
4	KABUPATEN TANGERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
5	KOTA SERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
6	KOTA TANGERANG SELATAN	60	500.000	30.000.000	60	497.500	29.850.012	99,50
7	KOTA TANGERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
8	KOTA CILEGON	60	500.000	30.000.000	60	497.500	29.850.012	99,50
JUMLAH		600		300.000.000	600		298.500.120	99,50

- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp36.594.934.788 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan Barang yang direncanakan kepada keluarga, dengan rincian berikut:
- a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp23.770.500.000 pada Dinas Sosial yang digunakan untuk Bantuan Jaminan Sosial Keluarga dalam rangka Penanganan Kemiskinan sebesar Rp18.870.500.000 dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp4.900.000.000, dengan peruntukan rincian berikut:

Tabel 5.1.15 Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Keluarga Bantuan Jaminan Sosial Keluarga Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kab. Serang	5.649	500.000	2.824.500.000	5.649	500.000	2.824.500.000	100,00
2	Kab. Pandeglang	8.610	500.000	4.305.000.000	8.610	500.000	4.305.000.000	100,00
3	Kab. Lebak	9.069	500.000	4.534.500.000	9.069	500.000	4.534.500.000	100,00
4	Kab. Tangerang	4.869	500.000	2.434.500.000	4.869	500.000	2.434.500.000	100,00
5	Kota Serang	2.422	500.000	1.211.000.000	2.422	500.000	1.211.000.000	100,00
6	Kota Tangerang Selatan	1.089	500.000	544.500.000	1.089	500.000	544.500.000	100,00
7	Kota Tangerang	3.610	500.000	1.805.000.000	3.610	500.000	1.805.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	2.423	500.000	1.211.500.000	2.423	500.000	1.211.500.000	100,00
JUMLAH		37.741		18.870.500.000	37.741		18.870.500.000	100,00

Tabel 5.1.16 Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Keluarga Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2025 dan 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kab. Serang	420	2.000.000	840.000.000	420	2.000.000	840.000.000	100,00
2	Kab. Pandeglang	420	2.000.000	840.000.000	420	2.000.000	840.000.000	100,00
3	Kab. Lebak	120	2.000.000	240.000.000	120	2.000.000	240.000.000	100,00
4	Kab. Tangerang	435	2.000.000	870.000.000	435	2.000.000	870.000.000	100,00
5	Kota Serang	100	2.000.000	200.000.000	100	2.000.000	200.000.000	100,00
6	Kota Tangerang Selatan	355	2.000.000	710.000.000	355	2.000.000	710.000.000	100,00
7	Kota Tangerang	500	2.000.000	1.000.000.000	500	2.000.000	1.000.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	100	2.000.000	200.000.000	100	2.000.000	200.000.000	100,00
TOTAL		2.450		4.900.000.000	2.450		4.900.000.000	100,00

b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp12.824.434.788,00 pada Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral yang digunakan untuk Pembangunan Listrik Pedesaan berupa program bantuan listrik untuk Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Belanja Bantuan Sosial berupa Barang Kepada Keluarga Program Bantuan Listrik Untuk Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) Tahun 2025 dan 2024

No	KABUPATEN / KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp)	JUMLAH SR (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kabupaten Serang	1.384	1.323.270.080	1.211.658.905	2.534.928.985
2	Kabupaten Pandeglang	1.750	1.674.575.000	1.532.083.153	3.206.658.153
3	Kabupaten Lebak	1.750	1.674.575.000	1.532.083.153	3.206.658.153
4	Kabupaten Tangerang	1.750	1.673.742.175	1.532.083.153	3.205.825.328
5	Kota Serang	354	338.466.480	309.918.535	648.385.015
6	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
7	Kota Tangerang	0	0	0	0
8	Kota Cilegon	12	11.473.440	10.505.713	21.979.153
JUMLAH		7.000	6.696.102.175	6.128.332.613	12.824.434.788

5.1.2.2. Belanja Modal Rp1.035.060.394.254

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp1.035.060.394.254 atau 87,04% dari target sebesar Rp1.189.126.004.461 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

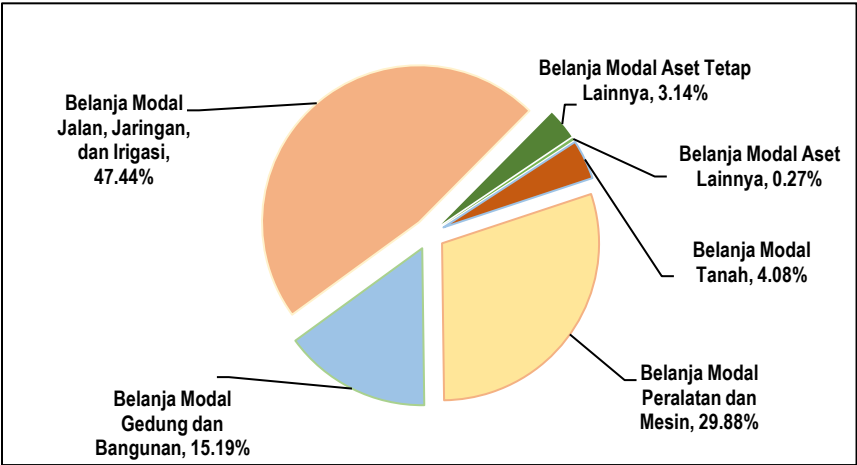
Rp1.130.629.758.508, realisasi Belanja Modal berkurang Rp95.569.364.254 atau turun 8,45%.

Secara ringkas perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09	46.092.332.880	155,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558	6,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81	171.787.754.271	19,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	318.031.145.447	299.055.992.016	94,03	536.407.648.367	(44,25)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663	35,30
Belanja Modal Aset Lainnya	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769	40,90
JUMLAH	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508	(8,45)

Grafik 5.1.3 Komposisi Belanja Modal TA 2025



Penjelasan rinci mengenai realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah Rp117.739.329.059

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp117.739.329.059 atau 63,09% dari target sebesar Rp186.613.886.304 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp46.092.332.880, realisasi Belanja Modal Tanah bertambah Rp71.646.996.179 atau naik 155,44%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Persil	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)
Belanja Modal Lapangan	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50
JUMLAH	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09	46.092.332.880	155,44

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Modal Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah Persil Rp61.519.366.328

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2025 sebesar Rp61.519.366.328 atau 50,02% dari target sebesar Rp122.996.463.200. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20 Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00
JUMLAH	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja seluruhnya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rendahnya realisasi Belanja Modal tersebut disebabkan tidak terlaksananya pengadaan tanah untuk SKHN 01 Kota Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, dan SMKN 6 Kota Serang. Hal ini terjadi karena belum tercapainya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dan pemilik tanah, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan hingga akhir tahun anggaran.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.519.366.328 untuk pengadaan tanah pada SMKN Cihara Kabupaten Lebak, SMKN 17 Pandeglang, SMKN 11 Kota Tangerang, SMKN 6 Kota Serang, SMKN 15 Pandeglang.

2) Belanja Modal Tanah Non Persil Rp0

Belanja Modal Tanah Non Persil TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.704.490.361. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Belanja Modal Tanah Non Persil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Basah	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)
JUMLAH	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)

3) **Belanja Modal Lapangan** **Rp56.219.962.731**

Realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2025 sebesar Rp56.219.962.731 atau 88,37% dari target sebesar Rp63.617.423.104 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp36.387.842.519, realisasi Belanja Modal Lapangan bertambah Rp19.832.120.212 atau naik 54,50%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Lapangan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Belanja Modal Lapangan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50
JUMLAH	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan digunakan untuk pembebasan lahan pada ruas jalan sebagai berikut:

- a) Akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten (Kabupaten Serang) Rp 7.130.407.288
- b) Sempu - Dukuh Kawung (Kota Serang) Rp 47.968.910.537
- c) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) Pelaksanaan Rp 1.120.644.906

b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** **Rp360.377.599.640**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp360.377.599.640 atau 90,50% dari target sebesar Rp398.196.494.582 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp337.794.670.558, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah Rp22.582.929.082 atau naik 6,69%. Rincian perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Besar	3.853.303.630	3.733.288.639	96,89	17.709.667.601	(78,92)
Belanja Modal Alat Angkutan	15.335.695.000	14.920.520.089	97,29	22.082.036.000	(32,43)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.082.000	170.094.265	93,93	4.242.645.709	(95,99)
Belanja Modal Alat Pertanian	1.490.350.000	1.124.585.150	75,46	1.060.682.000	6,02
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.423.801.264	58.524.483.183	84,30	60.433.862.800	(3,16)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.443.543.500	22.166.386.596	77,93	12.218.453.905	81,42
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.811.090.277	26.599.695.476	99,21	28.402.715.721	(6,35)
Belanja Modal Alat Laboratorium	144.481.959.816	126.389.673.428	87,48	51.803.018.293	143,98
Belanja Modal Komputer	24.030.227.000	22.794.385.170	94,86	29.398.912.256	(22,47)

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	0,00	10.186.031.200	(100,00)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	78.382.000	77.866.500	99,34	422.940.000	(81,59)
Belanja Modal Alat Peraga	-	-	0,00	1.765.515.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi	25.779.000	21.794.850	84,54	210.792.000	(89,66)
Belanja Modal Rambu-Rambu	5.545.856.100	5.389.628.115	97,18	13.570.963.757	(60,29)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	0,00	142.900.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	68.930.933.613	68.911.180.753	99,97	58.242.979.357	18,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.564.491.382	9.554.017.426	99,89	25.900.554.959	(63,11)
JUMLAH	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558	6,69

Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang rendah diantaranya:

1. Belanja Modal Alat Pertanian realisasi sebesar 75,46% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian disebabkan efisiensi sisa kontrak;
2. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar realisasi sebesar 77,93% hal ini disebabkan rendahnya realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Sekretariat DPRD disebabkan estimasi waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi serta adanya penyesuaian jadwal probity audit.
3. Belanja Modal Alat Laboratorium realisasi sebesar 87,48% hal ini disebabkan rendahnya realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sekretariat DPRD disebabkan penyesuaian pembayaran dan tindak lanjut berdasarkan hasil probity audit.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp205.562.940.358**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp205.562.940.358 atau 87,81% dari target sebesar Rp234.096.580.988 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp171.787.754.271, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah Rp33.775.186.087 atau naik 19,66%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bangunan Gedung	229.984.503.888	201.681.900.798	87,69	151.206.136.223	33,38
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.909.334.000	2.686.437.940	92,34	2.406.854.998	11,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.202.743.100	1.194.601.620	99,32	18.174.763.049	(93,43)
JUMLAH	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81	171.787.754.271	19,66

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp201.681.900.798

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp201.681.900.798 atau 87,69% dari target sebesar Rp229.984.503.888 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp151.206.136.223, realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung bertambah Rp50.475.764.575 atau naik 33,38%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja realisasi sebesar Rp201.521.160.668 terdiri dari:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp	20.325.056.853
(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	15.946.102.772
(b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	398.341.000
(c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	2.338.863.922
(d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	352.617.716
(e) Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	49.501.258
(f) Dinas Pertanian	Rp	100.492.430
(g) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp	96.480.294
(h) Badan Pendapatan Daerah	Rp	1.042.657.461
2. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar	Rp	3.609.869.000
(a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
3. Realisasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp	3.211.253.067
(a) Dinas Kesehatan		
4. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	167.783.152.832
(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
5. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp	743.606.800
(a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
6. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Rp	291.865.620
(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
7. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	Rp	553.027.524
(a) Dinas Perhubungan		
8. Realisasi Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan	Rp	547.859.755
(a) Dinas Kelautan dan Perikanan		
9. Realisasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp	861.102.721
(a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	520.983.224
(b) Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	148.879.497
(c) Dinas Pariwisata	Rp	191.240.000
10. Realisasi Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp	895.620.396
(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	54.323.400
(b) Dinas Kesehatan	Rp	285.897.330
(c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	97.578.300
(d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	399.546.366
(e) Badan Pengembangan Sumber Daya	Rp	58.275.000

Manusia		
11. Realisasi Belanja Modal Taman	Rp	2.698.746.101
(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	189.442.035
(b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	349.484.066
(c) Sekretariat DPRD	Rp	2.159.820.000
b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal realisasi sebesar Rp160.740.130 seluruhnya merupakan Belanja Modal Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Belanja Modal Cottage pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.		

2) **Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti** **Rp2.686.437.940**

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 sebesar Rp2.686.437.940 atau 92,34% dari target sebesar Rp2.909.334.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.406.854.998, realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti bertambah Rp279.582.942 atau naik 11,62%. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti seluruhnya berupa Belanja Modal Pagar terdapat pada SKPD:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	486.867.560
2. Dinas Sosial	Rp	91.393.000
3. Badan Pendapatan Daerah	Rp	2.108.177.380

3) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** **Rp1.194.601.620**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2025 sebesar Rp1.194.601.620 atau 99,32% dari target sebesar Rp1.202.743.100 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.174.763.049, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD berkurang Rp16.980.161.429 atau turun 93,43%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdapat pada:

- a) RSUD Banten sebesar Rp222.728.800 digunakan untuk pembiayaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Jasa konsultasi Perencanaan Rumah Singgah	Rp	91.985.700
2. Pembayaran Sisa 1% Pembangunan Bunker Radioterapi	Rp	130.743.100
- b) RSUD Malingping sebesar Rp 971.872.820 digunakan untuk pembiayaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Renovasi Gedung Instalasi Gizi	Rp	958.730.820
2. Pembayaran Belanja Modal Pembuatan Kanopi	Rp	13.142.000

d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **Rp299.055.992.016**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp299.055.992.016 atau 94,03% dari target sebesar Rp318.031.145.447 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp536.407.648.367, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang Rp237.351.656.352 atau turun

44,25%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	208.160.433.390	199.136.205.774	95,66	459.801.210.945	(56,69)
Belanja Modal Bangunan Air	82.630.735.749	73.533.328.233	88,99	64.574.711.422	13,87
Belanja Modal Instalasi	5.000.000.000	4.734.534.330	94,69	-	0,00
Belanja Modal Jaringan	15.790.420.000	15.202.486.050	96,28	12.031.726.000	26,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	6.449.556.308	6.449.437.629	100,00	-	0,00
JUMLAH	318.031.145.447	299.055.992.016	94,03	536.407.648.367	(44,25)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp199.136.205.774

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 sebesar Rp199.136.205.774 atau 95,66% dari target sebesar Rp208.160.433.390 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp459.801.210.945, realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan berkurang Rp260.665.005.171 atau turun 56,69%. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri dari:

- a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp166.645.507.274 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 166.357.205.815
 - 2. Dinas Kesehatan Rp 111.495.720
 - 3. Badan Pendapatan Daerah Rp 176.805.739
- b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp32.490.698.500 seluruhnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Belanja Modal Bangunan Air Rp73.533.328.233

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 sebesar Rp73.533.328.233 atau 88,99% dari target sebesar Rp82.630.735.749 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp64.574.711.422, realisasi Belanja Modal Bangunan Air bertambah Rp8.958.616.811 atau naik 13,87%. Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Air terdiri dari:

- a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp50.084.973.111 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 49.988.803.618
 - 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 96.169.493
- b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp23.448.355.122 seluruhnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) **Belanja Modal Instalasi** **Rp4.734.534.330**

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2025 sebesar Rp4.734.534.330 atau 94,69% dari target sebesar Rp5.000.000.000.

Belanja Modal Instalasi seluruhnya merupakan Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

4) **Belanja Modal Jaringan** **Rp15.202.486.050**

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 sebesar Rp15.202.486.050 atau 96,28% dari target sebesar Rp15.790.420.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp12.031.726.000, realisasi Belanja Modal Jaringan bertambah Rp3.170.760.050 atau naik 26,35%. Belanja Modal Jaringan terdiri dari:

- a) Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp15.103.561.050 seluruhnya terdapat pada Dinas Perhubungan;
- b) Belanja Modal Jaringan Telepon sebesar Rp98.925.000 seluruhnya terdapat pada Dinas Kesehatan.

5) **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** **Rp6.449.437.629**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2025 sebesar Rp6.449.437.629 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.449.556.308. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD seluruhnya terdapat pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Banten berupa:

- | | | |
|--|----|---------------|
| a) Alat penangkal petir | Rp | 128.728.500 |
| b) Pipa saluran pembuangan air limbah | Rp | 70.004.592 |
| c) Jaringan listrik bawah tanah dari Trafo induk pln ke genset baru dan bunker radioterapi uang muka | Rp | 1.236.545.261 |
| d) Pengadaan genset baru 1000 kva | Rp | 5.002.959.276 |
| e) Printer epson L121 sebanyak 7 unit | Rp | 11.200.000 |

e. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** **Rp48.066.730.408**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp48.066.730.408 atau 100,75% dari target sebesar Rp47.707.402.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.525.505.663, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah Rp12.541.224.745 atau naik 35,30%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	591.414.000	555.272.288	93,89	348.505.389	59,33
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000	-	0,00	5.200.000	(100,00)

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	47.110.988.140	47.511.458.120	100,85	35.171.800.274	35,08
JUMLAH	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663	35,30

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp555.272.288

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 sebesar Rp555.272.288 atau 93,89% dari target sebesar Rp591.414.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp348.505.389, realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan bertambah Rp206.766.899 atau naik 59,33%. Belanja Modal Bahan Perpustakaan terdapat pada:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 39.666.014
- b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 512.720.274
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp 2.886.000

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp0

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 tidak terdapat realisasi dari target sebesar Rp5.000.000 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.200.000.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp47.511.458.120

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 sebesar Rp47.511.458.120 atau 100,85% dari target sebesar Rp47.110.988.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.171.800.274, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP bertambah Rp12.339.657.846 atau naik 35,08%.

f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp4.257.802.773

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 sebesar Rp4.257.802.773 atau 95,03% dari target sebesar Rp4.480.495.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.021.846.769, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya bertambah Rp1.235.956.004 atau naik 40,90%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Lainnya 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	738.495.000	634.275.273	85,89	2.807.753.248	(77,41)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	3.742.000.000	3.623.527.500	96,83	214.093.521	1592,50
JUMLAH	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769	40,90

- 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan	Rp	7.514.000
b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	17.000.000
c) Daerah	Rp	609.761.273

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise pada Dinas kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Lisensi *Zoom Meeting*. Sedangkan pada Badan Pendapatan Daerah berupa Lisensi *Fortigate & RMA FG-80F*

- 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan	Rp	3.429.277.500
b) Inspektorat	Rp	194.250.000

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada Dinas Kesehatan terdapat pada RSUD Labuan sebesar Rp1.714.605.000 untuk *Radiology Information System* (RIS) dan *Smart Laboratory Information System* dan pada RSUD Cilograng sebesar Rp1.714.672.500 untuk paket *Laboratory Information System* dan paket *Radiology Information System*. Sedangkan pada Inspektorat berupa Software tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.

g. Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan

Dalam realisasi belanja modal, termasuk di dalamnya adalah pembayaran retensi atas jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh rekanan yang melewati tanggal 31 Desember 2025. Rincian Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.28 Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.736.526.019	4.535.778.373
Dinas Kesehatan	-	3.603.561.432
RSUD Banten	309.136.315	914.884.838
RSUD Malingping	108.715.653	-
RSUD Cilograng	33.809.156	-
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.892.312.038	18.641.081.020
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.620.014.975	11.449.676.064
Dinas Perhubungan	-	2.311.142.981
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	438.763.670
Sekretariat DPRD	1.158.104.443	-
Badan Pendapatan Daerah	173.267.559	-
JUMLAH	29.031.886.158	41.894.888.378

Secara lengkap rincian pekerjaan per dinas dapat dilihat pada **Lampiran 2 CaLK**.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Rp0

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Belanja Tak Terduga TA 2025 tidak terdapat realisasi dari target sebesar Rp32.756.687.505 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp75.000.000.

5.1.3. Belanja Transfer

Rp2.165.814.792.206

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70% dari target sebesar Rp2.414.524.730.906 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.605.330.492.510, realisasi Belanja Transfer berkurang Rp1.439.515.700.304 atau turun 39,93%. Secara ringkas Realisasi Transfer 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.29 Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024					
URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)
Belanja Bantuan Keuangan	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072	(35,44)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	95.923.928.072	(97,83)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)
JUMLAH	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil

Rp2.024.610.361.548

Realisasi Belanja Bagi Hasil seluruhnya merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp2.024.610.361.548 atau 89,56% dari target sebesar Rp2.260.672.110.906 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

Rp3.386.606.564.438, realisasi Belanja Bagi Hasil berkurang Rp1.361.996.202.890 atau turun 40,22%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.069.066.904.673	949.881.064.893	88,85	1.479.906.422.584	(35,81)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1.191.605.206.233	1.074.729.296.655	90,19	1.906.700.141.854	(43,63)
JUMLAH	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)

Penurunan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 diakibatkan pelaksanaan Opsen yang berlaku mulai tahun 2025 sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 191 ayat (1) yang berbunyi bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Rendahnya realisasi tahun 2025 akibat penurunan realisasi pendapatan dari pajak serta pelunasan hutang atas tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 tidak tercapai dan menjadi hutang Bagi Hasil Pajak.

Adapun penjelasan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.31 Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 2025 beserta Utang Pajak 2024 yang dibayar di tahun 2025

Uraian	Realisasi Pembayaran Utang Transfer 2024 (Rp)	Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 (Rp)	Total (Rp)
Kabupaten Lebak	4.097.245.190	134.848.420.971	138.945.666.161
Kabupaten Pandeglang	3.379.670.510	107.349.998.994	110.729.669.504
Kabupaten Serang	10.054.649.523	152.493.133.021	162.547.782.544
Kabupaten Tangerang	232.202.758.854	305.455.187.830	537.657.946.684
Kota Cilegon	35.921.293.736	86.425.502.578	122.346.796.314
Kota Serang	16.402.930.464	107.124.670.002	123.527.600.466
Kota Tangerang	220.107.361.478	232.221.219.788	452.328.581.266
Kota Tangerang Selatan	187.820.835.712	188.705.482.897	376.526.318.609
Jumlah	709.986.745.467	1.314.623.616.081	2.024.610.361.548

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Rp141.204.430.658

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp141.204.430.658 atau 91,78% dari target sebesar Rp153.852.620.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp218.723.928.072, realisasi Belanja Bantuan Keuangan berkurang Rp77.519.497.414 atau turun 35,44%. Secara ringkas perbandingan Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	95.923.928.072	(97,83)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)
JUMLAH	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072	(35,44)

Adapun penjelasan rincian Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi

Rp3.000.000.000

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi TA 2025 sebesar Rp3.000.000.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.000.000.000.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
a) Pemerintah Aceh	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
b) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
c) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
JUMLAH	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	-	100,00%

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Tanggal 1 Desember 2025 Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, penyediaan anggaran dan/atau Pemberian bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada daerah lain yang dilanda bencana alam/non alam, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 663 Tahun 2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Yang Bersifat Khusus Kepada

Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

b. Belanja Bantuan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.257.620.000
--	-------------------------

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2025 sebesar Rp25.257.620.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp25.257.620.000.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.34 Transfer Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Serang	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00%	0	100,00%
JUMLAH	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00%	0	100,00%

Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota Merupakan bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan PSU Kabupaten Serang. Berdasarkan Hasil verifikasi oleh tim dan Berita Acara hasil Kesepakatan pembahasan antara TAPD Provinsi Banten dan TAPD Kabupaten Serang sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan rincian alokasi anggaran bantuan pembiayaan PSU Kabupaten Serang untuk Badan Adhoc KPU Rp20.044.350.000,-
- 2) Jumlah dan Rincian alokasi anggaran bantuan pembiayaan PSU Kabupaten Serang untuk Bawaslu sebesar Rp5.213.270.000,-

Terdapat kesalahan penempatan kode rekening pada saat penganggaran yang seharusnya di alokasikan pada kode rekening belanja Transfer Bantuan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

C. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp2.085.000.000
---	------------------------

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota TA 2025 sebesar Rp2.085.000.000 atau 99,52% dari target sebesar Rp2.095.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp95.923.928.072, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota berkurang Rp93.838.928.072 atau turun 97,83%.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35 Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kota Serang	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	15.489.997.300	(86,54)
Kabupaten Serang	0	0	0,00	24.922.518.298	(100,00)

2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	32.600.000.000	30.560.000.000	93,74	32.600.000.000	(6,26)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	33.900.000.000	31.168.029.400	91,94	33.900.000.000	(8,06)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	24.600.000.000	21.346.781.258	86,78	24.000.000.000	(11,06)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Serang	32.400.000.000	28.757.000.000	88,76	32.300.000.000	(10,97)
Pengembalian Belanja yang Belum Teridentifikasi	-	(970.000.000)	0,00	-	0,00
JUMLAH	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)

Terdapat data pengembalian Bantuan Keuangan yang belum teridentifikasi desa penerima Bantuan Keuangan sebesar Rp970.000.000.

Berikut Jumlah Desa dan Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Per Kabupaten/Kota pada Tahun 2025:

Tabel 5.1.37 Jumlah Desa yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025

Kabupaten	Jumlah Desa	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Kabupaten Pandeglang	326	32.600.000.000	30.560.000.000	93,74	32.600.000.000
Kabupaten Lebak	339	33.900.000.000	31.168.029.400	91,94	33.900.000.000
Kabupaten Tangerang	246	24.600.000.000	21.346.781.258	86,78	24.000.000.000
Kabupaten Serang	324	32.400.000.000	28.757.000.000	88,76	32.300.000.000
Pengembalian Belanja yang Belum Teridentifikasi	-	-	(970.000.000)	0,00	-
JUMLAH	1.235	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000

Dari 1.235 desa yang dianggarkan terdapat 8 desa yang tidak disalurkan Bantuan Keuangan tahun 2025 karena beberapa hal, sebagai berikut:

Tabel 5.1.38 Alasan tidak tersalurnya Bantuan Keuangan Desa

KABUPATEN LEBAK			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Banjarsari	Kerta	Belum ada penetapan peraturan desa tentang APBDesa Tahun 2025
KABUPATEN SERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Ciruas	Citerep	Ada permasalahan administrasi keuangan desa
2	Tunjung Teja	Tanjung Teja	Belum menyampaikan pertanggungjawaban Tahun 2023

3	Padarincang	Ciomas	Belum menyampaikan pertanggungjawaban Tahun 2024
---	-------------	--------	--

KABUPATEN TANGERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Pakuhaji	Kohod	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
2	Pakuhaji	Kalibaru	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
3	Sindang Jaya	Wanakerta	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
4	Sepatan Timur	Lebak Wangi	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Rp(261.284.118.385)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD TA 2025 Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp305.987.541.412 dengan realisasi defisit sebesar Rp(261.284.118.385). Hal ini terjadi karena realisasi Belanja dan Transfer masih lebih besar yaitu 92,92% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan yang hanya 93,14%, meskipun keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, baik Pendapatan maupun Belanja dan Transfer. Secara ringkas, realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.39 Realisasi Perhitungan Surplus/(Defisit) Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PENDAPATAN	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863	(21,40)
BELANJA	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85	8.302.564.419.071	(5,51)
TRANSFER	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581	(15,93)
SURPLUS/(DEFISIT)	(305.987.541.412)	(261.284.118.385)	85,39	496.108.214.282	(152,67)

5.1.5. Pembiayaan

Rp305.987.808.375

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp305.987.808.375 atau 100,00% dari target sebesar Rp305.987.541.412. Secara ringkas, realisasi Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00
JUMLAH	305.987.541.412	305.987.808.375	100,00	(51.622.672.871)	(692,74)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp444.485.541.411

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari target sebesar Rp444.485.541.412 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp86.875.060.165, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah bertambah Rp357.610.481.246 atau naik 411,64%. Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.41 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64
JUMLAH	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp138.497.733.036

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari target sebesar Rp138.498.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp138.497.733.036, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berkurang Rp0 atau turun 0,00%. Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00	-	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00
JUMLAH	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025.

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP–SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan SAL TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Subtotal (3=1-2)	-	-	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) (4)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)
Subtotal (5=3+4)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	-	-	0,00
Lain-lain (7)	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+5+6+7)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp444.485.541.411

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 yaitu sebesar Rp444.485.541.411.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Rp444.485.541.411

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan seluruhnya merupakan SAL awal tahun 2025.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp44.703.689.990

SiLPA sebesar Rp44.703.689.990 merupakan SiLPA pada TA 2025.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0

Tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain-lain Rp0

Tidak Terdapat transaksi yang mempengaruhi Lain-lain.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp44.703.689.990

SAL Akhir sebesar Rp44.703.689.990 merupakan perhitungan dari SAL Awal Rp444.485.541.411 dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp444.485.541.411 ditambah SiLPA tahun berjalan Rp44.703.689.990 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0 ditambah Lain-lain Rp0.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Laporan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

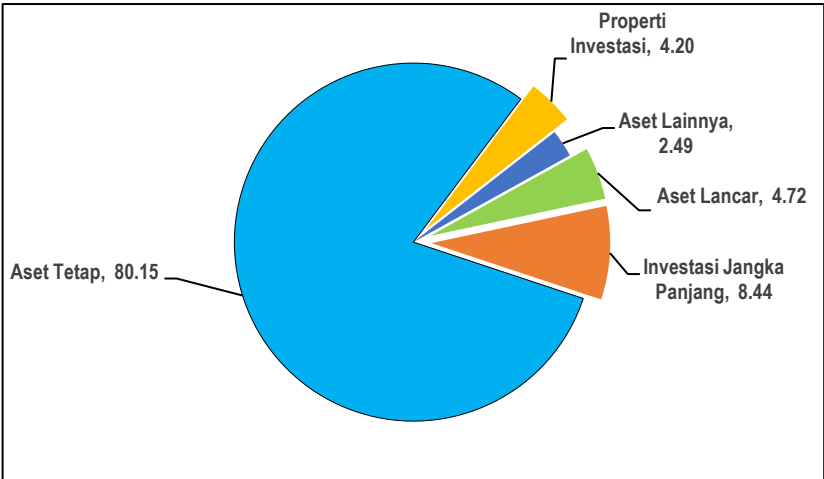
5.3.1 Aset Rp21.243.782.203.969

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.243.782.203.969 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Aset Lancar	1.002.897.415.788	709.708.890.375	293.188.525.413	41,31
Investasi Jangka Panjang	1.791.961.406.968	1.771.897.960.504	20.063.446.464	1,13
Aset Tetap	17.027.138.883.732	16.968.689.276.337	58.449.607.396	0,34
Properti Investasi	893.127.841.767	919.613.266.223	(26.485.424.456)	(2,88)
Aset Lainnya	528.656.655.714	520.834.459.866	7.822.195.848	1,50
JUMLAH	21.243.782.203.969	20.890.743.853.304	353.038.350.665	1,69

Grafik 5.3.1 Komposisi Aset Tahun 2025



Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp353.038.350.665 atau 1,69%.

Penjelasan lebih rinci mengenai Saldo Aset per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar Rp1.002.897.415.788

Aset Lancar terdiri dari kas, setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.002.897.415.788 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	335.671.538	429.351.948.995	(429.016.277.457)	(99,92)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	4.956.875.281	(4.956.875.281)	(100,00)
Kas di BLUD	35.713.661.608	9.071.167.006	26.642.494.602	293,71
Kas di Bendahara BOS	2.797.507.593	1.105.550.130	1.691.957.463	153,04
Kas Lainnya	-	47.270.000	(47.270.000)	(100,00)
Piutang Pajak Neto	3.950.747	273.741.488	(269.790.741)	(98,56)
Piutang Pajak	3.970.600	275.117.073	(271.146.473)	(98,56)
Penyisihan Piutang Pajak	(19.853)	(1.375.585)	1.355.732	(98,56)
Piutang Retribusi Neto	545.115.887	5.819.072.362	(5.273.956.475)	(90,63)
Piutang Retribusi	547.855.163	5.848.313.932	(5.300.458.769)	(90,63)
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.739.276)	(29.241.570)	26.502.294	(90,63)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	17.641.180	-	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.601.311	19.601.311	-	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(1.960.131)	-	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	349.914.788	1.473.519.541	(1.123.604.753)	(76,25)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	350.763.862	1.480.924.162	(1.130.160.300)	(76,31)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(849.074)	(7.404.621)	6.555.546	(88,53)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Neto	576.641.493.000	-	576.641.493.000	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	576.641.493.000	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
Beban Dibayar di Muka	4.609.749.111	6.596.759.060	(1.987.009.948)	(30,12)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.747.344.013	7.978.291.158	(230.947.145)	(2,89)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.126.882.873)	(2.301.008.749)	174.125.877	(7,57)
Piutang Lainnya Neto	5.856.849.251	-	5.856.849.251	0,00
Piutang Lainnya	10.897.963.851	12.333.916.600	(1.435.952.749)	(11,64)
Penyisihan Piutang Lainnya	(5.041.114.600)	(12.333.916.600)	7.292.802.000	(59,13)
Persediaan	368.278.517.071	243.017.054.176	125.261.462.895	51,54
JUMLAH	1.002.897.415.788	709.708.890.375	293.188.525.412	41,31

Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah

Rp335.671.538

Kas di Kas Daerah merupakan uang kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp335.671.538 tersimpan seluruhnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dengan nomor rekening 0801202021 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten.

Nomor rekening tersebut sesuai SK Gubernur Banten Nomor 583/Kep.127-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah

Provinsi Banten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Serang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan **Rp0**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di setor ke kas daerah dan pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan serta jasa giro yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca.

Pada tanggal 31 Desember 2025 seluruh Bendahara Pengeluaran telah menyetor sisa UP/TUP, pungutan pajak dan jasa giro.

d. Kas di BLUD **Rp35.713.661.608**

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo Kas RSUD Malingping dan RSUD Banten yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.713.661.608 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) saldo Kas BLUD di RSUD Banten di Bank Banten Nomor Rekening 0801000479 sebesar 28.880.239.670;
- 2) saldo Kas BLUD di RSUD Malingping di Bank Banten Nomor Rekening 0821000009 sebesar 4.596.978.197;
- 3) saldo Kas BLUD di RSUD Labuan di Bank Banten Nomor Rekening 0764008006 sebesar 2.119.099.816;
- 4) saldo Kas BLUD di RSUD Ciligrang di Bank Banten Nomor Rekening 0764008006 sebesar 117.343.926.

e. Kas di Bendahara BOS **Rp2.797.507.593**

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.797.507.593, yang seluruhnya berada pada Rekening Bendahara Bos di Bank Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4 Neraca**.

f. Kas Lainnya **Rp0**

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung Saldo Kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Tidak terdapat saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025.

g. Piutang Pajak

Rp3.950.747

Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Pajak neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.950.747 yang berasal dari saldo Piutang Pajak sebesar Rp3.970.600 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp19.853 yang seluruhnya merupakan saldo piutang Pajak Air Permukaan (PAP). Rekapitulasi Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 7 Neraca**.

Tabel 5.3.3 Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
PT.PANDJIWARINGIN	0035/SKPD/MLP/III/2025	14/03/2025	Februari	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0052/SKPD/MLP/IV/2025	15/04/2025	Maret	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0068/SKPD/MLP/V/2025	15/05/2025	April	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0097/SKPD/MLP/VI/2025	30/06/2025	Mei	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0101/SKPD/MLP/VII/2025	15/07/2025	Juni	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0169/SKPD/MLP/VIII/2025	15/08/2025	Juli	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0187/SKPD/MLP/IX/2025	16/09/2025	Agustus	1.800	UPTD Malingping	10/02/2026
Perkebunan Nusantara VII Kerta Jaya	0040/SKPD/MLP/III/2025	14/03/2025	Februari	3.576.400	UPTD Malingping	
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Bruto				3.970.600		
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan				(19.853)		
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Neto				3.950.747		

h. Piutang Retribusi

Rp545.115.887

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Retribusi neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp545.115.887 berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada:

1.

Rumah Sakit Umum Daerah Banten Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp413.805.500 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp415.884.925 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar 2.079.425;
2.

Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp129.113.427 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp129.762.238 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar Rp648.811;
3.

Rumah Sakit Umum Daerah Ciligrang Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp2.196.960 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp2.208.000 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar Rp11.040.

Rekapitulasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 8 Neraca**.

i. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Rp17.641.180

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.641.180 merupakan hasil dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bruto sebesar Rp19.601.311 dikurangi penyisihan piutangnya sebesar Rp1.960.131.

Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.601.311	19.601.311	-	0,00
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(1.960.131)	-	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	17.641.180	-	0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.601.311 merupakan Deviden tahun buku 2022 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2023 yang sampai saat ini belum bisa dibayarkan deviden dikarenakan PT.LKM Pandeglang di tahun buku 2024 masih mengalami kerugian.

j. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Rp349.914.788

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp349.914.788 merupakan hasil dari saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah bruto sebesar Rp350.763.862 dikurangi penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp849.074.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 5 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang BLUD	-	-	-	0,00
Piutang Jasa Giro	180.948.977	366.671.526	(185.722.549)	(50,65)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Denda PBBKB	168.276.785	1.113.771.536	(945.494.751)	(84,89)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Denda Pajak AP	1.538.100	481.100	1.057.000	219,70
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bruto	350.763.862	1.480.924.162	(1.130.160.300)	(76,31)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(849.074)	(7.404.621)	6.555.546	(88,53)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	349.914.788	1.473.519.541	(1.123.604.753)	(76,25)

Tabel 5.3.6 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=2-7
Piutang Jasa Giro Rekening Pemerintah Daerah	180.948.977	-	-	-	-	-	180.948.977
Denda PBBKB	168.276.785	841.384	-	-	-	841.384	167.435.401
Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.691	-	-	-	7.691	1.530.410
Total	350.763.862	849.074	-	-	-	849.074	349.914.788

Saldo piutang Jasa Giro sebesar Rp180.948.977 merupakan Jasa Giro untuk periode tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2025 atas saldo RKUD, Rekening Bendahara, Rekening BOS, Rekening BLUD RSUD Banten, BLUD RSUD Malingping, Rekening BLUD RSUD Labuan dan Rekening BLUD RSUD Ciligrang serta Rekening penerima hibah Baznas pada Bank Banten yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena penyetoran Jasa Giro oleh Bank Banten dilakukan secara *auto kredit* setiap tanggal 25 berdasarkan hasil perhitungan per tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk setiap periode dan seluruhnya telah diterima di RKUD pada tanggal 25 Januari 2026 dan penyetoran Jasa Giro Baznas tanggal 6 Januari 2026.

Rincian lebih lanjut Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran 10 dan 11 Neraca**.

k. Piutang Transfer Pemerintah Pusat **Rp576.641.493.000**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua

belas) bulan. Pada Tahun 2025, Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Banten berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak pemerintah daerah yang belum ditransfer dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp576.641.493.000. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang di atur dalam perundang-undangan.

Rincian lebih lanjut Piutang Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 12 Neraca**.

I. **Beban Dibayar Dimuka** **Rp4.609.749.111**

Beban Dibayar Dimuka merupakan akun untuk menampung sejumlah pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diterima prestasi kerjanya atau belum dirasakan manfaatnya setelah tanggal neraca namun telah dibayar pada TA 2025.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.609.749.111 dan Rp6.596.759.060. Rincian untuk tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.7 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BEBAN DIBAYAR DIMUKA (Rp)
1	2	3	4	5=2+3+4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.904.110	-	-	216.904.110
Dinas Kesehatan	-	-	-	-
UPT RSUD Banten	-	-	-	-
UPT RSUD Malingping	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.338.798	174.757.563	-	281.096.361
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	20.371.738	-	20.371.738
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	22.027.397	-	-	22.027.397
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	57.869.863	-	-	57.869.863
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.808.743	-	-	104.808.743
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	12.600.000	-	12.600.000
Dinas Perhubungan	-	76.678.962	93.845.455	170.524.416
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	89.913.093	89.913.093
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	8.677.049	-	8.677.049
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	11.886.509	-	11.886.509
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BEBAN DIBAYAR DIMUKA (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	59.280.435	-	59.280.435
Dinas Pariwisata	114.042.819	-	-	114.042.819
Dinas Pertanian	-	5.175.401	-	5.175.401
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	41.516.339	-	41.516.339
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.186.760	54.380.150	-	107.566.910
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
Biro Hukum	-	-	-	-
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
Biro Umum	89.051.781	13.825.137	-	102.876.917
Biro Pengadaan Barang/Jasa	68.154.000	-	-	68.154.000
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
Biro Administrasi Pimpinan	13.643.836	-	-	13.643.836
Sekretariat DPRD	43.961.644	408.063.760	-	452.025.404
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	85.352.003	-	85.352.003
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.852.459	-	6.502.732	15.355.191
Badan Pendapatan Daerah	2.316.821.577	161.002.603	-	2.477.824.180
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	22.906.557	22.906.557
Badan Penghubung	-	-	13.725.249	13.725.249
Inspektorat	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	33.624.590	-	33.624.590
JUMLAH	3.215.663.786	1.167.192.239	226.893.086	4.609.749.111

Rincian Sewa Tempat dapat dilihat pada **Lampiran 15.1 Neraca**, rincian Premi Asuransi dapat dilihat pada **Lampiran 15.2 Neraca** dan rincian lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15.3 Neraca**.

m. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi **Rp7.747.344.013**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.747.344.013 dan Rp7.978.291.158. Rincian untuk tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.8 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Penyisian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.126.882.873)	(2.301.008.749)	174.125.877	(7,57)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.747.344.013	7.978.291.158	(230.947.145)	(2,89)

Terdapat penambahan (pengurangan) nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto) sebesar Rp405.073.021 yang disebabkan:

- a. koreksi kurang saldo awal sebesar (Rp3.000.000) karena adanya setoran tahun sebelumnya yang baru dicatat sebagai setoran piutang Tuntutan Ganti Kerugian;
- b. adanya penambahan bagian lancar piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas SKTJM yang terbit di tahun 2025 sebesar Rp43.983.000;
- c. reklasifikasi dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sudah jatuh tempo sebesar Rp6.144.286;
- d. adanya pembayaran cicilan sebesar (Rp452.200.307).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13 Neraca**.

n. Piutang Lainnya **Rp5.856.849.251**

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo Piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tetapi tidak termasuk dalam Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD.

Saldo Piutang Lainnya bruto per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.897.963.851 dengan akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp5.041.114.600 atau piutang bersih sebesar Rp5.856.849.251, terdiri dari:

- 1. Piutang Pengadaan ALKES sebesar Rp5.041.114.600 yang telah di sisihkan seluruhnya;
- 2. Piutang atas Pengembalian Belanja sebesar Rp5.856.849.251 yang tersebar pada beberapa SKPD tanpa dilakukan penyisihan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14 Neraca**.

Tambahan informasi terkait Piutang Pengadaan ALKES dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT. Palugada Mandiri Pengadaan sarana penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp10.790.264.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.158.052.800;
- b) PT. Mikkindo Adiguna Pratama Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Ruang Operasi RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.415.309.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.883.061.800.

Bila dibandingkan saldo tahun 2024 sebesar Rp12.333.916.600, terdapat penurunan saldo piutang lainnya sebesar Rp7.292.802.000, dikarenakan telah direklas menjadi aset tetap-alat kesehatan, dengan rincian penurunan sebagai berikut:

- a. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp21.575.992.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp4.315.198.400;
- b. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscoy*) RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.888.018.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.977.603.600.

Hal ini disebabkan telah inkrah putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pdt/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 yang mengabulkan tuntutan agar Provinsi Banten memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar sebesar

Rp10.230.128.400 kepada CV. Bina Sadaya, dan Provinsi Banten telah membayar tagihan sejumlah tersebut pada tanggal 10 November 2025 melalui SP2D Nomor: 959.4/011182/LS/BUD/2025.dengan rincian sebagai berikut:

- a. Atas kontrak Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten dengan Nilai Kontrak Rp21.575.992.000, nilai barang yang sudah dikirim berdasarkan putusan sidang sebesar Rp9.992.785.000, sehingga dengan telah dibayarkannya uang muka sebesar Rp4.315.198.400 pada tanggal 26 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10745/DINKES/ LS/09.02/2013, sisa kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp5.677.586.600;
- b. Atas kontrak Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscopy*) RS Provinsi Banten dengan Nilai Kontrak Rp14.888.018.000, nilai barang yang sudah dikirim berdasarkan putusan sidang sebesar Rp7.530.146.000, sehingga dengan telah dibayarkannya uang muka sebesar sebesar Rp2.977.603.600 pada tanggal 24 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10651/DINKES/LS/09.02/2013, sisa kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.552.542.400.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14 Neraca**.

o. Persediaan **Rp368.278.517.071**

Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah, atau dimaksudkan dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024. Masing-masing sebesar Rp368.278.517.071 dan Rp243.017.054.177 Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berdasarkan *stock opname* yang dilakukan oleh SKPD dan *monitoring* Inspektorat Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 s.d 9 Januari 2026 yang tertuang di dalam BA Rekonsiliasi barang persediaan dan BA *monitoring stock opname* barang persediaan.

Selengkapnya rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024
Berdasarkan jenis Persediaan

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.060.757.342	2.810.344.982
Bahan Kimia	577.222.654	290.811.947
Bahan Bakar dan Pelumas	86.837.255	51.103.750
Bahan Baku	29.376.348	22.812.500
Bahan/Bibit Tanaman	243.077.116	45.808.720
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.284.630	2.000.000
Isi Tabung Gas	181.712.135	2.357.801
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.061.171.732	1.269.984.132
Bahan Lainnya	119.741.023	116.011.000
Suku Cadang Alat Angkutan	16.158.000	3.955.500
Suku Cadang Alat Besar	2.052.000	1.550.000

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Suku Cadang Alat Kedokteran	35.685.304.512	48.066.003.010
Suku Cadang Alat Laboratorium	4.359.657.404	6.347.914.923
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.624.759	6.483.500
Suku Cadang Alat Pertanian	61.868.653	175.003.612
Suku Cadang Alat Bengkel	126.028.399	27.651.900
Suku Cadang Lainnya	10.229.781	-
Alat Tulis Kantor	11.269.966.188	12.502.442.384
Kertas dan Cover	2.373.361.397	1.694.277.567
Bahan Cetak	10.528.500	2.450.000
Benda Pos	29.580.000	27.476.253
Bahan Komputer	4.331.907.715	3.695.783.283
Perabot Kantor	4.636.803.194	4.023.207.692
Alat Listrik	1.586.639.402	1.746.708.298
Perlengkapan Dinas	120.571.647	286.734.000
Perlengkapan Pendukung Olahraga	565.317.948	294.379.220
Suvenir/Cendera Mata	890.597.280	698.854.300
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.664.763	1.022.046.226
Obat	37.471.978.496	40.178.271.006
Obat-obatan Lainnya	7.254.513	440.000
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	56.400.045.298	69.915.010.992
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	194.237.242.612	21.718.173.655
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	3.833.693.237	17.099.332.384
Natura	5.456.823.757	8.463.540.014
Pakan	128.450.875	407.092.750
Natura dan Pakan Lainnya	184.523.506	1.036.875
Komponen Rambu-Rambu	128.463.000	-
JUMLAH	368.278.517.071	243.017.054.177

Rincian Saldo persediaan per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 17 Neraca**.

Tabel 5.3.10 Rincian Persediaan berdasarkan Penggunaan persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda	113.807.535.924	134.284.537.146
Persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat	254.470.981.147	108.732.517.030
JUMLAH	368.278.517.071	243.017.054.177

Rincian persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 18 Neraca**.

Rincian persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 19 Neraca**.

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.11 Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024	243.017.054.177
Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025	452.425.618
Mutasi Tambah:	1.163.548.567.672
Belanja Barang Persediaan	918.994.873.493
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	87.689.720.653
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	101.173.280.145
Reklasifikasi dari Belanja Modal	7.424.543.772
Reklasifikasi dari Belanja Hibah	37.932.531.904
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat dan BUMD	396.531.683
Penerimaan Lainnya	9.937.086.021
Mutasi Kurang:	(1.038.739.530.395)
Beban Persediaan	(362.301.467.682)
Reklasifikasi ke Beban Hibah	(673.547.388.211)
Reklasifikasi ke Aset Tetap	(1.366.411.884)
Rusak/Kedaluwarsa	(1.114.917.065)
Pengeluaran Lainnya	(409.345.554)
Saldo Per 31 Desember 2025	368.278.517.071

Penjelasan Rincian Selisih adalah sebagai berikut:

Penjelasan Rincian Koreksi Saldo Awal sebesar Rp452.425.618 terdapat pada:

- a) Koreksi tambah Saldo Awal pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp510.025.618 berupa penyesuaian harga satuan beras menjadi senilai Rp12.607,29/kg terhadap hasil *stockopname* beras Provinsi Banten di Gudang BULOG yang dilakukan oleh Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
- b) Koreksi kurang Saldo Awal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp57.600.000 berupa pengurangan nilai hasil PHO Inspektorat terhadap Persediaan PSU Tahun 2024 atas 2 Paket Pekerjaan yang menjadi Kewajiban Pembayaran pada Tahun 2025, yaitu:
 - 1) Pembangunan/peningkatan kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 008, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang berkurang senilai Rp9.480.000 dari Nilai Kontrak Rp187.630.000 menjadi Rp178.150.000 sesuai SP2D Nomor 959.4/011185/LS/BUD/2025 Tanggal 10 November 2025
 - 2) Pembangunan/ peningkatan kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, RW. 007 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang senilai Rp48.120.000 dari nilai kontrak Rp562.630.000 menjadi Rp514.510.000 sesuai SP2D Nomor 959.4/011183/LS/BUD/2025 Tanggal 10 November 2025

Penjelasan Rincian Mutasi Tambah yaitu:

a) Belanja Barang Persediaan sebesar Rp918.994.873.493 merupakan belanja barang persediaan pada tahun anggaran 2025 yang tersebar pada seluruh SKPD sebesar Rp920.434.483.493 dikurangi koreksi senilai Rp1.439.610.000 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa barang telah dicatat atas perolehan PSU Tahun 2024

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.134.484.629
- Dinas Kesehatan	81.339.308.196
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.681.727.594
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	464.557.918.033
- Satuan Polisi Pamong Praja	734.089.814
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.664.441.550
- Dinas Sosial	6.645.213.325
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.216.874.888
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	3.470.930.531
- Dinas Ketahanan Pangan	4.795.755.292
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.874.785.425
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.298.587.484
- Dinas Perhubungan	2.531.393.855
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.641.934.818
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	665.017.118
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	706.383.561
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.146.119.361
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	673.352.860
- Dinas Kelautan dan Perikanan	6.490.613.341
- Dinas Pariwisata	4.924.006.677
- Dinas Pertanian	35.301.884.379
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	669.997.760
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.374.292.523
- Sekretariat Daerah	12.502.985.832
- Sekretariat DPRD	32.943.346.216
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.863.679.525
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.406.473.352
- Badan Pendapatan Daerah	17.471.058.809
- Badan Kepegawaian Daerah	1.124.028.513
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.226.646.596
- Badan Penghubung	308.673.974
- Inspektorat Provinsi	1.106.245.144
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.502.622.518
JUMLAH	918.994.873.493

b) Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD sebesar Rp87.689.720.653 terdapat pada Dinas Kesehatan yang tersebar pada

- RSUD Banten	69.336.678.944
- RSUD Malingping	13.867.112.000
- RSUD Ciligrang	1.746.013.179
- RSUD Labuan	2.739.916.530
JUMLAH	87.689.720.653

c) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp101.173.280.145 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebar pada seluruh Unit Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Khusus.

d) Reklasifikasi dari Belanja Modal sebesar Rp7.424.543.772 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Perlengkapan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan senilai Rp1.219.512.122 dan Barang	1.255.380.122
--	---------------

Persediaan bersumber dari BOS pada unit sekolah senilai Rp35.868.000	
- Dinas Kesehatan pada RSUD Banten berupa Perlengkapan untuk Pelayanan Pendaftaran Pasien	6.659.400
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Konsultan Pengawasan pada persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain	273.950.500
- Dinas Perhubungan berupa Stok Lampu Penerangan Jalan	5.859.000.000
- Sekretariat Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan berupa Perlengkapan Rumah Tangga	29.553.750
JUMLAH	7.424.543.772
e) Reklasifikasi dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yang belum diserahterimakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp37.932.531.904 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:	
- Pembangunan Peningkatan Infrastruktur layanan Kejaksaan Tinggi Banten	13.039.162.152
- Pembangunan TK Adyaksa Kejaksaan Tinggi Banten	2.578.150.565
- Pembangunan Gedung Kantor BIN Daerah Provinsi Banten	8.031.846.112
- Pembangunan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten	12.624.003.975
- Pembangunan Gedung PPID Satuan Brimob Polda Banten	1.363.260.000
- Renovasi Lapangan Tennis Grup 1 Kopasus	296.109.100
JUMLAH	37.932.531.904
f) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat dan BUMD sebesar Rp396.531.683 terdapat pada:	
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Barang Persediaan peruntukan Siswa dan Layanan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Khusus perolehan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	329.311.683
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Perlengkapan Rumah Tangga peruntukan Korban Bencana perolehan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	58.640.000
- Badan Penghubung berupa Perlengkapan Rumah Singgah perolehan dari <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Bank Banten	8.580.000
JUMLAH	396.531.683
g) Penerimaan Perolehan Lainnya sebesar Rp9.937.086.021 terdapat pada:	
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kewajiban Pembayaran Tahun 2026 atas pekerjaan tahun 2025	9.098.712.627
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Kewajiban Pembayaran Tahun 2026 atas pekerjaan tahun 2025	630.293.394
- Dinas Kelautan dan Perikanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut berupa Produksi Perikanan terdiri dari Benih Ikan senilai Rp8.175.000,00 dan Ikan Konsumsi senilai Rp33.475.000,00	41.650.000
- Dinas Pertanian pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak berupa kelahiran hewan	166.430.000

ternak terdiri dari Kerbau, Sapi, Domba dan Kambing

JUMLAH

9.937.086.021

Penjelasan Rincian Mutasi Kurang yaitu:

a) Beban Persediaan sebesar Rp362.301.467.682 tersebar pada SKPD sebagai penggunaan barang persediaan;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.042.996.147
- Dinas Kesehatan	121.430.472.830
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.760.768.144,38
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.708.903.131
- Satuan Polisi Pamong Praja	853.767.914
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.593.087.285
- Dinas Sosial	4.104.136.895
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.603.804.180
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.126.013.589
- Dinas Ketahanan Pangan	712.211.858
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.888.864.671
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	793.774.644
- Dinas Perhubungan	8.514.774.034
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.640.257.243
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	464.715.183
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	650.917.126
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.702.683.420
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	619.771.560
- Dinas Kelautan dan Perikanan	3.946.189.875
- Dinas Pariwisata	1.219.829.541
- Dinas Pertanian	5.776.851.638
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	592.845.460
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.456.526.004
- Sekretariat Daerah	12.540.935.245
- Sekretariat DPRD	33.055.906.492
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.890.246.615
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.961.414.286
- Badan Pendapatan Daerah	18.371.804.751
- Badan Kepegawaian Daerah	1.130.786.093
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.231.996.096
- Badan Penghubung	322.632.093
- Inspektorat Provinsi	1.114.798.363
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.476.785.276
TOTAL	362.301.467.682

b) Reklasifikasi ke Beban Hibah berupa Barang Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat/ sebesar Rp673.547.388.211 tersebar pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.906.991.161
- Dinas Kesehatan	66.769.742.818
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.519.531.722
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	475.700.928.864
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.582.396.765
- Dinas Sosial	2.616.057.341
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.637.255.426
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.343.769.947
- Dinas Ketahanan Pangan	16.082.182.594
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.916.134.628
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	522.185.240
- Dinas Perhubungan	161.541.630
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196.630.000

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68.022.003
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	469.050.591
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	53.262.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan	2.353.992.255
- Dinas Pariwisata	3.706.394.256
- Dinas Pertanian	29.694.872.160
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	88.436.275
- Badan Pendapatan Daerah	444.347.998
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	478.690.495
- Inspektorat Provinsi	217.452.069
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.519.974
JUMLAH	673.547.388.211

c) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.366.411.884 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	843.748.560
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.880.000
- Dinas Sosial	12.765.000
- Dinas Perhubungan	6.990.780
- Dinas Pertanian	23.963.790
- Sekretariat Daerah	92.078.400
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000
- Badan Pendapatan Daerah	308.931.300
- Inspektorat Provinsi	3.054.054
JUMLAH	1.366.411.884

d) Rusak/Kedaluwarsa sebesar Rp1.114.917.065 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan yang tersebar pada:

- RSUD Banten berupa Suku Cadang Alat Kedokteran dan Obat	370.041.325
- RSUD Malingping berupa Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang Alat Laboratorium dan Obat	93.901.029
- RSUD Ciligrang berupa Natura	818.780
- Badan Pendapatan Daerah berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	650.155.930
JUMLAH	1.114.917.065

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi rusak/kedaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran 20 Neraca**.

e) Pengeluaran Lainnya sebesar Rp409.345.554 terdapat pada Dinas Pertanian pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak berupa penjualan dan kematian hewan ternak pada tahun 2025.

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 20 Neraca**.

5.3.1.2

Investasi Jangka Panjang

Rp1.791.961.406.968

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar.

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten pada perusahaan *investee* atau BUMD tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.791.961.406.968 dan Rp1.771.897.960.504. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Banten tidak melakukan tambahan penyertaan modal. Rincian penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Setoran Modal Provinsi Banten per 31 Desember 2025

PERUSAHAAN/ LEMBAGA	NILAI PENYETORAN (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN	METODE PERHITUNGAN	NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp)
PT. BGD	35.361.227.000	99,57%	METODE EKUITAS	39.236.911.389
PT. BPD BANTEN	2.165.600.000.000	66,11%	METODE EKUITAS	1.417.603.945.900
PT. JAMKRIDA	51.000.000.000	90,27%	METODE EKUITAS	73.686.344.126
PD. BPR SERANG	15.000.000.000	30,97%	METODE EKUITAS	38.845.243.179
PD. BPR KERTA RAHARJA	15.000.000.000	20,94%	METODE EKUITAS	28.703.460.193
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	80.000.000.000	100,00%	METODE EKUITAS	57.138.038.182
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	4,95%	METODE HARGA PEROLEHAN	130.147.464.000
PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	6,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	3.000.000.000
PT. LKM RANGKASBITUNG	470.700.000	6,27%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.350.000.000
PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	1,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	300.000.000
PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	7,32%	METODE HARGA PEROLEHAN	900.000.000
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	7,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.050.000.000
TOTAL	2.497.829.391.000			1.791.961.406.968

Penghitungan nilai investasi pada perusahaan *investee* secara metode ekuitas. Terdapat penambahan/(pengurangan) nilai pernyataan modal yang bersumber dari:

- a) Kapitalisasi atas Laba sebesar Rp47.198.307.551 yaitu pada:

1. PT. BGD

Rp4.309.105.229

2. PT. BPD Banten

Rp34.143.170.600

3. PT. Jamkrida

Rp4.825.144.137

4. PD. BPR Serang

Rp2.008.449.973

5. PD. BPR KERTA RAHARJA

Rp1.912.437.613
- b) Kapitalisasi atas rugi sebesar (Rp20.271.177.029) pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda);
- c) Deviden 2024 sebagai pengurangan investasi sebesar (Rp7.069.950.673) yaitu pada:

1. PT. Jamkrida

(Rp4.329.948.642)

2. PD. BPR Serang

(Rp2.049.590.915)

3. PD. BPR KERTA RAHARJA

(Rp690.411.116)
- d) Terdapat koreksi tambah pencatatan pada PT. BGD sebesar Rp206.266.615 dikarenakan pada saat penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten *Audited* 2024, Laporan Keuangan PT.BGD masih *un-Audited*, sehingga dilakukan koreksi atas laba yang kurang catat pada tahun 2024.

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah

Banten (Perseroda) Terbuka tanggal 30 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal kepada PT. BPD Banten berupa tanah dan bangunan sebesar Rp139.569.320.000, dengan rincian:

- 1. eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan senilai Rp96.269.120.000;
- 2. gedung lama pusat layanan usaha terpadu (PLUT) senilai Rp13.645.600.000;
- 3. gedung samsat Cikokol lama senilai Rp22.278.300.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4. Tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten senilai Rp7.376.300.000

SK Penghapusan empat lokasi tersebut masih dalam proses sehingga Pemerintah Provinsi Banten masih mencatat pada aset lain-lain dan belum mengakui penambahan penyertaan modal pada PT. BPD Banten.

Perhitungan Nilai penyertaan modal Banten selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Rp17.027.138.883.732

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan metode akuntansi berbasis akrual, dimana pengaruhnya terhadap aset tetap adalah diterapkannya penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan aset tetap yang diberlakukan di Provinsi Banten adalah metode garis lurus (*straight line*) bulanan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.027.138.883.732. Saldo Aset Tetap disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

URAIAN	Per 31 Desember 2025		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	9.363.770.901.401	-	9.363.770.901.401
Peralatan dan Mesin	4.539.113.218.722	(3.668.547.668.380)	870.565.550.342
Gedung dan Bangunan	5.383.991.912.324	(2.338.707.763.571)	3.045.284.148.752

URAIAN	Per 31 Desember 2025		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.506.088.574.010	(6.286.748.522.861)	3.219.340.051.149
Aset Tetap Lainnya	514.565.838.910	(38.636.519.886)	475.929.319.024
Konstruksi dalam Pengerjaan	52.248.913.064	-	52.248.913.064
JUMLAH	29.359.779.358.431	(12.332.640.474.699)	17.027.138.883.732

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 22 Neraca**. Adapun mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

URAIAN	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	9.287.817.013.353	149.880.006.472	(73.926.118.424)	9.363.770.901.401
Peralatan dan Mesin	4.224.775.742.903	398.424.652.523	(84.087.176.704)	4.539.113.218.722
Gedung dan Bangunan	5.021.714.531.995	426.773.920.258	(64.496.539.929)	5.383.991.912.324
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.015.649.850.754	526.042.416.392	(35.603.693.136)	9.506.088.574.010
Aset Tetap Lainnya	469.710.626.512	48.255.570.408	(3.400.358.010)	514.565.838.910
Konstruksi dalam Pengerjaan	198.760.372.691	38.920.302.322	(185.431.761.949)	52.248.913.064
JUMLAH	28.218.428.138.209	1.588.296.868.375	(446.945.648.152)	29.359.779.358.431

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 23 Neraca**. Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah Rp9.363.770.901.401

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2025 sebesar Rp9.363.770.901.401 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp9.287.817.013.353 atau mengalami peningkatan sebesar Rp75.953.888.048 (0,82%). Rincian mutasi aset tetap Tanah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Saldo Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	9.287.817.013.353
Mutasi Tambah:	149.880.006.472
Belanja Modal Tahun 2025	117.739.329.059
Kapitalisasi dari akun Hibah/lainnya	9.104.437.613
Koreksi atas Data Baru Catat	22.838.904.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	197.335.800
Mutasi Kurang:	(73.926.118.424)
Reklasifikasi atas perubahan Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(37.026.371.218)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(212.416.830)
Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi	(36.606.473.366)

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Mutasi Antar KIB (Keluar) ke Akun Konstruksi dalam Pengerjaan	(80.857.010)
Saldo Per 31 Desember 2025	9.363.770.901.401

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp149.880.006.472 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp117.739.329.059 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp61.519.366.328
Berupa pengadaan Tanah untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Unit Sekolah Baru untuk SMKN 15 Kabupaten Pandeglang, SMKN 6 Kota Serang, SMKN 17 Kabupaten Pandeglang, SMKN 2 Cihara, SMKN 11 Kota Tangerang, SMAN 30 Kabupaten Tangerang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp56.219.962.731
berupa pengadaan Tanah untuk ruas Jalan Sempu - Dukuh Kawung (Cipocok -Sp. Boru) dan Akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten.
- 2) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp9.104.437.613 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.104.437.613
berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan, Tanah Ruang Terbuka Hijau Hibah dari Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten peruntukan SMKN 12 Kota Tangerang seluas 3000 m2 berlokasi di Jl. Raden Fatah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan SMKN 3 Kota Serang hibah dari Masyarakat seluas 423 m2 berlokasi di Jl Kimara Walantaka Kota Serang.
- 3) Koreksi atas data baru catat berdasarkan hasil Inventarisasi BMD tahun 2025 sebesar Rp22.838.904.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan di SMAN 8 Kota Serang dan SMAN 6 Kota Serang.
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp197.335.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Appraisal Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan di SMKN 11 Kota Tangerang, SMKN 2 Cihara, SMKN 17 Pandeglang dan SMKN 6 Kota Serang.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp73.926.118.424 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi atas perubahan Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (Rusak Berat) berdasarkan Surat Keputusan Hibah dan Surat Pernyataan Kepala OPD tentang Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Tanah sebesar Rp37.026.371.218, Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan masih dalam proses terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14.636.736.696
berupa Tanah Pengganti Polsek Cipocok Jaya dan Tanah Pengadilan Agama Banten dan Situ Rawa Kambing
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp892.242.000
berupa 2 Bidang Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Mesjid Alfaizah Cikoneng Anyer yang dihibahkan ke Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Wilayah Kabupaten Serang

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp24.075.786
berupa Tanah Puskesmas Majasari Kabupaten Pandeglang
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp296.501.000
berupa BOP Tanah Jalan Serdang-Bojonegara-Merak dan Jalan Raya Cilegon-Pasuruan yang status kewenangannya Kementerian PUPR Pusat
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp21.176.815.736
berupa Penyertaan Modal Pemerintah berbentuk non tunai / barang (Inbreng) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah berlokasi di:
 - a) Jl. Syech Nawawi Al- Bantani Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang (Gedung Plut)
 - b) Jl. Raya Jakarta km 4,5 Pakupatan
 - c) Jl. Veteran Kel/Desa Cipare, Kec. Serang, Kota Serang
 - d) Jl. Yumaga Kelurahan Cipare, Kec Serang, Kota Serang
 - e) Jl. Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang dan Hibah Ke KEMENDIKTISAINTEK berlokasi di Jl. Syech Nawawi Al- Bantani Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
- 2) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp212.416.830 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan batalnya pengadaan lahan berupa:
- a) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Cihara dikarenakan atas dasar pertimbangan bahwa SMKN 1 Cihara akan di Marger dengan SMKN 2 Cihara sehingga pengadaan lahan untuk SMKN 1 Cihara tidak jadi dilaksanakan
 - b) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 12 Kota Tangerang dikarenakan atas dasar pertimbangan Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 sehingga pengadaan lahan untuk SMKN 12 Kota Tangerang tidak jadi dilaksanakan
 - c) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SKHN 01 Kota Tangerang dikarenakan atas dasar pertimbangan split bidang tanah SMKN 10 Kota Tangerang peruntukan SKHN 01 Kota Tangerang sehingga pengadaan lahan untuk SKHN 01 Kota Tangerang tidak jadi dilaksanakan
- 3) Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp36.606.473.366
- 4) Mutasi Antar KIB (Keluar) ke Akun Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp80.857.010 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Jasa Feasibility Study (FS) Lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang dipinjamakai oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.16 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2025

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M ²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
1.	264/2024 181-28-A	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kwarda Pramuka Banten	Luas Bangunan 1.288 M ² Luas Tanah 5.620 M ²	Tgl 23-10-2024 s/d Tgl 22-10-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000004	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000004

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M ²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
2.	41/2025 PL.01/4DPD RI/II/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPD RI	Bangunan 180 M ²	Tgl 12-02-2025 s/d Tgl 11-02-2027	Biro Umum 01.01.11.04.001 000001	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000006
3.	25/2025 032/99-BPKAD/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (BPKAD)	Tanah 500 M ² Bangunan 200 M ²	Tgl 02-01-2025 s/d Tgl 01-01-2027	Dinas Pertanian 01.01.11.04.001 000002	
4	42/2025 12/HM.04.01/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Kepegawaian Negara	Tanah 760 M ² Bangunan 297 M ²	Tgl 03-03-2025 s/d Tgl 02-03-2027	Bapenda 01.01.11.04.001 000001	Bapenda 03.11.01.01.001 000001
5.	02/2024 2/PR.08-PKS/36/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten	Tanah 2.400 M ² Bangunan 2.717 M ²	Tgl 03-03-2024 s/d Tgl 03-03-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000002	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000005
6.	26/2025 PL 03.05.2.01.25.01	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milk Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Tanah 9.063 M ²	Tgl 31-01-2025 s/d Tgl 30-01-2027	Biro Umum 01.01.11.04.014	
7.	24/2025 01/I/KaILG.03.02./2025/BNNP Banten	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNN Banten)	Tanah 5.522 M ²	Tgl 01-02-2025 s/d Tgl 31-01-2027	Biro Umum 01.01.11.04.001	
8.	000.2.3.2/4736-BPKAD/2023 593/4208/BPKAD/2023	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Dispora)	Tanah 1.190 M ²	Tgl 24-12-2023 s/d Tgl 23-12-2025	1.3.1.01.01.04.001	
9	032/879-BPKAD/2022 01/III/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Komando Resort Militer 064 Maulana Yusuf	Tanah 4.000 M ²	Tgl 15-03-2022 s/d Tgl 14-03-2027	01.01.11.04.001	

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M ²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
10.	3/2025 B/14/MOU/XI/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Resort Lebak	Tanah 154 M ²	Tgl 02-01-2025 s/d Tgl 31-01-2027	1.3.1.01.01.04.017 000001	
11.	23/2025 B/I/LOG.1.7/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Banten	Tanah 665 M ²	Tgl 05-02-2025 s/d Tgl 04-02-2027	1.3.1.01.01.04.001 000001	

2. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang disewakan oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.17 Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M ²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
1	032/2538-BPKAD/2020 001/SPK/BKS/XI/2020	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Karya Sukses (SPBN Panimbang)	68.310.000	414	Tgl 28-11-2020 s/d Tgl 29-11-2025	Biro Umum 01.01.13.09.004 000017	
2	032/4063-BPKAD/2022	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	53.506.500		Tgl 01-01-2023 s/d Tgl. 31-12-2025	Bapenda (UPT PPD Ciledug/ Provinsi Banten 1.3.1.01.01.04. 001/479/479	
3	900.1.14.3/012-BPKAD/2025 001/PKS/Dir-BB/I/2025	Perjanjian Sewa Menyewaan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten TBK . Lokasi : 2. Kantor BPKAD (ATM)	48.608.000	8,68	Tgl 01-01-2025 s/d	Biro Umum dan Perlengkapan 01.01.11.04.001	BPKAD BPKAD 03.11.01.01.001
		3. DPRD Banten (ATM)	33.600.000	6,00	Tgl 01-01-2027 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 01-01-2027	000012 Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	000001
4	032/2771-DKP/2022 01/SP/UWJ/IX/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Utama Wana Jaya (SPBN Binuangeun)	158.400.000	480	Tgl 01-01-2021 s/d Tgl 31-12-2026	DKP 01.3.1.01.01.04. 017/000001	
5	032/4071-Bapenda/2022 102/PKS-BB/XII/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Kantor Bapenda (Kantor Kas) Kantor Bapenda (ATM) UPT PPD Serang (ATM) UPT PPD Pandeglang(ATM) UPT PPD Rangkasbitung(ATM)	49.624.000 33.600.000 67.200.000 27.440.000 7.788.000	34,8 6,00 12,00 7,84 2,28	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026	Berkas di BAPENDA	

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M ²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
		UPT PPD Cilegon(ATM)	37.382.000	8,96	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Balaraja(ATM)	25.688.000	6,60	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Cikokol (ATM)	47.290.000	7,28	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Ciledug (ATM)	62.619.000	7,00	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Ciputat (ATM)	40.376.000	7,00	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Serpong (ATM)	62.916.000	10,50	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Cikande (ATM)	25.446.000	12,80	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPDS Malingping (ATM)	20.980.000	20,25	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
6	032/4074-BAPENDA/2022 064/KW4-SUP/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (ATM) UPT PPD Ciledug	53.506.500	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
7	100.3.7/011-BAPENDA/2025 B.1427-KC-XV/LOG/04/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk UPTD PPD Cikokol (ATM)	47.290.000	7,28	Tgl 21-04-2025 s/d Tgl 21-04-2027		
8	100.3.7/010-BAPENDA/2025 B.1427 KC-XV /LOG/04/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk UPT PPD Serpong (ATM)	40.826.600	10,50	Tgl 21-04-2025 s/d Tgl 21-04-2027		
9	B-000.2.3.2/1125/BPKAD/2024 017/PKS/DIR-BB/III/2024	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ATM Setda Provinsi Banten	49.972.500	12	Tgl. 01-01-2024 s/d 31-01-2026		
10	100.3.7/5217-DPUPT/2025 08/Pop12/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Populer Kaca Utama	1.798.609.000	6.382	Tgl. 21-09-2025 s/d 20-09-2026		

3. Rekap Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat

Tabel 5.3.18 Aset Tetap Tanah Bersertifikat per 31 Desember 2025

SKPD	S.D TAHUN 2024	TAHUN 2025	S/D 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375	18	393
Dinas Kesehatan	51	0	51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	352	96	448
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	155	1	156
Dinas Sosial	13	0	13
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5	0	5
Dinas Perhubungan	3	0	3
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	0	1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	0	4
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	0	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1

SKPD	S.D TAHUN 2024	TAHUN 2025	S/D 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	0	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	27	0	27
Dinas Pertanian	21	0	21
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56	0	56
Biro Umum	10	0	10
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	0	1
Badan Penghubung	1	0	1
Badan Pendapatan Daerah	28	0	28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	0	7
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	0	1
Dinas DP3AKKB	0	1	1
TOTAL	1.118	116	1.234

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3 CALK** dan **Lampiran 4 CALK**.

4. Upaya pengamanan tanah (sertifikasi) sampai dengan tahun 2025, dari 1.528 bidang tanah milik Provinsi Banten sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 1.234 bidang Tanah sudah bersertifikat Pada Tahun 2025 a.n. Pemerintah Provinsi Banten;
 - b) Sebanyak 116 bidang tanah telah terbit sertifikat pada tahun 2025;
 - c) Total tanah Pemerintah Provinsi Banten yang telah bersertifikat sejumlah 1.234 bidang (80,75%). Termasuk didalamnya Sertifikat 20 buah Situ/Danau/Embung/Waduk (SDEW), yaitu : Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Cihuni, Situ Palayangan, Situ Cilembun, Situ Sindang Mandi, Situ Cibirai, Situ Citaman, Situ Telagawangsa, Situ Ciwaka, Situ Gonggong, Situ gambar, Situ Ciranjen, Situ Cikempong, Situ Cikamunding, Situ Cimaesta, Situ Rempoa/ Rompong, Situ Gintung, Waduk Sindang heula dan Situ Lebak Keusik.
 - d) Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Banten merencanakan target sertifikasi tanah sejumlah 112 bidang yang berada di kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
 - e) Dalam percepatan pengamanan BMD melalui sertifikasi tanah Pemerintah Provinsi Banten menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kejati Banten, melalui :
 - 1) Penetapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 670 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pelaksanaan Percepatan Pensertifikatan Atas Hak Tanah Situ Provinsi Banten tanggal 12 Desember 2025.
 - 2) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten Dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tentang Percepatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Dan Asistensi pencegahan Serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah provinsi Banten Tanggal 5 September 2024 yang berlaku selama lima tahun.
 - 3) Perjanjian Kerjasama Antara BPKAD Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten Tentang Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor : 000.2.4/002-BPKAD/2024 dan NKS-08/M.6/GS/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan masa berlaku dua tahun.
5. Informasi selanjutnya terkait bidang tanah, terdapat 2 (dua) tanah rawa/situ yang digugat masyarakat dan berperkara di pengadilan:
 - a) Situ Ranca Gede Jakung beralamat Ds. Babakan Kec. Pamarayan Kab. Serang dengan luas 250.000 m² (25 ha) dan Kode Barang : 1.3.1.01.02.01.002 / 213/213. Berperkara di PTUN Serang tanggal 27

Nopember 2024 dengan nomor perkara 49/G/2024/PTUN.SRG. Para Pihak terdiri dari PT. Modern Industrial Estat sebagai Penggugat, Penjabat Gubernur Banten sebagai Tergugat I dan Kepala BPKAD Provinsi Banten sebagai Tergugat II. Isi gugatan menggugat Surat Keputusan Status Penggunaan BMD Tahun 2024 dan untuk Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Sidang pertama pada tanggal 23 Desember 2024. Perkara tersebut telah melalui 12 kali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan untuk pembacaan Putusan diagendakan pada tanggal 20 Mei 2025.

Pada tanggal 20 Mei 2025 majelis hakim telah mengeluarkan amar putusan (1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan (2) menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.854.000

Pada tanggal 4 Juni 2025 pihak penggugat mengajukan Memori Banding nomor 046/BW-BJHMP/MMR_BDG/VI/2025 Ke Ketua PTUN Jakarta melalui Kepaniteraan PTUN Serang. Pada tanggal 28 Mei 2025 Majelis hakim PTUN Jakarta melalui amar putusan banding perkara nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT telah menerima permohonan banding dari pembanding dengan amar putusan 1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2) menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Gubernur Banten Nomor 95 Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan Kartu Inventaris Barang (KIB A) tanah Provinsi Banten Kabupaten Serang, Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD Dinas PUPR Bagian 2 UPTD Pengelolaan DAS Cijung-Cidanau, nomor urut 11, nomor kode lokasi 11.01.28.00000000.00000.00000, Kode Barang/ID Barang/ID Awal : 1.3.1.01.02.01.002/213, Nama Barang Tanah Danau/Situ/Embung, Luas 250.000 m², tahun perolehan 1999, Letak/Alamat Situ Ranca Gede Jakung , Ds/Kel Babakan. Kec. Pamarayan, Kabupaten Serang, Sebatas tanah milik pengugat; 3) Memerintahkan Terbanding I dahulu Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan Gubernur nomor 95 tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan Status penggunaan BMD Di lingkungan Provinsi Banten; 4) Memerintahkan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari daftar aset Provinsi Banten, berupa situ Ranca gede Jakung, seluas kurang lebih 250.000 M² sebagai aset Provinsi Banten dengan nomor kode lokasi 11.01.28.00000000.00000.00000, Kode Barang/ID Barang/ID Awal : 1.3.1.01.02.01.002/213, yang diploting diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak setempat dikenal sebagai Kampung Rancagede, Desa Babakan, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan 5) menghukum para terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menanggapi putusan tersebut pemerintah Provinsi Banten mengajukan Upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh PTUN Jakarta yang merugikan kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Banten, pada tanggal 22 September 2025 permohonan Perkara

Kasasi sudah terdaftar di Mahkamah Agung dan Tanggal 12 Januari 2026 berkas Memori Kasasi telah teregister, dan saat ini dalam proses menunggu amar putusan Mahkamah agung.

b) Situ Setingin beralamat Ds. Klebet Kec. Mauk Kab. Tangerang dengan Luas 264.000 m² (26,4 ha) dan Kode Barang : 01.01.07.01.01 / 0007. Terdapat dua perkara :

1) Perkara 666/Pdt.G/2024/PN.Tng terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Juni 2024 dan sidang pertama pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Para Pihaknya yaitu : Hony Adhiwana Dkk sebagai Para Penggugat, Penjabat Gubernur Banten sebagai Tergugat I dan Penjabat Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat II. Isi gugatan Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Setelah sidang pertama, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak lima kali. Hingga saat ini, perkara tersebut telah melalui 24 kali persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tanggal 20 Mei 2025 telah keluar putusan : 1) Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; dan 2) menghukum para pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.434.000. Perkara dimenangkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.

2) Perkara 1232/Pdt.G/2024/PN terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2024 dan sidang pertama pada tanggal 11 November 2024 dengan Para Pihak yaitu : Tanmi sebagai Penggugat, Kepala BPKAD Provinsi Banten sebagai Tergugat dan BPN Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat. Isi gugatan Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Setelah sidang pertama, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali. Hingga pada tanggal 19 Februari 2025 perkara tersebut telah melalui 10 kali persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tanggal 26 Februari 2025 terdapat permohonan intervensi dari Hony Adhiwana Dkk yang sebelumnya sebagai Para Penggugat pada perkara 666/Pdt.G/2024/PN.Tng Sehingga pihaknya berubah menjadi Hony Adhiwana Dkk sebagai Penggugat Intervensi, Tanmi sebagai Tergugat I Intervensi yang sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi, Kepala BPKAD sebagai Tergugat II Intervensi yang sebelumnya sebagai Tergugat Konvensi dan BPN Kab. Tangerang sebagai Turut Tergugat Intervensi yang sebelumnya sebagai Turut Tergugat Konvensi. Pada tanggal 23 Oktober 2025 majelis hakim mengabulkan eksepsi.

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Majelis Hakim telah mengeluarkan amar putusan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengenai eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan dalam Pokok Perkara menyatakan 1) gugatan Pengugat asal/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima, 2) menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dan; 3) menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.395.000 (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Perkara dimenangkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.

6. Progres capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Pemerintah Provinsi Banten

a) Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat ke 8 (Delapan) dengan persentase sebesar 88.77% dalam 8 Area penilaian yaitu:

- Perencanaan	85.50%
- Penganggaran	86.69%
- Pengadaan Barang dan Jasa	94.40%
- Pelayanan Publik	94.19%
- Pengawasan APIP	82.71%
- Manajemen ASN	89,57%
- Pengelolaan BMD	77.45%
- Optimalisasi Pajak	97.24%

Nilai tertinggi 94 % diperoleh oleh provinsi Bali

b) Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat Provinsi se Indonesia ke 11 (sebelas) dengan persentase sebesar 77.45% dalam indikator Pengelolaan BMD meliputi:

- Aspek Transparansi (100%)	
a. Database	100%
- Aspek Regulasi dan kebijakan (40%)	
a. Pengelolaan BMD	40%
- Aspek Akuntabilitas (92,3%)	
a. Pengamanan Hukum	80,63%
b. Pemanfaatan BMD	97.78%
c. Rencana Kebutuhan BMD dan Pelaporan BMD	99,39%
d. Rekon dan Inventarisasi BMD	100%
e. Penyalahgunaan BMD	100%
f. Penertiban BMD	68,88%
g. Tindak lanjut reuiu pengelolaan BMD	100%

Pemerintah Provinsi Banten lebih tinggi dari daerah induknya Jawa Barat memperoleh nilai 75% dan nilai tertinggi diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Barat 88 %. Kontribusi nilai Pemerintah Provinsi Banten terendah pada aspek regulasi dan kebijakan (40%) hal ini disebabkan belum tersedia Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, yang pada saat penilaian MCSP KPK 2025 masih berbentuk draft Perda, pembahasan Perda telah berproses yaitu pada tanggal 25 November 2025 telah diputuskan dalam pembahasan Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, bahwa Perubahan Perda pengelolaan BMD

Baru akan dibahas dalam Pansus DPRD tahun anggaran 2026.

c) Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat ke 1 (satu) untuk wilayah Se Provinsi Banten dengan persentase sebesar 77.45% dalam indikator Pengelolaan BMD, dengan urutan berdasarkan penilaian:

- Pemerintah Provinsi Banten	77.45%
- Pemerintah Kabupaten Tangerang	74.99%
- Pemerintah Kabupaten pandeglang	73.55%
- Pemerintah Kota Tangerang	71.16%
- Pemerintah Kota Serang	70.28%
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan	66.25%
- Pemerintah Kabupaten Lebak	66.21%

- Pemerintah Kota Cilegon

63.29%

- Pemerintah Kabupaten Serang

57.69%
7. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Pada Ruas Jalan Provinsi

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten Sudah Mencatat Tanah Di bawah Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, tetapi belum memperhitungkan Ruang Milik Jalan berdasarkan inventarisasi jalan dalam leger jalan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.
8. Tanah dibawah Saluran Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Banten belum mencatat Daerah Irigasi berupa Tanah dibawah Saluran Irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi serta memberikan kepastian hukum mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria pembagian tanggung jawab didasarkan pada keberadaan jaringan terhadap wilayah administrasi dan strata luasan daerah irigasi.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang memiliki luas antara 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Penetapan status ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pencatatan aset, penganggaran biaya operasi dan pemeliharaan, serta pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan status, nama, atau luasan daerah irigasi dapat dilakukan secara berkala setelah 2 (dua) tahun ditetapkan melalui usulan tertulis sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan. Berikut Tabel Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Banten:

Tabel 5.3.19 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten Lintas Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
1	DI. Cisangu Atas	446	Kabupaten Lebak = 50 Ha Kabupaten Serang = 396 Ha	7.550,00	1,50	11.325,00
2	DI. Cicinta	1,344	Kabupaten Lebak = 46 Ha Kabupaten Serang = 1.298 Ha	12.300,00	4,00	49.200,00
3	DI. Kadugenep	200	Kabupaten Pandeglang = 36 Ha Kabupaten Serang = 164 Ha	7.450,00	1,00	7.450,00
4	DI. Cikarang Udik	200	Kabupaten Serang = 60 Ha Kota Serang = 140 Ha	8.166,00	1,20	9.799,20
5	DI. Ciwaka Bawah	1,210	Kabupaten Serang = 210 Ha Kota Serang = 1.000 Ha	15.950,00	7,00	111.650,00
6	DI. Cilemer	2,672	Kabupaten Lebak = 150 Ha Kabupaten Pandeglang = 2.522 Ha	38.800,00	2,70	104.760,00
	Jumlah			90.216,00	17,40	294.184,20

Tabel 5.3.20 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten Utuh Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
Kab. Lebak						
1	D.I. Cibuungeun	2,570		46.100,00	6,00	276.600,00
2	D.I. Cihara	2,000		0,00	0,00	0,00
3	D.I. Cikamunding I	1,700		8.250,00	1,50	12.375,00
4	D.I. Cikamunding II	1,030		99.500,00	1,20	119.400,00
5	D.I. Cikoncang	1,805		27.450,00	3,50	96.075,00
6	D.I. Cilangkahan I	1,798		31.850,00	5,57	177.404,50
7	D.I. Cimanyangray	1,500		13.155,00	1,00	13.155,00
8	D.I. Cipalabuh	1,020		18.637,00	1,35	25.159,95
9	D.I. Cisiuh	1,000		9.500,00	1,00	9.500,00
Kab. Pandeglang						
1	D.I. Cisata	2,112		15.155,00	2,50	37.887,50
2	D.I. Pasir Eurih	1,245		16.285,00	8,20	133.537,00
Kab. Serang						
1	D.I. Cikalumpang	1,000		26.326,00	3,50	92.141,00
2	D.I. Cipari/Ciwuni	1,644		11.580,00	7,00	81.060,00
3	D.I. Cisangu Bawah	1,436		21.757,00	1,00	21.757,00
Kota Serang						
1	D.I. Cibanten	1,289		21.850,00	5,30	115.805,00
Jumlah		23,149		367.395,00	48,62	1.211.856,95

Tabel 5.3.21 Daerah Irigasi Tambak Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
1	DIT. Mekarsari	1,635	Kabupaten Pandeglang			

Provinsi Banten masih dalam proses Inventarisasi dan Pendataan terhadap luasan dan harga perolehan yang menggunakan nilai pada NJOP atau Zona Nilai Tanah pada aplikasi Bhumi ATR/BPN.

b. Peralatan dan Mesin

Rp4.539.113.218.722

Peralatan dan mesin mencakup kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp4.539.113.218.722 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp4.224.775.742.902 atau mengalami peningkatan sebesar Rp314.337.475.820 (7,44%). Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.22 Saldo Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	4.224.775.742.902
Mutasi Tambah:	398.424.652.523
Belanja Modal Tahun 2025	360.377.599.640
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	9.975.000
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.313.941.512
Kapitalisasi dari akun Hibah	6.273.943.059
Koreksi atas Data Baru Catat	8.074.444.000
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang	218.653.000
Reklasi atas perubahan Akun Klasifikasi Barang	5.624.554.385
Reklasifikasi Ekstracomptable menjadi Intracomptable	408.000.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	16.123.541.927
Mutasi Kurang:	(84.087.176.704)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(30.332.266.472)
Penghapusan	(1.150.598.240)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(6.802.125.475)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(5.945.946)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(31.058.234.690)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun GB, JIJ, ATL dan ATB	(14.738.005.881)
Saldo Per 31 Desember 2025	4.539.113.218.722

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp398.424.652.523 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp360.377.599.640 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp218.185.743.001

- Dinas Kesehatan

Rp55.301.856.197

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rp5.349.424.979

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rp1.829.093.771

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rp360.095.100

- Satuan Polisi Pamong Praja

Rp209.742.270

- Dinas Sosial

Rp825.230.763

- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Rp5.442.081.579

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rp170.049.151

- Dinas Ketahanan Pangan

Rp231.900.000

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp839.222.631

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rp1.638.460.350

- Dinas Perhubungan

Rp8.714.673.373

- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Rp6.181.557.714

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rp576.314.660

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rp1.292.780.720

- | | |
|---|------------------|
| - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Rp1.086.605.286 |
| - Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp1.134.573.142 |
| - Dinas Pariwisata | Rp349.112.700 |
| - Dinas Pertanian | Rp2.288.577.770 |
| - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp7.800.000 |
| - Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp354.887.192 |
| - Biro Umum dan Perlengkapan | Rp4.313.183.540 |
| - Sekretariat DPRD | Rp29.464.550.643 |
| - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp319.559.246 |
| - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp133.726.140 |
| - Badan Pendapatan Daerah | Rp11.763.094.589 |
| - Badan Kepegawaian Daerah | Rp881.250.000 |
| - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Rp720.176.835 |
| - Badan Penghubung | Rp71.484.000 |
| - Inspektorat Provinsi | Rp328.659.998 |
| - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp12.132.300 |
- 2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.975.000 terdapat pada SKPD:
- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Badan Pendapatan Daerah | Rp9.975.000 |
|---------------------------|-------------|
- 3) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.313.941.512 terdapat pada SKPD:
- | | |
|--|---------------|
| - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp551.125.761 |
| - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp16.650.000 |
| - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Rp12.765.000 |
| - Dinas Perhubungan | Rp6.990.780 |
| - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp8.880.000 |
| - Dinas Pertanian | Rp23.963.790 |
| - Biro Umum dan Perlengkapan | Rp97.132.785 |
| - Badan Pendapatan Daerah | Rp298.956.300 |
| - Badan Penghubung | Rp252.935.000 |
| - Inspektorat Provinsi | Rp44.542.095 |
- 4) Kapitalisasi dari akun Pendapatan Hibah sebesar Rp6.273.943.059 terdapat pada SKPD:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp5.377.363.059 |
| - Dinas Perhubungan | Rp82.000.000 |
| - Dinas Pertanian | Rp814.580.000 |
- 5) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp8.074.444.000 terdiri dari:
- Merupakan Aset yang diterima sebelum tahun 2025 namun baru dilakukan pencatatan berdasarkan dokumen BAST yang diterima tahun 2025 pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp390.742.000
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp144.400.000
 - Merupakan Aset yang dilakukan pencatatan berdasarkan Hasil Keputusan Pengadilan MA nomor 215/PDT/2023/PT BTN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.292.802.000
 - Merupakan Aset yang dilakukan pencatatan berdasarkan Hasil Inventarisasi

- Biro Umum dan Perlengkapan Rp8.000.000
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp238.500.000
- 6) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang sebesar Rp218.653.000 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp197.600.000
Berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya tercatat Rusak Berat menjadi naik status ke aset tetap karena dimanfaatkan menjadi Alat Praktik SMKN 1 Ciruas
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp21.053.000
Berupa kendaraan roda dua yang baru ditemukan hasil inventarisasi tahun 2025
- 7) Reklasifikasi atas perubahan akun Klasifikasi Barang sebesar Rp5.624.554.385 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp211.836.160
 - Dinas Kesehatan Rp792.071.380
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.567.047.161
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp53.599.684
- 8) Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Intrakomptabel pada SMKN 2 Kota Serang senilai Rp408.000.000 berupa 4 (empat) kendaraan untuk Alat simulator Pendidikan yang dilakukan Penilaian berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.
- 9) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp16.123.541.927 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp428.053.300
 - Dinas Kesehatan Rp8.577.932.482
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp378.140.183
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp21.211.787
 - Dinas Perhubungan Rp6.671.000.000
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp47.204.175

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.087.176.704 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp30.332.266.472 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp28.208.786.982
 - Dinas Kesehatan Rp940.566.605
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp29.916.000
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp39.631.800
 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp47.563.500
 - Dinas Sosial Rp83.706.260
 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp168.276.000
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp1.959.000
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp16.171.787
 - Dinas Perhubungan Rp569.548.491
 - Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rp41.192.214
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp23.375.000

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp4.050.000
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp62.643.152
 - Dinas Pertanian Rp34.718.000
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp54.607.242
 - Badan Pendapatan Daerah Rp5.554.440
- 2) Penghapusan atas Temuan TLHP BPK terhadap Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp1.150.598.240 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp6.802.125.475 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp910.300.425
 - Dinas Kesehatan Rp3.271.300
 - Dinas Perhubungan Rp5.859.000.000
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp29.553.750
- 4) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp5.945.946 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp31.058.234.690 karena kondisi rusak berat, terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp5.351.531.085
 - Dinas Kesehatan Rp821.762.380
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp592.618.309
 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp575.961.600
 - Dinas Sosial Rp1.511.611.756
 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp815.296.865
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp38.725.000
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp53.599.684
 - Dinas Perhubungan Rp23.582.500
 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp30.750.000
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp1.979.719.204
 - Dinas Pertanian Rp627.688.858
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp258.000.000
 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp432.250.000
 - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Rp126.000.000
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp4.299.125.914
 - Biro Pengadaan Barang/Jasa Rp147.865.014
 - Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Rp21.910.000
 - Biro Administrasi Pimpinan Rp173.840.500
 - Sekretariat DPRD Rp2.249.000.000
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp150.600.000
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp4.805.547.161
 - Badan Pendapatan Daerah Rp5.615.717.831
 - Badan Penghubung Rp355.531.030
- 6) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.738.005.881 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp399.012.500
 - Dinas Kesehatan Rp4.157.860.500
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp331.800.000
 - Dinas Perhubungan Rp1.935.020.820
 - Sekretariat DPRD Rp 7.914.312.061

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8622/C/DM.00.03/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/Dm.00.03/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 September 2025, Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menerima bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran berupa:

Tabel 5.3.23 Jenis Barang Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran

No	Jenis Barang	Anggaran per Paket Bantuan
1	Smartboard (<i>berupa IFP</i>)	Rp 26.640.000
2	Laptop	Rp. 6.496.000
3	Media Penyimpanan Eksternal	Rp. 408.000

Tabel 5.3.24 Rekapitulasi Barang Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran

NO	WILAYAH	JUMLAH UNIT BANTUAN			HARGA PEROLEHAN			TOTAL	
		SMARTBOARD (BERUPA IFP)	LAPTOP	MEDIA PENYIMPANAN EKSTERNAL	SMARTBOARD (BERUPA IFP)	LAPTOP	MEDIA PENYIMPANAN EKSTERNAL	BARANG	HARGA PEROLEHAN
1	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Lebak	68	23	23	1.811.520.000	149.408.000	9.384.000	114	1.970.312.000
2	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Pandeglang	40	6	6	1.065.600.000	38.976.000	2.448.000	52	1.107.024.000
3	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD SERAGON	72	24	23	1.918.080.000	155.904.000	9.384.000	119	2.083.368.000
4	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Tangerang	57	30	30	1.518.480.000	194.880.000	12.240.000	117	1.725.600.000
5	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	62	29	26	1.651.680.000	188.384.000	10.608.000	117	1.850.672.000
TOTAL		299	112	108	7.965.360.000	727.552.000	44.064.000	519	8.736.976.000

Rincian barang-barang penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut belum tercatat pada Laporan Keuangan dikarenakan sampai dengan tanggal pelaporan berakhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Gedung dan Bangunan Rp5.383.991.912.324

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp5.383.991.912.324 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp5.021.714.531.995 atau mengalami peningkatan sebesar Rp362.277.380.329 (7,21%). Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.25 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	5.021.714.531.995
Mutasi Tambah:	426.773.920.258
Belanja Modal Tahun 2025	205.562.940.358
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	28.330.000
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	58.387.145.156
Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah	114.514.917.723
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	801.851.620
Koreksi atas Data Baru Catat	4.083.660.114
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang	89.350.000
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	40.068.927.638
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	1.276.081.829
Mutasi Antar KIB (Masuk)	1.960.715.820
Mutasi Kurang:	(64.496.539.929)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(157.263.249)
Reklasifikasi atas Koreksi Harga	(10.000.000)
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(36.553.482.524)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	(4.794.187.409)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin, Jalan,Irigasi dan Jaringan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	(22.981.606.747)
Saldo Per 31 Desember 2025	5.383.991.912.324

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp426.773.920.258 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp205.562.940.358 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp167.837.476.232

- Dinas Kesehatan

Rp4.691.752.017

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rp17.011.856.287

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rp4.008.210.000

- Dinas Sosial

Rp91.393.000

- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Rp2.338.863.922

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp1.383.825.136

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rp399.546.366

- Dinas Perhubungan

Rp553.027.524

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rp743.606.800

- Dinas Kelautan dan Perikanan

Rp746.240.510

- Dinas Pariwisata

Rp191.240.000

- Dinas Pertanian

Rp100.492.430

- Sekretariat DPRD

Rp2.159.820.000

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rp96.480.294

- Badan Pendapatan Daerah

Rp3.150.834.841

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rp58.275.000

2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.330.000 terdapat pada SKPD:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp21.120.000
- Dinas Pertanian	Rp7.210.000

3) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp58.387.145.156 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp11.292.733.282
- Dinas Kesehatan	Rp615.077.590
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp1.653.964.725
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp866.670.893
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp1.685.944.139
- Dinas Perhubungan	Rp996.108.281
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp390.977.700
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp396.206.955
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp676.908.979
- Dinas Pertanian	Rp668.934.484
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp394.972.400
- Biro Umum dan Perlengkapan	Rp49.282.110
- Sekretariat DPRD	Rp35.976.847.856
- Badan Pendapatan Daerah	Rp917.571.374
- Badan Penghubung	Rp706.104.964
- Inspektorat Daerah	Rp908.242.788
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp190.596.636

4) Kapitalisasi dari akun Pendapatan Hibah sebesar Rp114.514.917.723 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Selasar dan Bangunan Parkir pada sekolah Penerima Hibah Revitalisasi Tahun 2025.

5) Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp801.851.620 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp4.083.660.114 berupa Gedung dan Bangunan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat sebelum tahun 2025 namun berita acara serah terima nya baru diperoleh pada tahun 2025 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp2.971.098.064
Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di SMAN 14 Kabupaten Pandeglang, Bangunan Gudang Tertutup Permanen di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Pagar Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Gedung Pos Jaga Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Malingping, Bangunan Tempat Parkir di SMKN 1 Kota Cilegon, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen di SMKN 1 Kramatwatu, Bangunan Gedung Kantor Permanen di SMKN 1 Malingping.	
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp1.112.562.050
Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen – Gedung Pusat Pembelajaran Masyarakat (PBM) Cikiruh Wetan di Dinas Kelautan dan Perikanan.	

- 7) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp89.350.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen berlokasi di jl perintis kemerdekaan II desa/kelurahan babakan kecamatan tangerang kabupaten tangerang.
- 8) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp40.068.927.638 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp745.437.970
Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.
 - Dinas Kesehatan Rp18.733.150.660
Berupa Bangunan Rumah Sakit Umum pada UPT RSUD Banten
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp20.565.339.008
Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen – Pembangunan Gedung Bank Banten berlokasi di ruas jalan veteran
 - Dinas Pertanian Rp25.000.000
- 9) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp1.276.081.829 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 10) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp1.960.715.820 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp54.000.000
Berupa Pembangunan Pagar Semi Permanen pada SMAN 1 Mancak dan Pagar Permanen pada SKHN 01 Kabupaten Tangerang dan SMAN 15 Kabupaten Pandeglang
 - Dinas Perhubungan Rp1.906.715.820
Berupa Pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen pada Pos Perlindungan Kereta Api yang berlokasi di Nyomplong Kabupaten Lebak, Bojong Cae Kabupaten Lebak, Bojong Pandan Kabupaten Serang, Jambu Kabupaten Serang, Dahu Kabupaten Serang, Bogeg Kota Serang, Ciceri Kota Serang, Sumur Pecung Kota Serang, Kebaharan Kota Serang, Jatake Kabupaten Tangerang dan Tonjong Baru Kabupaten Serang

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.496.539.929 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp157.263.249 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp144.121.249
 - Dinas Kesehatan Rp13.142.000
- 2) Reklasifikasi atas Koreksi Harga sebesar Rp10.000.000 terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) berdasarkan Surat Keputusan Hibah dan Surat Keputusan Bongkaran Gedung dan Bangunan, Surat Pernyataan Kepala OPD atas perubahan Kondisi Aset sebesar Rp36.553.482.524, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp250.000.000
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.851.278.910
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2.671.923.000
 - Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Rp1.706.000.000
 - Dinas Kelautan Dan Perikanan Rp3.680.927.050
 - Dinas Koperasi Dan Umkm Rp209.700.000
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp256.255.000
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp24.927.398.564
- 4) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp4.794.187.409 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin, Jalan,Irigasi dan Jaringan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.981.606.747 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp21.281.358.779
- Dinas Kesehatan	Rp509.336.983
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp378.140.183
- Dinas Sosial	Rp91.393.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp234.169.777
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp199.473.500
- Dinas Pariwisata	Rp191.240.000
- Dinas Pertanian	Rp49.290.350
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp47.204.175

d. **Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Rp9.506.088.574.010**
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp9.506.088.574.010 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp9.015.649.850.754 atau mengalami peningkatan sebesar Rp490.438.723.256 (5,44%). Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.26 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	9.015.649.850.754
Mutasi Tambah:	526.042.416.392
Belanja Modal Tahun 2025	299.055.992.016
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.419.441.011
Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah	48.592.001.318
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	14.340.399.393
Koreksi atas Data Baru Catat	212.636.720
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	143.254.506.210
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset	373.903.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	18.793.536.724
Mutasi Kurang:	(35.603.693.136)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(273.950.500)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(1.148.855.430)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang	(1.293.866.191)
Penghapusan	(8.733.793.778)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	(24.153.227.237)
Saldo Per 31 Desember 2025	9.506.088.574.010

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp526.042.416.392 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp299.055.992.016 terdapat pada SKPD:
- Dinas Kesehatan Rp6.659.858.349
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp272.285.063.055
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp96.169.493
 - Dinas Perhubungan Rp15.103.561.050
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp4.734.534.330

- Badan Pendapatan Daerah Rp176.805.739
- 2) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.419.441.011 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.220.396.341
 - Dinas Kesehatan Rp149.880.000
 - Dinas Pertanian Rp49.164.670
- 3) Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah sebesar Rp48.592.001.318 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp8.365.638.721
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp40.226.362.597
- 4) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp212.636.720 yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Dana BOSP sebelum tahun 2025 dengan surat pernyataan Kepala Sekolah pada SMKN 1 Kramatwatu.
- 5) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp143.254.506.210 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa ruas jalan ciparay-cikumpay dan ruas jalan sumur-taman jaya.
- 6) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset sebesar Rp373.903.000 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jalan Provinsi Arteri.
- 7) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp18.793.536.724 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.538.775.986
 - Dinas Kesehatan Rp327.381.838
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp331.800.000
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp212.957.990
 - Dinas Perhubungan Rp28.305.000
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp199.473.500
 - Dinas Pariwisata Rp191.240.000
 - Dinas Pertanian Rp49.290.350
 - Sekretariat DPRD Rp7.914.312.060

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.603.693.136 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp273.950.500 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Konsultan Pengawasan yang semula dianggarkan pada belanja modal yang merupakan peruntukan belanja persediaan diserahkan kepada Masyarakat pada UPTD PJJ Tangerang
- 2) Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp1.148.855.430 berdasarkan Hasil Surat Keputusan Penjualan dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp162.498.360
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp827.047.070
 - Badan Pendapatan Daerah Rp159.310.000
- 3) Reklas atas perubahan akun klasifikasi barang sebesar Rp1.293.866.191 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Penghapusan sebesar Rp8.733.793.778 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Bahan Bangunan dan Konstruksi yang telah diserahkan ke Masyarakat.
- 5) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp24.153.227.237 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp6.478.358.037
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp11.003.869.200
 - Dinas Perhubungan Rp6.671.000.000

e. Aset Tetap Lainnya

Rp514.565.838.910

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp514.565.838.910 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp469.710.626.512 atau mengalami peningkatan sebesar Rp44.855.212.398 (9,55%). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.27 Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	469.710.626.512
Mutasi Tambah:	48.255.570.408
Belanja Modal Tahun 2025	48.066.730.408
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	7.830.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	181.010.000
Mutasi Kurang:	(3.400.358.010)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(375.000)
Penghapusan atas Temuan TLHP BPK pada Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024	(192.544.800)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(180.000)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(1.685.181.160)
Penghapusan	(1.054.578.200)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(467.498.850)
Saldo Per 31 Desember 2025	514.565.838.910

Mutasi tambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.255.570.408 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp48.066.730.408 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp47.551.124.134

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Rp512.720.274

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rp2.886.000
- 2) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.830.000 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset buku yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Dana BOSP pada SMKN 4 Kota Cilegon
- 3) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp181.010.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.400.358.010 berasal dari:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp375.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi atas barang bercorak kesenian Alat Musik Modern/Band pada SMAN 2 Kabupaten Tangerang
- 2) Penghapusan atas Temuan TLHP BPK pada Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp192.544.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp180.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan aset kategori barang persediaan berupa bingkai foto pada SMKN 4 Kota Cilegon;

- 4) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp1.685.181.160 berdasarkan Surat Keputusan Penjualan terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.655.181.160
 - Badan Penghubung Rp30.000.000
- 5) Penghapusan sebesar Rp1.054.578.200 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp12.400.000
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp9.905.600
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp197.600.000
 - Dinas Pertanian Rp834.672.600
- 6) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp467.498.850 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp52.248.913.064**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp52.248.913.064 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp198.760.372.691 atau mengalami penurunan sebesar Rp146.511.459.627 (73,71%). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 24 Neraca**. Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.28 Saldo KDP per 31 Desember 2025	
URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	198.760.372.691
Mutasi Tambah:	38.920.302.322
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	709.356.600
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	14.938.400.069
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap	420.463.200
Mutasi Antar KIB (Masuk)	22.852.082.453
Mutasi Kurang:	(185.431.761.949)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	(183.078.509.238)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(2.279.002.711)
Penghapusan	(74.250.000)
Saldo Per 31 Desember 2025	52.248.913.064

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp38.920.302.322 dirinci sebagai berikut:

- 1) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp709.356.600 terdapat pada Biro Umum dan Perlengkapan Berupa Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi DED Penataan.
- 2) Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp14.938.400.069 terdapat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap sebesar Rp420.463.200 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp22.852.082.453 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp11.664.834.553
 - Dinas Kesehatan Rp91.985.700
 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp11.003.869.200
 - Dinas Sosial Rp91.393.000

Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp185.431.761.949 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp183.078.509.238 terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rp745.437.970
- Dinas Kesehatan

Rp18.733.150.660
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rp163.525.398.608
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Rp49.522.000
- Dinas Pertanian

Rp25.000.000
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp2.279.002.711 disebabkan KDP berupa DED secara teknis sudah tidak sesuai kondisi saat ini dan secara penganggaran sudah tidak masuk rencana Kerja OPD terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp579.978.500
- Dinas Kesehatan

Rp243.379.675
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rp1.455.644.536
- 3) Penghapusan sebesar Rp74.250.000 terdapat pada Dinas Pertanian berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan jasa Konsultan yang sudah tidak akan dilaksanakan Pembangunan Fisiknya.

g. Akumulasi Penyusutan

Rp12.332.640.474.699

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.332.640.474.699 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

URAIAN	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.347.991.260.989	15.793.206.939	336.349.614.329	3.668.547.668.380
Gedung dan Bangunan	2.067.062.785.793	183.683.598	271.828.661.376	2.338.707.763.571
Jalan Irigasi Jaringan	5.801.098.266.090	(25.303.096.738)	460.347.160.033	6.286.748.522.861
Aset Tetap Lainnya	33.586.548.999	9.403.475	5.059.374.362	38.636.519.886
Jumlah	11.249.738.861.872	(9.316.802.727)	1.073.584.810.100	12.332.640.474.699

5.3.1.4 Properti Investasi

Rp893.127.841.767

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp893.127.841.767, berupa Banten Internasional Stadium (BIS) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.30 Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
Tanah	216.595.791.126
Gedung dan Bangunan	894.986.419.436
Jumlah Properti Investasi Bruto	1.111.582.210.562
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(218.454.368.795)
Jumlah Properti Investasi Neto	893.127.841.767

5.3.1.5Aset LainnyaRp528.656.655.714

Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25 Neraca**. Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.31 Aset Lainnya per 31 Desember 2025

URAIAN	Tahun 2024 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Neto 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	19.714.286	13.570.000	19.714.286	13.570.000
Aset Tak Berwujud Neto	24.901.470.548			24.223.634.234
Aset Tak Berwujud	35.732.344.452	9.587.201.673	2.083.119.000	43.236.427.125
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.830.873.904)	53.125.000	8.235.043.987	(19.012.792.891)
Aset Lain-lain Neto	495.913.275.032			504.419.451.480
Aset Lain-lain	950.748.796.252	110.531.007.705	88.790.236.038	972.489.567.920
Akumulasi Penyusutan	(454.835.521.220)	19.275.854.191	32.510.449.412	(468.070.116.440)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-
Jumlah	520.834.459.866			528.656.655.714

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka PanjangRp13.570.000
- Saldo Tagihan Jangka Panjang Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.570.000. Saldo tersebut merupakan piutang tuntutan ganti kerugian yang jatuh temponya di atas 1 (satu) tahun.
- b. Aset Tidak BerwujudRp24.223.634.234
- Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.223.634.234 turun sebesar Rp677.836.314 atau 2,72% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp24.901.470.548. Saldo tersebut seluruhnya merupakan perangkat lunak (*software*) dan Lisensi. Penjelasan mutasi saldo aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:
- 1) Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.587.201.673 berasal dari:

a. Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp4.257.802.773;

b. Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp391.810.900;

c. Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tak Berwujud sesuai Klasifikasi Barang Rp615.725.000 dikarenakan terdapat upgrade atas software yang sebelumnya sudah tidak digunakan namun dimanfaatkan kembali;

d. Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp4.321.863.000.

2) Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.083.119.000 berasal dari:

a. Reklas ke Akun Beban sebesar Rp7.514.000;

b. Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp49.000.000;

c. Reklas dikarenakan sebab lainnya sebesar Rp17.000.000

d. Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp2.009.605.000.

c. **Aset Lain-lain**

Rp504.419.451.480

Nilai Aset Lain-lain bruto per 31 Desember 2025 sebesar Rp972.489.567.920 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp468.070.116.440 sehingga nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp504.419.451.480 naik sebesar Rp8.506.176.447 atau 1,72% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp950.748.796.252. Rekapitulasi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25.2 Neraca**. Penjelasan saldo aset lain-lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa piutang atas tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp237.655.000;
- 2) Uang sitaan Kejaksaan Negeri Serang yang disita dari anggota DPRD yang menerima tunjangan perumahan masa bakti 1999 – 2004 sebesar Rp169.000.000. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Serang nomor: B-572/M,6,10/Fs.1/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 disampaikan bahwa:
 - a) Uang sitaan dan uang titipan atas tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Banten tersebut tersimpan dalam rekening titipan Kejaksaan Negeri Serang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Serang atas nama RPL 020 Kejari Serang UTK PDT Perkara Nomor Rekening: 0084-01-003443-30-0 dengan saldo sejumlah Rp169.000.000;
 - b) Status atas uang sebesar Rp169.000.000 memiliki rincian Rp109.000.000 belum bisa diambil karena memiliki dua putusan berbeda yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2097K/PID.2006 tanggal 8 Mei 2008 atas nama terdakwa Dr.Ir.H. Djoko Munandar, M.Eng dengan amar putusan terkait uang sitaan tersebut yaitu "dikembalikan dari mana asal barang bukti itu disita". sedangkan dalam putusan Pengadilan negeri Serang Nomor: 900/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 1 April 2009 atas nama terdakwa Rosyid dan James Tangka, SH dengan amar putusan "Dirampas untuk Negara", sehingga masih menunggu fatwa Mahkamah Agung RI. Serta uang sebesar Rp60.000.000 belum dikembalikan kepada mantan anggota dewan yaitu: atas nama HM. Sayuti, BA sebesar Rp2.000.000, atas nama Maman S sebesar Rp8.000.000 dan atas nama H. Achmad Fachruji sebesar Rp50.000.000 dikarenakan belum diketahui alamat terakhir yang bersangkutan.
- 3) Aset tetap dalam kondisi rusak berat sebesar Rp480.329.975.588 dengan rincian lampiran pada **Lampiran 25.3 Neraca**.
- 4) Aset Lain-Lain berupa Kerugian Daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua sebesar Rp4.829.369.200 yang belum dikembalikan ke RKUD. Terkait hal tersebut Gubernur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 951/Kep.45-Huk/2023 dan Nomor 951/Kep.46-Huk/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap saudara Zulfikar dan saudara Ahmad Pridasya, namun kedua SK Penetapan Pembebanan tersebut belum didukung Jaminan Penyelesaian TGR. Pj Sekretaris Daerah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) telah menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: P-900.1.11.4/001-MPPKD/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Konfirmasi Hasil Putusan Sidang.
- 5) Aset Tetap dalam proses hibah ke Kabupaten Kota sebesar Rp18.853.451.691 berupa:
 - a. Tanah dibawah Jalan sebesar Rp11.337.309.750 sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	LUAS	HARGA PEROLEHAN
	Tanah dibawah Jalan		11.337.309.750
1	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13.900	1.944.783.750
2	Ruas Jl. H. Usman (Ciputat) (KOTA TANGSEL Kec. Ciputat)	3.649	9.392.526.000

- b. Jalan sebesar Rp7.516.141.941 pada ruas Ciparay-Warung Banten dan Ruas Jalan Haji Usman sebagai berikut:

Tabel 5.3.33 Daftar Ruas Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	PANJANG (KM)	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Jalan		19.441.737.438	11.925.595.497	7.516.141.941
1	Ruas Jalan Cipanas – Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13,9	19.190.149.638	11.674.007.697	7.516.141.941
2	Ruas Jalan Haji Usman	3,6	251.587.800	251.587.800	-

d. **Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)** **Rp0**

Pada tanggal 11 April 2025 telah disalurkan Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) melalui rekening 519000639980 Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Banten ke Rekening Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp33.266.821.000.

Nilai TDF tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, serta diketahui telah disalurkan DBH Kurang Bayar sebesar Rp52.427.514.000 pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Sehingga menyisakan DBH Kurang Bayar yang Rp69.244.677.000 yang selanjutnya di tetapkan kedalam komponen DBH Kurang Bayar dan Lebih Bayar s.d Tahun 2024 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 sebesar Rp576.641.493.000.

5.3.2 Kewajiban **Rp746.076.822.332**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 terdiri dari:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp501.117.085.079**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp501.117.085.079 turun sebesar Rp359.146.855.127 atau 41,75% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp860.263.940.206. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.34 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	-	0,00
Pendapatan di terima di muka	2.990.941.314,84	1.996.670.086,07	994.271.229	49,80
Utang Belanja	359.628.410.728,30	719.769.537.084,00	(360.141.126.356)	(50,04)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	0,00
JUMLAH	501.117.085.079	860.263.940.206	(359.146.855.127)	(41,75)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26 Neraca**. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp0

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo.
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp138.497.733.036

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.497.733.036 merupakan bagian lancar utang pada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2025. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 28 Neraca**.
- c. Pendapatan Diterima di Muka

Rp2.990.941.315

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.990.941.315 merupakan pendapatan atas sewa bangunan yang masa sewanya melewati Tahun 2025 namun pembayarannya telah dilakukan seluruhnya pada Tahun 2025 terdiri dari:

1) Pendapatan diterima dimuka retribusi daerah sebesar Rp2.940.879.782 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pendapatan Daerah, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 29 Neraca**.

2) Pendapatan diterima dimuka lain - lain PAD yang sah - hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa sebesar Rp50.061.533 terdapat pada RSUD Banten, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 29 Neraca**.
- d. Utang Belanja

Rp359.628.410.728

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp359.628.410.728 terdiri dari:

1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.280.000 terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah berupa Tagihan Pemeriksaan Kesehatan - Medical Check Up Uji Kesehatan Tertentu Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.1 Neraca**.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.423.313.038 terdiri dari:

a) Utang Belanja Barang sebesar Rp7.142.678.325 terdapat pada:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp630.293.394 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Dan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.2 Neraca**;

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.840.000 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis - Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.3 Neraca**;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.510.544.931 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp126.131.257 dan Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp6.384.413.674. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.4 Neraca** dan **Lampiran 30.5 Neraca**.
- b) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp87.050.775 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pemeliharaan Kantor Gedung Ex BLKI Serpong. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.5 Neraca**.
- c) Utang Belanja Jasa sebesar Rp4.278.420.221 yang tersebar pada SKPD. Rincian Utang Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.35 Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.208.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	32.667.300
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	21.905.042
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	61.191.090
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.747.000.954
Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.950.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	99.674.288
Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	270.874.300
Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	8.585.300
Utang Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet	28.363.947
TOTAL	4.278.420.221

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.6 Neraca**.

- d) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp6.915.163.718 terdapat pada RSUD Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.7 Neraca**.
- 3) Utang Belanja Hibah sebesar Rp2.579.582.397 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.4 Neraca**.
- 4) Utang Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp29.993.600.306 terdiri dari:
- a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.653.200.913 terdapat pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.938.400.068 berupa pembangunan unit sekolah baru pada SMKN 16 Kabupaten Tangerang dan SMKN 12 Kota Tangerang, pembangunan ruang kelas baru pada SMKN 1 Baros, pembangunan ruang laboratorium pada SMKN 1 Panggarangan dan rehabilitasi ruang praktek peserta didik pad SMKN 1 Wanasalam;

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp714.800.845 berupa Penataan Pagar dan Parkir BIS;
- b) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp14.340.399.393 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pembangunan Jembatan Pelawad 2 Kota Tangerang, Pembangunan Jembatan Speelwijk Ruas Jalan Terate - Banten Lama, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikoncang, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilampe, Pembangunan Pengendali Banjir Kali Angke, Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Zaitun, Rehabilitasi Ruas Jalan Cipanas – Ciparay, Rehabilitasi Ruas Jalan Ciparay – Cikumpay, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibuungeun, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilemer, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisata, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisangu Atas, Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.8 Neraca**.

- 5) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp308.629.634.987 terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian Utang Belanja bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2025

KABUPATEN / KOTA	Kurang Salur (Rp)	Pelampauan (Rp)	Utang Bagi Hasil Pajak (Rp)
1	2	3	4=2+3
KABUPATEN LEBAK	18.847.381.693	60.456.650	18.907.838.343
KABUPATEN PANDEGLANG	17.618.906.787	4.889.800	17.623.796.587
KABUPATEN SERANG	39.407.096.652	698.848.400	40.105.945.052
KABUPATEN TANGERANG	80.402.038.373	231.180.900	80.633.219.273
KOTA CILEGON	22.278.179.144	0	22.278.179.144
KOTA SERANG	13.902.333.930	49.000.700	13.951.334.630
KOTA TANGERANG	63.214.445.569	297.901.250	63.512.346.819
KOTA TANGERANG SELATAN	51.324.516.339	292.458.800	51.616.975.139
TOTAL	306.994.898.490	1.634.736.504	308.629.634.987

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.9 Neraca**.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp0**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tidak termasuk dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Belanja.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang **Rp244.959.737.253**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban Jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp244.959.737.253 merupakan Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berasal dari Pinjaman

PT SMI Persero. Berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor: 577/PKS/.08-Huk/IX/2020 dan Nomor PERJ-113/SMI/0920, jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 8 (delapan) tahun.

Tabel 5.3.37 Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Saldo Awal Utang Jangka Panjang (Pinjaman ke PT. SMI)	244.959.737.253	383.457.470.289	(138.497.733.036)	(36,12)
JUMLAH	244.959.737.253	383.457.470.289	(138.497.733.036)	(36,12)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 32 Neraca.

5.3.3 Ekuitas

Rp20.497.705.381.637

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.497.705.381.637 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Ekuitas	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809	850.682.938.828	4,33

Penjelasan atas saldo Ekuitas secara lebih rinci disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Poin 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya dan beban yang timbul untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun penjelasan pos-pos Laporan Operasional ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening LO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, dengan rincian dan uraian penjelasan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

Rp10.516.289.464.924

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan - LO tahun 2025 sebesar Rp10.516.289.464.924 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.625.955.695.423 berkurang Rp2.109.666.230.498 atau turun 16,71%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar Rp766.633.237.019 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan LO TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	6.347.267.487.406	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)
Pendapatan Transfer - LO	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)
JUMLAH	10.516.289.464.924	12.625.955.695.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Rp6.347.267.487.406

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2025 sebesar Rp6.347.267.487.406 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.044.382.161.953 berkurang Rp2.697.114.674.547 atau turun 29,82%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah LRA dengan Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp10.822.528.172 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan (PAD) - LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Daerah-LO	5.719.902.391.393	8.552.678.801.729	(2.832.776.410.336)	(33,12)
Retribusi Daerah-LO	320.429.298.769	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	71.456.059.578	79.327.988.050	(7.871.928.471)	(9,92)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	235.479.737.666	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97
JUMLAH	6.347.267.487.406	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)

Adapun rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO Rp5.719.902.391.393

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp5.719.902.391.393 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.552.678.801.729 berkurang Rp2.832.776.410.336 atau turun 33,12%. Penurunan Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2025 disebabkan diantaranya oleh penurunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp271.146.473, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak Daerah	5.720.173.537.866	5.719.902.391.393	(271.146.473)

Hal ini merupakan selisih dari saldo Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp3.970.600 dikurangi dengan Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun sebelumnya sebesar Rp275.117.073.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	2.112.638.943.700	3.570.962.779.800	(1.458.323.836.100)	(40,84)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.272.028.812.300	2.676.106.930.100	(1.404.078.117.800)	(52,47)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	1.295.115.597.084	1.308.199.590.812	(13.083.993.728)	(1,00)
Pajak Air Permukaan-LO	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85
Pajak Rokok-LO	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35
Pajak Alat Berat-LO	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO	16.309.820.498	0	16.309.820.498	0,00
JUMLAH	5.719.902.391.393	8.552.678.801.729	(2.832.776.410.336)	(33,12)

Adapun rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Rp2.112.638.943.700

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800 berkurang Rp1.458.323.836.100 atau turun 40,84%.

Selengkapnya rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan PKB–LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	102.731.247.000	182.990.516.600	(80.259.269.600)	(43,86)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	240.467.653.400	418.061.999.900	(177.594.346.500)	(42,48)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.118.875.377.600	1.940.445.740.800	(821.570.363.200)	(42,34)
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	9.935.891.200	14.244.140.800	(4.308.249.600)	(30,25)
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	2.804.319.400	3.954.528.200	(1.150.208.800)	(29,09)
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	87.501.211.500	138.081.481.700	(50.580.270.200)	(36,63)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	118.837.810.200	186.462.408.000	(67.624.597.800)	(36,27)
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	53.491.237.200	83.624.669.200	(30.133.432.000)	(36,03)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	377.347.051.000	602.058.719.400	(224.711.668.400)	(37,32)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	621.287.400	986.719.500	(365.432.100)	(37,04)
PKB-Mobil Roda Tiga-LO	25.857.800	51.855.700	(25.997.900)	(50,14)
JUMLAH	2.112.638.943.700	3.570.962.779.800	(1.458.323.836.100)	(40,84)

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO** **Rp1.272.028.812.300**

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO tahun 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100 berkurang Rp1.404.078.117.800 atau turun 52,47%. Selengkapnya rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan BBNKB–LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	33.246.914.000	85.657.955.000	(52.411.041.000)	(61,19)
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	123.001.496.000	268.769.340.400	(145.767.844.400)	(54,24)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	592.461.107.500	1.359.620.337.100	(767.159.229.600)	(56,42)
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	13.231.484.500	19.905.185.500	(6.673.701.000)	(33,53)
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	3.839.974.000	3.394.740.500	445.233.500	13,12
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	54.151.141.000	87.312.031.000	(33.160.890.000)	(37,98)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	41.165.084.000	105.768.626.500	(64.603.542.500)	(61,08)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	22.279.301.000	46.628.795.000	(24.349.494.000)	(52,22)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	386.601.960.800	696.181.410.600	(309.579.449.800)	(44,47)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	2.004.437.000	2.725.383.500	(720.946.500)	(26,45)
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	45.912.500	143.125.000	(97.212.500)	(67,92)
JUMLAH	1.272.028.812.300	2.676.106.930.100	(1.404.078.117.800)	(52,47)

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Rp1.295.115.597.084

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp1.295.115.597.084 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.308.199.590.812 berkurang Rp13.083.993.728 atau turun 1,00%. Selengkapnya rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	923.305.743.195	925.390.783.327	(2.085.040.132)	(0,23)
PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	371.809.853.889	382.808.807.485	(10.998.953.596)	(2,87)
JUMLAH	1.295.115.597.084	1.308.199.590.812	(13.083.993.728)	(1,00)

4) Pajak Air Permukaan – LO Rp47.443.396.200

Realisasi Pajak Air Permukaan-LO tahun 2025 sebesar Rp47.443.396.200 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp43.584.861.200 bertambah Rp3.858.535.000 atau naik 8,85%.

Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO sudah termasuk Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.970.600. Selengkapnya rincian Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Air Permukaan-LO	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85
JUMLAH	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85

5) Pajak Rokok – LO Rp976.234.701.211

Realisasi Pajak Rokok-LO tahun 2025 sebesar Rp976.234.701.211 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp953.821.306.817 bertambah Rp22.413.394.394 atau naik 2,35%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Rokok-LO	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35
JUMLAH	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35

6) Pajak Alat Berat – LO Rp131.120.400

Realisasi Pajak Alat Berat-LO tahun 2025 sebesar Rp131.120.400 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.333.000 bertambah Rp127.787.400 atau naik 3.834,01%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Alat Berat-LO	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01
JUMLAH	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01

7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO **Rp16.309.820.498**

Realisasi Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO tahun 2025 sebesar Rp16.309.820.498. Selengkapnya rincian Pendapatan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	16.309.820.498	-	16.309.820.498	0,00
JUMLAH	16.309.820.498	-	16.309.820.498	0,00

b. Retribusi Daerah – LO **Rp320.429.298.769**

Realisasi Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp320.429.298.769 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp229.785.216.380 bertambah Rp90.644.082.389 atau naik 39,45%. Bertambahnya realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LO ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Adapun rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum - LO	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34
Retribusi Jasa Usaha - LO	12.898.291.350	8.977.004.529	3.921.286.821	43,68
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65
JUMLAH	320.429.298.769	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp6.547.399.381, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Retribusi Daerah	326.976.698.150	320.429.298.769	(6.547.399.381)

Hal ini merupakan selisih dari saldo Piutang Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp547.855.163 dikurangi dengan Pembayaran atas Piutang Retribusi Tahun sebelumnya sebesar Rp5.848.313.932 dan terdapat Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.693.939.170 dikurangi Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp2.940.879.782.

Secara ringkas rincian penjelasan rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Jasa Umum – LO**

Rp305.314.228.567
- Realisasi Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2025 sebesar Rp305.314.228.567 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp219.111.452.092 bertambah Rp86.202.776.476 atau naik 39,34%. Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan karena beroperasinya dua UPTD Rumah Sakit Daerah baru yaitu UPTD Rumah Sakit Labuan dan UPTD Rumah Sakit Cilograng dan hal ini berpengaruh terhadap capaian realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025. Selengkapnya rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34
JUMLAH	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34

- 2) **Retribusi Jasa Usaha – LO**

Rp12.898.291.350
- Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2025 sebesar Rp12.898.291.350 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.977.004.529 bertambah Rp3.921.286.821 atau naik 43,68%. Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi penerimaan untuk retribusi jasa kepelabuhanan dan juga peningkatan pada penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah yang cukup signifikan. Selengkapnya rincian Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.13 Retribusi Jasa usaha – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	7.920.092.529	(7.920.092.529)	(100,00)
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila - LO	25.000.000	-	25.000.000	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	-	549.305.500	(549.305.500)	(100,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	2.251.346.134	-	2.251.346.134	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	703.820.932	346.434.500	357.386.432	103,16
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	95.163.000	57.187.000	37.976.000	66,41
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.664.261.500	54.012.500	1.610.249.000	2.981,25
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	8.158.699.784	49.972.500	8.108.727.284	16.226,38
JUMLAH	12.898.291.350	8.977.004.529	3.921.286.821	43,68

3) **Retribusi Perizinan Tertentu – LO** **Rp2.216.778.852**

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2025 sebesar Rp2.216.778.852 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.696.759.760 bertambah Rp520.019.092 atau naik 30,65%.

Kenaikan realisasi tersebut diantaranya dikarenakan adanya peningkatan target realisasi penerimaan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), meningkatnya jumlah tenaga kerja asing dan tidak ada keterlambatan pembayaran retribusi TKA serta diiringi dengan naiknya nilai tukar mata uang asing USD. Selengkapnya rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65
JUMLAH	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65

c. **Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO** **Rp71.456.059.578**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp71.456.059.578 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp79.327.988.050 berkurang Rp7.871.928.471 atau turun 9,92%. Kenaikan realisasi tersebut diantaranya disebabkan adanya peningkatan Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	71.456.059.578	79.327.988.049	(7.871.928.471)	(9,92)
JUMLAH	71.456.059.578	79.327.988.049	(7.871.928.471)	(9,92)

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp19.857.179.849, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.598.879.729	71.456.059.578	19.857.179.849

Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan laba/rugi dan deviden pada BUMD TA 2025, terdiri dari:

Uraian	Kapitalisasi Laba/Rugi
PT. BGD	4.309.105.229
PT. BPD BANTEN	34.143.170.600
PT. JAMKRIDA	495.195.495
PD. BPR SERANG	-41.140.942
PD. BPR KERTA RAHARJA	1.222.026.497
PT. AGRO BISNIS BANTEN MANDIRI	-20.271.177.029
JUMLAH	19.857.179.849

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Rp235.479.737.666

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp235.479.737.666 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp182.590.155.795 bertambah Rp52.889.581.871 atau naik 28,97%. Kenaikan realisasi tersebut diantaranya disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan dari BLUD. Secara ringkas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah - LO	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)
JUMLAH	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp2.216.105.823, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah	237.695.843.489	235.479.737.666	(2.216.105.823)

Dengan penjelasan sebagaimana tabel dibawah ini:

URAIAN	Saldo (Rp)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025	350.763.862
Pembayaran Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	-1.480.924.162
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	-50.061.533
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2024 (Neraca)	302.730.917
Hasil Penjualan Kendaraan pada Sekretariat DPRD	-737.497.600
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Yang sudah terbayar (BPKAD)	-441.700.307
Koreksi pengakuan surplus atas klaim asuransi kendaraan pada Disperindag	-203.400.000

URAIAN	Saldo (Rp)
Penerbitan SKTJM 2025-BPKAD	43.983.000
JUMLAH	-2.216.105.823

Secara ringkas rincian perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.122.577.300	1.064.385.900	58.191.400	5,47
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	252.669.383	435.665.405	(182.996.022)	(42,00)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	7.050.778.000	6.566.193.200	484.584.800	7,38
Jasa Giro-LO	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)
Pendapatan Bunga-LO	428.715.632	4.909.702.882	(4.480.987.250)	(91,27)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	43.983.000	62.231.250	(18.248.250)	(29,32)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	22.421.707.738	130.685.367.841	(108.263.660.103)	(82,84)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34
Pendapatan dari Pengembalian-LO	180.557.293.511	2.171.897.700	178.385.395.811	8.213,34
Pendapatan dari BLUD-LO	2.701.339.420	2.233.410.749	467.928.671	20,95
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)
JUMLAH	235.479.737.666	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97

Penjelasan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO Rp1.122.577.300

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO tahun 2025 sebesar Rp1.122.577.300 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.064.385.900 bertambah Rp58.191.400 atau naik 5,47%.

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO tersebut merupakan pendapatan penjualan peralatan/mesin yang sudah tidak digunakan.

2) Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Rp252.669.383

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp252.669.383 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp435.665.405 berkurang Rp182.996.022 atau turun 42,00%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya karena menurunnya pendapatan sewa kantor kas ATM Banten dan Kantin pada UPTD RSUD Banten dan Bapenda.

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan intensifikasi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan potensi Barang Milik Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dikerjasamakan atau

- disewakan kepada pihak ketiga.
- 3) **Hasil Kerja Sama Daerah - LO** **Rp7.050.778.000**
- Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp7.050.778.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.566.193.200 bertambah Rp484.584.800 atau naik 7,38%.
- Bertambahnya Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah - LO tersebut diantaranya bersumber dari Fasilitas Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Orientasi DPRD, Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS dan lain sebagainya oleh Pemerintah Daerah lain yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten. Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah – LO tersebut dicatat pada Badan Pendapatan Daerah.
- 4) **Jasa Giro - LO** **Rp19.424.902.560**
- Realisasi Jasa Giro-LO tahun 2025 sebesar Rp19.424.902.560 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.142.719.183 berkurang Rp1.717.816.623 atau turun 8,12%.
- Jasa Giro-LO tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro – LO atas dana yang disimpan di Bank Banten berupa:
- a) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp16.643.770.462; dan
 - b) Jasa Giro pada Kas Bendahara sebesar Rp2.781.132.099.
- 5) **Pendapatan Bunga - LO** **Rp428.715.632**
- Realisasi Pendapatan Bunga-LO tahun 2025 sebesar Rp428.715.632 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.909.702.882 berkurang Rp4.480.987.250 atau turun 91,27%. Penurunan realisasi Pendapatan Bunga-LO ini disebabkan oleh menurunnya uang milik Pemerintah Provinsi Banten berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berada pada Bank Indonesia.
- 6) **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO** **Rp43.983.000**
- Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp43.983.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp62.231.250 berkurang Rp18.248.250 atau turun 29,32%.
- Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO bersumber dari pendapatan atas Kerugian Uang Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan – LO yang merupakan SKTJM baru terbit di Tahun 2025. Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO tahun 2025 sebesar Rp43.983.000 terdiri dari:

Tabel 5.4.18 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada TA 2025 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	KREDIT (Rp)
1	Bustomi	13.400.000
2	Ani Kurniasih	1.283.000
3	Hendra Gunawan	11.700.000
4	Iip Muripudin Tarigan, AMTE	9.200.000
5	Ajum Suryana	8.400.000
JUMLAH		43.983.000

7) **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO** **Rp111.346.114**

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2025 sebesar Rp111.346.114 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp133.726.463 berkurang Rp22.380.350 atau turun 16,74%. Berkurangnya realisasi ini diantaranya disebabkan oleh menurunnya Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari transaksi kelebihan setoran retribusi, pajak, serta denda keterlambatan pelaporan PBBKB, serta penerimaan-penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada kode rekening lainnya.

Selengkapnya rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)
JUMLAH	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)

8) **Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO** **Rp1.354.883.748**

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO tahun 2025 sebesar Rp1.354.883.748 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.644.866.075 berkurang Rp1.289.982.328 atau turun 48,77%. Turunnya realisasi Pendapatan Denda tersebut bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)
JUMLAH	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)

9) **Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO** **Rp22.421.707.738**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp22.421.707.738 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp130.685.367.841 berkurang Rp108.263.660.103 atau turun 82,84%.

Penurunan realisasi ini diantaranya disebabkan adanya insentif pajak dari pemerintah Provinsi Banten yang diberikan kepada masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	21.535.014.473	127.528.474.100	(105.993.459.627)	(83,11)
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	413.154.300	2.021.437.100	(1.608.282.800)	(79,56)
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	438.544.380	1.129.851.941	(691.307.561)	(61,19)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	7.942.900	5.604.700	2.338.200	41,72
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	27.051.685	0	27.051.685	0,00
JUMLAH	22.421.707.738	130.685.367.841	(108.263.660.103)	(82,84)

10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Rp9.541.260

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp9.541.260 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.624 bertambah Rp9.507.636 atau naik 28.276,34%. Bertambahnya realisasi ini diantaranya disebabkan oleh naiknya penerimaan pendapatan denda retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34
JUMLAH	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34

11) Pendapatan dari Pengembalian - LO Rp180.557.293.511

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2025 sebesar Rp180.557.293.511 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.171.897.700 bertambah Rp178.385.395.811 atau naik 8.213,34%. Bertambahnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia,

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Selengkapnya rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	22.740.820	2.069.138.248	(2.046.397.428)	(98,90)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	184.913.261	102.759.452	82.153.809	79,95
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang - LO	2.047.905.063	-	2.047.905.063	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LO	125.035.950	-	125.035.950	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan - LO	7.000.000	-	7.000.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	174.041.840.897	-	174.041.840.897	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	47.802.024	-	47.802.024	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	2.204.500.000	-	2.204.500.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS - LO	1.116.886.000	-	1.116.886.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan - LO	175.610.808	-	175.610.808	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi - LO	9.727.997	-	9.727.997	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga - LO	827.000	-	827.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa - LO	307.809.425	-	307.809.425	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah DanaBOSP-LO	176.324.643	-	176.324.643	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LO	88.369.623	-	88.369.623	0,00
JUMLAH	180.557.293.511	2.171.897.700	178.385.395.811	8.213,34

12) Pendapatan dari BLUD - LO Rp2.701.339.420

Realisasi Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2025 sebesar Rp2.701.339.420 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.233.410.749 bertambah Rp467.928.671 atau naik 20,95%. Bertambahnya realisasi tersebut disebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dan Lain-Lain Pendapatan BLUD. Selengkapnya rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Pendapatan dari BLUD – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD - LO	-	-	-	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	1.841.926.175	1.249.344.603	592.581.572	47,43
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	859.413.245	984.066.146	(124.652.901)	(12,67)
JUMLAH	2.701.339.420	2.233.410.749	467.928.671	20,95

13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Rp0

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp10.539.955.522. Berkurangnya realisasi tersebut Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 telah dikelompokan dalam pendapatan atas pengembalian belanja berkenaan dan telah dipindahbukukan ke rek bendahara umum negara dengan Nomor SI: 900.1/011-BPKAD/2025 tanggal 13 Juni 2025.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)
JUMLAH	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Rp3.983.458.654.771

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2025 sebesar Rp3.983.458.654.771 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.076.468.200.167 bertambah Rp906.990.454.604 atau naik 29,48%. Bertambahnya realisasi Pendapatan Transfer-LO diantaranya disebabkan oleh naiknya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang berasal dari Bagi Hasil Pajak-LO, Bagi Hasil Lainnya-LO, Dana Alokasi Umum (DAU-LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO.

Adapun secara ringkas rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.976.969.361.771	3.056.848.218.167	920.121.143.604	30,10
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
JUMLAH	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Transfer – LRA dengan Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp576.630.990.100 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.400.338.371.671	3.976.969.361.771	(576.630.990.100)
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO	6.489.293.000	6.489.293.000	-
JUMLAH	3.406.827.664.671	3.983.458.654.771	(576.630.990.100)

Hal ini dikarenakan terdapat akumulasi DBH kurang bayar s.d tahun 2025 sebesar Rp576.641.493.000, reklas dari Pendapatan DAK Non Fisik BOS Reguler-LO menjadi Pendapatan TGR-LO sebesar (Rp10.500.000) dan Koreksi SKH 3 Lebak (Rp2.900) serta reklas Pendapatan DAK Non Fisik Non Reguler ke Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Rp264.322.350)

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.976.969.361.771	3.056.848.218.167	920.121.143.604	30,10
Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	1.562.759.011.100	695.565.550.000	867.193.461.100	124,67
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.057.839.000	2.611.971.000	(1.554.132.000)	(59,50)
Bagi Hasil Lainnya - LO	906.874.000	-	906.874.000	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968	394.405.244	0,03
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	1.265.602.799.459	1.212.422.264.199	53.180.535.260	4,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
Dana Penyesuaian - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
JUMLAH	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp185.563.322.747

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2025 sebesar Rp185.563.322.747 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp505.105.333.302 berkurang Rp319.542.010.555 atau turun 63,26%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh berkurangnya pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah Provinsi Banten.

Secara ringkas perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	179.164.238.747	34.978.633.235	144.185.605.512	412,21
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	460.231.319.677	(460.231.319.677)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri-LO	-	2.679.886.750	(2.679.886.750)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	6.399.084.000	7.215.493.640	(816.409.640)	(11,31)
JUMLAH	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LO sebesar Rp179.179.718.747 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah	6.383.604.000	185.563.322.747	(179.179.718.747,33)

Selisih tersebut disebabkan terdapat Pendapatan Hibah berupa barang yang tersebar pada Perangkat Daerah berikut:

Perangkat Daerah	Jumlah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah	137.941.006.150
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.640.000
Dinas Kelautan Dan Perikanan	41.650.000
Dinas Perhubungan	82.000.000
Dinas Pertanian	814.580.000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.226.362.597
Badan Penghubung	15.480.000
Jumlah	179.179.718.747

5.4.2 Beban

Rp9.584.560.203.090

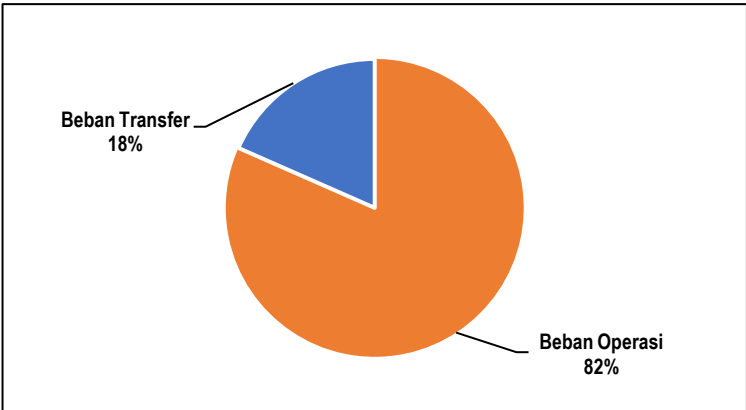
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Realisasi Beban tahun 2025 sebesar Rp9.584.560.203.090 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.872.010.300.755 berkurang Rp2.287.450.097.665 atau turun 19,27%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh turunnya Beban Operasi dan Beban Transfer.

Secara ringkas perbandingan Beban Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Jumlah Beban Tahun 2025 dan 2024				
URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Operasi	7.820.102.521.364	8.176.822.137.234	(356.719.615.870)	(4,36)
Beban Transfer	1.764.457.681.726	3.695.188.163.521	(1.930.730.481.795)	(52,25)
JUMLAH	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)

Grafik 5.4.1 Komposisi Jumlah Beban Tahun 2025



Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja LRA dengan Beban LO sebesar Rp608.680.251.053 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya. Sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Operasi	6.810.065.159.831	7.820.102.521.364	(1.010.037.361.533)
Beban Transfer	2.165.814.792.206	1.764.457.681.726	401.357.110.480
JUMLAH	8.975.879.952.037	9.584.560.203.090	(608.680.251.053)

5.4.2.1 Beban Operasi
Rp7.820.102.521.364

Realisasi Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp7.820.102.521.364 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.176.822.137.234 berkurang Rp356.719.615.870 atau turun 4,36%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Operasi dengan Beban Operasi sebesar Rp1.010.037.361.533 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024				
URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Pegawai	2.646.808.457.534	2.387.855.754.242	258.952.703.292	10,84
Beban Persediaan	362.301.467.682	384.397.060.097	(22.095.592.415)	(5,75)
Beban Jasa	1.673.969.314.320	1.894.097.138.935	(220.127.824.615)	(11,62)
Beban Pemeliharaan	182.159.326.802	208.936.231.188	(26.776.904.387)	(12,82)

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	204.886.719.835	266.961.190.578	(62.074.470.743)	(23,25)
Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	100.867.175.360	12.082.009.854	88.785.165.506	734,85
Beban Barang dan Jasa BOS	181.199.138.299	172.847.593.849	8.351.544.450	4,83
Beban Barang dan Jasa BLUD	133.315.037.293	103.264.860.303	30.050.176.990	29,10
Beban Bunga	-	1.029.672.328	(1.029.672.328)	(100,00)
Beban Hibah	1.150.634.432.879	1.554.968.397.167	(404.333.964.288)	(26,00)
Beban Bantuan Sosial	37.691.434.638	42.988.034.478	(5.296.599.840)	(12,32)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.144.283.735.242	1.141.848.570.703	2.435.164.539	0,21
Beban Penyisihan Piutang	(8.628.886)	94.199.631	(102.828.518)	(109,16)
Beban Lain-lain	-	75.000.000	(75.000.000)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	1.994.910.366	5.376.423.880	(3.381.513.514)	(62,90)
JUMLAH	7.820.102.521.364	8.176.822.137.234	(356.719.615.870)	(4,36)

Rincian beban di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai **Rp2.646.808.457.534**

Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp2.646.808.457.534 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242 bertambah Rp258.952.703.292 atau naik 10,84%. Beban Pegawai meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai. Adapun perbandingan antara Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pegawai	2.646.806.177.534	2.646.808.457.534	2.280.000

Perbedaan tersebut disebabkan adanya Utang Belanja Pegawai Pemeriksaan MCU Pegawai pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebesar Rp2.280.000.

b. Beban Persediaan **Rp362.301.467.682**

Realisasi Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp362.301.467.682 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp384.397.060.097 berkurang Rp22.095.592.415 atau turun 5,75%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan berkurangnya pemakaian barang-barang habis pakai selama Tahun 2025.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp556.693.405.811 sebagaimana rincian berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Persediaan	918.995.356.044	362.511.245.933	-556.693.405.811

Adapun penjelasan selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	Saldo (Rp)
Persediaan 2025	-368.278.517.071
Persediaan 2024	243.017.054.176
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	87.689.720.653
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	101.173.280.145
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Modal	7.424.543.772
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Hibah	37.932.531.904
Bertambahnya persediaan karena Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	396.531.683
Bertambahnya persediaan karena Penerimaan Lainnya	9.937.086.021
Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025	452.425.618
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Beban Hibah	-673.547.388.211
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap	-1.366.411.884
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Rusak/Kadaluarsa/Lainnya	-1.114.917.065
Berkurangnya persediaan karena Lainnya	-409.345.553
Jumlah	-556.693.405.811

- c. **Beban Jasa**

Rp1.673.969.314.320
- Realisasi Beban Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.673.969.314.320 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.894.097.138.935 berkurang Rp220.127.824.615 atau turun 11,62%. Beban Jasa merupakan beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp414.336.729.106. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian mapping dari beban jasa ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Aset Ekstrakomtabel, Beban Hibah serta terdapat penyesuaian jurnal balik, penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	selisih (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	803.178.732.787	460.834.069.515	342.344.663.272
DINAS KESEHATAN	698.923.059.572	487.186.908.710	211.736.150.862
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.180.864.422	123.277.163.804	-1.096.299.382
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.445.147.442	17.384.887.731	-939.740.289
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.236.356.008	7.978.425.618	-742.069.610
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.229.792.158	5.736.746.493	-506.954.335

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	selisih (Rp)
DINAS SOSIAL	9.218.640.464	12.106.966.829	-2.888.326.365
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.537.076.129	15.573.584.771	-2.036.508.642
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.650.582.673	9.278.195.256	-1.627.612.583
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.622.786.639	3.079.820.321	-457.033.682
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.909.254.775	14.548.521.384	-1.639.266.609
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.775.067.531	5.131.941.924	-356.874.393
DINAS PERHUBUNGAN	16.145.222.977	16.709.535.336	-564.312.359
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25.982.689.161	26.585.142.406	-602.453.245
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.985.668.355	12.835.791.532	-850.123.177
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.168.948.494	5.748.423.564	-579.475.070
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.669.429.538	13.744.582.600	-2.075.153.062
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.988.493.591	5.603.835.812	-615.342.221
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.337.304.198	8.933.194.866	-595.890.668
DINAS PARIWISATA	13.876.566.706	14.639.503.834	-762.937.128
DINAS PERTANIAN	13.895.806.137	15.080.213.629	-1.184.407.492
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.893.023.694	5.983.379.107	-90.355.413
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.577.144.554	13.421.310.755	-844.166.201
SEKRETARIAT DAERAH	45.993.418.847	58.640.562.132	-12.647.143.285
SEKRETARIAT DPRD	88.093.000.352	175.390.059.118	-87.297.058.766
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.241.913.390	9.061.932.311	-2.820.018.921
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.735.502.289	18.091.596.525	-1.356.094.236
BADAN PENDAPATAN DAERAH	69.406.397.130	73.264.415.716	-3.858.018.586
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.142.985.076	6.482.133.898	-1.339.148.822
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.416.850.274	18.003.600.540	-6.586.750.266
BADAN PENGHUBUNG	1.515.594.918	1.763.800.201	-248.205.283
INSPEKTORAT	3.142.116.375	4.052.072.945	-909.956.570
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.161.606.771	7.787.995.136	-1.626.388.365
JUMLAH	2.088.277.043.427	1.673.940.314.320	414.336.729.106

- d.
Beban Pemeliharaan
Rp182.159.326.802
- Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp182.159.326.802 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp208.936.231.188 berkurang Rp26.776.904.387 atau turun 12,82%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp49.661.753.152. Hal ini disebabkan secara dominan oleh adanya reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan menjadi aset tetap yang tersebar di beberapa perangkat daerah, kemudian terdapat pengakuan Beban Pemeliharaan

dari Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pemeliharaan	231.821.079.954	182.159.326.802	49.661.753.152

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.152.793.193	1.965.719.034	2.187.074.159
DINAS KESEHATAN	9.127.547.869	8.478.439.869	649.108.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.728.254.619	112.144.690.669	1.583.563.950
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.804.374.274	1.804.374.274	0
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.006.463.680	1.006.463.680	0
DINAS SOSIAL	4.773.980.469	4.479.006.908	294.973.561
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.796.938.546	1.089.874.407	1.707.064.139
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	604.972.278	604.972.278	0
DINAS PERHUBUNGAN	9.423.292.057	8.427.183.776	996.108.281
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	557.953.600	557.953.600	0
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.112.630.126	721.652.426	390.977.700
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	801.868.007	405.661.052	396.206.955
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	569.740.985	569.740.985	0
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.529.515.447	1.529.515.447	0
DINAS PERTANIAN	2.135.157.642	1.417.058.488	718.099.154
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	412.847.687	412.847.687	0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.665.446.071	1.270.473.671	394.972.400
SEKRETARIAT DAERAH	10.802.928.038	10.743.754.718	59.173.320
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.468.807.970	1.468.807.970	0
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	829.680.981	829.680.981	0
BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.555.970.925	8.638.399.551	917.571.374
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.820.205.493	1.820.205.493	0
BADAN PENGHUBUNG	1.318.429.464	612.324.500	706.104.964
INSPEKTORAT	1.399.379.480	449.648.650	949.730.830
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	902.151.285	711.554.649	190.596.636
DINAS KETAHANAN PANGAN	678.942.082	678.942.082	0
SEKRETARIAT DPRD	38.595.487.563	2.618.639.707	35.976.847.856

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.971.970.993	2.295.062.014	676.908.979
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	785.908.048	785.908.048	0
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.041.612.837	1.041.612.837	0
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.983.132.322	1.116.461.429	866.670.893
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	649.874.359	649.874.359	0
DINAS PARIWISATA	812.821.564	812.821.564	0
JUMLAH	231.821.079.954	182.159.326.802	49.661.753.152

- e.
Beban perjalanan Dinas
Rp204.886.719.835
- Realisasi Beban perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp204.886.719.835 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp266.961.190.578 berkurang Rp62.074.470.743 atau turun 23,25%. Beban perjalanan Dinas merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas.

- f.
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Rp100.867.175.360
- Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp100.867.175.360 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.082.009.854 bertambah Rp88.785.165.506 atau naik 734,85%. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- g.
Beban Barang Jasa BOS
Rp181.199.138.299
- Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2025 sebesar Rp181.199.138.299 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp172.847.593.849 bertambah Rp8.351.544.450 atau naik 4,83%. Beban Barang dan Jasa BOS adalah jenis pengeluaran rutin yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari sekolah, yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban ini mencakup pembelian barang habis pakai, penggunaan jasa, serta honorarium, yang diakui sebagai pengurangan nilai ekonomi dalam satu periode tertentu.
- Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp82.840.838.376. Sebagaimana tabel di bawah ini:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BOS	264.039.976.675	181.199.138.299	82.840.838.376

Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap dan menjadi Persediaan. Kemudian terdapat Kapitalisasi

Kredit dari Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomtabel menjadi Beban Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di SMAN/SMKN se Provinsi Banten.

- h. **Beban Barang Jasa BLUD**

Rp133.315.037.293
- Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp133.315.037.293 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp103.264.860.303 bertambah Rp30.050.176.990 atau naik 29,10%. Beban Barang Jasa BLUD merupakan pengeluaran yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari dalam bentuk barang dan jasa.
- Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp82.721.681.683. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BLUD	216.036.718.976	133.315.037.293	82.721.681.683

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian untuk pengakuan Persediaan dan Kapitalisasi Debet Aset Tetap, yang tersebar pada UPTD RSUD Banten, RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Cilograng.

- i. **Beban Bunga**

Rp0
- Realisasi Beban Bunga tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp1.029.672.328. Beban Bunga tahun 2024 merupakan beban pengelolaan pinjaman dan biaya provisi yang timbul akibat pinjaman terhadap PT. SMI.
- j. **Beban Hibah**

Rp1.150.634.432.879
- Realisasi Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp1.150.634.432.879 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.554.968.397.167 berkurang Rp404.333.964.288 atau turun 26,00%. Secara ringkas perbandingan Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	50.197.120.852	394.679.209.875	(344.482.089.023)	(87,28)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	675.361.936.765	736.812.846.821	(61.450.910.056)	(8,34)
Beban Hibah Dana BOS	260.553.112.141	394.701.430.805	(134.148.318.664)	(33,99)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	30.500.640.000	28.774.909.666	1.725.730.334	6,00
Beban Hibah Dana BOSP	134.021.623.121	-	134.021.623.121	0,00
JUMLAH	1.150.634.432.879	1.554.968.397.167	(404.333.964.288)	(26,00)

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp637.257.720.232 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Hibah	513.376.712.647	1.150.634.432.879	637.257.720.232

Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Persediaan yang diserahkan ke Masyarakat menjadi Beban Hibah dan reklasifikasi dari Persediaan ke Beban Hibah. Penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	53.068.193.359	50.197.120.852	2.871.072.507
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.135.661.455	15.135.661.455	0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.932.531.904	35.061.459.397	2.871.072.507
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.233.144.026	675.361.936.765	-640.128.792.739
DINAS KESEHATAN	6.230.760.182	73.000.503.000	-66.769.742.818
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	250.000.000	1.593.769.947	-1.343.769.947
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.524.880.000	2.524.880.000	0
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.087.736.832	17.295.287.423	-2.207.550.591
SEKRETARIAT DAERAH	8.465.670.383	8.465.670.383	0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.674.895.445	1.692.415.419	-17.519.974
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	999.201.184	999.201.184	0
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	3.637.255.426	-3.637.255.426
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	1.906.991.161	-1.906.991.161
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	21.362.436.250	-21.362.436.250
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	475.700.928.864	-475.700.928.864
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1.582.396.765	-1.582.396.765
DINAS SOSIAL	0	2.616.057.341	-2.616.057.341
DINAS KETAHANAN PANGAN	0	16.082.182.594	-16.082.182.594
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	8.916.134.628	-8.916.134.628
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	522.185.240	-522.185.240
DINAS PERHUBUNGAN	0	161.541.630	-161.541.630
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	196.630.000	-196.630.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	68.022.003	-68.022.003
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	53.262.000	-53.262.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2.353.992.255	-2.353.992.255
DINAS PARIWISATA	0	3.706.394.256	-3.706.394.256
DINAS PERTANIAN	0	29.694.872.160	-29.694.872.160
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	88.436.275	-88.436.275
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	478.690.495	-478.690.495
BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	444.347.998	-444.347.998
INSPEKTORAT	0	217.452.069	-217.452.069
Belanja Hibah Dana BOS	260.553.112.141	260.553.112.141	0
DINAS PENDIDIKAN DAN	260.553.112.141	260.553.112.141	0

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
KEBUDAYAAN			
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000	30.500.640.000	0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.500.640.000	30.500.640.000	0
Belanja Hibah Dana BOSP	134.021.623.121	134.021.623.121	0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134.021.623.121	134.021.623.121	0
JUMLAH	513.376.712.647	1.150.634.432.879	-637.257.720.232

k. Beban Bantuan Sosial **Rp37.691.434.638**

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp37.691.434.638 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.988.034.478 berkurang Rp5.296.599.840 atau turun 12,32%. Beban bantuan sosial adalah merupakan pengeluaran pemerintah (pusat/daerah) berupa uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan, yang bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Secara ringkas perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.096.499.850	10.588.034.478	(9.491.534.628)	(89,64)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	36.594.934.788	32.400.000.000	4.194.934.788	12,95
JUMLAH	37.691.434.638	42.988.034.478	(5.296.599.840)	(12,32)

l. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp1.144.283.735.242**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp1.144.283.735.242 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.141.848.570.703 bertambah Rp2.435.164.539 atau naik 0,21%.

Beban penyusutan berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Irigasi selama tahun berjalan, sedangkan Beban Amortisasi berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tidak Berwujud selama setahun. Secara ringkas perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	336.349.614.329	337.234.119.251	(884.504.921)	(0,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.828.661.376	247.364.542.753	24.464.118.623	9,89
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	460.347.160.033	485.812.803.063	(25.465.643.029)	(5,24)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.059.374.362	5.044.215.344	15.159.018	0,30
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.607.027.320	3.300.992.468	4.306.034.853	130,45
Beban Penyusutan Properti Investasi	63.091.897.822	63.091.897.825	(3)	(0,00)
JUMLAH	1.144.283.735.242	1.141.848.570.703	2.435.164.539	0,21

m. **Beban Penyisihan Piutang** **Rp(8.628.886)**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp94.199.631.

Beban Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang Retribusi, Lain-Lain PAD yang sah dan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, serta penyisihan uang muka. Secara ringkas perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024				
URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.853	1.375.585	(1.355.732)	(98,56)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(9.104.900)	11.844.176	(20.949.075)	(176,87)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	1.862.124	(1.862.124)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	456.161	24.802.016	(24.345.855)	(98,16)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	54.315.731	(54.315.731)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
JUMLAH	(8.628.886)	94.199.631	(102.828.518)	(109,16)

n. **Beban Lain-lain** **Rp0**

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp75.000.000. Realisasi beban lain-lain tahun 2024 merupakan realisasi dari beban tak terduga.

o. **Beban Aset Ekstrakomptabel** **Rp1.994.910.366**

Realisasi Beban Aset Ekstrakomptabel tahun 2025 sebesar Rp1.994.910.366 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.376.423.880 berkurang Rp3.381.513.514 atau turun 62,90%.

Beban Aset Ekstrakomptabel merupakan beban atas Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.

5.4.2.2 **Beban Transfer** **Rp1.764.457.681.726**

Realisasi Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp1.764.457.681.726 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.695.188.163.521 berkurang Rp1.930.730.481.795 atau turun 52,25%.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Transfer	2.165.814.792.206	1.764.457.681.726	401.357.110.480

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Transfer dengan Beban Transfer pada rekening Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini

disebabkan adanya penyesuaian untuk Pembayaran Utang BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2025 dan Pelampauan BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2025.

Secara ringkas perbandingan Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.35 Beban Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.623.253.251.068	3.476.464.235.449	(1.853.210.984.381)	(53,31)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	30.342.620.000	95.923.928.072	(65.581.308.072)	(68,37)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.861.810.658	122.800.000.000	(11.938.189.342)	(9,72)
JUMLAH	1.764.457.681.726	3.695.188.163.521	(1.930.730.481.795)	(52,25)

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional **Rp931.729.261.835**

Realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2025 sebesar Rp931.729.261.835 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp753.945.394.668 bertambah Rp177.783.867.167 atau naik 23,58%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.36 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan – LO	10.516.289.464.924	12.625.955.695.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)
Beban	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58

5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional **(Rp53.784.150.219)**

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 tidak terdapat realisasi. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.37 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
Defisit Non Operasional	54.062.605.219	41.729.621.165	12.332.984.055	29,55
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(53.784.150.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19

Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Rp278.455.000

Realisasi Surplus Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp278.455.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp99.310.500 bertambah Rp179.144.500 atau naik 180,39%. Pada tahun 2025 terdapat Realisasi Surplus Non Operasional dari hasil ternak biologis sapi, kambing, domba sesuai dokumen kelahiran TA 2025 sebesar 166.430.000 pada Dinas Pertanian.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Rp54.062.605.219

Realisasi Defisit Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp54.062.605.219 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp41.729.621.165 bertambah Rp12.332.984.055 atau naik 29,55%.

Realisasi Defisit Non Operasional berasal dari penghapusan aset lain-lain serta penghapusan atas barang-barang persediaan kedaluwarsa yang sudah tidak dapat digunakan kembali yang masih terdapat nilai buku. Adapun rincian dari realisasi Defisit Non Operasional tahun 2025 tersebar di beberapa OPD sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp7.993.434.345;
- UPT RSUD Banten
Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp370.041.325;
- UPT RSUD Malingping
Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp93.901.029;
- UPT RSUD Ciligrang
Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp818.780;
- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp2.669.393.529;
- Dinas Perhubungan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp819.893.333;
- Dinas Pertanian
Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak dikarenakan mati Rp409.345.554;
- Sekretariat DPRD
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp35.596.150;
- Badan Penghubung
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp21.700.000;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp5.945.946;
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp1.583.811.521;
- Badan Pendapatan Daerah
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp681.224.146;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp39.377.499.561;

5.4.5 Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2025 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Rp877.945.111.615

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO tahun 2025 sebesar Rp877.945.111.615 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp712.315.084.003 bertambah Rp165.630.027.612 atau naik 23,25%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.38 Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Dari Operasional	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58
Surplus/(Defisit) Dari Non Operasional	(53.784.150.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19
Surplus/(Defisit) - LO	877.945.111.615	712.315.084.003	165.630.027.612	23,25

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 771.712.800.969

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	9.747.592.753.005	12.402.938.739.963
Arus Kas Keluar	8.975.879.952.037	10.777.265.153.072
Arus Kas Bersih	771.712.800.969	1.625.673.586.891

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Rp 9.747.592.753.005

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp9.747.592.753.005 merupakan pendapatan daerah dari LRA sebesar Rp9.749.656.227.905 setelah dikurangi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.063.474.900. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan hasil penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

Tabel 5.5.2 Rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	5.720.173.537.866	8.552.409.195.856
Penerimaan Retribusi Daerah	326.976.698.150	238.989.988.258
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.598.879.729	51.909.734.739
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	235.632.368.589	180.454.955.943
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	986.117.518.100	988.546.837.000
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.057.839.000	5.887.789.000
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	906.874.000	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.265.613.302.359	1.212.441.264.199
Penerimaan Insentif Fiskal	6.489.293.000	19.619.982.000
Penerimaan Hibah	6.383.604.000	6.430.560.000
JUMLAH	9.747.592.753.005	12.402.938.739.963

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Rp 5.720.173.537.866

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	2.112.638.943.700	3.570.962.779.800
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	1.272.028.812.300	2.676.106.930.100
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LRA	1.295.383.786.757	1.307.931.401.139
Pajak Air Permukaan - LRA	47.446.353.000	43.583.445.000
Pajak Rokok – LRA	976.234.701.211	953.821.306.817
Pajak Alat Berat—LRA	131.120.400	3.333.000
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LRA	16.309.820.498	-
JUMLAH	5.720.173.537.866	8.552.409.195.856

2) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Rp326.976.698.150

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.4 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	310.614.687.336	228.658.468.898
Retribusi Pelayanan Kesehatan	310.614.687.336	228.658.468.898
Retribusi Jasa Usaha	14.145.231.962	8.634.759.600
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	25.000.000	-
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.251.346.134	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	7.577.847.600
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	703.820.932	346.434.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	95.163.000	57.187.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.664.261.500	603.318.000
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.405.640.396	49.972.500
Retribusi Perizinan Tertentu	2.216.778.852	1.696.759.760
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.216.778.852	1.696.759.760
JUMLAH	326.976.698.150	238.989.988.258

3) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp51.598.879.729

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, terdiri dari:

Tabel 5.5.5 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten. Tbk	44.380.285.224	49.482.065.813

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	2.888.645.863	2.427.668.926
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	4.329.948.642	-
JUMLAH	51.598.879.729	51.909.734.739

4) Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah **Rp235.632.368.589**

Arus masuk dari Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disetorkan ke kas daerah dan yang disetarakan dengan kas daerah setelah dikurangi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

**Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD Yang Sah
TA 2025 dan 2024**

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Hasil Kerja Sama Daerah	7.050.778.000,00	6.566.193.200
Jasa Giro	19.610.625.109	20.983.882.678
Pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah	428.715.632	4.909.702.882
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	441.700.307	558.961.572
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	111.346.114	133.726.463
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.354.883.748	2.699.948.075
Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.366.145.489	129.571.115.205
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.541.260	33.624
Pendapatan dari Pengembalian	180.557.293.511	2.171.897.700
Pendapatan BLUD	2.701.339.420	2.319.539.021
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	10.539.955.522
JUMLAH	235.632.368.589	180.454.955.943

5) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **Rp3.406.827.664.671**

Arus masuk dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, terdiri dari:

Tabel 5.5.7 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Transfer	3.400.338.371.671	3.353.124.323.167
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak	986.117.518.100	988.546.837.000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Hasil Sumber Daya Alam	1.057.839.000	5.887.789.000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Lainnya	906.874.000	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.265.613.302.359	1.212.441.264.199
Insentif Fiskal	6.489.293.000	19.619.982.000
JUMLAH	3.406.827.664.671	3.372.744.305.167

6) Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah Rp6.383.604.000

Arus masuk dari pendapatan hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten dari PT. Jasa Raharja, sebagai berikut:

Tabel 5.5.8 Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	6.383.604.000	6.430.560.000
JUMLAH	6.383.604.000	6.430.560.000

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Rp8.975.879.952.037

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.975.879.952.037 merupakan realisasi Belanja dan Transfer pada LRA sebesar Rp10.010.940.346.291 dikurangi belanja modal sebesar Rp 1.035.060.394.254. Kas keluar tersebut, terdiri dari :

Tabel 5.5.9 Rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	2.646.806.177.534	2.387.855.754.242
Pembayaran Barang dan Jasa	3.612.161.835.012	3.762.827.581.502
Pembayaran Bunga	-	1.029.672.328
Pembayaran Beban Hibah	513.376.712.647	977.158.618.012
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	37.691.434.638	42.988.034.478
Pembayaran Tak Terduga	-	75.000.000
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dan Desa	2.024.610.361.548	3.386.606.564.438
Pembayaran Bantuan Keuangan	141.204.430.658	218.723.928.072
JUMLAH	8.975.879.952.037	10.777.265.153.072

Penjelasan lebih rinci dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai Rp 2.646.806.177.534

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	994.346.146.816	802.999.872.291
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.462.633.081.415	1.449.548.826.429
Belanja Gaji dan Tunjangan DPR	127.216.268.244	90.446.260.739
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	1.687.001.656	1.251.132.000
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	9.566.892.900	12.917.398.500
Belanja Pegawai BLUD	51.356.786.503	30.692.264.283
JUMLAH	2.646.806.177.534	2.387.855.754.242

Termasuk dalam Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.462.633.081.415 adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp404.506.709.36.

2) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran
Barang dan Jasa

Rp3.612.190.835.012

Merupakan pengeluaran dari pembayaran belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.11 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Barang	1.087.176.991.796	1.033.034.186.729
Belanja Barang Pakai Habis	1.086.637.761.696	1.031.785.146.729
Belanja Barang Tak Habis Pakai	539.230.100	1.204.075.000
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	44.965.000
Belanja Jasa	1.505.623.672.416	1.746.148.002.634
Belanja Jasa Kantor	994.846.904.394	1.192.914.558.892
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	398.590.812.514	393.784.764.965
Belanja Sewa Tanah	108.051.000	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.722.711.147	14.948.742.132
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.765.385.366	25.743.939.457
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.139.657.345	1.401.198.388
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.752.289.326	13.735.723.230
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	23.683.985.899	50.770.553.493
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	14.143.499.310	5.130.115.550
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.870.376.115	11.490.784.363
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	35.833.022.164
Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	0	394.600.000
Belanja Pemeliharaan	231.821.079.954	235.104.649.989
Belanja Pemeliharaan Tanah	5.428.849.000	13.359.775.175
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.711.889.622	56.125.346.541
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.298.814.367	60.082.596.101
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.351.782.965	105.487.242.888
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.744.000	49.689.284
Belana Perjalanan Dinas	204.886.719.835	265.476.636.938
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	204.886.719.835	265.476.636.938
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	102.605.675.360	26.930.389.104
Belanja Barang dan Jasa BOS	264.039.976.675	285.938.548.010
Belanja Barang dan Jasa BLUD	216.036.718.976	170.195.168.099
JUMLAH	3.612.190.835.012	3.762.827.581.502

3) Arus Keluar Kas Untuk Pembayaran Bunga

Rp0-,

Tidak terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya pengelolaan pinjaman dalam periode akuntansi tahun anggaran 2025.

4) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah Rp513.376.712.647

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah kepada pemerintah pusat, kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan hibah dana BOS yang telah dikeluarkan kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	53.068.193.359	429.040.590.380
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.233.144.026	124.642.887.161
Belanja Hibah Dana BOS	260.553.112.141	394.701.430.805
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000	28.774.909.666
Belanja Hibah BOSP	134.021.623.121	-
JUMLAH	513.376.712.647	977.158.618.012

5) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial Rp37.691.434.638

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran bantuan sosial baik kepada individu maupun masyarakat yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.13 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.096.499.850	10.588.034.478
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	36.594.934.788	32.400.000.000
JUMLAH	37.691.434.638	42.988.034.478

6) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga Rp0,-

Tidak terdapat pengeluaran yang berasal dari Belanja Tak Terduga yang dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan 2025.

7) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp2.024.610.361.548

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu sebesar Rp2.024.610.361.548 untuk membayar bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 5.5.14 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	110.729.669.504	169.203.106.576
Kabupaten Serang	162.547.782.544	284.569.527.143
Kabupaten Tangerang	537.657.946.684	834.908.094.597
Kabupaten Lebak	138.945.666.161	191.225.694.268
Kota Cilegon	122.346.796.314	237.850.073.212
Kota Serang	123.527.600.466	203.794.204.488
Kota Tangerang	452.328.581.266	720.440.921.898

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kota Tangerang Selatan	376.526.318.609	744.614.942.256
TOTAL	2.024.610.361.548	3.386.606.564.438

8) Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan

Rp141.204.430.658

Merupakan pengeluaran yang berasal dari Transfer Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yaitu Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp3.000.000.000, untuk bantuan keuangan khusus Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp25.257.620.000, untuk bantuan keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp2.085.000.000 dan bantuan keuangan ke desa sebesar Rp110.861.810.658 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi TA 2025

URAIAN	2025 (Rp)
Provinsi Aceh	1.000.000.000
Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000
Provinsi Sumatera Barat	1.000.000.000
TOTAL	3.000.000.000

Tabel 5.5.16 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	-	15.185.254.852
Kabupaten Serang	25.257.620.000	24.922.517.298
Kabupaten Tangerang	-	5.678.915.700
Kabupaten Lebak	-	18.310.177.372
Kota Cilegon	-	5.284.290.550
Kota Serang	2.085.000.000	15.489.997.300
Kota Tangerang	-	5.407.316.000
Kota Tangerang Selatan	-	5.645.459.000
TOTAL	27.342.620.000	95.923.928.072

Tabel 5.5.17 Rincian Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kabupaten Pandeglang	30.560.000.000	32.600.000.000
Kabupaten Lebak	31.168.029.400	32.300.000.000
Kabupaten Tangerang	21.346.781.258	24.000.000.000
Kabupaten Serang	28.757.000.000	33.900.000.000
Pengembalian Belanja yang Belum Teridentifikasi	(970.000.000)	-
TOTAL	110.861.810.658	122.800.000.000

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp1.032.996.919.354)

Arus kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp1.032.996.919.354, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.18 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.063.474.900	1.064.385.900
Arus Kas Keluar	1.035.060.394.254	1.130.629.758.508
Arus Kas Bersih	(1.032.996.919.354)	(1.129.565.372.608)

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Rp 2.063.474.900

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.063.474.900. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 5.5.19 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	2.063.474.900	1.064.385.900
TOTAL	2.063.474.900	1.064.385.900

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Rp1.035.060.394.254

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.035.060.394.254 yang merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap sebesar realisasi Belanja Modal pada LRA, Belanja Modal Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.20 Rincian Arus Keluar Kas TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Perolehan Tanah	117.739.329.059	46.092.332.880
Perolehan Peralatan dan Mesin	360.377.599.640	337.794.670.558
Perolehan Gedung dan Bangunan	205.562.940.358	171.787.754.271
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.055.992.016	536.407.648.367
Perolehan Aset Tetap Lainnya	48.066.730.408	35.525.505.663
Perolehan Aset Lainnya	4.257.802.773	3.021.846.769
TOTAL	1.035.060.394.254	1.130.629.758.508

5.5.3 Aktivitas Pendanaan (Rp138.497.733.036)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp138.497.733.036, dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.21 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	138.497.733.036	138.497.733.036
Arus Kas Bersih	(138.497.733.036)	(138.497.733.036)

Arus Kas Keluar yang merupakan pengeluaran dalam rangka pembayaran pokok hutang pada tahun 2025 ke PT. SMI sebesar Rp138.497.733.036.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Rp5.904.119.251)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris, merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Saldo Kas atas retur belanja kepada pihak ketiga ke rekening penampung.

Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan Taspen, Taperum dan BPJS, serta penyetorannya kepada pihak ketiga. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.22 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	534.105.593.385	560.151.516.397
Arus Kas Keluar	540.009.712.636	560.697.694.988
Arus Kas Bersih	(5.904.119.251)	(546.178.591)

Penjelasan lebih rinci dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

- a. Arus Kas Masuk sebesar Rp534.105.593.385 berasal dari penerimaan PFK yang terdiri dari:

Tabel 5.5.23 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	85.025.321.262	77.415.187.840
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.919.666.217	1.462.464.069
Utang Iuran Jaminan Kematian	5.145.530.792	4.118.812.797
Utang PPh 21	143.204.434.014	160.207.879.228
Utang PPh 22	7.309.322.479	8.372.965.543
Utang PPh 23	31.979.893.401	34.464.363.068
Utang PPh 25	54.834.879	14.948
Utang PPN Pusat	199.955.461.454	220.833.423.988
Utang Iuran Wajib Pegawai	58.131.922.130	51.920.821.533
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	5.833.165	265.602
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.373.373.592	1.308.047.781
Penerimaan Transito	-	47.270.000
JUMLAH	534.105.593.385	560.151.516.397

b. Arus Kas Keluar sebesar Rp534.152.863.385 terdiri dari:

Tabel 5.5.24 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	85.025.321.262	77.415.187.840
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.919.666.217	1.462.464.069
Utang Iuran Jaminan Kematian	5.145.530.792	4.118.812.797
Utang PPh 21	143.204.434.014	160.207.879.228
Utang PPh 22	7.309.322.479	8.372.965.543
Utang PPh 23	31.979.893.401	34.464.363.068
Utang PPh 25	54.834.879	14.948
Utang PPN Pusat	199.955.461.454	220.833.423.988
Utang Iuran Wajib Pegawai	58.131.922.130	51.920.821.533
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	5.833.165	265.602
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.373.373.592	1.308.047.781
Pengeluaran Transito	5.904.119.251	593.448.591
JUMLAH	540.009.712.636	560.697.694.988

Pengeluaran transito sebesar Rp5.904.119.251 merupakan sisa kas atas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp47.270.000 yang telah dikembalikan ke RKUN pada tanggal 3 Januari 2025 dan Piutang atas Pengembalian belanja tahun anggaran 2025 yang disetor tahun 2026 ke RKUD sebesar Rp5.856.849.251

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar defisit Rp5.904.119.251 merupakan saldo Arus Kas Masuk sebesar Rp534.105.593.385 dikurangi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp540.009.712.636.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas (Rp405.685.970.673)

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan kas sebesar Rp405.685.970.673 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp771.712.800.969, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp1.032.996.919.354), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp138.497.733.036) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp5.904.119.251).

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Rp444.532.811.411

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya sebesar Rp444.532.811.411 merupakan saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.25 Rincian Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Kas di Kas Daerah	429.351.948.995
Kas di BLUD	4.956.875.281
Kas di Bendahara BOS	9.071.167.006
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.105.550.130
Kas Lainnya	47.270.000
JUMLAH	444.532.811.411

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya **Rp38.846.840.739**

Saldo akhir kas di BUD, Kas BOS, Kas BLUD, dan Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.846.840.739.

5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan **Rp0**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.9 Saldo Akhir Kas **Rp38.846.840.739**

Saldo akhir kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.846.840.739 yang merupakan penjumlahan dari seluruh saldo akhir kas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Kas di Kas Daerah	335.671.538
Kas di BLUD	35.713.661.608
Kas di Bendahara BOS	2.797.507.593
JUMLAH	38.846.840.739

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	19.647.022.442.809	19.184.343.785.908
SURPLUS/DEFISIT-LO	877.945.111.615	712.315.084.003
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(27.262.172.787)	(249.636.427.102)
EKUTAS AKHIR	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal Rp19.647.022.442.809

Jumlah Ekuitas Awal TA 2025 adalah sebesar Rp19.647.022.442.809. Nilai Ekuitas Awal tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.6.2 Surplus / Defisit – LO Rp 877.945.111.615

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp877.945.111.615 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp712.315.084.003, saldo Surplus–LO TA 2025 bertambah Rp165.630.027.612 atau naik 23,25%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Rp(27.262.172.787)

Dampak Kumulatif Perubahan sebesar minus Rp10.254.992.670 Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar minus Rp27.262.172.787, bertambah Rp222.374.254.315 atau turun sebesar 89,08%.

Tabel 5.6.2 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Koreksi Kas	(47.267.100)	(9.251.736)
Koreksi Piutang	196.910.563	52.492.913
Koreksi Nilai Persediaan	2.970.414.116	-
Koreksi Aset Tetap	(7.666.487.273)	(247.890.258.932)
Koreksi Aset Lainnya	(5.982.529.800)	195.517.708
Koreksi kewajiban	62.384.502	195.161.758
Koreksi Investasi	206.266.615	(2.180.088.813)
Lain-Lain	(17.001.864.412)	-
Jumlah	(27.262.172.787)	(249.636.427.102)

Penjelasan lebih rinci dari Dampak Kumulatif Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi minus Kas sebesar Rp47.267.100 merupakan Sisa Kas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan yang sudah Disetorkan ke RKUN pada 3 Januari 2025; Rincian Koreksi minus Kas terdapat pada **Lampiran 1 LPE**;
- b. Koreksi Piutang sebesar Rp196.910.563 yang berasal dari:

- 1) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp19.784.687 karena pelunasan;
 - a) Penyisihan Piutang Retribusi TA. 2024 sebesar Rp17.397.394 pada RSUD Malingping;
 - b) Penyisihan Piutang Jasa Giro 2024 sebesar Rp1.833.358, Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2024 sebesar Rp37.043 dan Penyisihan Piutang PBBKB sebesar Rp6.516.892 pada Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Koreksi minus saldo awal piutang TGR atas nama Mukhsin sebesar Rp3.000.000 atas setoran tahun lalu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Koreksi penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian sebesar Rp174.125.876 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Rincian Koreksi Piutang terdapat pada **Lampiran 2 LPE**;
- c. Koreksi Nilai Persediaan di tahun 2025 sebesar Rp2.970.414.116 terdiri dari:
- 1) Koreksi minus atas kurang pencatatan saldo awal sebesar Rp57.600.000 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2) koreksi nilai persediaan tahun lalu yang sudah di catat sebagai kewajiban sebesar Rp2.517.988.498 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 3) koreksi atas Saldo Awal, Saldo Akhir dan Saldo Persediaan diserahkan ke masyarakat untuk untuk Tujuan Berjaga-jaga sebesar Rp510.025.618,18 pada Dinas Ketahanan Pangan.
- Rincian Koreksi Piutang terdapat pada **Lampiran 3 LPE**;
- d. Koreksi minus Aset Tetap di tahun 2025 sebesar Rp7.666.487.273 terdiri dari:
- 1) Koreksi atas Aset Tanah sebesar Rp22.838.904.000;
 - 2) Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.920.574.460;
 - 3) Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.083.660.114;
 - 4) Koreksi atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp212.636.720;
 - 5) Koreksi minus atas Aset tetap Lainnya sebesar Rp192.544.800;
 - 6) Koreksi minus atas Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp41.519.717.766;
- Rincian Koreksi minus atas Aset Tetap terdapat pada **Lampiran 4 LPE**;
- e. Koreksi minus atas Aset Lainnya yaitu uang sitaan perkara terpidana Zulfikar (kasus samsat kelapa dua) ke kas negara sesuai dengan surat kejaksaaan tinggi banten nomor: B-194/m.6.5/Fu.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 sebesar Rp5.982.529.800 pada Badan Pendapatan Daerah;
- Rincian Koreksi minus atas Aset Lainnya terdapat pada **Lampiran 5 LPE**;
- f. Koreksi Kewajiban sebesar Rp62.384.502 atas kelebihan nilai kewajiban prasarana sarana umum yang dibayarkan pada TA 2024;
- Rincian Koreksi Kewajiban terdapat pada **Lampiran 6 LPE**.
- g. Koreksi atas investasi sebesar Rp206.266.615 yang berasal dari penyesuaian Laba atas Laporan Keuangan PT.Banten Global Development Audited 2024 yang terbit setelah Pelaporan LKPD Audited Provinsi Banten 2024 pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Rincian Koreksi Investasi terdapat pada **Lampiran 7 LPE**;
- h. Lain-Lain sebesar minus Rp 17.001.864.412 yang berasal dari:
- 1) Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, JJI Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp2.540.346.841;
 - 2) Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yakni Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung dan Bangunan pada RSUD Banten sebesar minus Rp243.379.675;

- 3) Penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar minus Rp11.605.557.346 yang terdiri dari penghapusan Aset Tetap Tanah berupa Lahan Akses Tol Serang Timur tidak dilanjutkan karena merupakan Jalan Nasional sebesar minus Rp31.170.200, Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar minus Rp8.018.358.610 dan penghapusan aset lain-lain berupa tanah untuk jalan sebesar minus Rp3.556.028.536;
- 4) Penghapusan Tanaman Perkebunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar minus Rp9.905.600;
- 5) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar minus Rp98.800.000;
- 6) Penghapusan Hewan Ternak Ikan Air Tawar Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar minus Rp197.600.000;
- 7) Penghapusan pada Dinas Pertanian sebesar minus Rp1.188.332.600 yang terdiri dari penghapusan Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp353.660.000 serta penghapusan Hewan Ternak Sapi, Kambing Domba dan Tanaman sebesar minus Rp834.672.600;
- 8) Penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar minus Rp624.509.500 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 9) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp211.058.850 pada Biro Umum;
- 10) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp282.374.000 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp20.497.705.381.637

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp20.497.705.381.637 merupakan nilai ekuitas awal ditambah surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan.

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025

6.1.1. Proses Penganggaran pada APBD Induk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024. Struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp11.837.699.357.260
b. Belanja Daerah	<u>Rp11.841.736.991.497</u>
c. Surplus/(defisit)	Rp (4.037.634.237)
d. Pembiayaan Daerah	Rp 4.037.634.237

Sesuai amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit Kebijakan Makro Ekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Struktur ekonomi daerah;
- b. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Ketimpangan pendapatan;
- d. Indeks pembangunan manusia;
- e. Kemandirian fiskal;
- f. Tingkat pengangguran;
- g. Tingkat kemiskinan; dan
- h. Daya saing daerah.

Sementara itu pada Pasal 140 dan 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
- b. penganggaran terpadu; dan
- c. penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun program Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

6.1.2. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024

Pada tanggal 21 Maret 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp11.837.699.357.260
b. Berkurang	<u>Rp 69.897.827.000</u>
c. Jumlah Pendapatan	Rp 11.767.801.530.260
d. Belanja (semula)	Rp11.841.736.991.497
Berkurang	<u>Rp 69.897.827.000</u>
Jumlah Belanja	Rp11.771.839.164.497
e. Surplus/(defisit)	Rp (4.037.634.237)
f. Pembiayaan (semula)	Rp 4.037.634.237
Berkurang	<u>Rp 0</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp 4.037.634.237

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah semula Rp11.837.699.357.260 menjadi Rp11.767.801.530.260 berkurang sebesar Rp69.897.827.000 yaitu pada Pendapatan Transfer sebagai tindak lanjut terbitnya:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2025 dengan nilai pengurangan alokasi untuk Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp70.039.187.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dukungan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp9.505.456.000;
 - 2) DAK Fisik Jalan Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri sebesar Rp21.211.573.000;
 - 3) DAK Fisik Jalan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sebesar Rp14.641.648.000;
 - 4) DAK Fisik Irigasi Layanan Dasar sebesar Rp18.505.510.000;
 - 5) DAK Fisik Pangan Akuatik Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sebesar Rp6.175.000.000.

Perangkat Daerah Terdampak:

 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp63.864.187.000;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.175.000.000.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 29 Desember 2024 dengan nilai penambahan sebesar Rp141.360.000 meliputi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian;
2. Belanja Daerah semula Rp11.841.736.991.497 menjadi Rp11.771.839.164.497 berkurang sebesar Rp69.897.827.000 sebagai tindak lanjut terbitnya:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD TA. 2025 yaitu:
 - 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas 50% (lima puluh persen);
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan Publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:
 - 1) Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025;
 - 2) Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
 - d) Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f) Dukungan swasembada pangan; dan
 - g) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA. 2025 yaitu:
 - 1) Melakukan efisiensi sebagaimana Inpres 1/2025.

- 2) Hasil Efisiensi dialihkan untuk digunakan:
 - a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Kesehatan;
 - c) Infrastruktur dan sanitasi;
 - d) Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - e) Penyediaan Cadangan pangan; dan
 - f) Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi;

Berdasarkan hal diatas terdapat perubahan Belanja Daerah meliputi:

- a. Belanja Pegawai semula Rp2.675.338.274.770 menjadi Rp2.675.018.220.360 berkurang sebesar Rp320.054.410 yaitu berkurangnya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp320.000.000 dan berkurangnya Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp54.410;
- b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp4.614.456.611.914,00 menjadi Rp4.054.207.352.271 berkurang sebesar Rp560.249.259.643 antara lain Belanja Barang Pakai Habis berkurang sebesar Rp447.584.280.041 terutama Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan dan Belanja Jasa Kantor berkurang sebesar Rp152.776.948.180;
- c. Belanja Hibah semula Rp689.127.272.000 menjadi Rp514.989.602.000 berkurang sebesar Rp174.137.670.000 antara lain Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berkurang sebesar Rp155.873.670.000 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berkurang sebesar Rp17.064.000.000;
- d. Belanja Bantuan Sosial semula Rp40.600.000.000 menjadi Rp37.970.500.000 berkurang sebesar Rp2.629.500.000 yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berkurang sebesar Rp3.000.000.000 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga bertambah sebesar Rp370.500.000;
- e. Belanja Modal semula Rp1.525.026.595.733 menjadi Rp1.120.391.534.483 berkurang sebesar Rp404.635.061.250 antara lain Belanja Modal Jalan sebesar Rp199.239.118.100, Belanja Modal Jembatan sebesar Rp37.068.190.000, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp35.619.856.900 dan Belanja Modal Lapangan sebesar Rp28.204.342.900;
- f. Belanja Tidak terduga semula Rp60.094.898.331,00 menjadi Rp1.104.908.696.634 bertambah sebesar Rp1.044.813.798.303;
- g. Belanja Transfer semula Rp2.237.093.338.749 menjadi Rp2.264.353.258.749 bertambah sebesar Rp27.259.920.000 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/1539/SJ tentang Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD TA.2025.

6.1.3. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025

Pada tanggal 11 April 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut terdapat pada rekening rincian obyeknya yaitu:

1. Belanja Barang semula Rp928.980.493.449 menjadi Rp930.446.926.029 bertambah sebesar Rp1.466.432.580 antara lain Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan bertambah sebesar Rp830.372.000.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat bertambah sebesar Rp468.600.000 dan Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp116.760.000;
2. Belanja Jasa semula Rp1.875.663.099.662 menjadi Rp1.874.155.837.082 berkurang sebesar Rp1.507.262.580 antara lain Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berkurang sebesar Rp1.875.800.000, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan berkurang sebesar Rp1.013.900.000 dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bertambah sebesar Rp1.863.000.000;
3. Belanja Perjalanan Dinas semula Rp191.598.920.500 menjadi Rp191.639.750.500 bertambah sebesar Rp40.830.000 yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

6.1.4. Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 13 Oktober 2025, dengan struktur sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp11.837.699.357.260
b. Berkurang	<u>Rp 1.333.112.927.525</u>
c. Jumlah Pendapatan	Rp10.504.586.429.735
d. Belanja (semula)	Rp11.841.736.991.497
Berkurang	<u>Rp 1.031.163.020.350</u>
Jumlah Belanja	Rp 10.810.573.971.147
e. Surplus/(defisit)	Rp (305.987.541.412)
f. Pembiayaan (semula)	Rp 4.037.634.237
Bertambah	<u>Rp 301.949.907.175</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp 305.987.541.412

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp8.319.775.525.770 menjadi Rp6.934.779.242.245 Berkurang sebesar Rp1.384.996.283.525 antara lain diakibatkan oleh terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Program yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025 diperpanjang hingga 31 Oktober 2025 sehingga memberikan kesempatan kembali bagi masyarakat untuk mengurus tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa dibebani sanksi denda maupun pokok pajak tertentu;
2. Pendapatan Transfer semula Rp3.511.577.068.000 menjadi Rp3.563.460.424.000 bertambah sebesar Rp51.883.356.000 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan PMK 89 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
3. Terkait belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 ini, Fokus utama perubahan APBD 2025 yaitu Peningkatan mutu pendidikan & layanan Kesehatan, Penurunan angka stunting, Pengendalian inflasi Pemberdayaan UMKM & industri kerajinan lokal, Pembangunan jalan desa sejahtera “Bang Andra” untuk konektivitas Lebak & Pandeglang serta Transparansi pengelolaan keuangan melalui sistem digital untuk Belanja Operasi semula Rp8.019.522.158.684 menjadi Rp7.169.161.051.275 berkurang sebesar Rp850.361.107.409 yang disebabkan oleh:
 - a. anggaran belanja pegawai bertambah sebesar Rp54.937.571.742 antara lain karena Belanja Gaji Pokok ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - b. Belanja Barang dan jasa berkurang sebesar Rp734.053.767.221 antara lain untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja Hibah berkurang Rp168.483.319.680 yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp2.761.592.250 yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
4. Belanja modal semula Rp1.525.026.595.733 menjadi Rp1.190.899.653.461 berkurang sebesar Rp334.126.942.277 yang disebabkan oleh:
 - a. Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp99.787.553.246 antara lain Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Lapangan;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp27.641.851.625 antara lain untuk Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Komputer, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp38.209.134.658 antara lain karena Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp231.597.629.613 yaitu karena Belanja Modal Jalan dan Belanja Modal Jembatan.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp9.588.002.620 yaitu karena Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

6.1.5. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025

Pada tanggal 5 Desember 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp10.504.586.429.735,00
b. Berkurang	Rp 37.035.942.000,00
c. Jumlah Pendapatan	Rp10.467.550.487.735,00
d. Belanja (semula)	Rp10.810.573.971.147,00
Berkurang	Rp 37.035.942.000,00
Jumlah Belanja	Rp10.773.538.029.147,00
e. Surplus/(defisit)	Rp (305.987.541.412,00)
f. Pembiayaan (semula)	Rp 305.987.541.412,00
Berkurang	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp 305.987.541.412,00

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan transfer semula Rp3.563.460.424.000,00 menjadi Rp3.526.424.482.000,00 berkurang sebesar Rp37.035.942.000,00 diakibatkan oleh terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta terbitnya Surat Gubernur Banten Nomor B.900.114/ 1344-DP3AKKB/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Dana Alokasi Khusus Fisik Renovasi Gedung UPTD PPA Provinsi Banten Mohon Diluncurkan di TA. 2026;
2. Belanja Pegawai semula Rp2.730.275.846.512,00 menjadi Rp2.695.013.553.512,00 berkurang sebesar Rp35.262.293.000,00 yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
3. Belanja Barang dan Jasa semula Rp3.880.402.844.692,68 menjadi Rp3.883.634.692.692,68 bertambah sebesar Rp3.231.848.000,00 menindaklanjuti Keputusan Gubernur Banten nomor 581 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp3.193.152.000,00 dan Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp38.696.000,00;
4. Belanja Modal semula Rp1.190.899.653.461,32 menjadi Rp1.189.126.004.461,32 berkurang sebesar Rp1.773.649.000,00 yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
5. Belanja Tidak terduga semula Rp38.988.535.505,00 menjadi Rp32.756.687.505,00 berkurang sebesar Rp6.231.848.000,00;
6. Belanja Transfer semula Rp2.411.524.730.906,00 menjadi Rp2.414.524.730.906,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

6.2. Mandatory Spending

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 dan diselaraskan dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025. Kebijakan anggaran disusun menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta prinsip money follows program untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja daerah. dengan rincian Alokasi pada Fungsi Pendidikan dan Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

a) Fungsi Pendidikan

Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengampu utama. Prioritas realisasi anggaran mencakup pemenuhan kesejahteraan pendidik melalui pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik), serta akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, optimalisasi DAU Specific Grant turut dimanfaatkan untuk mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi pendidikan juga didukung sinergi lintas Perangkat Daerah yang terintegrasi, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam penguatan literasi, BPSPDM pada pengembangan kompetensi aparatur, Biro Kesra melalui bantuan pendidikan keagamaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembangunan karakter pemuda. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan terwujudnya layanan pendidikan yang holistik, mencakup aspek formal, literasi, kompetensi SDM, hingga pembinaan mental generasi muda di Provinsi Banten. Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp2.729.019.002.246 atau 83,46% dari total yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.114.243.775.642	2.579.136.211.813	82,82%
2	Dinas Kesehatan	926.761.000	890.400.824	96,08%
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	76.000.000	66.256.000	87,18%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	541.315.000	427.473.100	78,97%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.319.170.400	1.197.567.718	90,78%
6	Dinas Sosial	858.328.000	813.858.903	94,82%
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	322.626.000	296.168.500	91,80%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana	6.358.768.900	6.110.184.669	96,09%
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.152.229.000	1.131.641.000	98,21%
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.704.825.000	1.649.465.158	96,75%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.404.974.000	1.197.847.380	85,26%
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	741.893.900	682.806.429	92,04%
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.082.624.200	928.421.045	85,76%
14	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	26.203.050.300	25.557.230.306	97,54%
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.549.233.300	2.275.826.622	89,27%
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	351.672.600	338.741.000	96,32%
17	Dinas Pariwisata	2.351.184.000	2.299.173.603	97,79%
18	Dinas Pertanian	394.178.000	377.006.000	95,64%
19	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	15.872.811.800	13.231.517.033	83,36%
20	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	18.372.000	18.309.656	99,66%
21	Sekretariat DPRD	82.784.324.200	82.335.952.600	99,46%
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.461.934.300	1.325.587.864	90,67%
23	Badan Pendapatan Daerah	4.190.621.200	4.031.006.208	96,19%
24	Badan Kepegawaian Daerah	33.177.904	32.819.575	98,92%
25	Badan Penghubung	500.000	499.800	99,96%
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.768.291.520	2.667.029.440	96,34%
JUMLAH		3.269.712.642.166	2.729.019.002.246	

b) Inflasi

Pelaksanaan Belanja Daerah untuk pengendalian inflasi pada Tahun Anggaran 2025 diimplementasikan melalui pendekatan tematik yang komprehensif dengan mengacu pada Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Kebijakan ini dijalankan melalui sinergi lintas Perangkat Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Fokus intervensi mencakup strategi Ketersediaan Pasokan (K1) yang menyasar stabilitas pendapatan dan produksi, serta strategi Kelancaran Distribusi (K3) melalui penguatan kerjasama antar daerah guna memastikan rantai pasok barang kebutuhan pokok tetap terjaga. Realisasi Rp2.582.531.768.358 atau mencapai 82,83% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Realisasi Anggaran Inflasi

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.114.243.775.642	2.579.136.211.813	82,82%
2	Dinas Ketahanan Pangan	926.761.000	890.400.824	96,08%
3	Dinas Perhubungan	76.000.000	66.256.000	87,18%

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	541.315.000	427.473.100	78,97%
5	Dinas Pertanian	1.319.170.400	1.197.567.718	90,78%
6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	858.328.000	813.858.903	94,82%
JUMLAH		3.117.965.350.042	2.582.531.768.358	

6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Jenis-jenis Opsen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84, tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- dihitung dari besaran Pajak terutang. Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagikan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di antaranya mengatur:

- 1) Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- 2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
- 3) Sinergi Pemungutan Opsen.

6.3.1. Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD;

- b) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD;
- c) SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
- d) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi;
- e) Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan;
- f) Penagihan termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- g) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

6.3.2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB;
- 2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105;
- 3) Salinan SKPDLB disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan;
- 4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

6.3.3. Sinergi Pemungutan Opsen

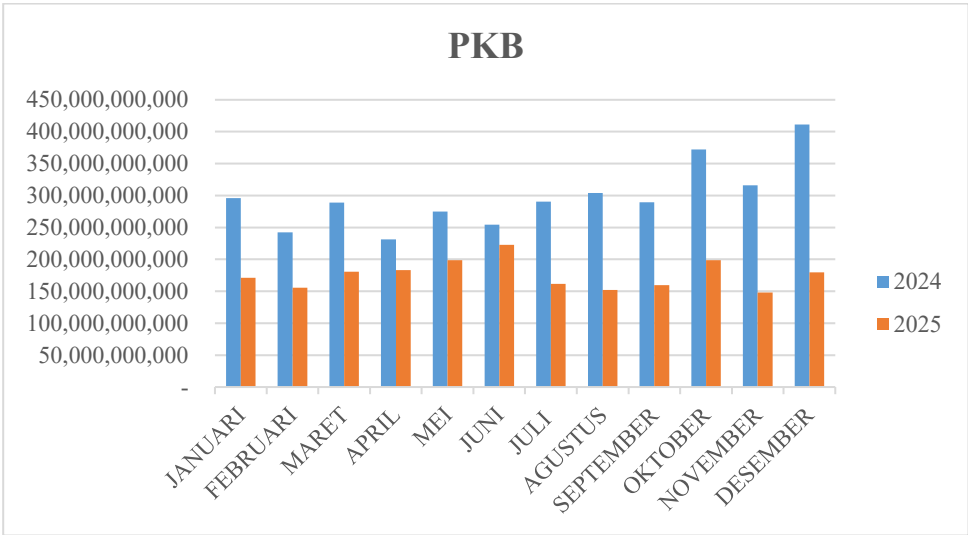
Sinergi Pemungutan Opsen diatur dalam Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,
 Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten / kota tersebut berada.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak PKB dan BBNKB sejak Januari 2025 berdampak pada penurunan jumlah pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (PKB dan BBNKB) melalui mekanisme *split payment* ke rekening Pemerintah Provinsi dan ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan PKB dan BBNKB ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Berikut perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Banten sebelum diterapkannya Opsen Pajak (Tahun 2024) dan setelah diterapkannya Opsen Pajak (Tahun 2025).

6.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700,- turun Rp1.458.323.836.100,- atau 40,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.570.962.779.800,- dengan rincian sebagai berikut:

PKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
JANUARI	296.112.073.800	171.176.864.700	- 124.935.209.100	-42,19%
FEBRUARI	242.235.901.900	155.578.654.800	- 86.657.247.100	-35,77%
MARET	288.720.767.400	180.524.191.000	- 108.196.576.400	-37,47%
APRIL	231.115.521.600	183.250.492.800	- 47.865.028.800	-20,71%
MEI	275.075.650.200	198.808.309.000	- 76.267.341.200	-27,73%
JUNI	254.427.963.650	222.840.169.000	- 31.587.794.650	-12,42%
JULI	290.524.786.850	161.855.322.900	- 128.669.463.950	-44,29%
AGUSTUS	303.784.601.800	152.318.770.300	- 151.465.831.500	-49,86%
SEPTEMBER	289.569.817.500	159.632.591.200	- 129.937.226.300	-44,87%
OKTOBER	372.387.072.300	198.893.282.200	- 173.493.790.100	-46,59%
NOVEMBER	315.910.838.200	148.186.592.100	- 167.724.246.100	-53,09%
DESEMBER	411.097.784.600	179.573.703.700	- 231.524.080.900	-56,32%
TOTAL	3.570.962.779.800	2.112.638.943.700	-1.458.323.836.100	-40,84%

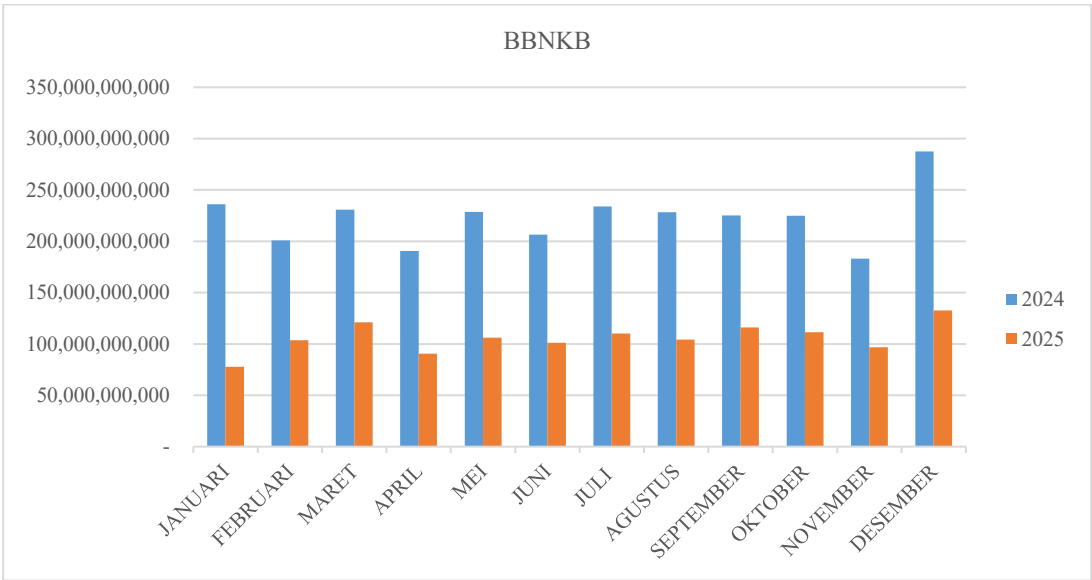
Pada tahun 2024 PKB disetorkan secara utuh (ditampung sementara) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya PKB hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan kepada Kabupaten/Kota melalui belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP). Belanja BHPP PKB kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar Rp1.071.288.833.940,- atau 30% dari realisasi pendapatan PKB yang masuk dalam RKUD. Persentase BHPP tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se provinsi Banten.

Sedangkan pada tahun 2025 PKB disetorkan langsung ke masing-masing Rekening melalui mekanisme *split payment*, yaitu ke rekening Pemerintah Provinsi sebagai pendapatan PKB Provinsi dan ke Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan opsen PKB, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi tahun 2025 hanya mencatat PKB yang merupakan hak Pemerintah Provinsi saja. Perbedaan mekanisme penyetoran tersebut berdampak pada penurunan nilai yang signifikan atas pendapatan PKB Provinsi tahun 2025.

Rincian Realisasi pendapatan PKB, Hak PKB Provinsi, dan Hak Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

BULAN	2024			2025		
	REALISASI PKB	HAK PROVINSI 70% DARI REALISASI PKB	HAK KAB/KOTA (BHPP) 30% DARI REALISASI PKB	REALISASI PKB	HAK PROVINSI (PKB)	HAK KAB/KOTA (OPSEN PKB) 66% DARI PKB PROVINSI
(1)	(2)	(3) = 70%*(2)	(4) = 30%*(2)	(5) = (6)+(7)	(6)	(7) = 66%*(6)
JANUARI	296.112.073.800	207.278.451.660	88.833.622.140	284.153.595.402	171.176.864.700	112.976.730.702
FEBRUARI	242.235.901.900	169.565.131.330	72.670.770.570	258.260.566.968	155.578.654.800	102.681.912.168
MARET	288.720.767.400	202.104.537.180	86.616.230.220	299.670.157.060	180.524.191.000	119.145.966.060
APRIL	231.115.521.600	161.780.865.120	69.334.656.480	304.195.818.048	183.250.492.800	120.945.325.248
MEI	275.075.650.200	192.552.955.140	82.522.695.060	330.021.792.940	198.808.309.000	131.213.483.940
JUNI	254.427.963.650	178.099.574.555	76.328.389.095	369.914.680.540	222.840.169.000	147.074.511.540
JULI	290.524.786.850	203.367.350.795	87.157.436.055	268.679.836.014	161.855.322.900	106.824.513.114
AGUSTUS	303.784.601.800	212.649.221.260	91.135.380.540	252.849.158.698	152.318.770.300	100.530.388.398
SEPTEMBER	289.569.817.500	202.698.872.250	86.870.945.250	264.990.101.392	159.632.591.200	105.357.510.192
OKTOBER	372.387.072.300	260.670.950.610	111.716.121.690	330.162.848.452	198.893.282.200	131.269.566.252
NOVEMBER	315.910.838.200	221.137.586.740	94.773.251.460	245.989.742.886	148.186.592.100	97.803.150.786
DESEMBER	411.097.784.600	287.768.449.220	123.329.335.380	298.092.348.142	179.573.703.700	118.518.644.442
TOTAL	3.570.962.779.800	2.499.673.945.860	1.071.288.833.940	3.506.980.646.542	2.112.638.943.700	1.394.341.702.842

6.4.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300,- turun Rp1.404.078.117.800,- atau 52,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.676.106.930.100,- dengan rincian sebagai berikut:

BBNKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
JANUARI	236.202.312.800	77.801.116.300	- 158.401.196.500	-67,06%
FEBRUARI	201.031.594.600	103.682.751.000	- 97.348.843.600	-48,42%
MARET	230.664.346.900	120.983.404.000	- 109.680.942.900	-47,55%
APRIL	190.592.647.300	90.627.941.000	- 99.964.706.300	-52,45%

BBNKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
MEI	228.585.921.800	106.024.546.000	- 122.561.375.800	-53,62%
JUNI	206.521.968.400	100.989.536.000	- 105.532.432.400	-51,10%
JULI	233.816.356.000	110.232.821.500	- 123.583.534.500	-52,85%
AGUSTUS	228.192.821.600	104.367.855.000	- 123.824.966.600	-54,26%
SEPTEMBER	225.100.938.900	116.100.074.000	- 109.000.864.900	-48,42%
OKTOBER	224.828.207.400	111.578.022.000	- 113.250.185.400	-50,37%
NOVEMBER	182.956.481.700	96.896.947.500	- 86.059.534.200	-47,04%
DESEMBER	287.613.332.700	132.743.798.000	- 154.869.534.700	-53,85%
TOTAL	2.676.106.930.100	1.272.028.812.300	-1.404.078.117.800	-52,47%

Pada tahun 2024 Pajak BBNKB disetorkan secara utuh (ditampung sementara) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya Pajak BBNKB hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan kepada Kabupaten/Kota melalui belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP). Belanja BHPP BBNKB kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar Rp 802.832.079.030,- atau 30% dari realisasi pendapatan BBNKB yang masuk dalam RKUD. Persentase BHPP tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten.

Sedangkan pada tahun 2025 Pajak BBNKB disetorkan langsung ke masing-masing Rekening melalui mekanisme *split payment*, yaitu ke rekening Pemerintah Provinsi sebagai pendapatan BBNKB Provinsi dan ke Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan opsen BBNKB, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi tahun 2025 hanya mencatat BBNKB yang merupakan hak Pemerintah Provinsi saja. Perbedaan mekanisme penyetoran tersebut berdampak pada penurunan nilai yang signifikan atas pendapatan BBNKB Provinsi tahun 2025.

Rincian Realisasi pendapatan BBNKB, Hak BBNKB Provinsi, dan Hak Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

BULAN	2024			2025		
	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI 70% DARI REALISASI BBNKB	HAK KAB/KOTA (BHPP) 30% DARI REALISASI BBNKB	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI (BBNKB)	HAK KAB/KOTA (OPSEN BBNKB) 66% DARI BBNKB PROVINSI
(1)	(2)	(3) = 70%*(2)	(4) = 30%*(2)	(5) = (6)+(7)	(6)	(7) = 66%*(6)
JANUARI	236.202.312.800	165.341.618.960	70.860.693.840	129.149.853.058	77.801.116.300	51.348.736.758
FEBRUARI	201.031.594.600	140.722.116.220	60.309.478.380	172.113.366.660	103.682.751.000	68.430.615.660
MARET	230.664.346.900	161.465.042.830	69.199.304.070	200.832.450.640	120.983.404.000	79.849.046.640
APRIL	190.592.647.300	133.414.853.110	57.177.794.190	150.442.382.060	90.627.941.000	59.814.441.060
MEI	228.585.921.800	160.010.145.260	68.575.776.540	176.000.746.360	106.024.546.000	69.976.200.360

BULAN	2024			2025		
	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI 70% DARI REALISASI BBNKB	HAK KAB/KOTA (BHPP) 30% DARI REALISASI BBNKB	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI (BBNKB)	HAK KAB/KOTA (OPSEN BBNKB) 66% DARI BBNKB PROVINSI
(1)	(2)	(3) = 70%*(2)	(4) = 30%*(2)	(5) = (6)+(7)	(6)	(7) = 66%*(6)
JUNI	206.521.968.400	144.565.377.880	61.956.590.520	167.642.629.760	100.989.536.000	66.653.093.760
JULI	233.816.356.000	163.671.449.200	70.144.906.800	182.986.483.690	110.232.821.500	72.753.662.190
AGUSTUS	228.192.821.600	159.734.975.120	68.457.846.480	173.250.639.300	104.367.855.000	68.882.784.300
SEPTEMBER	225.100.938.900	157.570.657.230	67.530.281.670	192.726.122.840	116.100.074.000	76.626.048.840
OKTOBER	224.828.207.400	157.379.745.180	67.448.462.220	185.219.516.520	111.578.022.000	73.641.494.520
NOVEMBER	182.956.481.700	128.069.537.190	54.886.944.510	160.848.932.850	96.896.947.500	63.951.985.350
DESEMBER	287.613.332.700	201.329.332.890	86.283.999.810	220.354.704.680	132.743.798.000	87.610.906.680
TOTAL	2.676.106.930.100	1.873.274.851.070	802.832.079.030	2.111.567.828.418	1.272.028.812.300	839.539.016.118

6.5. HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN JANGKA PENDEK, SILPA TA 2025, DAN PENYEDIAAN DUKUNGAN DANA UNTUK PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA APBD TA 2026

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp44.703.689.990** sebagaimana yang tercatat pada saldo Kas dan Piutang di Neraca per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

- Saldo RKUD (a)	Rp	335.671.538
- Saldo Kas BLUD (b)	Rp	35.713.661.608
- Dana Bendahara Sekolah Bosnas (b)	Rp	2.797.507.593
Kas dan Setara Kas(c=a+b+c)	Rp	38.846.840.739
- Piutang Lainnya (d)	Rp	5.856.849.251
SILPA (e=c+d)	Rp	44.703.689.990

SILPA sebesar **Rp44.703.689.990** berasal dari efisiensi belanja dan transfer daerah **Rp762.597.682.856**, ditambah surplus pembiayaan netto **Rp266.964**, dikurangi tidak tercapainya target pendapatan TA 2025 **Rp717.894.259.830**.
 Dari SILPA sebesar **Rp44.703.689.990** di atas, yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan TA 2026 hanya sebesar Rp6.192.520.789 (Rp335.671.538 + Rp5.856.849.251) yang berada pada saldo Kas di RKUD Provinsi Banten dan Piutang Lainnya yang sudah disetor ke RKUD di Tahun 2026, sedangkan sisanya sebesar Rp38.511.169.201 digunakan untuk keperluan operasional BLUD dan sekolah pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten mencatat piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp576.641.493.000**. Dengan demikian, terdapat sumber pembiayaan yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten mencatat kewajiban sebesar **Rp494.127.183.144** yang terdiri dari:

No	Kewajiban	Jumlah
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036
2	Utang Belanja Pegawai	2.280.000
3	Utang Belanja Barang dan Jasa (di Luar Jasa Kantor)	14.424.352.418
4	Utang Belanja Hibah	2.579.582.397

No	Kewajiban	Jumlah
5	Utang Belanja Modal	29.993.600.306
6	Utang Belanja Bagi Hasil	308.629.634.987
	TOTAL	494.127.183.144

Terdapat surat permohonan untuk pembayaran kewajiban pada tahun anggaran 2026 dari:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten nomor 900.1.2/13/Perkim/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Permohonan Pembayaran Kewajiban Bayar Tahun 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua TAPD Provinsi Banten, terdapat 3 (tiga) pekerjaan fisik dan 1 (satu) pekerjaan pengawasan yang belum dibayarkan pada Tahun 2025 dengan total sebesar **Rp823.517.000**, berdasarkan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025, yang dicatat sebagai kewajiban di LKPD Tahun 2025 sebesar **Rp630.293.394** sehingga terdapat potensi penambahan nilai kewajiban sebesar **Rp193.223.606**;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor:900.1.1/577-DPUPR/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Penganggaran Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Terhadap Pekerjaan TA.2025, sebesar **Rp24.240.963.640** yang terdiri dari paket pekerjaan yang diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp11.253.368.635 dan kewajiban retensi (5%) sebesar Rp12.987.595.005, seluruhnya sudah tercatat di LKPD Tahun 2025;
3. Kepala Dinas Pendidikan nomor B-400.3.13/0725/Dindikbud/2026 tanggal 19 Februari 2026 hal Permohonan Tambahan Anggaran untuk Penyelesaian Kewajiban Kegiatan Tahun 2025 terdapat 6 (enam) paket pekerjaan yang belum dibayarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2025 berdasarkan sebesar **Rp18.131.262.853**, berdasarkan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025, yang dicatat sebagai kewajiban di LKPD Tahun 2025 sebesar **Rp14.938.400.068** sehingga terdapat potensi penambahan nilai kewajiban sebesar **Rp3.192.862.785**.

Dari data di atas, maka potensi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar **Rp497.513.269.535 (Rp494.127.183.144 + Rp193.223.606 + Rp3.192.862.785)**. Potensi kewajiban tersebut akan dipenuhi dari sumber pembiayaan sebesar **Rp582.834.013.789 (Rp6.192.520.789 + Rp576.641.493.000)**.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	275.117.073	3.970.600	275.117.073	3.970.600
2	RSUD Banten	Piutang Retribusi Daerah	2.368.835.100	415.884.925	2.368.835.100	415.884.925
3	RSUD Malimping	Piutang Retribusi Daerah	3.479.478.832	129.762.238	3.479.478.832	129.762.238
4	RSUD Cilograng	Piutang Retribusi Daerah	-	2.208.000	-	2.208.000
5	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311		-	19.601.311
6	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pengembalian Jasa Giro	-	639.147	-	639.147
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pengembalian Jasa Giro	366.671.526	180.309.830	366.671.526	180.309.830
8	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah- Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.114.252.636	91.232.173	1.035.669.924	169.814.885
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah- Piutang Transfer Dana Bagi Hasil	-	577.509.325.000	867.832.000	576.641.493.000
10	Tersebar di beberapa SKPD	Belanja Dibayar Dimuka	10.294.532.279	4.609.749.111	10.294.532.279	4.609.749.111
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang TPTGR	10.279.299.907	50.127.286	455.200.307	9.874.226.886
12	Tersebar di beberapa SKPD	Piutang Lainnya	12.333.916.600	5.856.849.251	7.292.802.000	10.897.963.851
Jumlah Piutang			40.531.705.264	588.850.057.561	26.436.139.041	602.945.623.784

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Piutang Pajak Daerah	3.970.600	19.853	3.950.747
2	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	545.115.887
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311	1.960.131	17.641.180
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	350.763.862	849.074	349.914.788
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	576.641.493.000
6	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	4.609.749.111
7	Piutang TPTGR	9.874.226.886	2.126.882.873	7.747.344.013
8	Piutang Lainnya	10.897.963.851	5.041.114.600	5.856.849.251
Jumlah		602.945.623.784	7.173.565.807	595.772.057.977

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5=3-4
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Tambahan Penyertaan modal	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2007	PT BANK JABAR	Perda Nomor 3 Tahun 2007	saham	600.000.000.000	130.147.464.000	-	130.147.464.000	469.852.536.000	44.380.285.224	-	130.147.464.000
2	2007	PT Banten Global Development (BGD)	Perda Nomor 3 Tahun 2007	saham	35.361.227.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	2008		Perda Nomor 16 Tahun 2008	saham		12.000.000.000		12.000.000.000				12.000.000.000
	2010		Perda Nomor 7 Tahun 2010	saham		11.861.227.000		11.861.227.000				11.861.227.000
	2012		Perda Nomor 1 Tahun 2012	saham		10.000.000.000		10.000.000.000				10.000.000.000
		Jumlah			35.361.227.000	35.361.227.000	-	35.361.227.000	-	-	-	35.361.227.000
3	2023	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten	Perda Nomor 5 Tahun 2023	saham	8.000.000.000.040	2.165.600.000.000	-	2.165.600.000.000	5.834.400.000.040		-	2.165.600.000.000
	2025		Perda Nomor 4 Tahun 2025	Tanah dan Bangunan		139.569.320.000	-	-				-
		Jumlah			8.000.000.000.040	2.305.169.320.000		2.165.600.000.000	5.834.400.000.040	-		2.165.600.000.000
4	2007	PT. LKM AKTHA KERTA RAHARJA	Perda Nomor 3 Tahun 2007	saham	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-			3.000.000.000
		PT. LKM RANGKASBITUNG			470.700.000	470.700.000	-	470.700.000	-	19.785.311		470.700.000
		PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG			300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	44.198.349		300.000.000
		PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA			900.000.000	900.000.000	-	900.000.000	-	84.660.172		900.000.000
		PT. LKM PANDEGLANG BERKAH			1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	-	-		1.050.000.000
		Jumlah			5.720.700.000	5.720.700.000	-	5.720.700.000	-	148.643.832		5.720.700.000
5	2007	BPR KERTARAHARJA	Perda Nomor 3 Tahun 2007	saham	15.000.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	-	690.411.116	-	1.500.000.000
	2009		Perda Nomor 4 Tahun 2009	saham		13.500.000.000	-	13.500.000.000			-	13.500.000.000
		Jumlah			15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	690.411.116	-	15.000.000.000
6	2007	BPR SERANG	Perda Nomor 3 Tahun 2007	saham	15.000.000.000	2.100.000.000	-	2.100.000.000	-	2.049.590.915	-	2.100.000.000
	2009		Perda Nomor 4 Tahun 2009	saham		12.900.000.000	-	12.900.000.000			-	12.900.000.000
		Jumlah			15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	2.049.590.915	-	15.000.000.000
7	2013	PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida)	Perda Nomor 4 Tahun 2013	saham	51.000.000.000	51.000.000.000	-	51.000.000.000	-	4.329.948.642	-	51.000.000.000
9	2020	PT Agrobisnis Banten Mandiri	Perda Nomor 4 Tahun 2020	saham	153.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	78.000.000.000	-	-	10.000.000.000
	2021		Perda Nomor 4 Tahun 2020	saham		65.000.000.000		65.000.000.000			-	65.000.000.000
	2022		Perda Nomor 4 Tahun 2020	saham		5.000.000.000		5.000.000.000				5.000.000.000
		Jumlah			153.000.000.000	80.000.000.000	-	80.000.000.000	78.000.000.000	-		80.000.000.000
		JUMLAH			839.720.700.000	2.637.398.711.000	-	2.497.829.391.000	547.852.536.000	51.598.879.729	-	2.497.829.391.000

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.520.492.427.651	1.346.628.759.449	697.706.041.971	5.169.415.145.129
2	Dinas Kesehatan	720.942.136.409	33.330.505.652	259.039.252.912	495.233.389.148
3	UPT RSUD Banten	1.237.519.498.504	62.220.444.907	45.957.020.033	1.253.782.923.378
4	UPT RSUD Malingping	366.040.071.068	7.340.778.344	4.121.575.880	369.259.273.532
5	UPT RSUD Labuan	-	170.885.688.874	204.317.899	170.681.370.975
6	UPT RSUD Ciligrang	-	107.348.366.685	470.697.665	106.877.669.020
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.148.027.416.178	3.670.890.694.311	3.313.850.005.249	17.505.068.105.240
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	451.573.236.797	5.840.665.771	40.806.250.475	416.607.652.093
9	Satuan Polisi Pamong Praja	15.422.467.112	605.523.435	629.646.265	15.398.344.282
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.428.079.798	504.495.100	-	91.932.574.898
11	Dinas Sosial	61.918.776.162	10.710.917.463	11.389.611.716	61.240.081.908
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	255.148.880.151	11.984.320.082	6.013.511.553	261.119.688.680
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	28.476.366.824	170.049.151	1.959.000	28.644.456.975
14	Dinas Ketahanan Pangan	20.705.454.330	231.900.000	-	20.937.354.330
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.621.224.766	4.336.150.399	398.747.173	91.558.627.993
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.547.501.963	2.091.606.400	53.599.684	40.585.508.678
17	Dinas Perhubungan	206.510.111.946	25.456.361.008	7.990.972.991	223.975.499.963
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	84.070.039.747	6.353.017.714	212.652.214	90.210.405.247
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39.989.625.843	967.292.360	4.508.108.844	36.448.809.359
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.345.199.025	1.697.867.675	23.375.000	34.019.691.700
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.332.872.326	4.955.446.670	2.703.747.870	51.584.571.126
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.088.074.091	2.071.945.320	2.456.388.965	83.703.630.447
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	219.742.711.245	5.127.664.376	5.408.549.897	219.461.825.724
24	Dinas Pariwisata	39.276.925.736	540.352.700	-	39.817.278.436
25	Dinas Pertanian	209.569.546.383	4.426.784.991	2.045.191.305	211.951.140.069
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	90.803.351.110	4.742.334.330	-	95.545.685.440
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	149.068.804.828	2.855.284.452	3.647.811.838	148.276.277.442
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10.320.385.185	135.800.000	1.061.445.000	9.394.740.185
29	Biro Hukum	3.933.129.736	433.065.091	-	4.366.194.827
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	4.131.785.097	474.309.476	126.000.000	4.480.094.573
31	Biro Umum dan Perlengkapan	628.294.023.351	9.446.184.035	11.011.966.044	626.728.241.342
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10.159.990.980	39.750.000	147.865.014	10.051.875.966
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	11.557.956.204	211.980.256	29.110.000	11.740.826.460
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	17.743.955.040	68.624.001	173.840.500	17.638.738.540

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
35	Sekretariat DPRD	338.530.369.802	78.057.829.540	13.964.276.041	402.623.923.302
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.149.833.842	366.859.246	197.900.000	50.318.793.088
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	181.224.886.372	39.881.024.786	57.270.487.951	163.835.423.207
38	Badan Pendapatan Daerah	445.386.455.620	27.620.653.797	21.368.182.578	451.638.926.840
39	Badan Kepegawaian Daerah	50.053.879.928	1.004.050.000	-	51.057.929.928
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	118.877.585.949	778.451.835	-	119.656.037.784
41	Badan Penghubung	21.770.585.208	2.408.887.278	385.531.030	23.793.941.456
42	Inspektorat	40.160.349.482	1.470.619.882	189.175.000	41.441.794.364
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.472.166.421	202.728.936	-	37.674.895.357
Jumlah Aset		28.218.428.138.208	5.656.916.035.779	4.515.564.815.555	29.359.779.358.431
Akumulasi Penyusutan		(11.249.738.861.872)	3.276.244.827.924	4.359.146.440.750	(12.332.640.474.698)
Nilai Buku		16.968.689.276.336			17.027.138.883.733

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	9.287.817.013.353	1.901.563.491.140	1.825.609.603.093	9.363.770.901.401
2	Peralatan dan Mesin	4.224.775.742.902	470.175.297.418	155.837.821.598	4.539.113.218.722
3	Gedung dan Bangunan	5.021.714.531.995	1.078.005.861.359	715.728.481.030	5.383.991.912.324
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.015.649.850.754	2.119.369.552.020	1.628.930.828.764	9.506.088.574.010
5	Aset Tetap Lainnya	469.710.626.512	48.360.641.569	3.505.429.172	514.565.838.910
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	198.760.372.691	39.441.192.272	185.952.651.899	52.248.913.064
Jumlah Aset		28.218.428.138.208	5.656.916.035.779	4.515.564.815.555	29.359.779.358.431
Akumulasi Penyusutan		(11.249.738.861.872)	3.276.244.827.924	4.359.146.440.750	(12.332.640.474.698)
Nilai Buku		16.968.689.276.336			17.027.138.883.733

Gubernur Banten

Andra Soni

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI												REKLASIFI KASI/ PENGHAPU SAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH						BERKURANG							
			TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAIN NYA	JUMLAH	TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALA TAN DAN MESIN	ASET TETAP LAIN NYA	JUMLAH		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.450.039.170	-	26.603.234.622	-	-	-	26.603.234.622	-	1.325.416.470	-	-	-	1.325.416.470	-	26.727.857.322
2	DINAS KESEHATAN	702.196.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.196.100
3	RSUD BANTEN	18.976.530.335	-	91.985.700	-	-	-	91.985.700	-	18.976.530.335	-	-	-	18.976.530.335	-	91.985.700
4	RSUD MALINGPING	1.105.059.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105.059.450
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	166.019.741.476	-	420.463.200	11.003.869.200	-	-	11.424.332.400	932.131.846	20.565.339.008	143.483.572.300	-	-	164.981.043.154	-	12.463.030.722
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.160.566.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.566.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL	-	-	91.393.000	-	-	-	91.393.000	-	-	-	-	-	-	-	91.393.000
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	95.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.016.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DEKLINTUNGSIAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	49.522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.522.000	-	-	49.522.000	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERENCANAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KOPERASI DAN UMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU BINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.748.896.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.748.896.670
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN	99.250.000	-	-	-	-	-	-	-	99.250.000	-	-	-	99.250.000	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI												REKLASIFI KASI/ PENGHAPU SAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH						BERKURANG							
			TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAIN NYA	JUMLAH	TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALA TAN DAN MESIN	ASET TETAP LAIN NYA	JUMLAH		
28	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	-	-	515.439.599	-	193.917.000	-	709.356.599	-	-	-	-	-	-	-	709.356.599
30	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBAHANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEKREATARIAT DPRD	6.353.555.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.353.555.500
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	DINAS PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	198.760.372.701	-	27.722.516.122	11.003.869.200	193.917.000	-	38.920.302.322	932.131.846	40.966.535.813	143.533.094.300	-	-	185.431.761.959	-	52.248.913.064

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No.		SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.559.414.495	8.001.070.445	15.852.719.667	21.707.765.273
2	Dinas Kesehatan	18.299.494.416	1.350.755.500	3.663.880.070	15.986.369.846
3	RSU Malingping	6.110.272.419	29.691.000	1.589.760.554	4.550.202.865
4	RSUD Banten	1.819.077.853	1.630.879.675	1.238.116.175	2.211.841.353
	RSUD Labuan		1.419.605.000	59.150.208	1.360.454.792
	RSUD Ciligrang		1.419.672.500	59.153.021	1.360.519.479
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388.733.867.499	18.962.189.944	43.836.806.986	363.859.250.456
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.556.294.789	4.156.783.309	4.245.941.650	25.467.136.448
7	Satuan Polisi Pamong Praja	182.980.208	575.961.600	600.699.100	158.242.708
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	145.113.083	-	47.076.500	98.036.583
9	Dinas Sosial	312.216.258	1.511.611.756	1.511.611.756	312.216.258
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	82.531.482	2.521.296.865	2.541.323.785	62.504.562
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	8.166.667	98.500.000	98.500.000	8.166.667
12	Dinas Ketahanan Pangan	13.587.500	-	10.870.000	2.717.500
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93.763.292	62.800.786	38.725.000	117.839.077
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	122.657.292	-	44.812.500	77.844.792
15	Dinas Perhubungan	11.123.035.944	589.807.500	1.528.750.833	10.184.092.611
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.355.326.105	-	283.511.915	1.071.814.190
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75.000.000	209.700.000	209.700.000	75.000.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101.227.812	-	-	101.227.812
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	39.098.958	30.750.000	55.820.833	14.028.125
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.466.026	1.979.719.204	1.988.937.938	47.247.292
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.545.013.791	3.680.927.050	2.638.671.542	5.587.269.300
22	Dinas Pariwisata	275.394.762	-	30.094.875	245.299.887
23	Dinas Pertanian	2.674.456.901	627.688.858	930.848.858	2.371.296.901
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.775.963.423	94.005.900	38.399.196	13.831.570.128
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	737.758.447	258.000.000	891.072.208	104.686.239
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	432.250.000	432.250.000	-
27	Biro Hukum	-	-	-	-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	24.492.650	126.000.000	140.695.590	9.797.060
29	Biro Umum dan Perlengkapan	1.794.748.515	4.851.881.914	4.738.093.722	1.908.536.707
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	13.533.333	147.865.014	161.398.347	-
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12.187.500	21.910.000	21.910.000	12.187.500
32	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	173.840.500	173.840.500	-
33	Sekretariat DPRD	259.542.373	2.249.000.000	2.288.000.000	220.542.373
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.661.469	150.600.000	150.600.000	55.661.469
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.383.719.199	56.778.852.731	3.834.344.082	54.328.227.847
36	Badan Pendapatan Daerah	11.033.181.379	6.384.789.104	16.646.252.019	771.718.464
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	292.573.583	-	282.374.000	10.199.583
39	Badan Penghubung	21.700.000	385.531.030	377.231.030	30.000.000
40	Inspektorat	34.292.592	194.250.000	4.046.875	224.495.717
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.647.850	-	-	110.647.850
JUMLAH ASET LAINNYA		520.834.459.866	121.108.187.183	113.285.991.336	528.656.655.714

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
2		3	4	5	6 = 3+4-5
1	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036
	Pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036
2	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	1.996.670.086	2.990.941.315	1.996.670.086	2.990.941.315
	Sewa ATM - Badan Pendapatan Daerah	68.128.674	253.156.000	68.128.674	253.156.000
	Sewa Tanah Pangkalan SPBUN - Badan Pendapatan Daerah	52.456.179	541.724	52.456.179	541.724
	Sewa ATM - RSUD Banten	36.573.899	-	36.573.899	-
	Sewa ATM - BPKAD & Sekretariat DPRD	62.863.870	41.216.614	62.863.870	41.216.614
	Sewa Kantor Kas Bank Banten - BPKAD & Bapenda	-	45.960.575	-	45.960.575
	Sewa Tempat Usaha/Kantin - RSUD Banten	49.454.033	50.061.533	49.454.033	50.061.533
	Sewa ATM - Sekretariat Daerah	33.254.262	16.642.302	33.254.262	16.642.302
	Ijin Sempadan Jalan dan Ijin Bagian Jalan - Dinas PUPR	1.693.939.169	2.583.362.568	1.693.939.169	2.583.362.568
3	UTANG BELANJA	719.769.537.084	359.628.410.728	719.769.537.084	359.628.410.728
	Utang Belanja Pegawai	-	2.280.000	-	2.280.000
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak	709.986.745.467	308.629.634.987	709.986.745.467	308.629.634.987
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tersebar di OPD	3.565.693.171	4.278.420.221	3.565.693.171	4.278.420.221
	Utang Jasa Pelayanan RSUD Banten	-	-	-	-
	Utang Jasa Pelayanan RSUD Malingping	948.943.986	-	948.943.986	-
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Dan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.019.983.000	7.142.678.325	4.019.983.000	7.142.678.325
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Ahli, Jasa Konsultasi	26.901.600	-	26.901.600	-
	Utang Belanja Pemeliharaan	-	87.050.775	-	87.050.775
	Utang Belanja Barang Dan Jasa - BLUD	795.553.199	6.915.163.718	795.553.199	6.915.163.718
	Utang Belanja Hibah	-	2.579.582.396	-	2.579.582.396
	Utang Pengadaan Aset Tetap	425.716.662	29.993.600.306	425.716.662	29.993.600.306
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		860.263.940.206	501.117.085.079	860.263.940.206	501.117.085.079

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	383.457.470.289	-	138.497.733.036	244.959.737.253

Gubernur Banten

Andra Soni

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2025 DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	6	7=(4+5+6)	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	{17}={12}+{13}+{15}+{16}	(18)	(19)={17}x(18)
1. Bidang Perbankan																		
	1. PT. BANK BANTEN	1	S	8.551.041.000.000	1.450.404.000.000	-	10.001.445.000.000	100.017.000.000	8.001.272.000.000	8.101.289.000.000	4.308.864.000.000	-	2.165.600.000.000	369.541.000.000	(2.778.249.000.000)	1.900.156.000.000	66,11%	1.256.193.131.600
2. Bidang Lembaga Penjaminan																		
	1. PT. JAMKRIDA BANTEN	1	S	339.566.807.953	430.733.303.180	-	770.300.111.133	238.700.401.817	452.590.789.875	691.291.191.693	56.500.000.000	-	51.000.000.000	18.121.010.460	4.387.908.980	79.008.919.440	90,27%	71.317.785.689
3. Bidang Pertanian dan Pangan																		
	1. PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI	1	S	44.067.548.279	14.135.059.626	-	58.202.607.905	1.105.759.651	263.151.832	1.368.911.483	80.000.000.000	-	80.000.000.000	-	(23.166.303.578)	56.833.696.422	100%	56.833.696.422
4. Bidang Lainnya (Holding Company)																		
	1. PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT	1	S	32.442.904.133	31.724.282.949	-	64.167.187.081	10.319.468.064	32.856.928	10.352.324.992	35.515.240.376	-	35.361.227.000	-	18.299.621.714	53.814.862.089	99,57%	53.581.491.612
	Total Seluruh Bidang Industri			8.967.118.260.365	1.926.996.645.755	-	10.894.114.906.119	350.142.629.532	8.454.158.798.635	8.804.301.428.168	4.480.879.240.376	-	2.331.961.227.000	387.662.010.460	(2.778.727.772.884)	2.089.813.477.951	-	1.437.926.105.323

Keterangan:
a) **1)** Telah diaudit (*audited*); **2)** Lap.Tahunan belum diaudit (*unaudited*); **3)** Lap. Semester; **4)** Lap.Triwulan; **5)** Prognosa; **6)** RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
b) **S**= Sehat; **KS**=Kurang Sehat; **TS**= Tidak Sehat

Gubernur Banten

Andra Soni

PROVINSI BANTEN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)
1.	Bidang Perbankan								
	1. PT. BANK BANTEN	1	S	284.944.000.000	225.418.000.000	59.526.000.000	-	3.054.000.000	56.472.000.000
2.	Bidang Lembaga Penjaminan								
	1. PT. JAMKRIDA BANTEN	1	S	21.088.697.302	19.314.508.212	1.774.189.089	3.563.409.284		5.337.598.374
3.	Bidang Pertanian dan Pangan								
	1. PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI	1	S	101.716.042.933	129.108.430.150	(27.392.387.217)	1.238.443.267		(26.153.943.950)
4.	Bidang Lainnya (Holding Company)								
	1. PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT	1	S	27.669.772.735	31.697.203.065	(4.027.430.330)	9.420.348.647	4.767.291	5.388.151.027
	Total Seluruh Bidang Industri			435.418.512.970	405.538.141.427	29.880.371.542	14.222.201.198	3.058.767.291	41.043.805.451

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap.Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap.Triwulan; 5) Prognosa; 6) RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

b) S= Sehat; KS=Kurang Sehat; TS= Tidak Sehat

Gubernur Banten

Andra Soni